

D.N. AIDIT

PILIHAN TULISAN

DJILID I



Pustaka

Dimpos Manalu

dimposmanalu@yahoo.com

08126431319 ; 081933400001



Jajasan „Pembaruan”

Djakarta 1959

Katapengantar

Pilihan Tulisan D.N. Aidit ini disusun oleh Komisi *Pilihan Tulisan D.N. Aidit* dari CC PKI dan diterbitkan untuk menjambut Kongres Nasional ke-VI PKI pada pertengahan tahun 1959. Buku ini meliputi dua djilid dan artikel²nja disertai katapengantar pendek. Pada tiap djilid terdapat daftar keterangan serta daftar penggolongan artikel.

Isi seluruh *Pilihan Tulisan D.N. Aidit* diatur menurut urutan waktu dan meliputi masa sedjak tahun 1951 sampai dengan tahun 1958. Djilid pertama memuat tulisan² sedjak masa tradisi baru 1951 sampai dengan Kongres Nasional ke-V Partai tahun 1954 serta terlaksanaja Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia tahun 1955 untuk DPR dan Konstituante. Djilid kedua meliputi masa sedjak tahun 1956, terutama sesudah Sidang Pleno ke-IV CC PKI sampai masa mendjelang Kongres Nasional ke-VI Partai.

Perlu ditjatat bahwa *Pilihan Tulisan D.N. Aidit* tidak memuat semua tulisan jang penting dan berharga, bahkan atas permintaan penulis sendiri bagian² tulisan jang sudah kurang mempunjai arti praktis dihilangkan. Komisi berusaha untuk memuat tulisan² jang terpenting dalam penerbitan ini dan dengan persetudjuan penulis telah mengadakan perubahan² disana-sini mengenai susunan tata-bahasa dan istilah², disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Dalam memilih tulisan² Komisi telah menetapkan penggolongan berikut, jaitu *Soal² Pokok Revolusi, Pembangunan Partai, Front Persatuan Nasional, Gerakan Massa, Prinsip² Internasionalisme Proletar* serta *Ilmu dan Kebudayaan*. Guna perbaikan penerbitan² jang akan datang, Komisi senantiasa mengharapakan pendapat² dan saran² dari para pembatja.

Penerbitan *Pilihan Tulisan D.N. Aidit* dalam rangka menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai erat berhubungan dengan pelaksanaan dua tugas pokok dari Partai kita, jaitu *pertama* menggalang

front persatuan nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal, dan kedua meneruskan pembangunan Partai yang tersebar diseluruh negeri dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Pilihan Tulisan D.N. Aidit menundjukkan bahwa dalam melaksanakan dua tugas besar itu PKI telah mendapat kemajuan² yang pesat sesudah berhasil mengachiri masa gelap sebelum tahun 1951, masa yang penuh dengan pengalaman yang salah dan menjedihkan, dan setelah berhasil meletakkan dasar² baru dalam pekerjaan front persatuan nasional dan pembangunan Partai.

Dengan didjwai semangat tulisan kawan D.N. Aidit *Menempuh Djalan Rakjat* PKI berhasil setjara ber-angsur² melepaskan diri dari penjakit sektarisme dan lambatlaun mendapat kemajuan dalam penggalangan front persatuan nasional dan dalam meluaskan organisasi Partai. Kongres Nasional ke-V PKI tahun 1954 yang berhasil menjelesaikan soal² pokok dan penting dari Revolusi Indonesia telah mempunyai peranan yang bersedjarah dalam memperkuat Partai dan dalam menundjukkan garis umum untuk melaksanakan dua tugas yang besar itu. Sidang² Pleno sesudah Kongres Nasional ke-V, terutama Sidang Pleno ke-IV CC PKI pada pertengahan tahun 1956, tidak hanya telah mengkongkritkan tugas² Partai dalam menjelesaikan soal² pokok dan penting dari Revolusi Indonesia, dengan mengajukan sembojan² strategi dan taktik yang populer, seperti *Menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja* dan *Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%*, tetapi djuga telah memakukan tradisi tjarakerdja dengan plan djangka pandjang dan djangka pendek dilapangan organisasi dan pendidikan. Keputusan² ini telah lebih landjut memperkuat Partai dalam melaksanakan dua tugas pokok dan besar tersebut. Dalam menghadapi Kongres Nasional ke-VI PKI sekarang tugas front persatuan nasional telah mengalami kemajuan² yang penting, kemandjuan² dalam hal mengubah imbalanced kekuatan, jaitu dalam mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu. Pelaksanaan tugas pembangunan Partai telah dapat mentjiptakan Partai yang dalam tahun 1950-an beranggota kurang dari 10.000, sekarang mendjadi suatu

Partai besar yang beranggota 1,5 djuta, meliputi seluruh negeri dan semua sukubangsa.

Untuk lebih mensukseskan penggalangan front persatuan nasional dan pekerjaan pembangunan Partai dalam menjambut gelombang pasang Revolusi Indonesia dan memenangkan Revolusi Indonesia, maka mendjadi tugas setiap anggota PKI untuk terus mempeladjar prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme dan mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh.

Mempeladjar *Pilihan Tulisan D.N. Aidit* ini sangat membantu kaum progresif untuk melakukan tugas² revolusionernja yang berat tetapi mulia. Tugas² ini tentu dapat dilaksanakan apabila kita madju terus dengan sembojan² „*Likwidasi Masa Sebelum Tahun 1951 Dalam Ideologi, Politik Dan Organisasi !*” dan „*Kembangkan Masa Sedjak Tahun 1951 !*”.

*Komisi Pilihan Tulisan D.N. Aidit
dari CC PKI*

Djakarta, Mei 1959

Artikel ini ditulis pada waktu reaksi sedang mengamuk dalam Razzia Agustus tahun 1951 untuk menghantjurkan Partai kita sebagai persiapan melumpuhkan seluruh gerakan Rakjat. Pemerintah Sukiman yang reaksioner, arsitek Razzia Agustus, tidak terang2an melarang PKI, tetapi kenjataanja dalam beberapa hari sadja telah menjebloskan tidak kurang dari 2000 anggota Partai dan orang2 demokratis lainja kedalam pendjara.

Sewaktu menghadapi serangan reaksi tampak beberapa kelemahan yang menonjol didalam Partai. Dalam artikel ini kawan D.N. Aidit membahas kelemahan2 itu, menundjukkan sumbernja dan tjara2 untuk mengatasinja. Tulisan ini disambut oleh setiap anggota Partai sebagai pegangan dalam melawan Razzia Sukiman. Ia mempersendjatai anggota Partai untuk melawan oportunisme kanan dan „kiri”, menguatkan pimpinan kolektif, memperbanjak inisiatif serta meningkatkan kewaspadaan dan keberanian. Berkat desakan Rakjat dan perdjjuangan Partai yang gigih semua tahanan Razzia Agustus terpaksa dikeluarkan tanpa seorompokpun yang dapat diadjudkan kemuka pengadilan. Sedangkan Partai muntjul dari masa reaksi dengan lebih terkonsolidasi dan lebih bersatu.

MENGATASI KELEMAHAN KITA

Kewaspadaan Politik

Razzia Agustus memberi banjak peladjaran pada PKI. Dengan adanya razzia itu Partai mesti menentukan sikapnya yang tepat, Partai mesti menentukan tjara² untuk mengatasinya dan mesti memeriksa kembali seluruh barisannya. Ada perbedaan keadaan yang penting ketika terdjadi Razzia Agustus dengan ketika terdjadi peristiwa² penting lainnya seperti tangkapan² tahun 1926/1927, tangkapan² tahun 1936 dan Provokasi Madiun (1). Razzia Agustus terdjadi ketika tingkat kesedaran dan kewaspadaan anggota² Partai sudah lebih tinggi, anggota² sudah mulai berteori dan persatuan didalam Partai sudah mulai teguh. Ini tidak berarti bahwa kekurangan² dan kelemahan² sudah lenjap samasekali. Kekurangan² dan kelemahan² masih banjak, tentang ini kita bitjarakan belakangan.

Razzia Agustus menundjukkan, bahwa *bahaya fasisme* setjara kongkrit mengantjam Partai kita dan mengantjam seluruh kehidupan demokrasi daripada Rakjat. Diskusi yang agak ramai dikalangan anggota Partai telah timbul disekitar: apakah Partai tjukup waspada terhadap bahaya fasisme ini? Apakah Partai sudah mempunyai persiapan² dilapangan politik dan organisasi dalam menghadapi bahaya ini? Adanya diskusi² ini sangat penting artinya, menandakan anggota² Partai sudah mulai kritis. Dan hanya dengan mendjawab pertanyaan² ini setjara tepat, persatuan didalam Partai bisa dipelihara dan kepertjajaan anggota akan lebih besar kepada kekuatan sendiri, kepada pimpinan dan kepada Partai.

Pekerdjaan mengkonsolidasi ideologi dan organisasi Partai kedalam, pekerdjaan meninggikan kesedaran politik Rakjat, pekerdjaan menelاندjangi politik bangkrut pemerintah yang membela kepentingan² imperialis Belanda, Amerika dan Inggeris, pekerdjaan

membuka kedok politik perang imperialis Amerika, Inggeris dan Belanda, semuanya baru dapat dilakukan dengan tepat, teratur dan lantjar, mulai sedjak bulan Djanuari 1951, jaitu sesudah diadakan kritik dan selfkritik yang tadjam didalam Central Komite, yang berachir dengan kekalahan aliran² oportunis dan dengan dibentuknja Politbiro baru. Politbiro baru ditugaskan untuk memelihara kemurnian dan mewujudkan dalam praktek koreksi Kawan Musso „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia” (2). Sebelum itu perdjuaan lebih banjak bersifat kedalam, jaitu melawan elemen² oportunis kanan dan „kiri” yang masih mempertahankan diri dan mau bertjokol terus didalam Partai, yang mau mengembalikan kedudukan Partai sebagai sebelum ada „Djalan Baru”. Tetapi ini tidak berarti bahwa perdjuaan didalam Partai, terutama perdjuaan melawan oportunis kanan dan „kiri”, sudah selesai samasekali. Dalam berbagai bentuk restan² dari oportunisme masih terdapat dikalangan sebagian anggota² Partai.

Aktivitet politik Partai yang terpenting antara lain ialah: menghidupkan tradisi demokrasi dalam kehidupan politik Rakjat Indonesia dengan mengadakan Rakjat membela hak² demokrasi yang sudah ditjapai dalam Revolusi Agustus 1945 dan menuntut hak² demokrasi yang lebih luas. Partai menjelaskan kepada Rakjat tindakan² pemerintah yang anti-demokrasi, yang bersifat fasis, dan menundjukkan hubungan tindakan² pemerintah ini dengan per-setudjuan KMB yang anti-nasional dan dengan politik perang Amerika. Tentang ini djelas dikemukakan didalam pernyataan² (statement²) Partai dan didalam tulisan² madjalah resmi Partai „Bintang Merah”. Dibawah ini dimuatkan beberapa bagian dari tulisan² yang menundjukkan kewaspadaan politik daripada Partai dalam menghadapi fasisme:

Berhubung dengan dikeluarkannya *Peraturan Larangan Mogok* dalam bulan Februari 1951 oleh pemerintah Natsir (3), dengan kontan Partai mengeluarkan sebuah pernyataan pada tanggal 15 Februari 1951. Dalam pernyataan ini dijelaskan maksud yang djahat dari *Peraturan Larangan Mogok* pemerintah Natsir, dijelaskan bagaimana hubungan Peraturan Larangan Mogok ini dengan perlindungan pemerintah terhadap madjikan dan sebaliknya tekanan pemerintah pada kaum buruh, bagaimana hubung-

annja dengan pertahanan-gabungan (combined defence) di Pasifik sebagai persiapan perang dunia ketiga oleh imperialis Amerika. Peraturan Larangan Mogok adalah pelanggaran terang²an terhadap hak² demokrasi. Dalam pernyataan itu Partai mengajak seluruh Rakjat untuk memprotes pemerintah atas perkosaannja terhadap hak² demokrasi. Adjakan Partai ini disambut dengan hangat oleh seluruh golongan demokrasi dan progresif. Di-mana² hudjan protes, tidak hanja dari organisasi² Rakjat jang sudah terkenal progresif, tetapi djuga dari tjabang² dan ranting² partai kaum Nasionalis dan kaum Agama, atau dari organisasi² jang dibawah pengaruhnja.

Dalam tulisan *Kewadjaban Kita* (4) antara lain diterangkan bagaimana kaum tani di Djuwiring (Klaten, Surakarta) telah memakai hak demokrasinja dengan berdemonstrasi menuntut supaya pemimpin² Barisan Tani Indonesia (BTI) jang ditangkap oleh pemerintah dibebaskan kembali. Tuntutan jang sangat adil dari kaum tani ini didjawab oleh pemerintah Natsir-Sjafrudin dengan berondongan peluru. 8 orang tani mendjadi korban, 23 luka² berat, sedangkan lainnja luka² ringan. Atas tindakan alat pemerintah jang tidak kenal perikemanusiaan ini PKI mengajak Rakjat untuk „dengan segala kekuatan mempertahankan hak² demokrasi jang ada, menentang tiap² pertjobaan jang akan menguranginja, dan merebut serta memperdjuangkan hak² demokrasi jang lebih banjak dan lebih luas”

Dalam tulisan *Membolsjewikkan PKI* (5) antara lain diterangkan sbb.:

„Sekarang kita menghadapi provokasi² jang lebih besar, jaitu provokasi² jang sekali lagi disiapkan oleh agen² imperialis di Indonesia atas perintah intelligence service imperialis Amerika, Inggeris dan Belanda. Mereka berusaha memasukkan ideologi imperialis kedalam Partai kita, berusaha memetjahbelah persatuan Rakjat, dengan memakai kaum Trotskis, kaum sosial-demokrat dan lain² elemen pengatjau. Perbuatan djahat daripada imperialis ini adalah sesuatu jang sudah sewadjarnja daripada situasi internasional jang sangat dibikin ruwet oleh imperialis, dimana imperialis Amerika dan Inggeris dari hasutan dan persiapan² untuk agres, sudah terang²an mengadakan serangan, seperti di Korea, dan mengada-

kan militerisasi daripada seluruh kehidupan negeri² kapitalis. Oleh karena itu kewaspadaan revolusioner kita sedikitpun tidak boleh kendor.”

Dari sini mendjadi lebih djelas, mengapa ada Razzia Agustus dan siapa jang bermain dibelakang Razzia Agustus. Sudah sewadjarnja bahwa tuan Campbell dari FBI (Federal Bureau of Investigation, jaitu kenpeitai Amerika) memainkan rol jang sangat penting dibelakang Razzia Agustus. Berdasarkan pengalaman² FBI di Amerika dan Eropa, sudah sewadjarnja pula tuan Campbell menasehatkan supaya usaha menghantjurkan kaum Komunis dan menghantjurkan gerakan Rakjat, hendaklah didasarkan pada persatuan antara golongan agama jang sudah mendjual diri dengan kaum trotskis jang sudah lihay dalam membikin provokasi². Pengalaman FBI di Amerika dan Eropa dalam usahanja untuk menghantjurkan kaum Komunis, menunjukkan bahwa jang terpenting ialah membikin komplotan antara kaum katolik jang sudah mendjual diri dengan kaum trotskis. Dalam kenjataannja resep FBI ini didjalankan. Sebagaimana djuga dalam Provokasi Madiun, Masjumi memegang rol jang terpenting dalam menelorkan Razzia Agustus, dan orang² jang positif trotskis tidak ada jang ikut ditangkap, walaupun mereka suka ngomong „keras”. Ja, kaum trotskis sekarang sudah tidak mudah lagi menjembunikan diri dibelakang suara² jang „galak²” dan dalam soal² prinsipil, terutama dalam usaha² menghantjurkan Partai Komunis, mereka terang²an bersatu dengan pemerintah. Didaerah Tjirebon, misalnja, nampak dengan djelas usaha kaum trotskis untuk mentjemarkan namabaik PKI dan untuk menimbulkan provokasi² baru. Dengan tidak tahu malu mereka mengaku, bahwa merekalah „komunis sedjati” dan dengan memakai tjap „komunis” mereka memeras Rakjat. Tetapi untunglah, Rakjat jang mereka peras sudah tjukup sadar dan mengerti, bahwa kaum Komunis sedjati, anggota² PKI, tidak mungkin memeras Rakjat. Lambat-laun tampang mereka jang sesungguhnya, tampang agen² provokator, tidak bisa mereka sembunikan lagi pada Rakjat. Kaum trotskis djuga berusaha untuk mengendalikan aparat² pemerintah guna ditudjukan kepada kaum Komunis. Dimana reaksi sedang mengamuk, mereka muntjul dengan sifatnja jang sebenarnja dan sekali lagi mereka mendjalankan

bl seperti ketika terdjadi provokasi Madiun, rol sebagai „tukang undjuk” dan rol pemetjahbelah persatuan Rakjat dengan menggunakan kesempatan dimana orang² Komunis sedang di-kedjar². Ini bukan rahasia bagi orang jang sedikit awas, dan Rakjatpun, berdasarkan pengalamannja sendiri, makin lama makin mengerti. Demikian djuga rol kaum sosialis kanan, tidak kurang djahatnja dalam memetjahbelah persatuan Rakjat, terutama dalam memetjahbelah serikatburuh dan dalam mendirikan serikatburuh² kuning (kakitangan imperialis). Ini dibuktikan oleh surat Koordinator Buruh Djawa Timur dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) jang pernah diumumkan dalam salahsatu surat kabar. Surat ini ditulis pada awal Agustus 1951, ditudjukan pada Dewan² Tjabang PSI di Lumadjang, Probolinggo, Pasuruan, Malang Selatan dan Banjuwangi, jang maksudnja supaja „*meluaskan perpetjahan Sarbupri Djember*” sebagai diperintahkan oleh „surat dari Dewan Partai”. Bukankah tidak ada perbuatan jang lebih djahat terhadap kaum buruh daripada perbuatan badut² jang mengaku pemimpin buruh, tetapi jang dalam prakteknja sengadja memetjahbelah persatuan kaum buruh? Setjara pengetjut dan tidak tahu malu kaum trotskiskis dan kaum sosialis kanan ikut² seperti „djagoan” imperialis memfitnah kaum Komunis, dan setjara bodoh mereka berusaha merebut pimpinan serikatburuh dari tangan kaum Komunis jang kebanyakan sedang meringkuk dalam pendjara atau sedang ditjari² untuk ditangkap. Inilah „moral” dan „heroisme” mereka.

Dalam *Program PKI Untuk Pemerintah Nasional K koalisi* (6) jang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1951, maupun dalam *Program Bersama BPP* (7) djelas sekali ditjantumkan usaha² untuk menghidupkan tradisi demokrasi dan usaha² untuk mentjegah bahaja fasisme. Antara lain ada tuntutan pembebasan semua tahanan politik, pentjabutan SOB dan penghapusan semua Undang² jang anti-Rakjat serta tuntutan djaminan hak mogok.

Pada tanggal 26 Mei 1951, berhubungan dengan makin banjakknja provokasi² terhadap PKI, Politbiro mengeluarkan sebuah statement. Statement ini membukakan kedok imperialis Amerika dengan kakitangannja jang berusaha mengadakan provokasi², teror², dan tindakan² fasis lainnja. Dalam statement itu diterangkan dengan djelas, bahwa kekatjauan² jang dituduhkan kepada PKI itu, tidak lain

daripada aktivitet gangster² Amerika, aktivitet orang² Kuo Min Tang dan orang² van der Plas (8). Perbuatan² orang² van der Plas di Djawa Timur itu achirnja tidak bisa disembunjikan lagi. Pemerintah terpaksa mengakui dalam djawabannja kepada anggota Parlemen, bahwa kekatjauan-kekatjauan di Djawa Timur memang karena perbuatan kijai² kakitangan van der Plas. Sedikitpun tidak di-singgung² oleh pemerintah, bahwa ada orang² pemerintah jang sudah berbuat gegabah melemparkan tuduhan, bahwa jang membikin kekatjauan di Djawa Timur itu adalah kaum Komunis. Ja, tuan Hatta sendiri dalam rapat umum di Medan menjindir seolah² kaum kirilah jang membakar gudang tembakau di Besuki (9).

Kenjataan² diatas perlu dikemukakan, agar ada kesatuan pendapat dikalangan anggota dan tjalonanggota Partai, bahwa pimpinan Partai, terutama Politbiro sudah sedjak semula dan terus-menerus berusaha menggembleng Partai dan menggembleng Rakjat agar senantiasa siap untuk mentjegah dan melawan bahaja fasisme. Dan tidak hanja dilapangan politik dan ideologi, tetapi petundjuk² dilapangan organisasi dan tjara² bekerdja djuga sudah diberikan. Ini penting, karena ini menundjukkan bahwa ada kewaspadaan pada Partai kita. Pengertian tentang ini akan menanamkan kepertjajaan jang lebih besar dari anggota dan dari Rakjat kepada Partai.

Hanja dengan adanja kewaspadaan dilapangan politik, ideologi dan organisasi, kita bisa melawan bahaja fasisme, kita bisa menjelamatkan Partai kita dan seluruh pergerakan Rakjat dari serangan² kapital monopoli jang paling hebat dan paling kurang-adjar kepada massa pekerdja. Dan terbukti, di-daerah² dimana kewaspadaan ini sudah ada, disitu kebuasan tindakan fasis tidak membawa korban jang banjak dan organisasi bisa berdjalan terus, kepertjajaan pada diri sendiri, pada Partai dan kemenangan jang akan datang mendjadi bertambah besar.

Satu Udjian Lagi Bagi Partai Kita

Tanggal 16 Agustus 1951, pagi² buta, mulailah razzia besar²an di Djakarta. Diantara jang ditangkap terdapat anggota² parlemen fraksi Partai dan anggota² Partai jang memimpin organisasi²

buruh. Pada tanggal 16 Agustus itu juga, dengan melalui kawan Sakirman, ketua fraksi Partai diparlemen, Central Comite Partai menjatakan protesnja yang keras terhadap tindakan pemerintah yang se-wenang² itu.

Protes Partai segera diikuti oleh protes² dari organisasi² Rakjat, dari pusat sampai ke-daerah², dari kota² dan dari desa². Semuanya menjalahkan tindakan pemerintah dan menuntut dilepaskan-nja semua tahanan Razzia Agustus. Ini sekali lagi membuktikan benarnya politik Partai dimata Rakjat dan salahnja tindakan pemerintah yang dengan tidak ada alasan menangkapi pemimpin² Rakjat. Djelaslah, bahwa pada hakekatnja bukannya PKI yang memisahkan pemerintah dari Rakjat, tetapi tindakan² pemerintah sendirilah yang mendjauhkan Rakjat daripadanya. Djika disamping makin merosotnja pemerintah dimata Rakjat, PKI makin populer dan makin diikuti oleh Rakjat, adalah karena Rakjat merasakan, dan dibuktikan oleh pengalaman sendiri, bahwa PKI mewakili kepentingan dan tjita² Rakjat-banjak.

Bagaimana pendapat anggota Partai mengenai Razzia Agustus?

Ada anggota Partai yang berpendapat bahwa razzia bersifat insidentil, hanya berhubungan dengan perajaan 17 Agustus sadja, agar pemerintah bisa memonopoli perajaan 17 Agustus. „Sebentar lagi toh kawan² yang ditahan itu akan dilepaskan, oleh karena itu kita tidak usah kuatir”, demikian pendapat sebagian anggota. Pendapat ini bersifat mengetjilkan bahaja fasisme yang sedang mengantjam, memandang enteng sifat² bengis dan kurangadjar daripada fasisme serta terlalu mem-besar²kan kemungkinan demokrasi yang ada. Mereka se-olah² berani, tetapi dengan „keberanian” itu pada hakekatnja mereka menjerah pada musuh. Ini disebabkan karena tidak mempunjai pandangan yang tepat tentang makin tadjamnja perdjjuangan klas diseluruh dunia dan di Indonesia. Pendapat ini tentu keliru dan menundjukkan serta berakibat kurang kewaspadaan. Ini adalah tanda² daripada penjakit oportunisme kanan.

Sebagian lagi diantara anggota Partai ada yang berpendapat, bahwa Razzia Agustus adalah sama sadja dengan Provokasi Madiun yang berdarah itu. Karena itu semua yang ditangkap akan dibawa ketianggantungan dan didrel oleh pemerintah. Oleh

karena itu Partai sudah tidak semestinja lagi menggunakan hak² demokrasi yang ada, karena toh demokrasi yang ada itu palsu semata². Mereka tidak sadar bahwa watak dari tiap² demokrasi parlementer burdjuis adalah palsu. Setjara *sukarela* mereka mau membawa seluruh Partai bekerdja dibawah tanah. Mereka tidak membenarkan adanya wakil² Partai di Dewan² Perwakilan, mereka tidak membenarkan Partai terus membuka kantornja terang²an. Pada hakekatnja kawan² ini sudah putus asa dan hilang akal dalam hal menggunakan kemungkinan² demokrasi yang masih ada, walaupun bagaimana sempit dan palsunja, dan oleh karena itu mau mengillegalkan Partai dengan sukarela. Mereka masih kurang menjedari pentingnja kemerdekaan politik dan perdjjuangan parlementer untuk mendidik dan melatih massa. Padahal sudah sedjak berdirinja, 31 tahun j.l., Partai kita berdjjuang dibarisan paling depan untuk kemerdekaan politik bagi Rakjat Indonesia dan bagi pertumbuhan Partai kita sendiri. Padahal djustru inilah yang di-harap² oleh pemerintah Sukiman-Wibisono⁽¹⁰⁾, jaitu supaya kita mengillegalkan diri dengan sukarela, dan dengan demikian kita terisolasi dari massa dan mereka ada „alasan” untuk menjapu Partai kita serta kemudian seluruh gerakan demokrasi dan perdamaian. Ini adalah tanda² daripada penjakit oportunisme „kiri”.

Dalam Program Umum Partai sudah diterangkan, bahwa „perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan yang sedjati membutuhkan waktu yang pandjang” dan „Perdjjuangan yang memakan waktu pandjang, bisa menimbulkan bahaja, bahwa orang² yang lemah dalam teori dan tidak berkarakter akan mendjalankan politik kapitulasi atau avonturisme”. Tentang perdjjuangan dalam waktu pandjang dan tentang penjakit² yang mungkin timbul, djuga dalam tulisan „Membolsjewikkan PKI”, ketika membitjarakan perdjjuangan untuk dasar² politik dan ideologi bolsjewisme, antara lain dimuat:

„Perdjjuangan yang lama bisa menimbulkan dua matjam penjakit oportunis dalam barisan PKI, jaitu oportunis kanan dan 'kiri', jaitu *menjerahisme* (kapitulasi) dan *avonturisme* (keburu nafsu, mau lekas² menang).”

Dalam Program Umum Partai dinjatakan, bahwa pengalaman

revolusi Indonesia menundukkan penjakit kapitulasi dan avonturisme sebagai musuh² revolusi jang berbahaja.

Djadi, djelaslah betapa pentingnja bagi anggota Partai untuk senantiasa mempunjai pandangan jang tepat tentang makin tadjamnja perdjjuangan klas diseluruh dunia dan di Indonesia. Keadaan sekarang berlainan dengan tahun 1916. Ketika itu imperialisme masih meliputi seluruh dunia, oleh karena itu Lenin menulis bahwa perang antara grup negeri² imperialis jang satu dengan grup negeri² imperialis jang lain adalah satu kemestian. Tapi sekarang sudah berbeda sekali keadaannja. Lebih dari sepertiga penduduk dunia sudah dibebaskan dari imperialisme. Di Uni Sovjet, di Tiongkok Rakjat dan di-negeri² demokrasi Rakjat lainnja, imperialisme sudah dipatahkan untuk se-lama²nja, dan disini sudah tidak ada dan tidak mungkin lagi ada kemauan untuk mendjadjah negeri lain. Sedangkan di-negeri² kapitalis sendiri ada gerakan perdamaian jang makin lama makin hebat. Disemua front negeri² imperialis terus-menerus terdesak oleh kekuatan kemerdekaan, kekuatan demokrasi dan perdamaian. Dalam keadaan demikian ini, negeri² imperialis jang dipelopori oleh Amerika terus-menerus membikin ruwet situasi, dari hasutan² dan persiapan² perang mereka mengadakan serangan² seperti di Korea, mengadakan militerisasi daripada seluruh kehidupan negeri² kapitalis. Di-daerah² jang dikuasainja, termasuk djuga Indonesia, mereka berbuat bengis dan kurangadjar. Makin dekat mereka kepada liangkuburnja, makin bengis dan makin kurangadjar tindakan²nja. Hal ini sekedjappun tidak boleh kita lupakan. Melupakan hal ini bisa menjejabkan kita salah hitung, memandang enteng sifat² fasis mereka dan membikin kita tidak waspada.

Adalah keliru sekali djika kita tidak melihat perbedaan besar antara ketika terdjadi Provokasi Madiun (1948) dan ketika terdjadi Razzia Agustus (1951). Tidak melihat perbedaan besar antara kedua kedjadian ini berarti kita tidak menghargai pengalaman Rakjat dan pengalaman Partai kita selama Provokasi Madiun, bahwa pengalaman² itu mengadjar kepada Partai dan kepada Rakjat untuk lebih waspada terhadap provokasi² jang dibikin oleh reaksi. Berbeda dengan tahun 1948, sekarang Partai kita sudah membolsjewikkan diri diberbagai lapangan, dilapangan

politik, ideologi, organisasi dan moral. Kebenaran politik Partai (pembatalan KMB, Front Persatuan Nasional, perdamaian dunia) jang sudah diikuti oleh sebagian besar dari Rakjat Indonesia adalah satu halangan bagi pemerintah reaksioner untuk dengan begitu sadja dan terang²an membasmi PKI. Bertambah teguhnja ideologi Partai, bertambah tepatnja politik dan organisasi Partai, adalah satu djaminan bagi Partai untuk tidak mudah diprovokasi oleh imperialis dan oleh kakitangannja. Mulai sempurnanja organisasi dan tingginja moral anggota² Partai adalah djaminan penting untuk mengatasi tiap² kesulitan jang dihadapi oleh Partai. Hal² ini dilupakan oleh sebagian kawan² kita, dan mereka kurang menjedari perkembangan Partai selama tahun 1951.

Kedua pendapat jang keliru diatas, jaitu tanda² daripada adanja penjakit oportunisme kanan dan „kiri”, mempunjai sumber jang sama, jaitu fikiran individualis dan egois burdjuis ketjil jang sengadja atau tidak sengadja dalam banjak hal mengambil dasar kepentingan diri sendiri. Ini menundjukkan, tidak tahu atau tidak mau tahu tentang pendapat² massa, bahwa massa bukan pengetjut dan tidak bodoh sebagaimana jang mereka gambarkan. Mereka tidak memandang gedjala² jang mereka hadapi sebagaimana adanja. Mereka terlalu membawa keinginannja sendiri jang subjektif, tidak memandang apa jang mereka hadapi setjara objektif. Mereka mengidealisasi keadaan kongkrit jang mereka hadapi. Pendapat mereka terlalu dipengaruhi oleh sifat perseorangan mereka jang lemah, kurang tahan udji dan tidak suka memikir setjara dalam.

Apakah tindakan pimpinan menghadapi pendapat² jang berlainan dari anggota? Pada tanggal 24 Agustus Central Komite mengeluarkan sebuah statement, jang isinja sesuai dengan pendapat sebagian besar anggota² Partai. Statement Partai ini mempunjai arti jang sangat penting dalam mempersatukan pendapat anggota² jang ber-matjam². Statement ini membantah bahwa Razzia Agustus bersifat insidentil dan ia djuga membantah Razzia disamakan begitu sadja dengan Provokasi Madiun.

Dengan singkat isi statement adalah sbb.: bahwa Razzia Agustus adalah berhubungan dengan persiapan perang jang sedang giat dilakukan oleh imperialis Amerika. Bahwa persiapan perang

Amerika mendapat tentangan keras dari kekuatan² demokrasi dunia, termasuk kekuatan demokrasi di Indonesia. Ketidakmampuan imperialis Amerika dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi keruwetan ekonomi dan politik di Indonesia, sebagai akibat dari politik KMB yang mereka djalankan sendiri, dengan djalan biasa, dengan djalan demokrasi parlementer telah membikin imperialis Amerika, imperialis Belanda dan pemerintah Indonesia sangat agresif. Sifat agresif ini kelihatan dari provokasi² yang sengadja mereka timbulkan seperti di Besuki, Tandjung Priok, Bogor (11) dsb. serta tindakan se-wenang² seperti larangan mogok, pembubaran serikatburuh², larangan mengadakan rapat² dan demonstrasi². Tetapi provokasi² imperialis tidak bisa menjeret PKI dan organisasi revolusioner lainnja kedalam provokasi Madiun kedua sebagaimana yang mereka ingin²kan. PKI sudah mulai dewasa dan tahu bagaimana menghadapi tindakan² provokatif dari kaum imperialis yang djahat. Pada penutup statement tsb. Partai ber-seru kepada seluruh Rakjat, kepada semua patriot dan kaum demokrat untuk membentuk front nasional anti-fasis yang luas. Partai mengingatkan bahwa dalam perang dunia yang lalu kita bisa mengalahkan fasisme. Sekarangpun kita bisa mengalahkan, asal seluruh tenaga demokrasi bersatu dan melawan bahaya fasis dengan aktif.

Dari statement Partai ini djelas sekali bahwa tindakan² fasis dari golongan reaksi samasekali tidak menundjukkan bahwa mereka dalam kedudukan yang kuat, malahan sebaliknya, semakin memuntjaknja provokasi², kese-wenang²an dan tindakan² fasis lainnja, adalah tanda yang se-njata²nja betapa semakin lemahnja golongan reaksi, betapa mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi pergerakan Rakjat dengan tjara biasa, tjara demokrasi parlementer, jaitu sistim politik tjiptaan mereka sendiri. *Pukulan terhadap PKI adalah persiapan dan permulaan untuk memukul seluruh pergerakan Rakjat.*

Sedjarah telah membuktikan, bahwa saat keruntuhan imperialis Djerman dan Djepang makin bertambah dekat setelah di-negeri² itu didjalkan sistim fasis. Fasisme adalah muka setan yang menutupi kebobrokan didalam tubuh imperialisme sendiri.

Seruan Partai untuk melawan bahaya fasisme mendapat sam-

butan hangat. Ini dibuktikan oleh suara² yang datang dari organisasi² Rakjat, oleh suara² pers dan oleh pidato² anggota parlemen.

Disamping statement 24 Agustus, Central Comite Partai menjampaikan pendjelasan² dan petundjuk² yang kongkrit tentang hakekat daripada fasisme. Bahwa fasisme adalah serangan yang paling hebat dan paling kurangadjar dari kapital terhadap massa pekerdja, bahwa fasisme adalah sovinsisme (tjinta tanahair yang sempit dan keliru) dan perampokan imperialis yang sudah tidak kena dikendalikan lagi. Bahwa fasisme adalah diktatur teror yang terang²an daripada anasir kapital-finans. Selandjutnja dikemukakan 4 sjarat dari Dimitrov untuk melawan fasisme, jaitu: *perlunja ada kegiatan berdjuang dari klas buruh sendiri, perlunja ada Partai Komunis, perlunja ada politik front persatuan yang luas antara klas buruh dan massa Rakjat lainnja yang ada dikota dan didesa, dan yang terakhir perlunja ada kewaspadaan daripada proletariat.* Empat sjarat ini sudah ada pada klas buruh dan pada Rakjat Indonesia. Dengan terus menjempurnakan 4 sjarat ini, PKI mengadjak seluruh massa pekerdja untuk tetap setia pada organisasi, untuk dengan keberanian, keuletan, kewaspadaan dan militansi membela organisasi dan terus mendjadi propagandis yang aktif dari kebenaran dan keadilan perdjuaan klas buruh, perdjuaan seluruh massa pekerdja, perdjuaan kaum patriot dan demokrat. Dalam petundjuknja ini, Partai menjatakan tjelaannja pada sifat² menjerah atau kapitulasi dan sifat „berani” tanpa perhitungan, karena kedua fihak ini sama² membikin lumpuh organisasi Rakjat, membikin lumpuh perdjuaan Rakjat. Kedua sifat ini adalah makanan yang empuk bagi fasisme.

Kelemahan² yang Mesti Diatasi

Sebagaimana sudah disebutkan pada permulaan tulisan ini, masih banjaklah kelemahan² atau kekurangan² yang mesti kita atasi. Tiap² kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam Partai kita, tidak boleh kita simpan atau kita sembunjikan, tetapi mesti kita buka supaya kelihatan borok²nja agar kita mengetahui dengan pasti apa penjakitnja. Hanya kalau kita mengetahui apa penjakit yang ada didalam Partai kita, barulah kita bisa men-

tjarikan obatnja. Sebagai Partai proletar kita mesti senantiasa bersedia untuk mengadakan selfkritik, jaitu kritik pada diri sendiri. Inilah perbedaan yang besar antara Partai kita dengan partai burdjuis yang takut kalau² kesalahannya diketahui oleh Rakjat. Dalam brosjurnja *Komunisme „Sajap Kiri” Suatu Penyakit Kanak*² Lenin menulis tentang selfkritik dalam Partai proletar sbb.:

„Sikap suatu partai politik terhadap kesalahannya sendiri adalah salahsatu tjara yang paling penting dan terpenting untuk mengukur kesungguhan partai itu dan bagaimana ia dalam praktek menunaikan kewadjaban²nja terhadap k l a s - n j a dan m a s s a pekerdja. Terus terang mengakui suatu kesalahan, menjelidiki sebab²nja, menganalisa keadaan² yang telah menimbulkannya, dan mendiskusikan dalam² tjara² untuk memperbaikinja — itulah tandanya partai yang sungguh²; itulah tjaranya ia harus menunaikan kewadjaban²nja; itulah tjaranya ia harus mendidik dan melatih k l a s, dan kemudian m a s s a” (12).

Diantara kawan² kita masih ada yang berfikiran, bahwa membeberkan kesalahan², kekurangan atau kelemahan sendiri, dan mengadakan selfkritik adalah berbahaya, karena musuh bisa menggunakan ini untuk melawan Partai kita. Ini dibantah oleh Lenin dan murid² Lenin seperti Stalin, Mau Tje-tung, Musso, dll. Ini dibantah oleh pengalaman kita sendiri dengan koreksi „Djalan Baru”. Tadinja ada diantara kawan² kita sendiri yang berpendapat, bahwa dengan koreksi Musso yang tajam dan terusterang itu musuh² Partai, terutama kaum trotskis dan lain² agen provokator akan mendapat sendjata untuk memukul kita dan kita akan menjadi lemah karenanya. Tetapi buktinja djustru kebalikannya. Sendjata yang mungkin didapat oleh musuh² Partai untuk memukul kita adalah sangat sedikit dan tidak berarti djika dibanding dengan sendjata dan kepandaian yang kita dapat untuk menghantjurkan musuh dari koreksi yang tajam dan terusterang itu. Belum pernah Partai kita begitu terkonsolidasi dilapangan politik, ideologi dan organisasi daripada sesudah ada koreksi „Djalan Baru”. Belum pernah persatuan dalam Partai kita begitu teguh daripada sesudah kita berdjuaug untuk memelihara kemurnian dan melaksanakan isi koreksi besar „Djalan Baru”. Makin banjak brosur „Djalan Baru” tersiar, makin difahamkan isinja oleh anggota²

Partai, makin madjulah Partai kita. Makin lama makin terbuka mata Rakjat, bahwa Partai kita adalah Partai yang sungguh², karena kita senantiasa sedia untuk mendapat kritik dari Rakjat, untuk mengemukakan setjara terusterang kesalahan² dan kelemahan² Partai, yang sama artinja senantiasa sedia memberikan pertanggungjawaban pada Rakjat terhadap semua perbuatan kita. Hanya dengan demikian ini Partai kita membuktikan dalam praktek bahwa ia adalah *sendjata atau alat* daripada massa, dan dengan demikian ia mendapat kepertjajaan penuh dari massa.

Inilah keistimewaan Partai kita sebagai partai proletar, dan keistimewaan ini mesti kita pertahankan terus. Oleh karena itu, semestinja Partai tidak boleh segan² untuk mengadakan kritik dan selfkritik, tidak hanya terhadap kesalahan² dan kekurangan² organisasi Partai kita dari pusat sampai ke-daerah², tetapi djuga terhadap anggota² Partai satu per satu. Ini sangat penting, karena inilah sjarat untuk menimbulkan kesatuan kemauan dan kesatuan tindakan didalam Partai. Kritik dan selfkritik adalah sumber yang senantiasa segar dan tidak kering²nja bagi kehidupan Partai kita.

Apakah kelemahan² Partai sekarang? Setelah Partai menghadapi bahaya fasisme setjara kongkrit seperti sekarang ini, dimana perdjuaugan klas makin bertambah tajam, dimana reaksi dengan bernafsu mau menghantjurkan Partai, kelihatan dengan menondjol tanda² yang menunjukkan kelemahan² Partai. Ada lima matjam kelemahan yang sekarang ini menondjol yang nampak dengan djelas pada sebagian anggota Partai satu per satu maupun yang nampak pada beberapa organisasi Partai sebagai badan kolektif:

1. *Sebagian kader² Partai masih kurang tangkas dalam menangkis serangan² reaksi. Mereka bekerdja kurang gairah, tidak dengan menumpahkan sepenuh djiwanja, sepenuh hati dan enersi pada pekerdjaannya. Terhadap pekerdjaan mereka bersikap sering atjuh tak atjuh dan nampak sebagai otomat, yang hanya bergerak kalau ada yang menggerakkan. Selama belum ada yang menggerakkan atau yang mendorong, mereka berdiam diri tidak mempu-
njai inisiatif, mereka seperti massa biasa yang masih pasif, walaupun hanya fasis terus-menerus mengedjar untuk membinasakan Partai, untuk mengobrak-abrik organisasi Rakjat, untuk memendjarakan mereka sendiri. Djika ada rapat² atau diskusi² mereka*

sering datang terlambat atau tidak datang samasekali, dengan tidak memberi tahu lebih dulu atau tidak ada alasan kuat apa sebabnya mereka datang terlambat atau tidak datang samasekali. Mereka kurang sungguh² menjalankan putusan². Kegembiraan bekerdja sangat kurang.

Sifat pasif atau sifat „nerimo” adalah didikan jang dengan sengadja ditanamkan oleh kekuasaan kolonial dan jang hingga sekarang belum dibasmi samasekali. Ini sedikit banjaknja masih melekat pada sebagian anggota Partai.

Selain daripada itu, ini adalah djuga restan² dari masasilam Partai kita sendiri, zaman dimana elemen² anarkis sedikit-banjak masih berkuasa didalam Partai kita. Kira² tahun 1947 ada anggota Central Komite Partai jang „berteori” bahwa kaum Komunis tidak mengenal apa jang dinamakan „djiwa”. Demikian djuga „moral” dan „heroisme” samasekali tidak ada, demikian menurut anggota Central Komite itu. Djiwa, moral dan heroisme adalah „burgerlijk” ! Ja, ada anggota Politbiro jang mengatakan, bahwa „membikin sadjak-sadjak adalah pekerdjaan pengelamun burdjuis”. Bagaimana akan mungkin bekerdja dengan sepenuh djiwa djika adanja djiwa sadja sudah diungkiri !

Tetapi sekarang Partai kita sudah lain. PKI kita sekarang bukan lagi PKI tahun 1947 atau sebelumnja, tetapi sudah mendjadi PKI „*Djalan Baru*”. Ber-angsur² Partai kita sudah membolsjewikkan diri, tidak hanya dilapangan politik, ideologi dan organisasi, tetapi djuga dilapangan moral.

Tanpa djiwa jang murni, jang sepeñuhnja ditumpahkan untuk pekerdjaan Partai, untuk proletariat dan untuk Rakjat banjak, kita tidak mungkin mendjadi Komunis jang baik. Untuk mendjadi seorang Marxis kita harus menghidupkan teori² jang kita peladjadi, menghubungkan teori² ini dengan nasib dan perdjuaan Rakjat se-hari². Dengan demikian kita bisa mentjiptakan dan memimpin aksi² untuk memperbaiki nasib Rakjat. Djadi, seorang Marxis mesti mentjipta, dan memang *tiap² Marxis adalah pentjipta*, sebagaimana Rakjat banjak adalah djuga pentjipta. Bagaimanakah seseorang bisa mentjipta djika djiwanja, hatinja dan enersinja tidak ditumpahkan pada pekerdjaannja ?

Seorang Marxis bukan orang jang bekerdja tanpa tjurahan

djiwa, tetapi ia adalah pentjipta, seorang jang meletakkan seluruh djiwanja dalam tiap² pekerdjaannja, walaupun pekerdjaan jang se-ketjil²nja. Tidak perduli dilapangan apa ia bekerdja, bekerdja untuk menguasai teori² revolusioner atau untuk mempraktekkan teori² itu, bekerdja dalam gerakan tani atau gerakan buruh, dalam gerakan pemuda atau gerakan wanita, dalam gerakan perdamaian atau gerakan kebudayaan, bekerdja sebagai penulis atau sebagai pendjual buku² penerbitan Partai, bekerdja sebagai korektor madjalah Partai atau sebagai pengantar surat, seorang Marxis harus bekerdja dengan sungguh², dengan sepenuh djiwa, sepenuh hati dan enersi, dengan bersemangat. Hanya dengan begini bisa timbul kegembiraan dalam bekerdja. *Dan hanya dengan bekerdja sepenuh djiwa, hanya dengan bekerdja bersemangat dan gembira, kita bisa menarik massa untuk ikut kita. Massa tidak suka kepada orang jang tidak berdjiwa, jang tidak bersemangat dan tidak gembira.*

Betapa banjak sekarang orang berbitjara keras² dan pandjang² ber-tele², tetapi Rakjat tetap biasa, Rakjat tetap mentjemoohkan mereka, Rakjat tidak bisa mereka pukau dengan kata² demagogi. Ini jalah karena mereka tidak bitjara dengan sepenuh djiwanja, dan hati ketjil mereka sendiri sebenarnja membantah semua jang mereka omongkan. Mereka tidak lebih daripada tukang djual obat palsu.

Dengan djiwa mentjiptanja seorang Marxis harus bisa mengikuti keadaan jang terus-menerus berubah. Sedjarah terus madju, demikian djuga seorang Marxis harus terus madju. Karena kurang mempunjai semangat mentjipta, dan mereka itu tidak mengikuti kemadjuan² sedjarah setjara baik, sering kita lihat ada kehendak dari sebagian kader² Partai untuk memberi djawaban jang sama, jang itu² djuga pada masalah jang dihadapinja walaupun soalnya, keadaannya dan waktunja sudah berlainan atau sedikit berlainan. Ini sungguh mendjemukan, dan menandakan tidak ada kemadjuan dan tidak ada pembaruan jang timbul dari sumber jang segar.

2. *Kira² tahun 1947 sudah djadi pembitjaraan sambil lalu, bahwa didalam Partai maupun digerakan massa jang dipimpin oleh anggota² Partai, terutama didalam Pesindo ketika itu, terdapat penjakit jang dinamakan penjakit „garis besar”. Ketika itu, hampir semua kader „bisa” memetjahkan semua soal setjara „garis*

besar”, mulai dari politik internasional sampai kemasalah kaum tani didesa. Karena liberalisme ketika itu masih menjadi penjakit, mulai dari pimpinan sampai ke-anggota² biasa, maka tidak heran kalau tentang penjakit „garis besar” yang sudah dirasakan adanya ini, tidak pernah didiskusikan setjara mendalam didalam Partai dan hanya sampai pada edjeikan dan tertawaan belaka.

Orang bisa berkata, bahwa pada waktu itu kita belum maju seperti sekarang, sehingga kita tidak bisa lain ketjual bitjara dalam garis besar sadja. Andaikan alasan ini benar, djustru supaja kita menjadi maju kita mendiskusikan kelemahan² yang ada itu setjara mendalam, mengadakan rapat² atau konferensi² yang khusus membitjarakan kelemahan² kita. Tetapi rapat² atau konferensi² demikian tidak kedjadian.

Sematjam penjakit „garis besar”, jaitu suka bitjara dalam garis² umum dan abstraksi² sadja, yang lepas hubungannya yang satu dengan yang lain dan kurang dihubungkan dengan perkembangan situasi, sekarangpun masih terdapat pada sebagian anggota Partai kita. Dengan demikian, soal² yang dihadapi tidak mungkin dipetjahkan sampai kesoal yang *se-ketjil²nja*, sehingga tidak mungkin memberikan djawaban yang *kongkrit* pada persoalan yang dihadapi. Anggota² kita sudah banjak yang bisa meng-hafal istilah², definisi² dan dalil² tentang oportuniste kanan dan „kiri”, sektarisme, liberalisme, komandoisme, tutup-pintu-isme, dll. Kita yakin bahwa banjak diantaranya yang belum mengerti benar apa isinja istilah² itu. Tetapi apakah ada usaha mereka yang sungguh² supaja bisa mengerti, misalnja dengan mendiskusikannya setjara mendalam, dengan menanjakannya pada pimpinan atau pada Dewan Redaksi „Bintang Merah”? Sedikit sekali yang melakukan ini. Demikian djuga, misalnja, masih banjak anggota² Partai yang belum mengerti benar hakekat daripada politik perdamaian, daripada front persatuan nasional, dsb. Djika mengupas keburukan persetudjuan KMB, mereka mengupasnja djuga terlalu umum, tidak dikupas sampai soal² yang ketjil dan tidak dihubungkan setjara kongkrit dengan penghidupan Rakjat se-hari². Mereka tidak berusaha dengan keras untuk memahami benar² isi daripada semuanja ini hingga mengerti se-djelas²nja, disamping kewajiban pimpinan Partai dan Dewan Redaksi „Bintang Merah”

untuk terus-menerus memberikan pengertian² tentang istilah², definisi² dan dalil².

Mengetahui istilah², definisi² dan dalil² adalah perlu. Tetapi yang penting ialah mengerti isinja atau maksudnja yang dalam. Dan yang lebih penting lagi, djika sudah mengerti isinja atau maksudnja yang dalam, bagaimana menghubungkan istilah², definisi² dan dalil² yang kita peladjar itu dengan praktek perdjuaan se-hari². Untuk mengerti ini kita harus mengadakan diskusi dengan kawan² dalam fraksi, dalam Komite, dalam Resort atau Grup. Pendeknja, apa yang kita batja dan apa yang kita dengar, harus kita fahamkan benar². Djika tidak bisa dengan berdiskusi satu kali adakan diskusi untuk kedua-kalinya atau lebih atau sampai ketemu. Kalau kita ber-sungguh² dan bekerdja dengan sepenuh djiwa kita, achirnja mesti ketemu dan mesti bisa kita menghubungkannya setjara kongkrit dengan praktek pekerdjaan se-hari².

Misalnja kita ambil sekarang satu soal yang sangat urgen, yang saban kawan boleh dikatakan sudah membitjarakan setjara umum, setjara „garis besar”, jaitu bahwa sektarisme adalah bahaya besar yang mengakibatkan terisolasi Partai dari massa, dan bahwa dalam Partai kita sekarang djuga terdapat sektarisme. Tetapi, apakah sudah didiskusikan setjara mendalam apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sektarisme, apakah tanda² daripada sektarisme yang terdapat didalam fraksi saudara, didalam komite saudara, didalam grup atau resort saudara, didalam organisasi massa yang saudara pimpin dan didalam diri saudara sendiri? Apakah sudah ditjari dan sudah mendapatkan tjara kerdja yang tepat agar Partai tidak lagi terisolasi dari massa, agar Partai dapat menghimpun massa yang se-luas²nja disekitar Partai dan disegala lapangan, dilapangan buruh, dilapangan tani, pemuda dan peladjar, wanita, kebudayaan, sport, ilmu pengetahuan, perdamaian, koperasi, rukun kampung, dsb.? Memang sudah ada yang mendiskusikan setjara mendalam tentang tjara melenjapkan sektarisme, tentang tjara melaksanakan *garis massa* daripada Partai, dan merekapun sudah ada yang mendapatkan djalan yang tepat. Ini misalnja kita lihat dari tjara kawan² dibeberapa tempat yang pandai mengadakan kesatuan aksi dari kaum buruh yang tergabung dalam SOBSI (13) dengan kaum buruh yang tidak tergabung dalam SOBSI, djuga kita lihat

tjara bekerdja dikalangan kaum tani jang sudah dapat menghimpun massa jang sangat luas. Dengan demikian, SOBSI dan organisasi tani (RTI atau BTI)⁽¹⁴⁾ jang dipimpin oleh anggota² Partai, tidak hanja ditjintai oleh anggota² SOBSI atau RTI dan BTI, tetapi ditjintai oleh massa kaum buruh dan massa kaum tani jang luas. Tetapi tjara kerdja ini belum dilakukan oleh semua kawan kita, belum merata. Karena sektarisme ini, Partai *kurang dalam berakar dimassa.*

Tiap² anggota sudah mempeladjar Program Umum Partai. Dalam Program Umum itu antara lain dikatakan:

„Tiap² anggota Partai harus mengerti bahwa kepentingan² Partai adalah sama dengan kepentingan² Rakjat, dan bahwa tanggungjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungjawab terhadap Rakjat. Tiap² anggota harus memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhan²nja jang urgen dan membantu mereka berorganisasi untuk memperjuangkan kebutuhan²nja. Tiap² anggota harus senantiasa bersedia untuk beladjar dari massa Rakjat dan bersamaan dengan itu, dengan tidak djemu²nja senantiasa bersedia mendidik Rakjat dalam semangat revolusioner untuk membangunkan dan meninggikan kesedarannja. PKI harus yakin bahwa terpisah dari Rakjat berarti bahaya.”

Sampai kemana garis massa daripada Partai ini sudah didiskusikan dan diusahakan melaksanakannya oleh comite², fraksi², resort² dan grup²? Melaksanakan garis massa ini berarti melikwidasi sektarisme. Sampai kemana usaha² anggota Partai untuk meringankan beban² kaum buruh, untuk menaikkan upah kaum buruh, untuk mengurangi djam bekerdja, untuk mengatasi soal kenaikan harga barang dan usaha² untuk mendapatkan djaminan² sosial? Kaum tani mengeluh kekurangan sapi atau kerbau untuk pembantu bekerdja, pengairan tidak baik, sewa tanah terlalu tinggi, tukang idjon dan lintahdarat tetap kedjam, tidak ada pimpinan dalam teknik pertanian, perikanan, dan peternakan, butahuruf masih tetap meradjalela. Sampai kemana anggota Partai sudah berusaha untuk membantu kaum tani? Sampai kemana anggota² Partai sudah membantu pemuda dan peladjar, mengorganisasi mereka dan memimpin mereka dalam memenuhi kebutuhannya akan gedung sekolah jang lebih banyak dan pantas, peladjaran

jang lebih teratur dan baik nilainya, kebutuhannya akan sport, kebudayaan, piknik, dsb.?

Demikian pula pertanyaan, sampai kemana pekerdjaan² anggota Partai dikalangan massa wanita, dikalangan ahli kebudayaan, dikalangan pentjinta² ilmu, dikalangan penduduk kampung dan dalam gerakan untuk perdamaian dunia?

Dengan sungguh² dan djudjur mengabdikan kepentingan Rakjat, organisasi Rakjat jang kita pimpin dan Partai bisa mendapat nama jang harum dikalangan massa. Pekerdjaan kita *mengharumkan nama organisasi* jang kita pimpin berarti djuga mengharumkan nama Partai kita. Ada pendapat jang mengira bahwa kewadajiban kita hanja mengharumkan nama organisasi pada anggota². Ini pendapat jang keliru, pendapat jang sektaris. Organisasi jang kita pimpin harus *harum namanya pada Rakjat*, oleh karena itu organisasi kita tidak hanja mengabdikan kepentingan anggota²nja tetapi harus djuga mengabdikan kepentingan Rakjat banjak, djadi djuga jang belum mendjadi anggotanya. Demikianlah, misalnja, SOBSI bukan hanja kepunjaan dan hanja mengabdikan anggota SOBSI tetapi adalah kepunjaan dan mengabdikan massa kaum buruh. Demikian djuga Rukun Tani atau Barisan Tani, Pemuda Rakjat, Gerwis⁽¹⁵⁾ dll. Diskusi jang sungguh² dan mendalam bisa membantu kita dalam hal ini, bisa membantu kita untuk memberi djawaban jang kongkrit terhadap tiap² soal jang dihadapi Rakjat, dan dengan demikian kita bisa mengadakan tindakan jang kongkrit pula guna mengabdikan kepentingan Rakjat.

Djadi, kita tidak boleh puas mengetahui soalnya hanja dengan remeng², dengan kabur, tetapi hendaklah tiap² soal kita perdalam dan kita tjari djawabannya jang kongkrit dan tepat. Djika sudah mendapat djawaban jang kongkrit mesti dilaksanakan dengan kesedaran, artinja diamalkan dengan sepenuh djiwa, sepenuh hati dan enersi jang ada pada kita.

3. *Masih ada kader² Partai jang bekerdja tidak teratur, main serampangan dan tidak sungguh². Diskusi dalam fraksi² dan comite² Partai masih banjak jang belum teratur, belum diadakan setjara periodik (misalnja ditentukan se-kurang²nja sekali seminggu atau sekali dalam 10 hari) dan belum menurut tjara² sebagaimana mestinya. Ada fraksi dan comite jang hanja mengadakan diskusi*

„djika dipandang perlu”, dan dalam prakteknja tidak pernah mengadakan diskusi sampai ber-bulan². Ini menandakan masih bertjokolnja penjakit liberalisme didalam fraksi atau comite tsb.

Walaupun sudah ada ketentuan, bahwa sekretaris atau wakil sekretaris comite harus menjiapkan atjara dan membikin kata pengantar dalam diskusi² atau rapat², masih ada sadja sekretaris atau wakil sekretaris jang datang untuk rapat atau untuk berdiskusi tanpa persiapan apa², semuanya terserah pada sidang. Dan kalau ditanja mengapa tidak ada persiapan, maka sekretaris kita mendjawab: supaja „lebih demokratis”, supaja „tidak mempengaruhi”, supaja „tidak ada komandoisme”, dsb. Alasan jang tidak tepat, jang di-tjari² untuk menutupi keteledoran atau kealpaan.

Djuga tidak djarang anggota² comite atau fraksi datang untuk berapat atau berdiskusi tanpa persiapan. Akibatnja, dalam diskusi kelabakan men-tjari² soal atau ia bersifat pasif dan hanya mengengong pendapat anggota lain, atau ia mengganggu dengan melihat semua dari sudut jang lutju². Tempo² dua pendapat jang bertentangan dia setudju ke-dua²nja dengan meng-angguk²kan kepalanja. Diskusi begini, ketjual lutju, tentu tidak akan ada hasilnja dan tidak mungkin meningkatkan kesedaran politik anggota. Pimpinan atau anggota jang liberal tidak akan memberi tegoran apa² dan akan membiarkan keadaan ini terus berdjalan. Tetapi dengan demikian berarti ia tidak melakukan tugasnja jang sewadjarnja.

Karena tjara diskusi tidak diatur jang baik, atjaranja mendjadi tidak keruan dan ke-sungguh²an djuga tidak ada. Tidak heran kalau sering hasil² diskusi tidak diformulasi, atau tidak diformulasi dengan baik, dengan teliti. Masing² kepala mempunyai interpretasi sendiri mengenai kesimpulan² jang diambil. Pernah djuga kedjadian, karena putusan tidak diformulasi dan anggota² tidak begitu memperhatikan, bahwa putusan jang sudah pernah diambil dalam diskusi jang lalu kemudian diputuskan lagi, dengan tidak ingat bahwa putusan demikian sudah pernah diambil.

Kesimpulan daripada diskusi jang tidak teratur tidak mungkin disampaikan setjara benar kepada comite Partai jang bersangkutan. Comite Partai jang bersangkutan tidak mungkin mengetahui kekurangan² atau kesalahan² mengenai tjara berdiskusi

maupun mengenai putusan² jang dibikin oleh fraksi atau comite jang dibawah pimpinannja. Padahal laporan tentang hasil diskusi adalah sangat penting, karena ia mengandung pelajaran. Dan tjara berdiskusi atau hasil diskusi jang terbaik bisa didjadikan petunjuk umum atau pendirian umum daripada Partai. Hanya dengan adanja laporan hasil diskusi, comite Partai jang bersangkutan bisa memberikan pimpinan jang tepat pada fraksi² dan comite² Partai jang ada dibawah pimpinannja.

Karena diskusi tidak teratur, dan karena itu kesimpulan² diskusi tidak diformulasi dengan tepat, dan tiap kepala mempunyai interpretasi sendiri², maka tidak mungkin mengadakan kontrol jang teliti sampai kemana dan bagaimana putusan diskusi sudah didjalankan oleh anggota. Tidak adanja atau kurangnya kontrol terhadap pekerdjaan anggota, kontrol terhadap apakah putusan didjalankan dan bagaimana putusan didjalankan, akan berakibat bahwa pekerdjaan tidak mungkin berdjalan sebagaimana mestinja, disiplin mendjadi lembek, pengalaman tidak tjepat bertambah dan pimpinan tidak mendjalankan rolnja sebagaimana mestinja.

4. Anggota² Partai terdiri dari manusia² jang hidup, jang mempunyai fikiran dan perasaan, disamping mempunyai sifat² jang baik ia djuga mempunyai kelemahan². Soal manusia, dengan sifat²-nja masing², masih sangat kurang diperhatikan dalam tjakerdja kebanyakan kawan² kita. Padahal bagi organisasi, soal jang terpenting ialah soal mengenal dan menempatkan anggota, djadi mengenal dan menempatkan manusia, sehingga dengan tidak memperhatikan sungguh² soal ini, kita tidak mungkin membantu seorang kawan untuk mengembangkan sifat²nja jang baik dan melikwidasi sifat²nja jang kurang baik, agar mereka bisa lebih banjak dan lebih sempurna bekerdja untuk Partai dan untuk Rakjat.

Kita hendak mentjiptakan masjarakat demokrasi Rakjat dan masjarakat sosialis bukan dengan manusia² dari langit, tetapi dengan manusia² jang ada sekarang ini. Bukan manusia² lain, tetapi manusia² ini djuga, manusia² jang lahir dalam masjaraka kapitalis, manusia² jang mempunyai tugas sedjarah untuk menghantjurkan sistim kapitalis dan membangunkan masjarakat sosialis, atau untuk negeri kita sekarang: menghantjurkan sistim imperialis

dan feodal dan membangunkan masjarakat demokrasi baru atau demokrasi Rakjat.

Sebagai manusia jang lahir dalam masjarakat kapitalis, manusia² Indonesia sekarang telah mendapat didikan jang djahat dari masjarakat kapitalis, malahan dari masjarakat kolonial jang lebih djahat lagi, jaitu didikan mementingkan diri sendiri, didikan pengetjut, didikan rasa rendah diri dan didikan² lainnja jang buruk.

Memang, seorang jang sudah masuk Partai Komunis, harus diperlakukan sama oleh Partai sebagai anggota² lain, sebagai anggota Partai klas proletar. Tetapi tidak ada sesuatu jang terdjadi dengan sendirinja, dengan otomatis, demikian djuga mendjadi seorang Komunis jang sempurna tidak otomatis. Seseorang jang baru sadja masuk Partai tidak otomatis dia terus mendjadi manusia jang istimewa, sebagaimana mestinja tiap² Komunis. Untuk mendjadi seorang Komunis jang baik ia mesti mengubah sama-sekali ideologinja jang lama supaja mendjadi ideologi Komunis, dan ini memakan waktu jang ber-tahun², menghendaki pendidikan teori dan praktek bekerdja serta pengalaman dalam menghadapi serangan² reaksi. Djadi, kita bukan seorang realis, kalau dari tiap² orang jang baru sadja masuk mendjadi anggota Partai, artinja baru sadja mendaftarkan diri dan baru menerima Program dan Konstitusi Partai, masuk dan bekerdja aktif disalah satu organisasi Partai, taat kepada putusan² Partai dan membayar uang pangkal dan iuran Partai, mengundjungi rapat², dan kursus² Partai serta membatja penerbitan² Partai (lihat konstitusi PKI fasal 1), kita meminta kwalitet sebagai Komunis jang sama seperti kwalitet anggota² jang sudah lebih lama, lebih terdidik dan lebih terlatih.

Ketika terdjadi razzia baru² ini ada tanda² bahwa sebagian kader² Partai kurang memperhatikan sifat² anggota satu per satu, dengan kebaikan²nja dan kekurangan²nja. Kader² jang tidak melihat kenjataan ini tidak senang djika ada anggota (umumnja anggota baru) jang dibawah pimpinannja tidak segera bisa menyesuaikan diri dengan tjara hidup dan tjarakerdja baru. Apalagi djika anggota baru banjak permintaan dan usul² atau djika ia sedikit menundjukkan ketjil hati. Dua atau tiga kali usaha untuk menjedarkan kawan itu dianggapnja sudah tjukup banjak, dan lebih landjut dia tidak mau lagi mengurusnja. Dia sedikit mutung,

ngambek. Dia tidak mengerti kewajibannja, bahwa djustru dalam keadaan sulit kita mesti lebih menanamkan kejakinan dan kesedaran pada kawan² jang lemah, supaja kegembiraannja untuk berdjuang kembali lagi. Sifat² mutung, ngambek dan marah dalam menghadapi hal begini adalah menundjukkan sifat² burdjuis ketjil pada kader kita, dan ini sangat merugikan Partai.

Memang ada kader Partai jang tjakap memimpin gerakan Rakjat diwaktu aman tetapi tidak mudah menyesuaikan diri djika keadaan sudah tidak aman lagi. Kader² jang sudah pernah di-hudjani peluru selama perang² kolonial, jang sudah biasa dirazzia oleh Belanda, jang sudah mengalami hangatnja perdjjuangan selama Provokasi Madiun, mereka tentu akan lebih mudah menyesuaikan diri daripada anggota² baru. Kewaspadaan mereka sudah lebih tinggi dan mereka sudah mengetahui tjara² bekerdja dalam keadaan jang tidak aman. Djadi, dalam menghebatnja serangan reaksi, kawan² baru jang kebingungan bukannya mesti dimarahi atau dipatahkan semangatnja, tetapi dengan sabar mesti *ditentramkan dan dibangun kembali semangatnja* agar ia mempunyai kegembiraan lagi untuk terus berdjuang. Dalam keadaan begini kita mesti meresapkan benar² keterangan Kawan Stalin jang mengatakan, bahwa „dari semua modal jang berharga, jang ada didunia ini, jang paling berharga dan paling bersifat menentukan jalah manusia, jalah kader”.

Tidak hanja dalam hal seperti diatas, tetapi dalam banjak hal² lain kita masih melihat, bahwa dalam tjarakerdja kader² Partai masih sangat kurang memperhatikan tiap² anggota sebagaimana adanja, jang disamping sifat²nja jang baik masih mempunyai kelemahan² sebagai akibat pendidikan kolonial dan akibat kesalahan² Partai diwaktu jang lalu.

Masih banjak kader Partai jang bekerdja seperti pegawai, dan Partai dipandangnja sebagai kantor, sebagai instansi didalam pemerintahan, atau sebagai perusahaan jang tidak berdjawa. Tjarakerdja sematjam ini harus kita berantas. *Partai adalah gerakan daripada manusia² jang hidup, dan kader² Partai adalah pemimpin umat manusia jang djuga hidup, dan bukan pemimpin kantor, instansi pemerintahan atau perusahaan jang „bisa berdjalan” asal sudah diadakan tatatertib dan maklumat².*

5. *Jang terachir, tetapi jang tidak kurang pentingnja, ialah tanda² jang terdapat pada sebagian anggota Partai, jaitu tanda kurang pertjaja pada kekuatan sendiri, tanda kurang pertjaja pada Partai dan tanda kurang pertjaja akan kemenangan pasti ada pada kita. Mereka belum yakin benar² bahwa perdjjuangan kita pasti menang, mereka tempo² masih ragu, masih memikirkan kemungkinan² kalah dan kemungkinan² burdjuasi akan berkuasa terus.*

Kawan² ini terutama terdapat diantara anggota² jang masih sangat lemah ideologinja dan jang belum pernah berada ditengah-tengah gelora perdjjuangan Rakjat (perang dalam kota ketika permulaan revolusi, perang² kolonial (16), pemogokan Delanggu (17), Provokasi Madiun, demonstrasi² besar dan pemogokan², dsb.). Mereka belum pernah melihat dan belum dapat menggambarkan, bahwa massa jang „biasa” itu pada suatu ketika bisa mentjiptakan kekuatan² jang luarbiasa, bisa mentjiptakan kemungkinan² jang diluar dugaan biasa, bisa berdjjuang dengan sengit tetapi gembira dan dengan moral jang tinggi. Tiap² anggota Partai jang sudah digodog dan sudah menggodog diri didalam perdjjuangan Rakjat sengit selama revolusi, tidak akan mungkin melupakan sinar jang memantjar dari mata Rakjat jang sedang berdjjuang, jang menundukkan kebulatan tekad, keberanian, keichlasan dan kepertjajaan akan kemenangan pasti. Mereka tidak akan melupakan pembikinan barikade² dan pensitaan perusahaan² imperialis didalam dan diluar kota jang dilakukan oleh Rakjat tanpa perintah dari instansi resmi, tidak akan lupa inisiatif Rakjat jang tidak ada hingganya dalam memberi bantuan kepada pradjurit² kemerdekaan untuk mengusir kaum agresor Belanda dan Inggeris. Semua ini belum bisa dirasakan dan digambarkan oleh anggota Partai jang biasanja hidup „tenteram”. Mereka harus mempunyai pengalaman lebih dulu, baru bisa merasakan benar² keindahan, keperwiraan dan kegembiraan perdjjuangan ini.

Beberapa diantara mereka jang kurang mempunyai kepertjajaan pada kekuatan sendiri, pada Partai dan pada kemenangan jang akan datang, ada jang mengeluarkan perkataan² jang kelihatannja se-olah² baik, se-olah² konstruktif, misalnja utjapan „sudahlah, selama provokasi Madiun sudah terlalu banyak kader

PKI dibunuh oleh reaksi. Sekarang ini kita diam² sadja, djangan membikin agitasi dan propaganda dan djangan mengkritik pemerintah jang sedang buas, tenaga kita mesti disimpan baik², toh nanti kalau ada perang dunia III tentara Rakjat Tiongkok akan membebaskan kita”, atau utjapan „Indonesia sudah seutuhnja dikuasai oleh imperialis Amerika, kita sudah tidak bisa berbuat apa² lagi, dan djika bisa berbuat toh bantuan kita tjuma sedikit, oleh karena itu kita tunggu sadja sampai datang perang dunia III, itulah kesempatan jang baik bagi kita”, atau utjapan „Tidak ada gunanja mengumpulkan tandatangan untuk perdamaian dunia. Nanti Rakjat kurang semangat untuk berperang, padahal satu²nja djalan untuk menghantjurkan kapitalisme dunia hanjalah cengan perang dunia III”, atau lain² utjapan lagi jang tendensnja sama. Utjapan² ini *sangat berbahaya!* Tidak ada utjapan² jang lebih berbahaya daripada utjapan² ini. Djustru karena anggota² Partai Komunis jang mengutjapkannya, maka ia lebih berbahaya daripada propaganda perang Truman sendiri atau kakitangannya jang ada di Indonesia dan dimana sadja.

Utjapan² „kiri” diatas adalah timbul dari pikiran jang djika tidak segera dibasmi tidak hanja akan mematikan atau mengurangi kegiatan² untuk menjusun persatuan nasional jang kuat dan menggalang gerakan perdamaian sebagai gerakan jang terpenting untuk menjelamatkan umat manusia dari bentjana perang dunia jang baru jang sedang giat disiapkan oleh Amerika, tetapi ia djuga merupakan bantuan jang sangat besar bagi imperialis dan kakitangannya dalam pekerdjaannya memfitnah PKI dan memfitnah seluruh pergerakan Rakjat. Ia memperkuat fitnahan reaksi jang terus-menerus menanamkan pada alat²nja dan kakitangannya, terus-menerus mentjoba menghasut Rakjat, se-olah² „kemerdekaan nasional” terantjam karena kaum Komunis mau mentjapai tudjuan politiknya dengan kekuatan dari luar, dengan kekuatan negeri asing, dan bahwa kaum Komunislah jang sebetulnja menghendaki perang dunia dengan maksud supaja mereka bisa memantjing diair keruh. Nah, bukankah utjapan² dan fikiran² seperti diatas, sedar atau tidak sedar, adalah utjapan atau fikiran jang hakekatnja mutlak anti-Komunis. Utjapan atau fikiran „kiri” demikian ini dalam prakteknja berakibat *mengisolasi Partai dari*

Rakjat. Anggota² jang masih ketempelan fikiran jang berbahaja ini mesti lekas² diingatkan, diadjak berdiskusi, dijakinkan akan kesalahannja. Djika sudah ber-ulang² diingatkan tetapi ia tidak berusaha mengubah fikirannja, tidak ada tempat lagi bagi orang demikian didalam Partai kita. Orang demikian ini lebih banjak bersifat musuh Komunisme, lebih banjak bersifat agen burdjuis dan agen provokator didalam Partai, daripada seorang Komunis jang sungguh² tjinta pada Partainja dan sungguh² membela kepentingan Rakjat serta memimpin Rakjat untuk kemerdekaan nasional dan perdamaian.

Tiap anggota PKI harus yakin se-jakin²nja, bahwa mereka mempunyai kejakinan dan moral jang sangat berlainan dari kejakinan dan moral imperialis serta agen²nja. Kaum Komunis Indonesia harus pertjaja sepenuhnya pada kekuatan Rakjat Indonesia dan pada kekuatan perdamaian, ja, menurut kaum Komunis, Rakjat dan perdamaian adalah sumber daripada se-gala²nja. Sebaliknya, dengan kakitangan imperialis jang ada di Indonesia dan dimana sadja, mereka tidak mempertjaji dan mereka memusuhi Rakjat, mereka lebih pertjaja pada „bantuan” Amerika, dan dengan „bantuan” Amerika ini mereka ikut menindas Rakjat. Mereka tidak yakin akan kemenangan perdamaian dan mereka aktif mendjalankan politik perang Amerika.

Dalam Program Umum PKI samasekali tidak ada di-sebut² tentang menunggu kedatangan tentara asing untuk memerdekakan Indonesia atau me-nunggu² datangnya perang dunia III, tetapi setjara kongkrit dikatakan bahwa kewadajiban PKI ialah: *kedalam* „mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani, kaum intelek, pengusaha ketjil, pengusaha nasional dan semua anasir anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan semua golongan minoritet”. Sedangkan *keluar* kewadajiban PKI ialah: „bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua Rakjat jang tertindas, bangsa² jang terdjadjah dan nasion² jang memandang kita sederadjat, jang mentjintai kemerdekaan nasional, dengan demokrasi Rakjat dan perdamaian dunia”. Tiap² anggota berpegang teguh pada Program Umum Partai, dan didalam Program Umum sedikitpun tidak ada di-sebut² bahwa PKI me-nunggu² tentara asing atau perang dunia III.

Djustru sekarang dimana Rakjat makin besar kepertjajaannja pada Partai kita, kita mesti lebih banjak menundjukkan sifat² patriotik daripada Partai kita, sebagaimana mestinja tiap² Partai Komunis. Djuga dalam perbuatan se-hari² tiap² anggota Partai harus menampakkan ini. Dengan demikian kita bisa menelandjangi kepalsuan fitnahan orang² djahat terhadap Partai kita.

Dengan djujur dan hati terbuka terus-menerus, tidak djemu²nja kita harus kemukakan tjita² kita jang sesungguhnja jang sebenarnja tidak lain daripada tjita² Rakjat banjak. Sebagaimana kehendak Rakjat, kita kaum Komunis menghendaki kemerdekaan sedjati dan perdamaian, dan tidak lain daripada itu. Kita berdjuang untuk suatu Republik Rakjat jang demokratis dan samasekali *bukan Republik jang hanja untuk kaum Komunis, tetapi Republik persekutuan antara kaum Komunis dengan golongan² lain dan orang² jang progresif.* Kita samasekali tidak ber-tjita² supaja Republik Rakjat jang demokratis itu mesti diimpor dari luarnegeri, atau dengan djalan meletakkan beban perang dunia baru diatas pundak Rakjat Indonesia jang sudah begitu berat memikul matjam² beban sebagai akibat persetudjuan KMB. Kita yakin, bahwa mengimpor kekuatan dari luarnegeri atau perang dunia baru, bukan djalannja untuk mentjapai tjita² PKI. Republik Indonesia jang merdeka, jang demokratis dan jang damai hanja mungkin tertjapai djika sebagian besar Rakjat menghendakinja dan berdjuang untuk itu. Kehendak dan perdjuangan itu hanja bisa tumbuh dari aksi² bersama antara kaum Komunis dengan kaum sosialis, dengan kaum nasionalis, dengan kaum agama jang progresif dll. golongan kerakjatan, dari aksi² antara kaum buruh jang tergabung dalam SOBSI dan jang tidak tergabung dalam SOBSI, dari aksi² antara kaum tani jang tergabung dalam front persatuan tani (FPT)⁽¹⁸⁾ dan jang tidak tergabung dalam FPT, dari aksi² massa pemuda, wanita, peladjar dll. dalam menuntut perbaikan nasib dan hak² kita.

Kita anggota² PKI, partai jang kita tjintai dan kita djundjung tinggi, kita berdjuang untuk kemerdekaan nasional *di Indonesia.* Kita mempunyai solidaritet internasional jang tanpa ini kita tidak mungkin mentjapai kemenangan kita, tetapi solidaritet internasional kita tidak membebaskan kita dari kewadajiban kita

terhadap tanahair dan Rakjat Indonesia. Solidaritet internasional kita malah mewadjibkan pada kita untuk bekerdja lebih sungguh² dan lebih keras guna kemerdekaan nasional, karena perdjuaan untuk kemerdekaan nasional kita djuga memperkuat perdjuaan untuk demokrasi didunia dan untuk perdamaian dunia.

Tjara Kita Mengatasi Kelemahan²

Diatas sudah kita bitjarakan tentang beberapa kelemahan Partai kita. Kelemahan² seperti jang kita lihat didalam Partai kita sekarang djuga dialami oleh Partai² Komunis diluarnegeri. Baru² ini, misalnja, Partai Komunis Amerika djuga mengadakan koreksi jang tadjam terhadap kelemahan² mereka, kelemahan² jang hampir sama dengan kelemahan² jang sekarang masih ada didalam Partai kita. Ada lagi persamaannja dengan kita, jaitu bahwa kelemahan² didalam Partai di Amerika menondjol ketika Partai mendapat serangan² jang lebih sengit dari Pemerintah Truman jang sudah bersifat fasis itu. Segi jang baik daripada Razia Agustus jalah, bahwa kita sekarang mengenal dan menje-dari kekurangan² dan kelemahan² kita, sehingga kita bisa berusaha sungguh² untuk memperbaikinja. *Ini sangat penting bagi pertumbuhan Partai kita selandjutnja, apalagi dimana Partai kita mesti berhadapan dengan serangan² reaksi jang lebih ganas lagi.*

Djadi, kelemahan² jang nampak sekarang didalam Partai bukanlah tadinja tidak ada. Sedjak tadinja kelemahan² ini sudah ada. Dan kita bukan tukang sunglap, jang dalam waktu setengah tahun (sedjak permulaan tahun 1951, jaitu sesudah selesai kritik dan selfkritik jang sengit didalam Central Komite dan sesudah dibentuknja Politbiro baru dalam bulan Djanuari 1951) bisa melenjapkan semua penjakit dari Partai jang tadinja sudah begitu djauh tenggelam dalam oportunisme kanan dan „kiri” (lihat koreksi „Djalan Baru”). Apalagi kalau diingat, bahwa anasir oportunisme kanan dan „kiri” masih terus berusaha mengadakan perpetjahan dan menimbulkan ke-ragu²an didalam Partai. Umum-nja, waktu² jang achir-achir ini kader² Partai sudah merasakan banjarknja kekurangan² dan kelemahan² jang masih terdapat di-dalam Partai kita. Sebagian kawan² segera memperhatikan kele-

mahan² ini dan mendiskusikannja setjara mendalam sehingga mendapat pemetjahan jang tepat. Tetapi sebagian lagi belum berbuat demikian.

Disinilah kewadjiban daripada fungsionaris² Partai, jaitu kawan² jang memegang pimpinan dalam Partai kita, untuk mengadakan selfkritik. Dari fungsionaris Partai dituntut sjarat jang lebih tinggi daripada dari anggota biasa, karena fungsionaris Partai mempunjai tanggungdjawab jang lebih besar daripada anggota biasa. Makin tinggi fungsi (kedudukan) seorang anggota dalam pim-pinan, makin besar tanggungjawabnja.

Tiap² fungsionaris Partai harus bekerdja lebih kritis agar bisa memeriksa kelemahan² dan kesalahan², supaya bisa memperbaikinja dan supaya bisa terus meninggikan nilai pekerdjaannja. Inilah sifat² jang mesti ada pada tiap² pemimpin jang sungguh², supaya mampu memimpin pekerdjaan seluruh Partai.

Pengakuan perlunja kritik dan selfkritik sudah merata didalam Partai kita. Tetapi memang, antara pengakuan *setjara umum* dan setjara kongkrit *mempraktekkanja*, sering ada djurang jang dalam dan lebar. Kritik dan selfkritik jang sungguh² dan tepat, tidak timbul dengan sendirinja. Ia lahir didalam perdjuaan jang terus-menerus, dalam perdjuaan untuk mengatasi tiap² rintangan dan untuk mengatasi semua persoalan.

Di-waktu² jang lalu kritik dan selfkritik banjak jang masih belum dilakukan dengan sungguh² dan tepat. Masih sering ter-djadi seorang fungsionaris didalam suatu badan kolektif (Komite atau fraksi) jang membikin laporan tentang pekerdjaannja tidak banjak bedanja dengan laporan seorang lurah kolonial pada atas-annja. Lurah kolonial memang melaporkan kekurangan² mengenai daerahnja, tentang kekurangan air, tentang wabah penjakit jang berdjangkit didaerahnja, tentang kekurangan chewan untuk mem-bantu kaum tani bekerdja, tentang bentjana bandjir, dsb., tetapi dia tidak mengadakan kritik pada dirinja dan pada pekerdjaan-nja, tidak memberikan setjara kongkrit mengapa semuanja itu terdjadi serta tidak memberikan pandangannja sendiri tentang tjara² untuk mengatasinja. Dengan „tjerdik” lurah itu menutup laporannja dengan utjapan² manis, bahwa dengan bantuan dja-watan ini dan itu, dengan keahlian mantri chewan dan mantri

tjar, serta kebidjaksanaan tuan asisten wedana, insja Allah
un muka semua bisa berdjalan dengan beres, hasil panen akan
ih banjak dan padjak² akan masuk. Laporan pekerdjaan se-
tjam ini memang laporan jang dikehendaki oleh birokrasi
onial. Birokrasi kolonial dari atas sampai kebawah memang
ti-kritik dan pegawai² bekerdja setjara mesin, oleh karena itu
ruwetan² makin lama makin bertumpuk didalam birokrasi kolo-
al. Bukankah masih ada fungsionaris Partai jang tidak suka
engadakan kritik pada pekerdjaannya sendiri, dan menjerahkan
metjahan selandjutnja pada kebidjaksanaan kawan² fungsionaris
in atau pimpinan atasan? Padahal jang paling bisa mengada-
n kritik terhadap pekerdjaannya jalah dia sendiri, karena dialah
ng lebih mengetahui tentang pekerdjaannya sendiri dan tentang
ara² bekerdjanja. Tetapi, adalah satu kebenaran, bahwa djika
mengadakan kritik jang tadjam terhadap pekerdjaannya sendiri
an terhadap tjaranja bekerdja, akan diketahui kelemahannya oleh
ngsionaris² atau anggota² jang lain. Ini bisa mendjatuhkan
martabat" sobat kita. Fikiran² demikian ini, jaitu fikiran² indi-
idualis, sudah tentu merupakan rintangan besar bagi pembolsje-
yikan Partai.

Demikian djuga, fungsionaris² atau anggota² jang mendengar
aporan jang tidak kongkrit itu, jang tidak disertai selfkritik dan
andangan² jang mendalam, merekapun tidak pula mengadakan
kritik jang tadjam terhadap laporan itu. Mengadakan kritik jang
tadjam terhadap laporan pekerdjaan dari kawan tentu ada kon-
sekwensinja, takut kalau² menusuk perasaan dan mungkin sekali
mengandung resiko bahwa pekerdjaannya djuga akan dapat kri-
tikan kembali jang tidak kalah tadjamnja. Oleh karena itu lapor-
an² dibitjarkan setjara umum sadja, tidak diadakan kritik dan
selfkritik jang tadjam. Dengan demikian diskusi berdjalan dengan
„aman" dan tidak ada „pertarungan sengit".

Tetapi peladjaran apakah jang bisa kita ambil dari laporan
dan diskusi sematjam itu? Soal apakah jang bisa dipetjahkan
dengan tepat? Pimpinan apa jang bisa diberikan oleh badan
kolektif sematjam itu? Ini *bukan* pimpinan dan samasekali *bukan*
pimpinan jang kolektif! Ini tempat fungsionaris² ngobrol dan
memudji diri serta saling mengenakan satu dengan lainnja!

Dalam badan² kolektif jang masih terbelakang, ada kalanja bebe-
rapa fungsionaris membikin sematjam komplotan, membikin se-
matjam fraksi didalam badan kolektif itu untuk saling memudji
dan saling bela-membela agar bisa menondjol „kebaikan" mereka
dan bisa saling menutupi kelemahan² masing².

Apa jang kita terangkan ini adalah bentuk² daripada liberal-
isme, jang dengan tadjam dikritik oleh kawan Mau Tje-tung,
liberalisme „*jang tidak menghendaki perdjuaan ideologi dan
mempromagandakan kerukunan dengan mengorbankan prinsip*".
Liberalisme adalah salah satu pernjjataan oportuniste, adalah
ideologi jang pasif, dan langsung bertentangan dengan Marxisme.
Karena kelemahan² diatas adalah bentuk dari liberalisme, kita
tidak boleh membiarkan kelemahan² itu tetap ada didalam Partai
kita dan didalam seluruh pergerakan revolusioner. Karena adanja
liberalisme, kritik dan selfkritik tidak djalan didalam Partai dan
dengan demikian kelemahan² lain dengan sendirinja tidak mung-
kin diatasi.

Sebagaimana sudah sering diadjarkan pada kita, mengadakan
kritik adalah tidak mudah dan samasekali tidak boleh seram-
pangan. Mengadakan kritik dengan mematahkan orang jang
dikritik tentu bukan maksudnja. Pekerdjaan mengkritik ada per-
samaannya dengan pekerdjaan seorang dokter ahli bedah meng-
operasi orang sakit. Bukanlah soal sulit untuk mengoperasi dan
membikin mati orang jang dioperasi. Tetapi ini bertentangan
dengan maksud mengoperasi. Jang mendjadi soal jalah, bagai-
mana mengoperasi supaja sisakit mendjadi sembuh. Bagi seorang
Marxis, bagaimana mengkritik supaja jang dikritik mendjadi *sedar*
dan mempunyai kegembiraan untuk terus berdjuaan. Djadi, tidak
boleh mengadakan kritik jang anti-Marxis, jaitu kritik jang mem-
bikin orang jang dikritik mendjadi patah dan melarikan diri.

Belakangan ini kader² dan anggota² Partai banjak membi-
tjarkan brosur ketjil tulisan *Kian Ling* tentang: *tjara berfikir,*
tjara bekerdja, kritik dan selfkritik. Tersiaranja brosur ketjil ini tepat
pada waktunya, jaitu diwaktu kelemahan² dalam Partai sedang
menondjol kelihatan, dan untuk mengatasinja hanja djika kader²
dan anggota² Partai mempunyai tjara berfikir jang tepat, tjara
bekerdja jang tepat pula dan dengan radjin dan sungguh² meng-

adakan kritik dan selfkritik. Jang mendjadi pertanjaan sekarang jalah, sampai kemana brosur ini sudah dipeladjar dengan sungguh², sampai kemana isinja sudah difahamkan dan sampai kemana usaha kader² dan anggota² Partai menghubungkan isi brosur ini dengan pekerdjaan praktek mereka se-hari². Partai kita sudah meningkat dewasa, sudah samasekali bukan waktunja lagi membatja buku untuk lagak²an seperti orang kolot, sebagai advertensi dan untuk menutupi bahwa dia tidak beladjar sungguh². Sekarang waktunja untuk ber-sungguh², untuk mengamalkan dalam praktek semua jang baik jang kita dapat dari membatja dan mendengar, dan semuanja kita lakukan dengan sepenuh djiwa kita, dengan sepenuh hati dan enersi kita.

Dengan tidak adanja kritik dan selfkritik, tidak hanja tidak mungkin segera mengetahui dan segera memperbaiki kekurangan² dan kelemahan² didalam Partai, tetapi djuga tidak memungkinkan adanja *pimpinan kolektif*. Pimpinan kolektif hanja bisa tertjapai djika ada kritik dan selfkritik jang terusterang, jang terbuka dan setjara persaudaraan. Ini harus didjadikan tjara bekerdja di-tiap² badan kolektif, karena djika tidak demikian tidak dapat dinamakan badan kolektif dan tidak mungkin memberikan pimpinan jang baik.

Sesudah ada Razzia Agustus terasa sekali, dimana tadinja pimpinan tidak bekerdja setjara kolektif, dimana dalam pimpinan tidak didjalankan kritik dan selfkritik sebagai sjarat untuk tertjapai tjarakerdja kolektif, ditempat itu pimpinan Partai terhenti, anggota² merasa tidak ada pimpinan dan massa merasa ditinggalkan oleh pimpinan. Mungkin diwaktu biasa tempat itu termasuk dimana gerakan Rakjat agak madju, tetapi madjunja gerakan Rakjat itu hanja tergantung pada seseorang atau beberapa orang jang aktif, djadi tidak dipimpin oleh badan pimpinan jang bekerdja setjara kolektif. Djika pemimpin jang aktif itu ditangkap atau karena satu dan lain hal tidak bisa melakukan aktivitetnja sebagai biasa, gerakan disitu djuga terhenti. Untuk melahirkan pemimpin baru harus memakan waktu jang pandjang karena tidak ada kontinuitet dalam pimpinan.

Kawan² jang suka main djenderal²an sendiri ini biasanja memang seorang jang aktif, seorang jang tidak tahu lelah, tetapi satu kekurangan jang besar, ia merendahkan kawan²nja jang

sama-sama bekerdja, ia menganggap kawan²nja tidak mempunyai fikiran jang „hebat²“ seperti dia, sehingga tidak, perlu diadjak berdiskusi, dan tjukup dikasih tahu sadsja tentang putusan² jang diambilnja sendiri. Dengan fikiran ini berarti, bahwa dia bukan hanja tidak menghargai kawan²nja dalam pimpinan, tetapi pada hakekatnja dia djuga tidak menghargai massa, dia merendahkan massa, walaupun dia katakan bahwa dia seribu kali tjinta dan mendjungjung tinggi massa. Anggota pimpinan lain bukankah djuga dipilih oleh massa karena dipertjajai oleh massa? Pada hakekatnja ia sama dengan kaum sosial-demokrat jang tidak pertjaja pada massa, jang menjamakan massa dengan „kudde“, dengan gerombolan binatang, jang mesti mengikut sadsja kemana dia halau dan dia tarik. Ia menjamakan Rakjat dengan kerbau jang sudah ditjutjuk hidungnja. Adakah kedjahatan jang lebih besar dari ini?

Kebalikan dari tjontoh diatas. Sebelum Razzia Agustus Partai kita disuatu tempat tidak begitu kuat. Tetapi pimpinan dan anggota sudah dibiasakan bekerdja setjara kolektif. Kritik dan selfkritik didjalankan dengan sungguh². Diskusi² tentang politik dan tentang teori jang bahan²nja diambilkan dari „Bintang Merah“ atau dari brosur² djuga berdjalan dengan teratur. Walaupun dalam Razzia Agustus ada anggota pimpinan Partai atau pimpinan organisasi massa ditempat itu jang ditangkap, tetapi pimpinan Partai bisa berdjalan terus, anggota² tetap merasa ada pimpinan, demikian djuga massa. Malah dalam keadaan² jang genting begini timbullah pemimpin² dan pahlawan² baru.

Djadi djelaslah betapa perlunja ada pimpinan jang kolektif. Djustru diwaktu kita dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana perdjuaan klas makin meruntjing, dimana reaksi sedang bernafsu untuk menghantjurkan Partai kita sebagai persiapan dan permulaan untuk menghantjurkan seluruh pergerakan Rakjat, lebih² lagi perlunja pimpinan kolektif. *Dalam keadaan demikian ini, pimpinan Partai kita harus lebih kuat, lebih banjak inisiatif, lebih waspada, lebih berani daripada di-waktu² biasa.* Setjara kolektif dan setjara mendalam mesti kita bitjarakan kelemahan² dan kekurangan² Partai, walaupun mungkin baru berupa tanda² kelemahan atau kekurangan. Kita tidak boleh bersikap liberal dan

membiarkan semuanya berdjalan se-suka²nja, dan baru mengatasi kelemahan djika sudah terlambat.

Dalam perdjungan klas jang makin meruntjing seperti sekarang, anggota² Partai menghendaki kwalitet pimpinan jang lebih baik. Djuga massa, djustru dalam keadaan seperti sekarang ini, menghendaki kwalitet pimpinan jang lebih baik dari anggota² Partai. *Pimpinan demikian hanja mungkin timbul dari badan² jang bekerdja kolektif. Pimpinan kolektif hanja mungkin ada djika dalam pimpinan didjalankan kritik dan selfkritik.*

Selandjutnja kita harus mentjabut sampai ke-akar²nja restan² sektarisme dalam pandangan, politik dan tjarakerdja. Bersamaan dengan itu kita harus berdjung melawan reformisme, dan memobilisasi massa dibawah pandji² Partai dengan mendjalankan politik jang revolusioner. Sebagai Komunis kita berkewadajiban: *pertama* mengorganisasi, menggerakkan dan memimpin massa untuk mendapatkan keperluan hidup se-hari², tetapi bersamaan dengan itu, sebagai kewadajiban jang *kedua*, sekedjappun kita tidak boleh lupa, dimana sadja dan kapan sadja ada kemungkinan untuk meningkatkan kesedaran politik dari massa, terutama berdasarkan pengalaman² massa sendiri. *Melakukan kewadajiban jang pertama tanpa jang kedua berarti kita menudju kereformisme, dan melakukan jang kedua tanpa jang pertama berarti kita menudju kesektarisme.* Dalam perdjungan melawan sektarisme dan reformisme ini, dalam perdjungan melawan oportunisme „kiri” dan kanan ini, kita mesti banjak beladjar dari tulisan² Lenin dan Stalin, dari tulisan² Mao Tje-tung dan Liu Sau-tji, dari tulisan² pemimpin² Komunis lainnja, dari pengalaman² Komunisme internasional dan dari pengalaman² PKI sendiri. Atas dasar ini PKI akan mengatasi kelemahan² ideologi dan organisasi dan PKI akan pasti tumbuh mendjadi kekuatan jang tak terkalahkan, dan mampu serta penuh tanggungdjawab memenuhi kewadajiban dalam perdjungan hebat jang dihadapinja.

Untuk memenuhi tugas ini, kita mesti mengorganisasi waktu kita dan pekerdjaan kita lebih baik. Dan kita bekerdja dengan sepenuh djiwa kita, dengan sepenuh hati dan enersi jang ada pada kita.

Ditulis dengan nama Alamputra

Menempuh Djalan Rakjat adalah pidato jang diutjapkan untuk memperingati ulangtanun ke-32 Partai Komunis Indonesia. Dengan pidato ini kawan Aidit telah membawa Partai keluar dari kurungan sektarisme jang pada saat itu masih banjak menghambat perkembangan PKI. Ditegaskan bahwa persatuan nasional jang se-luas²nja merupakan kebutuhan objektif Indonesia dalam perdjungannya untuk Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis. Dalam tulisan ini djuga dikekukakan tentang kemungkinan mengubah DPR dan badan² negara lainnja sesuai dengan keinginan Rakjat.

Pada waktu itu telah terbentuk Pemerintah Wilopo, jaitu pemerintah jang Perdana Menteri² seorang PNI. Dibanding dengan kabinet² sebelumnja jang terbentuk setelah tahun 1948, maka Kabinet Wilopo adalah pemerintah pertama jang sedikit atau banjak mengandung unsur madju. PKI telah menjokong kabinet ini selama ia mendjalankan politik jang menguntungkan perdjungan Rakjat. Sikap PKI jang demikian setjara positif menjebabkan kekuatan kepalabatu mulai semakin terpen²til dan terpukul, sedangkan kekuatan tengah dan progresif mulai semakin bersatu dan berkembang.

Pidato ini menekankan djuga pentingnja perdjungan melawan kaum oportunis, melawan kaum sosialis kanan dan golongan² lain jang mengaku diri Marxis, tetapi jang dalam tindakannya memusuhi buruh. Djuga dikupas hubungan internasionalisme proletar dengan patriotisme sedjati, jang mendjadi pegangan setiap orang Komunis.

Dokumen ini mempunyai peranan penting dalam mengembangkan PKI mendjadi Partai besar dan tersebar luas diseluruh kepulauan dan dikalangan semua sukubangsa dinegeri kita.

MENEMPUH DJALAN RAKJAT

Per-tama², atas nama Politbiro CC PKI, saja mengutjapkan terimakasih kepada saudara² jang sudah sudi datang dalam malam peringatan ulangtahun PKI jang ke-32 ini.

Kepada wakil kaum buruh, wakil kaum tani, kaum terpeladjar dan orang-orang terkemuka jang revolusioner dan progresif, PKI menjampaiakan salutnja, berhubung dengan keuletan dan keperwiraan dari golongan² Rakjat jang saudara² wakili dalam perdjuaangan untuk mentjapai Indonesia baru, untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang sedjati, demokrasi dan perdamaian abadi.

Sebagaimana saudara² sudah mengetahui, pada tanggal 23 Mei tahun ini PKI berumur genap 32 tahun. Bagi dunia kepartaian ditanahair kita ini, umur 32 tahun termasuk umur jang tinggi. Banjak partai atau organisasi politik jang berdiri sebelum dan sesudah PKI didirikan, tetapi ia hanja berumur beberapa tahun dan kemudian lenjap. Djadi teranglah, bahwa untuk mentjapai usia 32 tahun, PKI mesti mempunyai dasar jang sangat kuat dan keuletan jang luarbiasa.

Arti Pembentukan PKI 32 Tahun Jang Lalu

Beberapa hari jang lalu, jaitu tanggal 20 Mei (1), kita habis merajakan Hari Kebangunan Nasional kita jang ke-44. Kita masing² mengerti akan arti jang dalam daripada tanggal 20 Mei tahun 1908, jaitu detik sedjarah jang sangat penting dalam perkembangan perdjuaangan Rakjat Indonesia menudju kemerdekaan nasionalnja. Tiap orang Komunis sedar benar akan besarnja arti daripada hari 20 Mei. Tanpa permulaan jang dipelopori oleh almarhum *Dr. Wahidin Sudiro Husodo* (1857-1917) 44 tahun jang lalu, perkembangan perdjuaangan Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional jang sedjati, untuk demokrasi dan perdamaian dunia, tidak akan setjepat sekarang.

Sedjak tahun 1908, usaha² dari putera² Indonesia untuk mendapatkan teori² dan bentuk² organisasi perdjuaangan jang mampu membebaskan Indonesia dan Rakjatnja dari pendjadjahan Belanda, makin lama makin njata dan mendapatkan bentuk² jang terang. Pada permulaannja usaha terutama ditudjukan pada beladjar sebanjak²nja dari buku² dan guru² orang Barat. Disamping organisasi Budi Utomo, Dr. Wahidin mendirikan dana-dana peladjar, diantaranya terkenal dengan nama „Darma Wara”. Pemuda² jang tjakap tapi tidak mampu, banjak jang dikirim ke Eropa untuk menuntut peladjaran dari orang² Barat. Diluar usaha Dr. Wahidin ini masih banjak lagi peladjar Indonesia jang pergi ke Eropa. Diantara pemuda² peladjar ini termasuk almarhum *Dr. Rivai* (1871-1933), dan ia adalah pionir dalam meretas djalan beladjar ke Barat. Dr. Rivai adalah bukti jang se-njata²nja, bahwa intelek Indonesia dapat merenangi ilmu pengetahuan jang diadjarkan di Amsterdam, Berlin, Cambridge dan Paris.

Tetapi ternjata, bahwa dalam berorientasi ke Barat, dalam mengambil orang² Barat, terutama Belanda, sebagai guru dan teladan dalam usaha mentjapai persamaan deradjat dengan bangsa² lain didunia, orang² Barat tidak memberikan peladjaran dan tjontoh² jang baik. Mereka mengadjarkan demokrasi kepada kaum terpeladjar Indonesia, tetapi kepada Rakjat Indonesia mereka memaksakan otokrasi kolonialisme. Mereka mengadjar kaum terpeladjar Indonesia tentang revolusi² dan tentang keperwiraan bangsa² Barat dalam perdjuaangan untuk kemerdekaan tanahairnja. Sebaliknya, orang² Indonesia tidak hanja tidak dibantu dalam mewujudkan apa jang mereka peladjar dari Barat, tetapi mereka dilarang mempraktekkannja. Ja, malahan mengutjapkan dan menulis perkataan „revolusi” dan „merdeka” mereka tidak dibolehkan.

Segera dirasakan oleh kaum terpeladjar Indonesia, bahwa teori² jang mereka terima, tidak tjotjok dengan praktek orang² Barat di Indonesia. Orang² Barat menghina dan memusuhi murid²nja sendiri. Ini menimbulkan perlawanan² jang sengit dari kaum terpeladjar Indonesia, dan perlawanan² ini disambut baik oleh Rakjat banjak, jang lebih terhina dan lebih tertindas lagi.

Salahsatu bentuk perlawanan jalah dengan mendirikan „Ko-

mite Bumiputera" pada tanggal 12 Djuli 1913, dibawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjiptomangunkusumo (meninggal tahun 1943) dan kawan²nja, jang bertudjuan untuk menghantam beleid pemerintah Hindia Belanda jang dengan perbuatan²nja merendahkan dan menghina bangsa Indonesia (2).

Tulisan Ki Hadjar Dewantara „*Als Ik Een Nederlander Was*” („*Seandainya Saja Seorang Belanda*”), adalah suatu protes jang hebat terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Perlawanan jang sengit djuga nampak dari buahpena² Dr. Rivai jang tadjam dan djitu.

Tetapi perlawanan diatas belum dipimpin oleh suatu teori jang tepat dan belum diikuti oleh massa Rakjat jang banjak dan terorganisasi. Perlawanan² ini tentu mempunyai arti jang besar dalam menggugah semangat perlawanan Rakjat terhadap kolonialisme Belanda dan terhadap imperialisme pada umumnya, tetapi ia akan mudah dipatahkan karena tidak dipimpin oleh teori revolusioner dan tidak ada Rakjat banjak jang terorganisasi jang mendukungnja.

Meletusnja Revolusi Sosialis Oktober tahun 1917 di Rusia dan menanganja revolusi ini, memberi inspirasi, kesedaran dan pandangan baru pada Rakjat Indonesia, terutama pada kaum buruh dan pada sebagian kaum intelektual Indonesia. Revolusi Sosialis Oktober sangat mempengaruhi ISDV (3) jang sudah didirikan pada tahun 1914, dimana didalamnya tergabung intelektual² Indonesia dan Belanda. *Revolusi Oktober tidak hanya merupakan suluh dan harapan bagi nasion² jang terdjadjah, tetapi ia djuga memberikan peladjaran kepada mereka tentang lahirnja suatu Partai tipe baru, jaitu bentuk tertinggi daripada organisasi klas dari proletariat jang bersendjatakan Marxisme-Leninisme, jang mempunyai anggota dari klas pekerdja jang paling sadar, jang mempunyai disiplin badja jang sangat kuat, jang memakai metode selfkritik dan jang berhubungan erat dengan massa. Partai ini adalah partainya Lenin, Partai Komunis.*

Berdasarkan pengalaman, peladjaran dan kesedaran inilah, atas inisiatif pemimpin² revolusioner ketika itu, pada tanggal 23 Mei tahun 1920 ISDV dilebur mendjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Anggota pengurus jang pertama terdiri dari Semaun

(ketua), Darsono (wakil ketua; sekarang sudah mengchianati PKI dan perdjuaan Rakjat), Bergsma (penulis), Dekker (bendahari), Baars, Stam, Dengah, Sugono, dll. Pada achir bulan Desember tahun itu djuga, PKI menggabungkan diri pada Komunis Internasionale (Komintern).

Djadi teranglah, bahwa tanggal 23 Mei tahun 1920 mempunyai arti jang sangat penting dalam perdjuaan Rakjat Indonesia, terutama dalam usaha mentjari teori revolusioner dan Partai revolusioner jang mampu untuk memimpin perdjuaan guna menggulingkan kekuasaan imperialisme di Indonesia. Sudah selajaknja proletariat Indonesia dan Rakjat Indonesia berterimakasih kepada proletariat Rusia dan kepada Partai Bolsjewik, karena sesudah proletariat Rusia berhasil menggempur benteng reaksi pada tahun 1917, barulah Rakjat Indonesia mendjadi terbuka matanja, *bahwa imperialisme hanya bisa digulingkan dengan kekerasan, dengan revolusi, dan ia harus dipimpin oleh suatu Partai klas proletar jang berpedoman pada teori Marxisme-Leninisme.*

Berdirinja PKI 32 tahun jang lalu tidak hanya penting bagi kaum Komunis dan klas buruh Indonesia sadja, tetapi ia mempunyai arti nasional jang besar dan adalah hari penting dalam sedjarah Kebangunan Bangsa Indonesia jang sudah dimulai pada tahun 1908. Sudah selajaknja PKI berbangga dan bergembira hati merajakan hari ulangtahunnja jang ke-32, karena ini berarti bahwa dari 44 tahun Kebangunan Nasional, PKI ambil bagian jang terpenting selama 32 tahun. Dan djika PKI bisa hidup 32 tahun dalam serangan² taufan kolonialisme dan fasisme, maka sekarang djuga sudah dapat kita pastikan, bahwa PKI akan bisa hidup seterusnya dan akan mentjapai tudjuannja, jaitu *hilangnja penindasan atas manusia oleh manusia dan terlaksanaja perdamaian dunia jang abadi.* Dan ini adalah kejakinan jang bulat daripada tiap² Komunis Indonesia.

PKI Dengan Partai² Lain

Dalam masjarakat jang ber-klas² dan masjarakat dimana sedikit atau banjak ada kesempatan untuk tumbuhnja partai², maka tidak boleh tidak dalam masjarakat demikian mesti terdapat ber-

matjam² partai. Tiap² klas membikin partainya sendiri sebagai organisasi politiknya. Dan sering kejadian bahwa suatu klas terbagi lagi dalam golongan² dan tiap golongan membentuk partai politiknya sendiri.

PKI berpendapat bahwa adanya ber-matjam² partai di Indonesia adalah sewajarnya, karena masyarakat Indonesia masih terbagi dalam klas² dan sedikit atau banyak perkembangan dari partai² itu dijamin oleh Undang² Dasar. Jang harus diusahakan ialah penjederhanaan daripada partai² jang ada sekarang, karena menurut buku „*Kepartaian di Indonesia*“, keluaran Kementerian Penerangan RI tahun 1951, di Indonesia ada 27 Partai. Ini terlalu banyak. Dan belum lagi dihitung partai² jang belum masuk buku resmi pemerintah tsb. Banyak diantara partai² jang ada itu mempunyai dasar dan tujuan jang sama atau hampir sama. Partai-partai demikian sudah selajaknya mempersatukan diri, dan perkembangan daripada sedjarah memang akan mempersatukan mereka.

PKI tidak akan mentjampuri soal² intern daripada partai² lain, walau untuk mempersatukannya sekalipun. Itu adalah soal daripada partai² jang bersangkutan sendiri. Kewajiban PKI ialah mengajak partai² apa saja jang sedia dan djudjur untuk bekerjasama dengan PKI guna menggalang front persatuan nasional dan front² persatuan diberbagai kalangan, dikalangan kaum buruh, kaum tani, kaum terpeladjar, kaum pentjinta dan ahli kebudayaan, kaum wanita, pemuda, pengusaha, dll.

Berusaha membentuk front persatuan nasional atau front² persatuan disegala lapangan antara anggota² dan pengikut² PKI dengan anggota² dan pengikut² partai lain, samasekali tidak berarti PKI akan membiarkan atau tidak mengkritik fikiran² jang salah dan politik jang keliru dari anggota², fungsionaris² bawahan dan pemimpin² atasan dari partai² itu. Kerdjasama jang sehat ialah kerdjasama jang disertai saling kritik setjara persaudaraan, atau sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Dasar Badan Permusjawaratan Partai² (BPP)⁽⁴⁾, kerdjasama jang „dilakukan atas dasar persaudaraan jang ichlas“. Barulah dengan demikian PKI bisa berguna bagi anggota² dan fungsionaris² bawahan daripada partai² lain. Dan hanya dengan bekerdja demikian, PKI

akan mendapat bantuan anggota² dan fungsionaris² bawahan jang djudjur dari partai-partai lain dalam menggalang front persatuan nasional.

Dan memang banyak bukti menundjukkan, bahwa kepentingan beberapa pemimpin atasan dari banyak partai, langsung bertentangan dengan kepentingan² anggota²nja dan fungsionaris² bawahannya. Sebagai tjontoh, banyak perdjandjian² dan persetudjuan², termasuk KMB, Embargo, Frisco, MSA (5) jang langsung merugikan seluruh Rakjat Indonesia, termasuk anggota² daripada partai² jang duduk didalam pemerintahan. Dengan tidak dirunding jang matang dengan anggota²nja, atau se-kurang²nja didengar pendapatnja, berbagai partai menerima ikatan² luarnegeri tersebut. Sebagai tjontoh lagi, kerdjasama antara berbagai partai, misalnja dalam BPP dan dalam mewujudkan Pernyataan Bersama pada Hari Kebangunan Nasional 20 Mei 1952, disambut dengan baik dan hangat oleh anggota² dan fungsionaris² bawahan dari semua partai. Tetapi ada saja pemimpin² atasan dari berbagai partai jang menekan keinginan jang sewajarnya dari anggota² dan fungsionaris² bawahannya. Sebuah tjontoh lagi, pemimpin Partai Buruh jang duduk dalam pemerintahan, jang mati²an memusuhi vaksentral SOBSI dan setjara tidak tepat mengaku mendjadi wakil kaum buruh, ia membikin peraturan², termasuk Undang² Darurat No. 16 Tedjasukmana (6), jang mendjerat batangleher kaum buruh. Peraturan² ini bertentangan langsung dengan kepentingan² kaum buruh, termasuk anggota-anggota Partai Buruh, jang karena belum mengertinja memasuki partai tersebut. Dalam terus mengusahakan adanya kerdjasama dengan partai² lain, PKI tidak akan membiarkan keadaan pintjang ini berdjalan terus, dan akan mengadakan kritik² jang ditudjukan kepada mereka jang bertanggungjawab.

PKI Dengan Partai² Jang Mengaku Mempunyai Dasar Sama Dengan PKI, Jaitu Dasar Marxisme

Sedjak tahun 1920, jaitu tahun didirikannya PKI, perkataan Marxisme dan sosialisme telah mendjadi sangat populer dikalangan klas buruh dan Rakjat Indonesia. Sedjak itu tiap² Partai jang

mau mendapat pengaruh dikalangan Rakjat mesti mentjantumkan sosialisme sebagai tudjuannja, atau mentjantumkan perkataan lain, jang dalam pendjelasannja dimaksudkan sosialisme. Sedjak PKI didirikan, tiap² perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ditjap sebagai perlawanan „komunis”, walaupun jang berbuat mungkin hanya segolongan intelektuil atau serombongan orang² jang fanatik. Demikianlah, orang² seperti Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjiptomangunkusumo, Douwes Dekker, Tjokroaminoto, ja, djuga Sukarno dan Hatta pernah ditjap oleh Belanda sebagai „komunis”.

Sesudah PKI dinjatakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai partai jang tidak sah, jaitu sesudah mengalami kegagalan pemberontakan tahun 1926 jang perwira itu, partai kaum nasionalis revolusioner jang didirikan kemudian, seperti P.N.I., Partindo dan Gerindo, dengan segala kekurangannja pada waktu itu, mengadjarkan Marxisme pada pengikut²nja. Djuga partai² ini dan anggota² serta pengikut²nja ditjap oleh Belanda sebagai komunis. Mereka ditangkap, dipendjarakan atau dikirim ketanah pembuangan.

Sekarang ini sudah tidak ada lagi satu Partai jang bisa menarik Rakjat banjak, djika tidak mentjantumkan sosialisme atau perkataan lain, misalnja „keadilan sosial”, sebagai tudjuannja. Diantaranja ada jang mentjantumkan Marxisme sebagai dasarnya. Dan belakangan ini ada pula jang menepuk dada, bahwa ia, pentjipta dari peraturan² jang mendjerat leher kaum buruh, adalah „pengikut Marx dan Lenin”. Dan setjara menghina mereka memasang gambar² Marx, Engels dan Lenin sebagai reklame partainya. Keadayaan begini, pemalsuan setjara terang²an begini, sudah digambarkan oleh Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan: „*Dialektika sedjarah adalah demikian rupa sehingga kemenangan teoritis Marxisme memaksa musuh²nja menjamar sebagai kaum Marxis*” (7). Tidak hanya tuan Tedjasukmana di Indonesia, tetapi djuga Hitler dan Mussolini menamakan dirinja sosialis. Tidak hanya kaum trotskis di Indonesia, tetapi djuga Tito, Clementis dan Slansky menamakan dirinja komunis.

Apakah arti semuanja ini? Ini artinja, bahwa disamping perkataan dan pengertian sosialisme makin banjak dikenal dan makin

dalam difahamkan oleh Rakjat Indonesia, ia djuga makin lama makin banjak dipergunakan setjara tidak tepat dan mentertawakan. Ini menundjukkan bahwa djuga di Indonesia Marxisme sudah mentjapai kemenangan² teoritis, sehingga musuh² Marxisme dan musuh² kemanusiaan jang paling berbahaja, terpaksa menjelubungi dirinja sebagai Marxis-Leninis, ja, ada djuga jang menamakan dirinja komunis, untuk menutupi segala matjam pengchianatannja terhadap klas buruh dan terhadap Rakjat. Mereka berbuat seperti Hitler dan Mussolini, seperti Attlee, Drees, dan djuga Clementis, hanya dan se-mata² untuk menutupi sifat² fasisnja jang kedjam dan biadab. Dengan menjebut dirinja Marxis dan sosialis, mereka mengebiri Marxisme atau sosialisme-ilmu.

Apakah kewadajiban kaum Komunis terhadap tukang² palsu dan tukang² kebiri ini? Apakah sikap kaum Komunis terhadap pemimpin² sosialis kanan, jaitu orang² jang mengaku dirinja sosialis tetapi jang menghambakan dirinja pada kepentingan politik imperialis? Tiap² Komunis, tiap² pemimpin buruh dan pemimpin Rakjat jang djudjur, wadajib melakukan perdjjuangan jang sengit terhadap pemalsuan² jang dilakukan oleh pemimpin² sosialis kanan. PKI didirikan 32 tahun jang lalu djustru dengan maksud supaja PKI mendjadi suatu Partai jang bebas dari penjakit² oportunisme; jaitu penjakit dari Internasionale ke-II, dan supaja PKI berdjjuang sengit melawan tiap-tiap oportunisme didalam dan diluar Partai, seperti jang diadjarkan oleh Lenin dan Partainya.

Kaum Komunis jakin, bahwa perdjjuangan untuk mempersatukan klas buruh hanya mungkin berhasil apabila kaum sosialis kanan, jang bertanggungdjawab atas terpetjahnja klas buruh, sudah tidak dipertjajai lagi dan sudah ditendang oleh kaum buruh. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Lenin tentang perdjjuangan terhadap kaum sosialis kanan dalam serikatburuh: „*Perdjjuangan ini harus dilakukan dengan tidak mengenal ampun, dan ia harus didjalankan tidak boleh tidak sampai pada titik dimana semua pemimpin oportunisme dan sosial-sovinisme jang sudah tidak bisa diperbaiki lagi mendjadi diskredit samasekali dan diusir dari serikatburuh*” (8).

Dalam gerakan buruh Indonesia sudah banjak bukti, bahwa kaum sosialis kanan adalah pemetjah gerakan buruh. Mereka ada-

lah agen² madjikan jang menempatkan dirinja di-tengah² kaum buruh. Perpetjahan dikalangan kaum buruh perkebunan, buruh gula, buruh textil, buruh minjak, buruh penerbangan, dll. adalah hasil daripada pekerdjaan pemalsu² Marxisme, jaitu madjikan² daripada Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh dan pengikut² trotskis Tan Malaka dengan SOBRI-nja (9).

Tiap² Marxis, dimanapun ia berada diseluruh dunia ini, adalah pedjuang perdamaian dan demokrasi serta penggalang front persatuan jang terbaik. Adakah mereka, orang² jang mengaku Marxis dari Partai Sosialis Indonesia, atau orang² jang mengaku Marxis dan Leninis dari Partai Buruh, berbuat demikian? Tidak, samasekali tidak.

Kaum sosialis kanan bukan hanja tidak aktif memperkuat gerakan perdamaian dunia, tetapi mereka mentjemoohkan gerakan perdamaian, dan politik mereka se-hari² praktis mendjadi embel² dari politik perang Amerika. Dengan melewati kongres² dan konferensi² sosialis internasional, dan dengan melewati saluran ICF-TU (10), jang ke-dua²nja adalah instrumen Kementerian Luar Negeri Amerika, mereka menghubungkan aktivitetnja dengan aktivitet reaksioner diseluruh dunia, terutama aktivitet untuk menimbulkan perang dunia jang baru.

Mereka bukan hanja tidak membela demokrasi dengan sunguh², tetapi mereka ambil bagian aktif dalam usaha² memfasiskan sistim negara Indonesia. Ketika Provokasi Agustus (1951)⁽¹¹⁾ sedang mengamuk, tuan Tedjasukmana dari Partai Buruh dan pemimpin² PSI memainkan rol jang sangat penting dalam menghantjurkan gerakan buruh. Dengan sangat bernafsu tuan Tedjasukmana dari Partai Buruh, dan pemimpin² sosialis kanan dari PSI, menerkam kesempatan itu sebagai saat jang baik baginja untuk mengharu-biru dan menghantjurkan gerakan buruh serta menghantjurkan Partai Komunis Indonesia. Mereka mengobrak-abrik front persatuan nasional, mereka melakukan intimidasi² supaja orang² progresif mendjauhi Partai Komunis Indonesia.

Kaum sosialis kanan bukan hanja tidak aktif menggalang front persatuan nasional, sebagai djaminan jang terpenting untuk melepaskan Indonesia dari pendjadjahan Belanda dan Amerika, untuk menjelamatkan kemanusiaan dari perang dunia dan dari keseng-

saraan, tetapi mereka malah mentjemoohkan tiap² usaha jang bermaksud menghimpun tenaga nasional dan memperkuat front persatuan. Mereka mengisolasi dirinja dalam lingkungannja sendiri jang ketjil serta aktif merintang terwujudnja persatuan nasional. Mereka tidak memperkuat Badan Permusjawaratan Partai² dan mereka tidak menandatangani Pernyataan Bersama pada Hari Kebangunan Nasional 20 Mei 1952. Apakah bedanja mereka, pemimpin² sosialis kanan, dengan pemimpin² Partai Masjumi dan pemimpin² partai konservatif lainnja? Pada hakekatnja, mereka adalah setali tiga uang.

Kenjataan jang nampak sekarang, bahwa kaum sosialis kanan mulai lebih bergiat, harus mendjadi perhatian tiap² Komunis, tiap² pemimpin buruh dan pemimpin Rakjat jang djudjur. Bukti diseluruh dunia sudah tjukup banjak jang menjatakan, bahwa kaum sosialis kanan adalah pembantu imperialis Amerika dalam memetjah gerakan buruh, dalam mendjadjah Rakjat² jang belum merdeka dan dalam mempersiapkan perang dunia jang baru. Dalam persiapan perangnja, imperialis Amerika tidak tjukup hanja menguasai ekonomi dan pemerintah negeri² lain, tetapi ia djuga berusaha memasuki gerakan² buruh negeri² itu, dan dengan demikian ia mentjoba membikin lumpuh gerakan buruh dengan djalan mengadakan korupsi dalam serikatburuh, menimbulkan kekatjauan² dan perpetjahan. Untuk ini kaum sosialis kanan adalah pembantu imperialis Amerika jang nomor wahid.

Djadi djelaslah, bahwa perdjjuangan untuk perdamaian, untuk demokrasi, untuk kemerdekaan nasional dan sosialisme, tidak mungkin berhasil djika perdjjuangan ini tidak disertai dengan perdjjuangan jang sengit melawan kaum sosialis kanan atau kaum oportunist pada umumnja, jang memalsu dan mengebiri Marxisme. Atau sebagaimana pernah dikatakan oleh Lenin: *„perdjjuangan melawan imperialisme adalah suatu kepura-puraan dan omongkosong belaka djika tidak dihubungkan se-erat²nja dengan perdjjuangan melawan oportunisme”* (12).

Tetapi kaum Komunis akan melakukan kekeliruan jang sangat besar djika tidak membikin perbedaan antara anggota² dan fungsionaris² bawahan dengan semua atau beberapa pemimpin² atasan dari partai² burdjuis. Kaum Komunis harus memperhatikan ke-

njataan, bahwa anggota² dan fungsionaris² bawahan daripada partai² ini pada umumnja adalah demokratis dan progresif, dan tidak mempunyai tudjuan² tersembunji seperti pemimpin² atasan-nja. Dan dikalangan pemimpin² atasan sendiri sering ada pertentangan² jang tempo² tadjam dan tempo² kurang tadjam. Dan mereka sering berebutan djika ada „keuntungan”, jang berupa uang atau kedudukan.

Oleh karena itulah tiap² Komunis harus dengan ulet dan tidak henti²nja mengadjak anggota² dan fungsionaris² bawahan dari Partai Sosialis Indonesia, dari Partai Buruh, dari Partai Murba, dan partai² lainnja, untuk membentuk front persatuan nasional atau front² persatuan di-pabrik², di-desa² atau dimana sadja ada kemungkinan. Dan sekali lagi didjelaskan, bahwa berusaha membentuk front persatuan antara anggota² dan pengikut² PKI dengan anggota² dan pengikut² Partai lain, samasekali tidak berarti PKI akan membiarkan atau tidak mengkritik fikiran² jang salah dan politik jang keliru dari anggota², fungsionaris² bawahan dan pemimpin² atasan dari partai² tersebut. Difihak lain, PKI djuga minta dikritik oleh partai² lain.

Persatuan klas buruh dan persatuan seluruh Rakjat hanja dapat tertjapai dengan perdjjuangan jang terus-menerus, jang ulet dan jang bidjaksana. Disatu fihak kaum Komunis harus mengadakan perdjjuangan² jang sengit dan penelandjangan² jang tidak setengah² terhadap pemimpin² sosialis kanan jang ngotot, dan difihak lain dengan tidak henti²nja berusaha mejakinkan anggota² dan fungsionaris-fungsionaris bawahan dari partai-partai lain akan keperluan adanya front persatuan nasional dan front² persatuan dikalangan kaum buruh, kaum tani, kaum terpeladjar, ahli-ahli kebudayaan, kaum wanita, pemuda, dsb. Dengan demikian ini, PKI akan berdjasa dalam menundjukkan kepada kaum buruh dan Rakjat, siapakah sosialis jang sesungguhnya dan siapakah musuh dari sosialisme-ilmu. Dengan demikian PKI akan mendorong pemimpin² jang djudjur dari partai² lain untuk berbuat djudjur seterusnja, dan akan mendorong pemimpin² jang ragu untuk menghilangkan ke-ragu²annja dan segera menempuh djalan jang benar. Djelas, bahwa kaum Komunis samasekali tidak memusuhi ang-

gota² Partai lain, tetapi sebaliknya mengadjak mendjalankan pengabdian jang sungguh² pada kepentingan Rakjat.

PKI Dengan Demokrasi

Musuh-musuh Rakjat sering mengatakan, bahwa kaum Komunis mau menghapuskan demokrasi dan mau mendirikan diktatur perseorangan atau diktatur Partai. Ini adalah bohong, dan adalah fitnahan dari orang² jang sudah kehilangan akal dalam menjegah kemandjuaan sosialisme dan demokrasi. Dari fitnahan ini dengan sendirinja orang bisa menarik kesimpulan jang keliru samasekali dari apa jang sebetulnja diinginkan oleh PKI.

Djika dikatakan bahwa PKI menghendaki diktatur daripada Rakjat atas musuh² Rakjat, maka inilah jang benar dan inilah jang dikehendaki oleh PKI. Bukan diktatur perseorangan, bukan diktatur Partai dan bukan diktatur golongan ketjil atas golongan besar. Diktatur atau kekuasaan jang dikehendaki PKI ialah diktatur atau kekuasaan oleh lebih dari 90% penduduk atas penduduk jang kurang dari 10%. Jang kurang dari 10% ini ialah kaum reaksioner jang terdiri dari kaum kapitalis besar asing, kaum tuantanah besar dan kaum komprador atau agen² imperialis jang terdiri dari orang² asing maupun orang² Indonesia sendiri. Kenapa PKI menghendaki diktatur Rakjat Indonesia atas musuh² Rakjat?

Pengalaman perdjjuangan Rakjat Indonesia selama 44 tahun, jaitu sedjak tahun 1908, mengadjarkan supaja Rakjat Indonesia melakukan diktatur atas musuh²nja. Hak berbitjara dari musuh² Rakjat, dari kaum reaksioner, jaitu kaum imperialis, tuantanah² besar dan agen²nja jang terdiri dari orang² asing maupun orang² Indonesia sendiri, harus dihapuskan. Hanja Rakjat, jaitu kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional jang mempunyai hak berbitjara. Dalam kategori Rakjat djuga termasuk kaum intelektual dan ahli² kebudayaan jang mengabdikan kepentingan Rakjat. Sistim demokrasi jang dikehendaki oleh PKI ialah sistim demokrasi jang dilaksanakan diantara Rakjat; kepada Rakjat diberikan hak berbitjara, hak bersidang dan berkumpul. Hak memilih hanja diberikan kepada Rakjat dan tidak diberikan kepada kaum reaksioner. Djika digabungkan ke-dua²nja ini, jaitu diktatur

terhadap kaum reaksioner dan demokrasi bagi Rakjat, maka mendjadilah ia diktatur daripada demokrasi Rakjat, atau singkatnja: diktatur demokrasi Rakjat.

Ada orang berkata: „Kalau begitu PKI sangat kasar, PKI berbuat provokatif dan menjinggung perasaan mereka yang bersangkutan. Kalau begitu kaum reaksioner akan marah besar dan akan menghantjurkan PKI”. Memang benar, bahwa tiap² perbuatan PKI adalah kasar bagi kaum reaksioner, menjinggung perasaan mereka dan membikin marah mereka. Tetapi terhadap Rakjat sikap dan perbuatan PKI adalah baik. PKI tidak pernah kasar terhadap Rakjat dan tidak pernah menjinggung perasaan Rakjat. PKI berbuat kasar atau tidak kasar, menjinggung perasaan atau tidak menjinggung perasaan, kaum reaksioner tetap marah besar dan tetap mau menghantjurkan PKI dan perjuangannya Rakjat Indonesia. Kemarahan kaum reaksioner bisa diatasi, tidak dengan bermanis-manis dan ber-tjumbu²an dengan mereka, tetapi dengan mengalahkan mereka. Dan yang bisa mengalahkan mereka hanyalah Rakjat, dan oleh karena itu Rakjat wajib mengetahui bahwa kaum reaksioner adalah musuh Rakjat, dan kaum reaksioner hanya bisa ditindas untuk se-lama²nja dengan diktatur daripada demokrasi Rakjat. Diktatur demokrasi Rakjat tidak ditunjukkan kepada perseorangan, tetapi ditunjukkan kepada kaum reaksioner serta agen²nja yang berada diluar dan didalam negeri.

Djadi teranglah, bahwa omongan dari musuh-musuh Rakjat, yang mengatakan PKI mau mendirikan diktatur perseorangan atau diktatur Partai adalah fitnahan se-mata². Dalam pernyataan PKI bulan Maret 1951 dijelaskan, bahwa PKI menghendaki adanya pemerintahan koalisi⁽¹³⁾ di Indonesia, jaitu pemerintahan yang terdiri dari partai², golongan² dan orang² tak-berpartai yang demokratis. „Dengan pemerintahan koalisi ini”, demikian pernyataan itu selanjutnja, „kita mengachiri diktatur satu atau beberapa partai dan menjalankan pemerintahan yang demokratis”. Pengalaman Rakjat Indonesia tahun yang lalu membuktikan, bahwa diktatur daripada satu atau beberapa partai, telah menimbulkan bentjana yang sangat besar dengan didjalankannya Provokasi Agustus oleh pemerintah Sukiman-Wibisono-Subardjo.

Penting djuga disini disebutkan, bagaimana sikap PKI ter-

hadap agama didalam pemerintahan demokrasi Rakjat. Dalam Program Umum PKI dijelaskan, bahwa Republik Demokrasi Rakjat yang ditudju oleh PKI ialah republik yang mendjamin kebebasan beragama. Yang ditentang oleh PKI ialah tiap² usaha imperialis yang mempergunakan agama untuk memetjahbelah persatuan nasional, seperti yang sudah ber-puluh² tahun dilakukan oleh van der Plas dan agen²nja di Indonesia sampai saat ini. Atas dasar pendirian ini pula, dan sesuai dengan pendirian berbagai golongan agama di Indonesia, PKI tidak menjetudju adanya dominasi agama yang satu atas agama yang lain.

PKI Dengan Kaum Pengusaha Nasional Dan Kaum Tani Sedang

Ada pemimpin² partai politik yang menjatakan keheranannya mengapa PKI sekarang tidak bermaksud melikwidasi kaum pengusaha nasional (burduasi nasional). Bukankah, menurut orang² itu, kaum pengusaha nasional djuga kapitalis dan djika dibiarkan mereka akan mendjadi kapitalis² monopoli dan akan sama berbahajanya dengan kapitalis monopoli asing? Oleh karena itu kita tidak boleh memberi kesempatan hidup pada mereka dan mulai sekarang djuga mereka harus kita tinas.

Fikiran² diatas adalah fikiran² yang sangat berbahaja, fikiran yang tidak berdasarkan kenyataan dan fikiran kaum pengetjut. Karena mereka, kaum pengetjut itu, tidak mampu atau tidak mau memukul modal monopoli asing, nafsu mereka mau mereka lampiaskan untuk menghantjurkan pengusaha² nasional yang lemah dan tidak berdaja karena persaingannya dengan modal monopoli asing. Mereka membikin kawan mendjadi lawan, dan tidak ada perbuatan yang lebih bodoh daripada itu. Kaum pengusaha nasional dirugikan oleh imperialisme. Lihatlah misalnja betapa hebatnja mereka dirugikan oleh politik embargo dan politik keuangan pemerintah Indonesia yang dikendalikan oleh imperialis Amerika dan Belanda. Oleh karena itu mereka harus mendjadi kekuatan front persatuan melawan imperialisme. Program PKI sekarang, jaitu program demokrasi Rakjat, samasekali tidak bermaksud melikwidasi mereka dengan djalan menasionalisasi perusahaan² mereka.

Malah program demokrasi Rakjat mau memberi kedudukan jang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masjarakat, sebagai sjarat menudju masjarakat sosialis. Djustru program demokrasi Rakjat bertudjuan mempertahankan hakmilik perseorangan dari pengusaha² nasional. Djadi adalah bertentangan samasekali dengan keterangan² kaum reaksioner jang mengatakan, bahwa PKI menghendaki hapusnja hakmilik perseorangan sehingga tiap² orang tidak boleh mempunjai apa² lagi. Tetapi apakah jang benar? Jang benar jalah, bahwa djustru imperialisme lah jang terus-menerus melikwidasi kaum pengusaha nasional, agar dengan demikian mereka bisa memusatkan atau memonopoli seluruh kehidupan ekonomi didalam tangan kliknja sendiri.

Djuga terhadap kaum tani sedang, program demokrasi Rakjat tidak bermaksud melikwidasi mereka. Dalam Program Agraria PKI diterangkan, bahwa maksud jang pokok dalam perubahan tanah jalah menghapuskan tanah tuantanah besar, untuk mewujudkan masjarakat tani merdeka atau tani sedang, sebagai sjarat penting untuk mengembangkan ekonomi nasional jang modern. Tudjuan jang terachir dari perubahan tanah bukanlah hanja menolong Rakjat tani jang miskin dengan memberikan tanah dan alat² bekerdja, karena dengan ini sadja kaum tani tidak akan ter-tolong dari kemiskinan dan kebodohan. Tudjuan jang terachir jalah untuk membebaskan tenaga produktif didesa dari tjengke-raman sistim milik tanah tuantanah, agar dapat mengembangkan produksi pertanian, dan dengan demikian terbukalah djalan untuk industrialisasi, sebagai sjarat untuk menudju sosialisme.

Djadi djuga dilihat dari Program Agraria PKI, adalah berten-tangan sekali dengan keterangan kaum reaksioner jang mengata-kan, bahwa PKI menghendaki hapusnja hakmilik perseorangan sehingga tiap² orang tidak mempunjai apa² lagi. Tetapi apakah jang benar? Jang benar jalah, bahwa kaum tani Indonesia, karena politik imperialis jang didjalankan oleh pemerintah Indonesia, sebagian besar tidak mempunjai tanah atau tidak tjukup mempun-jai tanah untuk dikerdjakan, dan ber-angsur² tanah² jang sudah kurang ini berpindah tangan dari tani miskin dan tani sedang ketangan sedjumlah ketjil lintahdarat. Djadi, djustru dengan politik pemerintah jang reaksioner, hakmilik perseorangan atas tanah

dari kaum tani ketjil dan tani sedang dilikwidasi, dan mereka achirnja hidup lebih sengsara.

PKI Dengan Uni Sovjet Dan Negara² Demokrasi Rakjat

Musuh-musuh Rakjat suka menuduh bahwa PKI adalah „agen Moskow” atau „agen RRT”. Ini adalah tuduhan jang sangat rendah, apalagi djika datangnja dari pemimpin² Partai Sosialis dan Partai Buruh atau partai² lainnja, jang tanpa bantuan politik dan bantuan² lain dari imperialis Amerika tidak bisa memegang rol jang berarti dalam masjarakat. PKI adalah partai jang demo-kritis dan setjara demokratis pula tiap² politik Partai ditentukan oleh PKI *sendiri*, dengan tiada sedikitpun ditjampuri oleh orang luar. Tuduhan bahwa PKI agen negara itu atau negara ini, hanja menundjukkan tjara berfikir pemimpin² partai burdjuis jang kolot jang sudah biasa mendjadi agen dan tengkulak negara asing, ter-utama tengkulak Amerika dan Belanda.

Ada lagi jang mengatakan, bahwa PKI memilih salahsatu fihak, bahwa PKI memihak sosialisme dan demokrasi Rakjat. Ini benar sekali, dan PKI samasekali tidak akan menjangkalnja, ma-lahan akan lebih menjelaskannja. Dalam segala hal PKI memi-hak. Dalam pertentangan antara kolonialisme Belanda dengan bangsa Indonesia, PKI memihak satu fihak, jaitu fihak bangsa Indonesia. Dalam pertentangan antara fasisme Djepang dengan Rakjat Indonesia, PKI memihak satu fihak, jaitu fihak Rakjat Indonesia. Dalam pertentangan antara Rakjat Indonesia dengan imperialis Amerika, PKI memihak satu fihak, jaitu fihak Rakjat Indonesia. Dalam pertentangan antara Rakjat Indonesia dengan pemerintah klik Sukiman, PKI memihak Rakjat Indonesia. Dalam pertentangan antara demokrasi dan fasisme, PKI memihak demo-kripsi. Dalam pertentangan antara Sosialisme dan demokrasi Rakjat disatu fihak dengan imperialisme dunia difihak lain, PKI memihak Sosialisme dan demokrasi Rakjat. Dalam pertentangan antara damai dan perang, PKI memihak satu fihak, jaitu fihak damai. PKI tidak men-tjoba² untuk berada diantara dua pertentangan ini, PKI tidak men-tjoba² untuk duduk diantara dua kursi. PKI tidak

netral dan tidak mentjari djalan ketiga. Netralitet hanjalah kamuflase belaka dan djalan ketiga tidak ada.

Ada orang berkata: „Kalau bersikap demikian kita tidak akan dapat bantuan internasional, dan oleh karena itu kita akan hantjur”. Kita bertanja, bantuan internasional jang mana? Bantuan imperialis Amerika atau Inggeris? Hingga sekarang jang berkuasa di Amerika dan Inggeris ialah kaum imperialis. Apakah mereka mau memberi bantuan pada suatu negeri jang melawan imperialis? Kalau ada negeri asing mau mendjual barang² kepada Indonesia, itu bukanlah bantuan, tetapi perdagangan biasa, karena mereka mau dapat untung. Perdagangan dengan negeri mana sadjapun harus diadakan, asal atas dasar saling menguntungkan dan tidak ada ikatan² politik. PKI menentang usaha² dari negeri imperialis jang membikin diskriminasi dalam perniagaan, dan djuga PKI menentang usaha² jang hendak menghalangi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara sosialis dan demokrasi Rakjat.

Ada lagi orang berkata, bahwa kemenangan Rakjat Indonesia bisa tertjapai tanpa bantuan internasional. Pengalaman revolusi Rakjat Indonesia tahun 1945 - 1948 menundjukkan, bahwa perdjungan Rakjat Indonesia mendapat kekuatan jang sangat hebat dari aksi² dan bantuan² lain dari kaum buruh dan Rakjat Australia, India, Mesir, Amerika, Nederland, dsb. serta bantuan² wakil Ukraina dan Uni Sovjet di PBB. Tanpa bantuan internasional ini, Revolusi Indonesia akan lebih mudah dihantjurkan oleh Amerika, Belanda dan Inggeris. Oleh karena itu, bantuan internasional adalah sangat penting bagi perdjungan Rakjat Indonesia. Dan bantuan internasional jang sungguh² hanya bisa kita dapat dari negara² dan dari Rakjat jang satu tudjuan dengan Rakjat Indonesia, jaitu tudjuan menghantjurkan imperialisme. Negara Amerika, Belanda dan Inggeris jang dikuasai oleh imperialis adalah musuh² Rakjat Indonesia, oleh karena itu kita tidak mungkin mendapat bantuan dari negara² itu.

Keadaan dunia sekarang sudah begitu rupa, sehingga apa² jang terdjadi disatu negeri mesti mempengaruhi keadaan negeri² lain. Uni Sovjet adalah negeri jang pertama, jang dapat membebaskan diri dari sistim imperialisme dunia dan jang dapat membangun sistim sosialis. Bertambah kuatnja Uni Sovjet berarti

bertambah lemahnja kapitalisme di-negeri² lain, dan ini berarti bantuan besar bagi Rakjat diseluruh dunia dalam perdjungan menghantjurkan imperialisme dinegerinja masing².

Oleh karena itulah, PKI berpendirian, bahwa Rakjat Indonesia harus berorientasi ke Uni Sovjet jang sosialis dan bukan berorientasi ke Amerika jang imperialis. Ini tidak berarti, bahwa bentuk negara Uni Sovjet, jaitu sistim Sovjet, mesti diikuti oleh semua negeri, termasuk Indonesia. Samasekali tidak demikian. Sebaliknya, tiap² bangsa akan melalui djalannja sendiri menudju kesosialisme, berdasarkan perkembangan daripada keadaan nasionalnja, keadaan politik, ekonomi dan kebudajaannja. Pengalaman perdjungan Rakjat di Eropa Timur, di Tiongkok, dll. sesudah perang dunia kedua menundjukkan, bahwa klas buruh bisa memenuhi kewadajiban sedjarahnja dalam negara Rakjat jang demokratis, dimana Dewan Perwakilan Rakjat dan badan² negara lainnja diperbarui, artinja diberi isi jang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakjat.

PKI Dengan Kepentingan Nasional Dan Kepentingan Tanahair

Dinegeri kita orang suka mengutip salahsatu utjapan almarhum Presiden Quezon dari Filipina, jang maksudnja supaya kesetiaan kepada partai harus dihentikan dimana kesetiaan pada tanahair dimulai. Utjapan ini mungkin ada gunanja bagi Quezon sendiri dan bagi partai² jang tidak mentjintai tanahair. Bagi PKI sendiri utjapan ini tidak berarti apa² ketjuali menundjukkan bahwa partai presiden Quezon adalah bukan partai jang mengabdikan dan mentjintai tanahair.

Sebagaimana sudah dibuktikan oleh sedjarahnja selama 32 tahun, PKI adalah Partai jang mengabdikan tanahair, mengabdikan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat. Dalam aksi² kaum buruh dan kaum tani, PKI tidak memihak kepentingan² kapitalis asing, tetapi memihak dan mengabdikan kepentingan kaum buruh dan kaum tani jang seluruhnja adalah bangsa Indonesia. Djadi PKI mengabdikan diri pada kepentingan bangsa, kepentingan nasional. PKI menuntut dibatalkannja perdjandjian² KMB, Frisco,

MSA dsb., karena perdjandjian² ini merugikan kepentingan nasional. PKI menentang adanya intervensi Amerika dalam politik negara Indonesia, karena ini melanggar kedaulatan negara Indonesia. Djadi djelaslah, bahwa bukan PKI jang a-nasional, tetapi djustru penuduh² dan musuh² kemanusiaan itulah jang mengurbankan kepentingan nasional untuk kepentingan² pendjadjah dan kapitalis asing.

Bagi kaum Komunis, pengabdian kepada Partai, kepada kepentingan nasional, kepada kepentingan tanahair dan kepada Rakjat adalah satu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnja. Djika seorang Komunis tidak mengabdikan kepentingan nasional, kepentingan tanahair dan kepentingan Rakjat, berartilah bahwa ia tidak mengabdikan kepentingan Partai, dan ia bukan seorang Komunis jang baik. Djika seorang Komunis berhenti mengabdikan kepentingan Partai, maka hilang kemungkinan baginja untuk mengabdikan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat setjara baik. *Bagi seorang Komunis djalan jang se-baik²nja dan jang sempurna²nja untuk mengabdikan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat ialah djalan melalui Partai Komunis.*

Tiap² Komunis adalah patriot, dan djika ada seorang patriot jang bukan Komunis, maka bagi patriot jang demikian itu sewaktu² pintu PKI terbuka untuk menerimanja menjadi anggota.

Ada orang berkata: „Tapi orang Komunis hanya tahu beroposisi sadja terhadap pemerintahnja sendiri”. Ini samasekali tidak benar. Selama tahun 1945 - 1948 Indonesia diperintah oleh pemerintah² jang revolusioner. Dengan pemerintah² ini imperialis Belanda kita lawan. Pada waktu itu PKI adalah pembela jang setia dari pemerintah. Djika di Indonesia ada pemerintah revolusioner lagi, PKI akan berdiri dibarisan paling depan untuk membelanja.

Jang ditentang oleh PKI ialah pemerintah jang tidak mengabdikan kepentingan nasional tetapi malah menghambakan diri pada kepentingan eksploitasi dan kepentingan perang dari negeri² imperialis, terutama imperialis Amerika. Apakah PKI bersedia untuk sewaktu² menghentikan oposisinja djika pemerintah Indonesia tidak lagi menjalankan politik jang merugikan kepentingan nasional dan tidak lagi menghambakan diri pada kepentingan eksploitasi

dan kepentingan perang imperialis? Tentu sadja PKI bersedia. Dalam peringatan hari ulangtahun PKI jang ke-31, djadi bulan Mei tahun jang lalu, PKI sudah menjerukan, bahwa: „PKI sewaktu² bersedia menghentikan oposisinja, asal pemerintah Indonesia dengan djudjur dan sungguh-sungguh mendjalankan politik perdamaian dan mau membatalkan persetudjuan KMB”. Apakah ini tidak menunjukkan kesediaan PKI untuk bekerdja dengan pemerintah Indonesia jang mana sadja, jang mau berdjuaug untuk perdamaian dunia dan untuk melepaskan ikatan negeri² imperialis dalam bentuk apapun? Djuga terhadap kabinet Wilopo, PKI menjatakan kesediaan memberikan sokongannja, asal kabinet ini menjalankan haluan politik baru, jaitu politik jang berdasarkan perdamaian dan demokrasi.

PKI Dengan Perdamaian Dunia

Dunia sekarang diliputi oleh satu pertanjaan vital: perang atau damai. Pertanjaan ini dijawab oleh Kawan Stalin, dalam interviunja dengan wartawan „Pravda” pada permulaan tahun 1951, bahwa „djuga pada waktu sekarang ini perang itu tidak bisa di pandang sebagai tak dapat dielakkan”, dan bahwa „Uni Sovjet akan terus mendjalankan politik menjegah perang dan mempertahankan perdamaian dengan teguh” (14). Keterangan Kawan Stalin ini adalah djawaban jang djitu terhadap tuduhan² jang menjesatkan dari penghasut² perang jang ditudjukan kepada Uni Sovjet.

Musuh² kemanusiaan mengatakan, bahwa Uni Sovjet mau menguasai dunia dengan mengadakan perang. Dan dikatakan lebih landjut, bahwa kaum Komunis di Indonesia jaitu anggota² PKI, adalah alat jang akan membantu Uni Sovjet menaklukkan bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Sovjet.

Memang benar bahwa perang dunia sekarang masih mengantjam dunia. Tetapi perang itu tidak disiapkan oleh Uni Sovjet atau oleh negara² demokrasi Rakjat. Sedjarah membuktikan, bahwa bukan Uni Sovjet jang menjebabkan petjahnja dua perang dunia, jaitu perang dunia pertama dan kedua, dan bukan Uni Sovjet jang menjebabkan adanya perang² kolonial di-mana².

Siapakah yang menjadi sebab meletusnya perang dunia pertama tahun 1914 - 1918? Bukan Uni Sovjet, dan Uni Sovjet ketika perang dunia pertama meletus belum lahir. Tetapi negara² imperialis yang berebutan untuk menguasai dunia.

Siapakah yang menjadi sebab meletusnya perang dunia kedua tahun 1940 - 1945? Bukan Uni Sovjet. Tetapi negara imperialis Djerman, Italia dan Djepang, dan dengan setjara tidak langsung didorong oleh klik² imperialis dari negara² lain.

Dan siapakah yang menjadi sebab daripada perang² kolonial yang sekarang mengamuk di Korea, di Viet-Nam, di Malaja, dll.? Bukan Uni Sovjet. Tetapi imperialis² Amerika, Inggeris, Perancis, dll. Indonesia dua kali mengalami perang kolonial. Selama dua kali perang kolonial tidak pernah kelihatan prajurit Tentara Merah Sovjet atau Tentara Rakjat Tiongkok di Indonesia. Jadi siapakah yang sudah mengadakan dua kali perang kolonial terhadap Rakjat Indonesia? Bukan Uni Sovjet. Tetapi imperialis Belanda dengan dibantu oleh imperialis² Amerika dan Inggeris.

Selama perang dunia melawan fasisme, antara Uni Sovjet, Amerika dan Inggeris telah dibikin persetujuan² yang dimaksudkan untuk menjamin perdamaian didunia, untuk menjamin perkembangan demokrasi di-negeri² fasis yang sudah ditaklukkan dan untuk menjamin kerdjasama antara negeri² sekutu. Persetujuan² itu ialah persetujuan Jalta, Teheran dan Potsdam. Pembentukan Perserikatan Bangsa² adalah memperkuat persetujuan² yang sudah ada itu.

Tetapi apakah yang kita lihat sekarang? Amerika dan komplotannya tidak mentaati persetujuan² yang sudah ditandatangani selama perang dunia kedua. Amerika tidak menjamin perkembangan demokrasi di Djepang, di Djerman Barat dan di Italia. Tetapi sebaliknya, Amerika menghidupkan kembali fasisme di-negeri² itu, malahan ditambah lagi dengan menghidupkan fasisme di Spanyol, di Turki, dll. Di Amerika sendiri kaum imperialis dengan giat memfasiskan sistim negara, menangkap dan membunuh kaum demokrat.

Bertentangan dengan politik perang Amerika yang agresif, kubu sosialisme dan demokrasi Rakjat yang dipelopori oleh Uni Sovjet menjalankan politik perdamaian setjara konsekwen dan prinsipil.

Bertentangan dengan sistim kapitalis, sistim sosialis tidak membutuhkan koloni dan daerah tempat menanam modal, karena sistim sosialis tidak membenarkan perlombaan mencari untung setjara kapitalis. Produksi sosialis se-mata² ditujukan kepada kebutuhan Rakjat negeri sendiri dan kepada pertukaran setjara damai dengan negeri² lain atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.

Kaum Komunis berpendapat, bahwa perkembangan imperialisme tidak sama diseluruh dunia, dan oleh karena itu kemenangan sosialisme disemua negeri setjara sekaligus adalah tidak mungkin, tetapi sebaliknya berpendapat, bahwa sosialisme disatu negeri atau dibeberapa negeri sendiri² adalah mungkin sekali, walaupun di-negeri² lain kapitalisme masih ada. Dari sinilah pula keterangannya mengapa negeri² yang sistim politik dan sosial ekonominya berlainan, mengapa negeri sosialis dan negeri kapitalis mungkin dan perlu hidup berdampingan setjara damai. Untuk menjaga perdamaian didunia, negara sosialis dan negara² demokrasi Rakjat dengan konsekwen bersedia untuk berunding, untuk mengadakan kerdjasama dan mengadakan hubungan dagang dengan semua negeri atas dasar tidak tumpangtindih dalam soal² negeri lain. Adanya perdamaian, adanya kerdjasama dan hubungan dagang atas dasar persamaan dan saling menguntungkan adalah sangat penting bagi Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat untuk membikin bangunan² perdamaian yang bisa menjamin terlaksananya sosialisme dan Komunisme.

Jadi teranglah, bahwa kaum Komunis samasekali tidak membutuhkan perang. Dan kaum Komunis Indonesia samasekali tidak membutuhkan Tentara Merah Uni Sovjet dan Tentara Rakjat Tiongkok untuk mewujudkan tjita-tjitannya di Indonesia. Kaum Komunis diseluruh dunia, juga kaum Komunis Indonesia, hanya membutuhkan perdamaian, karena hanya dalam perdamaian sosialisme dan Komunisme dapat dibangun. Kaum Komunis Indonesia berkejakinan, bahwa perdamaian dapat dipertahankan dan diperkuat dengan aksi² massa Rakjat, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Kawan Stalin, apabila „bangsa² memegang masalah mempertahankan perdamaian dalam tangannya sendiri dan mempertahankannya mati²an”.

Keinginan untuk damai adalah sangat besar pada Rakjat Indonesia. Pengalaman pendudukan fasis Djepang dan pengalaman dua perang kolonial Belanda lebih meyakinkan Rakjat Indonesia lagi akan kebenaran perjuangannya untuk perdamaian. Semangat perdamaian ini pula yang membikin Rakjat Indonesia diwaktu yang akhir² ini sangat menentang politik imperialis Amerika. Politik² Amerika yang tidak senonoh, yang antara lain berwujud Embargo, Frisco dan MSA, telah menimbulkan semangat anti Amerika yang ber-njala² didada putera² Indonesia yang terbaik. PKI yakin, bahwa perjuangan Rakjat untuk mentjapai perdamaian abadi pasti akan mengalahkan persiapan² perang Amerika. PKI berseru kepada tiap² putera Indonesia supaya setjara aktif membela tjita² perdamaian yang luhur, yang mulia dan yang sutji.

Itulah beberapa segi yang terpenting daripada politik dan perjuangan PKI sekarang. Alangkah gembiranya kami malam ini, karena bisa mengemukakan hal² diatas. Kami akan lebih bergembira lagi, apabila seruan² kami diatas, seruan untuk menggalang dan memperkuat front persatuan nasional, seruan untuk membela demokrasi dan seruan untuk membela perdamaian dunia, mendapat sambutan dari hadirin. Inilah djalan yang benar, djalan Rakjat, dalam menudju Indonesia Baru. Kami yakin, bahwa seruan² ini adalah pernjataan yang sewadjarja daripada keinginan² Rakjat sendiri. Oleh karena itu seruan² ini pasti akan menimbulkan kekuatan yang hebat didalam perjuangan² kita selanjutnja.

26 Mei 1952.

Artikel ini khusus ditulis untuk menjambut hari Proklamasi 17 Agustus 1952. Pada waktu itu pihak reaksi di Indonesia sedang melancarkan fitnahan terhadap PKI se-olah² taktik front persatuan nasional adalah „taktik Moskow” atau „taktik PKI untuk meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing”. Dalam tulisan ini kawan D.N. Aidit mendjawab fitnahan itu dan menundjukkan bahwa taktik front persatuan nasional adalah taktik objektif, yang sudah mendjadi taktik Rakjat Indonesia untuk melawan pendjadjahan. Sebelum PKI lahir djuga sudah terdapat bentuk² front persatuan nasional seperti „Sarekat Islam” dan „Radicale Concentratie”.

Suatu kenjataan yang tak bisa dibantah ialah bahwa PKI-lah yang dengan teguh dan konsekwen mendjalankan politik front persatuan nasional. Tulisan menekankan kepada kader² perlunja kesabaran dan keuletan dalam menggalang front persatuan nasional. Ditandaskan selanjutnja bahwa front persatuan nasional baru bisa kuat djika berbasiskan persekutuan antara kaum buruh dan kaum tani.

FRONT PERSATUAN NASIONAL DAN SEDJARAHNJA

Taktik Front Persatuan Nasional Adalah Taktik Jang Objektif

Mendjelang Hari Proklamasi 17 Agustus 1952, Central Komite PKI telah mengeluarkan seruan pada tgl. 12 Djuli 1952 supaya Hari Proklamasi 17 Agustus 1952 dirajakan setjara rukun dan penuh rasa tanggungjawab oleh golongan² Rakjat jang se-luas²-nja. Central Komite PKI mengandjurkan supaya perajaan Hari 17 Agustus 1952 diselenggarakan hanja oleh satu panitia perajaan sadja, artinja Rakjat dan pemerintah supaya merajakannja bersama². Partai² dan organisasi² Rakjat supaya sepakat untuk membentuk satu Panitia Hari Proklamasi, sebagai permulaan untuk membentuk organisasi kerdjasama antara partai² dan organisasi Rakjat, sebagaimana jang dikehendaki oleh Pernyataan Bersama jang ditandatangani oleh 62 partai² dan organisasi² Rakjat pada Hari Peringatan Kebangunan Nasional tgl. 20 Mei 1952.

Seruan CC PKI diatas sesuai dengan tuntutan dan keinginan Rakjat Indonesia jang menurut sedjarahnja dalam setengah abad jang terachir hingga kini memang menghendaki persatuan nasional, adalah sesuai pula dengan keinginan partai² dan organisasi² Rakjat jang progresif dan demokratis. Seruan CC PKI jang simpatik, masuk akal dan objektif ini, telah menjebakkan di-mana², dari kota-kota besar (Djakarta, Semarang, Bandung, Palembang, Medan, dll.) sampai ke-tempat² ketjil, PKI terpilih duduk dalam pimpinan Panitia Hari Proklamasi.

Kenjataan, bahwa PKI ditjintai, disenangi dan dipilih setjara demokratis oleh partai² dan organisasi² Rakjat, adalah tamparan bagi kaum reaksioner jang tidak ingin melihat perkembangan PKI dan tidak ingin melihat Rakjat Indonesia bersatu. Kaum reaksioner marah besar, karena adalah diluar dugaan dan diluar per-

hitungan mereka, bahwa PKI jang dalam bulan Agustus 1951 mereka razzia dan lebih setengah tahun pemimpin²nja mereka masukkan dalam pendjara atau mendjadi orang buruan, dalam waktu jang tidak sampai satu tahun sudah mendapatkan kembali kedudukannja jang penting dalam kehidupan politik Rakjat Indonesia.

Kaum reaksioner terdesak kepodjok oleh politik persatuan jang dengan konsekwen didjalankan oleh PKI. Dalam keadaan demikian tidak ada djalan lain bagi kaum reaksioner ketjuali memfitnah dan memprovokasi PKI, jaitu resep mereka jang klasik, tetapi jang sudah mulai tidak mandjur. Untuk memfitnah dan memprovokasi mereka mengerahkan segenap kekuatannja, jang ada dalam pemerintahan, jang ada dipersuratkabaran, dan terutama orang² mereka jang duduk dalam pimpinan partai Masjumi.

Titikberat usaha kaum reaksioner jalah menggagalkan organisasi persatuan nasional jang mungkin dilahirkan oleh Panitia Hari Proklamasi 17 Agustus 1952. Djika persatuan nasional dapat digalang, maka ini berarti membahayakan dominasi imperialis Belanda dan Amerika atas ekonomi, politik, kebudajaan dan angkatan perang Indonesia.

Kaum reaksioner meng-hasut², menakut-nakuti golongan² progresif dan demokratis agar mereka tidak mau ikut dalam usaha menggalang persatuan nasional. Kaum reaksioner memfitnah, bahwa „taktik front nasional adalah taktik PKI untuk meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing”. Dari fitnahan sematjam ini, tiap² orang jang mau berfikir dan Rakjat jang mulai mempunyai kesedaran politik, dapat mengetahui mentalitet daripada tukang fitnah itu sendiri, jang penuh dengan purba-sangka, jang tidak bisa berfikir dan berbuat diluar kekuasaan bangsa asing, jang tidak mempertjajai kekuatan bangsa sendiri.

Benarkah bahwa „taktik front nasional adalah taktik kaum Komunis untuk meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing”, sebagaimana antara lain difitnahkan oleh kaum reaksioner? Tentang ini, marilah setjara objektif kita peladjadi sedjarah perdjjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan dari sini akan kita ketahui, bahwa teori dan taktik front nasional adalah sesuai dengan tuntutan dan keinginan jang objektif daripada perdjjuangan bangsa

Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan nasionalnja yang sedjati. Taktik front nasional yang didjalankan oleh PKI adalah objektif, sesuai dengan keinginan dan tuntutan perdjjuangan Rakjat Indonesia. Oleh karena itu, walaupun bagaimana besarnya rintangan, walaupun sering mengalami kegagalan², front persatuan nasional pasti makin mendjadi kuat, karena ia adalah objektif.

Beberapa Pengalaman Dalam Menggalang Front Persatuan Nasional

Lama sebelum PKI berdiri, sudah ada usaha bangsa Indonesia untuk menggalang front persatuan nasional. *Serikat Islam* yang didirikan dalam tahun 1912, walaupun mungkin bukan maksud semula dari promotor²nja dan walaupun memakai tjap agama Islam, pada hakekatnja adalah front persatuan nasional yang mempunyai program² revolusioner. SI yang pada mulanja hanya perkumpulan pedagang ketjil dan menengah, segera mendjelma mendjadi gerakan massa yang pernah beranggota dua djuta. Selain dari anasir pedagang dan tani, didalam SI sangat besar pengaruh anasir buruh, terutama SI tjabang Semarang. Djuga Revolusi Oktober Rusia tahun 1917 membawa pengaruh yang revolusioner pada SI.

Kongres ke-V dari SI yang diadakan di Djokja antara tanggal 2-6 Maret 1921 menerima suatu program dimana antara lain dinjatakan „baha*wa* kaum kapitalis Belanda yang memiliki alat² pembikinan barang dan mempertahankan kedudukannja dengan kekuatan sendjata, kerdjapaksa dll. menjebabkan mundurnja industri dan pertanian Rakjat serta menghina kaum buruh dan kaum tani Indonesia. SI berkejakinan baha*wa* kerusakan² penghidupan Rakjat Indonesia disebabkan oleh faham kapitalisme, jaitu faham yang harus dilawan dengan kekuatan organisasi² buruh dan tani. Untuk tudjuan itu perlu diperoleh hak² politik”.

Dengan segala kekurangannja pada waktu itu, SI adalah front persatuan nasional dimana tergabung anasir buruh, tani, pengusaha² ketjil dan sedang, dalam perdjjuangan melawan imperialisme Belanda. Sifat front nasional dari SI berachir setelah kongres ke-VI dari SI, yang diadakan di Surabaja dalam bulan Oktober

1921, menerima resolusi tentang „disiplin partai”, artinja sedjak itu orang dari partai lain tidak boleh mendjadi anggota SI. Resolusi ini dipaksakan oleh golongan reaksioner dalam SI (Hadji Agus Salim cs.) dan terutama ditudjukan untuk mengeluarkan kaum kiri dan anasir buruh dan tani miskin dari SI. Ini adalah usaha kaum reaksioner untuk memetjah front persatuan nasional dan guna mengisolasi kaum Komunis dari massa Rakjat banjak. Tetapi untuk mengisolasi kaum Komunis dari Rakjat banjak kaum reaksioner tidak berhasil, karena ketika perpetjahan timbul sebagian besar pengikut SI mengikuti djedjak pemimpin²nja yang revolusioner.

Achir tahun 1918 terbentuk front persatuan nasional dengan nama „*Radicale Concentratie*”, suatu badan gabungan dimana termasuk SI, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan I.S.D.V. „*Radicale Concentratie*” adalah kesatuan aksi daripada partai² dan organisasi Rakjat untuk menuntut pemerintah Hindia Belanda agar segera membentuk suatu parlemen yang dipilih oleh Rakjat dan mempunyai hak penuh untuk membikin undang² serta membentuk suatu pemerintah yang bertanggungdjawab pada parlemen itu.

Atas usul Partai Nasional Indonesia (PNI) dan disetudjui oleh Partai Serikat Islam (PSI) pada 17 Desember 1927 lahir front persatuan nasional dengan nama *Permufakatan Perhimpunan² Politik Kebangsaan Indonesia* (PPPKI). Jang mendjadi anggotanja, ketjuali PNI dan PSI, jalah Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub. PPPKI adalah kesatuan aksi nasional dalam menuntut penghapusan undang² kolonial yang tidak demokratis, penghapusan Digul (1), penghapusan poenale sanctie (2) terhadap kuli kontrak, penghapusan tahanan politik, penghapusan larangan bagi pegawai negeri untuk mendjadi anggota beberapa partai nasional. Disamping itu PPPKI mengusahakan adanja pendidikan nasional, adanja vaksentral untuk kaum buruh Indonesia. PPPKI memandang tiap² orang yang tidak menghormati persatuan Indonesia sebagai musuh Indonesia. Untuk menggalang persatuan nasional yang lebih luas, pada achir bulan Mei tahun 1931 PPPKI mengadakan *Kongres Nasio-*

nal Indonesia Raja yang juga dihadiri oleh organisasi² Rakjat yang bukan anggota PPPKI.

Kerdjasama yang baik antara partai² dan organisasi² Rakjat dalam front persatuan PPPKI menjadi rusak dengan timbulnya pertentangan antara golongan nasionalis disatu pihak (terutama PNI dan Indonesische Studieclub) dengan golongan Islam difihak lain mengenai berbagai hal (misalnya mengenai rente Bank Nasional Indonesia, soal perkawinan kanak², soal monogami, dsb.), yang menyebabkan keluarnya SI dari PPPKI dalam bulan Desember 1931. Tetapi walaupun bagaimana, PPPKI sudah membantu mempererat rasa persatuan dikalangan berbagai partai dan organisasi Rakjat Indonesia.

Dalam bulan Mei 1939 lahirlah *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI), yaitu front persatuan dari segenap partai² politik guna menuntut parlemen bagi Indonesia. Didalam GAPI tergabung Partai Indonesia Raja (Parindra), Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII) dan kemudian juga Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Sebagai pimpinan harian dibentuk sekretariat, yang pertama² terdiri dari *Abikusno* wakil PSII (sekretaris umum), *Thamrin* dari Parindra (bendahara) dan *Mr. Amir Sjarifuddin* dari Gerindo (sekretaris). Tanggal 23-25 Desember 1939 GAPI mengadakan *Kongres Rakjat Indonesia* di Djakarta, yang dihadiri juga oleh organisasi-organisasi yang bukan partai politik (serikatburuh-serikatburuh, organisasi-organisasi sosial, dsb.), dimana soal „Indonesia Berparlemen” menjadi atjara yang terutama. Dalam konferensi pemimpin² dari segala organisasi yang tergabung dalam Kongres Rakjat Indonesia (jadi tidak hanya partai² politik) dalam bulan September 1941 diputuskan mengganti Kongres Rakjat Indonesia menjadi *Madjelis Rakjat Indonesia*. Madjelis Rakjat Indonesia dianggap sebagai suatu badan perwakilan segenap Rakjat Indonesia yang bertudjuan men-tjapai kesentosaan dan kemuliaan Rakjat berdasarkan demokrasi. Walaupun GAPI dan Madjelis Rakjat Indonesia sudah menjatakan kesediaannya bekerjasama dengan Belanda dalam menghadapi serangan fasis Djepang, tetapi pihak Belanda tidak mau

mengerti maksud yang baik dari Rakjat Indonesia sampai saat penjerahannya pada Djepang tanggal 9 Maret 1942 (3).

Demikianlah kita lihat, bahwa sedjak zaman kolonial Belanda, taktik front persatuan sudah menjadi taktik daripada bangsa Indonesia untuk melawan pendjadjahan. Dengan demikian tidak mungkinlah dikatakan bahwa taktik ini adalah „taktik Moskow” atau „taktik PKI untuk meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing”. Atau adakah orang yang mau mengatakan almarhum *H.O.S. Tjokroaminoto* seorang „agen Moskow” karena dia sudah menggalang organisasi raksasa SI, yang pada hakekatnya adalah front persatuan nasional? Atau adakah orang yang mau menamakan pemimpin² SI, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dsb., yang tergabung dalam „Radical Concentratie” sebagai „agen² Moskow”? Atau adakah orang yang mau menamakan *Ir. Sukarno*, *Sjhabudin Latif*, *Kusumo Utojo*, *Oto Subrata*, *Thamrin*, dll. sebagai „agen² Moskow” karena orang² ini duduk dalam pimpinan front persatuan nasional yang bernama PPPKI? Atau adakah orang yang mau menamakan *Mr. Sartono*, *Sukardjo Wirjopranoto*, *A.K. Gani*, dll. sebagai „agen² Moskow” karena mereka memimpin front persatuan yang bernama GAPI dengan Madjelis Rakjatnya? Demikianlah kenyataan sedjarah membantah fitnahan² kaum reaksioner yang mengatakan bahwa „taktik front nasional adalah taktik kaum Komunis untuk meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing”. *Taktik front nasional adalah taktik bangsa Indonesia untuk melawan pendjadjahan dalam bentuk apapun.* Hanya mereka yang tidak merasa satu dengan perjuangannya kemerdekaan bangsa Indonesia yang bisa berdiri dibelakang fitnahan² yang bersifat memetjah itu.

Memang front persatuan seperti GAPI dengan Madjelis Rakjatnya tidak mampu mengadakan perlawanan terhadap Djepang sesudah Indonesia diserahkan oleh Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, tetapi ini tidak berarti bahwa taktik front persatuan tidak dijalankan dalam perlawanan terhadap Djepang. Kerdjasama dibawah tanah antara anggota² partai yang tergabung dalam partai² anggota GAPI, maupun dengan orang² yang tidak menjadi anggota salahsatu Partai, dapat diwujudkan dalam zaman pendudukan Djepang. Demikianlah front persatuan nasional anti-

fasis tergalang, antara lain dengan nama *Gerakan Indonesia Merdeka (GERINDOM)*, *Angkatan Muda Indonesia*, *Angkatan Baru Indonesia*, dsb. Dan front² persatuan inilah yang menjadi pendorong yang pertama daripada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Teranglah bahwa taktik front persatuan nasional adalah taktik satu²nja yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk menjapai kemerdekaan nasional yang sejati. Taktik ini mempunyai dasar yang kuat dalam masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai klas dan golongan, seperti kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, kaum pengusaha kecil dan pengusaha sedang. Semua klas dan golongan ini dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme, dan oleh karena itu klas² dan golongan² ini menghendaki kebebasannya. Untuk inilah klas² dan golongan² ini, atau partai² dan organisasi² dimana klas² dan golongan² ini tergabung, mesti dipersatukan dalam front persatuan nasional. Demikian pengalaman Rakjat Indonesia sendiri, dan demikian pula pelajaran² yang kita dapat dari pengalaman² Rakjat terdjadjah dan setengah terdjadjah diluar negeri. Tepat apa yang dikatakan oleh *Ki Hadjar Dewantara* dalam pidato peringatan Hari Kebangunan Nasional tanggal 20 Mei 1952, yang antara lain menyatakan bahwa: „Gerakan Rakjat mulai 20 Mei 1908 sampai 17 Agustus 1945 penuh tjontoh bahwa kita selalu menang apabila kita *bersatu*. Sebaliknya kita selalu kalah diwaktu kita *berpetjahbelah*”.

PKI Konsekwen Mendjalankan Taktik Front Persatuan Nasional

Oleh karena itulah, selamanya PKI menjambut dengan hangat dan berusaha untuk ambil bagian yang aktif dalam tiap² usaha menggalang front persatuan nasional, asal usaha² itu memang objektif dan didorong oleh kehendak yang jujur mengabdikan kepentingan tanahair dan bangsa Indonesia. Sudah sedjak berdirinya 32 tahun yang lalu, salahsatu kewajiban PKI yang terpenting ialah mengusahakan terbentuknya front persatuan nasional. Walaupun sesudah pemberontakan tahun 1926 PKI terpaksa bekerja

dibawah tanah, tetapi dimana mungkin kaum Komunis yang tidak tertangkap berusaha membentuk „komite² persatuan” dipabrik, dikampung ataupun didesa-desa sebagai kern daripada gerakan² massa. Program 18 fasal yang dibikin bulan Djuli 1932, sebagai pegangan bagi anggota² PKI yang bekerja dibawah tanah, adalah program nasional yang menuntut kemerdekaan Indonesia dan perdamaian dunia. Program 18 fasal ini dibikin ketika bintang kaum nazi sedang menaik di Djerman, jadi ketika bahaya perang makin besar dan perjuangan untuk perdamaian menjadi perjuangan yang pokok. Program 18 fasal tsb. antara lain memuat tuntutan: kemerdekaan penuh bagi Indonesia dan lepas sama sekali dari Nederland, penglepasan semua orang tahanan dan buangan politik serta penghapusan Digul, djaminan hak² demokrasi yang luas, pindjaman negara pada kaum kapitalis supaya dianggap tidak sah, paling banjak 8 jam-kerdja dan djaminan sosial yang lajak, upah sama bagi pekerdjaan sama, menentang penurunan upah dan menuntut kenaikan upah, hari libur seminggu sekali dengan dibayar penuh, sokongan bagi kaum penganggur, pemberantasan butahuruf dan pendidikan vak dengan gratis, penghapusan segala matjam kontrak paksaan, penghapusan kerdja-paksa dan kerdja-desa yang tak dibayar, tanah bagi petani, penghapusan semua pajak yang belum dibayar oleh Rakjat miskin, penghapusan hutang kaum tani pada lintahdarat, menentang tiap² bantuan untuk perang intervensi di Sovjet Uni dan didaerah Tiongkok Bebas (ketika itu Tiongkok Sovjet).

Sesudah proklamasi Republik Indonesia PKI menjambut dengan gembira dan berusaha mengambil bagian yang aktif dalam *Konsentrasi Nasional*(4) di Djokja, PKI menandatangani *Pernyataan Bersama 20 Mei 1948* (5), PKI ikut membikin dan menandatangani *Program Nasional* yang disetujui dan disahkan oleh 20 Pusat Partai dan organisasi Rakjat pada tgl. 14 Djuli 1948, PKI mengambil bagian aktif dalam *Badan Permusjawaratan Partai² (BPP)* yang dibentuk dalam bulan Maret 1951 dimana tergabung sebagian besar partai² dan organisasi² Rakjat, PKI menjetujui dan menandatangani *Pernyataan Bersama 20 Mei 1952*.

Sebagaimana sudah diterangkan diatas, rintangan² tidak sedikit dalam tiap² usaha menggalang front persatuan nasional. Rintangan²

tidak hanya dialami oleh Konsentrasi Nasional atau BPP saja, tetapi juga dialami oleh „Radical Concentratie”, oleh PPPKI, GAPI dsb. Ini tidak usah diherankan, karena memang demikianlah perbuatan kaum reaksioner, karena kaum reaksioner akan mendapat pukulan lebih hebat dari gerakan Rakjat apabila front persatuan nasional bertambah kuat. Kedudukan imperialisme akan bertambah gojang dan akhirnya akan djatuh samasekali, dengan kuatnja front persatuan nasional.

Dalam pekerdjaan menggalang front persatuan nasional, sering kita menemui kader² Partai yang sangat gembira melaporkan hasil² pekerdjaan yang telah didapatnja dalam menjusun formulasi² kerdjasama diatas kertas dengan partai² atau organisasi² lain. Tetapi sering kegembiraan ini tidak lama, dan tempo² berganti dengan keketjwaan yang menunjukkan tanda² putus-asa, karena formulasi² yang disusun dengan baik diatas kertas tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Ke-sungguh²an dalam kerdjasama antara partai² dan organisasi sangat kurang, dalam rapat-rapat banjak yang datang terlambat dan pembagian pekerdjaan tidak berdjalan lancar. Menghadapi keadaan demikian, kader² yang kurang ulet mendjadi gojang kejakinannya akan kemungkinan dan pentingnya front persatuan nasional, dan setjara tidak tepat mereka menjalahkan kaum reaksioner yang menjabot pekerdjaannya.

Mesti Lebih Banjak Berfikir Dan Terus Memperkuat Basis Front Persatuan Nasional

Kita masih sangat kurang berfikir setjara mendalam tentang kemungkinan² dan tentang tjara² bekerdja dalam front persatuan nasional. Oleh karena itu, sehabis tiap² rapat dengan partai² atau organisasi² lain, hendaklah segera diadakan diskusi² yang mendalam tentang kesalahan² atau kekurangan² kita, tentang kemungkinan² dan tjara bekerdja kita selanjutnja. Djuga pengalaman² yang lampau harus kita diskusikan dan kita tarik pelajaran daripadanya. Dengan demikian kita membikin kegagalan² kita mendjadi ibu daripada kemenangan.

Selain daripada itu, oleh tiap² Komunis harus diinsjafi, bahwa segala sesuatu mempunyai basis. Tidak ada sesuatu bisa berdiri

teguh dan tahan lama, djika fondamennja tidak kuat. Demikianlah djuga front persatuan nasional, tidak mungkin ia berdiri dengan teguh dan tahan lama djika basisnja tidak kuat. Apakah basis daripada front persatuan nasional kita? *Basis front persatuan nasional kita ialah persatuan yang erat antara kaum buruh dengan kaum tani, jaitu golongan yang terbesar dan yang paling tertindas daripada Rakjat Indonesia.* Djika persatuan ini kuat, dan politiknya dipimpin setjara tepat oleh Partai Komunis, maka ini merupakan djaminan yang pasti bagi kuatnja front persatuan nasional. Dan kebalikannya pula, kuatnja front persatuan nasional pasti akan lebih mempererat persatuan antara kaum buruh dengan kaum tani, dan ini berarti pula lebih memperkuat dan lebih membikin mampu Partai Komunis. Kelemahan² daripada „Radical Concentratie”, PPPKI, GAPI, Konsentrasi Nasional dan BPP, ialah karena front² persatuan ini belum bersandar pada persatuan yang erat antara kaum buruh dengan kaum tani.

Itulah sebabnja, dalam senantiasa berusaha menggalang kerdjasama dengan berbagai golongan, dengan partai² dan organisasi² lain yang progresif dan demokratis, sekedjapun tidak boleh kita lupakan untuk memperkuat basis kita, untuk memperkuat pangkalan kita, jaitu persatuan yang erat antara klas buruh dan kaum tani, yang politiknya dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia. Terutama dalam kita menghadapi rintangan² dan kegagalan², hal ini harus mendjadi peringatan bagi kita.

Pidato berikut diucapkan oleh kawan D.N. Aidit dalam malam perpisahan pada tgl. 14 November 1952, sebelum keberangkatannya keluar negeri untuk mewakili Partai Komunis Indonesia dalam Kongres Partai Komunis Nederland.

Waktu itu kaum sosialis kanan dan pemimpin2 Masjumi telah melakukan berbagai pertjobaan mekad untuk melenjapkan demokrasi di Indonesia dengan mendjiplak perbuatan dan slogan2 Nadjib di Mesir. Tetapi, sebagaimana ditekankan oleh kawan Aidit, keadaan Indonesia sangat berlainan, kekuatan demokratis Rakjat kita lebih besar daripada kekuatan fasis, sehingga pertjobaan itu semuanya dapat digagalkan. Kekuatan Rakjat Indonesia malah makin bersatu, kuat dan waspada.

BELUM PERNAH KEADAAN DALAM- NEGERI SESUDAH KMB BEGITU BAIK SEPERTI SEKARANG

Sebagaimana sudah diketahui, kawan Njoto dengan saja akan meninggalkan kawan2 dan saudara2 untuk waktu jang tidak lama. Kami berdua dapat kewadajiban dari pimpinan Partai kita untuk menghadiri kongres Partai2 sekawan diluar negeri. Sebelum kami berangkat, saja merasa berkewadajiban mengutjapkan beberapa patah kata kepada kawan2 dan saudara2.

Putusan Polibitbiro Partai untuk mengirimkan pemimpin2 Partai guna menghadiri kongres2 Partai sekawan diluarnegeri adalah putusan jang sangat penting dan putusan jang bersedjarah (1). Sedjak kekalahan pemberontakan tahun 1926, hubungan kita dengan Partai2 sekawan adalah sangat renggang. Sedjak itu, pertukaran pengalaman jang langsung boleh dikatakan tidak ada. Memang, maksud kita berhubungan dengan Partai sekawan tidak lain daripada untuk bertukar pengalaman. Pengalaman partai2 Komunis diluar negeri adalah sangat penting bagi kita dalam perdjuangan melawan musuh bersama, jaitu imperialisme jang sekarang dipelopor oleh imperialis Amerika. Tentu tidak semua pengalaman diluar negeri tjotjok dengan keadaan negeri kita; disinilah kewadajiban kita untuk memilih dengan kritis pengalaman mana jang berharga dan berguna bagi perdjuangan dinegeri kita.

Apalagi pertukaran pengalaman dengan Partai Komunis Nederland (CPN) adalah sangat penting, karena kita dengan Rakjat Belanda, PKI dengan CPN, mempunyai musuh nomor satu jang sama, jaitu imperialis Belanda dengan kakitangannya. Saja katakan, imperialis Belanda dengan kakitangannya adalah musuh kita jang nomor satu, karena imperialis Belanda inilah jang masih sangat bertjokol dinegeri kita. Ini tidak bisa lain, karena persetudjuan KMB jang djahat telah membangunkan kembali kekuasaan imperialis di Indonesia, terutama imperialis Belanda.

Imperialis Belanda Musuh Nomor Satu

Dalam kehidupan kita sehari-hari masih sangat terasa dan masih sangat kelihatan kekuasaan imperialis Belanda.

Dilapangan ekonomi kita ketahui, bahwa imperialis Belanda masih mempunyai modal yang terbesar di Indonesia dan masih menguasai sektor ekonomi yang terpenting seperti perkebunan, bank, pertambangan dan industri.

Dilapangan militer, imperialis Belanda mempunyai banyak kakitangannya dalam angkatan bersenjata; imperialis Belanda menempatkan MMB (NMM)⁽²⁾ yang sangat berbahaya dan sangat dibentengi oleh prajurit² dan oleh Rakyat Indonesia; imperialis Belanda mempunyai pasukan² teror seperti DI, TII, dsb. yang dipimpin oleh orang² Belanda seperti Smith, Bosch, dll.; imperialis Belanda masih mempunyai tentara yang kuat di Irian Barat yang sewaktu² dapat dikerahkan untuk menjerang Republik Indonesia, jika Republik Indonesia ternyata membahayakan kepentingan imperialis Belanda.

Dilapangan politik, imperialis Belanda masih mempunyai kader² kolonialnya di kalangan pegawai negeri yang menurut persetujuan KMB mesti dijamin kedudukannya dalam RI, dan disamping itu kaum sosialis kanan, yang telah beberapa kali menguasai kabinet Indonesia, adalah wakil politik yang sewajarnya dari imperialis Belanda. Peranan kaum sosialis kanan dalam membela kepentingan Belanda dapat kita lihat dari politik PSI yang pada hakekatnya sama dengan politik imperialis Belanda terhadap berbagai soal nasional yang penting, seperti politik PSI terhadap Irian Barat, terhadap Uni Indonesia-Belanda, terhadap NMM; dan yang terakhir peranan kaum sosialis kanan dalam usaha membubarkan parlemen, karena justru parlemen inilah yang menghendaki diusirnya NMM, yang menghendaki dinasionalisasinya perusahaan² vital kepunyaan imperialis seperti tambang minyak Tjepu dan Sumatera Utara⁽³⁾.

Dilapangan kebudayaan pengaruh kebudayaan Belanda masih sangat kuat. Politik pendidikan belum mengalami perubahan prinsipil, pada hakekatnya masih tetap politik pendidikan kolonial. Sebagian kaum terpelajar Indonesia dalam kebudayaan dan filsafat

masih berorientasi ke Eropa Barat, terutama ke Nederland, dan pandangan ini terutama dipelopori oleh kaum sosialis kanan. Apa yang oleh persetujuan KMB dinamakan kerdjasama kebudayaan Indonesia-Belanda pada hakekatnya tidak lain daripada usaha Belanda untuk mempertahankan pengaruh kebudayaan dan pengaruh filsafat kaum kolonial atas Rakyat Indonesia, terutama atas kaum intelektual Indonesia.

Sosialis Kanan Wakil Politik Imperialis Belanda

Demikianlah kita lihat, bahwa imperialis Belanda masih bertjokol disegala lapangan. Imperialis Belanda masih merupakan musuh didalam rumah tangga kita, oleh karena itu ia merupakan musuh yang paling berbahaya, oleh karena itu ia adalah musuh kita yang nomor satu. *Dan sekedarjapun tidak boleh kita lupakan, bahwa imperialis Belanda tidak mungkin menguasai Indonesia jika tidak ada kakitangannya orang² Indonesia sendiri. Dan peranan kakitangan imperialis Belanda di Indonesia terutama adalah dimainkan oleh kaum sosialis kanan, oleh gerombolan Sjahrir dengan PSI-nja, yang waktu belakangan ini dengan tidak tahu malu dan setjara serampangan menjerang PKI.*

Bukan satu rahasia, bahwa sepanjang sejarah Revolusi Rakyat 17 Agustus, gerombolan ini dengan litjik telah mengembalikan kedudukan imperialis Belanda, yang terang²an dimulai dengan Manifesto politik bulan November 1945, yaitu keterangan yang mengakui dan melindungi kekayaan imperialis di Indonesia, dan terutama jalah kekayaan imperialis Belanda. Juga bukan rahasia lagi, bahwa pertjobaan kup tanggal 17 Oktober⁽⁴⁾ jl. adalah salahsatu perbuatan gerombolan ini untuk menjelamatkan kedudukannya sebagai komprador dan menjelamatkan kedudukan madjikkannya, yaitu imperialis Belanda.

Kekuatan Demokrasi Menggagalkan Fasisme

Pertumbuhan kekuatan demokrasi di kalangan Rakyat, telah memaksa parlemen menghukum perbuatan² kaum sosialis kanan yang kedji, yang korup, dan telah memaksa parlemen mengambil

beberapa putusan yang bermaksud mengurangi untuk akhirnya melepaskan samasekali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Keadaan ini telah membikin nekad imperialis Belanda dan kaum sosialis kanan, dan mereka telah menjalankan avontur dengan mendjiplak perbuatan Nadjib di Mesir⁽⁵⁾ dengan tiada memperhatikan faktor² objektif yang ada di Indonesia. Dengan slogan² seperti „bubarkan parlemen”, „basmi korupsi”, „adakan pemberisihan dalam Partai²”, dsb., mereka mentjoba memperdajakan Rakjat. Mereka bodoh dan tidak mengerti, bahwa Rakjat yang mau mereka perdajakan adalah sudah tjukup sedar dan mengerti bahwa djustru merekalah tukang korup, dan djustru partai merekalah yang semestinja dibersihkan. Mereka meremehkan perbedaan² besar antara faktor² objektif dan subjektif yang ada di Mesir dengan yang ada di Indonesia, perbedaan² dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Mereka, jaitu boneka Amerika dan Belanda-Inggeris meremehkan dan tidak memperhitungkan kekuatan revolusioner dari Rakjat Indonesia. Mereka tidak melihat perubahan besar yang sudah dialami oleh Rakjat Indonesia dalam tahun² yang terachir. Mereka mempunyai fikiran sangat kuno, masih menjamakan Rakjat Indonesia sekarang sebagai Rakjat Indonesia sebelum perang dunia kedua.

Keadaan dalam negeri, sedjak adanya persetudjuan KMB sebelum pernah begitu baik seperti sekarang ini bagi perkembangan kekuatan demokrasi. Kegagalan kup imperialis Belanda-Inggeris yang dilakukan oleh kakitangannya kaum sosialis kanan pada tanggal 17 Oktober yang lalu, telah membikin terang perimbangan kekuatan dinegeri kita, telah membikin djelas siapa lawan dan siapa sahabat demokrasi, telah membikin djelas siapa pedjuang kemerdekaan yang sedjati dan siapa musuh² kemerdekaan dan musuh² Rakjat Indonesia. Dengan gagalnja kup tsb., setjara definitif dapat kita ketahui, bahwa pada waktu sekarang kekuatan demokrasi adalah djauh lebih besar daripada kekuatan fasis yang sedang bangkrut. Keadaan ini memungkinkan perkembangan gerakan revolusioner dan gerakan demokratis setjara tjepat. Dan ini memang sangat nampak belakangan ini. Kegagalan kaum sosialis kanan dengan kupnja telah mendjadi boemerang (sendjata makan tuan) terhadap diri sendiri. Di-mana² sebagai djamur dimusim

hudjan timbul kesatuan² aksi dan penjataan² bersama yang menghukum pertjobaan kup yang djahat dan dengan tekad yang bulat Rakjat membela demokrasi. Barisan musuh² demokrasi makin bertjajabelah, partainya mendjadi berantakan, tetapi sebaliknya kekuatan demokrasi makin bersatu dan makin kuat.

Waspada Terhadap Intimidasi Dan Provokasi

Dalam keadaan terdjepit, sebagaimana kita lihat kenjataan di semua negeri burdjuis, kaum sosialis kanan dan kaum reaksioner seluruhnja memakai tjara² yang sangat djahat, mereka mengadakan intimidasi² dan provokasi². Ja, intimidasi dan provokasi! Taktik intimidasi inilah yang kita lihat pada 17 Oktober yang lalu, dan taktik inilah yang kemudian terus-menerus mereka pakai untuk membikin Rakjat mendjadi panik dan dengan demikian mereka djuga mengharapkan adanya tindakan² yang kesusu.

Adalah mendjadi kewadajiban tiap² demokrat, terutama kewadajiban tiap² Komunis, untuk tidak kena gertak sambel, tidak kena intimidasi, dari kaum reaksioner. Adalah mendjadi kewadajiban tiap² demokrat, terutama kewadajiban tiap² Komunis, untuk tidak bertindak yang kesusu, tetapi senantiasa harus mendasarkan tindakan²nya pada kenjataan² yang ada dan pada perhitungan² yang matang, agar tidak kena provokasi kaum reaksioner.

Saja yakin, djika kita, kaum demokrat dan kaum Komunis, tidak kena intimidasi dan tidak terperosok kedalam provokasi kaum reaksioner, kemenangan demokrasi di-hari² yang akan datang, akan lebih tjepat dan lebih besar. *Pengalaman yang perwira dari Rakjat Indonesia di-waktu² yang lalu, kerdjasama yang djudjur dan tulus-ichlas antara berbagai golongan demokratis, antara nasionalis dan Komunis, antara kaum agama dengan nasionalis dan Komunis, antara kaum sosialis yang djudjur dengan Komunis, inilah djaminan pokok untuk kemenangan pasti dari demokrasi atas fasisme. Kekuatan front persatuan nasional, inilah satu²nya kekuatan yang dapat menghantjurkan usaha² fasis yang djahat, tidak perduli apakah fasis sosialis kanan, fasis Masjumi Sukiman, atau lain²nya.*

Demikianlah kawan² dan saudara², dengan ringkas tentang keadaan yang kita hadapi sekarang. Dengan mengerti keadaan ini

dan dengan kejakinan ini, saja dengan kawan Njoto meninggalkan kawan² dan saudara² untuk waktu yang tidak lama, untuk waktu yang sangat sebentar djika dihitung menurut perdjalan sedjarah masjarakat.

Kami berdua mendapat kehormatan yang sangat besar dari Partai yang kita tjintai, karena Partai ini telah mempertjajai kami untuk mewakilinja diluarnegeri. Kami berdjandji akan melakukan kewadajiban kami se-baik²nja. Djuga perdjalan kami ini, adalah usaha memperkuat gerakan demokrasi dan perdamaian dinegeri kita, dan dengan ini djuga memperkuat gerakan demokrasi dan perdamaian diseluruh dunia.

Sekianlah kawan², selamat tinggal dan sampai bertemu lagi!

Tulisan ini dibuat untuk menjambut peringatan ke-45 Hari Kebangkitan Nasional pada tgl. 20 Mei 1953. Uraian ini setjara tegas membantah fitnahan kaum reaksi se-alkan² kaum Komunis „mengingkari kepentingan nasional”. Kenyataan sendiri menunjukkan sebaliknya. Djustru kaum reaksi dengan faham kosmopolitanisme berusaha keras untuk menghilangkan isi dan djiwa kebesaran nasional.

Kawan Aidit menekankan bahwa tiap² Komunis Indonesia sebagai putera Indonesia harus mendjadikan diri seorang patriot yang sedjati. Tetapi patriotisme ini bertentangan dengan sovinisme burdjuis. Patriotisme ini mendjundjung tinggi persamaan dan persaudaraan antara bangsa² sedunia. Djadi, patriotisme kaum Komunis berpadu dengan internasionalisme proletar, sedangkan internasionalisme proletar berlawanan dengan kosmopolitanisme burdjuis.

Dalam tulisan ini diperlihatkan bahwa sedjarah bangsa kita adalah sumber kekuatan yang luarbiasa bagi perdjuaan nasional kita, sumber patriotisme yang tak kundjung kering. Pengetahuan yang dalam tentang sedjarah bangsa dan negeri kita merupakan dasar yang kuat bagi ketjintaan dan kesetiaan kita kepada perdjuaan Rakjat. Oleh sebab itu PKI senantiasa menekankan kepada kader² dan anggota²nja supaya mempeladjadi sedjarah bangsa kita dan perdjuaannja, sedjarah ekonomi dan kebudajaannja dengan teratur dan mendalam.

Tiga hari kemudian pada rapat kader² Partai untuk memperingati ulangtahun ke-33 PKI, kawan Aidit dalam pidatonya *Patriotisme Rakjat Indonesia* menekankan lagi pentingnja kaum Komunis setia kepada prinsip² patriotisme dan internasionalisme proletar. Ia menegaskan bahwa „Patriotisme adalah sendjata yang tajam untuk melawan imperialisme dan melawan ideologi kaum imperialis seperti kosmopolitanisme atau 'internasionalisme' a la sosialis kanan”. Maka kaum Komunis djuga berkewadajiban untuk mendidik Rakjat supaya „dapat mentjintai tanahair dan negerinja setjara benar, sebab dalam ketjintaannja pada tanahair dan negerinja sudah termasuk ketjintaannja pada Rakjat pekerdja yang harus kita bebaskan dari semua penindasan”.

KEBANGGAAN DAN KESEDARAN NASIONAL

Tanggal 20 Mei 1908 adalah hari bersedjarah dalam perkembangan perjuangannya bangsa dan Rakjat Indonesia. Pada hari inilah bangsa kita, dipelopori oleh almarhum *Dr. Wahidin Sudirohusodo* yang bidjaksana dan budiman, mulai menjusun diri dalam organisasi kebangsaan yang modern dan yang dipimpin oleh pikiran² yang maju. Kedjadian ini sudah sewadjarnja, karena kemadjuan kapitalisme dan kemadjuan gerakan revolusioner didunia mengharuskan Rakjat Indonesia menjusun tenaga perlawanan terhadap kolonialisme setjara baru.

Adalah kenjataan yang baik sekali, bahwa belakangan ini pada tiap² tahun tanggal 20 Mei diperingati oleh putera² Indonesia yang maju. Hanya beberapa partai, beberapa gelintir pemimpin² reaksioner, terutama yang menamakan dirinja kosmopolit, universalis dan „internasionalis” berkeras kepala tidak mau ikut memperingati hari yang bersedjarah ini.

Memperingati hari² bersedjarah, memperingati dan melakukan pemudjaan² terhadap pahlawan² dan pudjangga² nasional adalah mempertebal semangat patriotik, jaitu *semangat tjinta yang dalam terhadap tanahair, terhadap Rakjat, bahasa, kebudajaan, kesusasteraan dan tradisi² bangsa sendiri yang baik*, yang sudah ber-abad² dan sudah turun-temurun dari generasi kegenerasi. Patriotisme adalah sumber kekuatan yang penting dalam perjuangannya untuk kemerdekaan nasional.

Apalagi bagi bangsa kita yang sudah ber-abad² didjadjah — dan sekarang ini imperialis Belanda dan Amerika sangat giat menjebarkan serdadu² ideologinja, menjebarkan lektur²nja yang beratjun, yang mempropagandakan kosmopolitanisme yang sangat berbahaja itu — adalah sangat penting senantiasa membangunkan dan mempertebal semangat patriotik.

Kosmopolitanisme adalah pernjataan ideologi dari persekutuan dan komplotan internasional kelas burdjuis. Kosmopolitanisme memupuk perasaan tak-bernasion (tak-berbangsa) dan mengingkari adanya tanahair, se-olah² orang merasa dirinja dirumah sendiri disetiap tempat didunia, dan se-olah² adalah sewadjarnja bahwa keanggotaan suatu nasion dan suatu negeri dapat diganti dengan kewargaan dunia. Semangat kosmopolit ini djugalah yang dipropagandakan dan ditanamkan oleh kaum internasionalis sosialis (sosialis kanan).

Dengan menanamkan semangat kosmopolit melewati agen²nja dan dengan lektur², kaum burdjuis dari negeri² kapitalis yang besar melemahkan kesedaran nasional dari nasion² yang hendak dikuasainja. Dengan kesedaran nasional yang lemah, sesuatu nasion suka menerima pengaruh kapitalis asing, suka menerima kebudayaan dan adat-istiadat asing tanpa kritik, dan disamping itu mengorbankan kemerdekaan dan kebebasan nasionalnja, kedaulatannja dan kehidupan nasionalnja.

Oleh karena itu djelaslah kepada kita mengapa ada golongan² di Indonesia yang tidak suka memperingati hari² bersedjarah, memperingati dan melakukan pemudjaan terhadap pahlawan² dan pudjangga² nasional. Atau, djika mereka terpaksa ikut memperingati, mereka lakukan itu hanya formil belaka sehingga tidak ada artinja bagi usaha mempertebal semangat patriotik daripada Rakjat. Ja, ada kalanja mereka pura² sadja memperingati dengan tudjuan menghilangkan isi dan djiwa kebesaran nasional. Inilah keterangannya mengapa kaum sosialis kanan dari PSI dan agen² imperialis lainnja, antara lain pimpinan Masjumi, dengan terang²an dalam tahun 1952 dan dalam tahun 1953 ini tidak mau ikut dalam Panitia Hari Kebangunan Nasional yang didukung oleh hampir semua partai dan organisasi Rakjat yang luas.

Tetapi kaum reaksioner ketjewa dan senantiasa akan ketjewa ! Sedjarah perjuangannya bangsa kita yang perwira memberi kepastian kepada kita, bahwa kaum pengchianat dan kaum reaksioner tidak akan berhasil menekan semangat patriotik Rakjat Indonesia. Waktu belakangan ini kita sudah biasa memperingati hari² yang bersedjarah, hari² pahlawan dan pudjangga kita, dan setiap kali sesudah peringatan itu kita mendapat kekuatan baru dan kegembiraan

baru dalam mengkonsolidasi kekuatan raksasa Rakjat Indonesia sebagai djaminan untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh.

Sedjarah mendjadi saksi bahwa bangsa kita bukanlah bangsa jang kerdil dan lembek-tak-berdaja, dan samasekali bukan bangsa jang tidak mempunjai inisiatif, jang tidak mempunjai dajatjpta, jang tidak mempunjai keberanian dan jang dengan sukarela suka menerima tiap² beban kolonial diatas pundaknja.

Sedjarah mengadjar kita, bahwa dalam abad ke-10 ada Dharmawangsa. Ketjuali seorang ahli negara, Dharmawangsa adalah seorang sastrawan, ahli bahasa dan ahli hukum. Ia seorang diplomat dan oleh kebidjaksanaannja Indonesia mempunjai hubungan diplomatik dengan Tiongkok jang besar dan berkebudajaan tinggi.

Sedjarah mengadjar kita, bahwa dalam abad ke-13, dalam zaman Sriwidjaja, ada Demang Lebar Daun. Ia seorang Perdana Menteri jang berkaliber besar dan seorang demokrat. Ia menentang adanja kasta² sebagai jang diadjarkan oleh agama Hindu dan ia mengadakan perubahan² jang sedikitbanjak demokratis didalam pemerintahan. Kebesaran Demang Lebar Daun dapat kita samakan dengan Gadjah Mada dizaman Madjapahit. Djikalau Gadjah Maka kita kenal sebagai seorang jang mempunjai tjita-tjita tinggi dalam mempersatukan seluruh Nusantara, maka Demang Lebar Daun mempunjai tjita-tjita tinggi dalam mendemokrasikan sistim pemerintahan.

Sedjarah mengadjar kita, bahwa dalam abad ke-14, dalam zaman Madjapahit, ada Gadjah Mada, jang seluruh hidupnja ditumpahkan untuk persatuan Nusantara. Kebesaran Gadjah Mada sangat terkenal, tidak hanja ditanahair kita, tetapi djuga diluar negeri. Kebesaran Gadjah Mada boleh disamakan dengan kebesaran Laksamana Hang Tuah, pahlawan Tanah Melaju.

Sedjarah mengadjar kita, bahwa dalam abad ke-17 ada Truno Djojo, seorang pahlawan tanahair jang gagahberani, jang berdjuang dengan sengit melawan pendjadjah Belanda dan melawan kaum pengchianat bangsa sendiri jang dikepalai oleh Amangkurat I dari Mataram.

Demikian beberapa tokoh tanahair kita. Mereka semuanya menggambarkan kebesaran bangsa kita. Jang harus mendjadi tela-

dan bagi kita jalah kebesaran tjita²nja, kebidjaksanaan dan keahliannja memimpin negara, perdjuangannja untuk mendemokrasikan sistim pemerintahan, untuk persatuan dan kemerdekaan negeri sendiri dari kekuasaan pendjadjah asing dan dari kaum pengchianat tanahair.

Selain daripada tokoh² tanahair diatas, sedjarah bangsa kita djuga dihiasi oleh keperwiraan, kepahlawanan dan kebesaran orang² seperti *Imam Bondjol, Pattimura, Dipo Negoro, Sultan Hasanudin, Si Singa Mangaradja, Teuku Umar, Raden Adjeng Kartini, Panglima Polem, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Abdul Rivai, Tjipto Mangunkusumo, Djenderal Sudirman, Amir Sjarifuddin, Musso, Monginsidi* dan banjak lagi. Bangsa Indonesia djuga sudah melahirkan pudjangga² besar seperti *Ronggowarsito* dan *Willem Iskandar*, melahirkan pelukis² besar seperti *Raden Saleh* dan *Raden Abdullah*, melahirkan komponis² seperti *Supratman* dan *Cornel Simandjuntak*, melahirkan sardjana terkemuka seperti ahli bakteriologi *Profesor Dr. Mochtar* dan ahli penjakit malaria *Dr. Susilo*, jang ke-dua²nja mati dibunuh oleh fasis Djepang.

Pahlawan², pudjangga², seniman² dan sardjana² kita telah menanamkan semangat tjinta jang dalam terhadap tanahair, terhadap Rakjat, kebudajaan dan tradisi jang baik dari bangsa kita sendiri. Pahlawan², pudjangga², seniman² dan sardjana² kita adalah bukti jang se-njata²nja, bahwa Rakjat Indonesia adalah Rakjat jang besar dan Rakjat pentjipta, bahwa Rakjat Indonesia bukanlah Rakjat budak dan hamba jang begitu sadja bisa dioperkan dari pendjadjah jang satu kepada pendjadjah jang lain, dari pendjadjah Belanda kepada pendjadjah Djepang, kepada pendjadjah Inggeris atau Amerika. Kita adalah Rakjat jang berbudi dan senantiasa melakukan perdjungan jang sengit, jang mati²an terhadap tiap² pendjadjahan jang bagaimanapun bentuknja.

Adalah kewadajiban tiap² orang Komunis, sebagai putera Indonesia jang terbaik, untuk meneruskan kepahlawanan, keperwiraan dan kebesaran pahlawan² dan pudjangga² nasional kita serta untuk meneruskan tradisi revolusioner dan baik dari bangsa dan Rakjat kita.

Dengan semangat patriotik jang tinggi Rakjat Indonesia mengadakan perlawanan² terhadap kaum pendjadjah, mengadakan pem-

berontakan tahun 1926 jang perwira, mengadakan pemberontakan dikapal perang *Zeven Provinciën* tahun 1933⁽¹⁾, mengadakan Revolusi Agustus 1945, mengadakan perlawanan terhadap Provokasi Madiun tahun 1948, mengadakan perlawanan terhadap Razzia Agustus 1951 dari tuan Sukiman jang mau menjerahkan Indonesia dengan Rakjatnja bulat² kepada Amerika, mengadakan perlawanan terhadap pertjobaan perebutan kekuasaan 17 Oktober 1952 jang berada dibawah arsitektur kaum sosialis kanan jang mau menjerahkan Indonesia dengan Rakjatnja bulat² kepada kaum imperialis Inggris dan Belanda.

Kita bangga akan pahlawan², pudjangga², seniman² dan sardjana² kita. Kebanggaan ini adalah kebanggaan nasional jang sewadarnja, jang murni, jang dimiliki oleh tiap-tiap bangsa, jang samasekali tidak ada hubungannja dengan sovisme burdjuis. Kebanggaan nasional kita menimbulkan kesadaran nasional jang tinggi dan melahirkan patriotisme jang sehat, sedangkan sovisme adalah semangat mementingkan diri sendiri sebagai pernajaan ideologi daripada nafsu merampok dari kaum kapitalis. Patriotisme kita adalah tidak hanja berbeda, tetapi bertentangan samasekali dengan sovisme burdjuis jang mementingkan diri sendiri, jang anti-bangsa asing, jang mempunyai purbasangka kebangsaan, jang sempit, jang mengisolasi diri, jang sektaris, jang isolasionis, jang provinsialis.

Tidak hanja pahlawan², pudjangga², seniman² dan sardjana² kita harus kita banggakan, tetapi djuga lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan kita. Tiap² putera Indonesia jang baik, terutama orang² Komunis, harus bangga akan lagu dan bendera kebangsaannja. Dengan mendjundjung lagu dan bendera kebangsaan kita, kita telah dan sedang melalui berbagai tingkat perdjjuangan dalam mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh. Dengan setia kepadanya kita telah mentjapai kemenangan² dan dengan semangat jang ber-njala² kita membelanja serta mendjaga kemurniannja. Dalam Revolusi Rakjat 1945-48 banjak bukti² jang menjatakan bahwa pradjurit² revolusi ichlas meninggal dengan bendera merah-putih ditangan dan menghembuskan nafas penghabisan dengan disertai kalimat² lagu Indonesia Raya.

Bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, telah dan sedang

memegang rol jang sangat penting dalam perdjjuangan kemerdekaan bangsa kita. Bahasa jang sederhana dan indah ini, ketjuali mempunyai rol jang sangat penting dalam mempersatukan suku-bangsa² jang banjak itu, djuga mempunyai haridepan jang gemilang dalam memperkembangkan kesusasteraan kita dan dalam menjiarkan ilmu dalam bahasa kita. Haridepan bahasa Indonesia mendjadi lebih terang dan lebih baik lagi, karena bahasa ini ditulis dengan huruf Latin. Ini artinja, ia mudah dipeladjar, djuga oleh bangsa² lain. Kebanggaan kita akan bahasa Indonesia haruslah didjadikan pendorong untuk mempeladjar dan menjempurnakan bahasa ini, sehingga mendjadi tjukup untuk menjatakan perasaan dan fikiran jang se-tinggi²nja, se-dalam²nja dan se-luas²nja.

Kebanggaan dan ketjintaan kita pada pahlawan², pudjangga², seniman² dan sardjana² kita, pada lagu dan bendera nasional kita, pada bahasa persatuan kita, pada kesusasteraan, pada tari-tarian, pada musik — pendeknja pada kebudayaan nasional kita — pada pulau², gunung², sungai², danau², tumbuh²an dan chewan² — pendeknja pada alam negeri kita — sedikitpun tidak mengurangi ketjintaan kita pada sesama manusia diseluruh dunia. Sebaliknya, ia memperkuat keinginan kita untuk bersatu dengan nasion² lain. *Patriotisme kita mendjundjung tinggi persamaan dan persaudaraan antara bangsa² dan bersamaan dengan itu berdjjuang untuk terlaksananja tjita² jang terbaik dari umatmanusia dinegeri kita.*

Dengan demikian teranglah, bahwa internasionalisme proletar kaum Komunis adalah bertentangan dengan kosmopolitanisme dan „internasionalisme” kaum sosialis kanan dan kaum burdjuis pada umumnja. Demikian djuga patriotisme kita bertentangan dengan sovisme burdjuis. Internasionalisme proletar kita bersatu-padu dengan patriotisme sedjati. Kita hanja bisa mendjadi internasionalis sedjati djika kita mendjadi pengabdian jang setia daripada tanahair dan bangsa kita, dan kita hanja bisa mendjadi patriot jang sedjati djika kita berdjjuang untuk tertjapainja persamaan dan persaudaraan antara bangsa² sedunia.

Kaum reaksioner suka memutarbalikkan keadaan dan memalsu kebenaran. Mereka suka memberi interpretasi jang menjesatkan dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari keperwiraan pahlawan² kita, dari keindahan tjiptaan pudjangga² dan seniman²

kita, dari lagu dan bendera nasional kita, dari keindahan dan kekayaan alam kita. Oleh karena itu kita harus hati² terhadap kaum reaksioner, terutama terhadap serdadu² ideologi dari kaum kapitalis.

Sebagaimana sudah sering kedjadian dinegeri kita, kaum reaksioner tidak segan², tidak tahu malu, dengan bendera nasional di tangan dan dengan lagu Indonesia Raya dimulut mereka melakukan perbuatan anti-nasional jang se-kedji²nja, mereka mengadakan perdjandjian² jang chianat dengan kaum imperialis, mereka mengadakan provokasi², mengadakan razzia dan kup, mengadakan penangkapan² dan pembunuhan² terhadap patriot² dan terhadap Rakjat, mereka memasukkan pemimpin² kaum buruh dan kaum tani kedalam pendjara, mereka mengadakan kekangan terhadap pers nasional dan menghukum wartawan² jang djudjur.

Adalah kewadajiban tiap² patriot, terutama tiap-tiap Komunis, untuk mendjaga agar pahlawan² dan pudjangga² nasional kita, agar lagu dan bendera nasional kita, agar bahasa persatuan kita, agar kebudayaan dan tradisi bangsa kita, agar keindahan dan kekayaan alam kita, tidak dinodai dan tidak digunakan untuk maksud² jang djahat. Kebanggaan dan kesedaran nasional kita tidak mengizinkan ini!

Menuju Indonesia Baru adalah uraian jang disampaikan pada malam tanggal 23 Mei 1953 untuk memperingati ulangtahun ke-33 PKI. Pidato kawan Aidit ini mendjelaskan tonggak² pokok dalam sedjarah perdjuaan pembebasan bangsa Indonesia dan menundjukkan djalan untuk mentjapai Indonesia Baru, dimana Rakjat berkuasa atas nasibnja sendiri. Pokok² uraian ini kemudian dirumuskan sebagai Rentjana Program PKI jang diterima o'eh Sidang Pleno Central Komite awal Oktober 1953 dan pada bulan Maret 1954 disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI sebagai Program Partai Komunis Indonesia.

MENUDJU INDONESIA BARU

Per-tama², atas nama Partai Komunis Indonesia, saja meng-utjapkan terimakasih kepada saudara² dan kawan² jang sudah sudi datang pada malam peringatan ulangtahun PKI jang ke-33 ini.

Kepada wakil² kaum buruh, wakil² kaum tani, kaum terpe-ladjar dan orang² terkemuka jang revolusioner dan progresif, PKI menjampaikan salutnja, berhubung dengan keuletan dan keper-wiraan dari golongan² Rakjat jang saudara² wakili dalam per-djuangan kita sekarang, dalam perdjungan untuk kemerdekaan nasional jang penuh, dalam perdjungan untuk demokrasi, untuk perdamaian dunia, pendeknja untuk Indonesia Baru dan Dunia Baru. Karena perdjungan saudara², karena perdjungan seluruh Rakjat jang ulet dan perwira, fadjar kemenangan kita makin lama bertambah dekat.

Pada peringatan ulangtahun ke-33 ini saja diwadjibkan oleh Politbiro Central Comite PKI menjampaikan sebuah uraian jang berisi beberapa kesimpulan mengenai perdjungan Rakjat Indo-nesia dalam menudju kemerdekaan nasional jang penuh. Uraian saja ini diberi nama „Rakjat Indonesia Berdjung Untuk Kemer-dekaan Nasional Jang Penuh” atau dengan singkat „Menudju Indonesia Baru”.

Pendahuluan

Negeri kita adalah salahsatu negeri di Asia jang luas dan banjak penduduknja. Indonesia terdiri dari banjak pulau² besar dan ketjil, luasnja 1.904.000 km² dan sekarang berpenduduk kira² 80 djuta. Indonesia menghubungkan daratan Asia dan Australia, dan menghubungkan samudera India dengan samudera Pasifik. Dengan demikian, Indonesia mempunyai kedudukan jang penting dalam hubungan dunia jang besar.

Pada tahun 1602 pedagang² Belanda mendirikan maskapai dagang jang diberi nama VOC⁽¹⁾. VOC inilah jang sedjak itu memonopoli perdagangan di Indonesia. Kolonisasi dan exploitasi Indonesia jang dimulai oleh VOC ini kemudian, pada achir abad ke-18, dengan resmi diambil oper oleh pemerintah Belanda.

Dibawah pendjadjahan Belanda Rakjat Indonesia mengalami penderitaan jang sangat berat dari dua matjam tindasan, tindasan kapitalis² asing dari luar dan tindasan tuantanah dalamnegeri. Tuantanah dalamnegeri mendjadi pembantu jang setia daripada kapitalis² asing. Belanda dan kapitalis² asing lainnja telah men-djadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah, sumber tenaga murah, sebagai pasar hasil industri negeri² kapitalis dan sebagai tempat penanaman modal asing. Tuantanah² besar mempunyai hak monopoli atas tanah sehingga kaum tani jang membasahi tanah dengan keringatnja, jang merupakan bagian terbesar dari Rakjat, kekurangan tanah atau tidak mempunyai tanah samasekali. Keadaan ini menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuantanah.

Indonesia ambil bagian jang besar dalam produksi dunia. Angka² sebelum perang dunia kedua menundjukkan bagian Indo-nesia dalam produksi dunia sbb.: meritja 92%, kina 91%, kapok 77%, karet 40%, kopra 31%, kakao 92%, agave 25%, minjak-sawit 25%, gula 25%, teh 19%, tembakau 5%, minjak 10%, bauxite 8%, kopi 5%, timah 18%.

Walaupun Indonesia kaya dalam hasil bumi dan hasil pertam-bangan, dan Rakjat Indonesia bekerdja sangat keras, tetapi Rakjat Indonesia, sebagai Rakjat djadjahan dan setengah-djadjahan lain-nja, termasuk Rakjat jang melarat. Menurut angka statistik peme-rintah kolonial Belanda tahun 1941, pembagian pendapatan nasio-nal adalah sbb.: orang Eropa di Indonesia jang hanja merupakan 0,4% dari seluruh penduduk memiliki lebih dari 65% dari pen-dapatan nasional; orang² Asia bukan-Indonesia jang merupakan 2,2% dari seluruh penduduk memiliki kira² 20% dari pendapatan nasional, sedangkan orang Indonesia jang merupakan lebih dari 97% memiliki tidak lebih dari 15% dari seluruh pendapatan nasional.

Rakjat Indonesia terus-menerus menderita kelaparan, oleh

karena itu sangat mudah diserang oleh segala matjam penjakit seperti malaria, tbc, kolera, disentri, typhus, dsb. Malaria adalah penjakit Rakjat Indonesia jang pertama, walaupun Indonesia menghasilkan kina 91% dari produksi dunia.

Dilapangan pendidikan Rakjat Indonesia sangat terbelakang. Sebelum perang dunia kedua di Indonesia hanya terdapat lebih kurang 1.000 mahasiswa dari semua fakultas, dan kira² hanya 50% mahasiswa bangsa Indonesia, sedangkan lainnja adalah bangsa Eropa dan Asia bukan-Indonesia. Murid² sekolah Rakjat kira² hanya 2 djuta, padahal djumlah anak² jang semestinja bersekolah kira² 10 djuta. Jang bisa membatja dan menulis hanya 7% dari seluruh penduduk.

Kebangunan Rakjat Indonesia Melawan Kaum Pendjadjah

Tindasan jang berat, jang tidak kenal perikemanusiaan, telah menimbulkan perlawanan Rakjat Indonesia jang sengit terhadap pendjadjah Belanda.

Diantara perlawanan² jang sengit dan banjak itu termasuk perang di Maluku dalam tahun 1817 jang dipimpin oleh *Pattimura*, perang di Djawa tahun 1825-1830 jang dipimpin oleh *Dipo Negoro*, perang di Minangkabau tahun 1830-1839 jang dipimpin oleh *Imam Bondjol*, perang ditengah Batak, di-pulau² Bali, Lombok, Sulawesi, dll. Sedangkan Atjeh baru dapat dikuasai oleh Belanda setelah berperang lebih dari 40 tahun, jaitu dari tahun 1873 sampai 1915. Semuanya ini membuktikan betapa teguh dan militannja Rakjat Indonesia berdjuaug untuk kemerdekaanja dan betapa tingginja mutu patriotisme Rakjat Indonesia. Kekalahan² jang diderita oleh Rakjat Indonesia dalam peperangan patriotik melawan Belanda bukanlah karena kurang sengitnja perlawanan, bukanlah karena kurang keberanian Rakjat atau kurang ketangkasan pemimpin² dan panglima², tetapi adalah karena Rakjat Indonesia belum dipimpin oleh suatu klas jang revolusioner dan persendjataan Belanda lebih banjak dan modern.

Dalam tahun 1905 di Rusia terdjadi Revolusi dibawah pimpinan Lenin dan Stalin. Revolusi ini mengalami kekalahan, tetapi

ia telah membangunkan Rakjat tertindas dan telah memberikan peladjaran jang tidak sedikit, tidak hanya pada proletariat Rusia, tetapi djuga pada proletariat dan Rakjat tertindas diseluruh dunia. Berhubung dengan revolusi ini Lenin berkata: „*Achirnja kapitalisme dunia dan gerakan 1905 di Rusia telah membangkitkan Asia*” (2).

Djuga klas-klas jang tertindas dan terhina di Indonesia pada bangun, pada mengorganisasi diri dan berdjuaug.

Dalam tahun 1905 berdiri serikatburuh jang pertama dikalangan buruh kereta-api dengan nama *SS-Bond* (3). Dalam tahun 1908 kaum intelektuil Indonesia mulai mengorganisasi diri dalam organisasi „*Budi Utomo*”, jang mula² se-mata² sebagai organisasi kebudajaan, tetapi kemudian mendjadi organisasi politik jang menuntut perbaikan sjarat² hidup. Peladjar² Indonesia dinegeri Belanda mengorganisasi diri dalam „*Indische Vereniging*” jang dalam tahun 1913 diganti dengan nama „*Perhimpunan Indonesia*” (4) jang mempunyai karakter politik jang tegas, jang menuntut kemerdekaan bagi Indonesia.

Dalam tahun 1911 kaum pedagang mengorganisasi diri dalam *Serikat Dagang Islam*, jang dalam tahun 1912 berganti nama „*Serikat Islam*”, jaitu organisasi jang memperdjuaugkan kepentingan pedagang² Indonesia terhadap pedagang² asing. „*Serikat Islam*” kemudian mendjadi organisasi massa jang besar, dimana didalamnja tidak hanya tergabung kaum pedagang, tetapi djuga beratus-ratus ribu kaum buruh, kaum tani dan kaum miskin kota, dan politiknya langsung ditujukan melawan kekuasaan kolonial.

Pada bulan Desember 1914 didirikan *ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereniging)*, dimana bersatu intelektuil Belanda dan Indonesia jang mempunyai fikiran² revolusioner, dan mereka mulai mempeladjar dan menjebarkan Marxisme di Indonesia. ISDV mempunyai pengaruh jang besar atas „*Serikat Islam*” dan atas usaha ISDV berdirilah serikatburuh².

Revolusi Besar Oktober 1917 mempunyai pengaruh jang sangat besar atas gerakan kemerdekaan di Indonesia. Terutama pengaruhnja sangat besar atas ISDV, dan dengan melewati anggota² ISDV pengaruhnja masuk ke-serikatburuh², kalangan intelektuil dan djuga masuk kalangan ratusan ribu kaum buruh dan kaum tani

jang tergabung dalam „Serikat Islam”. Bagian jang revolusioner dari „Serikat Islam” kemudian menamakan dirinya „Serikat Islam Merah”.

Atas inisiatif pemimpin² ISDV jang revolusioner, pada tanggal 23 Mei 1920 digantilah nama ISDV menjadi *Partai Komunis Indonesia (PKI)*, jaitu nama jang sesuai dengan nama Partai Lenin dan Stalin. Djadi, tanggal 23 Mei adalah hari kelahiran PKI. Pada bulan Desember 1920 PKI menggabungkan diri pada Komintern (5). PKI didirikan dalam waktu ketika keuntungan kapital kolonial terus meningkat tinggi, tetapi sebaliknya penghidupan kaum buruh terus merosot dengan tjepat. Dibawah pandji² PKI perjuangan melawan eksploitasi kolonial dan melawan pendjadjahan Belanda pada umumnja madju dengan tjepat.

Kemadjuan jang tjepat daripada gerakan revolusioner di Indonesia telah menimbulkan kekuatiran fihak imperialis dan telah menimbulkan kegiatan jang besar dikalangan pemerintah kolonial untuk membendung dan menghantjurkan gerakan revolusioner. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan pengedjaran, penangkapan, pembuangan dan pengusiran keluarnegeri terhadap pemimpin² jang revolusioner. Agen² provokator dimasukkan oleh reaksi kedalam organisasi² Rakjat untuk menimbulkan perpetjahan dari dalam. Sensor jang keras dilakukan terhadap penerbitan-penerbitan revolusioner. Organisasi-organisasi Rakjat ber-ulang² dilarang dan teror dilakukan terhadap pemimpin²nja. Tetapi sekian kali organisasi² Rakjat dilarang, sekian kali pula ia didirikan kembali. Polisi rahasia kolonial terus-menerus mengadakan provokasi² untuk menggulingkan organisasi² Rakjat djika organisasi² tersebut sudah agak berpengaruh. Provokasi² reaksi berhasil karena PKI ketika itu kena penyakit ke-kiri²an. Penyakit ke-kiri²an dari PKI ini telah mendapat kritik dari Kawan Stalin dalam pidatonja dimuka peladjar² Universitas Rakjat Timur tanggal 18 Mei 1925. Kritik Kawan Stalin antara lain sbb.: „*Kaum Komunis di Djawa, jang baru² ini setjara salah mengadakan sembojan kekuasaan Sovjet bagi negerinja rupa²nja terdjangkit penjelewengan ini. Ini adalah penjelewengan kekiri, jang mengandung bahaya mengisolasi Partai Komunis dari massa dan mengubahnja menjadi sekte. Perjuangan jang teguh melawan penjelewengan ini adalah sjarat jang perlu*

untuk melatih kader² jang sungguh² revolusioner bagi tanah² djadjahan dan negeri² tergantung di Timur”. Kritik kawan Stalin ini sampai sekarang masih sangat besar artinja dan dianggap sangat berharga oleh kaum Komunis Indonesia.

Puntjak daripada teror pemerintah kolonial terdjadi pada akhir tahun 1926 dan awal 1927 (6), jaitu dengan menindas pemberontakan Rakjat jang terdjadi dalam tahun² itu. Penderitaan Rakjat jang terlaiu berat dan provokasi² dari fihak pendjadjah telah menimbulkan pemberontakan ini setjara spontan. Setelah pemberontakan terdjadi PKI berusaha memberikan pimpinan padanja. Dalam beberapa bulan pemberontakan ini ditindas samasekali oleh pemerintah pendjadjah. 13.000 orang ditangkap dan 4.500 daripadja didjatuhi hukuman, dipendjarakan atau dibunuh. Sedangkan 1.300 di buang ke konsentrasikamp Boven Digul di Irian, jaitu daerah pembuangan jang sangat terkenal akan penyakit malaria-nja. Sebagian besar dari mereka jang pulang dari pembuangan sesudah perang dunia tidak bisa ambil bagian dalam aktivitas politik, karena kesehatannja sudah sangat rusak. Tetapi adalah satu kenyataan, bahwa nama PKI telah menjadi harum dikalangan Rakjat, karena kaum Komunis dengan gagah berani memberikan pimpinan dalam perlawanan bersendjata terhadap imperialis Belanda.

Sesudah terdjadi pemberontakan tahun 1926 - 1927 PKI dinjatakan dilarang oleh pemerintah kolonial. Karena banjak kehilangan kader, PKI tidak segera dapat mengumpulkan tenaganya kembali dalam illegalitet. Pukulan terhadap PKI ini adalah satu permulaan untuk menghantjurkan seluruh gerakan kemerdekaan nasional. Walaupun dalam tahun 1927 didirikan *Partai Nasional Indonesia (PNI)* jang djuga mengadakan perlawanan terhadap pendjadjah Belanda, tetapi sedjak kekalahan pemberontakan tahun 1926 - 1927 mulailah masa menurun dalam gerakan kemerdekaan nasional di Indonesia. Ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa djuga PNI jang mengadakan perlawanan terhadap pendjadjah Belanda, digulung oleh pemerintah kolonial.

Tetapi masa menurun dalam gerakan kemerdekaan hanja sebentar. Laksana petjutan halilintar dipanas terik, demikianlah pemberontakan anak-buah kapal „*Zeven Provinciën*” (7) jang perwira

pada malam tanggal 4-5 Februari 1933 memberi isyarat bahwa masa menaik dalam gerakan kemerdekaan nasional sudah mulai lagi.

Dalam tahun 1935, atas inisiatif kawan Musso (8), jang setjara rahasia kembali ke Indonesia dari luarnegeri, PKI dapat menghimpun tenaganya kembali setjara illegal. Atas inisiatif dan pimpinan kaum Komunis jang sudah terhimpun kembali ini didirikan organisasi Rakjat jang legal dengan nama „*Gerakan Rakjat Indonesia*” (GERINDO). Tudjuan GERINDO adalah terang, jaitu kemerdekaan Indonesia dilapangan politik, sosial dan ekonomi. GERINDO adalah satu²nja partai jang terang²an menentang fasisme Djepang jang mengantjam dunia dan mengantjam Rakjat Indonesia ketika itu.

Berdirinja GERINDO telah memberikan kekuatan baru kepada gerakan kemerdekaan nasional. Dalam bulan Mei 1939, atas inisiatif GERINDO dan beberapa Partai demokratis lainnja, telah dapat dibentuk „*Gabungan Politik Indonesia*” (GAPI), jaitu front persatuan dari partai² politik guna menuntut parlemen bagi Indonesia. GAPI berhasil mengorganisasi semua partai politik jang penting di Indonesia. Atas inisiatif GAPI, bulan Desember 1939 dapat diadakan Kongres Rakjat Indonesia, dan bulan September 1941 dapat dibentuk *Madjelis Rakjat Indonesia*, jaitu badan perwakilan jang dibentuk atas inisiatif Rakjat sendiri dan bertudjuan kesentosaan dan kemuliaan Rakjat berdasarkan demokrasi. GAPI maupun Madjelis Rakjat Indonesia terang²an menjatakan kesediaannya untuk bekerdjasama dengan pemerintah Belanda dalam melawan fasisme Djepang. Tetapi fihak Belanda tidak menjambut dengan baik kesediaan Rakjat Indonesia sampai saat penjerahannya kepada Djepang pada tanggal 9 Maret 1942 (9). Demikianlah, imperialis Belanda menjerahkan Rakjat Indonesia dengan tiada bersendjata samasekali kepada fasisme Djepang.

Revolusi Agustus 1945 Dan Rol Kaum Pengchianat Nasional

Dalam pendudukan Djepang kesempatan bergerak lebih terbatas lagi. Beratus-ratus kaum Komunis ditangkap dan dimasukkan kedalam pendjara oleh Djepang, dan tidak sedikit jang di-

bunuh, termasuk kader-kader pimpinan. Usaha² Djepang untuk mendirikan berbagai organisasi sivil dengan menggunakan kolaborator², dapat disabot sehingga tidak bisa berdjalan sebagai jang diinginkan oleh Djepang.

Organisasi militer dan setengah-militer didirikan oleh Djepang untuk menghimpun tenaga pemuda Indonesia guna kepentingan perangnja. Tidak sedikit pemuda² Indonesia jang dikirim kefront dan mati difront. Tetapi djuga tidak sedikit elemen² patriotik jang menggunakan kesempatan dalam tentara bikinan Djepang untuk melatih diri dalam kemiliteran dan merebut sendjata dari Djepang, agar kemudian sesudah datang saatnja dapat mengadakan pemberontakan bersendjata terhadap Djepang.

Karena menderita kekalahan² besar dalam peperangan, Djepang bertindak lebih kedjam lagi terhadap Rakjat. Pengerahan Rakjat mendjadi romusja (10) mendjadi lebih intensif dan paksaan terhadap kaum tani untuk menjerahkan padi dan ternaknja menurut harga jang ditentukan oleh Djepang dilakukan dengan antjaman sendjata. Hampir 2 djuta orang Indonesia mati diluarnegeri sebagai romusja. Dalam hubungan dengan kematian romusja diluarnegeri ini tidak bisa dilupakan sebuah kantor jang dikepalai oleh Drs. Mohamad Hatta (11), karena kantor ini giat mendorong pengerahan romusja keluarnegeri. Semuanya ini telah menimbulkan kemarahan besar pada Rakjat, dan diberbagai tempat timbul pemboikotan dan perlawanan² bersendjata dari fihak kaum tani dan romusja sendiri.

Korban Rakjat Indonesia jang berupa djiwa, jang mati karena terpaksa bertempur difront sebagai pembantu tentara Djepang atau mati karena disiksa sebagai romusja jang dikerdjakan di Indonesia maupun diluarnegeri, ada lebihkurang 5 djuta orang. Ini merupakan peladjaran jang sangat pahit bagi Rakjat Indonesia, dan menanamkan kebentjian jang tidak terhingga dari Rakjat Indonesia terhadap perang dan terhadap fasisme Djepang.

Penderitaan dan penghinaan jang merata, jang menimpa seluruh lapisan Rakjat, menimpa kaum buruh, kaum tani, intelligensia, pemuda dan peladjar, kaum pengusaha keradjinan-tangan dan pedagang², telah mempererat persatuan seluruh Rakjat

dalam perlawanan terhadap fasisme Djepang.

Ketika fasisme Djepang mendapat pukulan sengit dari tentara Sovjet yang djaja, jaitu dengan dihantjurkannya tulangpunggung kekuatan fasisme Djepang di Mantjuria, jang mendjadi sebab pokok daripada penjerahan Djepang, Rakjat Indonesia mengerti bahwa sudah tiba saatnja untuk membebaskan diri. Rakjat Indonesia menarik peladjaran jang baik dari tjontoh² jang diberikan oleh negeri² di Eropa jang membebaskan diri dengan bantuan jang bersifat menentukan dari tentara Sovjet, dan dari tjontoh jang diberikan oleh Rakjat Tiongkok jang djaja. Demikianlah, Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani jang dipimpin oleh kaum Komunis, dengan pemuda²nja sebagai elemen jang paling aktif dan jang sudah agak terlatih dalam pekerdjaan revolusioner selama pendudukan Djepang, telah berhasil mendesak Sukarno dan Hatta memproklamasikan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 (12).

Sesudah Republik Indonesia diproklamasikan, admiral Inggeris Lord Mountbatten memerintahkan kepada tentara Djepang jang ada di Indonesia untuk mendjaga „ketertiban dan keamanan” di Indonesia. Ini sama artinja bahwa tentara Djepang diperintah untuk melikwidasi Republik Indonesia, untuk menindas gerakan kemerdekaan nasional dan membela kepentingan imperialis dimana masih mungkin dibela. Kaum buruh dan kaum tani, jang dipelopor oleh kaum Komunis, dengan mati²an membela Republik Indonesia jang muda dengan sendjata jang dapat dirampasnja dari Djepang, mula² terhadap tentara Djepang, kemudian terhadap tentara imperialis Inggeris dan Belanda. PKI mengerahkan anggota²nja jang masih muda terutama untuk memasuki organisasi² pemuda jang pada permulaan revolusi tumbuh dimana-mana dengan sangat suburnja.

Dengan gagahberani tentara dan Rakjat Indonesia mengadakan serangan² terhadap tentara pendjadjah. Dengan meninggalkan korban jang tidak sedikit dan dengan moral jang rusak, dibanjak tempat tentara pendjadjah terpaksa mengundurkan diri. Kekuatan Republik muda makin lama makin bertambah, tidak hanja dari kebangunan Rakjat dalam negeri jang bertambah besar tetapi djuga karena kaum buruh Indonesia jang ada diluar negeri serta kaum

buruh negeri² lain, seperti kaum buruh Australia, India, Mesir, Belanda dan lain²nja memberikan bantuan jang aktif dengan djalan memboikot kapal² Belanda. Teranglah, bahwa dengan djalan militer kaum imperialis tidak berhasil menghantjurkan Republik Indonesia.

Atas inisiatif wakil Republik Sosialis Sovjet Ukraina, Manuilski, dalam bulan Djanuari 1946 untuk pertama kali soal Indonesia dibitjarakan dalam Dewan Keamanan PBB. Hal ini oleh pedjuang² kemerdekaan Indonesia tidak akan dilupakan.

Imperialis Belanda, dengan dibantu oleh imperialis Amerika dan Inggeris mentjari djalan lain untuk merebut kembali kedudukannya di Indonesia jang sudah hilang itu. Mereka menggunakan metode lama jang sudah biasa mereka pakai dengan berhasil, jaitu dengan antjaman sendjata dan dengan bantuan kakitangannya bangsa bumiputera sendiri mengadakan „perundingan² setjara damai”, mengadakan intrik² dan provokasi² untuk mendapatkan „persetudjuan²” jang menguntungkan mereka. Dalam usahanya ini kaum imperialis Belanda mendapatkan orang jang tepat, jaitu Sutan Sjahrir jang ketika itu mendjabat Perdana Menteri, seorang sosialis kanan jang melajani kepentingan imperialis Inggeris dan Belanda.

Sjahrir adalah inspirator daripada politik kapitulasi jang tjelaka. Ia adalah seorang tukang ngomong dan tukang memberi konsesi kepada imperialisme. Ia berlaku pura² „kiri” dan „progresif”. Ia menamakan dirinya pelopor kekuatan ketiga dan ia mengimpikan „blok netral” antara Uni Sovjet dan Amerika, jang pada hakekatnja tidak lain daripada politik membantu imperialisme.

Dalam suasana kompromi dan perundingan sebagai ditjiptakan oleh Sjahrir, pekerdjaan mengorganisasi dan memobilisasi kekuatan revolusi mendjadi terlantar. Perpetjahan timbul dalam kekuatan revolusi, jaitu antara jang menjetudju politik berunding model Sjahrir dengan jang menentangnja. Djuga dikalangan kekuatan bersendjata timbul perpetjahan. Dengan demikian Republik Indonesia mendjadi makin lama makin lemah, sedangkan fihak imperialis sambil berunding mempersiapkan serangan² militer. Setjara besar²an tentara dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia dan

ditempatkan terutama di Djakarta, Surabaya dan Semarang (13), yaitu tempat² dimana Belanda mempersiapkan serangannya setjara besar²an.

Setelah lama berunding antara delegasi Belanda dengan Indonesia, yang dipimpin oleh van Mook dan Max van Poll disatu pihak dengan Sjahrir difihak lain, pada tanggal 15 November 1946 tertjapai suatu persetudjuan, yang diberi nama sesuai dengan tempat dimana persetudjuan dibuat, yaitu *Linggardjati*. Persetudjuan ini dibikin atas inisiatif dan dibawah pengawasan *Lord Killearn*, wakil imperialis Inggeris. Persetudjuan Linggardjati antara lain menjatakan bahwa kekuasaan pemerintah Republik Indonesia hanya diakui de facto atas Djawa, Madura dan Sumatera. Dengan ini Belanda mempunyai basis yang kuat untuk menggunakan bagian² lain dari Indonesia, seperti pulau² Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil, Maluku, dll.nja untuk kepentingan agresinja, untuk kepentingan politiknya maupun militernja. Dengan giat Belanda mendirikan negara² boneka diluar daerah de facto Republik dengan menggunakan pengchianat² nasional untuk dipakai guna melawan Republik Indonesia. Dalam hal ini PKI telah membikin kesalahan besar karena ikut menjetudjui persetudjuan Linggardjati yang ditandatangani oleh Sjahrir.

Disamping mengadakan persiapan² politik dan militer, imperialis Belanda terus mentjari alasan untuk mengadakan peperangan yang terang²an terhadap Republik Indonesia. Imperialis Belanda mendapat „alasan” ketika Republik Indonesia menolak tuntutan Belanda untuk mengadakan patroli didaerah kekuasaan Republik. Tuntutan Belanda ini disetudjui oleh Sjahrir, tetapi ia ditentang keras oleh Rakjat Indonesia. Kerasnja tentangan Rakjat terhadap keinginan berkapitulasi dari Sjahrir, berakibat dengan djatuhnya kabinet Sjahrir, dan dibentuk kabinet yang dipimpin oleh kaum Komunis dalam bulan Djuli 1947 dengan kawan Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri. Dibawah pimpinan pemerintah Amir Sjarifuddin dilakukan perdjjuangan terhadap tentara Belanda selama perang kolonial pertama, yaitu perang yang dimulai pada 20 Djuli 1947 atas perintah pemerintah Belanda Beel-Drees. Sebagaimana sudah kita ketahui, Drees adalah seorang pemimpin sosialis

kanan Belanda.

Pendjadjah Belanda mengira bahwa dengan mengadakan perang kolonial akan lebih mudah menghantjurkan Republik. Tetapi kenjataanja tidak demikian. Tentara Belanda menemui perlawanan² yang sengit dari Rakjat dan tentara Republik, dan tentara Belanda hanya mungkin menduduki kota² besar. Sedangkan didesa-desa dan gunung² berkuasa tentara Republik Indonesia dan pasukan² gerilja, sehingga kedudukan tentara Belanda boleh dikatakan terisolasi. Kaum buruh seluruh dunia menentang dengan keras perang kolonial yang dilakukan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia. Ini dinjatakan oleh sikap *Gabungan Serikatburuh Sedunia* dan oleh instruksi GSS kepada seluruh anggotanja untuk solider dengan Rakjat Indonesia. Solidaritet internasional dari kaum buruh seluruh dunia ini serta kegiatan² dari wakil Uni Sovjet di Dewan Keamanan PBB, telah memaksa Dewan Keamanan memerintahkan imperialis Belanda untuk menghentikan perang kolonialnja. Sikap imperialis Amerika dengan begundalnya yang memusuhi Rakjat Indonesia dan berdiri difihak imperialis Belanda, kelihatan dari sikapnja yang tidak menjetudjui usul wakil Uni Sovjet untuk menarik kembali tentara Belanda sampai kegaris sebelum perang kolonial.

Dewan Keamanan PBB memutuskan membentuk Komisi Djasa² Baik (KDB)(14), yang kemudian ternjata samasekali tidak baik itu. Sedjak ada komisi ini Amerika dengan terang²an tjampur-tangan mengenai soal-soal dalamnegeri Indonesia. Dengan djalan perundingan imperialis Amerika berusaha memaksakan keinginanja pada gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia, dan berusaha menjingkirkan pengaruh Inggeris serta merebut tempat yang pertama dalam perundingan Indonesia-Belanda. Amerika memerlukan Indonesia untuk persiapan perangnja yang djahat.

Dalam bulan November 1947 Amerika menjediakan kapal perang „Renville” untuk perundingan Indonesia-Belanda. Pada tanggal 12 Djanuari 1948 *Persetudjuan Renville* ditandatangani. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin melandjutkan politik kapitulasi yang dimulai oleh Sutan Sjahrir. Berdasarkan Persetudjuan Renville, Republik Indonesia menarik kira² 35.000 pradjurit dari daerah² kantong (15), sebagian

besar dari Djawa Barat. Dengan demikian tentara Belanda mendapat kesempatan mengaso guna mempersiapkan serangan² baru. Sedangkan dari negeri Belanda terus mengalir tentara ke Indonesia.

Imperialis Amerika terang²an mentjampuri soal² intern Republik Indonesia. Mereka mengirimkan agen² seperti G. Hopkins, Campbell, dll. yang berkewadajiban menghantjurkan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh kaum Komunis. Mereka mengadakan intrik² supaya Persetujuan Renville diterima, tetapi bersamaan dengan itu mereka mengorganisasi sematjam „perlawanan” dari pemimpin² Masjumi dalam kabinet Amir Sjarifuddin; pemimpin² Masjumi kemudian diperintah oleh agen² Amerika untuk menjatakan „tidak setuju” pada Persetujuan Renville dan selanjutnya menolak untuk terus ambil bagian dalam pemerintah Amir Sjarifuddin. Dengan perbuatan busuk ini mereka mau membubarkan pemerintah Amir Sjarifuddin dan membentuk suatu pemerintah tanpa Komunis. Mereka mengadakan intimidasi². Karena kurang kewaspadaan dan karena tidak mengerti bahwa soal revolusi adalah soal kekuasaan negara, kawan Amir Sjarifuddin telah menjerahkan kekuasaan yang ada dalam tangannya dengan sukarela dalam bulan Djanuari 1948. Sebagai pengganti pemerintah Amir Sjarifuddin dibentuk pemerintah Hatta, dimana pemimpin² Masjumi ambil bagian yang terpenting dan pemerintah ini..... menerima serta mendjalankan Persetujuan Renville dengan patuh. Untuk melaksanakan Persetujuan Renville dibentuk suatu delegasi baru dibawah pimpinan Mohamad Roem dari Masjumi guna meneruskan perundingan dengan Belanda. Demikianlah pemimpin Masjumi mendjalankan rolnja sebagai burdjuis komprador, sebagai pengchianat revolusi dan sebagai agen dari imperialis asing.

Djadi, disatu fihak pemerintah Amir Sjarifuddin berani mengadakan perang kemerdekaan terhadap imperialis Belanda — disamping mengadakan undang² perburuhan yang progresif — tetapi di fihak lain, karena tekanan yang keras dan intrik² dari imperialis Belanda dan Amerika ia telah meneruskan politik kapitulasi Sutan Sjahrir dan telah menjerahkan dengan sukarela pemerintah yang dipegangnya kepada reaksi.

Dengan kekuasaan pemerintah didalam tangannya kaum reak-

sioner meneruskan pengchianatannya terhadap revolusi dan terhadap tanahair. Pada tanggal 21 Djuli 1948 di Sarangan (Madiun) diselenggarakan konferensi rahasia antara G. Hopkins (penasehat politik luar negeri Truman) dan M. Cochran (wakil Amerika dalam Komisi Djasa² Baik) disatu fihak dengan fihak pemerintah Indonesia yang dikepalai oleh Hatta, yang pada waktu itu sebagai Perdana Menteri. Hadir dalam konferensi ini pemimpin² Masjumi seperti Sukiman, Natsir dan Mohamad Roem. Konferensi Sarangan yang rahasia ini telah menelorkan putusan djahat yang kedji, yang diberi nama „Red Drive Proposals” (16). Aktivitet Amerika menghantjurkan gerakan kemerdekaan di Indonesia hanyalah satu bagian daripada aktivitet Amerika diseluruh dunia, karena bersamaan dengan penghantjuran gerakan kemerdekaan di Indonesia, djuga di-negeri² lain seperti di India, Birma dsb. diadakan penghantjuran² yang hampir sama dengan apa yang kedjadian di Indonesia.

Dalam keadaan dimana tekanan imperialisme Amerika makin keras terhadap Republik Indonesia, dalam bulan Agustus 1948 kembalilah kawan Musso dari luar negeri. Kawan Musso segera mengadakan koreksi terhadap politik yang didjalankan oleh PKI dan terhadap kesalahan² PKI dilapangan organisasi. Ia menunjukkan betapa besarnya bahaya bagi Revolusi Indonesia djika tidak mengambil sikap yang tegas terhadap imperialisme. Kedatangan kawan Musso telah menimbulkan semangat perdjjuangan yang baru.

Dibawah pimpinan kawan Musso diadakan selfkritik didalam Central Komite PKI. Dalam selfkritik ini diakui, bahwa PKI telah membikin kesalahan² dilapangan organisasi dan politik, karena PKI tidak memahamkan adanya perubahan keadaan politik didalam negeri sesudah proklamasi kemerdekaan dan karena PKI tidak memahamkan keadaan internasional yang penting sesudah perang. Akibatnya PKI telah terlalu mem-besar²kan kekuatan imperialisme dan mengetjilkan kekuatan anti-imperialisme. Selanjutnya diputuskan, bahwa PKI mengakui kesalahannya karena sudah menjetudjui Persetujuan Lingardjati dan PKI berdjjuang untuk membatalkan Persetujuan Renville dan semua persetujuan yang dibikin dalam perundingan yang tidak didasarkan atas kedudukan

jang sama. Seterusnya, jang merupakan pokok koreksi dilapangan organisasi, semua Partai jang berdasarkan Marxisme-Leninisme, jaitu PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia harus dipersatukan, sehingga di Indonesia hanja ada satu Partai Marxis-Leninis, jaitu PKI. Untuk mendapat sokongan kaum tani dalam revolusi, jaitu sokongan jang sangat penting dari l.k. 70% Rakjat Indonesia, PKI harus mendjalankan perubahan tanah. Atas dasar persekutuan buruh dan tani, PKI harus membentuk front persatuan nasional. Pekerdjaan kaum Komunis dikalangan angkatan bersendjata harus diperbaiki. Penghidupan Rakjat, terutama kaum buruh dan kaum tani, harus ditingkatkan. Semuanja ini ditjantumkan dalam sebuah resolusi jang diambil dalam konferensi Partai bulan Agustus 1948, jang terkenal dengan nama Resolusi „Djalan Baru”. Demikianlah PKI mengadakan selfkritik atas kesalahan²nja dilapangan politik dan organisasi dan dengan demikian PKI memberikan perspektif jang baru dan djelas kepada massa jang sudah begitu lama dibawa tenggelam dalam politik berunding dan memberi konsesi jang banjak pada imperialis sehingga bersifat kapitulasi.

Djalan baru jang ditempuh oleh PKI mendapat sambutan dari massa. Rapat² umum jang diadakan oleh PKI mendapat kundingan puluhan sampai ratusan ribu orang. Didalam rapat² umum ini dikemukakan setjara terang²an selfkritik PKI, didjelaskan program baru dari PKI, dan selanjutnja PKI mengadjak massa untuk meneruskan peperangan kemerdekaan melawan imperialis Belanda. Kedok pemerintah Hatta dan kedok partai Masjumi mulai terbuka bagi massa. Massa mulai memahami bahwa djalan baru jang ditunjukkan oleh PKI adalah satu²nja djalan untuk memenangkan revolusi.

Melihat gerakan kemerdekaan Rakjat jang makin maju dibawah pandji² PKI dan melihat pemerintah Hatta segera akan terisolasi, imperialis Belanda dan Amerika mendjadi sangat kuatir. Mereka menetapkan tindakan²nja untuk menghantjurkan PKI dan menghantjurkan gerakan kemerdekaan jang dipimpin oleh PKI, sesuai dengan putusan konferensi Sarangan.

Achir bulan Agustus 1948 mulai provokasi² di Solo dan kemudian dibeberapa tempat lain jang dibikin oleh „diplomat” luar-

negeri dengan bantuan partai Masjumi, kaum trotskis dan kaum sosialis kanan. Perwira² tentara jang revolusioner dibunuh setjara pengetjut. Kantor² serikatburuh dan kantor² Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) diduduki dengan paksa oleh golongan tentara jang tertentu. Kaum sosialis kanan dengan PSInja dan kaum trotskis dengan apa jang dinamakannja Gerakan Revolusi Rakjat mendjadi aparat jang penting dalam tangan imperialis dan kaum reaksioner.

Dalam pertengahan September 1948 terdjadi insiden ketjil di Madiun didalam tentara, antara golongan jang menjetudju politik reaksioner dan provokatif dari pemerintah Hatta dengan golongan jang dibawah pengaruh kaum revolusioner. Kedjadian ketjil ini ditiup oleh pemerintah Hatta dan dengan berdusta fihak pemerintah mengatakan, bahwa di Madiun terdjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan kaum Komunis mendirikan negara sendiri. Dengan alasan dusta ini fihak pemerintah Hatta menjerukan kepada semua aparatnja untuk mengedjar, menangkap dan membunuh kaum Komunis dan anggota² Front Demokrasi Rakjat, jaitu front persatuan jang dipimpin oleh kaum Komunis. Djuga anggota Masjumi dimobilisasi untuk mengedjar, menangkap dan membunuh Komunis. Dalam keadaan demikian ini tidak ada djalan lain bagi kaum Komunis dan bagi kaum revolusioner lainnja ketjujali membela diri terhadap teror pemerintah. Kira² 10.000 kaum buruh dan kaum tani serta golongan Rakjat lainnja, dengan pemimpin²nja, Komunis dan bukan-Komunis, dibunuh dalam kedjadian Madiun ini. Djuga pemimpin² PKI jang terkemuka dan pemimpin² kaum buruh jang terkemuka, seperti kawan Musso, Amir Sjarifuddin, Suripno, Dr. Wioreno, Harjono, Sardjono dan banjak lagi lainnja mati dibunuh dalam kedjadian Madiun ini.

Tudjuan Provokasi Madiun ini jalah untuk menghantjurkan gerakan buruh dengan PKI sebagai pelopornja, dan dengan demikian memisahkan gerakan kemerdekaan nasional dari pimpinannja jang revolusioner untuk selanjutnja samasekali melumpuhkannja. Dan terbukti pula kemudian bahwa Provokasi Madiun adalah satu persiapan untuk mengadakan perang kolonial kedua jang terdjadi dalam bulan Desember 1948. Perang kolonial ini adalah sebagai tekanan untuk memaksa Rakjat Indonesia menerima persetudjuan

jang chianat, jaitu persetudjuan KMB jang pada tanggal 2 November 1949 ditandatangani di Nederland oleh Hatta dan Sultan Abdul Hamid dari fihak Indonesia dan Maarseveen dari fihak keradjaan Belanda, dengan diawasi oleh *Merle Cochran*, wakil imperialis Amerika. Demikianlah kaum reaksioner Indonesia mengchianati kepentingan nasional. Bagi mereka lebih baik menjerahkan Indonesia kepada imperialis Belanda dan Amerika dan mendjadikan dirinja budak jang setia daripada bersatu dengan kaum Komunis dan Rakjat melawan imperialisme.

Agak pandjang saja menguraikan beberapa pengalaman jang penting dalam perdjungan kita jang lampau, perdjungan sebelum perang dunia kedua, perdjungan melawan pendjadjah Djepang dan perdjungan kita selama Revolusi Rakjat tahun 1945 - 1948. Ini saja anggap perlu karena salahsatu kekurangan jang serius daripada kader² gerakan buruh dan gerakan Rakjat, ialah kurang mengerti sedjarah perdjungan klasnja dan sedjarah perdjungan bangsanja. Karena kekurangan pengetahuan ini, ketjintaan dan kesetiaan mereka terhadap perdjungan kurang mempunyai dasar jang kuat, mereka se-olah² terlepas daripada perdjungan² jang lampau, mereka tidak melihat gerakan kita sebagai suatu gerakan jang tumbuh, jang berkembang, makin lama makin madju, makin luas dan makin tinggi. Oleh karena itu Partai senantiasia menekankan kepada kader² dan anggota²nja supaya mempelajari sedjarah bangsa kita dan sedjarah perdjungan dengan tjara jang teratur dan mendalam.

Indonesia Sekarang Negeri Setengah-Djadjahan

Atas dasar persetudjuan KMB pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan apa jang dinamakan „penjerahan kedaulatan” oleh Nederland kepada Indonesia. Persetudjuan KMB ini, sebagaimana djuga persetudjuan Linggardjati dan Renville adalah persetudjuan kolonial, tidak dibikin dalam perundingan atas dasar kedudukan jang sama. Ini kelihatan dari isi persetudjuan KMB jang hina itu.

Dengan diterimanya persetudjuan KMB oleh pemerintah Indonesia kaum imperialis Belanda berhasil mempertahankan pengawasanja atas Indonesia. Indonesia menjadi anggota dari apa jang dinamakan Uni Indonesia-Belanda dibawah naungan Ratu

Belanda.

Politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia dikontrol oleh pemerintah Belanda.

Republik Indonesia diwadjibkan membajar hutang Hindia Belanda kepada negeri Belanda dan negeri² imperialis lainnja seperti Amerika, Inggeris dll. sebanjak lebih dari 5 miljard rupiah. Ini berarti, bahwa ongkos² perang kolonial jang dikeluarkan oleh Belanda dan ongkos² lainnja untuk menindas Rakjat Indonesia harus dibajar oleh Rakjat Indonesia.

Menurut persetudjuan KMB pemerintah Indonesia tidak berhak mengadakan persetudjuan² dagang dan perdjandjian² dengan negara² lain setjara bebas. Semua usaha dilapangan industri, perdagangan dan keuangan seperti: bank, pabrik, tambang, sentral listrik, pengangkutan, perkebunan, dsb. jang dimiliki oleh kaum pendjadjah di Indonesia, dinjatakan oleh persetudjuan itu sebagai tak boleh diganggu-gugat dan kenjataanja dibela dengan setia oleh pemerintah reaksioner Indonesia. Persetudjuan itu mewadjibkan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan perusahaan² dan konsesi² kepada semua orang asing (ketjual Djepang dan Djerman), untuk mengembalikan hak-hak istimewa orang² asing dan untuk mengakui berlakunja hak² ini dihari kemudian.

Pegawai² Belanda masih tetap ada di Indonesia. Demikian djuga di Indonesia ditetapkan adanja Misi Militer Belanda (MMB). Pengeluaran untuk memeliharaja ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Gadji pegawai² Belanda djauh lebih tinggi daripada gadji pegawai² Indonesia. Pegawai² sivil dan militer Belanda masih tetap mengontrol alat² negara dan mengontrol tentara Indonesia. Selain daripada itu, pegawai² Belanda merupakan tenaga² spion dan tukang-sabot jang berada didalam aparat Republik Indonesia.

Untuk mengabui mata Rakjat Indonesia, Hatta mengatakan bahwa dengan KMB berarti „lenjapnja kekuasaan kolonial atas Indonesia”. Kenjataan² sebagaimana tertjantum dalam persetudjuan KMB dan sebagaimana jang dialami oleh Rakjat Indonesia selama beberapa tahun sesudah persetudjuan KMB adalah tidak demikian.

Jang benar jalah, bahwa di-negeri² djadjahan kaum imperialis sudah tidak bisa lagi berkuasa setjara lama, tjara jang kasar. Mengingat kebangunan Rakjat negeri² djadjahan, mereka terpaksa memakai metode jang tidak langsung. Pendjadjahan setjara kasar seperti sebelum perang dunia kedua termasuk metode jang sudah kuno dan membahayakan kedudukan imperialis sendiri. Oleh karena itu mereka terpaksa memberi apa jang mereka namakan „hak memerintah diri sendiri” kepada djadjahan mereka, seperti jang terdjadi dengan India, Birma, Indonesia, dll.

Dengan persetudjuan KMB, imperialis Belanda dan pengchia-nat² nasional dibawah pengawasan imperialis Amerika, menetapkan kedudukan Indonesia sebagai negeri setengah-djadjahan. Artinja, Indonesia mempunyai apa jang mereka namakan „hak memerintah diri sendiri”, tetapi dalam kenjataanja kekuasaan jang sesungguhnya dilapangan politik, ekonomi dan militer masih tetap ditangan imperialis Belanda, dan pintu Indonesia dibukakan seluas²nja oleh persetudjuan KMB untuk penetrasi² politik, ekonomi, dan militer bagi imperialis Amerika dan negeri² imperialis lainja.

Oleh karena itu tidak mengherankan, djika di Indonesia sekarang keadaan kaum buruh dan keadaan Rakjat umumja masih tetap djelek seperti sebelum perang dunia kedua, dan dalam beberapa hal lebih djelek lagi. Sebelum perang orang sering menggambarkan kemelaratan Rakjat Indonesia dengan kalimat, bahwa Rakjat Indonesia adalah „Bangsa jang terdiri dari kuli² dan kuli diantara bangsa²”. Keadaan sebagai digambarkan oleh kalimat ini sampai sekarang masih berlaku.

Disamping kekuasaan Belanda jang masih bertjokol, imperialis Amerika berusaha keras untuk merebut tempat jang pertama dalam mengexploitasi alam dan Rakjat Indonesia dan untuk mendapatkan pangkalan² perang di Indonesia. Amerika berhasil mempengaruhi pemerintah Hatta, dan kemudian pemerintah Natsir dan Sukiman, jang ke-dua²nja dari partai Masjumi. Dengan pemerintah² ini sebagai alatja, imperialis Amerika memaksakan kepada Rakjat Indonesia apa jang mereka namakan pindjaman Eximbank (17), embargo terhadap RRT, perdjandjian San Fransisco dan MSA. Dengan pindjaman dan perdjandjian² ini Amerika berusaha mendjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentahnja,

sebagai pasar barang industrinja, sebagai tempat penanaman modalja, sebagai pangkalan perangnya dan achirja sebagai tempat untuk mendapatkan serdadu² jang murah.

Amerika telah menetapkan seenaknja sendiri harga karet dan timah Indonesia dan djuga menetapkan apa jang mesti dibeli oleh Indonesia dari Amerika, jang dengan sendirinja hanja barang² jang dapat melantjarkan exploitasi dan persiapan perang Amerika. Amerika telah menarik pemerintah Indonesia kefihakja untuk ambil bagian dalam menghidupkan kembali militerisme Djepang berdasarkan perdjandjian San Fransisco.

Dalam pertengahan tahun 1951 imperialis Amerika telah memerintahkan pada pemerintah Sukiman untuk mengadakan pengedjaran terhadap kaum Komunis dan memfasiskan sistim pemerintahan. Perintah Amerika ini dengan patuh didjalankan oleh pemerintah Sukiman, dan berdasarkan perintah inilah dalam bulan Agustus 1951 lebih dari 2.000 kaum patriot dan pedjuang perdamaian ditangkap, terdiri dari pemimpin² Komunis, pemimpin² serikatburuh, serikattani, organisasi pemuda dan peladjar, organisasi wanita, pemimpin² komite perdamaian, dan lain².

Politik Amerika di Indonesia tidak hanja telah mempertadjam pertentangan dalam blok imperialis sendiri, tetapi djuga telah menimbulkan semangat anti-Amerika. Perlawanan Rakjat terhadap politik Amerika telah memaksa pemerintah Sukiman turun panggung dan sebagai penggantinya dibentuk pemerintah Wilopo jang tidak mengakui perdjandjian MSA jang sudah ditandatangani oleh pemerintah Sukiman. Pemerintah Wilopo djuga telah membebaskan semua tahanan Razzia Agustus Sukiman.

Setelah gagal dengan MSA, Amerika berusaha mengikat Indonesia dengan apa jang dinamakan TCA, jang pada hakekatja adalah djuga untuk memperbudak dan merampok negeri² terbelakang. Amerika djuga berusaha menarik Indonesia kedalam Pakt Pasifik jang agresif, tetapi perlawanan Rakjat Indonesia telah menggagalkan usaha Amerika ini.

Irian Barat, jaitu bagian jang sah dari Republik Indonesia, sampai sekarang masih langsung dikuasai oleh imperialis Belanda. Irian Barat adalah daerah jang luasja 375.000 km² dan kaya dengan barang pelikan seperti minyak, batubara, tembaga, osmiri-

dium, platina, sing, nikel, chroom, mas, perak, besi, asbes, marmar, dll. Dan yang sangat penting ialah bahwa di Irian Barat terdapat uranium. Walaupun tuntutan Rakjat Indonesia keras supaya Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia, tetapi imperialis Belanda tidak mau menjerahkannya, karena Irian Barat memberi harapan² baik untuk keuntungan² besar bagi kapital² besar Belanda dan karena pulau besar ini adalah sangat diperlukan Amerika untuk kepentingan paktnja yang agresif, antara lain Pakt Pasifik.

Teranglah apa yang dinamakan „penjerahan kedaulatan” yang terjdjadi pada tanggal 27 Desember 1949, sesuai dengan persetudjuan KMB, adalah untuk menimbulkan lamunan dikalangan Rakjat Indonesia bahwa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya yang penuh dan bahwa „penjerahan kedaulatan” adalah „njata, komplit dan tak-bersjarat”. Kenyataan² yang pahit selama tiga tahun „merdeka” dibawah kontrol Belanda dan Amerika, memaksa Presiden Sukarno, dalam pidatonya pada hari ulangtahun ke-VII proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1952, mengakui bahwa penjerahan kedaulatan adalah tidak njata, tidak komplit dan bukannya tidak bersjarat. Selandjutnja Sukarno berkata: „Sehingga dengan demikian, perdjjuangan kita melawan pendjadjahan ditanahair kita sendiri, belumlah boleh dikatakan habis”. Satu utjapan yang terang bersifat menentang persetudjuan KMB yang chianat. Kenyataan terlalu kuat untuk tidak mengakui palsu-nja „penjerahan kedaulatan” menurut persetudjuan KMB.

Tjengkeraman Krisis Ekonomi Dan Kemelaratan Rakjat Dalam Indonesia Jang Setengah-Djadjahan

Telah banjak dibitjarakan oleh golongan yang berkuasa tentang rentjana untuk pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan ekonomi. Tetapi sesungguhnya, Indonesia sekarang berada dalam tjengkraman krisis ekonomi yang terus-menerus dan sudah dekat pada keruntuhanja.

Djumlah produksi Indonesia dalam tahun 1952 merosot menjdjadi 65% sampai 85% djika dibandingkan dengan tahun 1938. Menurut Kantor Pusat Statistik Indonesia, dalam sepuluh bulan pertama dari tahun 1952 Indonesia mempunyai surplus impor 1.360 djuta rupiah, sedangkan tahun 1951 telah ada balans yang

menguntungkan sebanjak 1.077 djuta rupiah. Ini terutama disebabkan karena sangat merosotnja harga barang² ekspor Indonesia yang 70 sampai 80% terdiri dari bahan² karet, timah dan kopra. Ini terutama disebabkan oleh politik embargo dan blokade dari imperialis Amerika.

Menurut nota keuangan menteri keuangan Sumitro, penghasilan negara tahun 1953 kira² 7,5 miljard; 73% dari penghasilan ini didapat dari padjak², 24,5% dari penghasilan lain yang pada hakekatnja djuga padjak, dan hanya 2,5% didapat dari keuntungan perusahaan negara.

Tetapi disamping krisis ekonomi yang terus-menerus menjengkram Indonesia, keuntungan kapital Belanda dalam tahun 1951 berdjumlah lebih dari 1,5 miljard rupiah, jaitu djumlah yang belum pernah ditjapai sedjak tahun 1926, tahun keemasan bagi modal asing di Indonesia.

Tjengkraman krisis ekonomi yang terus-menerus dengan sendirinja membikin tingkat hidup sangat merosot dan makin lama makin merosot lagi. Djuga kemandjauan Rakjat dilapangan pendidikan dan kebudayaan menjdjadi sangat terhalang.

Upah kaum buruh Indonesia sangat rendah, sedang upah riilnja terus merosot berhubung dengan harga barang² terus meningkat. Menurut Kantor Pusat Statistik pada bulan Desember tahun 1951, untuk makanan satu orang dibutuhkan 155,49 rupiah tiap² bulan. Sedangkan menurut angka² resmi djuga, upah terendah tahun 1951 ialah 117,— rupiah sebulan atau 5,20 rupiah sehari buat buruh pertambangan, pabrik, bangunan dan transpor. Djadi, upah seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan makan satu orang sadja tidak tjukup. Belum lagi ongkos makan untuk anak dan isterinja serta kebutuhan² lain yang djuga menjdjadi kebutuhan pokok seperti pakaian dan perumahan. Upah 5,20 rupiah sehari ini baru berlaku bagi buruh pertambangan, pabrik, bangunan dan transport, sedangkan di-perusahaan² rokok, batik, tekstil, kulit, pertjetakan, bahan makanan, pertanian, dll., upah masih berada diantara 3 dan 4 rupiah sehari, dan buruh ini merupakan djumlah yang terbanjak. Ketetapan upah minimum bagi kaum buruh tidak ada sehingga upah buruh yang paling rendah ditentukan dengan se-wenang² oleh fihak madjikan. Dibanding dengan tahun² sebelum

perang kebutuhan se-hari² naik 30 sampai 40 kali, sedangkan upah rata² hanya naik 10 kali.

Menurut keterangan fihak pemerintah, djumlah penganggur dan setengah penganggur dari seluruh Rakjat Indonesia ada 15 djuta, dan bagian terbesar, jaitu kira² 10 djuta terdiri dari kaum tani miskin dan tani tak-bertanah. Sedangkan lainnja terdiri dari kaum buruh dan kaum miskin kota. Pengangguran kaum buruh jang tertjatat dalam tahun 1950 ada 179.546 orang sedang tahun 1951 ada 252.671 orang, artinja dalam satu tahun bertambah dengan lebih dari 40%. Bagian terbesar dari kaum buruh jang menganggur tidak mendaftarkan diri karena ketjilnja kemungkinan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, jang berupa pekerdjaan maupun sokongan uang. Kantor Pendaftar Kaum Penganggur termasuk salahsatu kantor jang sangat tidak populer.

Kedudukan kaum tani, jang merupakan kira² 70% dari seluruh Rakjat Indonesia, tidaklah lebih baik daripada waktu² jang lampau. Di Indonesia masih berkuasa sisa² feodalisme jang penting dan berat, jaitu: *hak tuantanah besar untuk memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa tanah dari pemilik² tanah dan menurut sjarat apa sadja; pembajakan sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian sangat terbesar dari hasil panen kaum tani dan jang mengakibatkan kemelaratan daripada bagian terbesar kaum tani; sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah², jang menempatkan bagian terbesar dari kaum tani dalam kedudukan hamba; jang terachir jalah tumpukan hutang² jang mendjerat batangleher bagian terbesar kaum tani jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.* Akibat daripada sisa² feodalisme ini adalah terang: terbelakangnja teknik pertanian, kemelaratan bagian terbesar dari kaum tani, susutnja pasar dalam-negeri, tidak mungkinnja mengindustrialisasi negeri.

Pembijtaraan tentang mengindustrialisasi Indonesia adalah pembijtaraan jang kosong belaka, selama pembijtaraan tentang ini tidak dihubungkan dengan soal pemberian tanah dengan tjuma² kepada kaum tani untuk dikerdjakannja sendiri. Bukankah negeri jang berindustri menghendaki Rakjat jang kuat membeli hasil

industri? Selama kaum tani, artinja 70% dari Rakjat Indonesia, masih hidup melarat, maka kaum tani tidak mempunyai kekuatan untuk membeli hasil industri. Djelaslah, bahwa industri tidak mungkin berkembang dinegeri dimana Rakjatnja masih berada dalam kedudukan budak atau hamba.

Dalam Indonesia setengah-djadjahan, inteligensia Indonesia tidak mempunyai haridepan jang baik. Keinginan untuk menuntut peladjaran di Indonesia adalah sangat besar. Ini dapat dilihat dari angka-angka sbb.: sebelum perang djumlah mahasiswa dari semua fakultas kira² 1.000 orang, sedangkan dalam tahun 1953 djumlah peladjar sekolah tinggi ada 10.000 orang. Kurangnja alat² dan sukarnja penghidupan para mahasiswa tidak memungkinkan hasil studi jang baik. 80% dari mahasiswa terpaksa beladjar sambil bekerdja untuk mentjari nafkah. Pada permulaan tahun 1953 harga buku peladjaran dari luarnegeri naik dengan 300%. Beberapa angka lagi mengenai pendidikan: pada permulaan 1951 murid sekolah Rakjat berdjumlah 6 djuta, djumlah ini tiga kali daripada djumlah sebelum perang, dan djumlah ini baru memenuhi 40% daripada anak² Rakjat jang mau sekolah. Sedangkan jang 60% walaupun sudah tjukup umurnja dan mau bersekolah, terpaksa tidak bersekolah karena kekurangan sekolah. Djumlah butahuruf masih tetap besar, jaitu kira² 80% dari seluruh penduduk. Teranglah, bahwa dilapangan pendidikan dan kebudayaan, Indonesia masih tetap terbelakang.

Pemerintah Indonesia jang terikat oleh persetudjuan KMB tidak membela kepentingan perdagangan dan industri nasional jang perkembangannja sangat lambat itu. Burdjuasi nasional tidak hanya tidak mungkin meluaskan usaha²nja dan mendirikan perusahaan² industri jang baru, tetapi ia djuga tidak mampu mempertahankan kedudukannja jang ada terhadap serangan² modal asing, serangan² kapitalis Belanda, Amerika dan Djepang. Lemahnja dajabeli Rakjat djuga merupakan faktor jang penting jang menjebabkan hantjurnja perdagangan dan industri nasional. Hampir saban hari dalam surat kabar² Indonesia dimuat keluhan dari pedagang dan pengusaha perindustrian nasional tentang kesulitan² mereka dan tentang penutupan perusahaan² mereka. Penutupan perusahaan² nasional ini lebih memperbanjak djumlah kaum pe-

nganggur.

Demikianlah keadaan Indonesia sekarang, Indonesia setengah-djadjahan dan setengah-feodal. Selama keadaan di Indonesia masih tetap tidak berubah, artinja selama kekuasaan imperialisme belum digulingkan dan sisa² feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin bebas dari keadaan melarat, terbelakang dan pintjang. Kekuasaan imperialisme dan sisa² feodalisme tidak akan hapus selama kekuasaan negara di Indonesia ada di-tangan tuan feodal dan komprador yang kepentingannya berhubungan erat dengan kapital asing, karena kekuatan negara yang demikian mempertahankan penindasan imperialis dan sisa² feodal di Indonesia.

Dengan Front Persatuan Nasional Menuju Kemerdekaan Nasional Penuh

Dengan menarik pelajaran dari pengalaman pemberontakan tahun 1926 - 1927 yang kalah, dengan menarik pelajaran dari Revolusi Rakjat 1945 - 1948 yang gagal dan dari Provokasi Madiun bulan September 1948 yang kedjam, Rakjat Indonesia dibawah pimpinan klas buruh Indonesia berdjuaug dengan militan untuk keluar dari keadaan setengah-djadjahan dan setengah-feodal. Rakjat Indonesia, sebagaimana djuga Rakjat negeri² lain, mempunjai tradisi dan semangat revolusioner yang gemilang.

Kaum buruh Indonesia yang berdjumlah kira² 6 djuta yang sedjak permulaan abad ke-20 sudah memelopori perdjuaugan kemerdekaan nasional, sekarang dalam keadaan yang lebih ter-organisasi dan lebih berdisiplin, berdiri dibarisan paling depan daripada perdjuaugan untuk demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh dan perdamaian.

Kira² 50% dari seluruh kaum buruh Indonesia, jaitu sedjumlah 3 djuta, sudah terorganisasi. Menurut laporan dalam Konferensi Nasional SOBSI bulan Oktober 1952, 2,5 djuta atau 85% dari kaum buruh yang sudah terorganisasi tergabung dalam SOBSI, terutama buruh perusahaan² vital seperti kereta-api, minjak, transpor bermotor, kapal dan pelabuhan, perkebunan, pabrik gula, dsb. Sedangkan 15% dari buruh yang terorganisasi, jaitu sedjumlah 0,5 djuta terorganisasi dalam serikatburuh yang didirikan oleh kaum

sosialis kanan, kaum nasionalis, kaum Masjumi, kaum Katolik reaksioner dan kaum trotskis. Front persatuan buruh, jaitu front yang lahir berdasarkan aksi² bersama antara buruh anggota SOBSI dan bukan-SOBSI makin lama makin erat. Kaum sosialis kanan, kaum trotskis, kaum Masjumi dan kaum Katolik reaksioner giat berusaha untuk menimbulkan perpetjahan dikalangan kaum buruh dan didalam serikatburuh yang progresif, tetapi ternjata bahwa keinginan bersatu dari kaum buruh djauh lebih kuat daripada usaha memetjah yang djahat dari musuh² klas buruh dan musuh² Rakjat.

Dalam tahun 1950 disamping pemogokan² ketjil yang banjak, telah terdjadi pemogokan² besar, antara lain pemogokan buruh perkebunan sebanjak 700.000 orang selama 50 hari yang berachir dengan kemenangan fihak buruh. Menurut keterangan fihak pemerintah, selama tahun 1951 pemogokan yang tertjatat berdjumlah 541 dan meliputi 319.030 buruh. Dengan pemogokan² ini kaum modal ditaksir telah menderita kerugian dengan kehilangan 3.719.914 harikerdja. Djumlah ini adalah sangat besar, apalagi djika dibanding dengan pemogokan² dalam tahun 1940, dimana hanja terdjadi 42 pemogokan, hanja diikuti oleh 2.115 buruh dan hanja merugikan kaum modal dengan hilangnya 32 harikerdja. Umumnya pemogokan² terdjadi berhubungan dengan tuntutan² kenaikan upah, menentang massa onslah dan menentang peraturan larangan mogok yang djahat.

Aksi² kaum buruh yang makin hari makin banjak dan makin meluas telah mengantjam eksploitasi kolonial dan mengantjam persiapan perang Amerika. Keadaan ini telah menjebakkan pemerintah Sukiman, pendjaga yang setia dari eksploitasi kolonial dan aparat² dari mesin perang Amerika, dalam bulan Agustus 1951 memerintahkan mengadakan penangkapan besar²an terhadap kaum Komunis dan kaum progresif pada umumnya.

Pemogokan² terdjadi sekalipun ada peraturan larangan mogok, jaitu peraturan kekuasaan militer tahun 1951 yang dibikin berdasarkan undang² „Staat van Oorlog en Beleg” (SOB) daripada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian peraturan kekuasaan militer diganti dengan Undang² Darurat yang ditjptakan oleh menteri perburuhan Tedjasukmana. Menurut „Undang² Tedjasukmana”

ini, kaum buruh yang mau beraksi 21 hari sebelumnya harus memberitahukan lebih dulu kepada pemerintah. Pihak pemerintah berhak memperpanjang batas waktu 21 hari dan pemerintah mempunyai hak veto dalam menyelesaikan perselisihan² antara buruh dengan majikan. Untuk menyelesaikan perselisihan² antara buruh dengan majikan pemerintah membentuk Panitia Arbitrase. Dengan sendirinya putusan Panitia Arbitrase dari pemerintah reaksioner menguntungkan majikan dan merugikan kaum buruh. Oleh karena itulah kaum buruh Indonesia mengadakan protes², demonstrasi² dan pemogokan² menuntut hapusnya undang² ini. Juga massa Rakjat lainnya menjokong tuntutan kaum buruh. Dalam parlemenpun sudah diajukan gugatan² tentang „Undang² Tedjasukmana” ini dan tentang pemimpin² buruh yang ditangkap karena dianggap melanggar undang² ini.

Disamping mengadakan peraturan² dan undang² yang membatasi hak² kaum buruh, kaum reaksioner melemparkan fitnahan² kepada kaum buruh dengan maksud mengisolasi kaum buruh yang beraksi dari golongan Rakjat lainnya, agar dengan demikian gerakan buruh menjadi lemah dan persatuan nasional lepas dari pimpinan kelas buruh. Kaum reaksioner antara lain memfitnah bahwa aksi² kaum buruh berarti menghalangi pembangunan nasional, mengakibatkan meningkatnya harga barang dan inflasi. Dalam memfitnah ini pemimpin² Masjumi, kaum sosialis kanan, kaum trotskis dan kantor propaganda Amerika USIS ambil bagian yang terpenting.

Untuk melawan tuantanah, melawan kaum reaksioner dan kaum imperialis, ber-djuta² kaum tani sudah menjusun diri dalam berbagai organisasi. Organisasi² kaum tani yang terpenting menggabungkan diri dalam Front Persatuan Tani (FTI), yaitu organisasi federasi dari kaum tani yang mengadakan kerdjasama yang baik dengan SOBSI dan dengan organisasi² progresif lainnya.

Ratusan ribu kaum tani yang tergabung dalam Front Persatuan Tani, dan yang dimana mungkin mengadakan kesatuan aksi dengan organisasi tani diluar front ini, telah memelopori perjuangan yang sengit daripada ber-djuta² kaum tani untuk turunnya sewatanah, untuk hapusnya pajak² yang sangat berat, untuk hapusnya kerdjapaksa, untuk menentang perampasan tanah oleh

tuantanah² Indonesia dan perkebunan asing dan untuk mendapatkan tanah dengan tjuma² sebagai milik perseorangan mereka. Disamping itu kaum tani Indonesia berdjung dengan sengit melawan gerombolan² teror yang diorganisasi oleh kaum pendjajah dan tuantanah² Indonesia.

Dikota-kota disamping gerakan buruh yang makin hari bertambah maju, inteligensia juga ambil bagian dalam memperkuat gerakan progresif dan perdamaian. Mereka memperkuat organisasi² yang sesuai dengan vaknja masing² atau mentjeburkan diri kedalam gerakan perdamaian dan gerakan kebudayaan Rakjat. Keadaan Indonesia yang setengah-djadjahan dan setengah-feodal, tidak memungkinkan inteligensia yang djudjur untuk tidak berfikir dan tidak berbuat guna mendapatkan djalan keluar, djalan kemerdekaan dan kebebasan.

Kaum pemuda dan peladjar, terorganisasi dalam organisasinya masing², sesuai dengan tradisinya yang revolusioner sedjak permulaan abad ke-20 dan terutama selama revolusi tahun 1945-1948, merupakan elemen yang aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian. Demikian juga gerakan kaum wanita makin lama makin nampak kemadjuannya dalam melawan adat² feodal, melawan exploitasi kolonial dan dalam perjuangan untuk perdamaian. Gerakan pemuda, peladjar dan wanita terus mempererat hubungannya dengan pemuda, peladjar dan wanita demokratis sedunia.

Keadaan yang pintjang dilapangan perdagangan dan industri telah menimbulkan protes² keras dari kalangan pengusaha² perkebunan Rakjat, dari kalangan perdagangan dan perindustrian bangsa Indonesia. Tuntutan² makin lama makin keras untuk tidak mengakui embargo terhadap RRT yang dipaksakan oleh imperialis Amerika, dan supaya ada hubungan dagang yang normal dengan semua negeri, termasuk negeri² Demokrasi Rakjat dan Uni Sovjet. Terutama berhubungan dengan Indonesia saban tahun harus mengimpor beras sebanyak 800.000 sampai 900.000 ton dan berhubungan harga karet sangat merosot karena ditekan oleh Amerika, timbulah tuntutan yang sangat keras supaya ada pertukaran langsung antara karet Indonesia dengan beras Tiongkok. Keinginan untuk mendapatkan mesin-mesin dari Uni Sovjet dan negeri² Demokrasi

Rakjat adalah sangat besar dari kalangan pengusaha industri bangsa Indonesia.

Kemadjuan gerakan buruh telah mendjadi inspirator bagi klas² dan golongan² lain untuk djuga mengorganisasi diri dan berdjuang guna demokrasi, perdamaian, kemerdekaan dan kebebasan. Kaum buruh Indonesia disamping berdjuang untuk memperbaiki tingkat hidupnja sendiri djuga memperluas dan mempertinggi tugas²nja. Ia membantu perdjjuangan klas² lain. Kaum buruh membantu perdjjuangan kaum tani untuk mendapatkan tanah, membantu perdjjuangan kaum inteligensia, pemuda dan wanita untuk mendapatkan hak²nja yang pokok, perdjjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perdjjuangan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional yang penuh, untuk demokrasi dan perdamaian.

Takut akan kekuatan klas buruh yang makin berkembang, dan dengan ini berkembang pula kekuatan persatuan nasional, takut akan pemogokan² dan yakin bahwa dengan tindakan kekerasan sadja serta dengan undang² yang berbau fasis tidak akan dapat menghantjurkan klas buruh, kaum reaksioner mendirikan serikatburuh² kuning sebagai persiapan menudju front buruh setjara Hitler. Pelopor serikatburuh² kuning ini terutama terdiri dari pemimpin² Masjumi, sosialis kanan, trotskis, dan agen² USIS dan FBI. Mereka ini memegang rol penting dalam tindakan² fasis seperti Razzia Agustus 1951, mereka mengadakan kerdjasama yang erat dengan kepolisian dan mereka bertindak sebagai spion dalam gerakan buruh. Kaum buruh Indonesia berdjuang dengan sengit terhadap aksi² memetjah dari orang² Sjahrir dalam serikatburuh perkebunan, serikatburuh textil dan lain² serta aksi² memetjah dari kaum trotskis dalam serikatburuh pabrik gula, serikatburuh listrik dan lain², terhadap aksi² memetjah dari Serikat Buruh Islam Indonesia yang dipimpin oleh pemimpin² Masjumi dan serikatburuh Katolik yang dipimpin oleh agen² USIS dan FBI. Kaum buruh Indonesia yang revolusioner memandang semuanya ini sebagai pekerdjaan musuh²nja yang menjelundup kedalam barisan kaum buruh.

Dalam keadaan sekarang adalah satu kenyataan, bahwa aksi² kaum buruh Indonesia dalam membela kepentingan² se-hari² di-

lapangan ekonomi dan sosial makin lama makin erat terdjalin dengan perdjjuangan untuk perdamaian. Persiapan perang kaum imperialis telah menjebabkan lebih intensifnja eksploitasi atas kaum buruh, lebih hebatnja serangan² terhadap tingkat hidup kaum buruh, makin meningkatnja harga kebutuhan hidup, makin tinggijnja pajak² dan makin banjaknja kaum 'penganggur. Organisasi² kaum buruh Indonesia yang progresif yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam SOBSI, mengerti akan keadaan ini dan oleh karena itu senantiasa menghubungkan perdjjuangan untuk kepentingan se-hari² dengan kewajiban yang utama dari zaman kita sekarang, jaitu perdjjuangan untuk perdamaian dan melawan militerisasi, perdjjuangan untuk menggagalkan rentjana perang dunia baru yang sedang disiapkan dibawah arsitektur Amerika.

Dalam tahun² belakangan ini dua kali bentjana besar menjerang gerakan buruh dan gerakan demokratis lainnja di Indonesia. Pertama, tindakan ultra reaksioner dari pemerintah Sukiman dalam bulan Agustus 1951, dan yang kedua bentjana pertjobaan kudeta kaum sosialis kanan dalam bulan Oktober 1952. Kedua-duanja bermaksud memfasiskan sistim pemerintahan Indonesia, bermaksud mendirikan diktatur militer, dimana hak² serikatburuh dan organisasi Rakjat lainnja tidak diakui. Tetapi kedua bentjana ini telah dapat digagalkan oleh kekuatan persatuan Rakjat dan kekuatan gerakan demokratis. Kemenangan Rakjat Indonesia atas tindakan² ultra reaksioner ini telah memberi kejakinan kepada Rakjat Indonesia, terutama kepada kaum buruh Indonesia, bahwa bahaja fasisme dapat dikalahkan asal kaum buruh waspada dan berdjuang dengan militan, asal kaum buruh dapat menarik golongan Rakjat lainnja dalam perdjjuangan mendjundjung hak² demokrasi. Pengalaman² ini sangat penting untuk perdjjuangan klas buruh dan seluruh Rakjat Indonesia dalam waktu² yang akan datang.

Demikianlah, bersamaan dengan berdjuang untuk kenaikan upah, untuk melawan pengangguran, melawan rasdiskriminasi, untuk hak² serikatburuh dan untuk djaminan sosial, kaum buruh Indonesia djuga berdjuang dengan militan untuk kepentingan seluruh Rakjat Indonesia. Klas buruh Indonesia berdjuang untuk menggalang persekutuan yang erat dengan kaum tani, jaitu golongan Rakjat yang terbesar dan djuga sangat tertindas. Klas

buruh Indonesia terus mendidik diri agar dapat menjadi pemimpin dan organisator dalam perjuangan untuk membatalkan persetujuan KMB, untuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda, untuk mengusir Misi Militer Belanda (MMB) dari Indonesia, untuk melenjakkan embargo dan blokade terhadap negeri² demokrasi, untuk melepaskan Indonesia dari ikatan perdjudjian San Francisco, untuk mengadakan hubungan dagang dan hubungan diplomatik yang normal dan saling menguntungkan, untuk menolak TCA dan menentang Pakt Pasifik yang agresif yang mau dipaksakan oleh imperialis Amerika. Dengan demikian, klas buruh Indonesia berjuang untuk memenuhi tugas sedjarahnja, tugas memberi pimpinan kepada seluruh kekuatan nasional di Indonesia dalam menudju kemerdekaan nasional yang penuh, dalam menudju demokrasi, kesedjahteraan dan perdamaian.

Teguhnja perjuangan klas buruh Indonesia dan PKI dalam membela kebebasan² demokrasi, ketika kebebasan² yang hanya sedikit ini mau dilenjakkan oleh klik Sukiman atas perintah Amerika dan kemudian oleh klik Sjahrir atas perintah Inggris dan Belanda, telah memungkinkan PKI menghimpun massa yang lebih luas disekitarnja. Di-mana² diseluruh negeri terbentuk kerdjasama yang baik antara PKI dengan elemen² demokratis, termasuk orang² progresif dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dan partai² lain, dalam melawan bahaya fasisme yang mau dipaksakan oleh imperialis² Amerika, Belanda dan Inggris.

Kedjadian² ini semua membuktikan kebenaran utjapan kawan Stalin pada penutupan Kongres ke-XIX Partai Komunis Uni Soviet, yaitu bahwa Partai² Komunis dan Partai² Demokratis hanya bisa menghimpun massa disekitarnja djika Partai mendjudjung pandji² kebebasan demokrasi burdjuis yang sudah dibuang oleh kaum burdjuis. „Tidak ada orang lain yang bisa mendjudjung pandji² ini”, demikian kata kawan Stalin, dan dengan ini ditekan-kannja bahwa hanya Partai² Komunis dan Partai² Demokratishlah yang bisa mendjudjung pandji² kebebasan demokrasi burdjuis.

Kedjadian ini semua menanamkan kejakinan yang lebih dalam pada Rakjat Indonesia, terutama pada klas buruh Indonesia, bahwa hanya persatuanlah, persatuan semua kekuatan anti-imperialisme dan anti-feodalisme yang dapat memenangkan perjuangan Rakjat.

Front Persatuan Nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, yang dipimpin oleh klas buruh, dan ditjiptakan sebagai hasil gerakan Rakjat yang se-luas²nja dan perdjuangan revolusioner massa, inilah djaminan bagi Rakjat Indonesia untuk membebaskan diri samasekali dari pendjadjahan imperialisme Belanda dan untuk menggagalkan politik agresi Anglo-Amerika di Indonesia. Inilah djaminan bagi Rakjat Indonesia untuk membangun Indonesia Baru, Indonesia yang merdeka penuh. Inilah djaminan yang memungkinkan Rakjat Indonesia untuk mendirikan suatu pemerintah Demokrasi Rakjat yang akan menjalankan program Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menudju kemenangan. Oleh karena itu adalah kewadajiban Rakjat Indonesia untuk senantiasa memperluas dan memperkuat Front Persatuan ini, memperluas dan memperkuatnja dengan melalui aksi² se-hari² untuk tuntutan ekonomi dan politik Rakjat.

Belum lengkap uraian ini djika tidak disertai keterangan mengenai politik PKI menjokong pemerintah Wilopo. Sokongan PKI terhadap pemerintah Wilopo adalah sokongan yang pertama kali diberikan oleh PKI pada pemerintah Indonesia sedjak permulaan tahun 1948, yaitu sesudah bubarnja pemerintah front persatuan yang dipimpin oleh kawan Amir Sjarifuddin. Sebagaimana sudah didjelaskan dalam pernjataan² dan keterangan² PKI, politik PKI menjokong pemerintah Wilopo adalah satu-satunja politik yang tepat. Dengan ini samasekali tidak berarti bahwa PKI menganggap pemerintah Wilopo sebagai pemerintah yang benar² demokratis atau benar² progresif, dan sebaliknya, PKI djuga tidak mungkin menjamakan pemerintah Wilopo dengan pemerintah² Hatta, Sukiman dan Natsir yang sangat reaksioner itu.

Dalam menentukan sikap politiknya PKI senantiasa berpedoman pada Marxisme-Leninisme dan berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial yang ada. PKI wadajib senantiasa memperhitungkan keadaan pertimbangan kekuatan sosial yang tidak stabil di Indonesia. Berdasarkan inilah PKI bisa mempunyai tiga matjam sikap terhadap pemerintah² sebelum pemerintah Demokrasi Rakjat. Pertama, djika pemerintah itu sangat reaksioner seperti pemerintah Hatta, Natsir dan Sukiman, PKI memobilisasi seluruh Rakjat untuk menjatuhkan pemerintah reaksioner itu dan untuk mendirikan

kan pemerintah yang maju atau agak maju. Kedua, jika pemerintah itu agak maju seperti pemerintah Wilopo dalam waktu² ketika ia baru dibentuk, PKI bisa memberikan sokongannya sampai batas² yang tertentu, walaupun PKI sendiri tidak ikut didalamnya. Ketiga, jika pemerintah itu adalah pemerintah front persatuan, artinya pemerintah yang terdiri dari elemen² demokratis termasuk Partai Komunis, seperti pemerintah² Republik Indonesia selama Revolusi Rakjat 1945-1948, dengan sendirinya PKI memberikan sokongannya.

Karena tekanan² menteri² reaksioner, terutama tekanan² dari menteri² Masjumi dan PSI, pemerintah Wilopo dalam waktu² belakangan ini sudah tidak lagi memperlihatkan sifat²nja yang agak maju. Untuk mendorong elemen² demokratis dalam pemerintah Wilopo agar mereka tidak berkapitulasi lebih jauh pada elemen² reaksioner, pada tanggal 9 Mei 1953 PKI mengeluarkan pernyataan, bahwa PKI hanya bersedia menjokong pemerintah Wilopo jika ia memenuhi syarat² minimum yang diadakan oleh PKI, yang menjamin adanya keamanan Rakjat, hak² demokrasi, perkembangan ekonomi nasional dan politik luarnegeri yang menuju perdamaian dunia yang abadi.

Sebagaimana juga pada peringatan tahun yang lampau, pada peringatan ulangtahun PKI yang ke-33 ini, kami dari Partai Komunis Indonesia menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia, kepada semua golongan dan partai² yang demokratis, untuk mempererat dan meluaskan persatuan nasional kita. Marilah kita meneruskan tradisi persatuan nasional kita, tradisi „Radical Concentration“, tradisi PPPKI, GAPI (18), „Konsentrasi Nasional“, BPP dll. Marilah kita mentjiptakan persatuan yang lebih kuat daripada persatuan² yang sudah pernah ditjapai oleh bangsa kita. Marilah kita melanjutkan tradisi perwira Rakjat kita dan pahlawan² nasional kita. Marilah melanjutkan tradisi perwira, tradisi persatuan dan tradisi revolusioner Revolusi Agustus 1945.

Rakjat Indonesia yang sudah melalui perjuangan yang lama dan sulit, yang sudah melalui jalan perjuangan yang berliku², dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia yang berpedoman pada ajaran² Marx, Engels, Lenin dan Stalin, tidak diragukan lagi pasti akan mentjapai kemenangannya yang terakhir.

Kaum Buruh Indonesia Berjuang Untuk Hak-Haknya adalah tulisan kawan Aidit yang memperbincangkan beberapa soal khusus dalam pekerjaan serikatburuh. Pada waktu itu ada tanda² bahwa gerakan buruh Indonesia terlalu mengutamakan perjuangan politik dan melalaikan perjuangan sosial-ekonomi. Dilain pihak penjakit sektarisme sedjak semula sudah menghinggapi pula gerakan buruh ditanahair kita.

Dengan bukti² yang meyakinkan dan dengan menganalisa pengalaman gerakan buruh kita, artikel ini menekankan pentingnya perjuangan sosial-ekonomi kaum buruh sehari² dilakukan bersamaan dengan perjuangan politik. Juga ditekankan pentingnya menggalang front persatuan buruh yang kokoh untuk dapat menarik golongan Rakjat lainnya dalam perjuangan revolusioner. Dengan demikian klas buruh Indonesia dapat memenuhi tugas sedjarahnja, yaitu memimpin seluruh kekuatan nasional menuju Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis.

KAUM BURUH INDONESIA BERDJUANG UNTUK HAK-HAKNJA

Dalam bulan November 1949 ditandatangani persetudjuan Konferensi Medja Bundar (KMB) jang chianat di Nederland oleh Pemerintah Indonesia jang dikepalai oleh Hatta dan oleh Pemerintah Belanda. Dengan ini Revolusi Rakjat 1945-1948 jang heroik dibikin gagal oleh Hatta-Sultan Abdul Hamid, oleh pemimpin² partai Islam konservatif Masjumi dan pemimpin² Partai Sosialis Indonesia, jaitu partai kaum sosialis kanan. Dengan ini mereka mengchianati republik revolusioner dan atas perintah imperialis membentuk pemerintah jang mendjamin kepentingan imperialis, kepentingan kaum komprador dan tuantanah². Mereka terang²an memihak kaum imperialis dan ber-sama² dengan kaum imperialis mengadakan serangan² terhadap Rakjat Indonesia, terhadap penghidupannja se-hari² maupun terhadap hak² politiknya.

Dengan persetudjuan KMB, oleh Belanda dan pengchianat² nasional, dibawah pengawasan imperialis Amerika, ditetapkanlah kedudukan Indonesia sebagai negeri setengah-djadjahan. Indonesia katanja mempunjai „hak memerintah diri sendiri”, tetapi dalam kenjataanja kekuasaan jang sesungguhnya dilapangan politik, ekonomi dan militer masih ditangan imperialis Belanda, dan pintu Indonesia dibukakan se-luas²nja untuk penanaman kapital Belanda dan kapital imperialis² lainnja. Dengan ini revolusi Rakjat 1945-1948 jang heroik dichianati oleh klik Hatta-Sultan Abdul Hamid.

Oleh karena itu tidak mengherankan, djika di Indonesia sekarang keadaan kaum buruh, sebagaimana keadaan Rakjat Indonesia umumnja masih tetap djelek seperti sebelum perang dunia kedua, dan dalam beberapa hal malahan lebih djelek lagi. Sebelum perang orang sering menggambarkan kemelaratan Rakjat Indonesia dengan kalimat, bahwa Rakjat Indonesia adalah „Bangsa

jang terdiri daripada kuli² dan kuli diantara bangsa²”. Keadaan sebagai digambarkan oleh kalimat ini sampai sekarang masih berlaku.

I

Upah kaum buruh Indonesia sangat rendah, sedang upah riilnja terus merosot berhubung dengan harga barang² terus meningkat. Menurut Kantor Pusat Statistik Pemerintah Indonesia pada bulan Desember tahun 1951, untuk makanan satu orang dibutuhkan 155,49 rupiah tiap-tiap bulan. Sedangkan menurut angka² resmi djuga, upah terendah tahun 1951 jalah 177,— rupiah sebulan atau 5,20 rupiah sehari buat buruh pertambangan, pabrik, bangunan dan transpor. Djadi, upah seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan makan satu orang sadja tidak tjukup. Belum lagi ongkos makan untuk anak dan isterinja serta kebutuhan² lain jang djuga pokok seperti pakaian dan perumahan. Upah 5,20 rupiah sehari ini baru berlaku bagi buruh pertambangan, pabrik, bangunan dan transpor, sedangkan di-perusahaan² rokok, batik, textil, kulit, pertjetakan, bahan makanan, pertanian, dll. upah masih berada diantara 3 dan 4 rupiah sehari, dan buruh ini merupakan djumlah jang terbanjak. Ketetapan upah minimum bagi kaum buruh tidak ada sehingga upah buruh jang paling rendah ditentukan dengan se-wenang² oleh fihak madjikan.

Karena upahnja sangat rendah, kaum buruh Indonesia hidup dalam kelaparan. Kaum buruh Indonesia, sebagaimana Rakjat Indonesia lainnja, rata² hanja dapat makan 1850 kalori sehari, djumlah jang sangat dibawah normal. Selain dari kurang makan, kesihatan kaum buruh adalah sangat djelek berhubung kurangnya perhatian fihak madjikan dan pemerintah. Menurut karangan menteri kesehatan Indonesia dalam bukunya "The upbuilding of Indonesia", rata² untuk 60.000 penduduk hanja ada satu dokter, untuk tiap² 50.000 hanja ada satu bidan, untuk tiap² 20.000 hanja ada satu djururawat, untuk tiap² 483.000 hanja ada satu dokter gigi dan untuk tiap² 900.000 hanja ada satu ahli-obat²an. Karena Indonesia adalah negeri pulau² jang menjejalkan perhubungan sangat sulit, dan berhubung pula kebanyakan dokter

dan bidan lebih senang tinggal di-kota², maka dibanjak tempat yang djauh dari kota untuk ratusan ribu orang hanya tersedia satu dokter. Penjelidikan di Djawa Timur menunjukkan bahwa 50% dari penduduk diserang malaria sekali dalam setahun. Menurut seorang ahli penjakit tbc, dokter Wisnujudo, sebelum perang tbc adalah penjakit Rakjat nomor 5, tetapi sekarang mendjadi penjakit nomor 2, jaitu sesudah malaria. Menurut keterangan dokter tsb. 25% dari penduduk Indonesia sakit tbc. Lebihkurang 15% dari penduduk menderita penjakit frambusia.

Untuk seluruh Rakjat Indonesia yang djumlahnja 80 djuta hanya ada 60.000 tempat tidur dirumah sakit, termasuk sanatoria dan leprosaria (untuk penderita kusta). Diantaraja hanya 22.000 tempat tidur kepunjaan pemerintah, sedang lainnja adalah kepunjaan partikulir.

Tundjangan atau djaminan diwaktu sakit bagi kaum buruh samasekali belum diatur dalam undang². Tetapi diberbagai perusahaan besar madjikan terpaksa memberikan sedikit tundjangan sesudah didesak oleh aksi² kaum buruh. Di-perusahaan² ketjil djaminan ini tidak ada. Oleh karena itu, sering kaum buruh yang sakit keras memaksa diri untuk bekerdja, dan ada kalanja mereka mati ditempat bekerdja, seperti yang pernah kedjadian disalahsatu perusahaan batik.

Dalam undang² perburuhan tahun 1947, yang dibikin oleh pemerintah yang dipimpin oleh kaum Komunis, jaitu pemerintah Amir Sjarifuddin, dinjatakan bahwa seseorang yang mendapat ketjelakaan dalam pekerdjaan atau peperangan sehingga tidak bisa bekerdja lagi diberi tundjangan se-banjak²nja 70% dari upahnja. Bagi buruh yang meninggal karena ketjelakaan, djandanja mendapat 30% dan tiap anaknja 15% dengan maximum semuanya 60%. Pelaksanaan undang² ini sekarang sangat mengetjewakan, antara lain karena pemerintah sangat sedikit menjediakan pegawai untuk mengawasinja. Di Indonesia terdapat kira² 10.000 orang yang mendjadi invalid karena ambil bagian melawan tentara Belanda dalam tahun² Revolusi Rakjat. Bagi invalid yang sebanjak ini hanya terdapat satu rehabilitasi centrum di Solo (Djawa Tengah) yang hanya dapat memuat 300 invalid. Perawatan terhadap kaum invalid sangat djelek, sehingga menurut harian „Mer-

deka” tanggal 16 Februari 1953 seorang kolonel Tentara Nasional Indonesia, Bambang Utojo, pernah berkata: „Kalau peraturan pensiun penderita tjatjad yang sekarang berlaku terus, maka penderita tjatjad akan mendjadi orang pengemis”.

Dalam undang² perburuhan tahun 1948, yang djuga dibikin oleh pemerintah Amir Sjarifuddin, ditetapkan bahwa djamkerdja sehari adalah 7 djam. Undang² ini sampai sekarang masih berlaku. Fasis Hjalmar Schacht yang pernah datang di Indonesia memberi nasehat kepada pemerintah Indonesia supaya undang² ini dibatalkan dan supaya djam-kerdja dibikin se-pandjang²nja agar produksi bisa naik. Pemimpin Masjumi seperti Jusuf Wibi-sono dan pemimpin sosialis kanan seperti Sutan Sjahrir, adalah orang² yang mendjadi trompet Schacht dalam memperpanjang djam-kerdja. Karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan undang² ini, di-perusahaan² partikulir sering terdjadi pelanggaran dari fihak madjikan. Fihak madjikan partikulir menggunakan segala matjam djalan, misalnja dengan menurunkan atau tidak menaikkan upah, agar tidak dirugikan oleh undang² yang masih berlaku ini. Kaum buruh Indonesia menganggap 7 djam-kerdja sehari sebagai hasil yang kongkrit daripada Revolusi Rakjat 1945-1948, oleh karena itu mereka pertahankan mati²an.

Dalam undang² perburuhan tahun 1948 djuga dinjatakan bahwa bagi buruh wanita yang melahirkan anak diberi waktu mengaso dengan upah penuh selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Kaum reaksioner berusaha untuk membatalkan undang² ini, tetapi mendapat tentangan keras dari massa. Dalam prakteknja sekarang pengawasan terhadap pelaksanaan undang² ini sangat djelek sehingga pelanggaran² banjak dilakukan oleh fihak madjikan. Buruh wanita banjak yang dipetjat oleh madjikan² partikulir se-mata² karena madjikan² mau menghindarkan diri dari undang² ini. Mengenai perongkosan rumah sakit diwaktu melahirkan baji samasekali tidak ada djaminan dari madjikan.

Undang² yang mendjamin tundjangan keluarga bagi semua anak buruh partikulir samasekali belum ada. Atas desakan aksi² buruh diberbagai perusahaan besar, pemerintah terpaksa mewajibkan madjikan memberi sokongan mulai anak yang ketiga dan

keempat. Akibat dari putusan pemerintah ini, jalah dalam men-tjari buruh madjikan lalu terutama mengambil orang² jang belum berkeluarga atau jang anaknja dibawah tiga orang.

Dalam soal pensiun buruh pemerintah terbagi dua, jaitu kira² 600.000 buruh tetap berhak menerima pensiun dihari tua, sedang-kan buruh harian jang djumlahnja 1,5 djuta atau hampir 75% dari seluruh buruh pemerintah tidak berhak menerima pensiun. Sistim buruh harian ini banjak dipakai oleh pemerintah maupun oleh madjikan partikulir karena ini adalah salahsatu tjara untuk mendapat tenaga buruh jang sangat murah, sedang fihak peme-rintah atau madjikan bebas dari membayar pensiun dan kewa-djiban² lain terhadap buruh. Di-perusahaan² partikulir soal pen-siun masih sangat asing. Aksi² kaum buruh menuntut pensiun pada perusahaan² partikulir memaksa madjikan untuk membitjarakan soal pensiun. Madjikan senantiasia menentang ikutsertanja kaum buruh dalam pembitjaraan mengenai soal pensiun, karena menurut madjikan soal ini adalah soal „prinsipil dan berat“, sehingga kaum buruh tidak mungkin bisa mengikutinja. Sudah ada perusahaan partikulir jang menentukan pensiun bulanan disekitar 10% dari gadji terachir, jang berarti sangat sedikit sekali. Ketentuan madji-kan ini diperkuat oleh pemerintah. Dengan sendirinja ketentuan ini ditentang oleh kaum buruh dan pada umumnja kaum buruh menolak untuk dipensiunkan berdasarkan ketentuan ini.

Djumlah penganggur makin lama makin besar di Indonesia. Ini disebabkan oleh karena perusahaan² monopoli berusaha men-dapatkan untung jang semaximum mungkin, antara lain dengan djalan memberhentikan buruhnja se-banjak²nja dan mengganti tenaga buruh dengan mesin² modern. Diperusahaan minjak BPM misalnja, produksi tahun 1950 naik dengan 22% dibanding dengan tahun 1949, pada tahun 1951 naik 14% djika dibanding dengan tahun 1950, akan tetapi selama tahun 1951 perusahaan ini meng-adakan pemetjatan sebanyak 1.600 buruh atau 7% dari seluruh djumlah buruhnja. Selain daripada itu pengangguran disebabkan djuga oleh banjaknja perusahaan kapitalis nasional jang bangkrut seperti perusahaan rokok, gelas, topi, batik, tekstil, dsb. Sebagai tjon-toh di Pekalongan (Djawa Tengah) 80% dan di Solo (Djawa Tengah) 60% perusahaan batik terpaksa ditutup. Penutupan per-

usahaan² nasional ini umumnja disebabkan oleh: tidak mampunja bersaing dengan barang² impor, dajabeli Rakjat sangat lemah dan iarga bahan baku jang diimpor sangat tinggi. Ini adalah akibat jang langsung daripada politik embargo dan blokade Amerika jang sampai sekarang masih diturut oleh pemerintah Indonesia.

Bekas pedjuang bersendjata memperbesar barisan penganggur. Dari 300.000 orang bekas pedjuang bersendjata, hanja 15% jang dapat diberi pekerdjaan atau diberi sokongan untuk meneruskar peladjaran. Pada pertengahan tahun 1952 sokongan pemerintah kepada kaum penganggur, jang djumlahnja sudah sangat sedikit itu, dihapuskan samasekali.

Menurut angka resmi, djumlah semua penganggur dan sete-ngah penganggur di Indonesia kira² 15 djuta, diantaranya jang 10 djuta terdiri dari kaum tani miskin dan tani takbertanah. Sedangkan lainnja adalah kaum buruh dan kaum miskin kota. Pengangguran kaum buruh jang terdaftar dalam tahun 1950 ada 179.546 orang sedang tahun 1951 ada 252.671 orang, artinja dalam satu tahun jang mendaftarkan diri bertambah dengan lebih dari 40%, walaupun kantor pendaftaran penganggur termasuk kantor jang tidak populer karena kebanyakan penganggur jang mendaftarkan diri tidak mendapat bantuan apa².

Mengenai kaum buruh jang diberhentikan masih berlaku un-dang² kolonial tahun 1941, dimana ditetapkan bahwa kepada kaum buruh jang diberhentikan se-tinggi²nja diberi 3 bulan gadji, walaupun buruh tsb. sudah berdinan puluhan tahun. Disamping itu, djuga dinjatakan bahwa madjikan boleh memberhentikan buruh dengan tiada djaminan apa² berdasarkan berbagai alasan jang dengan mudah dibikin oleh madjikan sendiri. Dengan demi-kian, djaminan jang hanja sedikit itu dalam prakteknja tidak di-bayar penuh atau tidak dibayar samasekali, sehingga fihak madji-kan leluasa mengadakan pemetjatan ketjil²an maupun besar²an.

Rasdiskriminasi masih meradjalela, dan oleh pemerintah Indo-nesia dilegalisasi, misalnja dengan mengakui upah dan tundjangan kemahalan tiap² bulan bagi buruh bangsa Eropa 1000 rupiah lebih tinggi daripada buruh bangsa Indonesia. Tundjangan ke-mahalan dari buruh bangsa Eropa lebih besar dari gadji pokok seorang buruh bangsa Indonesia. Undang² tjuti 14 hari dalam

setahun bagi buruh partikulir bangsa Indonesia belum ada, sebaliknya bagi buruh bangsa Eropa sudah berlaku tjuti 14 hari setahun, dan disamping itu saban 4 tahun tjuti 6 bulan ke Eropa dengan upah penuh. Perongkosan dan lain² fasilitas untuk sekeluarga selama tjuti dibayar oleh madjikan. Dan djika buruh bangsa Eropa mempunyai anak di Eropa, sianak bisa datang ke Indonesia saban dua tahun sekali dengan ongkos madjikan. Rasdiskriminasi jang hebat ini telah menimbulkan ketidakpuasan dan telah menimbulkan aksi² dikalangan buruh perusahaan² monopoli, terutama buruh minjak.

II

Upah jang sangat rendah, tidak adanya djaminan sosial, adanya rasdiskriminasi jang masih meradjalela, pengangguran jang makin besar serta pelanggaran² terhadap hak² serikatburuh, menyebabkan kaum buruh Indonesia terus-menerus beraksi melawan semuanya ini. Menurut statistik jang dikeluarkan oleh Kementerian Perburuhan, dalam tahun 1951 terdjadi 541 kali pemogokan, diikuti oleh 319.030 buruh dan berakibat hilangnya 3.719.914 harikerdja. Menurut tjatatan pemerintah dalam tahun 1952 terdjadi 4.003 perselisihan perburuhan dan ini berarti 45% lebih banyak djika dibanding dengan perselisihan perburuhan jang terdjadi dalam tahun 1951. Adalah satu kenjataan, bahwa jang terdjadi sesungguhnya biasanya lebih banyak dari apa jang ditjatat oleh pegawai pemerintah. Angka pemogokan tahun 1951 ini adalah djauh lebih besar djika dibanding dengan angka pemogokan sebelum perang dunia kedua. Menurut tjatatan Kantor Urusan Perburuhan Hindia Belanda, dalam tahun 1940 hanja terdjadi pemogokan di 42 perusahaan, diikuti oleh 2.115 buruh dan hanja berakibat hilangnya 32 harikerdja.

Aksi² kaum buruh jang makin hari makin banyak dan makin meluas telah mengantjam eksploitasi kolonial dan mengantjam persiapan perang Amerika. Keadaan ini telah menyebabkan pemerintah Sukiman, pendjaga jang setia daripada eksploitasi kolonial dan aparat daripada mesin-perang Amerika, dalam bulan Agustus

1951 memerintahkan mengadakan penangkapan besar²an terhadap kaum Komunis dan kaum progresif.

Pemogokan² terdjadi sekalipun ada peraturan larangan mogok, jaitu peraturan kekuasaan militer tahun 1951 jang dibikin berdasarkan undang² „Staat van Oorlog en Beleg” (SOB)(1) daripada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian peraturan kekuasaan militer diganti dengan Undang² Darurat jang ditjptakan menteri perburuhan Tedjasukmana. Menurut „Undang² Tedjasukmana” ini, kaum buruh jang mau beraksi 21 hari sebelumnya harus memberitahukan lebih dulu kepada pemerintah. Fihak pemerintah berhak memperpanjang batas waktu 21 hari dan pemerintah mempunyai hak veto dalam menyelesaikan perselisihan antara buruh dan madjikan. Untuk menyelesaikan perselisihan² antara buruh dengan madjikan pemerintah membentuk Panitia Arbitrase (2). Dengan sendirinja putusan Panitia Arbitrase pemerintah reaksioner menguntungkan madjikan dan merugikan kaum buruh. Oleh karena itulah kaum buruh Indonesia mengadakan protes², demonstrasi² dan pemogokan² menuntut hapusnya undang² ini. Djuga massa Rakjat lainnja menjokong tuntutan kaum buruh. Dalam parlemenpun sudah diajukan gugatan² tentang „Undang² Tedjasukmana” ini dan tentang pemimpin² buruh jang ditangkap karena dianggap melanggar undang² ini.

Disamping mengadakan peraturan² dan undang² jang membatasi hak² kaum buruh, kaum reaksioner melemparkan fitnahan² kepada kaum buruh dengan maksud mengisolasi kaum buruh jang beraksi dari golongan Rakjat lainnja, agar dengan demikian gerakan buruh mendjadi lemah dan persatuan nasional lepas dari pimpinan klas buruh. Kaum reaksioner antara lain memfitnah bahwa aksi² kaum buruh menghalangi pembangunan nasional, mengakibatkan meningkatnja harga barang dan inflasi. Dalam memfitnah ini pemimpin² Masjumi, kaum sosialis kanan, kaum trotskis dan kantor propaganda Amerika USIS mengambil bagian jang terpenting.

Dalam keadaan dimana seluruh kekuatan reaksi ditumpahkan untuk mengisolasi dan menghantjurkan gerakan buruh, dengan fitnahan maupun dengan aksi² memetjah lainnja, dalam bulan Maret 1951 Partai Komunis Indonesia mengeluarkan sebuah reso-

lusi tentang „Kewadajiban Front Persatuan Buruh”. Dalam resolusi tsb. antara lain diterangkan, bahwa tidak mungkin ada pembangunan nasional dan tidak mungkin ada reorganisasi produksi djika tidak dilakukan nasionalisasi atas perusahaan² vital dan djika tidak dilaksanakan industrialisasi, djika tidak dilikwidasi peraturan² kolonial dan djika tidak didjalankan program Demokrasi Rakjat. Kenaikan upah samasekali tidak mesti berakibat naiknya harga barang dan inflasi. Kenaikan harga barang yang tidak ada hingganya dan inflasi adalah akibat daripada sistim kapitalis, dan bukan akibat dari aksi² kaum buruh. Biarpun tidak ada aksi² kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, selama perusahaan² vital belum dinasionalisasi dan tudjuan tjari-untung setjara kapitalis dari perusahaan vital itu belum dilenjakkan, kenaikan harga barang dan inflasi akan terus mendjadi penjakit umum dari masyarakat.

Takut akan kekuatan klas buruh yang makin berkembang, dan dengan ini berkembang pula kekuatan persatuan nasional, takut akan pemogokan² dan yakin bahwa dengan tindakan kekerasan sadja serta dengan undang² yang berbau fasis tidak akan dapat menghantjurkan klas buruh, kaum reaksioner mendirikan serikatburuh² kuning sebagai persiapan menudju front buruh setjara Hitler. Pelopor daripada serikatburuh² kuning ini terutama terdiri dari pemimpin² Masjumi, sosialis kanan, trotskis, agen² USIS dan FBI (dinas mata² Amerika). Mereka ini memegang rol penting dalam tindakan² fasis seperti Razzia Agustus 1951, mereka mengadakan kerdjasama yang erat dengan kepolisian dan mereka bertindak sebagai spion dalam gerakan buruh. Kaum buruh Indonesia berdjuaug dengan sengit terhadap aksi² memetjah dari orang² Sjahrir dalam serikatburuh perkebunan, serikatburuh tekstil dll. serta aksi² memetjah dari kaum trotskis dalam serikatburuh pabrik gula, serikatburuh listrik dll., terhadap aksi² memetjah dari Serikat Buruh Islam Indonesia yang dipimpin oleh pemimpin² Masjumi dan Serikat Buruh Katolik yang dipimpin oleh agen² USIS dan FBI. Kaum buruh Indonesia yang revolusioner memandang semuanya ini sebagai pekerdjaan musuh²nja yang menjelundup kedalam barisan kaum buruh.

Berhubung dengan aktivitas kaum reaksioner yang makin giat

mendirikan serikatburuh² kuning atas perintah imperialis Belanda, Amerika dll.nja, resolusi PKI antara lain menjatakan bahwa kedok pemimpin² serikatburuh kuning harus dibuka dalam rapat² kaum buruh dan harus dibangkitkan kemarahan kaum buruh terhadap pengatjau² ini. Tiap² aksi mereka menentang pemogokan, tiap² usaha mereka untuk menakut-nakuti kaum buruh, tiap usaha mereka untuk memetjahbelah dan tiap² pengchianatan mereka harus dibuka kedoknja tepat pada waktunja, agar dengan demikian mereka yang tidak djudjur itu tidak mempunyai akar dimassa. Selandjutnja diperingatkan oleh resolusi tsb.: „Diatas se-gala²nja. se-kali² djangan ditanamkan pada massa kaum buruh suatu illusi bahwa Panitia Arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah burdjuis akan berbuat adil kepada kaum buruh”.

PKI sebagai barisan terdepan daripada klas buruh Indonesia senantiasa menekankan, bahwa front buruh harus merupakan front yang terkuat, yang paling bersatu, paling madju dan paling sedar dalam front persatuan nasional yang luas. Front buruh dan front tani harus ambil bagian yang terpenting didalam perdjuaugan untuk menggalang front persatuan nasional, jaitu persatuan daripada seluruh Rakjat Indonesia untuk melaksanakan tudjuan politiknya, dimana sumber kekuasaan ada pada Rakjat dengan terbentuknja Pemerintah Demokrasi Rakjat. Dalam front persatuan nasional ini kaum buruh dan kaum tani harus mendjadi basisnja.

Sektarisme adalah penjakit yang sedjak berdirinja serikatburuh di Indonesia pada permulaan abad ini sudah menghinggapi gerakan buruh. Tentang ini resolusi PKI mengatakan: „Untuk bisa menunaikan kewadajibannja, seksi² yang sudah militan dari klas buruh harus membersihkan diri dari penjakit sektarisme dan dari sembojan „kiri” yang kosong. Sektarisme dan slogan² „kiri” yang kosong, yang tidak disokong oleh massa luas dari kaum buruh tidak hanja membantu lawan dan pemetjah² klas buruh, tetapi ia djuga merupakan rintangan dalam usaha mempersatukan klas buruh”. Selandjutnja dikatakan: „Hanja dengan lenjapnja sektarisme, seksi² yang sudah militan dari klas buruh bisa menarik massa kaum buruh yang masih terbelakang dan bisa menarik seluruh Rakjat dalam perdjuaugan untuk perdamaian dan kemerdekaan nasional”.

Dengan mendapat inspirasi dari resolusi PKI ini kaum buruh Indonesia bertambah giat dalam menjusun dan memperbaiki organisasinya, maupun dalam mengadakan aksi². Disamping aksi² yang langsung dipimpin oleh SOBSI, pusat federasi serikatburuh Indonesia anggota GSS (3), diberbagai pabrik, pelabuhan, tambang, perkebunan dsb., terbentuk aksi-aksi bersama yang dipimpin oleh SOBSI dan serikatburuh non-SOBSI. Aksi² bersama ini lebih mempererat persatuan kaum buruh dalam perjuangannya menuntut pekerjaan dan kenaikan upah, dalam perjuangan untuk hak-hak serikatburuh dan dengan demikian melawan kaum pemetjah.

Dalam tahun 1952, dari 27 September sampai 12 Oktober, dilangsungkan Konferensi Nasional SOBSI di Djakarta, yang dihadiri oleh wakil² SOBSI-Daerah dari seluruh Indonesia, oleh wakil GSS, wakil EVC (vaksentral Nederland) dan wakil kaum buruh Australia. Dalam konferensi ini juga hadir wakil² serikatburuh yang non-SOBSI. Ketjuali membitjarakan dan mensahkan Konstitusi dan program baru, dalam Konferensi Nasional SOBSI juga menjadi diskusi hangat mengenai penyakit sektarisme yang sedjak berdirinya sudah menjadi penyakit SOBSI dan menjadi penghalang yang sangat besar bagi perkembangan SOBSI dan perkembangan gerakan buruh Indonesia pada umumnya. Selanjutnya dijakinkan oleh konferensi, bahwa SOBSI harus lebih banyak memperjuangkan kepentingan se-hari² dari kaum buruh dan harus menghindarkan diri dari sembojan² „kiri” yang kosong.

Hasil Konferensi Nasional SOBSI telah membukakan kemungkinan² yang besar untuk tertijptannya front persatuan buruh yang luas berdasarkan aksi² bersama antara buruh anggota SOBSI dan non-SOBSI, antara kaum buruh Komunis, Sosialis, Nasionalis, Islam, Katolik, dsb. Beberapa bulan sesudah Konferensi Nasional SOBSI, beberapa serikatburuh yang tadinya tidak masuk salahsatu vaksentral masuk kedalam SOBSI, antara lain serikatburuh transportasi udara dan serikatburuh pabrik beras, sedangkan beberapa serikatburuh yang tadinya anggota vaksentral reaksioner menjataskan keluar dari vaksentralnya dan berdiri diluar semua vaksentral, antara lain serikatburuh kesehatan.

Sekarang ini, dari tiga djuta kaum buruh yang sudah terorganisasi, 2,5 djuta adalah anggota SOBSI dan 39 pusat serikatburuh

sudah tergabung dalam SOBSI. Sedangkan kaum buruh yang sudah terorganisasi lainnya, yaitu lebihkurang 0,5 djuta tergabung dalam vaksentral yang dipimpin oleh kaum sosialis kanan, kaum nasionalis, Masjumi, trotskis dan dalam serikatburuh² non-vaksentral.

III

Dalam keadaan sekarang adalah satu kenjataan, bahwa aksi² kaum buruh Indonesia dalam membela kepentingan² se-hari² di lapangan ekonomi dan sosial makin lama makin erat terdjalin dengan perjuangan untuk perdamaian. Persiapan perang kaum imperialis telah menyebabkan lebih intensifnya eksploitasi atas kaum buruh, lebih hebatnya serangan² terhadap tingkat hidup kaum buruh, makin meningkatnya harga kebutuhan hidup, makin tingginya pajak² dan makin banjaknya kaum penganggur. Organisasi² kaum buruh Indonesia yang progresif, yang tergabung maupun yang tidak dalam SOBSI, mengerti akan keadaan ini dan oleh karena itu senantiasa menghubungkan perjuangan untuk kepentingan se-hari² dengan kewajiban yang utama dari zaman kita sekarang, yaitu perjuangan untuk perdamaian dan melawan militerisasi dan perjuangan untuk menggagalkan rentjana² perang dunia baru yang sedang disiapkan dibawah arsitektur Amerika.

Dalam tahun² belakangan ini dua kali bentjana besar menjerang gerakan buruh dan gerakan demokratis lainnya di Indonesia. Pertama, tindakan ultra-reaksioner dari pemerintah Sukiman dalam bulan Agustus 1951, dan yang kedua bentjana pertjobaan kudeta kaum sosialis kanan dalam bulan Oktober 1952 (4). Keduanya bermaksud memfasiskan sistim pemerintah Indonesia, bermaksud mendirikan diktatur militer, dimana hak² serikatburuh dan organisasi² Rakjat lainnya tidak diakui. Tetapi kedua bentjana ini telah dapat digagalkan oleh kekuatan persatuan Rakjat dan kekuatan gerakan demokratis. Kemenangan Rakjat Indonesia atas tindakan² ultra-reaksioner ini telah memberi kejakinan pada Rakjat Indonesia, terutama pada kaum buruh Indonesia, bahwa bahaya fasisme dapat dikalahkan asal kaum buruh waspada dan berjuang dengan militan, asal kaum buruh dapat menarik golongan

Rakjat lainnja dalam perdjungan mendjundjung hak² demokrasi. Pengalaman² ini sangat penting untuk perdjungan klas buruh dan seluruh Rakjat Indonesia dalam waktu² jang akan datang.

Demikianlah, bersamaan dengan berdjuang untuk kenaikan upah, untuk melawan pengangguran, melawan rasdiskriminasi, untuk hak² serikatburuh dan untuk djaminan sosial, kaum buruh Indonesia djuga berdjuang dengan militan untuk kepentingan seluruh Rakjat Indonesia. Klas buruh Indonesia berdjuang untuk menggalang persekutuan jang erat dengan kaum tani, jaitu golongan Rakjat jang terbesar dan djuga sangat tertindas. Klas buruh Indonesia terus mendidik diri agar dapat mendjadi pemimpin dan organisator dalam perdjungan untuk membatalkan per-setudjuan KMB, untuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda, untuk mengusir Misi Militer Belanda (MMB)⁽⁵⁾ dari Indonesia, untuk melenjapkan embargo dan blokade terhadap negeri² demokrasi, untuk melepaskan Indonesia dari ikatan-persetudjuan San Fransisco, untuk menolak TCA dan menentang Pakt Pasifik⁽⁶⁾ jang agresif jang terus-menerus dipaksakan oleh imperialis Amerika.

Dengan demikian, klas buruh Indonesia berdjuang untuk memenuhi tugas sedjarahnja, tugas memberi pimpinan kepada seluruh kekuatan nasional di Indonesia dalam menudju kemerdekaan nasional jang penuh, dalam menudju demokrasi, kesedjahteraan dan perdamaian.

Mei 1953

Enam artikel jang berikut adalah keterangan kawan Aidit disekitar pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo jang pertama pada bulan² Djuni-Djuli 1953.

Pada awal bulan Djuni 1953 terdjadi krisis pemerintahan di Indonesia sebagai akibat djatuhnja kabinet Wilopo.

Berdiri dan djatuhnja kabinet Wilopo ini telah memberikan pelajaran politik jang penting dan sangat besar artinja kepada Rakjat Indonesia. Kabinet ini adalah kabinet pertama dimana PNI sebagai wakil kaum tengah dapat memegang pimpinan jang sebelumnya, sedjak perisetudjuan KMB, selalu ditangan Masjumi-PSI sebagai wakil burdjuasi komprador dan tuantanah. Mula² kabinet Wilopo menundjukkan sifat²nja jang demokratis, ia tidak menghalangi perkembangan gerakan Rakjat. Oleh sebab itu PKI memberikan sokongan sampai batas² tertentu dan ini mendjadi salahsatu sebab jang memungkinkan kabinet Wilopo berdiri dalam waktu jang agak lama. Tetapi sedjak semula komposisi kabinet sudah mengandung banjak pertentangan politik. Achirnja ternjata bahwa elemen² demokratis dalam kabinet Wilopo ini tidak tjukup kuat dan tidak berani untuk menjingkirkan elemen² PSI dan Masjumi dari kabinet jang menjabot langkah² kabinet jang madju dan untuk menangkis serangan² reaksi dari luar kabinet. Tuntutan² Rakjat tidak dipeuhi oleh Wilopo dan di-daerah² malah terdjadi pelanggaran² jang sewenang-wenang atas hak-hak demokrasi dari Rakjat. Dengan demikian kabinet Wilopo sudah berubah mendjadi reaksioner dan achirnja ia didjatuhkan oleh kekuatan demokratis, termasuk PNI sendiri. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan demokratis lebih besar daripada kekuatan reaksioner.

Dalam menghadapi pembentukan kabinet baru, kawan Aidit dalam keterangannja kepada pers : *PKI Menghendaki Pemerintah Front Persatuan*, jang kemudian dipertegas lagi dalam keterangan lain : *Satu2nja Djalan Keluar : Kabinet Persatuan Nasional*, menekankan bahwa djalan keluar bagi Indonesia adalah pemerintah front persatuan dengan program madju, jaitu pemerintah dimana turutserta PKI sebagai wakil sewadjar-nja dari Rakjat pekerdja, terutama sebagai wakil kaum buruh dan tani dan dimana tidak ada tempat bagi elemen² komprador dan tuantanah dari Masjumi dan PSI. Didalam pernjataan² *Sudah Sewadjarnja Para Formator Mengembalikan Mandatnja dan Histeria Dikalangan Reaksi* ditandaskan bahwa tidak mungkin dibentuk pemerintah jang nasional, anti-DI-TII dan pro-parlemen, jang dikehendaki Rakjat, bila anasir² PSI atau Masjumi masuk kabinet.

Krisis kabinet berlangsung hampir dua bulan, tetapi sebagaimana djelas nampak dari keterangan kawan Aidit *Keadaan Sudah Lebih Matang Untuk Pemerintah Persatuan Nasional* tidak terdapat kelesuan apapun dikalangan Rakjat. Rakjat memperlihatkan kesedaran politik jang sangat tinggi jang menuntut lebih baik tidak ter-buru² membentuk pemerintah baru daripada terbentuk pemerintah reaksioner.

Sesudah kegagalan² formator² Mangunsarkoro-Roem (PNI-Masjumi), Mukarto (PNI), Burhanudin Harahap (Masjumi) untuk menjusun kabinet, akhirnya formator Wongsonegoro (PIR) berhasil membentuk kabinet dengan Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet ini tidak terdapat lagi wakil² PSI dan Masjumi. Komposisi dan programnya lebih demokratis dan madju daripada pemerintah Wilopo. *Kemenangan Gemilang Demokrasi Atas Fasisme* demikian sambutan kawan Aidit pada pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo jang pertama ini. Ia tekankan bahwa kabinet ini adalah kabinet pertama jang terbentuk sebagai hasil desakan dan tuntutan Rakjat. Proses pembentukannya membuktikan bahwa kekuatan demokratis sudah bertambah lebih kuat lagi, bahwa kekuatan Rakjat dapat memaksa suatu pemerintah reaksioner turun dan diganti dengan pemerintah jang lebih madju. Walaupun PKI sendiri tidak ikut, dan jang ikut hanya seorang menteri wakil Barisan Tani Indonesia (BTI) jang dipimpin oleh PKI, tetapi PKI menjokong kabinet Ali Sastroamidjojo.

PKI MENGHENDAKI PEMERINTAH FRONT PERSATUAN

Dibanding dengan pemerintah² reaksioner Hatta, Natsir dan Sukiman, pemerintah Wilopo termasuk pemerintah jang pandjang umurnya. Ini tidak lain karena pemerintah Wilopo sampai batas² jang tertentu mendapat sokongan dari Rakjat, termasuk sokongan kaum buruh dan tani jang berdjumlah lebih 90% dari Rakjat Indonesia.

Pemerintah Wilopo djatuh setelah ternjata pemerintah ini terus-menerus melakukan tindakan² jang bertentangan dengan kepentingan Rakjat, berhubung elemen² demokratis dalam kabinet kurang mampu melawan politik reaksioner jang dipelopori oleh pemimpin² Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia.

Disatu fihak pemerintah Wilopo menundjukkan watak jang sangat ragu², dan ke-ragu²an ini telah digunakan oleh pemimpin² Masjumi dan PSI untuk mengebiri kabinet ini, untuk membikin kabinet ini menjadi reaksioner dan dengan demikian mempertentangkan kabinet ini dengan Rakjat. Hal ini sudah dibayangkan oleh PKI ketika akan memberi sokongan kepada kabinet Wilopo. Politik reaksioner dari kedua partai burdjuis komprador Masjumi dan PSI telah tidak memungkinkan kabinet Wilopo melaksanakan isi seluruh programnya jang sudah didjandijkannya dimuka parlemen.

Djadi, adanja tindakan² pemerintah jang anti-nasional dan anti-Rakjat, jang menjebabkan djatuhnya kabinet Wilopo, adalah terutama menjadi tanggungdjawab pemimpin² Masjumi dan PSI. Ini dibikin lebih djelas oleh kenyataan, bahwa sebab pokok jang membikin djatuhnya kabinet Wilopo adalah karena pemimpin Masjumi mau meneruskan pentraktoratan tanaman² dan pengusiran kaum tani di Tandjung Morawa dan didaerah Sumatera Timur lainnya, sesuai dengan politik kaum modal monopoli asing jang diwakili oleh DPV dan AVROS (1). Oleh karena itu pula mereka

takut menghadapi mosi Sidik Kertapati (2). Sedangkan sebaliknya, pemimpin² PNI dan elemen² demokratis lainnja, didalam maupun diluar pemerintahan dan parlemen, tidak menjetudjui tindakan² pemimpin² Masjumi jang kedjam dan ganas terhadap kaum tani.

Tetapi difihak lain, karena desakan² dan perdjuaan Rakjat serta usaha² elemen² demokratis dalam pemerintahan, selama lebih satu tahun pemerintah Wilopo telah terdjadi pergeseran² perimbangan kekuatan dalam masjarakat Indonesia. Partai Masjumi dan PSI, karena tindakan² pemimpin²nja jang sangat reaksioner didalam dan diluar kabinet serta parlemen, sudah makin terisolasi dari Rakjat. Sebaliknya elemen² demokratis didalam dan diluar parlemen makin bersatu dan bertambah kuat. Elemen² demokratis dan patriotik dalam Angkatan Perang sekarang sudah lebih banyak menduduki tempat² jang penting, sesuai dengan djasas² mereka dalam menggagalkan pertjobaan perebutan kekuasaan oleh elemen² pro Belanda jang dipelopori oleh kaum sosialis kanan pada 17 Oktober 1952. Parlemen Indonesia sudah mengambil putusan² jang madju atau agak madju seperti amandemen Djaswadi, Undang² Pemilihan Umum, mosi Rondonuwu, mosi Tjickwan (3) dan jang terakhir, walaupun formil belum disetudjui parlemen, mosi Sidik Kertapati. Walaupun belum sempurna, kabinet Wilopo sudah mengambil tindakan² jang njata untuk melikwidasi Misi Militer Belanda. Dan jang tidak kurang pentingnja ialah, bahwa dalam waktu lebih satu tahun selama pemerintah Wilopo, sudah tertjpta kesempatan bagi Rakjat untuk lebih mengetahui dan menginsjafi betapa djahatnja politik imperialis² Belanda, Amerika dan Inggeris dengan kakitangannja bangsa Indonesia sendiri.

Semuannya ini menundjukkan bahwa perimbangan kekuatan dalam masjarakat disaat menghadapi pembentukan pemerintah sebagai pengganti kabinet Wilopo adalah dalam keadaan jang menguntungkan gerakan Rakjat dan gerakan demokratis di Indonesia. Keadaan lebih menguntungkan lagi, berhubung negeris² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat sedang mengalami lebih banyak lagi kegagalan² dalam politik perangnja, dalam lapangan ekonomi, diplomasi maupun militer.

Berdasarkan kenyataan² objektif diatas dan mengingat keinginan² jang baik dan djudjur dari bangsa dan Rakjat Indonesia, pada

tempatnja PKI sekarang mengadjukan tuntutan agar terbentuk pemerintah front persatuan, jaitu pemerintah jang tidak kemasukan elemen² komprador dan tuantanah dari Masjumi dan PSI, dan dengan demikian bisa didukung oleh seluruh kekuatan demokratis didalam maupun diluar parlemen, termasuk elemen² buruh dan tani. Pemerintah front persatuan ini wadjib mendjalankan program progresif jang disetudjui bersama oleh partai² dan golongan² demokratis.

Kabinet Wilopo telah memberikan pengalaman² jang lebih njata lagi kepada Rakjat Indonesia bahwa elemen² anti-nasional dan kaum koruptor politik dari kalangan pimpinan Masjumi dan PSI adalah musuh² Rakjat dan tukang² sabot segala usaha jang bersifat madju dan demokratis. Ini hendaknja mendjadi peladjaran bagi kaum progresif dan kaum demokrat Indonesia. Hanja keledai jang tidak tjepat menarik peladjaran dari pengalamannja !

Dalam keadaan dimana kaum reaksioner dan kaum imperialis sudah semakin terisolasi dan terdjepit, sudah biasa mereka mengadakan intimidasi² dan provokasi². Mereka sudah kurang mampu untuk meladeni persoalan politik setjara politik. Terhadap semuanya ini, Rakjat Indonesia dan pemimpin² Indonesia jang djudjur harus waspada, harus mempunjai pertimbangan² jang tenang dan dalam, tetapi dengan hati dan kemauan jang keras serta semangat patriotik jang tinggi.

Dalam pembentukan pemerintah sekarang ini, Rakjat Indonesia jang ada di-desa², di-kampung², di-pabrik² dan dimana sadja harus djuga setjara langsung menyatakan pendapatnja. Adalah mendjadi kewadjaban presiden, formator, parlemen dan partai² untuk mendengarkan dengan sungguh² dan teliti suara² dan keinginan² Rakjat ini.

Pemerintah jang akan datang harus lebih madju dari pemerintah Wilopo ! Hal ini mungkin sekali, karena perimbangan kekuatan didalam dan diluarnegeri ada difihak Rakjat dan demokrasi.

Bentuk pemerintah front persatuan dengan program jang progresif !

Djakarta, 4 Djuni 1953

SUDAH SEWADJARNJA PARA FORMATOR MENGEMBALIKAN MANDATNJA

Pendapat umum sekarang : Segera terbentuk
Kabinet tanpa Masjumi — PSI

Keputusan Masjumi untuk mengadjukan Mhd. Roem sebagai formator adalah suatu keadjaiban politik. Saban orang mengetahui bahwa kabinet Wilopo djatuh djustru karena politik Mhd. Roem jang ultra reaksioner.

Oleh karena itulah, sudah sedjak semula dapat dipastikan, bahwa Masjumi jang politiknya sangat reaksioner dengan Mhd. Roem jang mendjadi biangkeladi bubarnya kabinet Wilopo, tidak akan mungkin mendapat persetujuan dengan PNI, dengan Mangunsarkoro, walau dipaksakan bagaimanapun, selama PNI masih berpegang pada programnja sendiri.

Maka itu mendjadi beralasanlah dugaan orang jang mengatakan, bahwa diadjukannya Mhd. Roem sebagai formator oleh Masjumi adalah memang suatu „siasat” Masjumi untuk sengadja menggagalkan pembentukan kabinet agar sesudah gagal Masjumi „lebih beralasan” untuk kembali kepada usulnja jang asli, jaitu membentuk kabinet jang dikepalai oleh Hatta. Untuk kepentingan „siasat” Masjumi ini sudah dikorbankan satu minggu waktu jang sangat berguna !

Tidak bisanja Roem menerima fikiran² Mangunsarkoro mengenai soal² prinsipiil seperti penyelesaian soal Tandjung Morawa, nasionalisasi tambang minjak Sumatera Utara, pembasmian gerombolan teror Darul Islam dan gerombolan² teror lainnya, hubungan diplomatik dengan Uni Sovjet, melepaskan Indonesia dari ikatan perdjandjian San Francisco, dll. adalah sekali lagi membuktikan betapa reaksioner, betapa anti-demokrasi dan anti-nasionalnja partai Masjumi.

Teranglah, djika Mangunsarkoro dan Roem tidak segera diminta menjerahkan mandatnja, apalagi djika waktu jang diberikan

seminggu pada mereka diperpanjang oleh Presiden, maka berarti lebih memberikan kesempatan kepada permainan politik Masjumi jang sangat merugikan kepentingan nasional.

Dengan gagalnja usaha Mangunsarkoro dan Roem, kita menghadapi kenyataan baru, jaitu formator baru mesti ditundjuk.

Sudah mendjadi pendapat umum bahwa Masjumi bukanlah partai jang „tak-tergantikan” dalam pembentukan kabinet jang akan datang. Perpetjahan didalam Masjumi jang makin bertambah besar, sudah makin tidak pertjajanja anggota² Masjumi pada pimpinannya jang saling tjakar²an, pendeknja krisis dalam tubuhnya ini, telah membikin Masjumi sangat lemah. Untuk mengatasi krisis ini mereka terus berpegangan pada djimatnja, jaitu tuan Mohammad Hatta. Oleh karena itu sudah dapat kita pastikan, bahwa Masjumi dan PSI sekali lagi akan mengusulkan kembali Hatta sebagai formator dan perdana menteri.

Tetapi usul Masjumi-PSI ini, sebagaimana sudah kita lihat waktu² belakangan ini, akan mendapat tentangan jang sangat keras dari semua golongan demokratis. Hatta bukanlah seorang „kuat” dan „tidak berdosa” sebagaimana setjara salah sering orang gambarkan. Hatta memang seorang jang suka ngotot dan suka memaksakan keinginan²nja. Ini samasekali bukan sifat seorang jang kuat, malahan sifat dari seorang jang sebaliknya, sifat diktatoris dari seorang jang tidak berfikiran panjang. Rakjat Indonesia sudah merasakan sendiri pahit dan getirnja persetujuan KMB jang tjelaka jang ditjiptakan Hatta dengan Sultan Abdul Hamid. Rakjat Indonesia tidak akan melupakan Hatta sebagai arsitek Provokasi Madiun jang telah mengorbankan puluhan ribu Rakjat. Hatta adalah pemimpin Masjumi jang tidak resmi, oleh karena itu adalah naif sekali untuk memandang Hatta sebagai orang jang tidak berpartai. Semuanya ini perlu dikemukakan, karena oleh Masjumi dan PSI namanja selalu di-sebut² sebagai seorang jang „sutji” jang katanja paling tepat untuk mendjadi formator dan perdana menteri.

Dilihat dari sudut kebiasaan demokrasi parlementer dan dari sudut pertimbangan kekuatan dalam masjarakat, satu²nja jang berhak membentuk kabinet dalam keadaan sekarang adalah PNI. Oleh karena itu adalah kewajiban Presiden untuk menundjuk

PNI sebagai formator. Dan bagi PNI, untuk bisa menjalankan program yang madju, sesuai dengan program PNI sendiri, harus berani membentuk suatu kabinet tanpa tukang² sabot dari Masjumi dan PSI, kabinet yang sebagian terbesar terdiri dari menteri² yang demokratis.

Djakarta, Djuni 1953

HISTERIA DIKALANGAN REAKSI

Politik nasional yang dijalankan oleh PKI telah menimbulkan histeria dikalangan musuh² Rakjat. Politik nasional PKI telah begitu rupa menjulitkan reaksi sehingga reaksi menghadapi kesulitan besar dari mana PKI harus dipukul. Malahan beberapa koran bermaksud memukul PKI, tetapi karena sangat rendah tjaranja, mereka telah memukul diri sendiri dan dengan tidak sadar mereka telah membantu mempopulerkan PKI. Mereka tjoba memukul dengan editorial, tidak mempan, mereka tjoba memukul dengan karikatur, sia², mereka tjoba memukul dengan podjok gagal. Fit-nahan² sudah dikupas oleh PKI dengan djelas sehingga sudah sangat kurang mendapat pasaran.

Djalan lain djuga mereka lakukan. Suratkaleng mereka sampaikan kealamat PKI, demikian djuga bisikan². Antara lain mereka membisikkan supaja PKI djangan membikin pernyataan², karena pernyataan² PKI akan membikin orang yang ragu² mendjadi lari. Sebetulnja mereka sendiri yang ragu, tetapi mereka mau tutupi dengan mengatakan orang lain yang ragu. Memang, tiap² pernyataan PKI adalah sebagai pelor yang mengenai sasarannja, tiap pernyataan PKI menelandjangi musuh² Rakjat sampai telandjang bulat. Bisikan supaja PKI djangan membikin pernyataan² adalah tanda ketakutan kedok reaksi akan terbuka samasekali. Politik bukan hanya milik pemimpin², politik adalah milik Rakjat, oleh karena itu tiap² situasi politik yang baru harus diberitahukan kepada Rakjat. Ini adalah pendidikan politik yang sangat berguna bagi Rakjat.

Melihat tuntutan Rakjat yang menghendaki pemerintah persatuan nasional dimana PKI ikut didalamnya, fihak modal monopoli asing mendjadi makin beringas. Mereka lebih banjak mengeluarkan uang, agen²nja disebarkan ke-mana² untuk mentjari pemimpin² partai yang lemah. BPM misalnja, tidak hanya menggunakan uang, tetapi djuga besitua di Balikpapan dan Sumatera Utara

mereka dijadikan umpan untuk memantjing pemimpin² partai yang lemah. Sungguh tragis nasib Indonesia, karena „pemimpin²”nja dapat disuap dengan uang dan besitua ! Dan ini telah menimbulkan kesulitan² dalam pembentukan kabinet baru.

Dalam waktu singkat PKI telah berhasil menundukkan kepada Rakjat, siapa dan partai² mana yang menjadi sahabat Rakjat serta siapa dan partai² mana yang menjadi musuh² Rakjat. Diberikan musuh² Rakjat dengan jelas nampak sedjedjer manusia dan partai² yang dikepalai oleh partai konservatif Masjumi dan partai sosialis kanan PSI. Rakjat menjadi tahu apa itu „Islam” yang dimaksudkan oleh Masjumi dan apa „sosialisme” yang dimaksudkan oleh PSI, yang tidak lain daripada laba untuk BPM, DPV, AVROS, ALS⁽¹⁾, dll. Waktu yang singkat ini, dimana oleh politik nasional PKI kaum reaksi dipaksa membuka kedoknja, adalah sangat penting bagi perkembangan politik di Indonesia selanjutnja.

Politik nasional yang dijalankan oleh PKI dalam menghadapi pembentukan kabinet baru adalah sangat sederhana: Rakjat dihadapkan dengan kenyataan, yaitu disatu pihak pembentukan kabinet nasional yang anti-DI dan pro-parlemen, sedangkan di pihak lain kabinet Masjumi yang pro-DI dan anti-parlemen yang disokong oleh modal monopoli asing seperti DPV, AVROS, ALS, BPM, dsb.

Jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia sekarang bukanlah pemerintah Komunis atau anti-Komunis, sebagaimana difitnahkan oleh beberapa koran reaksioner. Tetapi menghadapi salahsatu diantaranya, pemerintah nasional parlementer atau pemerintah Masjumi yang pro-teror, yang anti-nasional, anti-parlemen, anti-Rakjat. Dalam hal ini PKI memilih pemerintah nasional yang bersedia menjalankan putusan² parlemen dan yang mau menghantjurkan gerombolan² teror. Politik PKI ini disambut dengan baik oleh sebagian besar Rakjat Indonesia dan dari semua pelosok Indonesia. Beribu-ribu pernyataan yang diterima oleh Presiden, oleh parlemen, oleh formator dan oleh pers adalah bukti kebenaran politik PKI.

Selanjutnja PKI yakin, bahwa Rakjat Indonesia akan tetap memilih pemerintah nasional dan akan mengadakan perlawanan yang sengit terhadap pemerintah Masjumi yang pro-DI yang seka-

rang sedang disiapkan oleh formator² gelap dengan jalan santase, suapan², intimidasi dan provokasi. Rakjat juga akan menentang suatu pemerintahan Masjumi yang dipimpin oleh Hatta, yaitu pemerintah seperti yang diputuskan oleh konferensi di Tugu (Puntjak)⁽²⁾ antara Hatta-Sjahrir-Natsir, tanggal 20-21 Djuni yang lalu. Rakjat akan menentang pemerintah sematjam ini karena pengalaman sudah mengadjar Rakjat bahwa pemerintah demikian pasti akan membantu gerombolan teror dan tidak akan menjalankan putusan² parlemen.

Waktu belum terlambat untuk menyelamatkan Indonesia dari tangan yang sudah kotor dan berdarah dalam hubungannja dengan teror DI, TII dll. asal ada kemauan baik, djudjur dan semangat pengabdian yang setia pada tanahair.

Keadaan sekarang meminta banjak perhatian untuk tidak berbuat serampangan yang tidak bertanggungjawab. Kebangunan Rakjat sudah tidak memungkinkan lagi berdirinja kabinet yang pro-DI dan anti-parlemen.

Semua kekuatan untuk terbentuknja kabinet persatuan nasional, satu2nja jalan keluar bagi Indonesia sekarang.

Djakarta, 30 Djuni 1953

SATU²NJA DJALAN KELUAR: KABINET PERSATUAN NASIONAL

1. Walaupun Mukarto tidak berhasil dalam usahanya membentuk kabinet baru, PKI tetap menghargai usaha Mukarto dan PNI, jang dengan ke-sungguh²an sudah berusaha mengatasi keadaan tidak berpemerintahan sekarang.
2. Gagalnja Mukarto dalam babak pertama adalah karena elemen² komprador dari partai Masjumi mengintimidasi pemimpin² NU sehingga NU tiba² menarik diri. Kegagalan dalam babak kedua disebabkan oleh karena Masjumi sengadja mengadakan orang² jang sudah terlalu dibentji oleh Rakjat berhubung dengan tindakan politiknja jang terang²an membela kepentingan imperialis dan menindas Rakjat. Malahan djuga diadjudkan orang² jang ada tanda²nja berhubungan dengan musuh negara, jaitu „Darul Islam”, sehingga tidak mungkin diterima oleh PNI dan partai² lain jang agak madju.
3. Kegagalan Mukarto sekali lagi membenarkan pendapat PKI dan pendapat umum, bahwa sudah tidak semestinja lagi membentuk kabinet jang berinti PNI-Masjumi, karena antara kedua partai ini sudah semendjak lama terdapat perbedaan prinsipil. Disatu fihak PNI menurut programnja adalah anti-DI dan pro-parlemen, sedang difihak lain Masjumi dalam kenjataan-
nja pro-DI dan anti-parlemen. Kabinet inti PNI-Masjumi sebagai jang diinginkan oleh Masjumi pada hakekatnja adalah kabinet dimana berlaku diktatur Masjumi, dan dengan demikian tidak mungkin mendjalankan putusan² parlemen dan membasmi gerombolan DI, TII, dll.
4. Satu²nja djalan keluar sekarang jalah: membentuk kabinet persatuan nasional, dimana ikut wakil² jang sewadjarnja dari kaum buruh dan tani. Hanja pemerintah demikian jang dapat mentjiptakan apa jang dinamakan perdamaian nasional, jaitu persatuan jang utuh dan bulat dari semua kekuatan nasional

untuk melawan pendjadjah² asing, tuantanah² dan pengchia-
nat² nasional. Pemerintah demikian ini jalah pemerintah jang
didalamnja tidak ikut elemen² komprador dan tuantanah, jang
pro-DI dan anti-parlemen dari kalangan Masjumi dan PSI.

5. Pemerintah Persatuan Nasional tanpa Masjumi-PSI pasti dapat dibentuk dengan kelebihan suara diparlemen, jaitu suara fraksi² pemerintah bersama fraksi² dan perseorangan diluar fraksi pe-
merintah jang dengan djudjur menjokong pemerintah persatuan nasional.
6. PKI berseru kepada seluruh Rakjat Indonesia supaja tetap ber-
pegang teguh dan memperkuat tuntutanja, jaitu: pemerintah front persatuan nasional tanpa Masjumi-PSI dan jang men-
djalankan program jang progresif, jang bersedia mendjalankan putusan² parlemen dan jang bersedia dengan sungguh² mem-
basmi gerombolan teror DI, TII, dan gerombolan² teror lain-
nja.

Djalankan putusan² parlemen !

Basmi DI, TII, dan lain² gerombolan !

Djakarta, 8 Djuli 1953

KEADAAN SUDAH LEBIH MATANG UNTUK PEMERINTAH PERSATUAN NASIONAL

Sudah waktunya soal pembasmian DI dan TII
terang2an masuk program kabinet

Gagalnya Burhanudin Harahap membentuk kabinet baru sekali lagi membuktikan bahwa dongengan tentang „kabinet inti Masjumi-PNI” sebagai djuruselamat adalah sudah sangat kuno dan tidak laku lagi. Dengan tidak terbentuknya kabinet Masjumi, terlepaslah Indonesia dari bahaya fasisme Masjumi yang berkomplot dengan PSI dan eksponen2 NICA (1), yang anti-parlemen dan anti-nasional, yang pro-teror, pro-kup dan pro-razzia.

Sampai sekarang sudah lebih sebulan setengah Indonesia tidak mempunyai pemerintah. Diluar dugaan setengah orang, keadaan ini samasekali tidak menimbulkan kelesuan, malahan sekarang ini hidup fikiran dikalangan Rakjat, daripada terbentuk pemerintah model Hatta yang menelorkan KMB, model Natsir yang menelorkan larangan mogok, model Sukiman yang menelorkan Razzia Agustus, lebih baik djangan buru2 terbentuk pemerintah baru. Djadi soalnya bagi Rakjat bukanlah asal terbentuk sadja kabinet baru, sebagaimana yang diandjurkan oleh pemimpin PSI ! *Dengan sabar dan penuh kejakinan Rakjat menunggu dan mendorong terbentuknya suatu pemerintah yang lebih maju daripada pemerintah Wilopo, yang se-kurang2nya dengan tegas membasmi DI, TII dan gerombolan2 teror lainnya, dan dengan konsekwen mendjalankan putusan2 parlemen yang menguntungkan Rakjat.*

Dalam sedjarah Indonesia, barulah sekarang Rakjat ambil bagian aktif dan langsung dalam pembentukan kabinet. Rakjat mengadakan rapat2 umum, demonstrasi2, membikin resolusi2, mengirinkan delegasi2nya, dsb. Ini adalah sangat penting bagi kehidupan politik Rakjat Indonesia, ini adalah pukulan hebat bagi kaum kolonialis yang dengan segala matjam djalan dan alasan melarang Rakjat berpolitik. Sekarang Rakjat mulai dengan tadjam mengon-

trol segala gerak-gerik dan langkah2 partai2 dan pemimpin2 partai. Tiap2 perubahan, tiap2 ada tanda penjeleungan dan tiap2 langkah maju atau mundur dari suatu partai terus diketahui oleh Rakjat. *Kontrol Rakjat ini mendjadi dorongan bagi partai2 dan pemimpin2nya yang memang mau maju untuk berbuat lebih maju, sebaliknya semakin menjulitkan kedudukan dan menimbulkan kemarahan bagi mereka yang memang mempunyai maksud djahat terhadap Rakjat. Dengan demikian, keadaan membikin lebih terang siapa sahabat dan siapa musuh Rakjat yang sebenarnya.*

Desakan Rakjat yang keras dan pendapat umum yang kuat yang menuntut pembasmian DI, TII dan gerombolan2 teror lainnya, telah membikin partai Masjumi mendjadi terdesak dan terdjepit, sehingga djurubitjara Masjumi Dr. Abuhanifah, menurut Harian „Merdeka” tanggal 10 Djuli 1953, terpaksa mengakui bahwa Darul Islam adalah musuh negara yang harus dibasmi. Kita mengetahui bahwa dalam program Mangunsarkoro (PNI) soal pembasmian DI terang2an ditjantumkan, tetapi „formulasi” Mangunsarkoro ini ditolak oleh Mr. Roem (Masjumi). Djadi, adalah satu pertanjaan sampai kemana pernyataan Abuhanifah sudah mendjadi pendirian dari pimpinan Masjumi ! Djika memang pimpinan Masjumi sudah terpaksa mengambil ini sebagai pendiriannya, maka ini berarti satu kemenangan besar bagi perdjuaan Rakjat yang anti-teror. Dengan demikian lenjap samasekali alasan orang2 yang tidak mau terang2an mentjantumkan pembasmian DI dalam program kabinet. Oleh karena itu, sudah sangat sewadjar-nya dalam program kabinet yang akan datang soal membasmi DI ditjantumkan terang2an. Dengan setjara terang2an mendjadi soal pembasmian DI sebagai program kabinet, maka ini akan menegaskan dan meletakkan dasar2 kerdjasama antara alat negara dan Rakjat dalam menghantjurkan musuhnya.

Mengenai penundjukan formator yang akan datang, PKI berpendapat sudah semestinya ditundjuk orang yang politiknya tidak diragukan lagi tentang pembasmian DI, TII dan gerombolan2 teror lainnya serta yang dengan sepenuh djiwanja bersedia mendjalankan putusan2 parlemen yang menguntungkan Rakjat. Selanjutnya kepada formator nanti PKI mengandjurkan supaya mem-

bentuk pemerintah persatuan nasional dimana didalamnya ikut wakil² jang sewadarnja dari kaum buruh dan kaum tani, pemerintah jang pro-parlemen dan anti-DI, TII dan gerombolan² lainnja. Karena pemerintah jang demikian hanja bisa bekerdja djika tidak kemasukan tukang² sabot, maka sudah semestinja didalamnja tidak boleh ikut pemimpin² Masjumi dan PSI jang dalam kabinet Wilopo ternjata pekerdjaannja menjabot segala jang bersifat madju.

Kepada Rakjat, terutama kepada kaum buruh dan kaum tani, PKI menjerukan supaja terus memperkuat tuntutanja untuk terbentuknja pemerintah persatuan nasional dengan program jang progresif, jang dengan sungguh² akan mendjalankan putusan² parlemen dan akan membasmi DI, TII dan gerombolan² teror lainnja. Perkuat tuntutan ini dengan aksi² massa, dengan rapat² umum, dengan demonstrasi² dan aksi² legal lainnja! Tertjapainja pembentukan pemerintah front persatuan tidak hanja bergantung kepada kelebihan suara dalam parlemen, tidak hanja bergantung kepada sikap partai² demokratis, tetapi sjarat jang menentukan adalah aksi-aksi Rakjat sendiri. Biarlah musuh² Rakjat gemetar oleh aksi² Rakjat jang megah dan kuasa!

Kemenangan² jang akan datang bukan untuk kaum teroris, bukan untuk kaum fasis, bukan untuk Belanda dan Amerika serta kakitangannja, tetapi untuk Rakjat, untuk demokrasi dan untuk Indonesia. Pertjajalah pada kekuatan Rakjat, pada kekuatan kita sendiri, seperti jang diadjarkan oleh pahlawan² dan pudjangga² kita!

*Bentuk pemerintah persatuan nasional!
Djalankan putusan² parlemen!
Basmi DI, TII dan gerombolan² lainnja!*

Djakarta, 19 Djuli 1953

KEMENANGAN GEMILANG DEMOKRASI ATAS FASISME

**Perjuangan lebih sengit baru akan mulai.
Kewaspadaan Rakjat harus terus dipertadjam**

Saja dapat membayangkan betapa gembiranjja Rakjat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke mendengar terbentuknja kabinet baru dimana didalamnya tidak ikut serta pemimpin² Masjumi-PSI. Kegembiraan ini lebih bisa dimengerti lagi, karena ini adalah kabinet Indonesia jang pertama dibentuk dengan desakan² dan tuntutan² Rakjat. Dengan terbentuknja kabinet ini, semua dongengan tentang keharusan „inti PNI-Masjumi“ sudah dikubur samasekali. Demikian djuga perkosaan hukum oleh mereka jang mau memaksakan kabinet presidensiil mengalami kegagalan total. Terbukti sekali lagi, bahwa nasib Indonesia tidak tergantung dari pemimpin² partai² reaksioner dan djuga tidak dari kolaborator² NICA, tidak dari tuan² modal besar asing dan tidak dari tuan-tanah², tetapi sepenuhnya tergantung dari partai² dan orang² jang demokratis.

Dengan terbentuknja kabinet baru ini samasekali tidak berarti bahwa perjuangan melawan elemen² fasis dan kolaborator² NICA sudah selesai. Djauh daripada itu! Orang reaksioner jang telah terisolasi karena politiknya jang ultra-reaksioner akan berbuat segala matjam kedjahatan dan untuk membikin kedjahatan² ini mereka mendapat sokongan penuh dari kaum modal besar asing. Suapan² uang dan besitua jang sekarang sudah banjak akan lebih meradajalela lagi di-waktu² jang akan datang. Djuga, setelah setjara politik mereka mengalami kekalahan², tjara² teror akan mereka gunakan. Mereka tidak bisa berbuat lain. Oleh karena itu, kita mesti betul² sadar bahwa dengan terbentuknja kabinet tanpa Masjumi-PSI ini, perjuangan lebih sengit baru mulai antara kekuatan progresif dan demokratis melawan kekuatan reaksioner dan fasis.

Mengingat semuanya ini, PKI berseru kepada seluruh Rakjat Indonesia untuk lebih waspada, untuk senantiasa awas terhadap tiap² tindakan musuh² Rakjat, terhadap provokasi², intimidasi², dan santase² mereka. Tetapi hadapilah semuanya ini dengan berani, tenang dan tekad yang tak kenal mundur! Mereka yang lemah, pengetjut dan ketjil hati adalah makanan yang empuk bagi kaum reaksioner dan bagi kaum fasis.

Selanjutnya persoalan² yang penting yang dihadapi oleh pemerintah baru ini harus dibawa ke-tengah² Rakjat, dibawa ke-pabrik, bengkel, kantor, sekolah, universitas, kampung, desa, dsb. Inilah djaminan bahwa Rakjat akan memberikan sokongannya kepada sifat² yang demokratis dari pemerintah ini dan akan memberikan kritiknya yang berguna pada tindakan² yang kurang tepat dari kabinet ini.

PKI mengharap agar kabinet baru ini tetap berpegang teguh pada program dan pendjelasannya seperti yang diberikan oleh formator Wongsonegoro di Istana Negara tanggal 23 Djuli yang lalu, supaya kabinet ini menarik se-banyak²nja pengalaman dan pelajaran dari kabinet Wilopo yang lalu. Terutama pelajaran, bahwa kaum modal besar asing bisa menjuap anggota² kabinet supaya bertindak reaksioner dan dengan demikian mempertentangkan kabinet ini dengan Rakjat. Hendaklah elemen² demokratis dalam kabinet ini tetap waspada dan berani mengambil tindakan² yang menguntungkan Rakjat.

Hendaknya pemerintah baru ini memenuhi tuntutan² Rakjat yang sudah disampaikan selama masa pembentukannya!

Djakarta, 31 Djuli 1953

Haridepan Gerakan Tani Indonesia ditulis untuk memberi djalan keluar kepada gerakan tani yang pada waktu itu menunjukkan kematjetan organisasi dan aksi² kaum tani yang belum meluas serta belum dipimpin dengan baik.

Dalam tulisan ini kawan Aidit dengan tegas mengkritik program „nasionalisasi tanah” yang tidak sesuai dengan revolusi Indonesia tingkat sekarang dan berbagai langgamkerdja kader² yang terpisah dari massa kaum tani. Ia menunjukkan bahwa program agraria yang tepat dan revolusioner bukanlah „nasionalisasi tanah”, melainkan „tanah untuk kaum tani”. Artikel ini djuga telah meletakkan prinsip² langgamkerdja yang tepat setjara kongkrit dikalangan kaum tani. Ditekankan pula pentingnya kader² mendjalankan penjelidikan yang teliti mengenai hubungan² agraria didesa dan pentingnya pendidikan politik serta organisasi terhadap kaum tani.

Pokok² tulisan ini kemudian dirumuskan sebagai program agraria Partai Komunis Indonesia yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.

HARIDEPAN GERAKAN TANI INDONESIA

Dibanding dengan gerakan kaum buruh, gerakan kaum tani Indonesia masih sangat djauh ketinggalan. Dari kaum tani jang djumlahnja kira² 70% dari seluruh penduduk, baru kira-kira satu djuta jang terorganisasi. Dengan keluarganja baru kira-kira 4 á 5 djuta atau kira² 7% dari seluruh kaum tani.

Apakah sebabnja gerakan kaum tani kita begitu ketinggalan? Apakah karena kaum tani Indonesia tidak mempunyai tuntutan² ekonomi, sosial, kulturil dan politik, sehingga dengan demikian tidak membutuhkan organisasi sebagai sendjata untuk memperdjua² tuntutan²nja? Djauh daripada itu! Kaum tani Indonesia, sebagaimana halnja djuga kaum tani negeri² djadjahan dan setengah-djadjahan lainnja, masih menderita kekurangan tanah garapan atau samasekali tidak mempunyai tanah, sedangkan berbagai bentuk penghisapan feodal, seperti pologoro, rodi (1) dsb. masih berlaku hingga sekarang.

Djadi, apakah sebabnja hingga sekarang bagian jang sangat besar dari kaum tani belum terorganisasi dan aksi² kaum tani belum luas, belum merata dan belum dipimpin dengan baik?

Ada dua sebab penting jang selama ini mendjadi penghalang kemadjuan gerakan tani, jaitu: *belum adanja program agraria jang tepat dan revolusioner dan belum baiknja pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani.*

Tentang program agraria

Sampai sekarang kita belum mempunyai program agraria jang tepat dan revolusioner, jang mendapat kepertjajaan penuh dari kaum tani dan dengan demikian mendapat dukungan kaum tani. Sudah kira² 6 tahun, jaitu sedjak Kongres BTI di Djember tahun 1947, kita telah menggunakan program dan sembojan jang sebenarnja mentjurigakan kaum tani karena belum bisa difaham-

kan oleh kaum tani. Dalam program BTI dituntut „*hak negara atas semua tanah*“. Program ini oleh RTI dioper dan dinjatakan dengan sembojan „*nasionalisasi semua tanah*“. Kader² dan anggota² Partai sudah berusaha mejakinkan kaum tani akan program² agraria jang lalu. Pengalaman menunjukkan, bahwa program² jang lalu tidak mampu membangunkan inisiatif massa, tidak mampu memobilisasi massa untuk melaksanakannja. Massa kaum tani atju² tak atju² dan bahkan tidak djarang tjuriga terhadap program agraria kita.

Oleh karena itu, adalah tugas kita jang terpenting untuk membikin program jang tepat dan revolusioner bagi kaum tani Indonesia, program jang dapat kepertjajaan kaum tani, jang dapat menimbulkan inisiatif kaum tani, jang dapat memobilisasi kaum tani. Tugas ini terutama terletak pada rapat pleno Central Komite jang akan datang, rapat jang akan menindjau program Partai jang lampau dan jang akan membikin rentjana Program PKI jang baru, jang lebih tepat, jang akan diadjukan kepada Kongres Partai.

Untuk dapat mentjiptakan program agraria jang tepat, pertama² kita harus mengetahui benar sampai kemana luasnja feodalisme di Indonesia. Sebagai suatu negeri jang sudah dikuasai oleh sistim kapitalisme, feodalisme di Indonesia sudah tentu tidak penuh lagi, sudah tidak 100% lagi. Jang masih ada di Indonesia-sekarang ialah sisa² feodalisme jang penting dan berat. Ini dapat kita lihat dari kenjataan²: *pertama masih adanja hak monopoli tuantanah² besar atas milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa tanah dari tuantanah² menurut sjarat² apa sadja; kedua ialah pembayaran sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan jang mengakibatkan kemelaratan bagian terbesar kaum tani; ketiga ialah sistim sewatanah dalam bentuk kerdja di tanah tuantanah², jang menempatkan bagian terbesar kaum tani dalam kedudukan hamba; jang terachir ialah tumpukan hutang² jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menetapkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.*

Adalah keliru sekali pendapat jang mengatakan bahwa di

Indonesia, dengan adanya Domeinverklaring tahun 1870 (2), sudah tidak ada lagi milik feodal atas tanah. Masih adanya sistem milik tanah dan persewaan tanah yang ruwet di Indonesia sekarang adalah bukti yang menandakan masih adanya penghisapan feodal atas kaum tani. Kenyataan menunjukkan, bahwa tuantanah² asing dan Indonesia serta kaum ningrat menguasai tanah² yang luas, sedangkan kekuasaan desa atas tanah menjadi hantjur sedikit demi sedikit dan tanah² itu *kenyataannya* jatuh ketangan kepala² daerah, pegawai² tinggi, kiai² kaya dan orang² beruang lainnya.

Domeinverklaring tahun 1870, yaitu pengakuan dan pernyataan pemerintah Hindia Belanda atas haknya terhadap tanah, sama sekali tidak mengubah hakekat sistem milik tanah. Peraturan ini tidak lain daripada satu usaha kaum kolonialis Belanda untuk memudahkan kaum modal monopoli mendapatkan tanah guna perkebunan². Ia sama sekali tidak menasionalisasi tanah dalam arti kata yang sesungguhnya. Tuantanah² Indonesia maupun asing tetap mempunyai *kekuasaan yang nyata* atas tanah yang dimilikinya. Kekuasaan negara atas tanah hanya formal, hanya menurut undang². Setara formal, ada batas waktu yang diberikan kepada kaum modal monopoli dalam menggunakan tanah, tetapi dalam prakteknya penggunaan tanah itu dapat diperpanjang dengan mudah sehingga boleh dikatakan tidak ada batasnya (3).

Akibat masih adanya sisa² feodalisme ini ialah: teknik pertanian sangat terbelakang dan karena itu kaum tani harus bekerja sangat keras sedangkan hasilnya tidak memadai; bagian terbesar dari kaum tani hidup melarat, tidak mempunyai atau tidak cukup mempunyai tanah dan menderita berbagai penghisapan setara feodal; pasar dalam negeri menjadi makin lama makin menyusut karena produksi pertanian makin merosot, karena penghasilan kaum tani terlalu rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang keperluan hidup yang pokok sehingga dengan demikian dajabeli kaum tani menjadi sangat lemah; mengindustrialisasi negeri menjadi hal yang tidak mungkin karena kira² 70% dari penduduk tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk membeli hasil² industri.

Adalah satu kenyataan, bahwa prinsip milik perseorangan atas tanah dinegeri kita begitu berakarnya dalam kehidupan kaum tani

sehingga kaum tani hanya dapat memahami revolusi agraria jika revolusi mensita tanah tuantanah², membagikannya dengan tjuma² kepada kaum tani sebagai milik perseorangan mereka. Inilah sebabnya mengapa kaum tani atjur tak atjur atau tjuriga terhadap sembojan „hak negara atas semua tanah” dari BTI dan sembojan „nasionalisasi semua tanah” dari RTI. Kader² Partai yang bekerja langsung di-tengah² kaum tani segera mengetahui bahwa sembojan ini tidak tepat, dan inilah pula yang menyebabkan RTI sedjak permulaan tahun 1952 tidak lagi mempropagandakan sembojan „nasionalisasi semua tanah”. Jadi, pengalaman kita sendiri menunjukkan, bahwa program yang bermaksud menjadikan semua tanah milik negara atau yang bermaksud menasionalisasi semua tanah, tidak mendapat sambutan dan ditjurgai oleh kaum tani, karena ini dianggap oleh kaum tani sebagai dajaja upaja untuk mengambil tanah kepunyaan mereka.

Berdasarkan kenyataan² diatas, maka kewajiban PKI yang terdekat ialah melenjapkan sisa² feodalisme, untuk mengembangkan revolusi agraria anti-feodalisme, untuk mensita tanah tuantanah dan memberikannya dengan tjuma-tjuma kepada kaum tani sebagai milik perseorangan mereka. Pensitaan atas tanah tuantanah, pembagian tanah ini dengan tjuma² kepada kaum tani sebagai milik perseorangan mereka, sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada perketjualian terhadap tanah² perkebunan yang berteknik modern. Tanah² ini dan juga tanah² hutan harus dikuasai oleh negara. Selandjutnya, tanah dan milik lainnya dari tani kaya tidak boleh disita, sedangkan tanah dan milik lainnya dari tani sedang harus dilindungi oleh pemerintah.

Apakah dengan memberikan tanah sebagai milik perseorangan kaum tani berarti bahwa sistem milik perseorangan atas tanah adalah sistem yang terbaik dan tidak akan berubah? Samasekali tidak demikian! Kita mengetahui, bahwa kelak kaum pekerdja tani yang merupakan golongan terbesar, berdasarkan pengalamannya sendiri sesudah revolusi agraria menang, akan sampai pada kesimpulan bahwa adalah perlu sekali untuk mempersatukan milik² tanah yang ketjil dan alat² kerdja mereka kedalam satu pertanian kolektif yang besar diatas tanah yang luas dan untuk mendapatkan bantuan negara dalam bentuk traktor, kombain dan mesin per-

Justika
Dimpos Mendu

tanian lainnja. Dengan perkataan lain, demikianlah kaum pekerdja tani kita menempuh djalan pertanian² kolektif, djalan perkembangan sosialis. Pengalaman kaum tani sendiri serta pimpinan dan didikan Partai akan menanamkan kesedaran pada kaum tani sehingga kaum tani dengan sukarela meninggalkan prinsip milik perseorangan atas tanah.

Djadi teranglah, bahwa sembojan kita jang tepat bukanlah „hak negara atas semua tanah” atau „nasionalisasi semua tanah”, tetapi ialah: „*tanah untuk kaum tani*”, „*pembagian tanah kepada kaum tani*” dan „*milik perseorangan tani atas tanah*”. Sembojan² ini adalah paling tepat dan paling masuk akal, karena *tidak ada orang jang lebih berhak atas tanah ketjuali kaum tani sendiri berhubung kaum tanilah jang mengerdjakan tanah dan jang sudah turun-temurun membasahi tanah dengan keringatnja*. Dengan sembojan² ini kaum tani pasti tidak akan ragu² terhadap program kita, malahan kaum tani akan mendukungnja dengan sekuat tenaga, dan ini adalah djaminan bagi persekutuan jang erat antara kaum buruh dan tani, djaminan bagi front persatuan nasional jang kuat, djaminan bagi kemenangan kita.

Tentang pekerdjaan Partai dikalangan kaum Tani

Anggota dan tjalon-anggota Partai sudah biasa dan lantjar mengutjapkan kalimat seperti: „Dengan tiada front nasional kemenangan tidak akan datang” dan „Front nasional tanpa basis persekutuan erat antara kaum buruh dan kaum tani, dan tanpa dipimpin oleh klas buruh, tidak mungkin mendjadi sendjata jang kuat”.

Didalam Partai sudah sering dibitjarakan bahwa bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani adalah bentuk kegiatan jang terpenting dan pokok daripada PKI. Tetapi ternjata bahwa hal ini belum mendjadi kesedaran jang mendalam. Ini dapat kita lihat dari kenjataan, bahwa menurut perbandingan masih terlalu sedikit anggota Partai jang berasal dari kaum tani dan belum ada anggota Partai jang mengerti benar serta sedikit sekali jang mengetahui tentang hubungan² agraria dan tentang tuntutan² dan kehidupan kaum tani.

Kekurangan jang serius dari PKI sekarang ialah pekerdjaan dikalangan kaum tani. Keadaan ini tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Kita harus lebih banjak menarik anggota² baru dari kalangan kaum tani dan mendidik mereka mendjadi anggota² jang baik. Anggota² dan organisasi² Partai dari daerah luarkota harus bekerdja keras untuk mengetahui dan mengerti benar hubungan² agraria dan tentang tuntutan² serta kehidupan kaum tani. Fungsionaris², kader² dan anggota² Partai jang bekerdja dikalangan kaum tani harus diperbanjak.

Semua kekurangan dalam pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani harus diatasi dengan segala kekuatan. Hanja dengan adanya ke-sungguh²an untuk mengatasi ini, barulah boleh dikatakan ada usaha jang njata untuk menggalang persekutuan anti-feodalisme dari kaum buruh dan tani, dan ini berarti menggalang basis front persatuan nasional.

Langkah pertama dalam pekerdjaan dikalangan kaum tani ialah membantu mereka dalam perdjjuangan untuk kebutuhan mereka se-hari². Hanja dalam perdjjuangan melawan tuantanah², kaum reaksioner dan imperialis untuk mendapatkan tuntutan bagian² atau tuntutan se-hari² dari kaum tani, hanja dengan melalui pekerdjaan mengorganisasi dan mendidik kaum tani, perdjjuangan kaum tani bisa dinaikkan ketinggian jang lebih tinggi. Membawa perdjjuangan kaum tani ketinggian jang tinggi dengan tiada didahului oleh pekerdjaan mengorganisasi dan mendidik kaum tani, dengan tidak didahului oleh pekerdjaan jang ketjil², jang remeh dan kelihatannja tidak penting dikalangan kaum tani, maka ini berarti menempuh djalan avontur jang sangat berbahaya bagi gerakan tani dan gerakan nasional pada umumnja.

Salahsatu penghalang kemadjuan gerakan tani revolusioner ialah, bahwa diantara anggota² dan kader² Partai jang bekerdja dalam organisasi tani masih terdapat mereka jang mempunyai hubungan ideologi dengan tuantanah, atau mereka sendiri adalah tuantanah. Anggota² dan kader² demikian ini, walaupun dalam beberapa hal mungkin membantu pekerdjaan Partai, tetapi pengalamanan kita sendiri selama kira² 6 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa mereka adalah penghalang kemadjuan gerakan tani revolusioner. Mereka tidak konsekwen membela kaum tani

melawan tuantanah, karena mereka djuga mempunyai kepentingan menghisap kaum tani. Kepada anggota² dan kader² sematjam ini Partai harus dengan tegas menjatakan pendiriannya, meyakinkan mereka dengan sungguh², bahwa kepentingan kaum tani akan tanah tidak mungkin dikompromikan dengan kepentingan tuantanah, bahwa kita tidak mungkin duduk diantara dua kursi, kursi kaum tani dan kursi tuantanah, supaja anggota² dan kader-kader sematjam itu melepaskan samasekali hubungan ideologinja dengan tuantanah atau meninggalkan kedudukannya sendiri sebagai tuantanah. Ber-angsur² dan sistematis, pimpinan organisasi tani harus dipegang oleh kader² yang baik dan tahan udji dalam membela kepentingan kaum tani, dan dalam badan² pimpinan organisasi tani harus makin lama makin banyak duduk kader² yang berasal dari buruh-tani dan tani miskin. Adalah kewadajiban Partai kita yang sangat penting dan berat untuk meluaskan keanggotaan Partai dikalangan kaum tani, terutama buruh-tani dan tani miskin, dan untuk meningkatkan anggota² Partai yang berasal dari buruh-tani dan tani miskin menjadi pemimpin kaum tani yang tjakap.

Sekarang masih banyak fungsionaris-fungsionaris dan kader-kader Partai yang menghindari pekerdjaan didesa. Keadaan ini djuga sangat menghalangi pertumbuhan gerakan tani. Ini terdjadi karena pekerdjaan didesa adalah lebih berat djika dibanding dengan pekerdjaan dikota dan karena kesadaran belum mendalam dikalangan anggota Partai tentang besarnya arti pekerdjaan didesa bagi Partai dan bagi revolusi. Tinggal didesa berarti djauh dari keramaian kota, djauh dari berbagai matjam tontonan, djauh dari restoran², djauh dari pusat² ilmu dan kebudajaan modern, dsb. Tinggal didesa berarti mesti hidup sangat sederhana, mesti menyesuaikan diri dengan keadaan kaum tani yang melarat dan yang pandangan²nja masih sangat terbatas.

Hanja kader dan anggota yang ideologinja sudah kuat berani datang kepada Partai dan berkata: „Kirimlah saja kedesa, karena Partai membutuhkan saja ada didesa”. Hanja kader yang sudah kuat ideologinja menjalankan instruksi Partai untuk pergi kedesa dengan sepenuh hati dan djiwanja. Hanja kader² yang demikian akan dapat mempunyai hubungan yang mesra dengan kaum tani, akan ditjintai oleh kaum tani dan akan mengalami sendiri bahwa

pekerdjaannya adalah sangat penting bagi Partai dan bagi revolusi. Bahwa kesenangan² dan kemadjuan tidak hanja bisa didapat dikota-kota tetapi djuga di-desa². Pengalaman² yang berharga serta keradjinan beladjar selama bekerdja didesa samasekali tidak berarti bahwa mereka sebagai anggota Partai akan ketinggalan dari kader² dan anggota² yang bekerdja di-kota². Disamping itu Partai akan memberikan penghargaan yang sangat besar kepada anggota² dan kader²nja yang bekerdja dengan sungguh² dan militan untuk massa kaum tani didesa.

Ada fungsionaris dan kader luarkota yang suka berkata bahwa didesa-desa didaerahnja tidak ada „objek” atau sasaran bagi pergerakan kaum tani. Mereka katakan, bahwa disana tidak ada tanah yang harus diduduki oleh kaum tani, disana tidak ada tuantanah yang harus dituntut supaya menurunkan sewatanah, disana tidak ada lintahdarat yang harus dituntut supaya menurunkan bunga uang pindjaman, disana tidak ada soal² irigasi, tidak ada soal² kerdjapaksa dsb. Pendeknja, kaum tani didaerahnja tidak mempunyai tuntutan apa² dan oleh karena itu kaum tani didaerahnja tidak bisa digerakkan, dan oleh karena itu pula BTI atau RTI-nja tidak bisa tumbuh.

Keterangan seperti diatas tentu menimbulkan pertanjaan: apakah dengan demikian berarti, bahwa kaum tani didaerah kawan tersebut sudah bebas, sudah memiliki tanah dan sudah tjukup tanah yang dimilikinja? Apakah dengan demikian berarti bahwa kaum tani didaerah kawan tersebut sudah makmur hidupnya, sehingga tidak mempunyai tuntutan² lagi? Pertanjaan² ini setelah diadjukan kepada kawan tersebut biasanja menimbulkan fikiran² padanja, karena ia mengetahui bahwa kaum tani didaerahnja, sebagaimana djuga kaum tani didaerah lain, masih djauh dari hidup makmur. Ia sendiri lalu menjedari bahwa sesungguhnya ia tidak mengetahui apa² tentang hubungan² agraria, tidak mengerti tuntutan dan kehidupan kaum tani didaerahnja. Djika tidak diadjukan pertanjaan seperti diatas kepadanya, soal² ini biasanja tidak terfikir olehnja.

Biasanja, sesudah bekerdja dan memperhatikan sungguh² persoalan dan penghidupan kaum tani, kader² luarkota kita akan mengetahui, bahwa kaum tani didaerahnja masih mempunyai tun-

tutan jang sangat banjak, seperti: tuntutan turun sewatanah, turun bunga uang pindjaman dari lintahdarat, turun padjak² negara, tuntutan hapusnja tunggakan padjak bumi, hapusnja setoran paksa kaum tani, hapusnja pologoro dan rodi, tuntutan tanah kosong jang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani supaja sah mendjadi milik kaum tani, tuntutan supaja tanah² kosong jang tidak dikerdjakan bisa dibagikan kepada kaum tani, tuntutan supaja kaum tani menentukan setjara bebas sewatanahnja kepada perkebunan² asing, tuntutan membasmi gerombolan teror, tuntutan supaja pemerintah memberi bantuan bibit dan obat² untuk tanaman, tuntutan supaja didirikan sekolah pertanian, tuntutan penghapusan pembayaran surat keterangan, tuntutan memperbaiki irigasi jang lama dan membikin jang baru, tuntutan pendemokrasian pemerintah desa, dsb. dsb.

Adalah kewadajiban kader² dan anggota² Partai untuk menentukan, melalui perundingan dengan kaum tani, tuntutan mana jang paling mendesak (urgen) disesuatu tempat dan pada waktu jang tertentu. Bagi tiap² tuntutan bisa diadakan gerakan jang berdasarkan sembojan², misalnja sembojan² sbb.: „turunkan sewatanah”, „turunkan bunga uang pindjaman”, „turunkan padjak negara”, „hapuskan tunggakan padjak bumi”, „hapuskan setoran paksa”, „hapuskan pologoro”, „hapuskan rodi”, „djangan diganggu tanah jang sudah dikerdjakan kaum tani”, „berikan tanah jang tak dikerdjakan kepada kaum tani”, „hak kaum tani menentukan sewatanahnja kepada perkebunan asing”, „persendjatai kaum tani untuk membasmi DI, TII dan gerombolan² teror lainnja”, „bantuan bibit dan alat bagi kaum tani”, „satu sekolah pertanian untuk ketjamatan”, „hapuskan pembayaran surat keterangan”, „perbaiki irigasi lama dan bikin jang baru”, „bentuk pemerintah desa jang membela Rakjat”, dsb. dsb. Apa jang tertjantung disini belum semua sembojan dari tuntutan se-hari² kaum tani. Terlalu banjak untuk ditjantumkan semua disini.

Dengan menjebutkan banjak sembojan diatas, samasekali bukan maksudnja supaja diadakan gerakan serentak untuk melaksanakan semua sembojan itu sekaligus. Sebelum dimulai suatu gerakan harus didiskusikan matang² dulu didalam organisasi Partai tentang gerakan apa jang harus diadakan dan bagaimana sembojaninja. Kemu-

dian sesudah matang dibitjarakan dalam organisasi Partai harus diadakan ke-rapat² organisasi tani. Djika dapat persetudjuan kaum tani, maka gerakan harus dipersiapkan, diorganisasi dan dipimpin. Gerakan jang diadakan haruslah benar² dimengerti oleh kaum tani, harus benar² mendjadi gerakan kaum tani sendiri, dan sembojaninja harus jang paling mudah ditangkap dan difahamkan kaum tani.

Tiap² tuntutan harus sesuai dengan kekuatan jang sesungguhnya dari organisasi kaum tani. Djika organisasi masih lemah, maka tuntutan tidak boleh tinggi², supaja dibatasi sampai kira² bisa berhasil dengan dukungan kekuatan organisasi jang belum kuat itu. Makin kuat organisasi makin tinggi dan makin banjak gerakan menuntut jang bisa diadakan. Dalam menentukan tuntutan, peganglah senantiasa pedoman: „*Biar ketjil, tapi berhasil*”.

Hanja dengan bekerdja praktis dikalangan kaum tani, hanja dengan memimpin kaum tani dalam memperdjuangkan tuntutan se-hari²nja, tuntutan jang kelihatannja ketjil, remeh, tidak penting, hanja dengan demikian kader² dan anggota² Partai dapat mempunyai hubungan jang mesra dengan kaum tani dan mendapat kepertjajaannja. Hanja dengan melalui aksi² menuntut hal² jang kelihatannja ketjil, jang remeh, tidak penting, organisasi kaum tani bisa makin lama makin kuat, makin luas dan makin teguh.

Hanja dengan melalui pekerdjaan mengorganisasi dan mendidik kaum tani, perdjuangan kaum tani bisa dinaikkan ketingkat jang lebih tinggi. Hanja dengan melalui pekerdjaan ini kaum tani dapat dididik dan dimobilisasi sehingga matang untuk melaksanakan sembojan: „tanah untuk kaum tani”, „pembagian tanah kepada kaum tani” dan „milik perseorangan tani atas tanah”.

Hanja dengan demikian Partai dapat membantu kaum tani dalam perdjuaannja melawan kaum feodal untuk mendapatkan tanah. Inilah sjarat untuk tertjiptanja front anti-feodalisme dari kaum buruh dan kaum tani, sebagai basis daripada front persatuan nasional jang dipimpin oleh klas buruh. Tanpa ikut sertanja kaum tani, jaitu kira² 70% dari seluruh penduduk, front persatuan nasional tidak akan mempunyai daja. Harus senantiasa mendjadi pelajaran bagi kita, bahwa sebab pokok daripada gagalnja revolusi Rakjat tahun 1945 - 1948 adalah karena massa kaum

tani jang ber-puluh² djuta belum dibangkitkan dan ditarik ke-dalam revolusi. Harus mendjadi peladjaran bagi kita, bahwa Partai mendapat lukaparah karena pukulan reaksi dalam tahun 1926 dan dalam Provokasi Madiun tahun 1948 adalah karena kaum tani belum dengan teguh berdiri dibelakang Partai.

Kawan Stalin dan Mau Tje-tung senantiasa mengadjar kita, bahwa masalah tani adalah pokok persoalan pimpinan klas buruh dalam revolusi, dan bahwa setelah mendapat persekutuan dengan kaum tani dalam revolusi barulah revolusi itu dapat mentjapai kemenangan. Kawan Stalin dan Mau Tje-tung senantiasa mengadjar kita, bahwa proletariat beserta partai politiknya, jaitu Partai Komunis, harus mendjadi pembentuk dan pemimpin revolusi serta mendjadi pemimpin kaum tani.

Demikian langkah² jang harus kita ambil dalam melaksanakan kewadajiban terdekat daripada Partai kita, jaitu kewadajiban melepaskan sisa² feodalisme, untuk mengembangkan revolusi agraria anti-feodalisme, untuk mensita tanah tuantanah dan untuk memberikan dengan tjuma² tanah tuantanah² kepada kaum tani sebagai milik perseorangan mereka. Revolusi agraria adalah hakekat revolusi Demokrasi Rakjat di Indonesia.

Dengan program agraria PKI jang revolusioner dan dengan kegiatan² anggota PKI bekerdja dikalangan kaum tani, kita yakin bahwa gerakan tani kita menghadapi masa gemilang, masa jang belum pernah dialami oleh gerakan tani Indonesia.

Artikel ini ditulis berkenaan dengan peringatan sewindu meletusnya Revolusi 17 Agustus 1945. Tudjuan revolusi ini belum terpenuhi. Persetujuan KMB bulan November 1949 telah mengembalikan kekuasaan imperialisme Belanda dilapangan ekonomi, politik dan kebudajaan di Indonesia. Walaupun demikian perjuangan Rakjat melawan imperialisme Belanda tidak bisa dihentikan. Kawan Aidit menegaskan bahwa setiap peringatan 17 Agustus mendjadi hari pembulatan tekad dan kekuatan Rakjat Indonesia untuk membatalkan persetujuan KMB. Kesetiaan kaum Komunis kepada tudjuan Revolusi Agustus membuat mereka senantiasa berdiri didepan dalam perjuangan itu. Kewaspadaan Rakjat Indonesia bertambah tinggi, sehingga tidak ada satu golonganpun jang berani terang²an membela KMB. Front persatuan nasional melawan KMB mendjadi semakin meluas dan tak dapat dibendung oleh kaum reaksi.

PERSATUAN NASIONAL DAN KEWASPA- DAAN NASIONAL

Situasi Dalam dan Luarnegeri Ada Difihak Demokrasi dan Perdamaian

Walaupun revolusi Agustus 1945 mengalami kegagalan karena perbuatan kaum pengkhianat nasional yang menandatangani persetudjuan KMB yang memalukan bangsa Indonesia, Rakjat Indonesia tetap memandang hari 17 Agustus sebagai hari bersedjarah yang wadjib diperingati saban tahun. Hingga sekarang, hari 17 Agustus adalah hari nasional terbesar dan terpenting bagi Rakjat Indonesia.

Hari 17 Agustus 1945 adalah hari persatuan nasional yang bulat dari seluruh Rakjat dalam melawan kekuasaan kaum pendjadjah. Dengan persatuan yang bulat ini Rakjat Indonesia mengangkat sendjata untuk kemerdekaan nasionalnja yang penuh, untuk perbaikan nasib, untuk demokrasi dan perdamaian abadi.

Persetudjuan KMB tahun 1949 yang didiktekan oleh kaum imperialis Belanda dibawah pengawasan imperialis Amerika telah membikin Indonesia dari satu Republik yang merdeka dan berdaulat mendjadi satu negara setengah-djadjahan. Persetudjuan KMB telah mendjadi penghalang yang besar bagi pelaksanaan tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis di Indonesia.

Dengan persetudjuan KMB kaum imperialis Belanda berhasil mempertahankan pengawasannja di Indonesia. Persetudjuan ini menetapkan Indonesia mendjadi anggota Uni Indonesia-Belanda dibawah naungan Ratu Belanda, politik luarnegeri dan perdaganganan luarnegeri Indonesia dikontrol oleh pemerintah Belanda, semua usaha dilapangan industri, perdagangan dan keuangan yang penting² kepunjaan kaum imperialis tidak boleh diganggu-gugat, pegawai² sipil dan militer Belanda kolonial masih tetap bekerdja di

Indonesia dan mendapat gadji serta perlakuan yang djauh lebih baik daripada pegawai bangsa Indonesia sendiri. Semua kenjataan ini menundjukkan betapa tidak penuh dan tidak njatanja kemerdekaan Indonesia sekarang.

Dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) perdjungan untuk membatalkan persetudjuan KMB makin lama makin luas dan kuat. Makin lama makin banjak partai, organisasi massa dan orang terkemuka dilapangan ilmu maupun kebudayaan yang menjokong politik pembatalan KMB.

Sekarang, sesudah tiga-setengah tahun tuntutan pembatalan persetudjuan KMB didjalankan dengan konsekwen, sudah tidak ada lagi partai, organisasi maupun orang yang berani terang²an menjatakan persetudjuan KMB sebagai pembela kepentingan Rakjat Indonesia. Karena desakan² dan tuntutan² Rakjat, pemerintah Wilopo maupun pemerintah Ali Sastroamidjojo sekarang terpaksa mentjantumkan dalam programnja soal penindjauan kembali dan penghapusan fasal² persetudjuan KMB yang langsung merugikan kepentingan nasional dan Rakjat Indonesia, terutama fasal² yang mengenai keuangan dan ekonomi.

Sedjak ada persetudjuan KMB, tiap² 17 Agustus digunakan oleh Rakjat Indonesia untuk memperbaharui dan memperhebat tuntutan pembatalan persetudjuan KMB. Bagi Rakjat Indonesia perkataan KMB sudah mempunjai arti yang sama dengan kemelaratan dan kemiskinan, dengan pendjadjahan dan teror. Dengan tidak usah membatja persetudjuan chianat yang begitu banjak fasal²nja sehingga merupakan buku yang tebal itu, Rakjat Indonesia sudah tahu apa artinja persetudjuan KMB berdasarkan pengalamannja sendiri yang langsung dan pahit.

Hari 17 Agustus tahun ini diperingati dalam keadaan istimewa, keadaan yang sangat menguntungkan gerakan kemerdekaan nasional Rakjat Indonesia.

Pertama, hari 17 Agustus tahun ini diperingati dalam keadaan internasional yang diliputi oleh keinginan damai yang sangat dalam dan luas dari umatmanusia seluruh dunia, termasuk keinginan negara² besar Barat, ketjuali Amerika yang dikuasai oleh penghasut² perang. Ini berkat politik perdamaian Uni Sovjet dan ber-

kat inisiatif perdamaian yang baru yang dalam bulan² belakangan ini diambil oleh Pemerintah Uni Sovjet.

Kedua, hari ini diperingati dalam keadaan dimana dalam bulan Djuli baru² ini ditandatangani persetudjuan gentjatan sendjata dimedan perang Korea (1). Ini berarti satu kemenangan yang tak ternilai artinja bagi front perdamaian sedunia. Ini adalah djuga berkat politik besar dan ulung dari Pemerintah Uni Sovjet yang berdasarkan prinsip bahwa semua perselisihan internasional dapat diselesaikan dengan djalan damai. Kemenangan besar ini telah tertjapai karena keuletan tentara Rakjat Korea dan tentara sukarela Tiongkok, karena politik perdamaian pemerintah Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Republik Rakjat Tiongkok, karena desakan front perdamaian sedunia yang sangat kuat.

Ketiga, hari ini diperingati dalam keadaan dimana pembangunan raksasa di Republik Rakjat Tiongkok mentjapai hasil² yang luar biasa. Sukses² Rakjat Tiongkok yang besar langsung dirasakan oleh Rakjat Indonesia sebagai sukses²nja sendiri. Orang² Indonesia yang djudjur, mulai dari profesor² sampai kepada pemimpin² kaum buruh di-pabrik² dan di-perkebunan² serta pemimpin² kaum tani didesa-desa, memandang segala kemandjuaan yang ditjapai di Tiongkok sekarang sebagai sesuatu yang terdjadi dinegeri sahabatnja yang harus dijadikan teladan oleh Rakjat Indonesia. Kenja-taan² di Tiongkok telah membikin makin lama makin banyak orang Indonesia, termasuk sardjana² dan pemimpin partai² demokratis berorientasi ke Tiongkok. Kemenangan Rakjat Tiongkok mereka anggap sebagai „kemenangan Timur”.

Keempat, hari ini diperingati dalam keadaan dimana kekuatan persatuan nasional dan kekuatan demokrasi dari Rakjat Indonesia berada dalam keadaan yang lebih besar daripada di-tahun² yang lalu. Persatuan nasional yang sudah makin kuat ini yang menjejabkan kaum reaksioner tidak mudah lagi membentuk pemerintah reaksioner sesudah pemerintah Wilopo yang menjeleweng kekanan itu didjatuhkan oleh kekuatan demokratis. Persatuan nasional yang makin kuat inilah yang telah memungkinkan adanya rapat² raksasa dan demonstrasi² yang didukung oleh partai² dan organisasi² massa yang demokratis dan diikuti oleh puluhan ribu orang seperti di Djogjakarta, Semarang, Surabaya, Tasikmalaja, Tjiamis, Medan

dsb. dan 100 ribu di Bandung dan Madjalengka serta lebih dari 130 ribu di Djakarta. Rapat² raksasa ini menuntut terbentuknja suatu pemerintah yang mendjalankan program yang demokratis, terutama mendjundjung tinggi demokrasi parlementer yang mau dihantjurkan oleh partai² Masjumi-PSI dan yang dengan sungguh² akan menghantjurkan gerombolan teror Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (2) dan gerombolan² teror lainnja. Rapat² yang mempunyai tuntutan demikian ini djuga diadakan diberatus-ratus tempat didesa-desa, kampung², pabrik², bengkel², dsb. Persatuan nasional yang makin kuat ini djugalah yang pada tanggal 30 Djuli yang lalu telah mengachiri krisis pemerintah yang 58 hari lamanja dengan terbentuknja pemerintah Ali Sastroamidjojo yang lebih madju dari pemerintah Wilopo, pemerintah tanpa partai² Masjumi-PSI dan yang berdjandji akan mendjalankan program sebagai yang dituntut oleh rapat² raksasa dan demonstrasi² Rakjat.

Kelima, hari 17 Agustus tahun ini diperingati dalam keadaan dimana Partai Komunis Indonesia sudah mempunyai hubungan yang makin erat dengan massa, mulai dipimpin dengan baik oleh ajaran² Marx, Engels, Lenin dan Stalin serta oleh fikiran² Mau Tje-tung. Djumlah anggota dan pengikut PKI bertambah dengan tjepat. PKI mulai melakukan rolnja yang sewadjarnja sebagai inspirator dan organisator daripada persatuan klas buruh, daripada persatuan klas buruh dan kaum tani dan daripada front persatuan nasional seluruh Rakjat Indonesia. Perdjuaan PKI yang konsekwen untuk kemerdekaan nasional yang penuh, untuk demokrasi, untuk perbaikan nasib Rakjat dan untuk perdamaian abadi, telah menjejabkan PKI mendapat pengaruh yang besar dikalangan massa yang sangat luas, menjejabkan PKI makin ditjintai oleh Rakjat sebagai pembelanja yang setia, yang konsekwen dan djudjur.

Dalam merenungkan kemandjuaan² yang tjepat dan besar yang ditjapai oleh gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia dan oleh PKI, Rakjat pekerdja dan kaum Komunis Indonesia senantiasa ingat akan bantuan² pengalaman dan teori dari partai² sekawan, terutama dari Partai Komunis Uni Sovjet dan dari Partai Komunis Tiongkok, Partai tipe Lenin. Kedua partai besar ini adalah

gurubesar PKI, pemberi inspirasi dan pemberi dorongan kepada PKI.

Dalam merenungkan kemadjuan² jang tjepat dan besar jang ditjapai oleh gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia, maka adalah kewajiban kita mengenangkan kembali djasa dan perdjjuangan pahlawan² dan pudjangga² nasional kita. Kita berterimakasih kepada mereka semua, karena berkat merekalah, berkat tradisi gemilang jang mereka tantjapkan dibumi tanahair kita, kita telah men-tjapai kemenangan² dalam perdjjuangan untuk memerdekakan tanahair kita.

Pada hari 17 Agustus jang bersedjarah ini kita ingat akan kepahlawanan, keperwiraan dan kebesaran pahlawan² dan pudjangga² kita. Dengan tiada mereka kita tidak akan seperti sekarang !

Kaum reaksioner didalam dan diluarnegeri marah besar melihat kemenangan² Rakjat Indonesia. Mereka tidak ingin melihat Rakjat Indonesia merebut kembali kemerdekaan jang sudah dibikin lenjap oleh persetudjuan KMB. Mereka tetap menginginkan status kolonial bagi Indonesia. Mereka akan mengerahkan segenap kekuatan mereka dan akan menggunakan tiap² kesempatan jang ada pada mereka untuk menghantjurkan gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia. Mereka meneruskan tradisi mereka jang reaksioner, jang memetjah-belah, jang mengadu-domba sukubangsa satu dengan sukubangsa lainnja, jang mengadu-domba golongan agama satu dengan lainnja, jang mengintimidasi dan memprovokasi.

Dalam menghadapi kegiatan² kaum reaksioner, kegiatan² jang sering sangat kotor, sangat rendah dan sangat djahat, adalah kewajiban seluruh Rakjat Indonesia untuk senantiasa waspada. Dengan waspada, tetapi penuh gairah dan keberanian, kita harus mematahkan tiap² pertjobaan kaum reaksioner. Soalnja sekarang, kita mengalahkan kaum reaksioner atau kaum reaksioner jang mengunjah kita ! Oleh karena itu kita harus berani ! Mereka jang takut mudah dikunjah oleh kaum reaksioner dan djika ini terdjadi berarti kaum reaksioner jang menang.

Dengan waspada, dengan penuh gairah dan keberanian, kita teruskan perdjjuangan kita menghantjurkan gerombolan² teror

Darul Islam, Tentara Islam Indonesia dan gerombolan² teror lainnja ! Kita teruskan perdjjuangan kita membela demokrasi parlementer jang mau dibinasakan oleh pemimpin² Masjumi dan PSI ! Kita teruskan perdjjuangan kita untuk membatalkan persetudjuan KMB jang chianat ! Kita teruskan perdjjuangan kita untuk kemerdekaan nasional jang penuh, untuk demokrasi, perbaikan nasib dan perdamaian abadi !

Adalah kewajiban tiap² Komunis Indonesia untuk berdiri di barisan terdepan dalam perdjjuangan jang sengit tetapi sutji ini. Adalah kewajiban tiap² Komunis Indonesia untuk meneruskan tradisi revolusioner Rakjat Indonesia jang lahir didalam pemberontakan Rakjat tahun 1926, didalam pemberontakan kapal perang „Zeven Provinciën” tahun 1933, didalam perdjjuangan melawan fasisme Djepang, didalam Revolusi Agustus 1945, didalam perlawanan terhadap teror putih selama Provokasi Madiun, didalam menggagalkan Razzia Agustus 1951 dan didalam menggagalkan perebutan kekuasaan oleh kaum sosialis kanan dan kaum militeris pada 17 Oktober 1952. Tiap² anggota PKI dan pentjinta PKI adalah penerus tradisi revolusioner jang gemilang ini !

PERKUAT KEDUDUKAN REPUBLIK!

TUGAS POKOK RAKJAT INDONESIA DITAHUN DATANG

Tahun 1953 akan meninggalkan kita dengan banjak kenangan² jang menggembirakan. Tahun ini kita tutup dengan banjak mentjatat kemenangan² perdjjuangan Rakjat, kemenangan jang bersifat nasional maupun jang bersifat internasional. Tahun ini telah memberikan kekuatan dan kesegaran untuk menghadapi tahun datang.

Kemenangan Dunia Baru Atas Dunia Lama

Pentjinta umatmanusia mana jang tidak mentjatat kegagalan Amerika Serikat dengan provokasinja di Berlin dan gentjatan sendjata di Korea sebagai kemenangan gemilang dari perdjjuangan Rakjat untuk menjelamatkan umatmanusia dari kebiadaban dan penghantjuran?

Bukankah „Masjarakat Pertahanan Eropa” (1) jang agresif, pemulihan militerisme Djepang oleh radja² perang Amerika dan diktat Amerika mengenai perdjandjian Pakistan-Amerika, jang semuanya ini merupakan pelanggaran terang²an oleh Amerika atas kedaulatan negeri² lain, mendapat tentangan sengit dan hebat dari seluruh dunia demokrasi dan tjintadamai? Amerika dengan rojal menabur bibit fasisme dan peperangan, tetapi jang tumbuh dengan subur ialah kekuatan demokrasi dan perdamaian. Demikianlah dialektik sedjarah jang tidak bisa diubah djalannja dengan dolar maupun bom atom.

Meninggalnja Stalin telah menimbulkan berbagai spekulasi dikalangan kaum penghasut perang. Mereka meng-harap² timbulnja perpetjahan dan kekatjauan didalam front demokrasi dan perdamaian. Tetapi sekali lagi mereka ketjewa. Meninggalnja Stalin telah menimbulkan kesadaran baru jang dalam dikalangan kaum

Tulisan ini adalah pesan tahun baru kawan Aidit kepada Rakjat Indonesia mendjelang 1954. Dalam artikel ini ia menganalisa peristiwa² penting jang menundjukkan kemadjuan kekuatan demokratis selama tahun 1953 dan mengadjukan tugas² memperkuat Republik Indonesia ke-dalam maupun keluar ditahun berikutnja.

Berlainan dengan fitnahan kaum reaksi, uraian ini menjatakan sekali lagi kesetiaan kaum Komunis membela Republik Proklamasi 1945.

Komunis, dikalangan proletariat dan dikalangan Rakjat tertindas sedunia, untuk lebih memperkuat persatuannya, mempertinggi hasil pekerdjaan dan mempertinggi kewaspadaan.

Dibunuhnja suami-isteri Rosenberg (2) jang tidak pernah dibuktikan dan tidak mungkin dibuktikan kesalahannya hanjalah tambahan bukti belaka, betapa tidak mampunya dunia lama jang dipelopori imperialisme Amerika meladeni kemadjuan dunia baru, dunia demokrasi dan perdamaian, dengan tjara² jang normal, jang masuk akal. Dengan terbentuknja pemerintah Ali Sastroamidjojo pada achir Djuli jl., Rakjat Indonesia mendapat peladjaran jang sangat penting, bahwa pertentangan jang tadjam antara golongan² jang berkuasa serta desakan puluhan dan ratusan ribu massa Rakjat melalui rapat² dan demonstrasi², dapat mentjiptakan suatu pemerintah jang agak lain daripada pemerintah tipe Hatta, Natsir atau Sukiman.

Pemerintah Ali Sastroamidjojo Menimbulkan Harapan Dan Kepertjajaan Rakjat

Dibawah pemerintah Ali Sastroamidjojo, jang sampai batas² tertentu mendapat sokongan Rakjat, telah diadakan tindakan² jang sejalan dengan keinginan Rakjat, misalnja: penjelesaian soal tanah Tandjung Morawa, serangan² jang bersifat menghantjurkan terhadap bandit² DI-TII dan gerombolan² teror lainnya, pembukaan kedutaan di Moskow, ketegasan terhadap soal Irian Barat dan terhadap Uni Indonesia-Belanda, persetudjuan dagang Indonesia-Tiongkok, beberapa tindakan pembersihan terhadap elemen² korup dan anti-Rakjat didalam beberapa kementerian dan djawatan, mutasi-mutasi jang bersifat madju dikalangan Angkatan Perang (3), berachirnja Misi Militer Belanda (sajang belum angkak kaki semuanja), dan beberapa tindakan lainnya.

Untuk satu pemerintah seperti pemerintah Ali Sastroamidjojo, dan jang baru bekerdja selama 6 bulan, tindakan² jang sudah diambil olehnja adalah menggembirakan dan memberi harapan bahwa ditahun datang pemerintah ini akan bertindak lebih madju, lebih tegas dan lebih banjak lagi.

Tindakan² pemerintah selama 6 bulan jang lalu telah mem-

perkuat kedudukan Republik Indonesia kedalam maupun keluar. Republik mendjadi kuat kedalam, karena kepertjajaan Rakjat mulai timbul kembali kepada pemerintah, karena Rakjat merasakan dan melihat tanda² bahwa pemerintah sekarang lain daripada pemerintah model Hatta, Natsir atau Sukiman. Rakjat melihat kemungkinan², bahwa dibawah pemerintah ini akan dapat diperjuangkan peluasan hak² demokrasi bagi gerakan Rakjat. Republik mendjadi kuat keluar karena dari pihak pemerintah sekarang ada usaha untuk menundjukkan kedaulatan Republik kepada negeri² lain, tidak seperti zaman pemerintah Hatta, Natsir atau Sukiman, dimana Republik se-mata² didjadikan embel² politik luarnegeri Belanda dan Amerika.

Dengan pernyataan² diatas samasekali tidak berarti bahwa kita sudah sangat puas dengan politik dan tindakan pemerintah sekarang. Kita yakin dan kita melihat kemungkinan², bahwa pemerintah Ali Sastroamidjojo mempunyai sjarat² untuk bertindak jang lebih banjak dan lebih tegas guna kepentingan Rakjat banjak.

Jang sangat kita kuatirkan ialah sikap ragu pemerintah dalam melaksanakan hubungan dagang luarnegeri jang normal dan menguntungkan Indonesia dengan negeri² diluar negeri² imperialis dan dalam membela kepentingan² Rakjat banjak terhadap penghisapan kapital monopoli asing dan terhadap penghisapan tuantanah. Sikap ragu pemerintah pasti menimbulkan keraguan pula pada Rakjat untuk sepenuhnya memberikan sokongannya kepada tindakan² pemerintah. Selain daripada itu, sikap ragu dari pemerintah tidak bisa berarti lain ketjuali memberi kesempatan kepada golongan oposisi jang berkomplot dengan gerombolan² bandit untuk mempermainkan pemerintah dan pendjabat² tinggi dari pemerintah.

Tugas² Untuk Tahun Depan

Berdasarkan kenyataan² diatas, maka pada tempatnjalah djika untuk tahun datang pemerintah dan Rakjat menugaskan kepada dirinya untuk mengambil tindakan² jang lebih tegas guna penghantjuran gerombolan² bandit DI-TII dan gerombolan² teroris lainnya, untuk mengachiri gerombolan militeris-fasis 17 Oktober dalam Angkatan Perang, untuk peluasan hak² demokrasi bagi

gerakan Rakjat, untuk penjelesaian undang² perburuhan dan agraria yang menguntungkan kaum buruh dan kaum tani, untuk melemparkan „penasehat²“ dan „ahli²“ Belanda serta elemen² korup dan anti-Rakjat dari semua kementerian dan djawatan, untuk mengeratkan hubungan anggota Angkatan Perang dengan Rakjat, untuk mengachiri kekuasaan kapital monopoli asing di-tempat² yang vital, seperti pelabuhan, untuk melaksanakan pemilihan umum yang se-demokratis mungkin, untuk mendemokrasikan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, untuk lebih aktif ambil bagian dan dimana perlu mengambil inisiatif didalam dan diluar PBB untuk memelihara perdamaian di Asia dan didunia, untuk meluaskan dan mengkongkritkan hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi atas dasar persamaan sepenuhnya dan saling menguntungkan.

Pemerintah Ali Sastroamidjojo akan terus mendapat sokongan dari Rakjat, asal pemerintah ini bersedia memberikan konsesi² kepada gerakan Rakjat. Pemberian konsesi kepada gerakan Rakjat bukanlah sesuatu yang akan merugikan pemerintah, tetapi sebaliknya, ia akan menjadi sumber kekuatan bagi pemerintah sendiri dan bagi Republik Indonesia. Konsesi² pemerintah kepada Rakjat dan sokongan Rakjat kepada pemerintah, inilah sjarat untuk memperkuat kedudukan Republik. Dengan ini, badai yang ditabur oleh oposisi dan gerombolan² bandit tidak akan menggontjangkan kedudukan pemerintah.

Sifat kritis yang dimiliki oleh Rakjat Indonesia sekarang, yang dimiliki berkat didikan puluhan tahun perdjjuangan kemerdekaan dan berkat didikan revolusi Rakjat tahun 1945-48, menjebakkan Rakjat mudah mengerti tiap tindakan yang madju dari pemerintah dan dengan gairah menjambut dan menjokong tindakan² itu. Tetapi sebaliknya, satu kali sadja pemerintah bertindak anti-Rakjat, maka selandjutnja Rakjat akan bersikap tjuriga terhadap semua tindakan pemerintah. Disinilah pentingnja bagi pemerintah Ali Sastroamidjojo untuk ber-hati² agar tidak bertindak yang merugikan Rakjat dan supaja mengawasi aparat² negara dari atas sampai kebawah agar djuga tidak bertindak demikian.

Rakjat Indonesia Pasti Akan Mentjapai Tudjuan

Dalam memasuki tahun datang kita berkejakinan, bahwa dasar² yang sudah diletakkan dalam tahun yang lalu membuka kemungkinan² yang tidak terbatas bagi perkembangan yang lebih madju. Tinggal sekarang bagi Rakjat Indonesia, dan terutama bagi pemimpin²nja yang berkemauan baik dan berperasaan nasional, untuk memakai kesempatan ini se-baik²nja guna memperluas dan memperkuat front persatuan nasional sebagai sjarat mutlak untuk tertjapainja kemerdekaan nasional yang penuh dan untuk perubahan² demokratis di Indonesia.

Rakjat Indonesia yang sudah digembleng selama puluhan tahun perdjjuangan kemerdekaan dan selama revolusi Rakjat tahun 1945-48, Rakjat Indonesia yang radjin, yang militan, heroik, berani dan mempunyai kewaspadaan tinggi, pasti akan dapat menunaikan tugas²nja ini. Rakjat sematjam ini sudah tidak pada tempatnja lagi diperintah oleh kekuasaan se-wenang² dari Masjumi-PSI, apalagi oleh Negara Islam Kartosuwirjo dengan bandit² DI-TII.

Demikianlah dengan singkat tugas² yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia ditahun datang.

PKI TIDAK AKAN HENTI²NJA MENJEBARKAN TJITA² PERSATUAN NASIONAL

Dari tgl. 16 hingga 20 Maret 1954 di Djakarta dilangsungkan Kongres Nasional ke-V PKI. Kongres ini adalah Kongres Partai jang pertama setelah Koreksi Besar Musso pada bulan Agustus 1948 dan setelah Partai berhasil mengatasi berbagai serangan berat dari reaksi. Ia telah menjawab masalah² penting dan pokok dari revolusi Indonesia, mensahkan Program dan Konstitusi Partai, meletakkan dasar² bagi penggalangan front persatuan nasional dan pembangunan Partai. Kongres Nasional ke-V PKI djuga dengan suara bulat menjetudjuai resolusi jang menghukum Tan Ling Djie-isme, perwujudan terpusat dari oportunisme kanan dan „kiri“ dalam Partai pada waktu itu. Dengan demikian Kongres ini telah mendjelmakan persatuan dan kebulatan Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi sebagaimana belum pernah terdapat dalam sedjarah Partai kita. Kongres Nasional ke-V PKI telah sangat mempertjepat perkembangan PKI dan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia umumnja.

Tulisan *PKI Tidak Akan Henti²nja Menjebarkan Tjita² Persatuan Nasional* ialah pidato kawan Aidit dalam malam resepsi Kongres Nasional ke-V PKI tersebut pada tgl. 15 Maret 1954. Ia mendjelaskan bagaimana PKI dalam mempersiapkan Kongres telah berusaha mengumpulkan pendapat² dan saran² dari golongan² Rakjat jang se-luas²nja, supaya Program PKI dapat sungguh² mendjadi program perdjuaan seluruh Rakjat Indonesia dan mentjapai tudjuan Kongres, jaitu kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian.

Per-tama² izinkanlah saja atas nama Central Komite Partai Komunis Indonesia mengutjapkan selamat datang dan banjak terimakasih kepada saudara² jang sudah memerlukan mengundjungi malam resepsi Kongres Nasional ke-V PKI ini.

Dari sini djuga saja sampaikan terimakasih PKI kepada Partai², organisasi² buruh, tani, pemuda, wanita, sosial, kebudayaan, dan kepada perseorangan² jang sudah menjampaikan sambutanja setjara tertulis kepada Kongres Nasional ke-V PKI ini. Kami minta maaf, karena sambutan jang berharga itu tidak bisa kami batjakan semua dalam resepsi ini mengingat terbatasja waktu.

Sebagaimana sudah dibatjakan tadi, Partai² Komunis luarnegeri menjampaikan pesan² dan sambutan² jang hangat kepada Kongres Nasional ke-V PKI. Mereka mengharapkan agar Kongres mendapat sukses besar, agar Kongres mendorong PKI lebih maju dalam pekerdjaan mengkonsolidasi kekuatan Rakjat Indonesia menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian.

Disamping itu, sebagaimana saudara² lihat dalam malam resepsi ini, Partai Komunis Australia, jaitu Partai Komunis dari salahsatu negeri tetangga kita jang terdekat, mengirimkan utusan persaudaraanja untuk menghadiri Kongres PKI.

Saja kira sangat pada tempatnja, djika saja, atas nama Central Komite dan atas nama seluruh anggota PKI, menjampaikan utjapan terimakasih jang se-dalam²nja atas solidaritet Partai² Komunis luarnegeri jang telah memberikan pesan²nja kepada Kongres PKI, dan kepada Partai Komunis Australia jang sudah mengirimkan utusanja.

Sebagaimana sudah diketahui, Kongres Nasional ke-V PKI sebetulnja mau dilangsungkan dalam bulan Oktober 1948 di Djok-

jakarta. Tetapi ini tidak terdjadi, karena didahului oleh tragedi nasional, Peristiwa Madiun, dan jang kemudian disusul oleh agresi kolonial Belanda kedua.

Sesudah Peristiwa Madiun dan agresi kolonial Belanda kedua, PKI tidak mungkin segera melangsungkan Kongres Nasionalnja jang ke-V. PKI lebih dulu harus menghimpun segenap kekuatannya kembali, mengkonsolidasi diri dan mendorong maju perkembangan politik dalam negeri, agar dengan demikian tertjipta sjarat² jang memungkinkan berlangsungnya Kongres PKI. Sekarang, sesudah lewat lima tahun, sjarat² itu sudah ada dan karena itulah PKI melangsungkan kongresnja sekarang.

Sambutan Pada Rentjana Program PKI

Lima bulan sebelum Kongres Nasional ke-V PKI dilangsungkan, bahan² pokok jang akan dibicarakan didalam Kongres, terutama rentjana Program PKI, sudah disiarkan dengan luas dalam bahasa Indonesia maupun dalam beberapa bahasa daerah.

Rentjana Program PKI tidak hanya didiskusikan oleh anggota² PKI, tetapi djuga dimintakan pendapat, kritik dan usul-usul dari orang² diluar PKI. Dalam rangkaian menerangkan rentjana Program PKI kepada orang² diluar PKI, sudah diselenggarakan lebihkurang 1500 rapat umum besar dan ketjil, dan jang seluruhnja dikundjungi oleh lebih dari dua djuta orang.

PKI meminta pendapat golongan² dan orang² diluar PKI tentang rentjana Programnja, se-mata² dengan pertimbangan untuk membikin lebih lantjar kerdjasama antara PKI dengan partai² dan golongan² demokratis lainnja. PKI mempunyai pengalaman, bahwa kerdjasama sering tidak lantjar karena saling tidak mengetahui program masing², atau ada kalanja kerdjasama diadakan dengan tidak terang apa program kerdjasama itu. PKI berusaha untuk mengurangi, dan se-dapat²nja menghilangkan pertentangan² jang timbul karena salahfaham. Djika ada pertentangan antara PKI dengan partai² atau golongan² lain, hendaknja pertentangan itu memang berdasarkan prinsip, berdasarkan politik dan program. Djadi, djangan sampai ada pertentangan jang timbul hanya karena disebabkan oleh purbasangka jang sangat tidak baik itu.

Kenjataan menundjukkan, bahwa rentjana Program PKI mendapat sambutan jang hangat dari berbagai golongan dan perse-orangan. Beratus-ratus pernjataan, dengan tertulis maupun dengan lisan, disampaikan kepada PKI.

Jang sangat menarik perhatian jalah, bahwa rentjana Program PKI mendapat sambutan jang baik dari kaum nasionalis jang patriotik dan dari golongan² agama jang progresif. Pada pokoknja, mereka mengatakan bahwa dengan rentjana Program PKI diletakkan dasar² untuk kerdjasama jang sehat antara kaum nasionalis, kaum agama dan Komunis. Rentjana Program PKI melenjapkan ke-ragu²an terhadap PKI. Rentjana Program PKI membukakan djalan baru, djalan jang terang, untuk perkembangan persatuan nasional dinegeri kita dan untuk stabilitet pemerintah Ali Sastroamidjojo, jang programnja mengandung unsur² demokratis⁽¹⁾ dan jang mendapat sokongan partai-partai dan golongan² demokratis. Memang, didalam rentjana Program PKI dinjatakan dengan djelas, bahwa PKI bersedia meneruskan sokongannja kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo dan memberikan semua bantuan kepadanya apabila pemerintah ini suka menjalankan program jang demokratis.

Oleh beberapa pemimpin Masjumi dan PSI rentjana Program PKI „sangat disesalkan”, karena program ini menurut mereka adalah terlalu kongkrit dan terlalu masuk akal, sehingga mudah difahamkan oleh Rakjat dan dengan demikian bisa menarik Rakjat. Ini bisa dimengerti, karena dalam menjusun rentjana Program, Central Komite PKI berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mentjantumkan perkataan atau kalimat jang berbau demagogi. Central Komite PKI berpegang pada prinsip, bahwa tidak ada gunanja program djika tidak bisa dilaksanakan.

Diantara pemimpin² soska⁽²⁾ ada jang berkata: „Rentjana Program PKI adalah baik, tetapi apakah PKI bisa melaksanakannja?” Mengenai ini perlu didjawab, bahwa PKI tidak membikin Program hanya untuk dilaksanakan oleh PKI sendiri. Dan saja kira, tidak ada program satu partaipun dinegeri kita maupun diluar negeri, jang maksudnja untuk dilaksanakan hanya oleh partai itu sendiri, hanya oleh anggota² partai itu sendiri. Program PKI, ja,

tiap² politik PKI, hanya mungkin direalisasi jika ia didukung oleh massa Rakyat yang luas dan terorganisasi.

Tetapi, disini juga harus diingatkan, bahwa tidak semua anggota Masjumi atau PSI yang „menjesali” rentjana Program PKI. Sesudah membuat rentjana Program PKI dan sesudah mendengar penjelasan²nja didalam rapat² yang diadakan oleh PKI, tidak sedikit petani anggota Masjumi dan buruh atau pegawai anggota PSI yang datang kepada orang² Komunis dan mengatakan, bahwa „tidak semua anggota Masjumi adalah komprador dan tuantanah”, bahwa „tidak semua anggota PSI adalah anti-Komunis dan anti-nasional”, bahwa mereka, petani Islam dan buruh atau pegawai sosialis, tidak mengerti serta tidak menyetujui politik anti-Komunis dan anti-nasional yang dijalankan oleh pemimpin² mereka, dan bahwa apa yang ditentumkan didalam rentjana Program PKI adalah juga menjadi tuntutan mereka.

Semua ini perlu saja kemukakan dalam pertemuan ini, karena semuanya ini lebih meyakinkan kita, bahwa kesadaran politik Rakyat kita telah membukakan kemungkinan yang tidak terbatas bagi perkembangan persatuan nasional ditanahair kita. Ini adalah sangat penting, karena ini adalah jaminan untuk berlangsungnya pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang programnya mengandung unsur² demokratis, karena ini adalah jaminan untuk kemerdekaan nasional kita yang penuh.

Sekarang tergantung kepada putera² Indonesia yang terbaik, sampai kemana kesempatan memperkembangkan persatuan nasional ini dapat digunakan sepenuhnya. Sekarang tergantung kepada kita, sampai kemana tradisi persatuan bangsa mau dipertahankan terhadap tiap² usaha siapapun, usaha dari dalam maupun dari luarnegeri, yang mau memetjahbelah dan melemahkan persatuan nasional.

Kongres Untuk Kemerdekaan Nasional, Demokrasi Dan Perdamaian

Kongres Nasional ke-V PKI dinamakan Kongres untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian. Kenapa Kongres ini dinamakan demikian ?

Kita namakan Kongres ini kongres untuk kemerdekaan nasional, karena sudah menjadi kenyataan kita semua, putera² Indonesia lelaki dan wanita, bahwa kemerdekaan yang kita miliki sekarang bukanlah kemerdekaan yang penuh atau kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sekarang bukanlah kemerdekaan sebagaimana yang di-tjita²kan oleh Revolusi Nasional kita, Revolusi Agustus 1945. Persetujuan KMB yang ditandatangani oleh Hatta-Roem-Sultan Hamid dengan kaum imperialis Belanda bukanlah persetujuan yang memerdekakan kita dari belenggu imperialisme Belanda.

Sebaliknya, persetujuan KMB telah melegalisasi dan menjamin kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, kekuasaan yang oleh Revolusi Agustus sudah diingatkan tidak sah dan tidak diakui lagi.

Dengan persetujuan KMB yang chianat itu sudah dikembalikan kepada Belanda atau „pemilik²” asing lainnya sumber ekonomi kita seperti perkebunan, pabrik, tambang, pengangkutan, sentralistik, bank, dll. Menurut persetujuan KMB, Indonesia tidak bisa melakukan satu tindakanpun dilapangan hubungan keuangan atau perdagangan dan politik luarnegeri pada umumnya, jika tidak berunding lebih dulu dengan Belanda. Indonesia terikat oleh apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda yang berada dibawah Ratu Belanda. Pegawai kolonial Belanda, sivil maupun militer, tetap di Indonesia dan bekerja sebagai „penasehat” atau „pegawai ahli” dengan gaji dan jaminan yang jauh lebih baik daripada pegawai² bangsa Indonesia.

Karena Indonesia belum merdeka penuh, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan sejati, maka Kongres Nasional ke-V PKI berkewajiban mencari jalan untuk mengatasi keadaan yang pintang ini. Kongres Nasional ke-V PKI akan berusaha memetjahkan semua masalah pokok dan penting revolusi Indonesia, semua masalah pokok dan penting untuk kemerdekaan nasional Rakyat Indonesia.

Kita namakan Kongres ini Kongres untuk demokrasi, karena soal demokrasi bagi gerakan kemerdekaan nasional kita adalah seperti nasi bagi kehidupan bangsa kita. Kita yakin, bahwa demokrasi yang sejati hanya mungkin jika Indonesia sudah merdeka penuh. Tetapi kita yakin pula, bahwa untuk meluaskan gerakan

kemerdekaan nasional, kebebasan demokratis adalah sangat kita butuhkan.

Dibanding dengan ketika masih pemerintah Hatta, Natsir dan Sukiman, selama pemerintah Ali Sastroamidjojo kebebasan demokratis sedikit terjamin. Adanja sedikit kebebasan demokratis ini telah membawa gerakan Rakjat sedikit lebih maju.

Kemadjuan gerakan Rakjat Indonesia di-waktu² belakangan ini telah membikin sulit kedudukan kaum imperialis dan kakitangan-nja di Indonesia. Kedudukan terdjepit dari partai² jang mendjadi tulangpunggung imperialis di Indonesia, jaitu Masjumi dan PSI, telah membikin pemimpin² partai² ini mendjadi matagelap dan setjara nekat melakukan semua daja-upaja untuk memfasiskan sistim pemerintahan. Berbagai intimidasi, provokasi dan sampai kepada pertjobaan kudeta sudah mereka lakukan. Dengan tudjuan jang sama, jaitu untuk memfasiskan sistim pemerintahan, kaum imperialis dan kakitangannya mengadakan aktivitet teror dengan gerombolan² bandit DI, TII, Pusa (Masjumi)⁽³⁾, dsb. Tetapi ternyata, bahwa semua usaha memfasiskan sistim pemerintahan menemui kegagalan. Mereka terbentur pada kekuatan demokratis, terbentur pada persatuan nasional Rakjat Indonesia.

Oleh karena itu adalah djuga mendjadi kewadajiban Kongres Nasional PKI untuk setjara mendalam mendiskusikan masalah mendjundjung tinggi pandji² demokrasi dan masalah menghantjurkan tiap² usaha jang mau memfasiskan sistim pemerintahan. Kebebasan demokratis adalah penting untuk mengembangkan gerakan kemerdekaan nasional Rakjat Indonesia dan untuk hidup langsungnja pemerintah Ali Sastroamidjojo jang programnja mengandung unsur² demokratis.

Kongres ini kita namakan kongres untuk perdamaian, karena masalah jang paling vital bagi umatmanusia sedunia sekarang, djadi djuga bagi lelaki dan wanita Indonesia, jalah masalah membela perdamaian. Oleh karena itulah, tidak mungkin PKI tidak mempersoalkan masalah membela perdamaian didalam Kongresnja. Apalagi djika kita mengingat, betapa besarnya bentjana jang bisa menimpa Asia dan Pasifik, djadi djuga menimpa Indonesia, berhubung dengan tjampurtangan Amerika dilapangan militer di

Djepang, Pakistan, Vietnam, dll. disamping soal Korea jang masih belum mendapat penjelesaian jang adil dan pasti.

Kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian adalah tudjuan tiap² putera Indonesia, oleh karena itu soal² ini akan mendapat tempat jang istimewa didalam Kongres Nasional ke-V PKI.

Penyebaran Tjita² Persatuan Nasional Adalah Faktor Jang Menentukan

Saja kira djuga pada tempatnja djika pada malam resepsi ini dan dalam menghadapi Kongres Nasional ke-V PKI, saja menjatakan kesungguhan PKI dalam menggalang persatuan nasional. PKI berkejakinan, bahwa faktor jang menentukan bagi bangsa kita pada saat sekarang jalah faktor penyebaran tjita² persatuan nasional dikalangan massa.

Banyak soal penting lainnja, tetapi pada saat sekarang tidak ada faktor jang lebih menentukan bagi bangsa kita daripada faktor menjebarkan tjita² persatuan nasional.

Sudah sedjak puluhan tahun jang lalu pemimpin² bangsa kita menjebarkan tjita² persatuan nasional, tetapi penyebaran tjita² ini sekarang tidak kalah pentingnja daripada puluhan tahun jang lalu. Oleh karena itulah, PKI tidak akan henti²nja menjebarkan tjita² persatuan Rakjat dan persatuan bangsa dikalangan massa jang luas.

PKI bisa mengerti sepenuhnya, bahwa pada saat sekarang masih banyak lelaki dan wanita Indonesia jang belum dapat menerima beberapa bagian dari program PKI, walaupun kaum Komunis memandang program PKI sekarang adalah program jang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tanahair kita sekarang ini. Tetapi walaupun demikian, banyak bukti jang menundjukkan, bahwa sebagian besar lelaki dan wanita Indonesia sekarang dapat menjetujui beberapa bagian dari program PKI, dan berdasarkan bagian² dari program ini, jaitu bagian² jang sesuai dengan program partai² dan golongan² demokratis lainnja, dapat dibentuk front persatuan nasional jang kuat dan kuasa, jang akan menetapkan dan memperdjuaangkan terlaksananya tudjuan² politik dan ekonomi sesuai dengan tuntutan² pada saat sekarang.

Front persatuan nasional jang dimaksudkan oleh PKI jalah

front yang mempersatukan lelaki dan wanita Indonesia dari semua kejakinan politik, semua kepertajaan agama dan kedudukan sosial, dan sudah tentu atas dasar keinginan bersama untuk mengatasi krisis ekonomi yang terus-menerus menjengkeram Indonesia, untuk menjegah diseretnya Indonesia kedalam pakat agresif oleh imperialisme Amerika, untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, untuk melawan dipersendjaintanya kembali Djepang, untuk mengguling komplotan kolonialis Belanda anti-Republik, untuk mendjundjung tinggi pandji² demokrasi dan untuk memperdjuaangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi Indonesia. Front persatuan berarti perdjuaangan dan organisasi dari perdjuaangan untuk tudjuan² yang kongkrit dibawah pandji² yang sesuai dengan kepentingan Rakjat pekerdja dan kepentingan seluruh bangsa.

Rakjat Indonesia sudah merasakan dan mengalami sendiri betapa besarnya arti persatuan nasional. Dengan persatuan nasional Rakjat Indonesia telah dapat memberikan kekuatan raksasa kepada proklamasi kemerdekaan bulan Agustus 1945, dengan persatuan nasional Rakjat Indonesia telah dapat memberikan perlawanan yang perwira terhadap agresi kolonial Belanda yang pertama dan kedua, telah dapat menggagalkan Razzia Agustus Sukiman, telah dapat menggagalkan ikatan MSA, telah dapat menggagalkan pertjobaan kudeta 17 Oktober 1952, telah dapat mendorong berdirinya pemerintah Ali Sastroamidjojo, telah dapat memberikan kekuatan kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo terhadap serangan² Masjumi-PSI yang mendapat inspirasi dan bantuan sepenuhnya dari imperialisme asing, dan djuga dengan persatuan nasional Rakjat Indonesia sedang berdjuaang untuk menghantjurkan gerombolan² DI, TII dan Pusa (Masjumi).

Pengalamannya sendiri telah mengadjar Rakjat Indonesia, bahwa persatuan nasional mempunyai kekuatan yang luarbiasa, dan oleh karena itu pulalah Rakjat Indonesia mendjadi yakin, bahwa perubahan yang komplit dilapangan politik pemerintahan yang sangat mereka inginkan, hanya bisa dengan djalan persatuan nasional dan dengan djalan perdjuaangan sebagai hasil daripada persatuan ini.

Dalam Laporan Umum yang akan disampaikan dalam Kongres

Nasional ke-V PKI antara lain dikatakan, bahwa :

„Front persatuan nasional adalah front yang paling demokratis dalam komposisinya maupun dalam tjara bekerdjanya. Front persatuan nasional mengikat bagian yang sangat terbesar dari Rakjat. Semua orang lelaki dan wanita Indonesia yang tidak menjukai pendjadjahan negeri asing atas Indonesia harus bersatu didalam atau berdiri dibelakang front ini. Hanya djika sudah dapat mempersatukan sebagian terbesar dari Rakjat Indonesia, kita bisa berkata tentang front persatuan nasional yang benar², yang luas dan yang kuat. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin berbi tjara tentang front persatuan nasional yang benar², yang luas dan kuat, sebelum kaum tani dapat ditarik kedalam front ini, karena kaum tani dinegeri kita merupakan kira² 70% dari penduduk. Dengan tidak ikutnya kaum tani berarti tidak ikutnya bagian yang terbesar dari Rakjat Indonesia, dan ini merupakan kelemahan yang sangat besar dari front persatuan nasional kita.”

Djika kita mau mengetahui dimana letak kelemahan front nasional kita dari dulu sampai sekarang, jalah dalam hal belum dibangunkannya dan belum ditariknya kaum tani kedalam front ini. Oleh karena itulah, disamping menggalang kerdjasama dengan partai² dan organisasi² demokratis, disamping membikin blok² didalam dan diluar parlemen, kewadjiban yang per-tama² dari PKI sekarang jalah menarik kaum tani kedalam front nasional. Inilah djaminan untuk tertjiptanya front nasional yang luas, yang kuat dan yang tak terkalahkan.

Demikianlah dengan singkat, apa sebab²nya PKI tidak henti²nya mempropagandakan tjita² persatuan nasional. Dalam pekerdjannya ini PKI mendapat banjak rintangan, fitnahan dan tuduhan. Tetapi PKI yakin, bahwa hanya dengan persatuan nasional yang luas dan kuat Rakjat Indonesia dapat membebaskan diri dan dapat membangun diri mendjadi Rakjat dan bangsa yang terhormat.

Ada orang yang berkata: „Andjuran persatuan nasional dari PKI adalah baik, tetapi PKI tidak konsekwen, karena PKI menjjering orang² seperti Sutan Sjahrir, Natsir, Sukiman dsb. Bukankah

serangan PKI membikin orang² ini menentang persatuan nasional?

Per-tama² perlu dijelaskan, bahwa PKI tidak mempunyai kepentingan perseorangan dalam menjerang orang² ini. PKI tidak akan menentang orang² ini jika seandainya tuan² Sjahrir, Natsir, Sukiman dll. tidak memegang rol penting dalam dunia politik di Indonesia. Jang dijadikan sasaran oleh PKI ini bukanlah Sjahrir biasa, Natsir biasa atau Sukiman biasa, jang mungkin kalau ditjari bisa diketemukan di-kampung² dan desa² negeri kita. Tidak, mereka bukan orang biasa! Mereka adalah wakil politik dari musuh² Rakjat Indonesia, wakil politik dari imperialisme Belanda, Amerika dan Inggris.

Apakah salahnja menjerang wakil² politik dari musuh² Rakjat Indonesia? Apakah dalam front persatuan nasional harus masuk djuga musuh² Rakjat Indonesia? Lagi pula, kapankah orang² seperti Sjahrir, Natsir, Sukiman dll. itu menginginkan persatuan nasional? Tidakkah kita ingat, bahwa dalam sedjarah gerakan kemerdekaan bangsa kita orang² ini adalah pemetjah persatuan nasional? Kita harus menempatkan orang² ini pada tempatnja, didasarkan atas perbuatan mereka sendiri, jaitu tempat diluar persatuan nasional Rakjat kita.

Djadi, djustru untuk persatuan nasional, kita harus kupas habis²an praktek memetjah dan perbuatan² jang tidak nasional dari siapapun. Djika tidak demikian, persatuan nasional akan menjadi slogan kosong belaka, karena kemasukan elemen² pemetjah dan kemasukan musuh² Rakjat. Persatuan nasional bukan persatuan antara domba dengan serigala, tetapi persatuan dari golongan² dan orang² jang berkemauan baik terhadap Rakjat dan tanahair.

Adalah kewadajiban PKI dan kewadajiban tiap² demokrat untuk menggagalkan semua usaha pemetjah persatuan. Adalah kewadajiban Komunis untuk mengkritik politik memetjah dari pemimpin² Masjumi-PSI, dan ber-sama² dengan itu dengan simpatik dan dengan penuh rasa persaudaraan menarik petani Islam dan buruh atau pegawai sosialis kedalam front persatuan.

Ada lagi orang jang berkata: „*Andjuran persatuan nasional dari PKI adalah baik, tetapi persatuan tidak mungkin tertjapai karena PKI agresif*”.

Per-tama² perlu diterangkan, bahwa PKI tidak pernah agresif, dalam arti menjerang lebih dulu atau menjerang orang jang sepatnja tidak diserang. PKI mengupas perbuatan tuan Natsir, karena tuan Natsir berbuat lebih dulu menjerang kaum buruh dengan peraturan larangan mogoknja. PKI mengupas perbuatan tuan Tedjasukmana habis²an karena tuan Tedjasukmana berbuat lebih dulu menjerang kaum buruh dengan Undang² Darurat No. 16. PKI mengupas perbuatan tuan Sukiman habis²an karena tuan Sukiman menjerang lebih dulu kaum demokrat dan patriot Indonesia dengan Razzia Agustusnja. PKI mengupas perbuatan tuan Sjafrudin Prawiranegara, karena tuan Sjafrudin menjerang Rakjat lebih dulu dengan gunting-uangnja (4). PKI mengupas habis²an perbuatan kaum soska, karena kaum soska dengan berbagai matjam djalan menjerang kehidupan Rakjat dilapangan ekonomi dan politik. PKI mengupas habis²an perbuatan tuan Mohammad Roem, karena tuan Roem dengan tidak kenal ampun menjerang kaum tani dengan traktor-mautnja.

Tepatkah PKI dinamakan agresif, karena PKI mengupas perbuatan orang² jang menjerang Rakjat dengan maksud agar Rakjat membela diri terhadap serangan² itu atau serangan² lain jang serupa itu? Apakah berbitjara tentang sesuatu jang benar berarti agresif?

Ada lagi orang berkata: „*Andjuran persatuan nasional dari PKI adalah baik, tetapi sajangnja persatuan nasional hanya digunakan oleh PKI untuk kepentingan PKI sendiri*”.

Per-tama² perlu diterangkan bahwa PKI tidak pernah dan tidak akan pernah mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan PKI adalah kepentingan nasion dan kepentingan Rakjat. PKI berkejakinan, bahwa tiap² pukulan terhadap PKI adalah djuga pukulan terhadap nasion dan Rakjat Indonesia. Sedjarah sudah membuktikan, bahwa tidak ada pukulan terhadap PKI jang hanya ditanggung oleh PKI sendiri, dan demikian pula tidak akan ada kemenangan PKI jang hanya untuk PKI sendiri.

Pukulan kolonialisme Belanda terhadap PKI pada tahun 1926-1927 pada hakekatnja adalah pukulan terhadap seluruh gerakan kebangsaan kita ketika itu. Demikian djuga pukulan terhadap

kaum Komunis dalam Peristiwa Madiun adalah pukulan terhadap seluruh gerakan kemerdekaan.

Peristiwa Madiun adalah kesempatan yang ditjiptakan oleh kaum imperialis dan oleh partai² tulang punggungnya, yaitu Masjumi dan PSI, untuk mengkonsolidasi diri guna memudahkan kompromi Indonesia dengan Belanda dan guna melemahkan gerakan kemerdekaan Rakjat. Ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa pemerintah Hatta membikin persetudjuan KMB dengan Belanda dan bahwa pemerintah Natsir dan Sukiman mengadakan bermatjam² peraturan untuk mengekang hak² demokrasi bagi Rakjat. Peristiwa Madiun seudjung rambutpun tidak menguntungkan kaum nasionalis dan kaum agama yang djudjur.

Demikian pula halnya dengan Razzia Agustus Sukiman. Walaupun PKI yang menjadi sasaran pertama, tetapi pada hakekatnya Razzia Agustus adalah serangan umum terhadap seluruh gerakan demokratis. Djuga demikian dengan pertjobaan kudeta bulan Oktober 1952. Djika pertjobaan ini berhasil, maka yang akan menjadi sasaran pertama ialah PKI, tetapi ini hanya permulaan untuk memasukkan pemimpin² partai demokratis lainnya kedalam pendjara. Razzia Agustus Sukiman maupun peristiwa 17 Oktober dibawah arsitektur kaum soska, tidak hanya mengantjam keselamatan kaum Komunis, tetapi djuga mengantjam seluruh gerakan demokratis di Indonesia, mengantjam seluruh kehidupan politik nasional Rakjat Indonesia.

Semua usaha Masjumi-PSI untuk memfasiskan sistim pemerintahan sampai sekarang dapat digagalkan berkat adanya persatuan nasional Rakjat Indonesia. Persatuan inilah yang telah ber-kali² menyelamatkan Indonesia dari bahaya fasisme. Dengan demikian menjadi djelaslah, bahwa samasekali tidak benar djika dikatakan, bahwa persatuan nasional hanya untuk kepentingan PKI sendiri. Malahan disini dapat dikatakan, bahwa tjita² persatuan nasional sudah ada bibit²nya sedjak sebelum PKI berdiri. Persatuan nasional dengan nama „Radicale Concentratie” sudah berdiri dalam bulan November 1918, djadi sebelum PKI didirikan.

Tentang kedjudjuran dan ke-sungguh²an PKI dalam melaksanakan front persatuan nasional dapat dilihat dalam politik PKI sehari², terutama dalam politik PKI menggalang persatuan di-

kalangan kaum buruh, kaum tani, pemuda, peladjar, wanita dsb., dimana PKI tidak henti²nja mengandjurkan persatuan tiap² golongan ini dengan tidak memandang perbedaan kejakinan politik dan agama. Kedjudjuran PKI djuga dapat dilihat dalam politik PKI menjokong pemerintah Ali Sastroamidjojo, selama pemerintah ini mau mendjalankan program² yang demokratis, walaupun didalam pemerintah ini tidak duduk satu orangpun anggota PKI. Djuga dalam pemilihan umum nanti, PKI akan dengan djudjur mendjalankan politik front persatuan. Dalam pemilihan umum nanti PKI tidak hanya mengandjurkan kepada Rakjat supaya bersatu menudju kotak pemilihan untuk memilih PKI, tetapi djuga supaya memilih partai² demokratis lainnya.

Demikian sedikit djawaban kepada orang² yang menjangka, bahwa PKI mau menggunakan front persatuan nasional untuk kepentingan PKI sendiri.

Disini tidak perlu saja ulangi dengan pandjang lebar tentang fitnahan² yang kedji, yang dulu sering dilemparkan kepada PKI, misalnja fitnahan, bahwa PKI mau merobohkan Republik, bahwa PKI a-nasional, bahwa PKI tukang sabot dan tukang teror, bahwa PKI agen negeri asing, dsb. Apakah maksud fitnahan² ini? Fitnahan² ini dilontarkan dengan maksud untuk merintang² terwujudnja persatuan nasional dikalangan Rakjat Indonesia, untuk merintang² kerdjasama antara partai² dan organisasi² demokratis dengan PKI. Tetapi, dengan gembira dapat saja kemukakan disini, bahwa semua fitnahan itu sekarang sudah tidak laku lagi. Politik PKI yang nasional dan demokratis sudah dengan sendirinja membantah semua fitnahan itu.

Malahan sekarang Rakjat sudah bertanja, siapakah sebenarnya yang mau merobohkan Republik, yang a-nasional, yang tukang sabot dan tukang teror, yang agen negeri asing, dsb.? Rakjat bertanja sambil melirik kepada pemimpin² Masjumi dan PSI, dan dalam hatinja berkata bahwa tuan² itulah yang tepat dinamakan tukang robohkan Republik, a-nasional, tukang sabot, tukang teror, agen negeri asing, dsb. Ja, sifat kritis Rakjat Indonesia sekarang sudah demikian rupa, sehingga sulit mentjari orang Indonesia yang berfikiran sehat yang mau dengan sukarela sekali lagi diperintah oleh Masjumi-PSI.

Demikianlah kejakinan PKI tentang front nasional, tentang perlunja dan tentang mungkin² ia dibentuk oleh kita bersama.

Dengan tidak banjak ramai² persatuan nasional sekarang tumbuh dengan suburnja. Persatuan nasional ini tumbuh didalam per²juangan kaum buruh dan kaum tani membela hak²nja dan didalam per²juangan seluruh Rakjat membela negerinja.

Dengan tidak pandang perbedaan kejakinan politik dan agama, kaum buruh Indonesia ber²juang untuk perbaikan nasibnja di-pabrik², di-tambang², di-pelabuhan², di-kebun², di-kantor², dsb.

Dengan tidak pandang perbedaan kejakinan politik dan agama, kaum tani Indonesia ber²juang untuk melawan sisa² penghisapan feodal, melawan tuantanah, lintahdarat dan tuankebun asing jang mau merampas tanah. Kaum tani kita ber²juang di-desa² di Djawa maupun di Sumatera, di Sulawesi maupun di Maluku, di Kalimantan maupun di Sunda Ketjil.

Dengan tidak pandang perbedaan kejakinan politik, agama dan kedudukan sosial, persatuan nasional kita tumbuh dalam per²juangan untuk menggagalkan serangan² gerombolan bandit DI, TII, Pusa, dsb., tumbuh dalam per²juangan untuk menghapuskan Uni Indonesia-Belanda, untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, untuk menggulung komplotan kolonialis Belanda anti-Republik dan untuk menggagalkan tjampur-tangan negeri asing dalam soal² intern negeri kita.

Persatuan nasional kita tumbuh didalam keadaan dimana per²juangan Rakjat diseluruh dunia mendapat kemenangan di-mana². Per²juangan untuk kemerdekaan nasional mendapat kemenangan jang gemilang di Korea, di Vietnam, di Malaja, di Birma, di India, dsb. Gerakan demokratis tumbuh disemua negeri kapitalis, di-negeri² djadjahan dan setengah-djadjahan. Tjita² perdamaian makin besar kekuasaannja didunia. Konferensi Berlin jang belum lama ini dilangsungkan dan konferensi Djenewa jang akan datang (5) adalah bukti jang se-njata²nja, bahwa kekuatan perdamaian sangat unggul, dan bahwa kekuatan perdamaian jang unggul dapat memaksa kaum imperialis datang kemedja perundingan.

Dalam keadaan seperti disebutkan diatas, dalam keadaan front persatuan nasional dinegeri kita tumbuh dengan suburnja, tumbuh dari kesedaran Rakjat kita sendiri dan mendapat dorongan jang

kuat dari perkembangan gerakan kemerdekaan nasional dan demokrasi diseluruh dunia, PKI melangsungkan Kongres Nasionalnja jang ke-V. PKI jakin, Kongresnja akan mendorong lebih madju perkembangan front persatuan nasional dinegeri kita.

Front persatuan nasional dinegeri kita mempunyai haridepan jang gemilang. Ini akan mendjadi kenjataan, karena kita tidak akan henti²nja menjebarkan tjita² persatuan nasional dikalangan Rakjat kita.

PKI akan bekerdja se-baik²nja untuk persatuan nasional Rakjat Indonesia, sesuai dengan pertanggungandjawab sedjarah jang diletakkan diatas pundaknja.

MADJU TERUS UNTUK SUKSES² JANG LEBIH BESAR!

Kawan², sudah lebih tudjuh tahun sedjak Kongres Nasional Partai kita jang ke-IV, jang dilangsungkan dalam bulan Djanuari tahun 1947 dikota Solo.

Kongres Nasional Partai jang ke-IV dilangsungkan di-tengah² revolusi Rakjat, jaitu di-tengah² puntjak perlawanan Rakjat Indonesia terhadap imperialisme Belanda. Pada waktu itu anggota² dan pentjinta² Partai kita, ber-sama² dengan seluruh Rakjat Indonesia jang gagahberani, mengambil bagian dalam peperangan kemerdekaan.

Ketika Kongres Nasional ke-IV dilangsungkan, keadaan objektif dinegeri kita adalah sangat baik. Bukankah tidak ada keadaan jang lebih baik daripada keadaan revolusi? Tetapi, pada waktu itu, kemampuan Partai kita masih sangat terbatas, kemampuan Partai kita tidak sesuai dengan tugas² jang banjak dan berat, jang memang sudah semestinja dihadapi oleh sesuatu Partai Komunis didalam revolusi.

Ketika Kongres Nasional ke-IV dilangsungkan, Partai kita baru sadja keluar dari keadaan bekerdja dibawahtanah jang berat selama 20 tahun. Pada waktu itu boleh dikatakan Partai tidak mempunyai kader² jang berpengalaman dan berteori. Kader² Partai meninggal dan rusak ditanah pembuangan, dibunuh atau mati karena sakit didalam pendjara kolonialisme Belanda dan fasisme Djepang. Djuga anggota² Central Komite Partai seperti kawan² Pamudji, Sukajat, Hadji Abdul Rachim, Hadji Abdul Azis dll. mendjadi korban keganasan fasisme Djepang. Untuk anggota² PKI jang perwira dan pahlawan² Rakjat jang gagahberani ini, marilah Kongres Nasional ke-V PKI ini menjatakan hormat jang se-tinggi²-nja.

Kawan², ketika Kongres Nasional ke-IV dilangsungkan, Partai kita masih sangat lemah dilapangan organisasi, politik dan ideologi.

Tulisan berikut adalah pidato pembukaan dalam Kongres Nasional ke-V PKI. Disini kawan Aidit menjimpulkan kedjadian² terpenting sedjak Kongres Nasional ke-IV, terutama mengenai kehidupan dan pertumbuhan Partai, jang telah memurgkinkan Partai melepaskan diri dari kesalahan² oportunist dan mempersiapkan sjarat² jang se-baik²nja bagi suksesnja Kongres Nasional ke-V.

Anggota Partai ketika itu belum beberapa ribu dan tidak terorganisasi baik, sedangkan diantara yang sedikit ini hanya beberapa puluh saja yang sudah atau mulai berkenalan dengan teori Marxisme-Leninisme setjara dangkal. Umumnya mereka belum terlatih setjara teratur dalam pekerdjaan revolusioner. Organisasi Partai ketika itu masih kusut dan baru tersebar di beberapa tempat di daerah Republik dipulau Djawa dan Sumatera. Diluar daerah Republik boleh dikatakan organisasi Partai tidak ada, demikian juga di daerah Republik diluar Djawa dan Sumatera. Kehidupan intern Partai, bekerdja setjara kolektif dan kritik-selfkritik masih asing samasekali bagi Partai ketika itu. Dilapangan politik dalam dan luarnegeri Partai mendjalankan politik yang reformis, yang menjebabkan politik Partai tidak populer dikalangan massa. Dengan melewati Partai Sosialis dan Sajap Kiri (1) kaum sosialis kanan berhasil memasukkan politiknja kedalam Partai kita! Ideologi non-proletar berkuasa didalam Partai. Kaum trotskis berhasil menjelundupkan agen²nja kedalam Partai untuk memetjah-belah Partai.

Dari Partai yang keadaan organisasi, politik dan ideologinja masih seperti yang saja terangkan diatas, sudah tentu tidak mungkin kita harapkan hasil² Kongres yang memberikan pemetjahan masalah² pokok revolusi Rakjat yang sedang berdjalan. Dan memang, hasil² ini tidak kita dapat dari Kongres Nasional ke-IV.

Kawan², banjak kedjadian yang dialami Partai dan Rakjat Indonesia sesudah Kongres Nasional ke-IV Partai. Diantara kedjadian² itu ialah agresi kolonial Belanda yang pertama, „Peristiwa Madiun“, agresi kolonial Belanda kedua, ditandatanganinja per-setudjuan KMB yang chianat, Razzia Agustus Sukiman, meletusnja dan menghebatnja pemberontakan gerombolan bandit DI-TII, pertjobaan perebutan kekuasaan pada 17 Oktober 1952 oleh kaum militeris-fasis yang dikendalikan oleh kaum sosialis kanan dan kaum trotskis, penuntutan² dan penangkapan² terhadap pemimpin² kaum buruh dan pemimpin² kaum tani sebagai akibat undang² kolonial yang masih berlaku. Rakjat Indonesia dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia dan partai² demokratis lainnja, telah mengadakan perlawanan yang sengit terhadap agresi², perbuatan² chianat dan kedjahatan² ini. Dalam melawan agresi kolonial Belanda yang pertama dan kedua, dan dalam melawan teror putih selama „Per-

istiwa Madiun“, tidak sedikit putera² Indonesia yang terbaik menjadi korban keganasan. Djuga kawan² Musso, Sardjono, Amir Sjarifuddin, Harjono, Suripno dan pemimpin² Partai kita lainnja telah meninggal, telah dibunuh oleh reaksi. Kepada mereka semuanya, kepada putera² Indonesia yang terbaik yang menjadi korban agresi kolonial Belanda maupun korban „Peristiwa Madiun“, Kongres Nasional ke-V PKI yang bersedjarah ini menjatakan penghargaan yang se-besar²nja dan penghormatan yang se-tinggi²nja.

Djuga kepada pemimpin² kaum buruh dan pemimpin² Rakjat yang sampai sekarang masih meringkuk didalam pendjara, Kongres Nasional ke-V PKI menjatakan penghargaannya.

Kawan², ada lagi kedjadian yang sangat penting yang tidak akan terlupakan. Kedjadian itu ialah yang menimpa diri pemimpin dan guru besar kita, Stalin yang kita tjintai. Dengan wafatnja Stalin pada tanggal 5 Maret tahun 1953, umatmanusia mengalami kehilangan yang berat. Kawan Njoto dengan saja mendapat kehormatan mewakili Partai kita pada saat² dukatjita yang sangat berat itu. Atas nama Partai kita, kawan Njoto dengan saja sudah berdjandji, bahwa kita, kaum Komunis Indonesia, akan tetap setia kepada ajaran² Stalin.

Marilah Kongres Nasional PKI yang bersedjarah ini menjatakan terimakasih kita atas pimpinan Stalin, menjatakan penghargaan dan hormat kita kepada Stalin.

Kawan², mengenai kehidupan dan pertumbuhan Partai kita sesudah Kongres Nasional Partai yang ke-IV banjak djuga kita mengalami kedjadian² penting. Diantara kedjadian² penting itu ialah: pertama, Konferensi Partai bulan Agustus 1948 yang mengambil resolusi menerima Koreksi Besar Musso „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia“; kedua, rapat Pleno Central Komite bulan Djanuari 1951 yang diadakan berhubung dengan penjelewengan kawan Tan Ling Djie dari prinsip² organisasi, politik dan ideologi Partai; ketiga, Konferensi Nasional Partai pada permulaan tahun 1952 yang terutama ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah Sukiman yang ultra-reaksioner; dan yang keempat ialah Sidang Pleno Central Komite dalam bulan Oktober 1953 yang telah dapat memetjahkan masalah² pokok revolusi Indonesia dan yang telah

mempersiapkan berlangsungnya Kongres Nasional Partai yang ke-V ini.

Kedjadian² diatas adalah tonggak² penting didalam sedjarah Partai kita. Tiap² kedjadian merupakan lompatan maju bagi Partai kita dalam menudju persatuan dan kebulatannya, dalam menudju Partai tipe Lenin. Adalah sangat penting bagi anggota Partai, terutama bagi anggota baru, untuk mempelajari putusan² yang diambil oleh Konferensi² dan Sidang² Pleno Central Komite diatas.

Konferensi Partai bulan Agustus 1948, dengan menerima resolusi „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia” atau biasa disebut „Djalan Baru” sadja, telah menundjukkan djalan keluar dari keadaan sulit yang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu. „Djalan Baru” djuga telah meletakkan dasar² untuk pembolsjewikan Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Dalam „Djalan Baru” antara lain dikatakan, bahwa kesalahan² prinsip dilapangan politik dan organisasi terutama disebabkan oleh lemahnya ideologi Partai dan kurangnya elemen proletar didalam pimpinan Partai. Dengan „Djalan Baru” sebagai langkah pertama PKI berdjuaug untuk mendjadi Partai yang memenuhi sjarat Partai Lenin.

Rapat Pleno Central Komite bulan Djanuari 1951 adalah rapat perdjuaugan yang sengit antara anggota² Central Komite sajak Leninis yang berpegang pada prinsip² organisasi, politik, dan ideologi yang dimuat dalam „Djalan Baru” disatu pihak, dan difihak lain anggota Central Komite Tan Ling Djie, yang dalam perkataannya mengakui kebenaran prinsip² politik, organisasi dan ideologi „Djalan Baru”, karena „formil sudah diterima oleh Konferensi Partai”, tetapi yang dalam perbuatannya, perbuatan terang atau sembunyi, menentang prinsip² „Djalan Baru”. Dengan ber-belit² kawan Tan Ling Djie mempertahankan politiknya yang reformis dan legalis mengenai Irian Barat, dan dengan ber-belit² djuga ia membela pentingnya meneruskan Partai Sosialis, yang katanja untuk „menampung” orang² pro Komunis tetapi „tidak berani masuk PKI”. Tetapi akhirnya, tjara kawan Tan Ling Djie yang ber-belit² ini telah membelit dirinya sendiri! Central Komite memutuskan mentjabut keterangan tertulis kawan Tan Ling Djie mengenai

Irian Barat. Central Komite djuga memutuskan pembubaran Partai Sosialis, sesuai dengan resolusi „Djalan Baru”. Dengan putusan Central Komite ini gagallah usaha kawan Tan Ling Djie untuk mengebiri PKI dan gagal usahanya membikin partai kelas tengah dengan berazaskan „Marxisme-Leninisme” dan memakai merek „Sosialis”. Central Komite memutuskan bahwa PKI-lah satu²nja Partai kelas buruh di Indonesia, dan Partai Sosialis, yang mengakui Marxisme-Leninisme sebagai dasarnya, harus dibubarkan. Kawan Tan Ling Djie telah gagal dalam menetjilkan rol PKI sebagai pelopor revolusi. Kekalahan kawan Tan Ling Djie menjejabkan ia ditinggalkan oleh golongan sentris didalam Central Komite. Kemenangan prinsip² organisasi, politik dan ideologi „Djalan Baru” telah menjejabkan perubahan Politburo Central Komite, dan dibawah pimpinan Politburo ini diteruskan perdjuaugan untuk satu Partai tipe Lenin.

Dalam Konferensi Nasional Partai yang dilangsungkan pada permulaan tahun 1952 telah diambil kesimpulan² penting untuk melawan penjakit² yang menondjol selama Razzia Agustus Sukiman, jaitu penjakit² sektarisme, kapitulasiisme dan avonturisme. Konferensi berkejakinan, bahwa perdjuaugan melawan semuanya ini merupakan sjarat yang tidak boleh tidak untuk menjatuhkan pemerintah Sukiman yang ultra-reaksioner, untuk menghantjurkan gerombolan DI-TII yang ketika itu sedang mengamuk dengan giatnya di Djawa Barat dan Djawa Tengah, untuk menggalang front persatuan nasional, untuk meluaskan keanggotaan dan meluaskan organisasi Partai diseluruh Indonesia. Putusan² Konferensi Nasional Partai, terutama putusan mengenai peluasan keanggotaan dan organisasi Partai serta putusan tentang mempergiat peladjaran teori, telah menimbulkan aktivitet yang sangat besar, yang belum pernah ada bandingannya sedjak Partai kita didirikan. Konferensi Nasional Partai ini sangat mempengaruhi perkembangan Partai selanjutnya, perkembangan dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Djuga perkembangan politik dalam negeri sangat dipengaruhi oleh Konferensi ini, terutama karena dalam Konferensi inilah, atas usul wakil² Djawa Tengah, Partai memetjahkan tjara² yang kongkrit untuk menghantjurkan gerombolan DI-TII (2).

Sidang Pleno Central Komite dalam bulan Oktober tahun

1953 adalah kejadian penting yang terakhir sebelum Kongres Nasional ke-V ini dilangsungkan. Sidang Pleno Central Komite ini telah berhasil memecahkan masalah² pokok revolusi Indonesia. Dalam Sidang Pleno Central Komite ini telah diambil putusan² penting mengenai kewajiban Partai dilapangan politik luarnegeri dan dalam negeri, tentang pembangunan Partai dan tentang sikap terhadap Tan Ling Djie-isme. Hasil² Sidang Pleno Central Komite telah memberikan dasar² untuk mentjapai persatuan dan kebulatan pimpinan sentral Partai, untuk mentjapai persatuan dan kebulatan seluruh Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Sidang Pleno Central Komite ini telah memberikan sendjata yang berupa program, taktik dan garis organisasi yang terang kepada anggota dan fungsionaris Partai.

Sekarang Partai kita melangsungkan Kongres Nasionalnya yang ke-V. Dalam Kongres ini akan kita bitjarakan setjara mendalam bahan² putusan² Sidang Pleno Central Komite yang terakhir. Djuga Kongres ini yang akan mensahkan Konstitusi Partai sebagai pengganti Anggaran Dasar yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-IV, demikian pula akan mensahkan Manifes Pemilihan Umum sebagai salahsatu persiapan Partai yang penting dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang.

Kongres ini dilangsungkan tidak dalam keadaan revolusi Rakjat seperti dalam tahun 1947. Tetapi walaupun demikian, keadaan internasional maupun keadaan dalam negeri sekarang menundjukkan adanya kemungkinan² yang boleh dikatakan tidak terbatas bagi perkembangan pekerdjaan Partai disegala lapangan. Dibanding dengan tahun 1947, yaitu tahun Kongres Nasional Partai yang ke-IV, kemampuan Partai sekarang sudah djauh lebih besar dalam memimpin keadaan kearah yang maju. Berdasarkan semua inilah saja berkejakinan, bahwa Kongres Nasional Partai yang kita langsung sekarang akan mentjapai hasil² yang kita harapkan, yang djuga diharapkan oleh Rakjat pekerdja dan semua orang progresif dinegeri kita.

Marilah Kongres Nasional ke-V PKI ini kita djadikan kongres yang memberi djawaban kepada kita tentang semua masalah penting dan pokok revolusi Indonesia.

Marilah Kongres Nasional ke-V PKI ini kita djadikan kongres

yang meletakkan dasar² untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional yang luas dan kuat, yang bersendikan persekutuan klas buruh dan kaum tani.

Marilah Kongres Nasional ke-V PKI ini kita djadikan kongres yang memberi djawaban kepada kita tentang semua masalah pokok pembangunan Partai.

Marilah Kongres Nasional ke-V PKI ini kita djadikan kongres yang akan lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa.

Hidup Kongres Nasional Partai Komunis Indonesia yang ke-V !

Madju terus untuk sukses² yang lebih besar !

DJALAN KE DEMOKRASI RAKJAT BAGI INDONESIA

Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia merupakan Laporan Umum CC PKI yang disampaikan oleh kawan Aidit kepada Kongres Nasional ke-V PKI dan disahkan oleh Kongres. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan laporan umum mengenai keadaan politik dan organisasi serta penjelasan mengenai pokok2 yang dimuat dalam Rentjana Program PKI. Ia berisi kesimpulan2 penting tentang pengalaman PKI dalam pekerjaan menggalang front persatuan nasional dan membangun Partai. Kesimpulan2 tersebut menjadi pegangan bagi kader2 Partai untuk melaksanakan tugas2 Partai di dua lapangan itu.

Per-tama² saja mengucapkan terimakasih kepada Partai kita, yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menjampaikan laporan umum ini kepada Kongres Nasional Partai ke-V, Kongres yang bersedjarah ini.

Banyak hal yang sudah terdjadi sedjak Kongres Nasional Partai yang ke-IV, yang dilangsungkan 7 tahun yang lalu di kota Solo. Tentang ini pokok²nja sudah saja laporkan dalam pidato pembukaan Kongres. Saya tidak perlu mengulanginja lagi.

Bahan² untuk Kongres Nasional ke-V sudah dimuat dengan lengkap dalam penerbitan resmi Partai, dalam *PKI-Buletin* nomer istimewa maupun dalam madjalah „*Bintang Merah*” beberapa bulan yang lalu. Bahan² ini djuga sudah dibrosurkan, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa² daerah. Kawan² mendapat waktu yang tjukup untuk mempelajariinja. Tidak itu sadja, seluruh Partai kita sudah membitjarakannja dan mendiskusikannja, dan djuga sudah diusahakan menjampaiakannja kepada Rakjat-banjak. Dengan demikian, kawan² datang kekongres ini tidak hanya membawa suara anggota dan tjalon-anggota Partai, tetapi djuga membawa fikiran dan kritik yang langsung datangnja dari Rakjat-banjak. Ini adalah penting, karena dengan begini kepertjajaan anggota, tjalon-anggota dan Rakjat-banjak kepada Partai kita menjadi lebih besar. Saya kira pada tempatnja djika saja, atas nama Kongres kita ini, menjatakan terimakasih Partai kepada semua golongan dan orang yang sudah menjatakan pendapat dan kritiknya terhadap material Kongres kita, terutama terhadap Rentjana Program Partai.

Dari sidang ini dapat kita bajangkan, betapa gembiranja anggota, tjalon-anggota, pentjinta² Partai dan semua orang progresif menjambut tiap² putusan yang nanti diambil oleh Kongres ini.

Central Comite menjampaikan bahan² kepada Kongres ini dengan kejakinan, bahwa bahan² yang dihidangkan itu akan membikin terang semua masalah yang pokok dan yang penting dari revolusi Indonesia dan semua masalah yang pokok dan yang penting mengenai pembangunan Partai kita. Dengan bahan² ini diharapkan Kongres akan dapat mempersendjaiti anggota² dan fungsionaris² Partai dengan pengertian yang tepat tentang Program, tentang taktik dan tentang garis organisasi Partai. Dengan ini berarti akan terbukalah djalan yang lebar bagi perkembangan gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia dan bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia.

Central Comite berpendapat bahwa *Rentjana Program* yang sekarang dihidangkan sebagai material yang terpenting kepada Kongres ini perlu diberi pendahuluan sebagai pendjelasan. Oleh karena itulah, laporan umum yang akan saja sampaikan ini mempunyai dua fungsi: *pertama*, sebagai laporan umum tentang keadaan politik dan organisasi, dan *kedua*, sebagai pendjelasan mengenai pokok² yang dimuat didalam *Rentjana Program PKI*. Dengan demikian, fungsi laporan umum, yang oleh Central Comite diberi nama *Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia*, mendjadi djelas. Mengenai bahan² Kongres yang lain akan diberi pendjelasan tersendiri.

I

SITUASI INTERNASIONAL

1. Situasi Internasional Sesudah Perang Dunia ke-II

Perang dunia ke-II berachir dengan kemenangan demokrasi atas fasisme. Keadaan internasional sesudah perang menunjukkan perkembangan yang menguntungkan perdjjuangan kemerdekaan Rakjat dan perdjjuangan untuk perdamaian dunia.

Pada pertengahan tahun 1945 imperialisme dunia berada dalam kedudukan yang djauh lebih lemah daripada ketika sebelum perang, berhubungan dengan hantjurnya tiga negara imperialis besar Djerman, Italia dan Djepang, berhubungan dengan bangkrutnja

ekonomi negara² imperialis di Eropa seperti Inggeris dan Perantjis, berhubungan dengan bertambah tingginya prestise internasional dari Uni Sovjet, berhubungan dengan beberapa negeri Eropa Timur dan Asia melepaskan diri dari dunia kapitalis dan mendirikan negara² demokrasi Rakjat, berhubungan dengan bertambah menghebatnja perdjjuangan kemerdekaan Rakjat djadjahan dan setengah-djadjahan untuk mengusir kekuasaan² asing dan untuk mendirikan negara nasional sendiri yang merdeka dan berdaulat.

Pembebasan diri beberapa negeri Eropa Timur dan Asia dari dunia kapitalis dan bertambah menghebatnja perdjjuangan kemerdekaan Rakjat djadjahan dan setengah-djadjahan telah mempersempit pasar dunia kapitalis. Akibatnja, mereka kehilangan sumber² bahan yang bukan ketjil, kesempatan pendjualan dipasar dunia makin bertambah djelek, dan industri² mereka terpaksa bekerdja dibawah kapasitas. Keadaan ini lebih memperdalam krisis umum kapitalisme dunia.

Rakjat Indonesia djuga mengambil bagian yang penting dalam pergolakan besar dari tanah djadjahan dan setengah-djadjahan sesudah perang, dengan memproklamasikan Republik Indonesia yang merdeka, yang kemudian diikuti oleh peperangan yang sengit melawan tentara Djepang, Inggeris dan Belanda yang mendapat bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika.

Selama perang dunia berdjalan imperialisme Amerika dapat menarik keuntungan se-banyak²nja dari darah dan djiwa ber-puluh² djuta manusia yang mendjadi korban selama perang. Oleh karena itu Amerika keluar dari perang dunia yang dahsjat itu sebagai negeri imperialis yang paling kaya, yang kemudian menjebabkan negara² imperialis lainnja terpaksa tunduk dibawah kekuasaan dan pimpinan imperialisme Amerika.

Uni Sovjet, pelopor kubu perdamaian dan Sosialisme, sekalipun menderita sangat banyak korban djiwa putra²nja yang terbaik dan korban harta-benda selama perang, keluar dari kantjah perang dunia ke-II dengan tenaga yang luarbiasa besarnya sebagai negara yang mendapat kemenangan yang gilang-gemilang. Kekuatan tentara dan Rakjat Sovjet, tidak hanya bisa mengusir dan membersihkan kaum fasis dari negeri sendiri, tetapi djuga dengan gagahberani telah membebaskan negeri² di Eropa Timur dan bebe-

rapa negeri di Asia, dan memberikan kepada negeri² itu keleluasaan untuk berkembang menurut keinginan Rakjatnja masing².

Djadi djelaslah, bahwa sesudah perang, dunia terbagi sebagai berikut: disatu fihak, bagian dunia jang terdiri dari negara² jang dikuasai oleh kaum imperialis dengan Amerika sebagai kepalanja. Difihak lain bagian dunia jang terdiri dari Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat dimana dinjatakan dalam undang² dan dalam kehidupan se-hari², bahwa sumber segala kekuasaan ada pada Rakjat dan dimana kaum imperialis dan tuantanah dianggap sudah tidak sah lagi. Ini jalah bagian dunia sosialis dan dunia demokrasi Rakjat.

Sifat perkembangan di-negeri² kapitalis, jang dipelopori oleh Amerika Serikat, berlainan sekali dengan perkembangan dinegeri sosialis dan di-negeri² demokrasi Rakjat. Dunia kapitalis jang terdiri dari negeri² imperialis dengan segenap djadjahan dan daerah² pengaruhnja jang dikuasai dan dipimpin oleh imperialisme Amerika, adalah masjarakat jang penuh dengan pertentangan² dan permusuhan², baik permusuhan antara kaum kapitalis jang berkuasa dengan kaum buruh jang dihisap dan ditindas, permusuhan antara negeri imperialis dengan tanah² djadjahannja, maupun permusuhan antara kaum kapitalis sendiri satu sama lain. Dibagian dunia kapitalis ini, permusuhan² itu sedang *berdjalan dengan hebatnja*. Oleh karena itu, kekuatan dunia kapitalis bukannya kekuatan jang kokoh dan kompak berhubung dengan adanya pertentangan dikalangan imperialisme sendiri, pertentangan antara kekuatan imperialis jang berkuasa dengan gerakan kaum buruh jang demokratis dan jang bersatu dengan kekuatan jang kompak dari dunia demokratis dalam kubu dunia anti-imperialisme dan anti-perang. Pertentangan dan permusuhan antara negara² imperialis satu sama lainnja lebih² lagi melemahkan kubu dunia imperialisme dan perang. Salahsatu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara² imperialis jalah perang imperialis jang membawa kemiskinan, kesengsaraan dan kematian ber-djuta² manusia.

Dalam bukunya *Masalah² Ekonomi Sosialisme di Uni Republik² Sovjet Sosialis*, Jusuf Stalin membantah pendapat jang mengatakan bahwa jang mendjadi basis hukum kapitalisme modern adalah laba dalam ukuran biasa. „Itu tidak benar”, kata Stalin.

„Bukan laba dalam ukuran biasa, tetapi laba maksimallah jang dituntut oleh kapital monopoli, jang dibutuhkannya untuk sedikit atau banyak meluaskan produksinja”. Kapitalisme monopoli akan lebih tjepat sampai pada kehantjurannja, djika tidak ada djaminan mendapat laba maksimal. Oleh karena itu, perdjjuangan untuk mendapat laba maksimal adalah perdjjuangan hidup atau mati bagi imperialisme. Menurut Stalin sifat² dan sjarat² jang penting dari hukum ekonomi pokok kapitalisme modern dapat setjara garis besar dirumuskan sbb.: „*Pendjaminan laba maksimal kapitalisme dengan djalan menghisap, membangkrutkan dan memelaratkan sebagian besar dari Rakjat negerinja sendiri, dengan djalan memperbudak dan merampok setjara sistimatis Rakjat negeri² lain, terutama negeri² terbelakang, dan achirnja dengan djalan peperangan dan militerisasi ekonomi nasional guna mendjamin laba jang setinggi²nja*”.

Sebaliknya dunia demokrasi tidak membutuhkan perang dan tidak mengandung benih² perang, ia madju terus atas dasar politik jang tjinta-damai. Uni Sovjet dan seluruh dunia demokrasi tidak membutuhkan perang, tidak menghendaki, tidak mempunyai niat dan tidak menjetudjui perang, seperti jang didjelaskan oleh kawan Malenkov dimuka sidang Sovjet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953. Kawan Malenkov antara lain mengatakan: „*Kita tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa sekarang tidak ada pertikaian atau soal² jang belum diselesaikan, jang tidak bisa dipetjahkan setjara damai dengan persetudjuan bersama antara negara² jang bersangkutan*”. Selandjutnja dikatakannya: „*Ini djuga berlaku mengenai soal² jang bertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet. Kita dulu berpendirian dan sekarang djuga berpendirian perlunya kedua sistim hidup berdampingan setjara damai. Kita berpendapat bahwa tidak ada dasar² objektif jang mengharuskan adanya bentrokan² antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet. Kepentingan keamanan kedua negara dan kepentingan keamanan internasional, kepentingan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet bisa didjamin atas dasar hubungan normal antara kedua negara*”.

Stalin dalam bukunya jang telah disebutkan diatas menjatakan, bahwa sifat² dan sjarat² jang penting dari hukum ekonomi pokok

Sosialisme bisa setjara garis besar dirumuskan sbb.: „*Pendjaminan kepuasan maksimal dari kebutuhan materiil dan kulturil jang terus-menerus meningkat dari seluruh masjarakat dengan djalan terus-menerus mengembangkan dan menjempurnakan produksi sosialis diatas dasar teknik jang se-tinggi²nja*”⁽¹⁾. Dengan rumusan ini mendjadi djelas, bahwa Sosialisme tidak mengenal laba maksimal bagi segolongan ketjil manusia, tidak mengenal krisis, tidak mengenal perkembangan teknik jang ter-putus² berhubung dengan adanya krisis jang timbul periodik, tidak mengenal penghantjuran tenaga² produktif masjarakat jang djuga disebabkan oleh krisis. Sosialisme hanya mengenal kepuasan maksimal mengenai kebutuhan² materiil dan kulturil, hanya mengenal peluasan produksi jang tak ter-putus² dan kemadjuan penjempurnaan produksi jang terus-menerus atas dasar teknik jang lebih tinggi.

Kenjataan internasional seperti tersebut diatas djelas menunjdjukkan adanya perdjjuangan sengit antara kekuatan reaksioner jang mempertahankan penindasan kapitalisme dan perang dengan kekuatan Rakjat sedunia jang memperdjjuangkan kemerdekaan nasional jang penuh bagi semua bangsa, memperdjjuangkan demokrasi, perdamaian dan Sosialisme.

Propaganda palsu kaum imperialis dan kakitangannya selalu memutarbalikkan kenjataan dan menggambarkan kenjataan dunia sekarang hanya berputar disekitar „pertentangan antara Amerika dan Rusia jang tidak kenal damai”, se-olah² jang berkepentingan dan terlibat dalam perdjjuangan ini hanya kedua negara besar itu sadja dan se-olah² Uni Sovjet djuga mendjalankan politik imperialis seperti pemerintah Amerika Serikat. Inilah jang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan dan oleh kaum reaksioner lainnya diseluruh dunia, dan inilah djuga jang dipropagandakan oleh kaum sosialis kanan Indonesia, oleh pemimpin² Masjumi dan oleh kaum reaksioner lainnya.

Kenjataannya adalah tidak seperti jang dipropagandakan oleh kaum reaksioner didalam dan diluarnegeri. Dari luar memang kelihatan se-olah² hubungan antara Amerika dengan negeri² kapitalis jang dikuasainya adalah berdjalan dengan baik dan lantjar sadja. Tetapi kita akan salah djika kita hanya melihat dari luarnya sadja, djika kita tidak melihat kekuatan² jang saling berten-

tangan jang ada didalamnya. Tepat sekali apa jang dikatakan oleh Stalin, bahwa walaupun negeri Eropa Barat, Djepang dan negeri² kapitalis lainnya sudah djatuh kedalam kekuasaan Amerika Serikat, tetapi adalah keliru sekali djika mengira bahwa negeri² ini akan membiarkan sadja kekuasaan dan tindasan jang terus-menerus dari Amerika Serikat, djika mengira bahwa mereka tidak akan menjtjaba melepaskan diri dari ikatan Amerika dan menempuh djalannya sendiri, djalan perkembangan jang bebas. Hal ini sudah dibuktikan dalam perkembangan sehari-hari daripada hubungan Amerika Serikat dengan negeri² jang dikuasainya, jang makin hari makin nampak dan makin keras „pemberontakan²” negeri² jang dikuasai dan dipimpin oleh Amerika terhadap Amerika sendiri. Ini bukti tentang tidak benarnya keterangan jang mengatakan bahwa tidak mungkin timbul perang antara negeri² kapitalis sendiri. Setjara teoritis, tentu sadja pertentangan² antara kapitalisme dan Sosialisme adalah lebih tajam daripada pertentangan² antara negeri kapitalis. Ini adalah benar, sebelum maupun sesudah perang dunia kedua. Tetapi sedjarah telah membuktikan kepada kita, bahwa perang dunia kedua tidak dimulai sebagai perang dengan Uni Sovjet, tetapi dimulai sebagai perang antara negeri² kapitalis.

Didunia kapitalis tidak ada ketenteraman hidup karena pertentangan dan permusuhan klas tidak mendjamin adanya hidup tenteram dan damai bagi manusia. Penghisapan, penindasan, permusuhan, pengrusakan dan perang adalah kenjataan² jang spesifik daripada masjarakat dunia kapitalis. Sebaliknya, kemadjuan jang terus-menerus dalam kekuatan ekonomi nasional dan dalam kehidupan materiil dan kulturil Rakjat adalah kenjataan² jang spesifik dunia sosialis dan demokrasi Rakjat. Saling membantu setjara djudjur dan persamaan hak antara bangsa², dan persatuan jang kokoh antara pemerintah dan Rakjatnja, membikin dunia sosialis dan demokrasi Rakjat mendjadi benteng raksasa jang tidak mungkin dihantjurkan.

Terbaginja dunia dalam dua kubu, jaitu kubu kapitalis disatu fihak dan kubu sosialis dan demokrasi Rakjat difihak lain, berarti djuga adanya dua matjam kesatuan ekonomi dan dua matjam pasar dunia. Disatu fihak pasar dunia kapitalis jang terdiri dari negara² imperialis dengan daerah pengaruhnja dan negeri² dja-

djahan dan setengah-djadjahan jang dikuasainja, dan difihak lain pasar dunia demokratis jang terdiri dari Uni Sovjet, RRT dan negara² demokrasi Rakjat lainnja.

Kedua pasar diatas mempunjai sifat dan perkembangannja sendiri.

Pasar dunia kapitalis makin lama makin dikuasai oleh imperialisme Amerika jang paling kaja dan oleh karena itu paling kuasa. Dengan djalan menekan atau mematikan imperialisme negeri² lain dan dengan memperhebat penghisapan dan penindasan terhadap kaum buruh dan Rakjat di-negeri² imperialis lainnja, kaum imperialis Amerika berusaha untuk lebih memperkaja diri lagi. Apa jang dinamakan „bantuan” oleh Amerika kepada negeri² jang ekonominja lemah, tidak menimbulkan kerdjasama jang baik antara Amerika dengan negeri² jang „dibantu”, tetapi sebaliknya malahan menimbulkan perlawanan dan „pemberontakan”. Seorang anti-Komunis seperti Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh Inggeris, menentang politik „bantuan” Amerika dengan slogannja „Dagang, bukan bantuan” („Trade, not aid”). Slogan Attlee bukan ditimbulkan oleh karena persetudjuannja pada politik Komunis jang melawan politik „bantuan” Amerika, tetapi adalah se-mata² timbul karena kepentingan ekonomi imperialisme Inggeris sendiri, jang oleh politik „bantuan” Amerika mendapat tekanan² jang keras sehingga tidak bisa berkembang dengan bebas.

Apa jang dinamakan „bantuan” Amerika itu bukanlah untuk memulihkan ekonomi damai, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Rakjat negeri jang menerima „bantuan” itu, akan tetapi digunakan untuk memperluas ekonomi perang dan pembikinan alat² pembunuh setjara besar²an. Bukan itu sadja ! Dengan „bantuan” itu Amerika menguasai negeri² jang „dibantu”, bukan sadja menguasai lapangan ekonomi dan politik, tetapi djuga militer. Pengangguran, kenaikan harga barang², kenaikan padjak, merosotnja upah riil, dll. adalah kedjadian² jang lumrah dan meradjalela dalam dunia imperialis.

Kebalikan daripada apa jang terdjadi dalam kubu kapitalisme, kerdjasama jang djudjur dan sukarela antara semua bangsa dilapangan kebudayaan dan perdagangan, dilapangan pembangunan

ekonomi nasional masing² negeri, makin lama bertambah erat sehingga makin memperkokoh dan menguatkan persekutuan lahir dan batin antara negara² dari kubu sosialis dan demokrasi Rakjat.

Imperialisme Amerika, dengan politik embargo dan blokadenja melarang negeri² dari dunia kapitalis untuk mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia sosialis dan demokrasi Rakjat. Sebaliknya, Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat mengambil tindakan² jang njata untuk memperbaiki kembali dan memperluas hubungan dagang internasional jang normal dengan semua negeri manapun djuga, termasuk dengan Amerika Serikat. Amerika takut adanja persaingan setjara damai, dan oleh karena itu terus-menerus melakukan tindakan² kekerasan terhadap negeri² jang dikuasainja dan terus-menerus memprovokasi timbulnja perang dunia baru.

Demikianlah perkembangan dunia sesudah perang dunia ke-II, perkembangan jang sudah terang tidak menguntungkan kaum kapitalis monopoli dan seluruh kaum reaksi, tetapi sebaliknya, sangat menguntungkan gerakan kemerdekaan Rakjat, gerakan demokrasi dan perdamaian.

2. Beberapa Kemenangan Besar Dari Keinginan Damai Umat-manusia Atas Kaum Agresor

Dalam keadaan sekarang situasi internasional sangat dikarakterisasi oleh kemenangan² besar dari Uni Sovjet, dari RRT dan dari seluruh kubu perdamaian dan demokrasi dalam perdjungan untuk meredakan keadaan internasional jang tegang, untuk perdamaian dan untuk mentjegah perang dunia baru.

Rakjat diseluruh dunia menjambut dengan gembira gentjatan sendjata di Korea sebagai hasil pekerdjaan perdamaian jang sudah lebih dari tiga tahun. Ini adalah suatu kemenangan besar gerakan perdamaian sedunia, satu kemenangan keinginan damai dari herdjuta² Rakjat jang sudah demikian besar kekuasaannja sehingga dapat memaksa kaum agresor menghentikan perbuatan²nja jang diluar batas perikemanusiaan. Dengan ini, keinginan imperialisme Amerika untuk menundukkan Rakjat Korea jang gagahberani mendjadi impian kosong belaka. Perdjungan Rakjat Korea ter-

hadap kaum intervensionis dan orang² sewaan klik Syngman Rhee telah menundukkan bahwa kesetiaan kepada kemerdekaan nasional dan perdamaian dari sesuatu negeri telah melahirkan kekuatan raksasa, melahirkan keberanian dan heroisme yang meliputi massa yang sangat luas. Rakjat Korea telah menarik perhatian seluruh dunia kemanusiaan untuk berdiri difihaknja. Sangat mengharukan dan tak mungkin dilupakan oleh sedjarah umatmanusia tentang keksatriaannya dan keperwiraan Tentara Sukarela Tiongkok yang berjuang mati-matian dan dengan gagahberani untuk kemerdekaan tanahair tetangganya dan untuk perdamaian dunia.

Ber-sama² dengan Rakjat seluruh dunia, Rakjat Indonesia menjambut gentjatan sendjata di Korea dengan penuh rasa kegembiraan dan penuh rasa terimakasih dan rasa hormat kepada Rakjat Korea, kepada Tentara Rakjat Korea dan Tentara Sukarela Tiongkok. Pidato Profesor Dr. Prijono dan pidato beberapa pemuka Rakjat lainnja pada malam *Menjambut Gentjatan Sendjata Di Korea* dalam bulan Agustus 1953, adalah pernyataan rasa gembira, rasa terimakasih dan rasa hormat Rakjat Indonesia kepada Rakjat Korea. Sebagaimana djuga di-negeri² lain, di Indonesia hanya kaum reaksioner yang sangat djahat yang tidak ikut bergembira dengan tertjapainja gentjatan sendjata di Korea.

Dengan kemenangan gemilang dari dunia damai difront Korea, kawan Malenkov antara lain berkata dalam sidang Sovjet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953: „Kami, Rakjat Sovjet, mengharap dengan sangat agar kehidupan Rakjat Korea yang gagahberani bisa berkembang dalam keadaan damai. Uni Sovjet akan membantu Rakjat Korea untuk menjembuhkan luka yang berat yang disebabkan oleh perang. Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan satu milyar rubel untuk membangunkan kembali ekonomi Korea yang rusak”. Sebagaimana kita ketahui usul pemerintah Uni Sovjet ini diterima dengan suara bulat oleh Sovjet Tertinggi.

Apa yang terdjadi di Korea adalah kedjadian dibahagian Timur dari dunia.

Dibahagian Barat dari dunia keinginan damai djuga telah mendapat kemenangan dengan menggagalkan avantur provokatif dari imperialisme Amerika di Berlin dalam bulan Djuni 1953.

Organisator² dari perbuatan provokatif di Djerman bertujuan menghantjurkan kekuatan demokrasi di Djerman, menghantjurkan benteng kekuatan tjinta-damai dari Rakjat Djerman, jaitu Republik Demokrasi Djerman. Mereka mau mengembalikan Djerman dizaman Hitler, mendjadikan Djerman suatu negara militer dan menghidupkan kembali biangkeladi peperangan didjantung Eropa. Hal ini tidak boleh terdjadi, oleh karena itu ia harus ditindas dan achirnja memang dapat ditindas. Kalau tidak segera ditindas maka kedjadian di Berlin akan mempunyai akibat internasional yang besar dan akan membawa bentjana, tidak hanya bagi Rakjat Djerman, tetapi djuga bagi seluruh dunia. Kedjadian di Berlin bulan Djuni 1953 hanjalah satu tjara imperialisme Amerika memprovokasi perang baru.

Makin banjak kemadjuan² yang dapat ditjapai oleh gerakan demokrasi dan perdamaian untuk meredakan kegentingan internasional, makin terdjepitlah kedudukan kaum penghasut perang dan ini membikin mereka makin bertambah matagelap. Dengan segenap kekuatannya mereka mentjoba menggagalkan usaha-usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Inilah yang mendjadi sebab mengapa gentjatan sendjata di Korea tadinja terus-menerus diundur, yang mendjadi sebab ditjiptakannya batulontjatan perang dunia baru di Djerman dan di Djepang, yang menjebabkan terdjadinja kup atau pertjobaan kup di beberapa negeri, yang menjebabkan provokasi² di-negeri² yang termasuk kubu demokrasi dan yang menjebabkan digunakannya politik bom atom yang bersifat santase.

Golongan agresor dengan keras melawan tiap² usaha untuk meredakan kegentingan internasional. Mereka takut pada keredaan internasional, karena djika ini terdjadi maka mereka akan terpaksa mengurangi perdagangan sendjata mereka yang memberi keuntungan luarbiasa kepada radja² meriam mereka. Mereka takut kehilangan laba mereka yang luarbiasa besarnya.

Untuk mentjegah keredaan kegentingan internasional, Amerika tidak hanya tidak menarik kembali tentaranya dari daerah² yang didudukinja, seperti Djerman, Austria, Djepang, Korea Selatan dsb.nja, tetapi djuga malahan memperkuat pendudukannya di-negeri² tsb. dan menempatkan pasukan²nja di-negara² seperti Ing-

geris, Perantjis dan negara² Eropa Barat lainnja. Amerika berbuat bertentangan dengan ketentuan² Piagam PBB, perdjandjian Potsdam dan perdjandjian² internasional lainnja jang dimaksudkan untuk memperkokoh perdamaian. Lebih djauh lagi, Amerika malahan terang²an melanggar semua perdjandjian perdamaian dengan mendirikan blok-blok agresif seperti blok Pakt Atlantik (NATO) jang dimaksudkan untuk mempersiapkan agresi baru terhadap Uni Sovjet, seperti apa jang mereka namakan „Masjarakat Pertahanan Eropa” dengan „Tentara Eropa”nja jang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali tentara fasis Djerman bagi keperluan agresinja di Eropa, dan seperti ANZUS dan Pakt Pasifik jang dimaksudkan sematjam NATO bagi daerah Asia (2). Semua blok itu dinjatakan kepada dunia sebagai blok² jang mempunyai tudjuan defensif, tetapi jang sebenarnja adalah merupakan pengchianatan jang besar terhadap perdamaian. Kegiatan Amerika nampak difront Vietnam dengan mendjual sendjatanja kepada imperialisme Perantjis untuk membunuh Rakjat Vietnam jang tjinta-damai. Kegiatan² Amerika di Iran telah menimbulkan ketegangan jang besar didalamnegeri Iran, dan achirnja menimbulkan perebutan kekuasaan oleh agen imperialis Amerika, seorang penganut fasisme, Fazlollah Zahedi. Peristiwa ini terdjadi ketika sedang ada pembijtaraan antara pemerintah Uni Sovjet dengan pemerintah Mossadeq. Kawan Malenkov dalam pidatonja dimuka Sovjet Tertinggi dalam bulan Agustus 1953 antara lain mengatakan tentang ini: „Kami harap pembijtaraan ini akan berhasil. Tidak berapa lama jang lalu telah tertjapai persetudjuan jang saling menguntungkan dalam soal memadjukan perdagangan antara kedua negeri. Adalah bergantung kepada pemerintah Iran apakah hubungan Sovjet-Iran akan madju melalui djalan hubungan tetangga jang baik, djalan peluasan hubungan ekonomi dan kebudayaan”. Takut akan adanja hubungan sukarela antara kedua bangsa ini, pemerintah Amerika menjiapkan dan achirnja memerintahkan perebutan kekuasaan (3).

Mendjadi djelaslah sekarang, bahwa disamping kemadjuan² jang ditjapai oleh kekuatan perdamaian dunia, bekerdjalah satu kekuatan lain untuk mempertegang situasi internasional guna kepentingan beberapa gelintir radja² meriam dan avonturir² politik

internasional. Mereka melihat keredaan kegentingan internasional sebagai suatu bentjana bagi dirinja. Mereka memilih djalan avontur dan melandjutkan politiknja jang agresif. Provokasi² internasional dan apa jang dinamakan „siasat perang dingin” dan segala matjam lagi adalah untuk mengabdikan politik ini.

Demikianlah setjara singkat keadaan internasional pada saat² jang terachir ini. Perkembangan keadaan internasional pada saat² jang terachir ini adalah sangat baik bagi kemadjuan demokrasi dan perdamaian, tetapi disamping itu kekuatan reaksioner terus-menerus dan dengan segenap tenaganja berusaha untuk mentjegah perkembangan kearah jang sehat ini. Keadaan ini mengharuskan kita untuk lebih waspada lagi. Kita harus ingat, bahwa musuh² Rakjat dan musuh² kemanusiaan tidak akan menjerah setjara sukarela, sebaliknya, mereka akan meneruskan pekerdjaannja jang anti-Rakjat dan anti-damai jang kedji dan djahat. Mereka tidak segan² untuk mengadakan teror dan provokasi dan untuk mengulanginja ber-kali² seperti jang telah terdjadi dengan provokasi fasis di Berlin dalam bulan Djuni 1953 dan seperti jang banjak mereka lakukan untuk mengatjaukan ekonomi dan hidup damai Rakjat Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat. Belakangan ini agen terbesar dari imperialisme dunia, jaitu pengchianat Beria, telah terbongkar rahasianja beserta kakitangannja jang tersebar di-mana². Di-mana² perbuatan agen² imperialis jang djahat ini dapat dilikwidasi. Berhasilnja pekerdjaan melikwidasi perbuatan kaum pengchianat ini merupakan pukulan besar bagi kaum imperialis, berarti kaum imperialis kehilangan kakitangannja jang penting. Semuanya harus mendjadi peringatan bagi gerakan Rakjat, nasional maupun internasional.

Kaum reaksi jang di-mana² berada dalam keadaan terdjepit tidak bisa mengambil djalan lain, ketjuali djalan intimidasi, provokasi, sabot, santase, teror dan achirnja kudeta. Ini kita lihat di-luarnegeri dan kita lihat di Indonesia sendiri. Oleh karena itulah semuanya bukan soal teoritis lagi bagi Rakjat Indonesia, tetapi sudah mendjadi soal praktis.

3. Perjuangan Rakjat Indonesia Untuk Perdamaian

Keadaan internasional seperti tersebut diatas meletakkan kewajiban yang berat diatas pundak tiap-tiap bangsa yang tjinta demokrasi dan perdamaian, djadi djuga diatas pundak bangsa Indonesia.

Rakjat Indonesia tidak boleh bersikap „netral” terhadap soal damai dan perang. Sikap „netral” adalah menguntungkan penghasut² perang dan melemahkan perjuangan untuk perdamaian, karena dengan bersikap „netral” kita tidak mungkin memobilisasi massa untuk menentang perang dan membela perdamaian dengan mati²an.

Di Indonesia ada dua matjam sikap „netral” atau „bebas” terhadap kekuatan perdamaian yang dipelopori oleh Uni Sovjet dan kekuatan yang hendak menimbulkan perang dunia yang baru yang dipelopori oleh imperialisme Amerika Serikat.

Sikap „netral” atau „bebas” yang pertama ialah yang dilakukan dengan sadar untuk menipu oleh agen² imperialis, seperti oleh pemimpin² sosialis kanan dan pemimpin² Masjumi. Mereka mengetahui, bahwa mereka akan mendapat tentangan yang keras dari Rakjat Indonesia, djika mereka terang²an menjetudjui perang dan terang²an memihak Amerika Serikat. Oleh karena itu mereka memakai kedok „netral” atau „bebas”. Pemimpin² Masjumi Sukiman-Subardjo-Wibisono yang melakukan Razzia Agustus atas perintah imperialisme Amerika mentjantumkan dalam program pemerintahnja politik luarnegeri yang „bebas”. Demikian djuga kaum sosialis kanan ngomong tentang politik „netral”, politik „bebas” atau politik „kekuatan ketiga” untuk menutupi pengabdianja yang setia kepada imperialisme. Makin lama makin djelas bagi Rakjat Indonesia apa artinja politik luarnegeri yang „netral” atau „bebas” daripada pemimpin² PSI, Masjumi dan pemimpin² reaksioner lainnja. Sikap „netral” atau „bebas” sematjam ini harus kita telandjangi dan kita kupas maksud² yang sesungguhnya, agar tidak mendjadi ratjun bagi Rakjat.

Sikap „netral” atau „bebas” yang kedua ialah sikap dari orang² yang karena tidak mengerti, karena naif, mengira bahwa ada kekuatan gaib yang bisa berdiri diantara damai dan perang. Golongan

yang bersikap „netral” atau „bebas” karena tidak mengerti atau karena naif itu sangat banjak dikalangan bangsa kita, djuga banjak terdapat dikalangan Rakjat biasa. Terhadap golongan yang tidak mengerti atau naif ini, kaum Komunis harus bersikap sabar dalam mejakinkan mereka. Kita harus mejakinkan mereka, bahwa sikap mereka yang bimbang adalah merugikan perdamaian dan merugikan Indonesia. Dengan sikap bimbang kekuatan raksasa daripada Rakjat tidak mungkin dibangunkan untuk membela perdamaian dunia dan membela suasana damai di Indonesia. Tiap² akibat sikap mereka yang bimbang yang sudah terbukti merugikan perdamaian dunia dan merugikan suasana damai di Indonesia harus segera dikupas dan sikap mereka yang ternjata keliru itu harus dikritik (4).

Politik perdamaian, sebagaimana dikatakan oleh kawan Malenkov, se-kali² bukanlah soal „taktik” atau „manuver diplomatik”, melainkan garis umum kita dilapangan politik luarnegeri, djadi satu²nja garis yang benar bagi Partai kita disaat sekarang dan seterusnya.

Apakah tudjuan gerakan perdamaian itu ? Jusuf Stalin mendjelaskan bahwa „tudjuan gerakan perdamaian sekarang ini ialah membangkitkan massa Rakjat untuk berdjuaung guna memelihara perdamaian dan mentjegah perang dunia yang lain”, dan bahwa „tudjuan gerakan ini bukanlah untuk menumbangkan kapitalisme dan mendirikan Sosialisme — ia membatasi diri kepada tudjuan demokratis untuk memelihara perdamaian” (5). Maka itu gerakan perdamaian mesti merupakan gerakan yang se-luas²nja, yang meliputi se-luas²nja golongan dari aliran dan kepertjajaan apapun.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia kita harus insjaf, bahwa bahaya perang lebih mengantjam Indonesia daripada mengantjam Uni Sovjet dan negeri² demokrasi Rakjat, karena dalam menjiapkan kekuatan perangnja, imperialisme Amerika berkepentingan terlebih dulu untuk menguasai negeri² lain yang lemah. Makaitu gerakan perdamaian adalah per-tama² untuk kita sendiri, untuk Indonesia dan Rakjat Indonesia.

Diatas se-gala²nja Rakjat Indonesia harus dengan sekuat tenaga mentjegah timbulnja bahaya perang yang baru. Kita harus men-

tjegah Indonesia terseret kedalam peperangan. Kita harus berpegang teguh pada prinsip, bahwa tidak ada persoalan dan pertikaian internasional jang tidak dapat diselesaikan setjara damai dengan perundingan antara negara² jang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia kita harus meluaskan dan mengkonsolidasi perdamaian jang telah tertjapai di Korea dengan menuntut supaya semua tentara asing jang ada diwilajah Korea ditarik dan supaya seluruh wilajah Korea dipersatukan setjara damai mendjadi satu negara dibawah pimpinan satu pemerintah nasional Korea jang demokratis. Kita harus memperjuangkan supaya apa jang sudah tertjapai di Korea djuga dilaksanakan difront Vietnam, agar seluruh Rakjat Vietnam jang tjinta-damai dapat hidup bebas dan sedjahtera.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang dan mentjegah timbulnja kembali militerisme Djepang dan Djerman jang sekarang sedang dibangun oleh imperialisme Amerika. Dalam menentang timbulnja kembali militerisme di Djepang, kita menjatakan diri bersatu dengan Rakjat Djepang jang menentang pendudukan tentara Amerika ditanahairnja; jang berdjuaug untuk melepaskan diri dari ikatan politik dan ekonomi dari imperialisme Amerika, untuk mengadakan hubungan diplomatik dan hubungan dagang jang normal dengan semua negeri, terutama dengan Uni Sovjet dan RRT, jang sangat penting bagi kehidupan ekonomi Djepang, untuk mentjapai kemerdekaan jang penuh bagi Djepang. Untuk mentjegah timbulnja kembali militerisme di Djerman, seluruh wilajah dan Rakjat di Djerman harus dipersatukan setjara damai dalam satu negara Djerman jang demokratis dengan satu pemerintah nasional dari bangsa Djerman sendiri tanpa tjampurtangan negara asing manapun djuga. (6) Dengan negara Djerman jang demokratis ini harus segera diadakan perdjandjian perdamaian jang sudah delapan tahun terus-menerus di-tunda² sadja oleh politik imperialisme Amerika di Djerman. Dengan demikian bangsa Djerman akan menempati tempat jang sewadjarinja dalam pergaulan bangsa² jang demokratis dan tjinta-damai.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Indonesia harus memperjuangkan terselenggaranja hubungan dagang

internasional jang normal dan bebas antara Barat dan Timur, antara semua negara didunia berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan serta tanpa tjampurtangan dalam soal² intern negara lain. Untuk memperkuat hubungan persaudaraan dalam suasana damai antara bangsa², penukaran delegasi² Rakjat antara negara² mesti diperbanjak.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, Rakjat Indonesia harus menjokong tiap² perdjuaugan Rakjat untuk mentjapai kemerdekaan jang penuh seperti jang dilakukan oleh Rakjat Malaja, Filipina, Birma, Siam, India, Maroko, Tunisia, Kenya, Iran dll., karena kemerdekaan nasional tiap² bangsa adalah mempunyai arti jang penting bagi perdamaian dunia dan bagi Indonesia sendiri.

Dalam hubungan dengan membela perdamaian dunia, kita harus menentang keras politik Belanda jang tidak tahu malu terhadap Irian Barat, wilajah jang sah dari Republik Indonesia. Laporan tahunan kementerian luarnegeri Belanda dan keterangan ratu Juliana jang disampaikan dalam pembukaan parlemen Belanda tanggal 15 September 1953 menjatakan, bahwa pemerintah Belanda tidak melihat faedahnja untuk memulai lagi perundingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Dengan perkataan lain pemerintah Belanda tidak lagi menganggap Irian Barat sebagai daerah sengketa antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah bukti jang se-njata²nja bahwa imperialisme Belanda seenaknja sadja melanggar perdjandjian jang sudah dibikinnja dengan Indonesia, bahwa imperialisme Belanda dengan bantuan sepenuhnya dari imperialisme Amerika tetap mau meneruskan kolonialisme model lama di Irian Barat. Padahal bagi Indonesia, djika Belanda terus berkuasa di Irian Barat adalah merupakan antjaman pistol jang terus-menerus ditudjukan kepada Republik Indonesia.

Pelaksanaan semua tindakan kearah perdamaian akan lebih mudah apabila badan internasional PBB selekasnja dapat dipulihkan kembali kepada fungsinja jang semestinja seperti jang tersebut dalam Piagam Bangsa². Badan internasional ini harus bisa kembali mendjadi alat dan tempat untuk menjelesaikan semua persoalan dan pertikaian internasional setjara damai. Praktek sampai sekarang, dimana PBB praktis mendjadi embel² dari kementerian

luarnegeri Amerika Serikat, harus dihentikan se-lekas²nja. Seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, D. Jay namanja, karena melihat kedudukan PBB yang dikangkangi oleh Amerika, telah mengatakan kepada koresponden AFP, dalam hubungan dengan gentjatan sendjata di Korea dan pemasukan RRT kedalam PBB, bahwa „Rakjat Inggris umumnja telah memutuskan untuk tidak ikutserta dalam suatu peperangan umum melawan RRT. Mereka menghendaki agar PBB mendjadi mimbar untuk menjelesaikan pertikaian² dan untuk mempertegak hukum, tapi bukan untuk mendjadi 'club anti-Komunis'” (berita AFP tanggal 17 September 1953). Utjapan anggota Partai Buruh ini tidak boleh kita pandang sebagai persetudjuannja kepada Komunisme, tetapi se-mata² didorong oleh keadaan ekonomi di Inggris yang makin lama makin bangkrut karena ditekan terus-menerus oleh Amerika. Sjarat yang penting bagi PBB, djika ia hendak kembali kepada kedudukannja yang semestinja, yang sesuai dengan Piagam Bangsa², jalah memberikan kedudukan yang sewadjarnja sebagai anggota PBB kepada RRT yang mewakili lebih dari 600 djuta manusia, dan mengeluarkan klik Kuomintang yang sampai sekarang dengan tidak sah duduk dalam badan internasional itu.

Satu faktor yang menentukan bagi terlaksanaja semua tjita² umatmanusia jalah, djika mengenai semua soal internasional ada kata sepakat antara negara² besar Amerika Serikat, Uni Sovjet, RRT, Inggris dan Perantjis. Oleh karena itu, perdjungan untuk mentjapai Pakt Perdamaian antara Lima Besar adalah perdjungan yang penting dan bersifat menentukan.

Rakjat Indonesia akan mendapat manfaat yang besar djika pemerintah Indonesia — yang sekarang sampai batas² tertentu mendapat sokongan Rakjat — konsekwen mendjalankan politik perdamaian dan konsekwen mendjalankan „good neighbour policy” (politik hubungan baik dengan negeri tetangga) yang telah dipraktikkan dengan Filipina, Birma, India dll., serta djuga meluaskan prinsip ini dengan tetangga kita yang besar, jaitu RRT, dan dengan tetangga kita yang gagahberani Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam. Pelaksanaan dari politik luarnegeri ini hanja akan menguntungkan Rakjat Indonesia dan

menempatkan Republik Indonesia pada tempatnja yang terhormat dalam pergaulan dan hubungan internasional.

Kewadjiban Partai Dilapangan Politik Luarnegeri Sekarang Adalah Sbb.:

1) *Melandjutkan perdjungan untuk perdamaian, untuk mentjegah timbulnja perang dunia yang baru dan memperdjungkan supaya semua pertikaian internasional diselesaikan dengan perundingan setjara damai; memperdjungkan adanja kerdjasama antara Indonesia dengan semua negeri yang tjinta-damai dengan tudjuan mempertahankan perdamaian dan mentjegah peperangan.*

2) *Memperdjungkan adanja kerdjasama dilapangan ekonomi dan kebudayaan antara Indonesia dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan dan persamaan sepenuhnja; menjokong tiap² perdjungan Rakjat untuk kemerdekaan nasional yang penuh.*

3) *Ikut mengkonsolidasi kemenangan perdamaian di Korea dan memperdjungkan agar gentjatan sendjata yang sudah tertjapai difront Korea djuga tertjapai difront Vietnam; menentang timbulnja militerisme di Djepang dan Djerman dan melawan provokasi² untuk menimbulkan perang baru di Djerman.*

4) *Memperdjungkan supaya kedudukan PBB sesuai dengan Piagam Bangsa², jaitu sebagai alat umatmanusia untuk perdamaian; memperdjungkan masuknja RRT sebagai anggota PBB, dan memperdjungkan tertjapainja Pakt Perdamaian antara Lima Besar (Amerika Serikat, Uni Sovjet, RRT, Inggris dan Perantjis).*

5) *Memperdjungkan pembatalan perdjandjian² dan persetudjuan² yang diadakan antara Indonesia dengan negara² lain yang merusak kemerdekaan dan suasana damai di Indonesia.*

SITUASI DALAM NEGERI INDONESIA

1. Indonesia Setengah-djadjahan Membawa Akibat Krisis Ekonomi Jang Terus-menerus. Djalan Untuk Mengatasinja Jalah Melikwidasi Keadaan Setengah-djadjahan Dan Menggantikannya Dengan Sistim Demokrasi Rakjat

Sudah tiga setengah tahun PKI me-nerang²kan kepada Rakjat dengan terus-menerus dan dengan tidak djemu²nja, bahwa persegudjian KMB jang dibikin oleh Hatta dan Sultan Abdul Hamid dengan pemerintah Belanda adalah persegudjian kolonial, persegudjian jang tidak dibikin atas dasar kedudukan jang sama antara Republik Indonesia dan keradjaan Belanda.

Pada permulaannya banjak orang jang pertjaja pada Hatta jang mengatakan, bahwa persegudjian KMB berarti „lenjapnja kekuasaan kolonial atas Indonesia”. Tetapi lama-kelamaan tipudaja kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri ini terbongkar djuga, berkat penerangan² jang diberikan oleh kaum Komunis dan oleh golongan² demokratis lainnja dan berkat pengalaman Rakjat sendiri jang pahit menanggung akibat persegudjian KMB. Achirnja seluruh bangsa mengetahui, bahwa „penjerahan kedaulatan” jang diberikan berdasarkan persegudjian KMB oleh keradjaan Belanda kepada Indonesia adalah hanja lamunan belaka, adalah sandiwara se-besar²nja jang pernah terdjadi dalam sedjarah bangsa Indonesia.

Dengan persegudjian KMB imperialisme Belanda berhasil dalam mempertahankan pengawasannya di Indonesia. Indonesia mendjadi anggota dari apa jang dinamakan Uni Indonesia-Belanda (7). Politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia dikontrol oleh pemerintah Belanda. Irian Barat, bagian jang sah dari Republik Indonesia, masih sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Sumber² ekonomi jang penting tetap dalam kekuasaan negeri² imperialis. Pegawai² sipil dan militer Belanda masih tetap mengontrol alat² negara dan tentara Indonesia.

Persegudjian KMB telah membikin Indonesia jang merdeka

dan berdaulat mendjadi negeri setengah-djadjahan, jaitu negeri jang kelihatannya mempunjai „hak memerintah diri sendiri”, tetapi dalam kenjataannya, kekuasaan jang sesungguhnya, terutama kekuasaan dilapangan ekonomi, masih tetap ditangan kaum imperialis, terutama kaum imperialis Belanda.

Ber-matjam² demagogi oleh kaum reaksioner telah dilakukan untuk mengabui mata Rakjat, antara lain demagogi tentang pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan negeri. Semuanya ini adalah demagogi, omong besar tetapi tidak ada buktinja, selama ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh kaum kapitalis monopoli asing. Dengan demagogi ini Indonesia bukannya makin dekat kepada pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan, tetapi makin lama makin djauh. Malahan sebaliknya, Indonesia sekarang berada didalam tjengkeraman krisis ekonomi jang terus-menerus dan sudah dekat pada keruntuhannya.

Bahwa Indonesia berada didalam tjengkeraman krisis ekonomi, ini dibuktikan oleh angka² pemerintah sendiri dan oleh kenjataan² didalam masjarakat. Pemerintah Ali Sastroamidjojo, jang memikul akibat politik ekonomi dan keuangan dari pemerintah Hatta, Natsir, Sukiman dan jang terachir politik Sumitro ketika kabinet Wilopo, menerangkan dalam djawaban pemerintah kepada parlemen pada tanggal 2 September 1953, bahwa defisit untuk 7 bulan pertama tahun 1953 sudah berdjumlah sampai 1600 djuta rupiah. Menurut taksiran pemerintah Ali Sastroamidjojo, untuk tahun 1953 kekurangan anggaran belandja akan berdjumlah lk. 2500 djuta rupiah. Djumlah ini hampir sama besarnya dengan djumlah jang harus dibayar keluarnegeri untuk „djasa²” (invisibles); jaitu untuk tahun 1953 melebihi 2300 djuta rupiah. Sebagian besar dari djumlah ini merupakan pembayaran untuk modal asing jang ditanami diwaktu jang lampau, demikian pengakuan pemerintah Ali Sastroamidjojo. Pembayaran „djasa²” keluarnegeri jang besar djumlahnja pada waktu sekarang, menurut pemerintah Ali Sastroamidjojo sendiri, adalah sebagai akibat dari struktur ekonomi Indonesia sekarang dan sebagai akibat dari politik penanaman modal asing dizaman kolonial, jang sampai sekarang masih berlaku. Disamping defisit anggaran belandja Republik Indonesia

jang besar, dengan berbagai djalan modal monopoli asing meng-gondol laba jang luarbiasa besarnja keluarnegeri !

Mengenai ekspor dikatakan oleh pemerintah Ali Sastroami-djojo, bahwa kemundurannja ditahun 1953 tidak disebabkan oleh djumlah volume ekspor, akan tetapi disebabkan oleh djumlah harganja. Djadi ekspor tetap besar, tetapi jang merosot jalah harganja. Ini disebabkan oleh politik menekan harga dari impe-rialisme Amerika dengan melalui politik pembeli-tunggal, politik blokade dan embargo. Djumlah volume ekspor Indonesia, dan bersamaan dengan itu djuga dengan sendirinja djumlah harga barang² jang diekspor, bisa berlipatganda lebih besar djika Indo-nesia bebas dalam menentukan hubungan dagang dengan luar-negeri, djika Indonesia tidak terikat oleh politik blokade dan embargo Amerika. Sebagai tjontoh sangat menjolok sekali diktatur harga dari Amerika dengan lewat Rubber Study-Group (8) jang dengan tidak tahu malu menetapkan, bahwa untuk harga karet baru dapat diharapkan perbaikan harga dalam tahun 1957. Pada-hal, diluar pasar blok Amerika ada negeri² jang bersedia mem-beli karet Indonesia dan karet negeri² lain dengan harga jang pantas.

Djuga politik impor sangat merugikan ekonomi nasional, ber-hubung politik imperialisme Amerika jang memaksa Indonesia membeli barang² jang mereka tentukan matjamnja maupun harga-nja, berhubungan masih tetap berkuasannya importir² asing, berhu-bung penurunan nilai rupiah dan berhubungan peraturan devisa Sumitro (9). Berdasarkan persetudjuan KMB Indonesia harus membayar komisi untuk semua ekspor maupun impornja kepada negeri Belanda.

Untuk mengalihkan perhatian orang dari eksploitasi besar²an dan laba raksasa jang digondol keluarnegeri oleh kaum kapitalis monopoli asing, oleh kaum reaksioner dilakukan demagogi ten-tang koperasi. Dalam pidato radio Drs. Mohammad Hatta, berkenaan dengan *Hari Koperasi* ke-III pada tanggal 12 Djuli 1953 dengan bangga disebutkannja, bahwa djika dibanding-kan angka² tahun 1951 dengan tahun 1952, maka kelihatan djum-lah koperasi bertambah 2.000 buah (semua 7.700), djumlah ang-gota bertambah kira² 179.000 orang (semua 1.180.000 orang),

sedangkan uang simpanan meningkat sampai lebih dari Rp. 56 djuta. Dalam pidato sambutan Hatta itu terlalu di-besar²kan arti dari koperasi kaum tengah ini. Padahal tidak ada artinja ri-buan perusahaan koperasi ketjil²an dengan modal Rp. 56 djuta djika dibanding dengan besarnja kapital kaum monopoli asing jang tidak diganggu-gugat di Indonesia ini. Nasib daripada kope-rasi² ini tidak beda dengan nasib „ikan teri jang ditempatkan dalam satu kolam ketjil ber-sama² dengan ikan kakap”. Kalau ikan kakap mau, dalam sekedjap mata sadja ikan teri itu habis ditelannja. Dalam negeri jang terus-menerus diantjam oleh krisis ekonomi, koperasi tidak mempunyai haridepan jang baik, pada waktunja ia akan dihantjurkan oleh kapital² monopoli asing, apa-lagi djika koperasi² itu berani melangkah kelapangan operasi kapi-tal² monopoli asing. Tetapi, untuk melangkah kelapangan operasi kapital² monopoli asing adalah satu lamunan bagi koperasi² a la Hatta. Djadi koperasi a la Hatta bukanlah obat jang mudjarab untuk mengatasi krisis ekonomi, ia hanja untuk memindahkan per-hatian, agar perjuangn Rakjat tidak ditudjukan kepada meli-kwidasi kekuasaan kapital monopoli asing di Indonesia (10).

Dalam Indonesia jang ditjengkeram oleh krisis ekonomi dengan sendirinja tingkat hidup Rakjat sangat merosot dan makin lama makin merosot lagi. Upah kaum buruh Indonesia sangat rendah, sedang upah riilnja terus merosot berhubungan dengan harga barang² terus meningkat. Djumlah penganggur makin lama makin bertam-bah banyak. Kaum tani Indonesia jang merupakan kira² 70% daripada penduduk masih tetap berada dalam kedudukan budak, hidup melarat dan terbelakang dibawah tindasan tuantanah dan lintah-darat. Inteligensia Indonesia djuga tidak mempunyai ha-ridepan jang gemilang didalam Indonesia jang terus-menerus berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi, karena Indonesia jang tidak makmur tidak memungkinkan perkembangan ilmu dan ke-budajaan. Kemerosotan tingkat hidup Rakjat merupakan tanah jang subur bagi musuh² Republik Indonesia untuk meluaskan gerakan terornja jang berupa DI, TII (11) dsb.

Kenjataan² diatas makin lama makin dalam mejakinkan Rak-jat Indonesia, jaitu kaum buruh, kaum tani, inteligensia, ka-um burdjuis ketjil dan burdjuis nasional, bahwa sistim ekonomi

kolonial harus dihapuskan dan diganti dengan sistim ekonomi nasional. Penghapusan ekonomi kolonial dan penggantinya dengan ekonomi nasional hanya mungkin dengan menghapuskan persetudjuan KMB seluruhnya, karena justru isi pokok daripada persetudjuan KMB ialah mengenai kekuasaan ekonomi. Dengan demikian sebagian besar dari bangsa Indonesia menjadi yakin, bahwa satu-satunya jalan untuk pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan ialah jalan kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan² demokratis, yaitu dengan mewujudkan sistim demokrasi Rakyat.

2. Perkembangan Front Persatuan Nasional

Dalam keadaan sekarang, dimana persetudjuan KMB harus dibatalkan, dimana intervensi Amerika dan negeri² lain harus dilawan, dimana militerisme Jepang yang dibangun oleh imperialisme Amerika sekali lagi harus ditentang, dimana Indonesia harus dilepaskan dari Uni Indonesia-Belanda, dimana Irian Barat harus dipertahankan sebagai wilayah Republik Indonesia dan dimana gerombolan² DI, TII dan gerombolan teror lainnya harus dihancurkan, adalah tugas yang sangat urgen dari kelas buruh untuk lebih memperkuat persatuannya. Persatuan kaum buruh Indonesia makin hari makin kuat. Resolusi Politbiro CC PKI bulan Maret tahun 1952 tentang *Kewajiban Front Persatuan Buruh* merupakan stimulator yang penting bagi perjuangan kaum buruh Indonesia untuk tuntutan² ekonomi dan politiknya yang langsung, untuk mempersatukannya dan untuk mengkonsolidasi organisasinya.

Bersamaan dengan memperkuat persatuannya, kelas buruh memelopori terbentuknya front persatuan nasional yang tumbuh dengan sewajarnya di-mana² diseluruh Indonesia. Semua orang Indonesia lelaki dan wanita yang setuju dengan kemerdekaan nasional yang penuh bagi tanahair Indonesia dan setuju dengan perdamaian, dengan tiada pandang kejakinan politik, kepertjajaan agama dan kedudukan dalam masyarakat berdiri dibelakang front persatuan nasional ini.

Dibawah pimpinan Partai mulai diadakan propaganda, bahwa

perjuangan massa tidak hanya dapat mendjamin dipenuhinya sesuatu tuntutan ekonomi, tidak hanya dapat mendjamin realisasi daripada sesuatu tujuan politik yang langsung, tetapi juga bisa mendjamin kemenangan² yang lebih besar. Perjuangan massa tidak hanya bisa mengakibatkan perubahan pemerintah yang tidak mempunyai arti apa² karena pemerintah baru tetap menjalankan politik pemerintah yang lama (pemerintah Hatta diganti dengan pemerintah Natsir, dan pemerintah Natsir diganti dengan pemerintah Sukiman), tetapi juga, dan ini adalah penting, perjuangan massa bisa mengakibatkan *perubahan dalam politik*. Terbentuknya pemerintah Ali Sastroamidjojo membuktikan kebenaran hal ini, dan kejadian ini telah memberi dorongan kepada massa untuk mendapatkan perubahan politik yang lebih besar.

Kepentingan kaum buruh dan kaum tani Indonesia, kepentingan seluruh Rakyat Indonesia lelaki dan wanita, menuntut supaya dilakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menggagalkan tindakan² dilihat dari pemimpin² Masjumi, PSI dan kaum reaksioner lainnya, yang atas perintah negeri asing bertindak anti-Rakyat, antidemokrasi, anti-nasional dan anti-Indonesia. Kita harus menggagalkan tiap² siasat (manuvre) mereka dimana saja, didalam maupun diluar parlemen, yang legal maupun yang illegal. Menggagalkan siasat mereka berarti menggagalkan operasi² imperialisme Belanda, Amerika dan Inggeris dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan dinegeri kita.

Tidakbisa diungkiri, bahwa pada saat sekarang masih banyak lelaki dan wanita Indonesia yang belum dapat menerima beberapa bagian dari program Partai kita, walaupun kita kaum Komunis memandang program Partai kita sebagai satu-satunya program yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tanahair kita untuk sekarang dan nanti. Tetapi walaupun demikian, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar lelaki dan wanita Indonesia sekarang dapat menyetujui beberapa bagian dari program Partai Komunis dan berdasarkan beberapa bagian dari program ini dapat dibentuk front persatuan nasional yang kuat dan kuasa yang akan menetapkan dan memperjuangkan terlaksananya tujuan politik dan ekonomi sesuai dengan tuntutan pada saat sekarang.

Front persatuan nasional yang digalang oleh Partai kita ialah front yang mempersatukan lelaki dan wanita Indonesia dari semua kejakinan politik, semua kepertajaan agama dan kedudukan sosial, dan sudah tentu atas dasar hasrat bersama untuk mengatasi krisis ekonomi yang terus-menerus menjengkeram Indonesia, untuk menjegah diseretnya Indonesia kedalam pakt agresif oleh imperialisme Amerika, untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, untuk melawan dipersendjatainya kembali Djepang, untuk menjundjung tinggi pandji² demokrasi dan untuk memperdjuangkan kemerdekaan nasional yang penuh bagi Indonesia.

Atas dasar hasrat bersama, front persatuan nasional bisa djuga menjalankan politik ekonomi, keuangan dan sosial didalam bingkai ekonomi damai, yang dapat menjjamin perkembangan industri dan pertanian di Indonesia, yang dapat memenuhi kebutuhan² langsung daripada kaum buruh, dapat memberikan tanah kepada kaum tani tak-bertanah atau tak tjukup mempunja tanah, yang dapat mengembangkan perdagangan atas dasar saling menguntungkan dengan semua negeri dan dapat membangunkan sedjumlah besar rumah yang sangat dibutuhkan oleh penduduk.

Berdasarkan bantuan yang sepenuhnya dari Rakja Indonesia lelaki dan wanita, front persatuan nasional djuga berewadajiban membela kebebasan² demokratis dari semua serangan kaum reaksi dan fasisme. Perdjuangan Rakjat Indonesia waktu taun² belakangan ini membuktikan, bahwa dengan persatuan nasional, walaupun belum begitu kuat, dapat menggagalkan tindakan² fasis Razia Agustus pemerintah Sukiman-Subardjo-Wibisono taun 1951, menggagalkan pertjobaan kup pada tanggal 17 Oktoer 1952 oleh golongan sosialis kanan dan kaum militeris, dan djuga dapat mendesakkan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamidjo yang programnya agak demokratis dan didalamnja tidak ikuterta elemen² komprador dan tuantanah dari Masjumi dan elemen² komprador dari PSI (12). Demikian djuga, dengan persatuan nasional yang belum begitu kuat, gerakan menghantjurkangerombolan² DI, TII dan gerombolan² teror lainnya makin lam makin meluas dan makin bertambah kuat. Djadi, front persatuan nasional yang berakar dikalangan semua sektor dari bangsa kita dan

yang memobilisasi Rakjat kedalam perdjuangan, akan memudahkan dalam memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan betapa bohongnja keterangan pemimpin² Masjumi, PSI dan pemimpin² reaksioner lainnya tentang keharusan Indonesia mendjadi bagian dari keradjaan Belanda atau bagian dari Amerika Serikat, tentang „kesutjian” tudjuan perdjuangan DI dan TII dan tentang „djasa²” modal monopoli asing untuk pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemimpin² Masjumi, PSI dan pemimpin² reaksioner lainnya takut setengah mati kepada front persatuan nasional, karena mereka tahu bahwa kekuatan Rakjat yang bersatu dalam front persatuan nasional adalah yang akan menelandjangi perbuatan² mereka yang mesum dan yang akan menggagalkan tiap² perbuatan mereka yang anti-demokrasi dan anti-Indonesia.

Hanya front persatuan nasional, yang mempersatukan kaum Komunis dengan semua patriot, bisa menetapkan politik yang sesuai dengan kepentingan tanahair dan bangsa Indonesia dan bisa menjjamin terbentuknja suatu pemerintah yang sedia menjjalankan politik ini. Dan memang sesungguhnya, bahwa perubahan dalam politik hanya mungkin dengan bantuan perdjuangan kaum Komunis untuk kesatuan aksi yang se-luas²nya didalam bingkai front persatuan nasional yang kuasa, yang mampu mendesakkan perubahan² sematjam itu. Dan pembela² politik anti-Komunis seperti Sukiman, Jusuf Wibisono, Sjahrir, Hatta, Natsir dll. akan dianggap oleh semua orang yang berperasaan nasional sebagai badut² politik yang menggelikan.

Front persatuan nasional adalah front yang paling demokratis dalam komposisinya maupun dalam tjara bekerdjanja. Front persatuan nasional mengikat bagian yang sangat terbesar daripada Rakjat. Semua orang lelaki dan wanita Indonesia yang tidak menjukai pendjadjahan negeri asing atas Indonesia harus bersatu didalam atau berdiri dibelakang front ini. Hanya djika sudah dapat mempersatukan sebagian terbesar dari Rakjat Indonesia, kita bisa berkata tentang front persatuan nasional yang benar², yang luas dan yang kuat. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin berbitjara tentang front persatuan nasional yang benar², yang luas dan yang kuat, sebelum kaum tani dapat ditarik kedalam front ini, karena kaum tani dinegeri kita merupakan kira² 70% dari

penduduk. Dengan tidak ikutnja kaum tani berarti tidak ikutnja bagian jang terbesar dari Rakjat Indonesia, dan ini merupakan kelemahan jang sangat besar dari front persatuan nasional kita. Sampai sekarang baru kira² 7% dari kaum tani jang sudah terorganisasi. Djumlah ini adalah djumlah jang masih sangat ketjil.

Oleh sebab itulah, kewajiban kaum Komunis jang per-tama² ialah menarik kaum tani kedalam front persatuan nasional. Ini artinja, agar kaum tani dapat ditarik, kewajiban jang terdekat daripada kaum Komunis Indonesia ialah melenjapkan sisa² feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal, mensita tanah tuantanah dan memberikan dengan tjuma² tanah tuantanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak-bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka. Langkah pertama dalam pekerdjaan dikalangan kaum tani ialah membantu perdjuaan mereka untuk kebutuhan se-hari², untuk mendapatkan tuntutan-bagian kaum tani. Dengan demikian berarti mengorganisasi dan mendidik kaum tani kearah tingkat perdjuaan jang lebih tinggi. Inilah dasar untuk membentuk persekutuan kaum buruh dan kaum tani, sebagai basis daripada front persatuan nasional jang kuasa.

Revolusi agraria adalah hakekat revolusi demokrasi Rakjat Indonesia. Revolusi agraria adalah sjarat untuk pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan ekonomi bagi Indonesia. Dengan kaum tani jang melarat, jang tak-bertanah atau tak tjukup mempunyai tanah, tidak mungkin mengadakan pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan ekonomi negeri. Djadi, sjarat pertama dan sjarat jang tidak boleh tidak untuk pembangunan Indonesia, untuk industrialisasi dan kesedjahteraan ekonomi negeri, ialah pelaksanaan sembojan „tanah untuk kaum tani“.

Dengan menitikberatkan pekerdjaan pada menarik kaum tani, samasekali tidak berarti bahwa pekerdjaan dikalangan kaum buruh, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional dikota dilengahkan. Dan djuga samasekali tidak berarti melengahkan pembikinan blok² kerdjasama dengan partai² dan organisasi² lain. Pengalaman Rakjat Indonesia sendiri mengadjarkan, bahwa pembentukan blok² kerdjasama didalam maupun diluar parlemen dengan partai² dan organisasi² lain bisa memberi manfaat jang

tidak ketjil artinja, misalnja dalam menggagalkan Razia Agustus Sukiman tahun 1951, dalam menggagalkan pertjobaan kup sosialis kanan dan kaum militeris pada 17 Oktober 1952, dalam membentuk kabinet Wilopo tahun 1952 dan dalam membentuk kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953, jang atas desakan Rakjat berdjandji akan mendjalankan program² jang demokratis sesuai dengan tuntutan² rapat² umum dan demonstrasi² Rakjat.

Diantara anggota Partai, sesudah sedikit mempelajari pengalaman revolusi Tiongkok, ada jang berpendapat bahwa karena jang terpenting ialah membangkitkan kaum tani agar turutserta dalam perdjuaan, maka semua Komunis mesti meninggalkan kota dan bekerdja dikalangan kaum tani. Pendapat ini tentu sadja salah. Pertama perlu dinjatakan bahwa kaum Komunis Tiongkok tidak pernah mengetjilkan arti bekerdja dikalangan kaum buruh. Djustru sebaliknya, mereka telah memberikan arti jang besar kepada pekerdjaan dalam kota, teristimewa diwaktu mendjalankan peperangan gerilja didaerah luar kota. Kedua, ada perbedaan² tertentu dalam keadaan geografi dan dalam hal perkembangan politik antara Indonesia dan Tiongkok jang harus kita perhatikan.

PKI harus terus tetap mendjalankan pekerdjaan dikalangan kaum buruh, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional di-kota². Semangat inteligensia dan pemuda pelajar dan tekad mereka untuk mengabdikan kepada Rakjat pekerdja banjak artinja bagi gerakan revolusioner. Ini sudah dibuktikan oleh pengalaman perdjuaan Rakjat Indonesia sendiri.

Dari keterangan diatas djelaslah, bahwa satu²nja garis politik PKI jang tepat ialah membentuk persekutuan buruh dan tani dan diatas dasar ini mendirikan front persatuan nasional. Berdasarkan keadaan jang njata dinegeri kita, berdasarkan kemungkinan² dan kemampuan Partai kita, adalah kewajiban Partai kita untuk membentuk ke-dua²nja sekaligus, jaitu mengorganisasi persekutuan buruh dan tani atas dasar program agraria jang revolusioner dan bersamaan dengan itu memperbaiki dan memperkuat front persatuan nasional dalam bentuk blok² kerdjasama dengan partai² dan organisasi² lain.

Musuh Rakjat Indonesia jang pertama, dilihat dari sudut besarnya kekuasaan diberbagai lapangan, terutama dilapangan

ekonomi, ialah imperialisme Belanda. Oleh karena itulah front persatuan nasional per-tama² harus ditudjukan kepada melikwidasi kaum imperialisme asing di Indonesia. Per-tama² tudjuan front ini mestilah pengusiran kaum imperialis Belanda dan kekuatan² bersendjata mereka dari Indonesia, pensitaan dan nasionalisasi milik kaum pendjadjah Belanda, penarikan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan pernajaan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Tetapi, bilamana imperialisme Amerika dan imperialisme lainnja memberikan bantuan bersendjata kepada pendjadjah Belanda dan kakitangannja bangsa Indonesia, maka perdjungan mesti diarahkan kepada semua imperialisme di Indonesia, milik² mereka harus disita dan dinasionalisasi.

3. Pemerintah Ali Sastroamidjojo Dibentuk Sebagai Hasil Dari Pertentangan² Diantara Kalangan² Jang Berkuasa Didalam-negeri Dan Atas Desakan Persatuan Rakjat

Sebagai hasil dari pertentangan² diantara kalangan² jang berkuasa didalamnegeri dan atas desakan persatuan Rakjat, pemerintah Sukiman jang ultra-reaksioner telah djatuh dan digantikan oleh pemerintah Wilopo jang mendjandjikan tindakan² jang demokratis. Kemudian memang terbukti, bahwa pemerintah Wilopo dalam bulan² ketika baru dibentuk telah melakukan beberapa tindakan jang demokratis.

PKI dan seluruh kekuatan demokratis segera menghentikan sokongannja kepada pemerintah Wilopo, setelah ternjata bahwa pemerintah ini bertindak anti-demokrasi dan anti-nasional, berhubungan dengan lemahnja elemen demokratis jang ada didalamnja dan karena politik dari menteri² partai Masjumi dan PSI jang reaksiனர் (13). Pemerintah Wilopo kemudian djatuh, sebagai hasil dari pertentangan² diantara kalangan² jang berkuasa didalamnegeri dan atas desakan kekuatan demokratis.

Sebagai hasil dari pertentangan² diantara kalangan² jang berkuasa didalamnegeri dan atas desakan persatuan Rakjat, sesudah hampir dua bulan mengalami krisis pemerintah, pada tanggal 30 Djuli 1953 terbentuklah pemerintah Ali Sastroamidjojo jang mempunyai program jang lebih demokratis dan lebih tegas daripada

program pemerintah Wilopo. Sebagaimana djuga kepada pemerintah Wilopo sebelum ia melakukan tindakan² jang anti-demokrasi dan anti-nasional, maka PKI memberikan sokongannja kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo.

Sikap PKI terhadap kabinet Wilopo dan terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo adalah sikap jang tepat. PKI memberikan kesempatan bekerdja kepada sesuatu pemerintah dengan sjarat bahwa pemerintah itu memberi kesempatan berkembang kepada gerakan Rakjat. PKI mendasarkan politiknja atas analisa Marxis mengenai keadaan jang kongkrit dan perimbangan kekuatan. Adalah satu avonturisme djika PKI, karena mengharapkan terbentuknja pemerintah jang lebih baik, tidak memberikan sokongannja kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo jang sekarang ini, sehingga bisa berakibat pemerintah djatuh kedalam kekuasaan partai Masjumi-PSI jang ultra-reaksioner, jang pasti akan menindas gerakan Rakjat dengan kedjam. Tetapi, PKI djuga tidak memandang pemerintah Ali Sastroamidjojo sekarang sebagai pemerintah front persatuan nasional atau sebagai pemerintah jang benar² progresif.

Keadaan jang tidak stabil di Indonesia sekarang ini bisa berkembang sebagai berikut:

Pertama: Atas desakan massa pemerintah Ali Sastroamidjojo bisa memberikan konsesi² tertentu kepada Rakjat, gerakan Rakjat bisa mendapat sedikit kemadjuan dan pemerintah Ali Sastroamidjojo dengan demikian tetap pada kedudukannja.

Kedua: Pemerintah Ali Sastroamidjojo, djika bertindak anti-demokrasi dan anti-nasional, berhubungan dengan lemahnja elemen demokratis dalam pemerintah, bisa mengalami pengalaman pemerintah Wilopo, jaitu didjatuhkan oleh kekuatan² demokratis dan atas desakan kekuatan² demokratis dibentuk suatu pemerintah jang lebih memenuhi sjarat² untuk bertindak lebih demokratis dan lebih tegas.

Ketiga: Kaum reaksiனர் dan imperialis, dengan mengambil keuntungan dari politik pemerintah jang bertudjuan membatasi gerakan Rakjat dan karenanja tidak mendapat sokongan Rakjat mungkin akan menggulingkan pemerintah Ali Sastroamidjojo dan menggantinya dengan suatu pemerintah reaksiனர்.

Keempat: Pemerintah Ali Sastroamidjojo, jang menggunakan so-

kongan Rakjat untuk memperkuat kedudukannya dan karena itu bisa mendesak Belanda untuk memberikan konsesi² yang tertentu, bersamaan dengan itu, karena takut akan meluasnya gerakan Rakjat, bisa mengubah politiknya yang setengah² sekarang, dan bersama² dengan kaum imperialis dan kaum reaksioner melakukan serangan terhadap Rakjat.

Partai Komunis Indonesia dan Rakjat Indonesia mesti waspada, mesti sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. PKI dan Rakjat Indonesia harus mendorong maju pemerintah Ali Sastroamidjojo, supaya pemerintah Ali Sastroamidjojo suka memberi konsesi² kepada Rakjat agar gerakan Rakjat bisa mendapat sedikit kemajuan. Tetapi jika pemerintah Ali Sastroamidjojo mendjurkan kekanan, maka PKI dan Rakjat Indonesia juga harus bersedia menghadapinya.

Pembentukan pemerintah Ali Sastroamidjojo adalah pelajaran yang penting bagi Rakjat Indonesia. Ia memberikan pelajaran bahwa perjuangan massa tidak hanya mampu merealisasi tuntutan ekonomi dan tujuan politik yang langsung, tetapi ia juga mengajarkan bahwa dengan perjuangan massa dapat diadakan perubahan didalam politik, bahwa dengan perjuangan massa dapat dibentuk suatu pemerintah yang agak maju. Pemerintah Ali Sastroamidjojo memecahkan soal tanah di Tandjung Morawa (14) dengan tjara yang berlainan dari politik reaksioner Masjumi dan PSI yang mau dipaksakan dengan melewati pemerintah Wilopo. Putusan Pemerintah Ali Sastroamidjojo mengenai soal tanah di Tandjung Morawa mendapat sambutan hangat dari kaum tani. Rakjat Indonesia harus terus mendesak, agar bagian² dari program pemerintah Ali Sastroamidjojo yang demokratis dijalankan dengan konsekwen, sesuai dengan keinginan bagian terbesar Rakjat Indonesia. Inilah djaminannya supaya pemerintah Ali Sastroamidjojo bisa dalam waktu yang lama sedjalan dengan Rakjat Indonesia. Dan inilah pula djaminannya supaya politik anti-demokrasi, anti-nasional dan anti-Indonesia dari pemimpin Masjumi, PSI dan pemimpin² reaksioner lainnya terus-menerus mengalami kegagalan.

Kekalahan politik dari pemimpin² Masjumi, PSI dan pemimpin² reaksioner lainnya telah membuat mereka makin lama makin matagelap. Hubungan politik antara mereka dengan kaum impe-

rialis Belanda dan Amerika, dengan gerombolan DI dan TII, dengan kaum militeris yang tersangkut dalam pertjobaan kup pada tanggal 17 Oktober 1952, dan ini dipengaruhi lagi oleh kemenangan sementara dari kup yang diorganisasi oleh Amerika dibawah pimpinan fasis Zahedi di Iran, merupakan bahaya yang kongkrit bagi Indonesia. Keadaan ini meletakkan kewajiban yang lebih berat diatas pundak tiap² Komunis dan tiap² patriot Indonesia.

Kewajiban Partai Dilapangan Politik Dalamnegeri Sekarang Adalah Sebagai Berikut :

1) *Mentjegah keruntuhan Indonesia yang disebabkan oleh tjengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dengan berdjuaug untuk pembatalan persetudjuan KMB, untuk kemerdekaan nasional yang penuh dan untuk perubahan² demokratis; melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan mempertahankan Irian Barat sebagai wilajah Republik Indonesia.*

2) *Melakukan pekerdjaan se-hari² dikalangan kaum buruh, kaum tani dan massa Rakjat lainnya, menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani dan memperbaiki serta memperkuat front persatuan nasional.*

3) *Mendjundjung pandji² demokrasi parlementer yang mau dihapuskan oleh pemimpin² Masjumi-PSI dan memobilisasi massa untuk membasmi gerombolan² DI, TII, Bambu-runtjing, Gerajak Merbabu-Merapi dan gerombolan² teror lainnya.*

4) *Menjokong pemerintah Ali Sastroamidjojo dan mendorong pemerintah ini supaya memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat sesuai dengan Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia sendiri.*

5) *Meninggikan aktivitet politik Rakjat, memperkuat patriotisme dan menanamkan kewaspadaan politik terhadap provokasi², intimidasi², perbuatan² teror dan kup dari kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri.*

PARTAI

1. Hubungan Kebenaran Garis Politik Partai Dengan Pembangunan Partai

Rapat Pleno Central Komite bulan Djanuari 1951 (15), dimana diadakan kritik dan selfkritik dikalangan anggota² Central Komite berhubung dengan adanya penjelewengan ideologi dan politik dari beberapa anggota Central Komite, dan yang berakhir dengan kemenangan ideologi dan politik proletar atas ideologi dan politik non-proletar, mempunyai akibat yang baik bagi perkembangan Partai kita. Demikian pula lahirnya rentjana *Konstitusi Partai* dalam rapat Pleno Central Komite bulan April 1951 (16) menjadi dorongan yang besar untuk perkembangan Partai diseluruh Indonesia, untuk meninggikan tingkat politik Partai, untuk kehidupan demokrasi intern Partai, untuk kehidupan kritik dan selfkritik didalam Partai, untuk memperkuat disiplin Partai, untuk kesatuan ideologi dan kesatuan tenaga Partai.

Banyak yang kejadian sesudah Sidang Pleno Central Komite yang bersedjarah itu. Kejadian² yang banyak ini memberi latihan² kepada anggota², kader² dan pimpinan Partai kita. Partai kita dilatih untuk menggunakan tiap² kesempatan yang ada semaximum-maximumnya untuk meluaskan pengaruh Partai dan untuk memperhebat pembangunan Partai. Di-tengah² pukulan² reaksi yang terus-menerus, Partai dihadapkan dengan masalah² yang pokok dan yang paling urgen untuk dipetjahkan, yaitu: *pertama*, masalah menghalang front persatuan nasional yang berdasarkan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan *kedua*, masalah membangun Partai Komunis Indonesia yang dibolsjewikkan, yang meluas diseluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Razzia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Djanuari 1951 baru saja enam

bulan mulai dengan pekerdjaannya mengkonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan dimana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani. Kesulitan Partai dalam mengatasi Razzia Agustus Sukiman adalah juga karena disebabkan kesalahan² tjara bekerja dikalangan tjalon-anggota, anggota dan kader Partai berhubung masih banjaknya elemen² sektaris dan masih adanya elemen² kapitulator dan avonturis didalam Partai.

Taktik yang tepat yang digariskan oleh Politbiro Central Komite ketika itu, yaitu taktik memisahkan burdjuasi nasional dari burdjuasi komprador yang ultra-reaksioner yang dipelopori oleh Sukiman-Subardjo-Wibisono, adalah bersifat menentukan dalam menggagalkan Razzia Agustus Sukiman. Taktik ini, sesudah diadakan penerangan yang intensif, diikuti dengan bulat oleh seluruh Partai dan oleh massa yang dibawah pimpinan Partai. Tulisan² dalam „Bintang Merah” merupakan petundjuk² yang penting bagi kader² dan anggota² Partai untuk mengatasi bahaya fasisme ketika itu. Taktik Partai berhasil, pemerintah ultra-reaksioner yang dikepalai oleh Sukiman-Subardjo-Wibisono makin lama makin terisolasi dan akhirnya terpaksa turun panggung. Burdjuasi nasional sendiri menjadi sedikit tjondong kekiri, dan ber-angsur² mengambil tempatnya yang sewadjarnya, yaitu tempat bersama² dengan kaum buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil kota dalam perjuangan melawan kaum komprador dan imperialisme Belanda.

Kebenaran garis politik Partai sangat besar pengaruhnya pada pekerdjaan membangun Partai dan pada perkembangan Partai. Kepertjajaan massa makin besar kepada pimpinan dan politik Partai. Beberapa anggota yang pada permulaan Razzia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika „Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razzia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil mentjiptakan „Peristiwa Madiun” kedua, karena di-mana² ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.

Atas petundjuk² Politbiro Central Komite dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali disemua

organisasi Partai. Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razzia Agustus dengan apa yang dinamakan „diskusi teori” yang diadakan setjara periodik, disamping apa yang dinamakan „diskusi tentang pekerjaan praktis” yang juga dilakukan setjara periodik didalam grup, resort, fraksi dan comite Partai. Demokrasi intern Partai, kritik dan selfkritik dan diskusi² tentang soal² teori dan soal² pekerjaan sehari² sekarang sudah menjadi kebiasaan didalam Partai kita. Satu kemajuan yang tidak ternilai artinya bagi perkembangan Partai kita. Disamping itu semangat-Partai dari tjalon-anggota, anggota dan kader Partai terus tumbuh sesuai dengan perkembangan Partai disegala lapangan. Hal ini tidak mungkin kedjadian di-waktu² yang lampau, berhubungan tidak adanya kebulatan dalam pimpinan dan karena sifat liberal daripada pimpinan.

Kedjadian yang penting yang terdjadi pada akhir Razzia Agustus ialah *Konferensi Nasional Partai* yang dilangsungkan pada permulaan tahun 1952. Dalam Konferensi Nasional ini dibitjarkan dengan mendalam politik Partai terhadap pemerintah Sukiman-Subardjo-Wibisono, soal membasmi gerombolan teror DI dan TII, soal menggalang front persatuan dengan burdjuasi nasional, soal memperkuat ideologi Partai, masalah peluasan anggota dan masalah² organisasi lainnya. Diskusi mengenai semua atjara yang dibitjarkan dalam Konferensi Nasional ini sampai kepada kesimpulan perlunya melenjapkan sektarisme, kapitulasiisme dan avonturisme, sebagai djaminan terlaksananya putusan² Konferensi.

Dalam Konferensi Nasional sangat dirasakan betapa erat hubungannya antara masalah garis politik Partai dengan masalah pembangunan Partai. Garis politik Partai yang menitikberatkan kewajiban Partai pada tugas menggalang front persatuan nasional anti-pemerintah-Sukiman yang ultra-reaksioner, hanya bisa dipetjahkan djika masalah organisasi yang terpenting ketika itu dipetjahkan, yaitu peluasan keanggotaan dan peluasan organisasi Partai. Dengan anggota dan tjalon-anggota yang ketika itu berjumlah hanya 7.910 dan dengan organisasi Partai yang ketika itu ketjil dan sempit, adalah tidak mungkin melaksanakan kewajiban politik yang luas dan berat seperti diatas, yaitu menjatuhkan

pemerintah Sukiman yang mendapat sokongan penuh dari imperialisme Amerika.

Mengingat banyaknya pekerjaan yang dihadapi oleh Partai sehingga banyak kader yang mesti merangkap sampai tujuh matjam pekerjaan dalam pimpinan Partai dan organisasi massa, dan mengingat pula bahwa kebenaran politik Partai dan makin berkurangnya elemen² sektaris didalam Partai telah menarik massa yang luarbiasa besarnya yang ingin masuk kedalam Partai, maka Politbiro merentjanakan peluasan keanggotaan. Konferensi Nasional menjatudjui rentjana Politbiro untuk meluaskan keanggotaan dari 7.910 menjadi seratus ribu dalam 6 bulan.

Rentjana peluasan keanggotaan menimbulkan aktivitas yang besar dikalangan tjalon-anggota, anggota dan kader Partai. Rentjana peluasan keanggotaan ditutup dengan hasil 126.671 anggota dan tjalon-anggota, artinya hasil yang melebihi rentjana. Bersamaan dengan berdjalanja rentjana peluasan anggota ini juga dipetjahkan soal² mengorganisasi tjalon-anggota dan anggota, soal pendidikan politik, soal memperkuat ideologi, soal menempatkan kader dan soal kewaspadaan politik. Kampanje pendidikan untuk tjalon-anggota, untuk anggota, untuk kader dan juga untuk massa diadakan dengan rentjana tertentu.

Kegiatan² Partai selama Razzia Agustus dalam hal menggalang front persatuan nasional dan dalam pembangunan Partai, telah menjadi faktor yang terpenting bagi perkembangan kekuatan demokrasi. Pertentangan diantara kalangan yang berkuasa sendiri dan desakan dari kekuatan demokratis telah menyebabkan jatuhnya pemerintah Sukiman dan diganti dengan pemerintah yang agak maju, yaitu pemerintah Wilopo. Partai memberi kesempatan bekerja kepada pemerintah ini, sebagai usaha untuk menjegah agar pemerintah tidak jatuh kembali ketangan Sukiman-Hatta cs. dan supaya terbuka kesempatan bagi Partai dan bagi kekuatan² demokratis lainnya untuk berkembang memperkuat diri.

Selama pemerintah Wilopo, Partai telah memperbaiki dan memperkuat pekerjaan menggalang front persatuan nasional. Pekerjaan Partai yang makin baik untuk front persatuan nasional membawa perbaikan² bagi perkembangan Partai, dan demi-

kian pula sebaliknya, bertambah baik pekerjaan untuk pembangunan Partai menjadi bertambah baik pula pekerjaan untuk front persatuan nasional.

Anggota dan tjalon-anggota Partai yang tadinya kurang dari 10 ribu yang organisasinya tadinya hanya meluas di Djawa dan Sumatera dan yang terisolasi dari kelas² dan golongan² demokratis lainnya dalam tahun 1952 telah mendapat kemungkinan meluaskan keanggotaannya menjadi lebih dari 100 ribu, telah meluaskan diri di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Ketjil dan Maluku, telah mendapat simpati dan sokongan dari elemen² demokratis yang luas diluar Partai.

Taktik Partai yang tepat terhadap pemerintah Wilopo telah memperbaiki dan melapangkan jalan bagi pekerjaan Partai menggalang persatuan dengan burdjuasi nasional, persatuan yang petjah sedjak pertengahan tahun 1948, dengan memihaknya kaum burdjuasi nasional kefihak kaum komprador yang dipelopori oleh Hatta-Sukiman-Natsir yang menjatakan perang terhadap kaum buruh, kaum tani dan elemen² demokratis lainnya (Peristiwa Madiun). Kembalinya burdjuasi nasional kedalam front persatuan nasional anti-imperialisme berarti tambahan kekuatan yang penting pada front ini. Djika Partai tidak tjepat dan tepat mengadakan hubungan kembali dengan burdjuasi nasional, maka tidak akan setjepat sekarang perkembangan front persatuan nasional dan perkembangan, perkokohan dan pembolsjewikan Partai kita.

Berkat front persatuan nasional dan Partai Komunis yang bertambah kuat inilah, pertjobaan kup dari kaum sosialis kanan pada tanggal 17 Oktober 1952 dapat digagalkan. Kegagalan pertjobaan kup 17 Oktober ini telah memberi kekuatan yang baru kepada front persatuan nasional dan kepada PKI serta partai² demokratis lainnya.

Perkembangan front persatuan nasional dan pembangunan Partai mempunyai kemungkinan² yang lebih besar dengan terbentuknya pemerintah Ali Sastroamidjojo yang komposisi dan programnya lebih maju dari pemerintah Wilopo, dan oleh karena itu mendapat sokongan dari PKI dan dari partai² dan golongan² demokratis lainnya.

Kelemahan yang serius dari Partai sekarang ialah, bahwa ang-

gota² dan kader² Partai belum mengerti benar tentang hubungan² agraria dan tentang tuntutan serta penghidupan kaum tani. Oleh karena itu Partai belum dapat menarik sebagian besar dari kaum tani kedalam front persatuan nasional dan djumlah keanggotaan Partai dari kalangan kaum tani, menurut perbandingan, adalah masih sangat sedikit. Sekarang baru kira² 7% dari kaum tani yang sudah terorganisasi dibawah pimpinan Partai dan keanggotaan Partai tidak sampai 50% datangnya dari kalangan kaum tani. Program Agraria Partai yang dibikin dalam Razzia Agustus dan kemampuan bekerja dari anggota² Partai, ternyata belum dapat menarik dan memobilisasi kaum tani setjara besar²an. Dengan ini berarti, bahwa front persatuan nasional kita belum mempunyai basis yang kuat, dan dalam keadaan sulit, misalnja djika burdjuasi nasional sekali lagi tidak setia kepada perdjjuangan melawan imperialisme asing seperti ditahun 1948, maka Partai tidak mempunyai sandaran kaum tani yang kuat.

Front persatuan nasional kita sekarang, walaupun sudah bisa menjapai beberapa kemenangan dalam perdjjuangannya, masih tetap belum berdiri diatas fondamen yang kuat. Keadaan ini akan terus selama Partai belum bekerja yang benar untuk massa kaum tani dan selama belum banyak orang dari kalangan kaum tani, terutama tani miskin dan tani tak-bertanah, masuk Partai dan menjadi kader Partai kita.

2. Dua Kewadajiban Partai yang Sangat Urgen

Djelaskan, bahwa masalah yang sangat urgen bagi Partai kita sekarang ialah: *pertama*, masalah penggalangan front persatuan nasional anti-imperialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme; *kedua*, meneruskan pembangunan PKI yang dibolsjewikkan, yang meluas diseluruh negeri dan yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Sjarat subjektif dan sjarat objektif tjukup untuk membangun front persatuan nasional yang luas dengan basis persekutuan buruh dan tani dan tjukup untuk membangunkan Partai Komunis yang dibolsjewikkan, Partai Komunis tipe Lenin.

A. Masalah Menggalang Front Persatuan Nasional

Sedjak Partai kita berdiri pada tahun 1920, front persatuan dari proletariat dengan burdjuasi nasional Indonesia telah melalui beberapa keadaan yang berlainan dan dalam beberapa periode yang berlainan pula.

Periode pertama (1920-1926) ialah periode dimana Partai masih gelap samasekali tentang perlunya bersatu dengan burdjuasi nasional, dimana slogan Partai ialah „sosialisme sekarang djuga“, „Sovjet Indonesia“ dan „diktatur proletariat“. Penjelewengan kekiri daripada Partai ini dikritik setjara tepat dan kena oleh Stalin dalam pidatonja dimuka peladjar Universitas Rakjat Timur pada tanggal 18 Mei 1925, dimana dikatakannya bahwa penjelewengan kekiri ini mengandung bahaya mengisolasi Partai dari massa dan mengubah Partai menjadi sekte. Stalin mengatakan, bahwa perjuangan yang teguh melawan penjelewengan ini adalah sjarat yang penting untuk melatih kader² yang sungguh² revolusioner bagi tanah² djadjahan dan negeri² tergantung di Timur.

Periode kedua (1935-1945) ialah periode front persatuan dengan burdjuasi nasional melawan fasisme. Partai mendapatkan garis politiknya yang benar ini, terutama ialah berkat pimpinan kawan Musso yang dalam tahun 1935 datang ke Indonesia setjara illegal dari luarnegeri. Kedatangan kawan Musso tidak hanya dapat memberikan pimpinan politik kepada Partai, tetapi dibawah pimpinan kawan Mussolah dibangun kembali Partai yang sedjak teror pemerintah kolonial Belanda tahun 1926-1927 banjak mengalami kerusakan² dan tidak bisa segera terhimpun kembali. Walaupun PKI ketika itu bekerja illegal, tetapi dengan melewati GERINDO dan organisasi² lain PKI mengambil bagian yang aktif dalam menggalang front anti-fasis, sebelum Djepang menduduki Indonesia maupun selama zaman pendudukan Djepang. Front anti-fasis tidak hanya berhasil menarik burdjuasi nasional, tetapi djuga sebagian dari burdjuasi komprador merupakan tambahan kekuatan dalam front anti-Djepang. Tetapi setelah balatentara Djepang menduduki Indonesia, sebagian besar burdjuasi nasional dan boleh dikatakan semua burdjuasi komprador menjalankan politik bekerjasama dengan Djepang. Burdjuasi nasional menjalankan politik

kerdjasama dengan Djepang, setelah mereka melihat bahwa kekuatan Rakjat melawan Djepang tidak begitu besar dan mereka mempunyai illusi bahwa Djepang akan memberikan „kemerdekaan“ kepada Indonesia.

Periode ketiga (1945-1948) ialah periode front persatuan nasional bersendjata melawan imperialisme Belanda. Burdjuasi nasional kembali masuk kedalam front persatuan nasional setelah melihat bahwa kekuatan revolusi Rakjat adalah besar. Revolusi Rakjat yang mempunyai kekuatan besar telah membikin burdjuasi nasional pada tahun² permulaan revolusi mempunyai sikap yang teguh. Kelemahan Partai dilapangan politik, ideologi dan organisasi menjejaskan Partai tidak mampu memberikan pimpinan kepada keadaan objektif yang sangat baik ketika itu. Dalam revolusi ini Partai telah meninggalkan kebebasannya dalam politik, ideologi dan organisasi dan Partai tidak mementingkan pekerdjaannya dikalangan kaum tani, dan inilah sebab² pokok daripada kegagalan revolusi. Lemahnya pimpinan revolusi menjejaskan revolusi terus-menerus mengalami kekalahan² dilapangan militer, politik dan ekonomi, dan kekalahan² ini telah membikin ragu burdjuasi nasional dan akhirnya mereka memilih pihak kaum komprador dan imperialis. Resolusi „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia“ yang disahkan oleh Konferensi PKI bulan Agustus 1948 adalah djalan keluar dari keadaan sulit yang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu. Tetapi pelaksanaan resolusi ini didahului oleh provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang menelorkan „Peristiwa Madiun“.

Periode keempat (1948-1951) ialah periode dimana burdjuasi nasional memisahkan diri dari front persatuan anti-imperialisme dan memihak pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang memprovokasi „Peristiwa Madiun“. Burdjuasi nasional ikut berkapitulasi kepada imperialisme dengan menjetudjui persetudjuan KMB yang chianat, yang ditjiptakan oleh Hatta, Sultan Abdul Hamid dan Mohammad Roem. Politik burdjuasi nasional yang memisahkan diri dari front persatuan terasa sangat berat bagi Partai, karena Partai berhubung kelemahan pekerdjaannya dikalangan kaum tani, belum dapat bersandar kepada kaum tani. Keadaan ini memaksa Partai menjalankan taktik untuk mendapatkan waktu guna mena-

rik kembali burdjuasi nasional kedalam front persatuan anti-imperialisme dan untuk memperbaiki serta memperkuat pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Kebenaran taktik Partai ini dibuktikan oleh perkembangan politik dalam negeri yang baru yang dimulai pada permulaan tahun 1952.

Periode kelima (1951 sampai sekarang) ialah periode dimana persatuan dengan burdjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan kaum buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunyai fondamen yang kuat. Dalam tingkat ini Partai dengan keras harus melawan penjelewengan kekanan yang memberi arti ber-lebih²an kepada persatuan dengan burdjuasi nasional dengan mengetjilkan arti pimpinan klas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaja ini ialah bahaja melepaskan sifat bebas daripada Partai, bahaja meleburkan diri dengan burdjuasi. Disamping itu, sudah tentu Partai juga harus dengan keras mentjegah penjelewengan kekiri, mentjegah sektarisme, jaitu sikap yang tidak mementingkan politik front persatuan dengan burdjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga. Karena klik burdjuasi komprador bersandar pada imperialisme yang berlainan, dan karena politik Partai sekarang ini per-tama² ditudjukan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing, maka telah timbul pertentangan yang bertambah tajam dikalangan kaum imperialis sendiri dan pertentangan² ini dengan sendirinja juga timbul dikalangan komprador²nja. Terbentuknja front persatuan dengan burdjuasi nasional ini membukakan kemungkinan² baru bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerdjaan Partai yang terdekat, jaitu menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme. Pembangunan Partai dan pengalaman persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah djaminan bagi pimpinan proletariat atas front persatuan nasional.

Dari pengalaman² diatas dapat kita tarik kesimpulan² sbb.:

1. *Burdjuasi nasional Indonesia*, karena juga tertekan oleh imperialisme asing, dalam keadaan tertentu dan sampai batas² yang tertentu, dapat turut serta dalam perdjungan melawan imperialisme. Dalam keadaan tertentu demikian proletariat Indonesia

harus menggalang persatuan dengan burdjuasi nasional dan mempertahankan persatuan itu dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan yang lebih tertentu lagi, djika politik Partai pada suatu waktu hanya ditudjukan kepada sesuatu imperialisme, maka sebagian dari-pada burdjuasi komprador bisa juga merupakan tambahan kekuatan dalam melawan imperialisme yang tertentu itu. Tetapi walaupun demikian, burdjuasi komprador masih tetap sangat reaksioner dan masih tetap bertudjuan untuk menghantjurkan Partai Komunis, menghantjurkan gerakan proletariat dan gerakan demokratis lainnja.

2. Karena lemahnja burdjuasi nasional Indonesia dilapangan ekonomi dan politik, maka dalam keadaan sedjarah yang tertentu burdjuasi nasional yang wataknja bimbang itu bisa gontjang dan mengchianat. Oleh karena itu proletariat dan Partai Komunis Indonesia harus senantiasa berdjaga-djaga akan kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu burdjuasi nasional tidak ikut dalam front persatuan, tetapi dalam keadaan lain lagi mungkin ikut kembali.

3. Dengan tidak ikutnja kaum tani, front persatuan nasional tidak mungkin kuat dan kuasa. Dengan tidak ikutnja kaum tani, front persatuan paling banjak hanya bisa menghimpun 20% Rakjat, jaitu kaum buruh, burdjuasi ketjil kota dan burdjuasi nasional. Sedangkan kaum tani djumlahnja kira² 70% daripada Rakjat Indonesia. Oleh karena itulah, front persatuan nasional yang kuat dan kuasa, ialah front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Disamping kaum tani adalah sekutu proletariat yang teguh, maka burdjuasi ketjil kota yang djumlahnja tidak ketjil adalah sekutu proletariat yang bisa diper-tjaja. Oleh karena itu, pekerdjaan dikalangan burdjuasi ketjil kota adalah juga pekerdjaan yang penting.

4. Dalam perdjungan untuk tertjiptanja front persatuan nasional, baik dengan kerdjasama dengan berbagai partai politik maupun dengan kerdjasama dengan orang² dari berbagai aliran dan ideologi, Partai tidak boleh mendjadi terlebur dengan mereka. Partai mesti tetap memegang kebebasannja dalam lapangan politik, ideologi dan organisasi. Untuk ini Partai mesti mempersendjatai fungsionaris²nja dengan pengertian yang terang tentang program

dan taktik Partai. Front persatuan dengan partai² politik dan dengan klas² jang lain adalah merupakan suatu persekutuan atas dasar tuntutan² bersama dan aksi bersama. Bersama dengan ini, djika perlu, kaum Komunis mesti mengkritik tindakan² jang reaksioner dari sekutunja, mesti menentang sikap mereka jang bimbang. Disamping itu Partai mesti memperingatkan anggota²nja terhadap sektarisme.

Djelaslah bagi kita, bahwa Partai kita harus setjara benar memetjahkan masalah front persatuan, masalah bersatu dan berpisah dengan burdjuasi nasional dan masalah persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan nasional.

B. Masalah Pembangunan Partai

Djika Partai sudah mempunyai garis politik jang benar, maka soalnya ialah bagaimanakah supaja garis politik Partai jang benar itu bisa didjalankan dengan konsekwen dan mendjadi garis massa? Bagaimanakah supaja semua kemungkinan jang digariskan oleh Partai mendjadi kenjataan? Ini adalah bergantung kepada keadaan Partai. Dalam hal ini jang mendjadi pusat masalah ialah masalah mengenai Partai sendiri, masalah pembangunan Partai.

Kawan Stalin terus-menerus mengadjar kita, bahwa kalau kita mau menang dalam revolusi, kita harus mempunyai Partai revolusioner tipe Lenin. Dengan tiada Partai revolusioner jang demikian, jang dibangun menurut teori revolusioner dan menurut langgam Marx-Engels-Lenin-Stalin, jang bebas dari oportunisme, adalah tidak mungkin memimpin klas buruh dan memimpin massa Rakjat jang luas untuk menghapuskan imperialisme dan kakitangannya dari bumi Indonesia. Dengan perkataan lain, kalau kita mau menang dalam revolusi, kalau kita mau mengubah wadjah masjarakat jang setengah-djadjahan mendjadi Indonesia jang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah wadjah dunia, maka kita harus mempunyai Partai model Partai Komunis Uni Sovjet dan model Partai Komunis Tiongkok.

Dengan tiada teori Marxisme-Leninisme tidak mungkin kita mempunyai Partai demikian. Peranan pelopor daripada Partai hanja mungkin djika Partai dipimpin oleh teori jang madju. Hanja

Partai jang menguasai teori Marxisme-Leninisme jang bisa diper-tajai memelopori dan memimpin klas buruh dan massa Rakjat-banjak lainnja. Agar Partai kita mampu sepenuhnya memikul beban sedjarah jang besar dan berat dan agar mampu memimpin Rakjat Indonesia dari kemenangan jang satu kekemenangan jang lain, per-tama² Partai kita harus mentjiptakan kesatuan ideologi Marxis-Leninis didalam barisannya sendiri, meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis dari seluruh Partai dan mengkonsolidasi pimpinan Marxis-Leninis jang tepat. Partai kita hanja mungkin kuat dengan djalan meninggikan tingkat ideologi Marxis-Leninis daripada segenap anggota Partai. Hanja apabila kita menguasai ilmu Marxisme-Leninisme dan mempunyai kepertajaan kepada massa, berhubungan erat dengan massa dan memimpin massa madju kedepan, hanja dengan demikian kita bisa mendo-brak semua rintangan dan mengatasi semua kesulitan, dan dengan demikian kekuatan kita akan mendjadi tak terkalahkan.

Partai kita hanja bisa memenuhi kewadajiban sedjarah jang besar dan berat djika Partai terus-menerus melakukan perdjjuangan jang tidak kenal ampun terhadap kaum oportunist kanan maupun „kiri” didalam barisannya sendiri, djika Partai terus-menerus membersihkan kaum kapitulator dan pengchianat dari kalangannya sendiri dan djika Partai terus-menerus memelihara kesatuan dan disiplin didalam barisannya sendiri. Partai adalah barisan pimpinan daripada klas buruh, adalah benteng jang terkuat, adalah djenderal staf. Kemenangan tidak mungkin tertjapai djikalau didalam djenderal staf ini duduk kaum kapitulator, kaum oportunist dan pengchianat. Djika ini terdjadi, Partai mudah dihantjurkan, dihantjurkan tidak hanja dari luar tetapi djuga dari dalam.

Partai kita hanja mungkin memenuhi kewadajiban sedjarahnja jang besar dan berat, djika Partai tidak mendjadi sombong karena kemenangan² jang ditjapainya, djika Partai melihat kekurangan² didalam pekerdjaannya, djika Partai berani mengakui kesalahan²nja dan dengan terang²an dan djudjur memperbaikinja. Partai akan mendjadi tak terkalahkan djika Partai tidak takut pada kritik dan selfkritik, djika Partai tidak menjembunikan kesalahan dan kekurangan² dalam pekerdjaannya, djika Partai mengadjar dan

mendidik kader²nja menarik peladjaran dari kesalahan² pekerjaan Partai dan pandai memperbaikinja tepat pada waktunya.

Indonesia adalah negeri burdjuis ketjil, artinja negeri, dimana perusahaan pemilik² ketjil masih sangat banyak terdapat, terutama pertanian perseorangan yang kurang produktif. Partai kita dilingkungi oleh kelas burdjuis ketjil yang sangat besar ini, dan banyak anggota Partai kita datang dari kalangan kelas ini dan tidak dapat tidak, bahwa mereka yang masuk Partai kita ini membawa sedikit atau banyak fikiran² dan kebiasaan² burdjuis ketjil. Burdjuasi ketjil inilah yang menjadi basis sosial daripada dua macam penjakit subjektivisme didalam Partai kita, yaitu dogmatisme dan empirisme. Dua macam subjektivisme inilah yang merupakan dasar ideologi daripada mereka yang bersalah menjalankan oportunisme kanan dan „kiri” didalam Partai di-waktu² yang lampau.

Dogmatisme dan empirisme timbul dari dua ujung yang bertentangan. Kedua macam ideologi ini adalah sama² berat-sebelah. Kaum dogmatis mendasarkan sesuatu hanya kepada buku dan kepada dalil² teori yang ter-pisah², dan tidak melihat sesuatu sebagai yang hidup, berubah dan berkembang. Mereka membikin teori menjadi mati tak-berdaja karena dilepaskan hubungannya dengan praktek, dengan massa. Sebaliknya kaum empiris, mereka bekerja, mungkin kerasnja seperti kudabeban, tetapi dengan tidak mengetahui dari mana asal semua yang dikerdjakannya dan tidak mengetahui kemana tudjuannya dan bagaimana tjara yang tepat untuk mentjapai tudjuan itu. Mereka membikin praktek menjadi gelap karena tidak dipimpin oleh suatu teori, karena mereka mere-mehkan teori. Djelaslah, bahwa ke-dua²nja adalah tidak objektif, dan atas dasar berat-sebelah inilah kedua macam ideologi itu dalam menghadapi sesuatu soal praktis pada waktu yang tertentu, akan saling berhubungan dan bertemu pada titik pertemuan yang sama. Oleh karena itulah bukan jarang kita melihat, bahwa orang yang „kiri” didalam dan diluar Partai kita, dalam menghadapi masalah² praktis saling berhubungan dan bertemu dalam titik pertemuan yang sama dengan orang kanan didalam dan diluar Partai kita. Demikian juga sering kita melihat, bahwa orang seorang itu juga, bisa dari seorang yang tadinja „kiri” tiba² men-

jadi seorang kanan, atau sebaliknya, dengan tidak mengalami per-djuangan batin yang berat, terjdadi dengan sewadjaranja sadja.

Bagi Partai kita adalah sangat penting soal melawan subjektivisme, yaitu melawan dogmatisme maupun empirisme. Ke-dua²nja macam subjektivisme ini sama berbahajanja bagi Partai kita, dan yang paling berbahaja ialah subjektivisme yang tidak kita lawan dan kita serang. Pengalaman Partai kita menunjukkan, bahwa kekalahan² Partai dan kerusakan² didalam Partai (misalnja kekalahan dan kerusakan tahun 1926, kekalahan revolusi 1945-1948, kekalahan dalam melawan Provokasi Madiun serta kerusakan yang disebabkan olehnja) adalah disebabkan oleh kedua subjektivisme yang tersebut diatas, yaitu dogmatisme dan empirisme. Oleh karena itu, anggota dan tjalon-anggota Partai yang dihing-gapi penjakit ini harus mengisi kekurangan yang ada pada dirinya masing². Mereka yang mempunyai pengetahuan buku harus pergi kekenjataan yang hidup, supaya bisa maju dan tidak mati dalam mengeloni buku, supaya tidak menjalankan kesalahan dogmatisme. Mereka yang berpengalaman bekerja supaya pergi ke studi dan supaya membuatja dengan sungguh², agar dapat menjusun pengalaman²nja setjara sistimatis dan membikin sintese tentang pengalaman²nja agar dengan demikian meningkatkan diri dilapangan teori. Inilah djalan baginja untuk tidak menganggap pengalaman dirinya sendiri yang ter-putus² dan terbatas sebagai kebenaran umum, agar dengan demikian tidak menjalankan kesalahan empirisme.

Pokoknja ialah, supaya kita dalam pekerjaan kita dipimpin oleh pandangan Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Stalin menentang teori tanpa praktek dengan utjapannya, bahwa: „Teori menjadi tidak bertudjuan djika tidak dihubungkan dengan praktek revolusioner”. Stalin juga menentang praktek tanpa teori dengan utjapannya, bahwa: „Praktek meraba dalam gelap djika djalan-nja tidak disinari oleh teori revolusioner”.

Sifat-sempit burdjuis ketjil mendapat bentuk sektarisme dalam kehidupan politik dan dalam organisasi, sebagai tambahan pada sifat-sempit dalam ideologi. Subjektivisme berarti isolasi ideologi dari massa, didalam maupun diluar Partai. Sedangkan sektarisme berarti isolasi politik dan organisasi dari massa didalam dan diluar

Partai. Ke-dua^{nya} adalah dua segi dari barang jang satu dan sama, jaitu sifat-sempit burdjuis ketjil.

Untuk melawan subjektivisme didalam Partai kita adalah sangat perlu kita lakukan: *pertama*, mengadjar anggota² Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam menghitung kekuatan klas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota² kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi, agar dengan demikian bisa menentukan taktik perjuangan dan metode kerdja, dan dengan demikian membikin kawan² kita mengerti bahwa kesalahan dalam penjelidikan sesuatu keadaan jang njata akan menjebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme. Dua tjara inilah djuga jang dipakai oleh kaum Komunis Tiongkok sedjak tahun 1929 untuk melawan subjektivisme didalam Partai. Berhubung dengan dua hal inilah, mendjadi sangat penting arti daripada konferensi² jang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 dimana tiap² wakil Komite diwadjabkan membikin laporan tentang keadaan politik, sosial dan ekonomi daerahnja masing-masing, penting djuga artinja persetudjuan Politbiro atas uraian *Rakjat Indonesia Berdjuaug Untuk Kemerdekaan Nasional Jang Penuh (Menudju Indonesia Baru)* sebagai pidato untuk memperingati ulangtahun ke-33 Partai dan lebih penting lagi putusan Central Komite tentang *Rentjana Program PKI* jang diadjudkan kepada Kongres Nasional ke-V sekarang ini. Dengan demikian dapat kita harapkan, bahwa di-waktu² jang akan datang anggota dan kader-kader Partai akan lebih mengetahui tentang sedjarah, tentang keadaan politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan negerinja sendiri. Pengetahuan tentang semuanya ini adalah sjarat bagi Partai jang sudah dibolsjewikkan.

Bagaimana tjara jang paling berhasil untuk mengatasi subjektivisme dan sektarisme setjara besar-besaran didalam Partai kita? Karena Partai kita, berhubung dengan keadaan sedjarah, sebagian besar anggotanja adalah dari kalangan burdjuasi ketjil, maka untuk mengatasi ber-matjam² kesalahan dan untuk mengkonsolidasi kesatuan Partai, kita harus mengambil sikap jang serius dan hati², dan samasekali bukan sikap jang liberal dan ke-

susu. Dengan tidak kenal ampun kita harus mengupas tiap² kesalahan, menganalisa dan mengkritiknja setjara ilmu, agar dengan demikian kita akan lebih hati² lagi dalam pekerdjaan² kita dikemudian hari dan akan bekerdja lebih baik lagi. Tetapi, disamping mengkritik keras tiap² kesalahan, kita harus berusaha memperbaiki jang bersalah. Dengan demikian kita melakukan tugas kita setjara benar, jaitu membikin bersih ideologi Partai dan memelihara persatuan dikalangan kawan².

Gerakan jang diadakan oleh Partai kita dalam tahun 1952 untuk mempeladjar tulisan kawan Mau Tje-tung *Tentang Praktek dan Membasmi Liberalisme Dalam Partai* dan tulisan kawan Liu Sau-tji *Tentang Garis Massa* mempunyai arti jang sangat besar bagi usaha meninggikan tingkat ideologi Partai kita. Demikian djuga kemadjuan jang pesat dari penerbitan lektur Partai, terutama dengan terbitnja seperti tulisan Lenin *Komunisme „Sajap-Kiri“*, *Suatu Penyakit Kanak²*, dan akan terbitnja tulisan Stalin *Sedjarah Partai Komunis Uni Sovjet*, tulisan kawan Malenkov *Laporan Pada Kongres ke-19 Tentang Pekerdjaan Central Komite Partai Komunis Uni Sovjet* dan tulisan kawan Mau Tje-tung *Tentang Kontradiksi*, akan lebih meninggikan tingkat ideologi daripada Partai kita.

Kewadjaban Kita Untuk Memperkuat Partai Adalah sbb.:

1. *Meninggikan tingkat politik para tjalon-anggota, anggota dan kader Partai dan mejakinkan mereka akan eratnja saling hubungan antara kebenaran garis politik Partai dengan pembangunan Partai.*

2. *Mejakinkan seluruh Partai tentang dua kewadjaban Partai jang sangat urgen, jaitu pertama, penggalangan front persatuan nasional anti-imperialisme jang berbasiskan persekutuan kaum buroh dan kaum tani anti-feodalisme dan kedua, meneruskan pembangunan PKI jang dibolsjewikkan, jang meluas diseluruh negeri dan jang mempunyai karakter massa jang luas, jang sepenuhnya dikonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.*

3. *Melandjutkan peluasan keanggotaan dan organisasi Partai, menarik lebih banyak kaum tani kedalam barisan Partai — ter-*

utama kaum tani miskin dan tani tak-bertanah — menempatkan anggota² dan kader² Partai pada tempat yang lebih tepat, mengurangi rangkapan pekerjaan anggota dan kader² Partai. Mengadakan kontrol yang lebih baik atas tiap² pekerjaan Partai.

4. Mementingkan pekerjaan dilapangan ideologi didalam Partai dengan lebih banyak mempeladjar tulisan² Lenin, Stalin, Malenkov, Mao Tse-tung, Liu Sau-tji dan pemimpin² Partai lainnja, meneruskan perjuangan terhadap dogmatisme, empirisme, oportunisme, sektarisme dan liberalisme.

5. Lebih banyak mempeladjar sedjarah Indonesia, mempeladjar keadaan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan Indonesia sebagai dasar untuk menentukan taktik perjuangan dan metode kerja Partai.

6. Memperlengkapi Partai dan mempersendjatai fungsionaris² Partai dengan garis taktik yang tepat, garis organisasi yang tepat dan dengan program baru yang terang dan singkat mengenai semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia. Membikin program yang memenuhi keinginan massa ini menjadi program massa.

Kawan², dari laporan umum ini sekarang menjadi terang bagi kita beberapa segi yang pokok dari keadaan internasional, keadaan dalam negeri dan keadaan Partai kita, dan juga menjadi terang kewajiban Partai dilapangan politik luar negeri, dilapangan politik dalam negeri dan kewajiban kita untuk memperkuat front persatuan nasional dan memperkuat Partai. Dengan demikian juga menjadi jelas, apa yang menjadi dasar daripada Rentjana Program PKI yang menjadi atjara terpenting dalam Kongres ini.

Sesudah sidang Pleno Central Komite dalam bulan Oktober yang lalu ada beberapa kejadian luar negeri dan dalam negeri yang penting. Kejadian luar negeri, misalnja konferensi empat-besar di Berlin yang antara lain memutuskan untuk mengundang RRT dalam konferensi yang dihadiri oleh lima-besar untuk membitjarkan ketegangan² di Timur Djauh (17). Sedang kejadian² dalam negeri antara lain jalah mulai digulungnja komplotan kolonialis Belanda anti-Republik (18), adanja tindakan² pemerintah Indonesia yang kongkrit untuk mempertahankan Irian Barat se-

bagai wilayah Republik Indonesia dan untuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda (19). Semua kejadian ini memperkuat apa yang sudah ditjantumkan dalam laporan umum, menambah bukti bahwa gerakan perdamaian yang bertambah kuat dapat memaksa imperialisme Amerika untuk datang kemedja perundingan, dan bahwa dorongan Rakjat Indonesia yang terus-menerus terhadap Pemerintah telah memaksa Pemerintah mengambil sikap yang agak tegas terhadap kolonialisme Belanda.

Kita semuanya sadar, bahwa kewajiban yang dihadapi oleh kita kaum Komunis Indonesia adalah berat. Tentang ini juga dijelaskan oleh laporan umum ini. Tetapi kita juga sadar, bahwa kewajiban ini akan dapat kita penuhi, karena kita dalam pekerjaan sehari² disinari oleh teori² Marx, Engels, Lenin dan Stalin dan Fikiran Mao Tse-tung yang mahadjaja, dan karena kita dalam pekerjaan kita mendapat inspirasi dan teladan dari pengalaman² dua Rakjat dan dua Partai yang besar, jaitu Uni Sovjet dan Tiongkok.

Dibawah pandji² Lenin yang abadi, dengan bersatu dengan Rakjat dan pertjaja kepada kekuatan Rakjat Indonesia yang gagah-berani, kita pasti akan maju terus sampai kepada kemenangan kita, kemenangan sistim demokrasi Rakjat atas kekuasaan setengah-djadjahan dan setengah-feodal di Indonesia. Ini adalah tudjuan Rakjat dan oleh karena itu ia akan menjadi milik Rakjat.

Tulisan berikut adalah pidato kawan Aidit dalam Kongres Nasional ke-V PKI yang khusus menjawab berbagai pertanyaan sekitar Tan Ling Djie-isme. Dengan tandas kawan Aidit mengupas Tan Ling Djie-isme pada umumnya dan Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Kerusakan² besar pernah banjak ditimbulkan oleh Tan Ling Djie-isme didalam Partai. Berhasilnya perjuangan mengalahkan Tan Ling Djie-isme yang merupakan perjuangan ideologi terpenting dalam Partai kita telah memperkuat persatuan Partai dan membawa lebih maju perkembangan Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Tulisan ini merupakan pegangan penting bagi setiap anggota PKI dalam melikwidasi setiap bentuk Tan Ling Djie-isme.

TENTANG TAN LING DJIE-ISME

Ada kawan² yang bertanya, apakah Tan Ling Djie-isme itu penjakit yang baru sadja didalam Partai? Sedang pertanyaan lain ialah, apakah sebelum ada putusan Sidang Pleno Central Komite dalam bulan Oktober tahun 1953 pimpinan dengan sengadja membiarkan Tan Ling Djie-isme berkembang didalam Partai?

Djawab atas pertanyaan² diatas ialah, bahwa sedjak sebelum Sidang Pleno Central Komite bulan Oktober 1953, perjuangan terhadap Tan Ling Djie-isme sudah lama dilakukan didalam Partai kita dalam ber-matjam² bentuk. Perjuangan terhadap Tan Ling Djie-isme adalah perjuangan ideologi yang terpenting didalam Partai kita didalam tahun² yang lampau maupun untuk waktu² yang akan datang.

Sidang Pleno Central Komite bulan Oktober tahun 1953 mempunyai arti yang istimewa dalam perjuangan terhadap Tan Ling Djie-isme, karena sidang tersebut sudah berhasil mengambil sikap yang resmi terhadap Tan Ling Djie-isme. Peristiwa ini membawa perjuangan terhadap Tan Ling Djie-isme kepada tingkat yang baru, tingkat dimana soal Tan Ling Djie-isme tidak lagi hanya menjadi persoalan didalam Central Komite, tetapi sudah menjadi persoalan yang terang²an diperbintjangkan oleh seluruh Partai. Ini akan sangat memudahkan dan seluruh Partai dapat dimobilisasi dalam perjuangan melawan Tan Ling Djie-isme ini. Ini adalah sangat penting bagi perjuangan untuk memperkuat persatuan Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi.

Tan Ling Djie-isme sudah berkuasa didalam Partai sedjak kawan Tan Ling Djie memegang rol penting didalam Partai kita, sebagai Sekretaris Djenderal Partai Sosialis merangkap sebagai anggota terkemuka Politbiro „PKI illegal“, kemudian sedjak bulan Agustus 1948 sebagai Wakil Sekretaris Djenderal PKI, dan sesudah kawan Musso meninggal dengan sendirinya menjadi orang pertama didalam Central Komite Partai. Singkatnja, Tan Ling Djie-

isme sudah berkuasa didalam Partai selama revolusi tahun 1945-1948 dan sampai pada permulaan tahun 1951. Dengan sendirinja Tan Ling Djie-isme telah sangat mempengaruhi perkembangan Partai dilapangan organisasi, politik dan ideologi, dan dengan demikian ia djuga mempengaruhi djalannja revolusi.

Mungkin ada orang jang akan berkata, bahwa semua kesalahan dilapangan organisasi, politik dan ideologi jang dikritik didalam Resolusi Konferensi Partai bulan Agustus 1948 („Djalan Baru Untuk Republik Indonesia”) bukan kesalahan kawan Tan Ling Djie individuil, tetapi kesalahan kolektif pimpinan Partai ketika itu. Soalnja disini bukan mau mengungkiri bahwa kesalahan *ketika itu* adalah kesalahan jang dibikin setjara kolektif oleh pimpinan Partai. Dan semuanya ini dikemukakan tidak untuk kepentingan perseorangan, tetapi se-mata² untuk kepentingan Partai dan kepentingan klas keseluruhannja. Satu hal jang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa *kemudian*, sesudah resolusi „Djalan Baru” diterima oleh Konferensi Partai bulan Agustus 1948, sesudah Partai mendapat pukulan dalam „Peristiwa Madiun”, sesudah kawan Musso meninggal, sesudah revolusi mengalami kekalahan jang menjebakkan orang² jang tidak teguh mendjalankan kapi-tulasi, dari semua anggota Central Komite jang masih ada, hanja kawan Tan Ling Djie sendiri jang mati²an mau kembali kepada keadaan seperti sebelum ada resolusi „Djalan Baru”.

Sesudah revolusi mengalami kekalahan, jang terpenting didalam Partai, terutama didalam Central Komite, ialah persoalan pro atau kontra „Djalan Baru”, artinja pro atau kontra prinsip² organisasi, politik dan ideologi jang dimuat dalam resolusi tersebut. Satu kenyataan didalam Sidang Pleno Central Komite pada permulaan tahun 1951 ialah, bahwa jang pro dan konsekwen membela prinsip² organisasi, politik dan ideologi „Djalan Baru” ialah sajak Leninis didalam Central Komite, sedangkan jang dalam omongan maupun dalam perbuatan kontra „Djalan Baru” ialah sajak likwidator jang diwakili oleh kawan Tan Ling Djie dengan bantuan pasif beberapa orang sentris, jang kemudian meninggalkan kawan Tan Ling Djie setelah ternjata sajak likwidator mengalami kekalahan.

Dari sikap kawan Tan Ling Djie jang mati²an mau kembali

kepada keadaan seperti sebelum ada resolusi „Djalan Baru” itu, dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa Tan Ling Djie-isme sebenarnja sudah berkuasa didalam PKI selama revolusi tahun 1945-1948 dan sampai pada permulaan tahun 1951, dan bahwa „Djalan Baru” pada hakekatnja tidak lain daripada penelanj-djangan terhadap Tan Ling Djie-isme.

*

Apakah Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi?

Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi telah menempatkan PKI sebagai buntut Partai Sosialis, buntut Sajak Kiri dan kemudian buntut Front Demokrasi Rakjat (1). Tan Ling Djie-isme telah mengetjilkan rol PKI sebagai pelopor revolusi, telah melenjapkan sifat bebas dari PKI dilapangan organisasi. Tentang ini Konferensi Partai bulan Agustus 1948 telah mengatakan bahwa:

„PKI sebagai Partai klas buruh dan pelopor revolusi telah diperketjil. PKI ditempatkan pada tempat jang tidak semestinja, sehingga sebagai Partai dan organisasi samasekali tidak mewujudkan kekuatan jang berarti.”

Selandjutnja tentang ini dikatakan lagi: „Adanja tiga Partai klas buruh sampai sekarang (PKI legal, Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis), jang semuanya dipimpin oleh Partai Komunis illegal, mengakui dasar² Marxisme-Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat serta mendjalankan aksi bersama berdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnja gerakan buruh seumumnja. Hal ini sangat menghalangi kema-djuaan dan perkembangan kekuatan organisasi klas buruh, djuga sangat menghalangi meluas dan mendalamnja ideologi Marxisme-Leninisme jang konsekwen. Dengan demikian telah memberi banjak kesempatan kepada musuh klas buruh untuk menghalangi kema-djuaan gerakan Komunis dengan djalan mendirikan ber-matjam² Partai Kiri jang palsu dan jang memakai sembojan² jang semestinja mendjadi sembojan PKI”.

Sikap seperti diatas oleh Konferensi Partai bulan Agustus 1948 dinjatakan sebagai sikap jang anti-Leninis, dan karena sikap anti-Leninis inilah maka dilapangan serikatburuh kaum Komunis telah

sangat menghalangi tumbuhnya kesadaran politik kaum buruh pada umumnya sebagai tenaga pemimpin revolusi nasional.

Berhubung dengan kesalahan² yang mengenai azas dilapangan organisasi seperti tersebut diatas, Konferensi Partai bulan Agustus 1948 memutuskan untuk mengadakan perubahan radikal, yang bertujuan: 1) selekas-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor klas buruh; 2) selekas-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II; 3) PKI mendapat hegemoni dalam pimpinan revolusi nasional.

Djelaslah sekarang, bahwa konsep yang diadjukan oleh kawan Tan Ling Djie dalam Pleno Central Comite pada permulaan tahun 1951 untuk mempertahankan Partai Sosialis sebagai „partai penampung”, jaitu partai untuk menampung orang² yang pro Komunis tetapi „tidak berani masuk PKI”, adalah konsep anti-„Djalan Baru”, konsep anti-Leninisme dilapangan organisasi.

Disamping mengemukakan alasan tentang perlunya Partai Sosialis sebagai „partai penampung”, kawan Tan Ling Djie dalam Sidang Pleno Central Comite pada permulaan tahun 1951 juga mengemukakan bahwa tidak selamanya Partai klas buruh memakai nama „Partai Komunis”. Sebagai tjontoh antara lain dikemukakan, bahwa di Djerman ada Partai klas buruh yang memakai nama Partai Persatuan Sosialis Djerman dan di-negeri² Eropa Timur ada yang memakai nama Partai Pekerdja. Dengan mengemukakan ini sebenarnya kawan Tan Ling Djie sudah mengungkiri sendiri „teorinya” tentang „partai penampung”. Dengan mengemukakan ini menjadi terang apa yang sebenarnya dimaksudkannya dengan Partai Sosialis sebagai „partai penampung”, bahwa dalam fikirannya, „partai penampung” itu tidak lain daripada Partai klas buruh, tetapi yang anggota²nja terdiri dari orang² yang pro Komunis tetapi „tidak berani masuk PKI”. Djadi, Partai klas buruh atau Partai Marxis-Leninisme yang bukan PKI! Djadi, pengungkiran terhadap PKI sebagai satu²nja Partai klas buruh!

Tidak seorangpun yang membantah, bahwa di beberapa negeri Partai klas buruh atau Partai Marxis-Leninisme ada yang tidak memakai nama „Partai Komunis”, tetapi memakai nama Partai Persatuan Sosialis atau Partai Pekerdja. Kenyataan ini tidak hanya

digunakan oleh kawan Tan Ling Djie untuk membenarkan „teorinya” tentang Partai Sosialis sebagai „Partai Marxis-Leninisme”, tetapi digunakan juga oleh kaum trotskis untuk membenarkan „teorinya” tentang „Partai Murba” sebagai „Partai Komunis yang asli”.

Disinilah bertemunya Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi dengan Tan Malaka-isme dilapangan organisasi. Ke-dua²nja sama² mengungkiri PKI sebagai satu²nja Partai klas buruh. Bedanya hanyalah, bahwa penganut² Tan Malaka-isme berada diluar Partai dan mengemukakan pendiriannya yang anti-PKI setjara terang²an, sedangkan kawan Tan Ling Djie berada didalam Partai dan mengemukakan pendiriannya yang anti-PKI dengan berbelit-belit. Disinilah lebih berbahajanya Tan Ling Djie-isme daripada Tan Malaka-isme, karena musuh Partai yang terang²an lebih mudah diketahui oleh massa daripada musuh Partai yang tidak terang²an.

Adalah satu kebenaran, bahwa berdasarkan keadaan yang njata disesuatu negeri, Partai klas buruh atau Partai Marxis-Leninisme di-negeri itu bisa dan perlu memakai nama yang lain. Tetapi, kawan Tan Ling Djie maupun pengikut² trotskis Tan Malaka tidak bisa dan tidak mungkin bisa memberi jawaban yang benar djika ditanya keadaan njata yang manakah yang mengharuskan Partai klas buruh di Indonesia memakai nama lain ketjuali PKI, keadaan njata yang manakah yang mengharuskan klas buruh Indonesia menamakan Partainya „Sosialis” atau „Murba”? Apakah partai² ini sudah begitu berakarnya dan sudah begitu lama tradisinya sehingga akan menimbulkan „pemberontakan” djika Partai diberi nama yang bukan Partai Sosialis atau Partai Murba? Kenyataannya adalah tidak demikian, baik Partai Sosialis maupun Partai Murba sama² tidak mempunyai tradisi dan sama² tidak berakar dan tidak mungkin berakar dikalangan massa. Sebaliknya, sebagaimana djuga disebut dalam „Djalan Baru”, PKI adalah Partai yang mempunyai tradisi baik dan populer dikalangan massa Rakyat Indonesia. PKI adalah nama sewadjarnya, nama yang objektif, tjotjok dengan tradisi klas buruh Indonesia dan tjotjok dengan kebutuhan yang njata daripada perjuangannya klas buruh dan Rakyat Indonesia. Nama lain untuk Partai klas buruh Indonesia adalah subjektif, adalah tidak tjotjok dengan tradisi klas buruh Indonesia dan tidak

tjotjok dengan kebutuhan yang nyata daripada perjuangannya kelas buruh dan Rakyat Indonesia.

Penganut Tan Malaka-isme terang²an mengatakan, bahwa nama PKI tidak tepat dipertahankan, bahwa nama PKI „sudah rusak oleh pemberontakan tahun 1926” atau „oleh Peristiwa Madiun”. Dengan ini penganut² Tan Malaka-isme merusak nama baik PKI dan menjegah peluasan pengaruh PKI. Tjara kawan Tan Ling Djie tidak terang²an seperti kaum trotskis, tetapi akibatnya sama saja, yaitu sama² sangat menghalangi peluasan pengaruh PKI. Kawan Tan Ling Djie ada kalanya menggambarkan, bahwa keanggotaan PKI adalah „tidak sembarangan”, yang menjadi anggota hanya „orang² hebat” saja, dan organisasi PKI „bukan organisasi sembarangan”. Tetapi, jangan ditanya apakah kawan Tan Ling Djie berbuat, mengorganisasi dan mendidik orang² supaya menjadi orang² yang tidak sembarangan dan menjadi orang² yang hebat supaya bisa menjadi anggota PKI. Jangan pula ditanya apakah dia benar² menjusun organisasi PKI sehingga benar² menjadi organisasi yang tidak sembarangan. Kawan Tan Ling Djie tidak berbuat untuk semuanya ini! Sebaliknya, ia selalu menghalangi pemasukan orang² yang baik kedalam PKI dan menarik orang² yang baik ini kedalam Partai Sosialis. Dengan gambarannya ini dia membikin PKI menjadi angker dan serem, menjadi ditakuti dan dihindari orang, dan dengan demikian PKI menjadi terisolasi, dan selanjutnya, mereka yang „tidak berani masuk PKI” itu diharapkan dapat ditampung dalam Partai Sosialis. Djelaslah bagaimana perbedaan tjara Tan Malaka-isme dengan Tan Ling Djie-isme, tetapi jelas pula dimana persamaannya, yaitu sama² menjegah peluasan pengaruh PKI, sama² likwidasiisme. Djelaslah bagaimana kawan Tan Ling Djie berbuat yang samasekali bertentangan dengan omongannya.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa tidak ada perbedaan hakekat antara Tan Ling Djie-isme dan likwidasiisme yang terdapat dalam Partai Buruh Sosial-Demokratis Rusia. Konferensi ke-V daripada Partai Buruh Sosial-Demokratis Rusia, yang dilangsungkan dalam bulan Desember 1908, atas usul Lenin telah meng-hukum likwidasiisme, yaitu usaha daripada sebagian kaum intelektual didalam Partai (kaum mensjewik) „untuk melikwidasi organi-

sasi Partai Buruh Sosial-Demokratis Rusia yang ada dan untuk menggantikannya biar dengan pengorbanan apapun juga, meskipun dengan terang²an melepaskan program, taktik dan tradisi Partai, dengan suatu perkumpulan yang tidak tentu bentuknya, yang bekerja setjara legal” (2). Konferensi ke-V Partai Buruh Sosial-Demokratis Rusia menjerukan kepada semua organisasi Partai untuk berjuang dengan tidak kenal ampun terhadap kaum likwidator.

Kesimpulan: Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi ialah suatu aliran didalam Partai yang menghendaki adanya „Partai kelas buruh” disamping PKI, yang menghendaki adanya „Partai kelas buruh” yang anggotanya terdiri dari orang² kelas tengah, yaitu apa yang dinamakan orang² yang pro Komunis tetapi „tidak berani masuk PKI”. Singkatnya Tan Ling Djie-isme adalah aliran didalam Partai yang menetjilkan rol PKI sebagai pelopor revolusi, yang melenjapkan sifat bebas dari Partai, dan yang pada hakekatnya melikwidasi Partai.

*

Apakah Tan Ling Djie-isme dilapangan politik?

Dilapangan politik Tan Ling Djie-isme telah menjadi perintang yang besar dalam meningkatkan kesadaran politik massa dan telah membikin politik Partai tidak populer dikalangan massa. Sebagaimana dilapangan organisasi Tan Ling Djie-isme menganggap PKI „terlalu keras” dan oleh karena itu harus diganti dengan Partai Sosialis yang lunak, demikian pula dilapangan politik Tan Ling Djie-isme menganggap program Komunis „terlalu keras” dan oleh karena itu harus diganti dengan program Sosialis. Hegemoni Partai Sosialis yang didapat dengan melewati Politburo „PKI illegal” dan Sajap Kiri (kemudian Front Demokrasi Rakyat), adalah sebab pokok mengapa PKI tidak mempunyai dan tidak melaksanakan programnya sendiri, programnya yang sesungguhnya. Dalam politik PKI menjadi buntut Partai Sosialis, buntut Sajap Kiri dan kemudian buntut Front Demokrasi Rakyat.

Tan Ling Djie-isme dilapangan politik bersumber pada sikap tidak pertjaja kepada kekuatan massa disatu pihak dan terlalu

membesarkan kekuatan reaksi difihak lain. Akibatnja tidak bisa lain daripada mengurangi program Partai jang sesungguhnya dan hanya menjalankan politik „jang mungkin² sadja” dalam lingkungan undang² dan kekuasaan jang sedang berlaku. Tan Ling Djie-isme pada hakekatnja sama dengan „Marxisme legal” di Rusia pada achir abad ke-19, jaitu „Marxisme” jang dianut oleh golongan intelektuil burdjuis jang berdjubah Marxis. Tan Ling Djie-isme menggunakan pandji² Marxisme untuk membikin gerakan buruh mendjadi tergantung pada dan menyesuaikan diri dengan kepentingan masjarakat burdjuis, dengan kepentingan burdjuasi. Tan Ling Djie-isme, sebagaimana djuga „Marxisme legal”, tidak lain daripada pemakaian „Marxisme” dengan membuang bagian² jang terpenting dari adjaran² revolusioner Marx, sehingga, sebagaimana djuga „Marxisme legal”, Tan Ling Djie-isme adalah tidak lain daripada liberalisme burdjuis. Politik reformis dari liberalisme burdjuis ini djugalah jang menjebabkan Partai Sosialis menerima persetudjuan Linggardjati dan Renville, dan dengan melewati Politbiro „PKI illegal” serta Sajap Kiri, dan kemudian Front Demokrasi Rakjat, PKI djuga telah menerima politik reformis daripada Partai Sosialis.

Sifat legalis dari Tan Ling Djie-isme dilapangan politik djuga nampak dalam kebiasaan kawan Tan Ling Djie mengupas soal² politik jang lebih mengutamakan dan mendahulukan pertimbangan² dan alasan² jang berdasarkan undang² dan bukan alasan² serta pertimbangan² politik. Dengan demikian Tan Ling Djie-isme sudah membawa kaum buruh dan Rakjat Indonesia tenggelam kedalam lautan undang² burdjuis, tidak membawa klas buruh kepersoalan politik jang sesungguhnya, dan dengan demikian djuga tidak membawanja kepada kesengitan realitet perdjjuangan klas. Apakah dengan ini berarti bahwa kita pada umumnja menentang digunakannya alasan² hukum untuk menguatkan kebenaran sikap Partai? Tentu sadja tidak mungkin kita bersikap demikian. Sebaliknya, kita harus menggunakan setjara tepat alasan² hukum jang bisa menguatkan sikap Partai. Jang kita tentang jalah kalau alasan² hukum digunakan sebagai satu²nja alasan jang pokok, dan karena itu mendjauhkan massa dari kenjataan² politik dan kesengitan perdjjuangan klas. Terlalu banjak dan terlalu sering menggunakan

fasal² dari undang² untuk membela sikap Partai, dan disamping itu kurang atau tidak mengemukakan alasan² politik jang kuat, tidak bisa lain ketjuali turut menanamkan kepertjajaan kepada massa, bahwa undang² burdjuis djuga baik untuk proletariat.

Sebagai tjontoh, jalah keterangan kawan Tan Ling Djie jang dikeluarkan atas nama Central Comite dan berkepala „Ir. Sukarno sebagai presiden belum sah” (3). Keterangan ini hanya terdiri dari beberapa kalimat. Isinja menerangkan bahwa Ir. Sukarno belum disumpah menurut undang² dasar fasal 47, dan oleh karena kabinet Natsir ketika itu dilantik oleh presiden jang belum sah ini, maka kabinet Natsir adalah djuga tidak sah.

Tidak lama kemudian Presiden Sukarno disumpah menurut undang² dasar. Apakah dengan penjumpahan, formalitet jang tidak sulit untuk dipenuhi ini, kawan Tan Ling Djie mau mengatakan kepada massa bahwa presiden sudah sah menurut undang² dasar dan dengan demikian, djika kabinet Natsir dilantik oleh presiden jang sah ini, maka kabinet Natsir djuga sah dan Rakjat harus taat kepada jang sah ini. Kalau massa mendengarkan keterangan kawan Tan Ling Djie ketika itu, maka massa akan pertjaja, bahwa dengan adanya penjumpahan, semuanya adalah sah dan wadajib ditaati. Apakah ini jang mau dididikkan kepada massa? Alangkah baiknja didikan ini!

Sebagai tjontoh lagi, atas nama Central Comite, kawan Tan Ling Djie mengeluarkan pernjataan dalam bulan Desember 1950 tentang Irian Barat. Dalam pernjataannya ini kawan Tan Ling Djie mengemukakan „teorinja” tentang „Statenbond antara Republik Demokrasi Irian jang bebas dari persetudjuan KMB dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang masih belum dibebaskan dari persetudjuan KMB”. Dari pernjataan ini djelas sekali kepertjajaan kawan Tan Ling Djie kepada kemungkinan² dalam lingkungan undang² dan kekuasaan jang ada, bahwa setjara damai undang² dan kekuasaan jang ada akan „mengizinkan” berdirinja satu Republik Demokrasi Irian jang bebas dari Belanda-Amerika. Tetapi setjara undang² pula kawan Tan Ling Djie telah mengembalikan „Republik Demokrasi Irian jang merdeka penuh” mendjadi suatu negeri setengah-djadjahan dengan djalan mengawinkannya dengan Republik Indonesia jang masih terikat oleh perse-

tudjuan KMB. Pernyataan kawan Tan Ling Djie-isme ini telah menyebabkan kemarahan umum kepada Partai, dan jika tidak segera diambil tindakan yang keras untuk membatalkan pernyataan kawan Tan Ling Djie tentang Irian, maka akan berakibat sangat mengisolasi Partai dari Rakjat Indonesia yang demokratis dan patriotik.

Kesenangan subjektif kawan Tan Ling Djie kepada undang² djugalah yang menyebabkan ia memberi nama „Fasal 33” kepada madjalah sentral Partai Sosialis. Akibatnja, madjalah ini tidak menjadi madjalah yang populer. Perasaan massa tjukup tadjam untuk mengetahui, bahwa fasal 33 adalah demagogi burdjuasi yang ditempelkan didalam undang² dasar.

Satu kenyataan yang sangat menjedihkan ialah, bahwa selama Tan Ling Djie-isme berkuasa didalam Partai, yaitu selama revolusi 1945-1948 sampai pada permulaan tahun 1951, perhatian dan kegiatan pimpinan sentral daripada Partai setjara ber-lebih²an ditumpahkan pada perdjuaan parlementer. Dan yang lebih djauh lagi ialah, bahwa sesudah revolusi mengalami kegagalan, kawan Tan Ling Djie setjara ngotot mempertahankan „teorinja” tentang „membangun Partai dari parlemen”. Keadaan ini telah menimbulkan ilusi pada anggota² Partai dan pada massa, se-olah² perdjuaan parlementer adalah satu²nja bentuk perdjuaan, adalah perdjuaan yang terpenting dan mempunyai kemungkinan² yang tidak terbatas. Keadaan ini telah menyebabkan pimpinan sentral Partai tidak menjiapkan Partai untuk mempertahankan diri terhadap tindakan² dan pengedjaran² baru yang mungkin datang. Inilah pula sebabnja, kenapa Partai kurang siap menghadapi tindakan² pemerintah reaksioner Sukiman dalam tahun 1951.

Kesimpulan: Tan Ling Djie-isme dilapangan politik adalah suatu aliran didalam Partai yang mengetjilkan kekuatan massa dan terlalu membesarkan kekuatan reaksi, yang mengurangi program Partai, yang membikin perdjuaan klas buruh menjadi perdjuaan undang² dan perdjuaan parlementer se-mata², yang membikin klas buruh djauh dari soal² politik, dan semuanya ini berarti membikin PKI tidak mempertahankan kebebasan politiknya sendiri.

*

Apakah Tan Ling Djie-isme dilapangan ideologi?

Tan Ling Djie-isme dilapangan ideologi bersumber pada subjektivisme. Ini dibuktikan oleh dua penjakit yang besar pengaruhnja pada Partai kita selama revolusi 1945-1948 sampai permulaan tahun 1951, penjakit oportunist kanan dan „kiri”, penjakit kapitalisme dan avonturisme. Keduanya ini bersumber pada dua penjelewengan ideologi, yaitu dogmatisme dan empirisme, yang ke-dua²nja subjektif, ke-dua²nja sama² beratsebelah.

Tan Ling Djie-isme adalah dogmatisme, karena apa yang di batja dari buku atau apa yang didengar dari luarnegeri dengan begitu sadja mau didjiplak di Indonesia, dengan tidak melihat kondisi² yang ada di Indonesia. Usaha untuk dengan sungguh² mengetahui keadaan yang njata di Indonesia tidak diadakan.

Pada satu masa, ketika peperangan melawan agresor kolonial Belanda pertama tahun 1947 sedang menghebat, didalam Partai kita dan didalam Sajap Kiri dimana PKI tergabung ada andjuran untuk membikin indusko (industri-koperasi), yaitu koperasi perusahaan keradjinan-tangan ketjil, berupa perusahaan tempe, perusahaan tahu, perusahaan ketjap dsb. Andjuran ini sumbernja dari kawan Tan Ling Djie, dengan tidak didiskusikan terlebih dulu didalam pimpinan pusat Partai, tidak didiskusikan apakah itu indusko sebenarnya, sjarat² apa yang ada di Indonesia untuk melaksanakannya, bagaimana tjara pelaksanaannya, dan terutama bagaimana supaya kegiatan² yang digunakan untuk membikin koperasi industri tidak mengurangi kekuatan berperang Rakjat, tetapi sebaliknya menambah kekuatan berperang. Satu fikiran dari satu orang yang timbulnja mendadak, spontan, karena kebetulan baru habis membuatja buku yang mentjeritakan tentang pentingnya koperasi industri, fikiran yang belum diudji dengan keadaan yang njata, telah berakibat sangat merugikan revolusi.

Andjuran indusko kawan Tan Ling Djie telah menyebabkan banyak kader Partai ngomong tentang indusko, tetapi begitu banyak yang ngomong tentang indusko, begitu banyak pula yang tidak mengerti apakah indusko, bagaimana melaksanakannya supaya dengan indusko bisa menguatkan revolusi dan bagaimana hubungannya dengan pekerjaan Partai. Dengan andjuran setjara beratsebelah tentang indusko ini, perhatian anggota dan kader Partai

dipindahkan dari persoalan-persoalan politik. Persoalan politik tinggal menjadi persoalan beberapa orang pemimpin besar. Dan yang paling menjedihkan lagi ialah, bahwa omongkosong yang banyak tentang indusko ini telah menjimpangkan fikiran kader² Partai dari tugas perjuang bersendjata, tugas melatih diri di lapangan gerilja, tugas beladjar memperbaiki sendjata yang rusak, tugas membikin sendjata sendiri, dsb. Setjara beratsebelah perhatian ditudjukan kepada pembikinan ketjap, pembikinan tahu, pembikinan tempe, pembikinan djamur, dsb. Jang lain² dianggap tidak penting. Hanya indusko yang paling penting, pembikinan ketjap paling penting, pembikinan tahu paling penting, pembikinan tempe paling penting.

Apakah kita menentang adanja kegiatan² untuk memperbesar produksi bahan makanan? Samasekali tidak demikian! Kita tjukup mengerti bahwa revolusi tidak mungkin menang djika makanan tentara dan Rakjat yang berdjuaug tidak terdjamin. Kita tidak mungkin menang dalam revolusi, djika kita tidak memperhatikan kepentingan langsung dari Rakjat, seperti kebutuhan kaum tani akan tanah, kebutuhan Rakjat akan beras, minyak, garam, ikan asin, kajubakar, dsb. Jang kita tentang ialah, tjara mengambil dan menggunakan pengalaman dari luarnegeri yang sepotong² dan tidak kritis, tidak menjesuaikannja dengan kebutuhan kongkrit daripada revolusi kita, tidak melihat hubungan sesuatu dengan hubungan kegiatan revolusi keseluruhannja, terutama tidak melihat hubungannja dengan perdjuaug bersendjata Rakjat.

Adalah djuga pandangan dogmatis kawan Tan Ling Djie yang menjebabkan ia menggunakan kenjataan² di Djerman dan di Eropa Timur, yang menunjukkan bahwa tidak selamanja Partai kelas buruh memakai nama „Partai Komunis”, dalam membela Partai Sosialisnja. Ia mendasarkan kesimpulannja kepada apa yang dilihatnja diluar Indonesia dan tidak kepada analisa keadaan yang njata di Indonesia.

Tan Ling Djie-isme adalah empirisisme, karena tidak mementingkan pekerjaan di lapangan memperinggi teori anggota² Partai. Beladjar teori dianggap tidak penting, dianggap tidak praktis. Jang penting bukan membuat buku dan mengerti dalil² revolusioner dari Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Jang penting ialah menge-

tahui berapa harga telur bebek, harga beras, harga kain belatju, agar dengan mengetahui harga semuanja ini kita bisa membantu Rakjat untuk memperdjuaugkan kepentingannja. Rakjat bukan mau dalil² Marxis-Leninis tapi mau perbaikan nasib, mau tahu, mau djamur, mau ketjap, tempe, dsb. Demikianlah beberapa utjapan yang sering keluar dari kawan Tan Ling Djie selama revolusi. Kader² sering ketjewa kalau menanjakan arti tulisan Lenin, misalnja. Mereka sering ketjewa karena mendapat djawab bahwa isi buku itu tidak penting. Pertanjaan ini terus diputar oleh kawan Tan Ling Djie kearah pembitjaraan tentang „soal² praktis”. Seolah-olah teori bukan soal praktis bagi kader Partai yang ambil bagian dalam revolusi.

Apakah dengan ini berarti kita menentang praktek dan menentang diperhatikannja kebutuhan² langsung dari Rakjat? Samasekali tidak demikian, malahan kita menghendaki praktek lebih banyak dan memperhatikan kebutuhan langsung dari Rakjat lebih sungguh². Jang kita tentang ialah apa yang beratsebelah, sehingga menetjilkan dan meremehkan teori sebagai pedoman dalam pekerjaan praktis. Pendeknja kawan Tan Ling Djie tidak menanamkan pentingnja rol teori untuk perdjuaug revolusioner, dia menetjilkan rol teori, dia meremehkan rol teori dan tempo² dia mengedjek anggota² Partai yang mau beladjar teori. Kira² pada pertengahan tahun 1950 sebagian anggota Central Komite mengemukakan tentang pentingnja menerbitkan madjalah *Bintang Merah* agar dapat memperinggi teori Partai dan dapat menghimpun seluruh Partai yang ketika itu tidak merasa adanja pimpinan sentral daripada Partai. Kawan Tan Ling Djie tidak menerima usul ini dan lebih mementingkan madjalah yang „bersifat umum”, yang diterbitkan oleh fraksi Partai dalam parlemen, dimana didalamnya banyak ditulis tentang per-undang²an. Tetapi untung, bahwa walaupun masih banyak kekurangan²nja, madjalah *Bintang Merah* toh achirnja terbit djuga dan oleh seluruh Partai dirasakan betapa pentingnja, penting dalam meninggikan tingkat teori anggota Partai dan penting dalam memusatkan seluruh Partai pada satu pimpinan sentral.

Akibat dari dua ideologi subjektif, jaitu dogmatisme dan empirisisme, Partai kita terumbang-ambing diantara dua penyakit. Sub-

jektivisme telah menjebabkan Partai kita tidak bisa mengambil sikap yang tepat, sikap yang objektif, yang benar menurut ilmu. Dalam satu hal Partai kita membikin kesalahan² menjalankan politik kanan, politik reformis, berdjalan dibelakang massa yang sudah lebih maju. Tetapi dalam hal lain Partai kita membikin kesalahan „kiri”, menjalankan avonturisme, berdjalan djauh di-muka massa yang masih terbelakang. Oleh karena itulah, sedjarah Partai kita selama Tan Ling Djie-isme berkuasa adalah sedjarah kesalahan² kanan dan „kiri” sekaligus, sedjarah kapitulasiisme dan avonturisme ber-sama².

Kesimpulan: Tan Ling Djie-isme dilapangan ideologi adalah subjektivisme, adalah aliran dogmatis dan empiris didalam Partai, yang telah menjebabkan Partai membikin kesalahan² kanan dan „kiri” yang sangat merusak pertumbuhan Partai dan pertumbuhan gerakan revolusioner.

Ada kawan² yang bertanya: Karena kawan Tan Ling Djie sudah begitu besar kesalahannya dan Tan Ling Djie-isme sudah menimbulkan kerusakan² besar didalam Partai, mengapa Central Komite dalam sidangnya bulan Oktober tahun 1953 hanya mengeluarkan kawan Tan Ling Djie dari Central Komite dan tidak dari keanggotaan Partai samasekali? Satu²nja alasan kenapa putusan ini yang diambil ialah karena kawan Tan Ling Djie menerima putusan Central Komite dan berdjandji untuk memperbaiki semua kesalahannya. Ini diutjapkannya dalam sumpah ketika menerima putusan Central Komite. Putusan Central Komite adalah putusan yang tepat, karena djika seseorang sudah mengakui kesalahannya dan berdjandji untuk memperbaiki kesalahannya, maka kesempatan untuk membuktikan djandjinya harus diberikan kepadanya. Djika kawan Tan Ling Djie dikeluarkan samasekali dari Partai, maka berarti kepadanya tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebagai anggota Partai.

Demikianlah dengan singkat Tan Ling Djie-isme pada umumnya dan Tan Ling Djie-isme dilapangan organisasi, politik dan ideologi.

Likwidasi Tan Ling Djie-isme!

Kembangkan Periode 1951 adalah pidato kawan Aidit pada penutupan Kongres Nasional ke-V PKI. Dalam menilai hasil² Kongres ditandaskan oleh kawan Aidit bahwa setjara definitif zaman lama yang gelap dari Partai sudah ditutup untuk selama-lamanya dan periode baru, jaitu periode yang dimulai dalam tahun 1951, berkembang dengan suburnya. Agar hasil² yang sudah ditjapai oleh Kongres Nasional ke-V PKI dapat dikonsolidasi dan dikembangkan maka diserukan kepada setiap anggota PKI untuk melikwidasi periode sebelum 1951 dan mengembangkan periode 1951.

KEMBANGKAN PERIODE 1951!

Kawan², perkenalkanlah saja, atas nama Central Komite yang baru, menjampaikan pernyataan terimakasih kepada semua delegasi Kongres Nasional ke-V Partai kita ini. Dengan dipilihnya Central Komite yang baru ini berarti, bahwa seluruh anggota dan tjalon-anggota Partai yang kawan² wakili, memberikan kepertjajaan penuh kepada kami untuk memimpin Partai kita sampai Kongres yang akan datang. Ini sangat penting kawan². Dengan tidak ada kepertjajaan yang penuh ini, tidak mungkin Central Komite memberikan pimpinan yang baik kepada Partai kita, Partai yang saban hari bertambah besar dan bertambah luas pekerdjannya.

Kepertjajaan penuh yang kawan² berikan menjadi lebih penting lagi, berhubung kita tidak tahu sedjak sekarang apa yang akan terdjadi di-waktu² yang akan datang. Saja kira pada tempatnya saja njatakan disini, atas nama Central Komite baru, bahwa apapun yang akan terdjadi di-waktu² yang akan datang, kami berdjandji akan tetap mendjundjung tinggi kepertjajaan yang telah diberikan oleh kawan² dan oleh seluruh Partai kita.

Dalam pidato pembukaan Kongres Nasional ke-V ini antara lain sudah saja sampaikan harapan² agar Kongres kita dapat memberi djawaban tentang semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia, agar Kongres kita dapat meletakkan dasar² untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, agar Kongres kita memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai, dan agar Kongres kita dapat lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa.

Saja kira seluruh anggota dan tjalon-anggota Partai kita, ja, seluruh Rakjat progresif dinegeri kita akan bergembira, karena Kongres Nasional Partai kita telah dapat memenuhi harapan² yang sudah disampaikan kepadanya. Kongres ini sudah dapat memberi-

kan djawaban tentang semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia, sudah dapat meletakkan dasar² untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, sudah dapat memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai, dan dapat lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa.

Dengan terpetjahkannya masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia, berartilah Partai kita dan gerakan revolusioner dinegeri kita menjadi puluhan tahun lebih maju.

Didalam Kongres ini kawan² utusan telah mengatakan, bahwa program, garis taktik dan organisasi yang tepat dari Partai telah kita temukan berkat kemampuan dan berkat pekerdjaan pimpinan sentral Partai. Ini hanyalah sebagian dari kebenaran. Pimpinan sentral Partai tidak akan mungkin menjusun dokumen² Partai, seperti yang sudah kita miliki sekarang, djika tidak mendapat bantuan organisasi² bawahan, bantuan kader² dan anggota² Partai.

Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa salahsatu faktor terpenting yang menjebabkan berhasilnya pimpinan sentral dari Partai ialah dijakininya kebenaran setiap putusan CC. Untuk sampai kepada kejakinan ini kawan² tidak takut menghadapi kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat didalam diskusi². Oleh karena itu, untuk selanjutnya harus dijadikan pegangan, bahwa setiap putusan CC harus difahamkan benar² oleh segenap anggota dan tjalon-anggota, meskipun menghadapi kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat didalam mendiskusikannya.

Hasil pekerdjaan kawan² di-daerah² dan laporan kawan² yang objektif kepada Central Komite, adalah bantuan yang tidak terhingga artinya dalam memperbesar kemampuan Central Komite Partai kita. Pekerdjaan kawan² yang dilakukan dengan sepenuh jiwa dan dengan rasa solidaritet yang dalam selama Kongres berdjalan, adalah sumbangan yang tidakternilai dalam mengambil putusan² Kongres yang penting.

Adalah satu kenjataan, bahwa hasil Kongres kita merupakan bukti kemenangan Marxisme-Leninisme atas musuh²nya didalam Partai. Hal ini lebih mejakinkan kita lagi, bahwa bagaimanapun djuga tersembunjinja elemen non-Komunis didalam Partai, pada

akhirnya ia pasti akan terbongkar, dan semakin tinggi tingkat ideologi dan tingkat kewaspadaan politik daripada segenap anggota, semakin tjepat pula elemen non-Komunis didalam Partai terbongkar dan disingkirkan dari Partai.

Dengan berhasilnya Kongres kita ini setjara definitif zaman lama jang gelap dari Partai kita sudah ditutup untuk se-lama2nja, dan periode baru berkembang dengan suburnja, periode jang dimulai dalam tahun 1951.

Kawan², putusan² jang kita ambil didalam Kongres Nasional Partai jang bersedjarah ini adalah putusan, jang seperti sudah saja sebutkan diatas, akan membawa Partai kita dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju. Oleh karena itu, putusan² jang sudah kita ambil akan membikin gemetar dan akan sangat tidak menjenangkan musuh² Partai dan musuh² Rakjat didalam- dan diluarnegeri. Terlalu banjak untuk disebutkan tjontoh² jang menjatakan, bahwa kebenaran politik Partai kita, politik jang nasional dan demokratis, telah membikin musuh² Rakjat mengalami banjak kekalahan politik dan membikin mereka terdjepit. Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana telah dibuktikan ber-kali², kaum reaksioner dalamnegeri dengan bantuan kaum reaksioner luarnegeri suka bertindak se-wenang² dan matagelap. Mengingat ini kawan², saja menekankan perlunja Partai kita lebih mempertinggi dan tidak henti²nja mempertinggi kewaspadaannya, perlunja Partai kita lebih ber-hati², lebih berani dan lebih militan.

Kawan², saja kira tepat kalau saja katakan, bahwa Kongres Nasional Partai kita jang ke-V ini adalah djuga demonstrasi persatuan pimpinan sentral dengan pimpinan daerah dari Partai. Dengan adanya persatuan ini Kongres kita berdjalan dengan lancar. Selain daripada itu, dan ini adalah jang terpenting, ialah bahwa persatuan pimpinan Partai kita adalah sjarat untuk persatuan seluruh Partai, untuk persatuan seluruh klas buruh, persatuan seluruh Rakjat pekerdja dan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itulah maka sangat vital bagi Partai kita untuk mempertahankan dan tidak henti²nja memperkuat persatuan pimpinan sentral dengan pimpinan daerah dari Partai.

Kawan², Kongres ini kita tutup dengan harapan² akan mendapat sukses jang lebih besar dalam pekerdjaan Partai di-waktu²

jang akan datang. Kita mengharap agar Kongres jang akan datang dilangsungkan dalam keadaan jang lebih baik daripada sekarang dan dalam keadaan dimana persatuan Rakjat dan Partai kita djauh lebih kuat dan lebih besar. Kita mengharap agar didalam delegasi Kongres jang akan datang djuga ikut kawan² dari suku-bangsa² jang dalam Kongres ke-V ini belum ikut. Demikian djuga kita mengharap agar dalam delegasi Kongres jang akan datang djuga ikut kawan² wanita.

Kawan², sekali lagi, atas nama Central Komite jang baru, saja mengutjapkan terimakasih kepada semua delegasi Kongres Nasional ke-V. Djuga kepada semua anggota dan kader Partai jang sudah mentjorahkan tenaga dan fikirannya dalam mengurus penjelegaraan dan keselamatan Kongres, atas nama Central Komite, saja mengutjapkan terimakasih.

Dengan ditutupnja Kongres ini berlangsunglah dengan baik satu peristiwa sedjarah jang penting, penting untuk Rakjat Indonesia, untuk PKI, untuk demokrasi dan perdamaian abadi. Oleh karena itu, ia adalah peristiwa jang tak terlupakan.

Kawan², marilah kita ber-sama² memperkuat sumpah kita kepada Partai dan marilah kita berdjandji untuk memperkuat persatuan pimpinan Partai kita, sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk persatuan seluruh Partai, untuk persatuan klas buruh, untuk persatuan Rakjat pekerdja dan untuk persatuan seluruh bangsa Indonesia.

Marilah Kongres ini kita tutup dengan seruan:

Likwidasi periode sebelum '51!

Kembangkan periode '51!

KONGRES NASIONAL KE-V PARTAI KOMUNIS INDONESIA

Setjara keseluruhan kawan Aidit dalam tulisan ini menjimpulkan artipentingnja Kongres Nasional ke-V PKI bagi sedjarah perkembangan PKI dan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Berlainan dengan spekulasi kaum sosialis kanan dan kaum trotskis, Partai keluar dari Kongres bukannya dalam keadaan terpetjah, tetapi sebaliknya malahan tambah lebih bulat bersatu baik dilapangan organisasi, politik maupun ideologi. Kongres Nasional ke-V PKI tidak hanja memetjahkan masalah2 penting dan pokok revolusi Indonesia, tetapi djuga meletakkan dasar2 bagi pekerdjaan penggalangan front persatuan nasional dan pembangunan Partai. Selandjutnja tulisan ini djuga menundjukkan keputusan2 penting jang telah diambil oleh Kongres mengenai susunan organisasi untuk lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa.

Kongres Nasional ke-V Partai kita jang diadakan di Djakarta sudah berlangsung dengan baik. Spekulasi² kaum sosialis kanan dan kaum trotskis, jang mengira bahwa Partai akan keluar dari Kongres dalam keadaan petjah, ternjata salah samasekali. Mereka mendasarkan spekulasi²nja pada putusan Central Comite bulan Oktober 1953 mengenai pengeluaran kawan Tan Ling Djie dari Central Comite.

Mereka mengira, bahwa dikeluarkannja kawan Tan Ling Djie dari CC akan membawa perpetjahan jang hebat didalam Partai. Tentang ini digambarkan oleh pembitjaraan² dikalangan mereka dan oleh surat kabar² mereka se-olah² PKI akan berantakan dengan „keluarnja” kawan Tan Ling Djie jang dengan rojal mereka beri djulukan „ahli teori” didalam pimpinan PKI. Djulukan ini tidak akan begitu rojal mereka berikan kalau bukan karena mereka mengira kawan Tan Ling Djie „akan keluar” dari PKI.

Kongres kita jang besar telah mendjawab spekulasi² dan lamunan² kaum sosialis kanan dan kaum trotskis. Diskusi² didalam Kongres dan hasil² jang sudah ditjiptakan oleh Kongres adalah bukti, bahwa sedjak berdirinja pada tahun 1920 persatuan dalam Partai kita belum pernah begitu kuat seperti sekarang, baik persatuan didalam pimpinan maupun persatuan antara pimpinan dengan anggota. Persatuan Partai makin kuat dilapangan organisasi, politik dan ideologi. Dengan dikeluarkannja kawan Tan Ling Djie dari Central Comite dalam sidangnya bulan Oktober 1953 tidak seorangpun diantara delegasi jang melaporkan kepada Kongres, bahwa ada anggota atau tjalon-anggota jang keluar dari Partai karena itu. Sebaliknya, Kongres berpendapat bahwa peristiwa ini adalah peladjaran jang penting bagi seluruh Partai, penting untuk mengkonsolidasi Partai disegala lapangan.

Tetapi jang terpenting jalah bukan soal benar atau tidaknja

spekulasi² kaum sosialis kanan dan kaum trotskis. Jang terpenting ialah, bahwa Kongres sudah berhasil mendiskusikan dan mensahkan dokumen² penting seperti Laporan Umum CC (*Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia*), Program Partai, Konstitusi Partai, Manifes Pemilihan Umum Partai dan referat *Tentang Tan Ling Djie-isme*. Dengan beberapa amandemen ketjil, koreksi besar kawan Musso tahun 1948, jaitu resolusi *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*, disahkan oleh Kongres. Djuga lambang dan sumpah Partai disahkan oleh Kongres. Semua putusan, mulai dari laporan CC sampai kepada lambang dan sumpah diambil sesudah didiskusikan setjara mendalam, dimana delegasi dari tiap² provinsi ambil bagian jang aktif. Untuk sekali lagi menjatakan kebulatan jang ada didalam Partai, boleh dikatakan semua putusan diambil dengan suara bulat dan semua putusan diambil dengan kejakinan jang penuh.

Kongres bersedjarah ini dihadiri oleh utusan² dari semua provinsi, ketjuali Irian Barat, dan mewakili 49.042 anggota serta 116.164 tjalon-anggota. Hadir djuga dalam Kongres ini delegasi persaudaraan dari Partai Komunis Australia.

Utjapan² selamat berkongres dan harapan² supaja Kongres mendapat sukses diterima dari Partai² Komunis luarnegeri. Pembatjaan tilgram² dan surat² utjapan selamat disambut oleh para peserta Kongres dengan hangat, terutama ketika dibatjakan tilgram utjapan selamat berkongres dari Partai Komunis Uni Sovjet dan Partai Komunis Tiongkok. Lebih dari seribu utjapan² selamat berkongres diterima dari dalamnegeri, dari para pemimpin partai², organisasi² massa dan orang² terkemuka, termasuk dari Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia.

Sebelum Kongres dilangsungkan segenap organisasi dan anggota serta tjalon-anggota Partai mendapat kesempatan untuk memeladjari bahan² Kongres dan untuk menyiapkan Kongres selama 4 bulan. Material Kongres jang diputuskan oleh Sidang Pleno CC bulan Oktober 1953, jang berupa Laporan Umum CC, Rentjana Program Partai, amandemen² terhadap Konstitusi Sementara dan beberapa putusan lain dari Sidang Pleno CC disiarkan untuk anggota² dan umum dalam djumlah tidak kurang dari 150.000 exemplar. Rentjana Program dikirimkan kepada beratus-ratus orang

progresif jang terkemuka dengan permintaan supaja suka memberikan pendapat dan kritiknya.

Dalam rangkaian mempersiapkan Kongres, Laporan Umum CC tentang keadaan politik dalam dan luarnegeri serta Rentjana Program Partai dijadikan bahan pembitjaraan dalam rapat² umum dan tjeramah². Disamping rapat² umum jang dihadiri terutama oleh kaum buruh dan kaum tani, Partai djuga mengorganisasi rapat² dan tjeramah² khusus untuk orang² terkemuka, rapat² khusus untuk kaum wanita, kaum pemuda, peladjar dan mahasiswa. Dalam rapat² umum jang bukan rapat dilapangan, diadakan tanjadjawab. Kesempatan bertanja pada umumnja digunakan dengan baik oleh hadirin. Pada penutup tiap² rapat atau tjeramah, oleh pimpinan rapat diminta kepada hadirin supaja suka menjampaikan pendapat² dan kritik²nja setjara tertulis kepada Komite Partai setempat atau langsung kepada CC. Dalam rangkaian menerangkan Rentjana Program PKI kepada orang² diluar Partai sudah dilangsungkan lebihkurang 1.500 rapat umum besar dan ketjil, dan jang seluruhnja dikundungi oleh lebih dari dua djuta orang.

Dalam waktu lebih dari 4 bulan itu diadakan rapat² anggota dan tjalon-anggota, rapat² fraksi² dan diadakan konferensi² dari organisasi tingkat paling bawah sampai ketingkat provinsi. Rapat² dan konferensi² ini, ketjuali mendiskusikan bahan² Kongres, djuga memilih utusan² ke Kongres setjara bertingkat. Dengan demikian djelaslah, bahwa utusan² jang datang dikongres membawa suara seluruh anggota dan tjalon-anggota, dan dengan demikian, garis politik dan organissai jang diputuskan oleh Kongres adalah garis² dalam mana Partai seluruhnja telah ambil bagian dalam mendiskusikan dan menetapkanja.

Kongres djuga sudah berhasil memilih Central Komite baru dan Komisi Verifikasi Keuangan. Sidang CC jang pertama, jang diadakan segera sesudah Kongres, telah memilih Politbiro, Sekretariat CC, Komisi Kontrol CC dan telah membitjarakan lebih dalam masalah organisasi dan taktik Partai.

Kongres ditutup dengan sebuah rapat umum dikota Djakarta jang dihadiri oleh lebihkurang 400.000 orang. Lebihkurang 50% dari jang hadir terdiri dari kaum tani jang datang dari tempat²

disekitar kota Djakarta dan dari tempat² jang puluhan sampai ratusan kilometer djauhnya dari Djakarta.

Keadaan Politik Ketika Kongres Dilaksanakan

Sedjak terbentuknja kabinet Ali Sastroamidjojo jang disokong oleh PKI, pertentangan antara kekuatan reaksi jang dipelopori oleh partai² reaksioner Masjumi-PSI dan kekuatan demokratis jang digalang oleh PKI dan partai² serta golongan² demokratis lainnja mendjadi sangat tadjam. Kekuatan reaksi berada dalam keadaan terdesak, sehingga sering timbul tanda² bahwa reaksi akan melakukan tindakan nekad, mengulangi pertjobaan kup dan mengulangi provokasi² jang sudah ber-ulang² mereka lakukan. Meskipun tidak ada anggota Masjumi-PSI dalam kabinet, tetapi mereka masih banyak mempunyai orang²nja jang menduduki tempat² penting didalam alat² negara, baik sebagai orang sipil maupun militer.

Kebalikan dari kedudukan reaksi jang makin lama makin terdjepit, PKI dan kekuatan demokratis pada umumnja makin lama makin berkembang. Organisasi² kaum buruh dan kaum tani, organisasi² pemuda dan peladjar, organisasi wanita dan kebudayaan mempunyai kesempatan berkembang jang lebih luas daripada ketika pemerintah masih dipegang oleh Masjumi-PSI. Kemungkinan² jang boleh dibilang tidak terbatas bagi perkembangan PKI dan organisasi² demokratis ini telah membikin kaum reaksioner lebih mata-gelap lagi.

Sesudah CC mengumumkan bahwa Kongres Nasional ke-V akan dilaksanakan dalam bulan Maret 1954, nampak aktivitas kaum imperialis dan kaum reaksioner didalamnegeri untuk mentjip-takan suasana jang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kongres PKI. Kita melihat kedatangan wakil Presiden Amerika, Nixon, dan kemudian disusul dengan kedatangan Gubernur Inggeris di Malaja, Mac Donald. Kedatangan dua orang besar dari kalangan dunia imperialis ini, terang bermaksud memperkuat front reaksi di Indonesia, untuk mengadakan tekanan² terhadap pembesar² Indonesia, untuk memutuskan kerdjasama antara PKI dengan partai² pemerintah, agar dengan demikian dapat mengisolasi PKI dan kemudian memukulnja.

Kaum reaksioner dalamnegeri mentjurahkan fikiran dan tenaga-nja untuk memfitnah dan memprovokasi PKI, dan djuga memprovokasi pemerintah untuk melakukan pengekangan kebebasan² demokratis. Mereka mau mengulangi apa jang sudah pernah mereka lakukan untuk menggagalkan Kongres ke-V PKI tahun 1948, jaitu dengan memprovokasi adanya kekatjauan didalamnegeri seperti „Provokasi Madiun”. Diantara tindakan provokatif mereka ialah demonstrasi jang diadakan oleh Masjumi-BKOI (1) pada tanggal 28 Februari di Djakarta. Demonstrasi ini diadakan dengan mendatangkan banjak orang dari luarkota dengan truk² onderne-ming asing dan dengan membawa slogan² anti-Komunis dan pro Amerika. Bukanlah sesuatu jang aneh kalau diantaranya banjak terdapat orang² dari gerombolan teror DI-TII. Dalam demonstrasi ini oleh kaum demonstran telah dilakukan pembakaran atas barang² prabot rumahtangga kepunjaan perwira² TNI jang bertempat-tinggal didekat Lapangan Banteng, disamping itu mereka melakukan pembunuhan kedjam terhadap seorang perwira TNI, Kapten Supartawidjaja. Mereka menginginkan supaya tindakan mereka ini diladeni setjara serampangan oleh PKI dan oleh seluruh kekuatan demokratis agar dengan demikian timbul kekatjauan jang besar, dimana terdjadi saling membunuh dan keributan di Djakarta kemudian diikuti oleh seluruh daerah.

Djika keadaan dalamnegeri mendjadi kalangkabut, kedudukan pemerintah mendjadi sulit, maka dalam keadaan demikian segenap kekuatan reaksi jang ada di Djakarta, diseluruh Djawa Barat dan dimana sadja, akan bangun serentak untuk bertindak terhadap pemerintah dan seluruh kekuatan demokratis. Kaum reaksioner selandjutnja se-olah² bertindak sebagai „pahlawan” jang mampu „menenteramkan” keadaan katjau itu dan kaum Komunis dijadikan kambing hitam daripada semua kekatjauan jang sudah terdjadi. Dengan demikian, menurut fikiran mereka, akan terbukalah djalan lebar untuk mengadakan razzia besar²an terhadap kaum Komunis dan golongan² demokratis. Tetapi latjur bagi kaum provokator, kesedaran Rakjat dan kewaspadaan PKI serta partai² demokratis lainnja telah menjebabkan gagalnya provokasi Masjumi-BKOI.

Kesimpulannja, kaum reaksi tidak hanja tidak berhasil mem-

bikin provokasi Madiun kedua dan Razia Agustus kedua, tetapi djuga tidak berhasil menimbulkan keadaan dimana pemerintah melarang dilangsungkannya Kongres PKI. Karena sifat ragu pemerintah Ali Sastroamidjojo, kaum reaksioner berhasil menggelintjirkan pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan larangan untuk semua demonstrasi. Larangan demonstrasi ini begitu keluar begitu diprotes oleh PKI, bahwa tindakan pemerintah adalah tidak adil dan tidak demokratis, dan kalau toh mau diadakan larangan tidak seharusnya larangan ditujukan kepada semua demonstrasi, tetapi seharusnya hanya ditujukan kepada demonstrasi Masjumi-BKOI yang telah melakukan teror dan kekatjauan sehingga menimbulkan ketegangan² didalam negeri. Karena larangan pemerintah inilah, yang menggunakan alasan untuk „mendjaga keamanan”, maka rapat penutup Kongres ke-V PKI yang sedianja diikuti oleh suatu demonstrasi raksasa mendjadi tidak dapat diteruskan.

Masalah Persekutuan Buruh Dan Tani Dan Front Persatuan Nasional

Salahsatu masalah penting dan pokok yang telah dijawab oleh Kongres ialah masalah persekutuan buruh dan tani dan front persatuan nasional. Masalah ini adalah masalah yang sudah mendjadi diskusi hangat didalam rapat² anggota, rapat² fraksi dan konferensi² Partai selama persiapan Kongres. Oleh karena itulah, mengenai masalah ini boleh dikatakan semua utusan mengambil bagian yang aktif dalam memberikan tjontoh² dan pengalaman² mereka diprovinsi masing². Pada umumnya tidak ada perbedaan pendapat yang penting mengenai semua masalah ini.

Sesudah berdiskusi yang mendalam Kongres sampai kepada kesimpulan, bahwa sebab pokok kekalahan revolusi Rakjat 1945-1948 adalah karena massa kaum tani yang ber-djuta² itu tidak dibangkitkan dan tidak ditarik kedalam revolusi. Mengingat pengalaman kekalahan revolusi yang pahit ini, Kongres menentukan tugas pokok PKI yang terdekat ialah memobilisasi dan menarik kaum tani. Dan Kongres menjedari djuga, bahwa kaum tani hanya bisa dimobilisasi dan ditarik dengan melalui perjuangan yang konsekwen dan teguh untuk menghapuskan milik feodal atas tanah

dan memberikan tanah² itu kepada kaum tani. Front anti-feodalisme itu harus diorganisasi demikian rupa sehingga kaum feodal (tuantanah) terisolasi samasekali dari kaum tani, termasuk dari kaum tani kaya yang djuga harus ditarik kedalam front ini.

Untuk mengerti benar tugas pokok yang terdekat dari PKI ini, ditekankan oleh Kongres supaya tiap² kader dan anggota PKI berusaha sungguh² untuk mengerti benar² hubungan agraria di desa, untuk mengetahui sampai kemana luasnya feodalisme di Indonesia. Kongres menjimpulkan, bahwa di Indonesia sekarang tentu sadja tidak terdapat lagi feodalisme yang 100%, tetapi yang ada ialah sisa² feodalisme yang penting dan berat.

Djadi, dasar untuk membentuk persekutuan buruh dan tani ialah melaksanakan kewadajiban terdekat dari PKI, yaitu melenjapkan sisa² feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodalisme, memberikan dengan tjuma² tanah tuantanah² kepada kaum tani sebagai milik perseorangan mereka. Kongres yakin, bahwa revolusi agraria adalah hakekat revolusi demokrasi Rakjat di Indonesia.

Kongres dengan suara bulat sepakat untuk tidak lagi menggunakan sembojan „nasionalisasi tanah” atau sembojan „semua tanah mendjadi milik negara”, tetapi sembojan yang tepat ialah „tanah untuk kaum tani”, „pembagian tanah kepada kaum tani” dan „milik perseorangan tani atas tanah”. Sembojan „nasionalisasi tanah” dan „semua tanah mendjadi milik negara” tidak digunakan, karena ini berarti merampas dari kaum tani bagian tanah yang sekarang sudah milik mereka, dan oleh karena itu sembojan ini tidak mungkin disokong oleh kaum tani.

Tentu sadja timbul persoalan, apakah dengan tidak mengadakan sembojan „nasionalisasi tanah” dan dengan mendjalankan pembagian tanah tuantanah² kepada kaum tani sebagai milik perseorangan kaum tani tidak berarti mengingkari kemungkinan² sosialis dalam perkembangan pertanian? Bukankah Sosialisme menghendaki agar alat² produksi, termasuk tanah, berada ditangan negara, djadi menghendaki supaya tanah djuga dinasionalisasi?

Laporan² didalam Kongres menyatakan, bahwa prinsip milik perseorangan atas tanah dinegeri kita adalah demikian berakarnya dalam kehidupan kaum tani sehingga kaum tani Indonesia tidak

bisa memahami revolusi agraria didalam bentuk lain ketjuali bentuk pembagian tanah tuantanah² mendjadi milik perseorangan mereka. Pengalaman dengan program BTI (Barisan Tani Indonesia), jang menuntut supaya „semua tanah mendjadi milik negara”, dan pengalaman dengan program RTI (Rukun Tani Indonesia) jang menuntut „nasionalisasi semua tanah”, membikin kaum tani atjuh tak atjuh atau tjuriga. Sembojan „tanah mendjadi milik negara” atau „nasionalisasi tanah”, jang ke-dua²nja sebetulnja adalah sama sadja, dan bagi kaum tani memang sama sadja, berarti daja-upaja untuk mengambil tanah jang sudah kepunjaan mereka. Makaitu, adalah perlu untuk menempuh djalan nasionalisasi dan kemungkinan² sosialis dalam perkembangan pertanian, tidak setjara langsung tetapi melalui djalan pembagian tanah tuantanah² sebagai milik perseorangan kaum tani. Kelak, kaum pekerdja tani jang merupakan golongan terbesar, akan sampai pada kesimpulan, berdasarkan pengalaman mereka sesudah revolusi agraria mendapat kemenangan, bahwa adalah perlu sekali untuk mempersatukan milik tanah jang ketjil² dan alat² kerdja mereka jang sederhana kedalam satu pertanian kolektif jang besar diatas tanah jang luas dan untuk mendapatkan bantuan negara dalam bentuk traktor², kombain² dan mesin² pertanian lainnja. Dengan perkataan lain, demikianlah kaum pekerdja tani kita menempuh djalan pertanian kolektif, djalan perkembangan sosialis.

Tetapi dengan menetapkan kewadajiban jang terdekat dari PKI seperti diatas, tidaklah berarti bahwa PKI mengabaikan pekerdjannja dikalangan inteligensia, burdjuasi ketjil kota maupun burdjuasi nasional jang djuga berkepentingan akan kebebasan dan kemerdekaan negerinja. PKI tetap berkewadajiban meneruskan dan memperbaiki pekerdjannja dikalangan inteligensia, burdjuasi ketjil kota maupun burdjuasi nasional. Dengan perkataan lain, PKI harus menggalang front persatuan nasional jang terdiri dari semua klas dan golongan Rakjat jang ditudjukan untuk melawan imperialisme Belanda guna mentjapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Front persatuan nasional ini per-tama² harus ditudjukan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing umumnja. Tetapi, bilamana imperialisme Amerika dan imperialis² asing lainnja memberikan bantuan bersendjata kepada

pendjadjah Belanda dan kakitangannja bangsa Indonesia, maka perjuangan mesti diarahkan kepada semua imperialis di Indonesia; milik mereka harus disita dan dinasionalisasi.

Kongres telah menarik kesimpulan jang tetap, jaitu bahwa kuntji kemenangan terletak pada pentjiptaan front persatuan nasional dari kaum buruh, tani, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional atas dasar persekutuan anti-feodalisme daripada kaum buruh dan tani, serta dibawah pimpinan klas buruh untuk melawan imperialisme Belanda.

Djadi, satu²nja garis politik PKI jang tepat ialah membentuk persekutuan buruh dan tani dan diatas dasar ini mendirikan front persatuan nasional. Ini berarti, bahwa tugas pokok PKI bukanlah mengadakan pemitjaraan² dan konferensi² dengan partai² lain didalam dan diluar parlemen, untuk membentuk dan memperkuat front persatuan jang dimaksud front persatuan nasional jang sungguh² sebagai dasar untuk mentjiptakan suatu pemerintah demokrasi Rakjat. Dengan ini tidak berarti PKI mengingkari adanja kenyataan, bahwa blok² dan kesatuan² aksi dengan berbagai partai dalam keadaan tertentu adalah penting dan perlu. Dengan ini hanya mau ditekankan bahwa tidak bisa ada omongan tentang front persatuan nasional jang sungguh², bahkan pasti tidak bisa kita berbitjara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis didalam front persatuan ini selama massa buruh dan tani tidak diorganisasi dan ditarik kedalam front ini.

Putusan² Penting Lainnja

Perubahan jang terpenting mengenai *susunan organisasi* ialah, pertama tentang pemberian keleluasaan dan kelonggaran jang lebih besar kepada pimpinan Partai tingkat provinsi, dan kedua tentang kedudukan grup² sebagai kesatuan jang terketjil dari Partai.

Ketika Partai baru dibangun kembali pada tahun 1951, adalah tepat putusan CC jang memberikan kedudukan kepada Komisariat² CC hanya sebagai pembantu CC dalam memberikan pimpinan kepada Komite² Seksi. Komisariat² CC dibentuk atas angkatan CC, djadi tidak dipilih dari bawah. Ini adalah tepat, karena dengan djalan ini CC mempunjai pembantu² jang teper-

tjaja dalam membangunkan organisasi² Partai di-daerah², dengan djalan ini CC mempunyai hubungan langsung dengan Komite² Seksi, dan dengan ini djuga CC mengenal langsung kader² jang memimpin Komite² tersebut. Selain daripada itu tindakan ini adalah tepat, karena pada waktu itu, berhubung masih sangat kurangnya kader Partai, adalah sulit untuk mendapatkan kader² daerah jang dapat disertai memimpin Komite² provinsi atau jang setingkat dengan provinsi.

Tetapi, setelah Komite² Seksi merata terbentuk dan kader² daerah mulai banjak jang meningkat, maka sistim Komisariat CC sudah tidak tepat lagi, ia tidak lagi mendorong perkembangan Partai di-provinsi², tetapi sebaliknya sudah menjadi penghalang bagi kehidupan demokrasi didalam Partai, penghalang bagi perkembangan organisasi dan pertumbuhan kader. Disamping itu, karena sudah banjaknya Komite² bawahan, CC sudah tidak mungkin lagi memberikan pimpinan setjara langsung kepada Komite² Seksi. Kongres Nasional ke-V berkejakinan, bahwa dengan menghapuskan sistim Komisariat CC, dan dengan menggantinya dengan Provinsi Komite (Provcom) jang dipilih setjara demokratis dari bawah serta mempunyai lebih banjak keleluasaan dan kelonggaran dalam bertindak, maka perkembangan Partai di-provinsi² akan lebih terjamin. Selain daripada itu, Komite² pada tingkat provinsi ini akan dapat memberikan perhatiannya jang lebih besar kepada persoalan² sukubangsa atau sukubangsa² jang hidup diprovinsinya masing². Dengan sendirinya, ini akan merupakan bantuan jang tidak ketjil kepada CC.

Organisasi basis Partai ialah Resort. Dibanjak desa dan tempat-kerdja terdapat anggota dan tjalon-anggota Partai jang terdabung dalam Resort sampai berdjumlah ratusan orang. Untuk mengadakan rapat organisasi basis sampai ratusan orang adalah tidak mudah dan tidak tepat. Oleh karena itu, Kongres menjetudjui pembagian Resort didalam grup² jang terdiri dari se-banjak²nya 7 orang tiap grup. Rapat anggota hanya diadakan didalam grup, sedangkan rapat Resort dihadiri oleh wakil² dari grup. Tindakan ini adalah tindakan jang dapat memelihara dan mempertinggi militansi Partai.

Adanja resolusi Kongres mengenai *Tan Ling Djie-isme*, akan

sangat membantu anggota² Partai dalam memahami kesalahan² pimpinan Partai dimasa jang lalu, kesalahan² jang besar dilapangan organisasi, politik maupun ideologi. Ia akan sangat membantu anggota² Partai dalam perdjjuangan melawan oportunisme kanan dan „kiri“, dan ia seterusnya akan menghidupkan perdjjuangan ideologi jang sehat didalam Partai, berdasarkan pengalaman² jang kongkrit dari PKI sendiri. Ia akan membantu perdjjuangan mempertahankan kebebasan daripada Partai dan perdjjuangan melawan sektarisme. Diterimanya resolusi tentang Tan Ling Djie-isme dengan suara bulat oleh Kongres berarti bahwa pimpinan PKI untuk pertama kalinya dalam sedjarah PKI bersatu disegala lapangan dan dengan ini menempuh djalan baru untuk persatuan jang lebih kuat lagi. Ini adalah djaminan untuk persatuan seluruh Partai. Dengan ini kekuatan Partai tidak lagi dalam keadaan terpetjah-belah karena adanya pertentangan² jang prinsipil diantara pemimpin² Partai, dan se-besar²nya kekuatan Partai dapat dipukulkan kepada musuh² Partai dan musuh² Rakjat.

Diterimanya *Manifes Pemilihan Umum* oleh Kongres adalah satu tindakan permulaan jang penting dari Partai dalam menghadapi pemilihan umum jang akan datang. Dengan manifes ini Partai tampil kegelanggang pemilihan umum dengan programnya sendiri, jang diambil dari Program Partai, jaitu dokumen terpenting jang djuga sudah disahkan oleh Kongres ke-V. Manifes Pemilihan Umum PKI telah membikin djelas kepada Rakjat siapa sahabat² Rakjat dan siapa musuh² Rakjat, berdasarkan pengalaman Rakjat sendiri. Manifes ini telah meletakkan kewadajiban dan tanggungdjawab jang berat diatas pundak tiap² anggota dan simpatisan Partai, karena bukanlah pekerdjaan jang mudah untuk mengalahkan musuh² Rakjat didalam pemilihan umum jang akan datang. Tetapi keadaan politik dinegeri kita dan keadaan Partai kita ketika Manifes itu dibuat menunjukkan adanya kemungkinan untuk mengadakan perubahan penting didalam politik di Indonesia dengan melalui pemilihan umum jang akan datang. Sjaratnya ialah, Partai harus memperbaiki dan memperhebat pekerdjaannya dikalangan kaum buruh dan kaum tani, dan berdasarkan ini memperbaiki dan memperhebat pekerdjaan menggalang front persatuan nasional. Sistim demokrasi Rakjat sebagai jang disebut didalam

Manifes Pemilihan Umum hanya mungkin dijumpai jika Partai mendapat sokongan yang kuat dari kalangan kaum buruh dan kaum tani, dan jika Partai dapat menggalang kerdjasama yang erat dengan golongan² dan partai² demokratis. Oleh karena itulah, sjarat yang paling menentukan untuk menjapai sukses dalam pemilihan umum yang akan datang ialah kegiatan Partai dalam memimpin aksi² untuk membela kepentingan se-hari² daripada semua kelas dan semua golongan Rakjat dan kemampuan Partai menggalang kerdjasama yang erat dengan golongan² dan partai² demokratis.

Kongres juga menerima usul CC tentang rentjana *peluasan keanggotaan dan organisasi Partai*. Usul CC ini didasarkan atas kenyataan, bahwa ada atau tidak ada rentjana peluasan setjara sentral, anggota dan organisasi Partai pasti akan meluas, dalam jumlah maupun dalam luas daerah. Kongres berpendapat bahwa peluasan keanggotaan dan organisasi Partai akan jauh lebih baik jika menurut rentjana yang tertentu.

Pengalaman yang pertama mengenai peluasan keanggotaan dan organisasi yang berentjana dalam tahun 1952, yang diberi nama rentjana peluasan „Angkatan Jalan Baru”, dianggap oleh Kongres sebagai pengalaman yang penuh pelajaran dan berakibat sangat baik bagi perkembangan PKI. Tetapi juga berdasarkan pengalaman peluasan berentjana yang pertama, Kongres menekankan bahwa peluasan berentjana yang kedua ini, yang diberi nama „Angkatan Kongres Nasional ke-V”, hanya akan baik akibatnya bagi perkembangan Partai jika peluasan ini disertai oleh pendidikan besar²an dikalangan anggota Partai. Terutama dirasakan sekali tentang perlunya dan pentingnya pendidikan teori untuk kader² Partai.

*

Semua utusan berpendapat, bahwa dokumen² yang sudah disahkan oleh Kongres akan sangat mendorong perkembangan PKI dan perkembangan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Ja, sebagaimana dikatakan didalam pidato penutup Kongres, putusan² yang sudah diambil akan membawa PKI dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju.

Kenapa akan membawa PKI dan gerakan revolusioner puluhan tahun lebih maju? Fikirkan saja, revolusi Indonesia yang tadinya tidak mempunyai program, sekarang sudah mempunyai program, dijiptakan oleh Kongres ke-V PKI. Revolusi Agustus sudah menunjukkan, bahwa revolusi yang tidak mempunyai program, tidak mungkin terpinpin dan tidak mungkin menang. Tetapi sebaliknya, gerakan revolusioner mana yang tidak mendapat motor dengan adanya program yang tepat dan yang tjotjek dengan tuntutan gerakan itu sendiri? Fikirkan saja, soal² pokok tentang organisasi dan taktik PKI yang tadinya masih samar², sekarang semuanya telah menjadi terang-benderang, berkat Kongres ke-V PKI. Fikirkan saja, suatu Partai yang sudah lebih 30 tahun diombang-ambingkan oleh oportunisme kanan dan „kiri”, oleh dogmatisme dan empirisme, yang dalam tahun² belakangan ini mendapat bentuk Tan Ling Djie-isme, dan yang tadinya belum jelas jalan yang harus ditempuh untuk mengalahkannya, sekarang jalan itu sudah ditemukan, berkat Kongres ke-V Partai. Fikirkan saja, suatu Partai yang mempunyai tugas sedjarah memimpin gerakan kemerdekaan Rakjat, tetapi yang sedjak berdirinya belum pernah mempunyai Konstitusi yang memenuhi kebutuhan, atau tahun² belakangan ini baru mempunyai Konstitusi Sementara, sekarang sudah mempunyai Konstitusi tetap yang disahkan oleh Kongres Partai. Fikirkan saja, suatu Partai yang untuk pertama kalinya menghadapi pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante, dalam Kongres ke-V yang lalu telah berhasil menjiptakan sebuah Manifes untuk menghadapi pemilihan umum itu. Bagaimana seandainya tidak ada semuanya ini? Bagaimana kalau tidak ada Kongres ke-V Partai? Tidaklah ber-lebih²an kalau dikatakan, bahwa seandainya tidak ada semuanya ini, maka PKI dan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia masih puluhan tahun terbelakang daripada sekarang. Oleh karena itulah, dengan berlangsungnya Kongres yang lalu maka berlangsunglah peristiwa sedjarah yang penting, yang takkan terlupakan oleh kaum progresif Indonesia, apalagi oleh kaum Komunis Indonesia.

*

Demikianlah putusan² jang terpenting jang sudah diambil oleh Kongres Nasional ke-V PKI. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Kongres telah mentjapai hasil² jang besar. Kongres telah mempersendjaitai Partai dengan putusan² jang terang, jang dapat memimpin aktivitet Partai se-hari², dapat menentukan taktik Partai disegala lapangan dan di-tiap² provinsi.

Kongres Nasional ke-V PKI telah mendjawab semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia, Kongres telah mengambil tindakan² untuk melantjarkan pekerdjaan² organisasi Partai, untuk mempersatukan Partai disegala lapangan, untuk memenangkan kekuatan demokratis dalam pemilihan umum jang akan datang, dan untuk peluasan keanggotaan dan organisasi Partai.

Dengan program Partai jang baru dan dengan putusan² Kongres Nasional ke-V PKI lainnja, Partai madju terus dengan langkah²nja jang lebih teratur menudju haridepan jang indah dari Rakjat Indonesia jang djaja.

Tulisan ini dibuat berkenaan dengan ulangtahun ke-34 PKI, jaitu ulangtahun pertama sesudah Kongres Nasional ke-V Partai. Dalam menekankan kembali tugas² Partai jang urgen sebagaimana jang diputuskan oleh Kongres tersebut, kawan Aidit menundjukkan artipenting khusus dari pekerdjaan ideologi dan pendidikan dikalangan anggota Partai bagi pelaksanaan tugas² jang berat itu.

PERKUAT PERSATUAN NASIONAL DAN PERKUAT PARTAI!

Hari 23 Mei tahun ini adalah hari ulangtahun PKI yang ke-34. Ini adalah ulangtahun yang pertama sesudah Kongres Nasional ke-V yang bersedjarah, Kongres yang telah mendjawab semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia.

Sudah 34 tahun usia PKI, tetapi djalan pengabdian PKI kepada proletariat dan Rakjat Indonesia serta kepada proletariat internasional belum pernah begitu terang seperti sekarang, dimana PKI sudah mempunyai program, garis taktik dan garis organisasi yang tepat.

Terpetjahkannya masalah² penting dan pokok dari revolusi Indonesia dalam Kongres PKI yang baru lalu tidak hanya telah membawa PKI puluhan tahun lebih madju, tetapi djuga telah membawa gerakan revolusioner Rakjat Indonesia puluhan tahun kedepan. Hal ini telah melipatgandakan kemampuan dan kegembiraan bekerdja kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia dalam perjuangannya untuk kepentingan yang vital dari massa dan untuk haridepan yang lebih baik.

Pada hari ulangtahun ke-34 PKI ini perlu ditekankan kepada tiap² anggota PKI tentang dua kewadajiban yang sangat urgen, sebagaimana sudah diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V. Pertama, kewadajiban menggalang front persatuan nasional anti-imperialisme yang berdasarkan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme; kedua, kewadajiban meneruskan pembangunan PKI yang dibolsjewikkan, yang meluas diseluruh Indonesia dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi.

Dua tugas yang sangat urgen ini lebih mudah dikatakan atau ditulis. Tetapi ia tidak mudah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya menghendaki tjurahan fikiran, tjurahan tenaga dan tjurahan djiwa yang luarbiasa. Ia menuntut kepada tiap² Komunis untuk

bekerdja lebih keras, bekerdja dengan otak dan bekerdja dengan tenaga badan. Dua kewadajiban inilah yang harus mendjadi pokok-pangkal aktivitas anggota² PKI. Pada pelaksanaan kedua kewadajiban inilah terletak haridepan revolusi Indonesia, haridepan Rakjat Indonesia.

*

Front persatuan nasional yang harus dibentuk oleh PKI bukanlah front persatuan yang formil, tetapi front persatuan yang njata, yang kongkrit, yang sungguh². Bukan persatuan yang hanya kelihatan djika kebetulan ada rapat² benggolan partai² dan organisasi² massa atau djika kebetulan ada resepsi² yang dihadiri oleh wakil² partai² dan organisasi² massa. Yang harus dibentuk oleh PKI bukan front persatuan yang terdiri dari benggolan², tetapi front persatuan yang berfondamenkan massa Rakjat yang ber-puluh² djuta djumlahnya.

Front persatuan nasional yang berfondamenkan massa Rakjat hanya mungkin dibentuk djika kaum Komunis tidak henti², tidak djemu² dan terus-menerus memperbaiki dan menjempurnakan pekerdjaannya dikalangan kaum tani, disamping memperbaiki dan menjempurnakan pekerdjaannya dikalangan kaum buruh. Inilah sjarat untuk mentjiptakan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan persekutuan inilah yang harus mendjadi dasar daripada front persatuan nasional kaum buruh, kaum tani, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional.

Djadi, bekerdja dikalangan kaum buruh dan tani adalah bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok dari PKI.

Langkah pertama dalam pekerdjaan dikalangan kaum buruh, kaum tani, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional ialah membantu mereka dalam perjuangan untuk kebutuhan mereka se-hari², untuk mendapatkan tuntutan²-bagian mereka. Agitasi dan propaganda adalah sangat penting untuk mempersatukan dan memberi pendidikan politik kepada Rakjat. Tetapi persatuan tidak dapat ditjapai hanya dengan agitasi dan propaganda sadja. Persatuan yang sungguh² dan kesadaran politik hanya dapat lahir didalam aksi² untuk melaksanakan program bersama yang

kongkrit dari tiap² golongan dan dari seluruh massa Rakjat. Agitasi dan propaganda dengan tiada disertai pekerdjaan se-hari² jang radjin dalam membantu Rakjat adalah tidak lain daripada omongkosong. Omongkosong adalah musuh kaum Komunis. Omongkosong adalah pembawaan jang sewadjarnja daripada kaum trotskis dan sosialis kanan.

Djadi, memperkuat persatuan nasional hanya bisa dengan bekerja lebih banyak, lebih sungguh², lebih ulet dan lebih militan dalam membantu Rakjat, terutama membantu kaum buruh dan kaum tani, dalam perjuangan mereka untuk kebutuhan se-hari².

Apakah ini berarti bahwa kaum Komunis tidak boleh ambil bagian jang aktif didalam badan² Kontak, Panitia² Kerdjasama, Badan² Kordinasi antara partai² dan organisasi² massa? Samasekali tidak demikian! Badan² kerdjasama demikian ini tetap ada gunanja, dan tempo² sangat berguna. Badan² kerdjasama begini djuga dapat membantu dalam memudahkan usaha² mengisolasi musuh² Rakjat dan mempersatukan serta memobilisasi massa jang berada dibawah pimpinan partai² dan organisasi² massa jang tergabung itu. Tetapi ini adalah kewadajiban nomor dua dalam menggalang persatuan nasional. Kewadajiban nomor satu ialah menggalang kerdjasama dikalangan massa sendiri, berdasarkan program bersama dan aksi bersama. Ini kuntji persatuan dan ini kuntji kemenangan.

Perlu ditegaskan lagi, bahwa kemungkinan bagi penggalangan front persatuan nasional pada waktu ini adalah tidak terbatas. Pengalamannya sendiri telah mendidik Rakjat Indonesia untuk mentjintai persatuan dan untuk berdjung guna persatuan. Tidak ada tempat jang tidak membutuhkan persatuan dan tidak ada tempat jang tidak dapat digalang persatuan. Persatuan perlu dan dapat digalang dipabrik, dibengkel, dikantor, diperkebunan, dipelabuhan, dikota, dikampung, digang, didesa, dipegunungan dsb. Persatuan dapat digalang antara buruh, tani dan inteligensia, Komunis, Nasionalis, Islam, Kristen, Sosialis, dsb.

Persatuan Nasional hanya mungkin kuat, djika ada Partai Komunis jang kuat. Ini adalah sewadjarnja, karena Partai Komunislah jang paling konsekwen melawan feodalisme dan imperialisme, dan Partai Komunislah jang mempunyai sjarat untuk memimpin massa pekerdja jang se-luas²nja. PKI hanya bisa kuat

djikalau PKI sudah meluas diseluruh Indonesia dan mempunyai karakter massa jang luas, djikalau PKI sudah sepenuhnya dikonsolidasi dilapangan politik, ideologi dan organisasi.

Bahwa PKI sekarang sedang merasuk kedalam tulangsum masyarakat Indonesia dan bahwa ia sedang menjebarkan diri keseluruh Indonesia, adalah satu kenyataan. Dengan program PKI jang sekarang, dengan garis taktik dan garis organisasi jang djalankan oleh PKI sekarang dan dengan kegiatan bekerja seperti jang dimiliki oleh kader² PKI sekarang, bukanlah barang jang kebetulan kalau PKI pada akhir tahun ini mendjadi Partai jang mempunyai anggota dan tjalon-anggota satu djuta; bukan anggota jang hanya sekedar terdaftar, tetapi anggota jang terorganisasi dan mendapat didikan. Dalam keadaan dimana kaum buruh, kaum tani dan inteligensia Indonesia mulai djemu dan muak melihat partai² burdjuis, terutama Masjumi-PSI, jang sudah terlalu banyak membohongi dan menipu Rakjat, jang dengan tidak tahu malu melakukan korupsi dan kedjahatan² lain terhadap Rakjat, bukanlah satu hal jang kebetulan kalau massa kaum buruh dan kaum tani serta inteligensia jang sadar hanya dapat memberikan keper-tjaannya kepada kaum Komunis, kepada PKI.

Djadi, soal meluaskan keanggotaan PKI dan meluaskan organisasi PKI keseluruh Indonesia bukanlah soal jang berat. Jang berat ialah, bagaimana mengkonsolidasi semuanya ini. Bagaimana supaya semua orang jang masuk PKI, jang sudah lama maupun jang baru, mendapat pendidikan politik, ditingkatkan ideologinya dan diorganisasi jang rapi. PKI akan mendjadi Partai jang rapuh dan tidak berdjaja, djika PKI tidak mengkonsolidasi diri dilapangan politik, ideologi dan organisasi.

Kita tidak mungkin menolak kaum buruh, kaum tani dan inteligensia jang sadar, jang dengan mengetahui segala risikonja mau masuk PKI. Kita harus menerima mereka dengan kedua-dua tangan kita, karena mereka adalah penghubung² jang baik antara Partai dengan massa.

Peluasan keanggotaan Partai dan pekerjaan Partai menggalang front persatuan nasional dengan partai² dan dengan klas² lain hanya dapat dilakukan dengan tepat, djika Partai memegang teguh kebebasannya dilapangan politik, ideologi dan organisasi. Kebebas-

an ini hanya dapat dipegang teguh jika Partai tidak henti-hentinya mengintensifkan pekerjaan ideologi dan pendidikan dikalangan anggota² dan kader²nya.

Kalau beberapa tahun yang lalu kader² Partai mengeluh kekurangan bahan untuk mendidik anggota dan tjalon-anggota Partai, dan mereka mengeluh karena tidak mengetahui bagaimana seharusnya anggota² diorganisasi, maka sekarang keluhan demikian itu sudah kurang pada tempatnya. Walaupun belum kompli, tetapi sudah memadai bahan² yang ada untuk mendidik anggota dan tjalon-anggota Partai, misalnja yang berupa putusan² Kongres Nasional ke-V maupun yang berupa tulisan² lain. Sekedar yang penting² sudah ditulis dan sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Konstitusi Partai yang disahkan dalam Kongres yang baru lalu adalah bahan pendidikan yang penting dan senjata yang penting pula untuk mengorganisasi anggota² Partai dan untuk mengorganisasi seluruh Partai.

Djadi, tidak bisa ada omongan tentang peranan memimpin dari klas buruh, selama Partai tidak teguh memegang kebebasannya dan tidak menjalankan politiknya yang berdiri sendiri. Untuk ini Partai harus memperkuat barisannya. Partai mesti mengintensifkan pekerjaan ideologi dan pendidikan dikalangan anggota²nya, Partai mesti menguatkan disiplin, yang sama bagi semua anggota. Partai harus memelihara kesatuan tenaganya.

Demikian sjarat²nya untuk memperkuat front persatuan nasional dan ini juga penting untuk kemenangan PKI dan partai² demokratis lainnya dalam pemilihan umum yang akan datang. Demikianlah sjarat²nya untuk memperkuat Partai, untuk membikin Partai kita tetap ditjintai oleh Rakjat dan menjadi kebanggaan Rakjat.

Dengan ingat dan sadar akan tugas² yang berat inilah kita memperingati ulangtahun Partai yang ke-34 ini.

Hidup Revolusi Agustus ! adalah sambutan pada ulangtahun kesembilan Revolusi 17 Agustus 1945. Dalam artikel ini kawan Aidit memberikan penilaian tepat yang tinggi kepada revolusi Rakjat itu. Walaupun revolusi mengalami kekalahan, tapi ia telah membangkitkan Rakjat Indonesia, menggembeleng dan mendidiknya untuk menolak tiap bentuk perbudakan. Semangat Revolusi Agustus hidup terus dalam kalbu bangsa Indonesia dan mendjiwai setiap kemajuan gerakan Rakjat kita.

HIDUP REVOLUSI AGUSTUS!

Dapat kita bajangkan betapa gelapnja Indonesia sekarang se-andainja tidak ada Revolusi Agustus 1945. Bajangkanlah, betapa hebatnja tekanan lahir dan batin jang harus diderita oleh Rakjat Indonesia jang hidup dibawah naungan bendera asing dengan kekuasaan asing se-wenang², jang memandang tiap² kemadjuan gerakan Rakjat sebagai tabu, walaupun kemadjuan itu hanya sangat sedikit. Bajangkanlah, bagaimana Rakjat Indonesia hidup hanya di-iming²i dengan djandji² jang samar² oleh pemerintah Belanda tentang pemerintah sendiri untuk Indonesia, djandji² jang tidak akan dilaksanakan.

Revolusi Agustus 1945 walaupun menderita kekalahan pada achir tahun 1948 karena perbuatan pengchianat² nasional, telah membikin tidak mungkin lagi kembalinja kekuasaan asing jang mutlak di Indonesia. Memang, kita tidak habis²nja menjajangkan dan menjesali kekalahan jang diderita oleh Revolusi Agustus, tetapi berkat pernah ada Revolusi Agustus jang besar, keadaan Indonesia sekarang sudah tidak begitu gelap lagi. Keadaan sekarang memberi kemungkinan² jang tidak terbatas kepada gerakan Rakjat jang revolusioner.

Revolusi Agustus telah mendjadikan persoalan kita sekarang lebih sederhana, jaitu bagaimana menggunakan hak² politik jang didapat berkat Revolusi Agustus se-maximal²nja untuk mengembangkan dan mengkonsolidasi kekuatan Rakjat. Tidak ada lain jang dapat menebus kekalahan Revolusi Agustus ketjuali kekuatan Rakjat sendiri, kekuatan jang terorganisasi dan terpimpin. Hanya kemenangan gerakan Rakjat di-hari² jang akan datang jang dapat merealisasi tudjuan² Revolusi Agustus.

Revolusi Agustus telah mengalami kekalahan, dalam arti bahwa revolusi ini tidak mentjapai tudjuannja jang objektif. Persetudjuan KMB jang chianat, jang dibikin pada achir tahun 1949, telah mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, telah

mengundang kembali kaum kapitalis monopoli asing untuk mengeduk kekajaan alam Indonesia dan untuk menghisap Rakjat Indonesia.

Tetapi, walaupun kaum kapitalis monopoli Belanda, dibantu oleh kaum imperialis Amerika dan Inggeris, telah menggunakan segala matjam manuver dan intrik, menggunakan peluru dan bom dan dibantu oleh kakitangan²nja didalam negeri, mereka tetap gagal dalam mengembalikan Indonesia kepada keadaan seperti sebelum revolusi.

Satu kali Rakjat Indonesia sudah dibangunkan oleh revolusi Rakjat jang begitu besar, satu kali Rakjat Indonesia sudah digembleng selama tiga tahun oleh revolusi (1945 — 1948), Rakjat ini sudah tidak mungkin lagi diperlakukan seperti sebelum revolusi, revolusi sudah mendidik Rakjat Indonesia bagaimana berkuasa atas nasibnja sendiri, revolusi telah mendidik Rakjat Indonesia untuk menolak tiap² bentuk perbudakan.

Kesedaran Rakjat Indonesia akan harga diri, kemadjuan jang ditjapai Rakjat Indonesia dilapangan politik, dilapangan semangat dan keberanian berdjjuang selama tiga tahun revolusi adalah djauh lebih besar daripada kesedaran dan kemadjuan jang sudah ditjapai oleh gerakan Rakjat selama 350 tahun penindasan VOC dan pendjadjahan Belanda ditambah dengan 3½ tahun pendjadjahan Djepang. Inilah sebabnja mengapa Rakjat Indonesia memberikan nilai jang sangat besar pada Revolusi Agustus, walaupun revolusi itu sendiri menderita kekalahan. Inilah sebabnja mengapa Rakjat Indonesia tidak mungkin melupakan pemuda² revolusioner jang telah memberanikan diri mendesak supaya Republik Indonesia diproklamasikan, walaupun fasisme Djepang ketika itu masih berkuasa penuh dan walaupun pemuda² itu tidak mempunyai program jang kongkrit untuk revolusi jang di-idam²kannja. Tetapi jang pasti jalah bahwa pemuda² ini tahu perasaan jang hidup di-tengah² Rakjat, tahu getaran djiwa Rakjat jang sudah tidak tahan lagi memikul beban² perang jang ditimpakan oleh fasisme Djepang, dan berani bertindak sebagai djurubitjara Rakjat. Inilah sebabnja putera² Indonesia jang sedar bukan main marahnja dan bukan main besar kutukkannja kepada pengchianat² nasional jang telah menjebabkan kalahnja Revolusi Agustus.

Pada tanggal 17 Agustus tahun ini Rakjat Indonesia memperingati ulangtahun kesembilan Revolusi Agustusnja, Republiknja. Sebagaimana tiap² tahun, terutama tahun jang baru lalu, djuga tahun ini hari ulangtahun revolusi akan diperingati oleh massa Rakjat jang luas.

Panitia² peringatan dibentuk diseluruh Indonesia, dikota besar dan ketjil, dipabrik dan didesa. Dalam panitia² 17 Agustus duduk wakil² partai dan organisasi massa disamping wakil² pemerintah setempat. Untuk membikin peringatan ulangtahun revolusi, diadakan kerdjasama jang luas antara pemimpin² partai² nasionalis, pemimpin² PKI, pemimpin² partai² jang berdasarkan keagamaan, pemimpin² organisasi buruh, tani, pemuda, wanita, kebudayaan, dsb. Djuga pemimpin² lokal dari partai Masjumi dan PSI, walaupun diluar persetudjuan pemimpin² sentralnja, ikut duduk dalam panitia 17 Agustus.

Sebagaimana tahun² jang lalu, peringatan tahun ini akan dirajakan dengan rapat² umum dimana diadakan pidato² jang mengadjak seluruh Rakjat ingat kembali kepada Revolusi Agustus, ingat kembali kepada keberwiraan, keberanian dan kemampuannja dalam Revolusi Agustus, dan ditekankan bahwa tudjuan Revolusi Agustus belum tertjapai.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati dalam keadaan dimana klas buruh Indonesia sudah lebih terorganisasi dan lebih kuat persatuannja. Kaum buruh Indonesia lebih bersatu dalam membela nasibnja. Ini dibuktikan oleh adanja tuntutan bersama beberapa bulan jang lalu dari seluruh serikatburuh pemerintah, baik anggota SOBSI maupun jang bukan anggota SOBSI, untuk mendapatkan upah extra berhubung dengan hariraja „Lebaran“. Walaupun tuntutan ini tidak seluruhnja dipenuhi oleh pemerintah, tetapi hasil² jang ditjapai adalah menggembirakan. Kedjadian ini telah menanamkan kejakinan pada kaum buruh dan pegawai pemerintah tentang pentingnja persatuan dan tentang kesungguhan SOBSI dalam membela kepentingan mereka.

Ketika perajaan hari 1 Mei jang lalu, ketjuali sebagian ketjil

kaum buruh jang dibawah pengaruh partai Masjumi dan PSI, boleh dikatakan semuanya bersatu memperingati hari kemenangan kaum buruh itu. Pidato² jang diutjapkan dalam rapat² 1 Mei tahun ini pada umumnja mempunyai garis jang tegas mengenai pembelaan nasib kaum buruh, mengenai pembelaan hak² demokrasi, mengenai pentingnja persatuan nasional dan mengenai perjuangan untuk perdamaian abadi.

Aksi² kaum buruh untuk kenaikan upah, untuk melawan diskriminasi dan mempertahankan hak² demokrasi berada dalam keadaan jang terus meningkat.

Kaum buruh Indonesia dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia ber-angsur² menjedari tanggungjawab jang besar jang terletak diatas pundaknja. Pengalaman selama Revolusi Agustus serta didikan jang diberikan oleh Partai Komunis mengadakan, bahwa klas buruh Indonesia tidak hanya harus berjuang untuk kepentingan klasnja, tetapi djuga untuk kepentingan semua klas dari Rakjat Indonesia jang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme.

Ber-angsur² klas buruh Indonesia mendjadi sedar bahwa kemerdekaan bagi dirinja hanya bisa tertjapai djika ia berjuang untuk kemerdekaan seluruh bangsa, djika kaum pendjadjah dan madjikan² asing sudah tidak ada lagi di Indonesia dan djika kekuasaan dilapangan politik dan ekonomi sudah ada ditangan suatu pemerintah Rakjat sendiri. Kenaikan upah dan hasil tuntutan² lainnja tidak mungkin langgeng, djika tidak ada perubahan penting dalam politik, djika tidak ada perubahan sistim politik dan ekonomi, djika tidak ada penggantian kekuasaan kaum imperialis dan tuantanah dengan kekuasaan seluruh Rakjat dibawah pimpinan klas buruh.

Makin tinggi kesedaran klas buruh Indonesia akan rol politiknya, makin besar djaminan untuk kemenangan seluruh Rakjat atas kaum imperialis dan tuantanah.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati didalam keadaan dimana gerakan kaum tani sedang meluas. Boleh

dikatakan disemua provinsi kaum tani mulai bangun, dan dibeberapa provinsi gerakan tani sudah agak terkonsolidasi sehingga tidak mudah lagi dipatahkan.

Beratus-ratus ribu kaum tani, yang sudah terorganisasi maupun yang belum terorganisasi, yang tergabung dalam BTI (Barisan Tani Indonesia) maupun yang tidak, telah berdjuaug dengan sengit membela tanahnja yang didapatnja dizaman pendudukan Djepang, dizaman revolusi tahun 1945-1948 maupun dalam tahun² belakangan ini.

Tidak hanja petani lelaki yang sudah dewasa, tetapi djuga anak² dan isteri kaum tani mengambil bagian yang luarbiasa aktifnja dalam perdjuaugan untuk mempertahankan tanah mereka dari perampasan ondernemer² asing.

Sangat mengharukan kalau kita ingat betapa tidak takut sedjung rambutpun isteri² dan anak² petani di Tandjung Morawa (Sumatera Timur) sengadja berdiri menghalangi traktor yang mau menggilas kebun dan rumah mereka. Bulat tekad mereka, jaitu bahwa traktor itu harus menggilas mereka lebih dulu sebelum menggilas kebun dan rumah tempattinggal mereka. Kebulatan tekad kaum tani Tandjung Morawa ini telah memaksa traktor² pada mundur dan masuk kandang.

Kekuatan mana pula yang akan mampu menaklukkan tekad kaum tani Wates (1). Isteri² dan anak² kaum tani Wates berdjun² minta diangkut dengan truk² polisi kependjara, agar mereka dapat dipendjarakan bersama suami dan bapak mereka. Mereka mempunjai tekad demikian, karena mereka yakin bahwa tidak akan ada satu pemerintahan di Indonesia yang mampu mengeluarkan ongkos untuk membikin rumah pendjara yang dapat memuat semua petani Indonesia dengan keluarganja.

Kaum tani di Bojolali dan Klaten (Djawa Tengah) sudah lebih dulu mendapat kemenangan terhadap ondernemer² asing. Ondernemer² asing sudah menjerah kalah, tanah sudah ditangan kaum tani kembali. Kaum tani didaerah ini merupakan kekuatan yang sangat besar dalam usaha menghantjurkan gerombolan teror „Darul Islam”. Pemerintah setempat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakui besarnja djasa² kaum tani dalam menghantjurkan gerombolan² teror.

Kaum tani Indonesia di-provinsi² Sumatera Utara, Djawa Timur dan Djawa Tengah telah berdjuaug seperti banteng melawan traktor² dan alat² negara yang dikerahkan untuk memenuhi kepentingan kaum kapitalis monopoli asing akan tanah. Achirnja, berkat perdjuaugan yang tidak kenal takut dari petani² ditiga provinsi ini, kaum tani mendapat kemenangan, tidak hanja kemenangan bagi kaum tani ditiga provinsi tsb., tetapi djuga bagi kaum tani di-provinsi² lain. Berkat perdjuaugan kaum tani ditiga provinsi tsb., dalam bulan Djuni yang lalu pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan Undang² Darurat No. 8 tahun 1954 yang diberi nama „Undang² Darurat Tentang Penjelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakjat”.

Tentu ada bagian² dari Undang² ini yang kurang disetudjui oleh kaum tani yang sudah menduduki tanah² perkebunan. Tetapi Undang² ini mengakui hak kaum tani yang sudah menduduki tanah² perkebunan „setjara tidak sah” untuk menundjuk seorang atau beberapa orang wakilnja guna berunding dengan fihak pemerintah dan ondernemer² asing. Dalam Undang² ini ditentukan bahwa putusan² yang diambil harus dengan mengingat kepentingan Rakjat yang bersangkutan. Ondernemer² asing yang sengadja melanggar putusan bisa dibatalkan haknja atas tanah perkebunan untuk sebagian atau seluruhnja.

Dalam pendjelasan Undang² tersebut antara lain dikatakan, bahwa penjelesaian masalah pemakaian tanah perkebunan oleh Rakjat dalam waktu yang singkat „tidak sadja berarti memelihara sesuatu tjabang produksi yang penting, tetapi terutama akan memberi kemungkinan djuga pada Rakjat yang bersangkutan untuk memperbaiki tingkat hidupnja, karena untuk selandjutnja mereka akan dapat mengusahakan tanahnja itu dengan tenteram dan teratur”.

Menurut pendjelasan Undang² tersebut, dari 200.000 ha tanah perusahaan kebun di Djawa telah diduduki Rakjat kira² 80.000 ha atau 40%. Dari jang 80.000 ha yang sudah diduduki ini, antara lain terdapat 20.000 ha di Malang (Djawa Timur), 23.000 ha di Kediri (Djawa Timur) dan 14.000 ha di Surakarta (Djawa Tengah). Di Djawa kira² 28.000 keluarga petani yang mengambil bagian dalam menduduki tanah² perusahaan perkebunan asing.

Di Sumatera kira² 125.000 keluarga jang sudah menduduki tanah perusahaan perkebunan asing, jaitu kira² 65.000 keluarga didaerah perkebunan tembakau dan 60.000 keluarga didaerah perkebunan karet, kelapa sawit, dan sebagainya.

Djadi, berdasarkan angka² dalam Undang² tersebut dalam gerakan menduduki tanah perkebunan asing ini sudah mengambil bagian lebih 150.000 keluarga atau lebih dari 750.000 djiwa.

Disamping perjuangan kaum tani melawan ondernemer² asing jang mau merampas tanah jang sudah didudukinja dan dikerdjakannya, perjuangan kaum tani melawan tuantanah bumiputera, melawan kekuasaan radja² setempat (terutama di Djawa Tengah), melawan lintahdarat, melawan kese-wenang²an aparat negara, melawan gerombolan² teror (terutama di Djawa Barat) dsb. makin hari makin meningkat, tidak hanya di-provinsi² dipulau Djawa dan Sumatera, tetapi djuga di-provinsi² diluar Djawa dan Sumatera.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati dalam suasana dimana persatuan nasional makin luas dan makin terkonsolidasi dalam perjuangan untuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda, untuk pemasukan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dan untuk membatalkan seluruh persetudjuan KMB jang chianat.

Ketjuali partai Masjumi dan PSI serta beberapa organisasi satelitnja, boleh dikatakan semua partai dan semua organisasi massa jang demokratis baru² ini telah menuntut bubarnya Uni Indonesia-Belanda, masuknja Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dan batalnja fasal² persetudjuan KMB dilapangan ekonomi dan keuangan.

Ketjuali partai Masjumi dan PSI, boleh dikatakan semua partai sudah menjatakan, bahwa kalau pemerintah Belanda tidak mau membatalkan Uni Indonesia-Belanda setjara berunding atau kalau pemerintah Belanda mendjalankan taktik mengulur waktu dalam perundingan, maka Pemerintah Indonesia didesak supaya membatalkan Uni Indonesia-Belanda setjara unilateral. Boleh dikatakan semua partai dan organisasi² massa demokratis sudah menjatakan

dirinja siap untuk menghadapi akibat² apa sadja jang ditimbulkan oleh pembatalan Uni Indonesia-Belanda setjara unilateral ini.

Sudah mendjadi kejakinan bagian terbesar Rakjat Indonesia, bahwa dalam soal Uni Indonesia-Belanda, dalam soal Irian Barat maupun dalam soal mempertahankan hak² istimewa imperialis Belanda dilapangan ekonomi dan keuangan, imperialisme Amerika Serikat berdiri difihak Belanda.

Djuga sudah mendjadi rahasia umum, bahwa Belanda dan Amerika telah mengadakan manuver², intimidasi², intrik² dan komplotan² jang kotor. Dengan melalui agen²nja jang ada didalam dan diluar partai² pemerintah dan dengan menggunakan uang suapan mereka telah mengadakan pertjobaan² untuk menjatuhkan pemerintah Ali Sastroamidjojo jang mendapat sokongan Rakjat dalam melaksanakan program²nja jang demokratis.

Dilapangan dinas rahasia imperialisme Belanda, Amerika dan Inggris telah mengadakan kerdjasama, ditudjukan untuk mengadudomba partai satu dengan partai lainnja, mengadudomba pemimpin² didalam sesuatu partai, mendorong semangat perebutan kekuasaan setjara militer, mengadakan hasutan² terhadap kaum Komunis dengan maksud mengisolasi kaum Komunis dari partai² dan golongan² demokratis lainnja, agar djika sudah sampai waktunja nanti seluruh kekuatan dapat ditumpahkan untuk melumpuhkan kaum Komunis dan partai² serta golongan² demokratis jang konsekwen.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati dalam keadaan dimana PKI baru sadja melangsungkan Kongres Nasionalnja ke-V dalam bulan Maret jl. Kongres PKI ini adalah kongres jang bersedjarah, dilihat dari sudut dorongan jang diberikannya untuk perkembangan PKI sendiri maupun untuk perkembangan gerakan kemerdekaan nasional dan gerakan untuk perdamaian dunia.

Kongres Nasional ke-V PKI telah memetjahkan masalah² pokok revolusi Indonesia dan telah memetjahkan masalah² jang dihadapi oleh PKI dilapangan ideologi, organisasi dan politik. Kongres ini

djuga telah menjiapkan Rakjat pekerdja Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum jang akan datang. Dengan Kongres ini mendjadi djelas apa jang mendjadi tugas pokok PKI jang terdekat, jaitu memobilisasi dan menarik kaum tani kedalam perdjuaan untuk melenjapkan sisa² feodalisme, untuk mengembangkan revolusi agraria anti-feodalisme. Disamping itu, PKI tetap berkewadajiban meneruskan dan memperbaiki pekerdjaan dikalangan kaum buruh, inteligensia, burdjuasi ketjil kota dan burdjuasi nasional.

Dengan perkataan lain, disamping menitikberatkan pekerdjaan dikalangan kaum tani, disamping mengutamakan pekerdjaan menggalang persekutuan buruh dan tani, PKI berkewadajiban menggalang front persatuan nasional.

Dokumen² jang ditjiptakan oleh kongres, seperti misalnja Laporan Umum Central Comite, Program Partai, Konstitusi Partai, Manifes Pemilihan Umum, referat „Tentang Tan Ling Djie-isme”, adalah pegangan² jang penting untuk melandjutkan dan memperbaiki pekerdjaan anggota² dan kader² Partai dalam membangun Partai dan dalam membawa madju gerakan kemerdekaan Rakjat Indonesia ketingkat jang lebih tinggi.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati dalam keadaan internasional jang diliputi oleh semangat kemenangan perdamaian dengan berhasilnja konferensi Djenewa jang sudah berhasil mentjiptakan gentjatan sendjata di Indotjina. Partai² dan organisasi² massa jang demokratis maupun Pemerintah Indonesia menjambut dengan gembira dan antusias kemenangan Djenewa.

Semua menjatakan, bahwa kemenangan Djenewa adalah kemenangan besar jang harus dikembangkan dan dikonsolidasi. Lima prinsip untuk perdamaian jang sudah disetudjui oleh Tjou En-lai, Nehru dan U Nu, dianggap sebagai prinsip² jang masuk akal dan penting guna mengembangkan dan mengkonsolidasi kemenangan Djenewa.

Semangat damai jang menguasai alam politik Indonesia menjebabkan adanya kesatuan sikap antara Rakjat dan Pemerintah Indonesia dalam menolak undangan Amerika Serikat untuk ikut ber-

konferensi di Filipina dalam bulan September tahun ini, jang akan mentjiptakan pakt agresif jang dinamai Organisasi Persetudjuan Asia Tenggara (SEATO).

Walaupun dikalangan bangsa Indonesia masih tjukup banjak agen² Wallstreet jang berkepala panas, tetapi angin damai jang sedjuk jang bertiup dari Djenewa dan Indotjina serta keteguhan Rakjat Indonesia dalam membela perdamaian, telah membikin mereka tidak mempunjai tjukup keberanian untuk membela politik Amerika setjara terang²an.

Walaupun masih ada kalangan² jang belum mau menerima atau masih ragu² terhadap kenyataan bahwa Uni Sovjet dan RRT adalah pembela² perdamaian jang utama, tetapi sudah tidak bisa disembunjen lagi dan sudah mendjadi pendapat umum, bahwa Amerika Serikat adalah penghasut perang jang berbahaja. Rakjat Indonesia jang sudah merasakan sendiri pahit-getirnja penderitaan dalam perang dunia kedua jl. terlalu mudah untuk melihat bahaja jang dikandung oleh „diplomasi bom atom” Amerika.

*

Ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini diperingati dalam keadaan dimana negeri² sosialis Uni Sovjet, negeri² demokrasi Rakjat di Eropa Timur, Republik Demokrasi Djerman, dan Republik Rakjat Tiongkok telah mendapat kemadjuan² jang luarbiasa besarnja baik dilapangan diplomasi maupun dalam mengembangkan ekonomi dan kebudajaannja. Kebalikannja dari kenyataan² ini, negeri² kapitalis makin terisolasi dalam diplomasi dan makin djauh tenggelam didalam lumpur krisis dan tidak akan mungkin menemukan djalan keluar.

Uni Sovjet dan Republik Rakjat Tiongkok telah menjapai popularitet jang sangat tinggi dalam perdjuaan jang konsekwen untuk mentjiptakan perdamaian didunia. Kemenangan konferensi Djenewa telah mempertinggi martabat Uni Sovjet dan RRT sebagai negeri² jang sungguh² memperdjuangkan perdamaian dan jang bersimpati serta membantu perdjuaan kemerdekaan bangsa² jang terdjadjah.

Adalah sangat menggembirakan, bahwa dalam waktu² bel-

kangan ini, atas dorongan Rakjat yang terus-menerus, pemerintah Republik Indonesia telah meluaskan hubungan dagangnja baik dengan negeri² demokrasi Rakjat di Eropa Timur maupun dengan Republik Rakjat Tiongkok.

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Uni Sovjet sudah dibuka. Sang merah-putih sekarang sudah berkibar dikantor kedutaan Republik Indonesia di Moskow, dan tidak lama lagi Rakjat Indonesia akan melihat bendera Uni Sovjet berkibar dikantor kedutaan Sovjet di Djakarta.

Hubungan diplomatik dan hubungan dagang yang normal yang ber-angsur² mulai didjalankan oleh pemerintah Republik Indonesia mendapat sambutan yang hangat, mulai dari kaum buruh sampai kepada kaum sardjana dan kaum burdjuis nasional. Mereka menganggap adanya hubungan yang normal sebagai langkah yang tepat untuk mentjiptakan hubungan persahabatan, hubungan dagang dan kebudayaan antara Indonesia dan negeri² lain.

Dalam keadaan demikianlah Rakjat Indonesia memperingati ulangtahun Republiknja yang kesembilan. Tepat apa yang dikatakan oleh kawan L. Aarons, wakil Partai Komunis Australia dalam Kongres Nasional ke-V PKI, ketika ia menjampaikan kesan²nja kepada Kongres, bahwa Rakjat Indonesia sekarang sedang „berada dalam semangat revolusioner yang mendidih, yang sedang mengalami kebebasan energi dan inisiatifnja yang telah lama ditindas, yang sedang mengalami naiknya gelombang kekuatan yang besar”.

Djustru dimana Rakjat sedang mengalami naiknya gelombang kekuatan yang besar, kewadajiban PKI bukanlah enteng. Sebaliknya, Rakjat Indonesia sekarang menghadapi keadaan politik yang pelik, dimana kaum imperialis asing dan kaum reaksioner dalam negeri masih berkuasa, masih giat mendjalankan manuver², intrik², intimidasi² dan komplotan²nja. Semuanya ini meletakkan tanggungjawab yang berat pada pundak PKI untuk memimpin Rakjat menuju kemenanganja. Kenyataan ini meminta kewaspadaan yang luarbiasa, menghendaki keberanian dan kegiatan bekerdja yang luarbiasa dari kader² dan anggota² PKI.

Dengan penuh kepertjajaan kepada kekuatan Rakjat Indonesia yang ber-puluh² djuta dan yang mempunyai tradisi gemilang dan yang sudah pernah digembleng oleh Revolusi Agustus yang besar,

dengan pertjaja kepada solidaritet internasional dari proletariat dan Rakjat sedunia, dan dengan dipimpin oleh teori² revolusioner dari Marx, Engels, Lenin dan Stalin, Rakjat Indonesia dengan PKI sebagai hulubalang pasti akan mentjapai tudjuannja.

PKI tidak hanya berdjuaug untuk membebaskan proletariat Indonesia, tetapi djuga untuk membebaskan semua klas dari Rakjat Indonesia. Oleh karena itu, dengan menundjukkan kemampuan, keuletan dan kedjudjurannja, lambatlaun PKI pasti akan mendapat simpati dan kepertjajaan yang lebih besar dari orang², golongan² dan partai² demokratis lainnja.

Pada ulangtahun kesembilan Revolusi Agustus ini kaum Komunis Indonesia menjampaikan utjapan terimakasihnja kepada proletariat dan Rakjat diseluruh dunia yang sudah memberikan bantuannja kepada perdjuaugan Rakjat Indonesia, baik ketika sebelum dan selama Revolusi Agustus, maupun di-waktu² belakangan ini.

Chusus kepada proletariat dan Rakjat Belanda PKI menjampaikan utjapan terimakasihnja. Proletariat dan Rakjat Indonesia dalam perdjuaugannja untuk memerdekakan diri dari imperialisme Belanda, tidak pernah dan tidak akan pernah sesaatpun merasa bermusuhan dengan proletariat dan Rakjat Belanda.

Sebaliknya, proletariat dan Rakjat Belanda, dibawah pimpinan Partai Komunis Nederland, adalah sahabat Rakjat Indonesia dalam perdjuaugan untuk mengalahkan musuh bersama, jaitu imperialisme Belanda.

Dengan tidak sedikitpun dibikin mabok atau dibikin sombong karena sukses² yang sudah ditjapai, Rakjat Indonesia dengan PKI dibarisan paling depan akan meneruskan perdjuaugannja yang berat tetapi mulia, untuk merealisasi tudjuan Revolusi Agustus. Akan datang masanja, dimana tidak ada satupun kekuatan yang dapat membendung terdjangan bandjir energi Rakjat Indonesia yang mahabesar, yang akan menghantjurkan segala perintang. Tidak peluru dan bom Belanda, tidak bom atom dan bom zat air Amerika, dan djuga tidak razzia dan provokasi kaum pengchianat nasional!

Revolusi Agustus barulah repetisi umum daripada pertundjukan yang sesungguhnya, yang masih akan datang.

RAKJAT INDONESIA BERSATU UNTUK MEMBUBARKAN UNI INDONESIA-BELANDA DAN UNTUK MEMASUKKAN IRIAN BARAT KEDALAM WILAJAH KEKUASAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam artikel² berikut ini ditulis sekitar perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada pertengahan tahun 1954 tentang beberapa bagian dari persetujuan KMB, yaitu mengenai Uni Indonesia-Belanda dan Irian Barat.

Artikel *Rakjat Indonesia bersatu untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda dan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia* mengupas keadaan ketika perundingan sedang berlangsung. Ia menunjukkan bagaimana gerakan Rakjat menggelora dan bersatupadu mendukung delegasi Indonesia yang diketuai Menteri Luar-negeri Sunario, yang menuntut pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pemasukan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Artikel *Delegasi Sunario berhasil menggerowoti sebagian persetujuan KMB* menjambut hasil² perundingan tersebut. Dengan tertjapainja pembubaran seluruh Statut Uni, delegasi Indonesia telah berhasil menghapuskan sebagian dari persetujuan KMB. Kawan Aidit menegaskan bahwa hasil ini telah membawa Indonesia selangkah lebih maju kepada kedaulatannya yang penuh. Disamping itu ia menunjukkan bahwa Belanda samasekali tidak mau berbitjara tentang Irian Barat dan bagian² lain dari persetujuan KBM masih utuh. Maka perjuangan Rakjat untuk mengusir imperialisme Belanda seluruhnja dari Indonesia belum selesai dan pasti semakin meningkat.

Delegasi Indonesia untuk berunding dengan Belanda mengenai pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan mengenai pemasukan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia, berangkat kenegeri Belanda pada tanggal 23 Djuni jl. dengan diantarkan oleh suatu demonstrasi Rakjat ditanah lapangan Kemajoran, Djakarta. Demonstrasi ini diorganisasi oleh *Panitia Kerdjasama Partai² dan Organisasi² Djakarta*, dimana tergabung didalamnya 32 partai dan organisasi massa, termasuk semua partai pemerintah, PKI, serikatburuh², organisasi² tani, organisasi² pemuda dan organisasi² demokratis lainnja. Banjak slogan² yang dibawa dan pekikan² yang didengarkan dalam demonstrasi, semuanya menuntut pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan semuanya menuntut agar Irian Barat masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Jang tidak nampak dalam demonstrasi politik ini ialah partai Masjumi, PSI, Partai Katolik Republik Indonesia, Parkindo dan Partai Murba, semuanya partai oposisi.

Panitia Kerdjasama menjerahkan sebuah statement kepada ketua delegasi Indonesia, Mr. Sunario, dimana dengan djelas diformulasi tuntutan partai² dan organisasi² demokratis, jang mewakili golongan terbesar dari Rakjat Djakarta. Dalam statemen itu antara lain dimuat, bahwa djika pemerintah Belanda mau mengulur perundingan, maka satu²nja djawaban jang tepat ialah pembatalan Uni setjara unilateral. Pernyataan penduduk Djakarta ini diterima baik oleh ketua delegasi Indonesia dengan pernyataan, bahwa delegasi merasa lebih kuat lagi dengan adanya pernyataan tsb.

Tetapi, adalah keliru sekali kalau orang mengira, bahwa jang dinjatakan oleh demonstrasi partai² dan organisasi² Rakjat di Djakarta hanja tuntutan Rakjat Djakarta belaka. Dalam banjak rapat² besar dan ketjil jang diorganisasi oleh PKI dan partai² serta organisasi² demokratis lainnja diseluruh Indonesia, soal pembatalan Uni Indonesia-Belanda dan soal pemasukan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia senantiasa mendjadi atjara jang menarik dan mendapat sambutan jang hangat. Bersamaan dengan hari berangkatnja delegasi Indonesia, jaitu tanggal 23 Djuni, dalam rapat raksasa jang diorganisasi oleh PKI di Bukit Tinggi, jang dikundjungi oleh 100.000 orang dari kota Bukit Tinggi sendiri dan dari tempat² jang ber-puluh² dan beratus-ratus kilometer dari Bukit Tinggi, soal pembubaran Uni dan pemasukan Irian Barat mendapat sambutan hangat. Dengan antusias rapat menjambut berita keberangkatan delegasi Indonesia. Beberapa hari sebelum rapat di Bukit Tinggi, jaitu tanggal 20 Djuni, di Padang djuga sudah diadakan rapat raksasa PKI jang dihadiri oleh 75.000 orang, dan djuga disini soal Uni dan Irian Barat mendapat sambutan jang tidak kalah hangatnya.

Pada tanggal 25 Djuni Komisaris Agung Belanda untuk Indonesia, Graaf van Bylandt, telah mengeluarkan pernyataan mengenai perundingan tentang pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan tentang pemasukan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan lantjang Komisaris Agung Belanda ini mengatakan, bahwa pernyataan Panitia Kerdjasama Partai² dan Organisasi² jang dikeluarkan beberapa saat sebelum delegasi Indonesia berangkat ke Nederland adalah sangat mengetjewan, dan sebagaimana lagu lamanja, ia mengatakan bahwa pernyataan itu adalah menurut „resep Komunis”.

Mengenai Irian Barat antara lain van Bylandt berkata: „Fihak kami menganggap Irian Barat jang kami sebut Nederlands Nieuw Guinea, tetap sebagai daerah Nederland. Djuga bagi kami soal tsb. adalah soal nasional”. Dengan tidak tahu malu dan tidak memusingkan peta bumi jang umum berlaku, van Bylandt berani mengatakan bahwa Irian Barat adalah daerah Nederland. Dengan sangat dungu van Bylandt marah² kepada orang jang berani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih bersifat kolonial dan

dengan tjongkak ia berkata bahwa dari padjak² jang mengalir kedalam kas Indonesia ada kira² separuhnja datang dari perusahaan² Belanda. Jang mendjadi tertawaan ramai, tidak hanja bagi kaum Komunis tetapi djuga bagi tiap² demokrat Indonesia, jalah utjapan van Bylandt tentang adanja „satu matjam kolonialisme lain, jang pada waktu ini bagi Indonesia lebih berbahaja lagi, jaitu imperialisme Komunis”. Van Bylandt jang mengira bahwa ia sudah mendjadi seorang mahaguru dengan „kuliahnja” ini tidak tahu bahwa sebenarnja ia sudah mendjadi badut jang gagal.

Disamping mendjadi tertawaan jang hebat, utjapan van Bylandt telah menimbulkan kemarahan jang sangat. Tidak hanja partai² dan organisasi² massa jang demokratis, tetapi djuga Pemerintah Indonesia mengetjam utjapan van Bylandt tsb. Panitia Kerdjasama Partai² dan Organisasi² Djakarta, dan hampir semua koran di Indonesia, dengan perketjualian beberapa koran trompet Masjumi dan PSI, memprotes keras perbuatan van Bylandt, menuntut pada pemerintah supaya van Bylandt lekas² angkat kaki dari bumi Indonesia sebagai persona non grata. Kementerian Penerangan Republik Indonesia mengeluarkan keterangan tersendiri terhadap pernyataan van Bylandt, dimana antara lain dinjatakan bahwa „bagi bangsa Indonesia semua pendjadjahan, baik dengan nama kolonialisme maupun imperialisme, apapun bentuk dan warnanja, sama berbahajanja; tidak ada jang lebih dan tidak ada jang kurang berbahaja. Dalam hal ini kita tidak perlu menerima ‘kuliah’ lagi dari siapapun”. Tentang Irian Barat dikatakan dalam keterangan Kementerian Penerangan itu bahwa „bagi Rakjat Indonesia persoalan Irian Barat adalah persoalan ada atau tidak-adanja kemerdekaan bagi sebagian Rakjat Indonesia di Irian Barat. Menentang pendjadjahan di Irian Barat itulah nationale-zaak Indonesia”. Demikian antara lain pernyataan Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

Dengan demikian mendjadi djelas, bahwa apa jang dinamakan oleh Komisariat Agung Belanda „resep Komunis” tidak lain daripada tuntutan nasional Rakjat Indonesia. Ini tidak lain daripada satu bukti lagi, bahwa kepentingan kaum Komunis adalah kepentingan nasional, dan bahwa usaha PKI dan partai² demokratis

lainnja untuk membulatkan sikap Rakjat Indonesia terhadap imperialisme Belanda mentjapai hasil jang gemilang.

Pernyataan van Bylandt jang bersifat bermusuhan terhadap Rakjat dan Republik Indonesia, terang²an dibenarkan oleh Kementerian Luarnegeri Keradjaan Belanda, jaitu bahwa keterangan itu adalah pendirian pemerintah Belanda. Hal ini, disamping telah menimbulkan kebentjiaan Rakjat Indonesia jang sangat besar terhadap pemerintah Belanda, djuga telah lebih meninggikan kewaspadaan Rakjat Indonesia dalam menghadapi Belanda. Ketjuai pemimpin² partai² reaksioner lainnja, seluruh Rakjat Indonesia berada dalam keadaan siap sedia menghadapi segala kemungkinan jang bisa terdjadi sebagai akibat dari sikap Belanda jang kurang ajar dan provokatif. Sikap Belanda ini telah membikin partai² dan pemimpin² demokratis mengambil sikap jang lebih tegas.

Putjuk Pimpinan PSII dalam sidangnya tanggal 7 Djuli telah mengambil putusan menjatakan ketjewa terhadap sikap Belanda jang sangat tidak sesuai dengan tatatjara kesopanan, dan PSII akan merentjanakan aksi jang akan dilaksanakan baik oleh PSII sendiri ataupun ber-sama² dengan partai² lain, apabila perundingan itu tidak memberikan hasil jang memuaskan. Ketua PSII, Arudji Kartawinata, dalam keterangannya kepada pers mengatakan, bahwa pembubaran Uni Indonesia-Belanda harus berakibat tindakan² dilapangan keuangan dan ekonomi jang menguntungkan Indonesia dan harus ada penyelesaian mengenai masalah Irian Barat. Mengenai sikap Amerika terhadap soal Irian Barat dikatakan oleh Arudji, bahwa Amerika tjondong pada pendirian supaya Irian Barat tetap ditangan Belanda. Arudji djuga mengajukan saran² djika perundingan gagal, jaitu: pembatalan hutang Indonesia kepada Belanda, pembatasan aktivitet bank² Belanda di Indonesia, tidak memberikan lisensi untuk impor dan ekspor kepada perusahaan² Belanda, memperkeras peraturan pemasukan orang² Belanda ke Indonesia dan menormalisasi hubungan dagang Indonesia-Belanda. Djuga mengenai Irian Barat, diadjukannya saran² sbb.: supaya pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat, mengadakan pendaftaran warganegara Indonesia di Irian Barat dengan melewati pos, menuntut bij verstek para pemimpin „Republik Maluku Selatan” jang ditjiptakan oleh Belanda itu dan meng-

hukum mereka bij verstek djuga, mengadakan blokade terhadap Irian Barat.

Hampir bersamaan waktunya dengan pernyataan Arudji Kartawinata, djuga S. Mangunsarkoro, wakil ketua II DPP PNI menjatakan pada harian „Sin Po” (10 Djuli 1954), bahwa PNI akan tetap memelihara kerdjasama dengan partai² manapun, baik didalam maupun diluar pemerintahan. Mengenai pembatalan Uni Indonesia-Belanda dikatakan, bahwa pembatalan Uni harus dapat memberikan keuntungan politik dan ekonomi, sebab tanpa keuntungan ini pembatalan Uni tidaklah akan ada manfaatnja. Mengenai Irian Barat Mangunsarkoro mengatakan, bahwa PNI akan tetap memperdjuaikan pemulihan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Anggota parlemen S. Papare, putera Indonesia jang berasal dari Irian Barat, menerangkan kepada pers tentang maksud pemerintah Belanda untuk terus mendjadjah Irian Barat. Ini dapat dibuktikan, kata Papare, oleh angka anggaran belandja untuk memperkuat kekuasaan Belanda di Irian Barat. Menurut anggaran belandja Nederland, untuk Irian Barat dalam tahun 1953 dikeluarkan 89,5 djuta gulden, sedang untuk tahun 1954 meliputi djumlah 105,5 djuta gulden untuk „keperluan biasa”, 31,5 djuta gulden untuk pengeluaran tambahan dan 26 djuta gulden untuk investasi. S. Papare djuga mengatakan supaya dalam perundingan dengan Belanda sekarang ini djangan se-kali² soal Irian Barat dikesampingkan.

Dr. Diapari, pemimpin partai nasionalis SKI (Serikat Kerakjatan Indonesia) dan seorang jang biasa bertindak sebagai djurubitjara fraksi² partai² pemerintah dalam parlemen, menerangkan kepada wartawan „Berita Minggu” (11 Djuli 1954), bahwa delegasi kita tidak boleh menerima perlakuan Belanda jang akan mengulur-ulur waktu. Maka kalau memang sudah tjukup djelas tidak ada pengertian Belanda melihat realitet dan Belanda tidak mempertjajai Indonesia, sebaiknya perundingan diachiri. Selanjutnja dikatakan oleh Diapari: „Dilapangan ekonomi dan keuangan Indonesia masih banjak terikat pada Belanda, sedang sebaliknya Belanda dalam hal² tsb. tidak terikat pada Indonesia. Ini tak dapat diterima dan dibiarkan oleh Rakjat Indonesia dari segala golongan

dan lapisan". Mengenai Irian Barat dikatakannya, bahwa tetapi Irian Barat ditangan Belanda tidak hanya merupakan penghalang untuk normalisasi hubungan Indonesia-Belanda, tetapi juga merupakan rintangan penting bagi stabilisasi keamanan di Asia.

Dari pernyataan² pemimpin² partai² dan dari resolusi² partai², serikatburuh², organisasi² tani, organisasi² pemuda, peladjar, wanita dsb., jelas bahwa Rakjat Indonesia sungguh² ingin melihat bubar-nja Uni Indonesia-Belanda dan masuknja Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Keinginan yang sungguh² ini timbul berdasarkan pengalaman Rakjat Indonesia sendiri. Sudah hampir lima tahun Rakjat Indonesia terikat oleh apa yang dinamakan persetudjuan KMB, yaitu persetudjuan yang menjebabkan adanya Uni Indonesia-Belanda dan yang menjebabkan Irian Barat tetap didalam kekuasaan Belanda.

Selama hampir lima tahun ini, memang Rakjat Indonesia sudah bebas mengibarkan bendera kebangsaan merah-putih, menjanjikan lagu kebangsaan „Indonesia Raja” dan sampai batas² tertentu di-bolehkan mengorganisasi diri menurut undang², tetapi semuanya bukan tanda bahwa Rakjat Indonesia sudah berkuasa didalam rumahnja sendiri. Modal asing masih menguasai perekonomian Indonesia. Dari modal ini masih tetap modal Belanda yang paling besar. Semua perusahaan vital dilapangan industri, perdagangan dan keuangan masih tetap didalam kekuasaan imperialis asing, terutama imperialis Belanda. Untuk mengawal modal asing yang banjak ini, kaum imperialis mengorganisasi gerombolan teror yang menamakan dirinja „Darul Islam” (DI), „Tentara Islam Indonesia” (TII), dsb. Irian Barat yang terus-menerus mereka perkuat persendjataannya, adalah merupakan pistol yang diatungkan kepada Republik dan Rakjat Indonesia. Irian Barat yang terus-menerus diperkuat persendjataannya dan gerombolan² teror adalah pengawal modal asing, sebagai pentungan untuk menjegah djangan sampai Rakjat Indonesia berkuasa atas kekajaan alamnja sendiri dan atas dirinja sendiri.

Selama Irian Barat masih ditangan imperialisme Belanda, sewaktu² daerah yang sah dari Republik Indonesia ini dapat didjual oleh Belanda kepada Foster Dulles untuk kepentingan Pakt Asia Tenggara yang agresif. Djika ini terdjadi, maka berartilah bahwa

daerah sah dari Republik Indonesia digunakan oleh negeri yang tidak berhak untuk kepentingan agresinja, untuk mengatjaukan keamanan dan perdamaian di Asia dan didunia. Maka itu, dilihat dari sudut kepentingan kolonialisme Belanda maupun dari kepentingan rentjana perang Amerika, Rakjat Indonesia harus mempersiapkan diri untuk suatu perdjuaan yang sengit dan tahan lama untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayahnja. Rakjat Indonesia tidak hanya berhadapan dengan Belanda, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih kurangadjar dibelakang Belanda, yaitu imperialisme Amerika Serikat yang haus perang.

Tuntutan pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan tuntutan atas Irian Barat, mendapat dukungan makin hari makin kuat dari kaum buruh dan kaum tani, yang makin bangun dan makin terorganisasi dibawah pimpinan PKI. Inilah djaminannya, bahwa perdjuaan untuk menjapai tuntutan² tsb., tidak akan berhenti ditengah djalan dan pasti akan menjapai tudjuannya.

Kongres Nasional ke-V PKI dalam bulan Maret jl. merupakan dorongan yang kuat untuk perkembangan gerakan kemerdekaan nasional, tidak hanya untuk menuntut pembubaran Uni dan untuk mendapatkan Irian Barat, tetapi juga untuk tuntutan² nasional lainnya. Tiap² putusan yang diambil oleh Kongres tsb. merupakan sendjata yang ampuh bagi kader² PKI untuk mengkonsolidasi Partai dan untuk membangunkan serta mengorganisasi massa Rakjat, guna membela hak² politik dan ekonominja dibawah pandji² PKI dan dibawah bendera nasional merah-putih.

Terutama program agraria PKI yang diputuskan oleh Kongres telah membangunkan kaum tani yang merata diseluruh Indonesia. Djuga di-provinsi² yang tadinja gerakan kaum tani masih sangat terbelakang, seperti di-provinsi² Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, timbul kegembiraan baru dari kaum tani dalam mengorganisasi diri untuk membela kepentingan se-hari²nja dan untuk menghapuskan sistim tuan-tanah. Dibeberapa provinsi, misalnja di Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Sumatera Utara gerakan kaum tani sudah lebih terkonsolidasi, berkat aksi²nja yang militan, yang terorganisasi dan dipimpin. Kebangunan kaum tani ini merupakan

kebangunan kekuatan nasional jang luarbiasa besarnja, kekuatan jang tadinja terpendam. Kaum tani Indonesia mulai melihat hari-depannja jang gemilang.

Sebentar lagi, tanggal 17 Agustus 1954, Rakjat Indonesia akan memperingati ulangtahun ke-IX proklamasi Republik Indonesia. Sebagaimana tahun² jang sudah peristiwa ini akan merupakan manifestasi jang besar dari Rakjat Indonesia untuk hidup merdeka dari pendjadjahan asing, untuk hidup bebas dari tiap² penindasan, untuk hidup bersahabat dan hidup damai dengan negeri² lain. Perajaan 17 Agustus tahun ini, jang pasti akan lebih besar dan kuasa dari tahun² jang lalu, akan lebih memperkuat tuntutan Rakjat Indonesia untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda dan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan kemadjuan² jang ditjapai oleh Rakjat negeri² lain, djelaslah bahwa Rakjat Indonesia djuga madju setapak demi setapak, dan makin lama makin dekat djuga kepada tudjuannja, berkat persatuannja jang bertambah kuat.

DELEGASI SUNARIO BERHASIL MENGGERO- WOTI SEBAGIAN PERSETUDJUAN KMB

Saja sudah mempeladjar teks lengkap dari hasil² perundingan jang ditjapai oleh delegasi Sunario di Den Haag. Dengan demikian saja djuga sudah mengetahui bagian² dari persetudjuan KMB jang sudah dapat dihapuskan oleh delegasi Sunario, dan bagian² jang masih tetap berlaku. Pada umumnja kesimpulan saja jalah, bahwa delegasi Sunario berhasil menggerowoti sebagian persetudjuan KMB tjiptaan Hatta-Roem-Sultan Hamid lima tahun jl. Berbitjara setjara objektif, dengan hasil delegasi Sunario Indonesia selangkah madju mendekati kedaulatannja jang penuh.

Dengan hasil delegasi Sunario, seluruh Statut Uni bubar. Arti-nja dengan ini Republik Indonesia dan Rakjat Indonesia tidak lagi berada dibawah naungan Radja Belanda. Disamping itu, berhubungan dengan dibubarkannja Uni, djuga persetudjuan² tentang „kerdja-sama” dilapangan hubungan luarnegeri, dilapangan pertahanan dan kebudajaan dengan resmi dibubarkan.

Dari persetudjuan² keuangan dan perekonomian jang dulu di-lampirkan pada Statut Uni djuga dengan resmi dihapuskan bagian C, jaitu bagian jang mengurus hubungan dan „kerdja-sama” dilapangan politik perdagangan. Fasal² 14, 15, 16, 17 dan 19 dari bagian B, jaitu bagian jang mengenai hubungan keuangan, djuga dengan resmi dihapuskan.

Demikianlah beberapa bagian persetudjuan KMB jang sudah dapat digerowoti oleh delegasi Sunario. Semuanja ini dapat ditjapai oleh delegasi Sunario berkat adanja dukungan Rakjat-banjak. Dengan demikian, Rakjat Indonesia dapat merajakan ulangtahun proklamasi Republik Indonesia dalam keadaan dimana tidak ada lagi Uni Indonesia-Belanda dan dimana sebagian dari persetudjuan keuangan dan ekonomi setjara resmi sudah dihapuskan. Keadaan sematjam ini tidak mungkin diimpikan oleh Rakjat Indonesia djika pemerintahan dikuasai oleh partai Masjumi dan PSI.

Tetapi, dengan hasil yang ditjapai oleh delegasi Sunario, Rakjat Indonesia samasekali belum selesai dengan perjuangannya mengusir imperialisme Belanda dari Indonesia. Ini disebabkan oleh kenyataan² masih berlakunya bagian A dari persetudjuan KMB, yaitu bagian yang menetapkan hak² konsesi, vergunning dan perusahaan Belanda. Disamping itu juga masih berlaku fasal 18 dari bagian C, yaitu fasal yang mendjamin transfer uang dari Indonesia ke Nederland, masih berlaku juga bagian D yang dulu dilampirkan pada Statut Uni, yaitu bagian yang menetapkan „hutang” Indonesia kepada Belanda. Tentang Irian Barat, bukan hanya tidak terjapai persetudjuan, tetapi Belanda samasekali tidak mau berbitjara.

Kesimpulan saja lagi jalah, walaupun delegasi Sunario sudah dapat mentjapai hasil² yang penting, tetapi bagian² yang sangat merugikan Rakjat Indonesia dari persetudjuan KMB tjiptaan Hatta-Roem-Sultan Hamid masih tetap berlaku. Satu pengalaman pahit, bahwa perbuatan orang² yang gegabah 5 tahun jl., harus diderita oleh Rakjat Indonesia sampai sekarang! Dengan ini berarti, bahwa imperialisme Belanda masih tetap musuh Rakjat Indonesia yang pertama.

Beban yang berat masih terletak dipundak Pemerintah Ali Sastroamidjojo dan Rakjat Indonesia untuk tidak henti²nja mentjari djalan dan dengan teguh berdjuaug untuk membatalkan hak² istimewa Belanda yang masih ada dilapangan keuangan dan ekonomi, untuk menghapuskan samasekali „hutang” Indonesia yang tidak pada tempatnja kepada Belanda dan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Sekarang, seluruh kekuatan Rakjat Indonesia harus dikerahkan untuk membatalkan seluruh persetudjuan KMB. Untuk semuanya ini, tidak ada djalan lain ketjuali Rakjat Indonesia harus lebih memperkuat persatucnnya dan menarik seluruh kekuatan demokratis dan kekuatan kemerdekaan didunia untuk berdiri dijihaknja.

Djakarta, 12 Agustus 1954

Tulisan ini adalah pidato kawan Aidit dalam Sidang Pleno ke-II CC PKI tanggal 8 — 10 November 1954. Dengan tegas dikemukakan dalam laporan ini bahwa dengan situasi diluar dan dalam negeri yang berlangsung dengan sangat tjepat, PKI sudah mendjadi kekuatan nasional yang penting dan besar, yang tidak mungkin diabaikan oleh kawan maupun lawan. Untuk bisa menggalang persatuan yang lebih luas dari semua kekuatan nasional ditandaskan pentingnja mendorong perkembangan melalui djalan nasional yang demokratis dan pentingnja mendjamin adanya tjara pimpinan kolektif dalam Partai. Mengingat tradisi aliran² politik Komunis, Nasionalis dan Islam dalam gerakan nasional, kawan Aidit menegaskan perlunya mengusahakan kerdjasama berdasarkan program kongkrit antara massa Komunis, massa Nasionalis dan massa Islam. Penegasan ini mendidik massa Rakjat agar tidak mau dipetjah-belah oleh beberapa pemimpin Nasionalis dan Islam dengan dalih „anti-Komunisme”. Dalam laporan kepada Sidang Pleno ke-IV CC PKI bl. Djuli 1956 kawan Aidit menganalisa perimbangan tiga kekuatan yang ada di Indonesia, yaitu kekuatan progresif, kekuatan tengah dan kekuatan kepalabatu. Dengan demikian ia mendjelaskan dasar klas dari front persatuan nasional ini.

UNTUK PERSATUAN JANG LEBIH LUAS DARI SEMUA KEKUATAN NASIONAL DI INDONESIA

Kawan², sedjak sidang pertama Central Comite Partai kita jang diadakan segera sesudah Kongres Nasional ke-V, sampai kepada sidang kedua CC ini, kita telah banjak mengalami perkembangan² kedjadian mengenai situasi internasional dan dalamnegeri, maupun mengenai Partai sendiri.

Partai kita dibawah pimpinan Politbiro sudah berusaha untuk mendorong lebih madju tiap² perkembangan. Kita sudah berusaha untuk tidak membuntut dibelakang kedjadian, tetapi supaja berada di-tengah² kedjadian dan memimpin perkembangannja. Dengan ini bukan maksud saja, bahwa Partai kita sudah mentjatat hasil² jang maximum dalam pekerdjaannja. Tidak, dalam mendorong perkembangan² kedjadian, kita merasa bahwa masih banjak kekurangan² jang harus kita atasi dan kita perbaiki agar pekerdjaan selandjutnja dapat berhasil lebih baik.

Satu hal jang njata jalah, bahwa Partai kita sudah mendjadi kekuatan nasional jang penting dan besar, jang tidak mungkin diabaikan oleh kawan maupun lawan. Peranan jang dipegang oleh Partai dalam keadaan sekarang sudah begitu pentingnja sehingga kaum imperialis dan tuantanah² serta kakitangan²nja mendjadi tidak enak tidur dan sering mengigau. Mereka mendjadi marah dan mentjutjimaki serta memfitnah Partai kita, tempo² mereka mengantjam akan mematahkan batangleher kita semua. Tetapi Partai Komunis mana jang tidak saban hari mendapat marah dan ditjutjimaki serta difitnah oleh musuh² Rakjat? Difihak lain, peranan Partai kita djuga sudah tidak bisa diabaikan oleh tiap putera Indonesia jang berkemauan baik, jang ingin hidup damai dan berkemadjuan, tidak perduli apa politik, agama dan kedudukan sosialnja. Partai kita jang makin luas dan makin berakar di-

tengah² Rakjat Indonesia, merupakan kekuatan jang besar dalam mempersatukan Rakjat, persatuan jang sangat penting untuk melawan tiap² rentjana djahat jang akan membakar dunia dalam perang dunia jang baru, untuk melawan kekuasaan imperialis asing dan kaum penindas didalamnegeri. Partai kita adalah kekuatan jang besar untuk membikin Rakjat Indonesia berkuasa dinegerinja sendiri, berkuasa atas kekajaan alam negerinja, atas hasil keringatnja dan atas peninggalan kebudajaan nenekmojangnja.

Sidang Central Comite Partai jang kedua ini diadakan dalam keadaan dimana kedjadian diluar dan didalamnegeri berlangsung dengan sangat tjepat, dan dalam keadaan dimana banjak hal tergantung pada politik Partai kita dan pada kemampuan organisasi² dan anggota² Partai mewujudkan politik ini. Kenjataan ini meletakkan tanggungjawab dan kewadjiban jang berat diatas pundak Partai kita, diatas pundak tiap² kader dan anggota Partai. Tiap² kedjadian menghendaki analisa jang dalam agar mendapat pemertjahan jang tepat. Semuanja ini akan dapat kita lakukan, asal kita tetap setia berpedoman kepada Marxisme-Leninisme, asal kita dengan tjurahan sepenuh hati dan djiwa menghadapi tiap² kedjadian, asal kita senantiasa tidak lupa bahwa Partai kita adalah elemen jang objektif dari situasi negeri kita dan hasil perdjjuangan klas didalam dan diluarnegeri.

Kebangkrutan Politik Dan Ekonomi Perang Dan Keunggulan Politik Dan Ekonomi Damai

Kawan², situasi internasional dimana kita sekarang hidup berkembang dengan penuh pertentangan². Disatu fihak kita melihat adanja perlombaan persendjataan setjara besar-besaran, adanja usaha-usaha membikin djaringan-djaringan militer, adanja usaha² membikin sendjata² jang lebih sempurna, adanja „politik kekerasan” dari sesuatu negeri jang memaksa negeri² lain menerima perdjandjian² militer dan jang dengan berbagai alasan jang di-tjari² merintang hubungan diplomatik dan perdagangan jang normal. Ini jalah fihak negeri² blok Atlantik Utara jang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggeris. Difihak lain kita melihat adanja politik jang ditudjukan untuk memperkuat perdamaian dan ker-

djasama internasional, politik mengurangi persendjataan setjara besar²an dan melarang produksi serta pemakaian sendjata² penghantjur massal seperti bom atom dan bom zat-air, dengan mengadakan kontrol internasional jang keras atas pelarangan tersebut. Politik ini berpangkal pada dalil jang pokok bahwa tidak ada persengketaan dalam hubungan internasional jang tidak bisa diselesaikan dengan djalan damai. Politik ini, jang sudah ber-puluh² tahun dibela dengan teguh oleh Uni Sovjet dan sesudah perang dunia jl. djuga dengan teguh dibela oleh negeri² demokrasi Rakjat, adalah sesuai dengan kepentingan² kerdjasama setjara persahabatan diantara bangsa² dan membantu mempersatukan kekuatan² jang tjinta-damai dari bangsa² diseluruh dunia.

Untuk dapat memahami perkembangan² jang penuh pertentangan, seperti jang kita alami sekarang, kita harus mengetahui lebih dalam apa sesungguhnya jang mendjadi sebab² dan dasar² jang memungkinkan terdjadinja kedjadian² dengan segala akibatnja jang sangat luas itu. Dengan demikian kita akan dapat melihat gerak dan tumbuhnja kekuatan² sosial, sehingga disamping mengerti kedjadian² sekarang, kita djuga akan mempunjai gambaran tentang arah perkembangan jang sedang ditudju oleh sedjarah umat-manusia dalam masa dekat jang akan datang.

Politik Amerika Serikat jang sekarang mengantjam kehidupan internasional antara nasion² dan mengantjam umatmanusia, adalah ditentukan oleh ekonomi AS jang didasarkan atas industri perang, jang lebih mengutamakan produksi sendjata dan alat² perlengkapan militer untuk perang daripada produksi bahan² konsumsi untuk keperluan hidup Rakjat. Kenyataan ini dibuktikan oleh angka² dari sumber AS sendiri jang dimuat dalam madjalah „Economic Indicators” (1) bulan Oktober 1954, tentang pembelian barang² dan djasa² oleh pemerintah AS: Tahun 1939 (sebelum perang) dari total pembelian 5.2 milyar dolar, untuk keperluan Angkatan Perang 1.3 milyar; tahun 1944 (dalam perang) dari total pembelian 89.0 milyar, untuk keperluan AP 88.6 milyar; tahun 1953 (lama sesudah perang) dari total pembelian 60.1 milyar untuk keperluan AP 52.0 milyar. Dari beberapa angka ini mendjadi djelas, bahwa sekalipun sudah lama perang berhenti

sebagian besar (lebih dari 86%) dari pembelian pemerintah AS adalah untuk keperluan AP.

Ekonomi perang AS jang lahir didalam perang dunia jl. bukan hanya tidak dirombak mendjadi ekonomi damai, tetapi malahan diperluas, seperti balon karet jang terus ditiup dan terus melembung mendjadi besar sampai datang saatnja untuk tidak kuat lagi menahan tekanan dari dalam dan achirnja meletus dan hantjur. Ekonomi perang ini membawa keuntungan jang luarbiasa kepada kaum kapitalis monopoli di AS. Ini dibuktikan oleh angka² jang dimuat dalam sumber tsb. diatas tentang keuntungan bersih kaum monopoli AS: tahun 1939 (sebelum perang) 5.0 milyar dolar; tahun 1944 (dalam perang) 10.4 milyar dolar; tahun 1953 (lama sesudah perang) 18.3 milyar dolar. Dalam tahun 1949 ekonomi AS mengalami resesi (kemunduran) dan ini mengurangi keuntungan kaum monopoli dengan lebih dari 4.500 djuta dolar. Tetapi kekurangan keuntungan ini dapat dikedjar dengan mengadakan pembunuhan² terhadap Rakjat Korea sehingga dalam setengah tahun sджа keuntungan raksasa ini sudah naik dengan lebih dari 6.300 djuta dolar (angka keuntungan bersih tahun 1948 berdjumlah 20.3 milyar dolar, tahun 1949 berdjumlah 15.8 milyar dolar dan tahun 1950 berdjumlah 22.1 milyar dolar).

Selandjutnja mari kita lihat angka² jang menggambarkan banjknja pengeluaran untuk AP djika dibandingkan dengan seluruh pengeluaran dalam anggaran belandja pemerintah AS, sekaligus dibandingkan dengan banjknja dan terus meningkatnja hutang negara (dalam milyar dolar):

	<i>Djumlah Pengeluaran</i>	<i>Pengeluaran untuk Angkatan Perang</i>	<i>Hutang Negara</i>
Tahun fiskal 1951	44.1	22.3	255.3
Tahun fiskal 1952	65.4	43.8	259.2
Tahun fiskal 1953	73.9	50.3	266.1

Dari angka² ini djuga mendjadi terang bahwa pengeluaran AS untuk AP dalam tahun 1953 lebih dari 68% dari semua pengeluaran. (Bandingkan: angka Uni Sovjet dalam tahun jang sama hanya 20.8%, RRT 22.38%, Rumania 18%).

Dengan melalui wakil²nja jang menguasai pemerintahan dan Kongres AS, kaum monopoli memaksakan adanja pesanan² perang, baik untuk keperluan Angkatan Perang AS sendiri maupun untuk mempersendjatai boneka²nja di-negeri² lain melalui apa jang dinamakan „bantuan militer”. „Bantuan militer” ini merupakan bagian jang terpenting dari segala matjam bentuk „bantuan” jang diberikan AS kepada negara² lain dengan maksud untuk mempengaruhi dan mengikat dan lambatlaun menguasai dan mendjadjah sepenuhnya negara² itu, jang berarti pendudukan negara itu oleh Angkatan Perang AS. Angka² dari tahun ketahun memperlihatkan adanja pergeseran politik „bantuan” AS dari „bantuan ekonomi” ke „bantuan militer”. Angka² jang dikumpulkan oleh „Federal Reserve Bank of New York” menundjukkan bahwa „bantuan ekonomi” untuk Eropa diantara tahun² 1946-1948 rata² setahun 1.252 djuta dolar, sedangkan „bantuan militer” baru berdjumlah 141 djuta dolar atau 11% dari „bantuan ekonomi”. Tetapi dalam tahun 1953 keadaannja sudah berlainan samasekali. Dalam tahun ini „bantuan ekonomi” untuk Eropa berdjumlah 1.126 djuta dolar, sedangkan „bantuan militer” sudah berdjumlah 3.464 djuta dolar atau lebih dari 300% dari banjakknja djumlah „bantuan ekonomi”.

Nafsu perang kaum monopoli AS akan lebih nampak lagi kalau ditambahkan kenyataan bahwa di AS masih tertimbun sedjumlah sendjata dan amunisi, termasuk bom atom, seharga tidak kurang dari 100.000 djuta dolar, sedangkan industri perangnja terus bekerja membikin lebih banyak lagi sendjata dan amunisi. Untuk semuanya ini tentu harus ditjarikan konsumennja!

„Bantuan dolar” seperti jang dilakukan oleh AS samasekali tidak membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional di-negeri lain, tetapi djustru sebaliknya, „bantuan dolar” hanya menimbulkan kekatjauan dan krisis ekonomi di-negeri² jang „dibantu”. Tjontoh jang paling terang tentang ini adalah kebobrokan ekonomi dan lenjapnja demokrasi di-negeri² seperti Iran, Pakistan, Muang Thai, Filipina dan Korea Selatan, jaitu negeri² jang hidupnya menggantungkan diri pada „bantuan dolar”. Menurut harian „Merdeka” 23 Djanuari 1954, „bantuan militer” AS kepada „negara Islam” Pakistan akan berupa: 3.000 pesawat udara, 250

djuta dolar untuk membeli alat² militer, 21 buah kapal perang. Angkatan Darat Pakistan jang sekarang 50.000 orang akan dibesarkan mendjadi 400.000, artinja dibesarkan 8 kali. Ongkos semuanya ini sudah tentu dibebankan kepada kaum buruh dan kaum tani Pakistan jang sangat menderita itu. Kita semuanya mengetahui bahwa di Pakistan ini djuga, jaitu di Pakistan Timur, kemenangan Rakjat jang ditjapai setjara demokratis melalui pemilihan umum ditindas dengan kedjam dan kurangadjar. Ju Tjan Jang, dutabesar Syngman Rhee di AS mengakui bahwa „di Korea Selatan sudah semendjak djaman ECA terdapat regu² penindjau jang lari kian kemari ber-kedjar²an, tapi satu pabrikpun belum ada jang berdiri”. Sebaliknya dikatakan oleh Ju bahwa „Di Korea Utara projek² pembangunan perindustrian itu didjalankan dengan sangat tjepatnja”. Kenyataan ini hendaknja mendjadi peladjaran bagi Rakjat dan pemimpin² Indonesia, karena djuga di Indonesia masih ada orang² jang mengharapkan „bantuan dolar”, djuga di Indonesia banjak „ahli” dan „penasehat” Belanda dan Amerika jang berkeliaran, djuga di Indonesia ada „mahasiswa² AS jang mempeladjar sedjarah”, ada „ahli² tumbuh²an asing jang mengadakan penjelidikan² di Sulawesi dan Maluku”, ada „atase² militer” asing jang dengan menggunakan kapal udara dan jeep amphihi sendiri dengan bebas mengadakan perdjalan² di-bagian² Indonesia, dan ada djuga „atase² militer” asing jang suka pergi „berburu babi” dengan „ditemani” oleh pembesar² tinggi Indonesia. Tetapi, mana pabrik jang sudah didirikan sebagai imbalan daripada kegiatan² luarbiasa dari para „ahli”, „penasehat” dan kaum penindjau asing ini? Sampai sekarang jang didapat oleh Indonesia dari „bantuan” Amerika bukan pabrik, tetapi barang rongsokan jang memang sudah tidak ada pasarannja lagi di Amerika atau di-negeri² lain jang sudah madju.

„Bantuan dolar” tidak membantu pembangunan ekonomi nasional, tetapi jang kongkrit jalah bahwa dengan „bantuan dolar” sudah ada satu setengah djuta serdadu AS jang menduduki 63 negara (termasuk lebih dari 50.000 serdadu AS jang menguasai 40 pangkalan udara dan militer di Inggeris), sudah ada sepertiga dari angkatan udara AS menduduki 49 negeri diluar wilajah AS, dan sudah ada 82 pangkalan militer AS diwilajah negeri orang

lain. Dan tidak boleh kita lupakan adanya rentjana AS untuk menduduki 90 tempat strategis di Indonesia.

Ekonomi perang dan politik agresif AS memang telah membikin sedjumlah ketjil orang² Amerika menjadi miljuner dan milyarder, tetapi ia samasekali tidak membawa kebahagiaan kepada Rakyat Amerika sendiri. Ini dibuktikan oleh angka² pengangguran: bulan Djanuari tahun 1954 jang 100% menganggur di Amerika ada berdjumlah 3.250.000, jang setengah menganggur 8.300.000, total jang menganggur dan setengah menganggur 11.550.000.

Kawan², dengan menundjukkan fakta² diatas, djelaslah bagi kita bahwa politik perang AS adalah bersumber pada ekonomi perangnya, menjadi djelas bagi kita bahwa menjatukan diri dengan AS berarti turut menerima kebangkrutan ekonomi dan politik perangnya.

Berbeda dengan ekonomi dan politik perang Amerika, pekerjaan damai dan kreatif untuk kebahagiaan hidup Rakyat-banjak adalah hukum pokok masyarakat sosialis dan demokrasi Rakyat. Di Hongaria, negeri jang berpenduduk tidak lebih dari 10 djuta, hasil industrinja antara tahun 1951-1953 naik dengan 73%, sehingga dalam tahun 1953 hasil industrinja sudah menjadi 22.5% lebih tinggi dari seluruh hasil industrinja dalam tahun 1938. Akibatnja dirasakan langsung oleh Rakyat Hongaria dengan sudah 3 kali mengalami penurunan harga barang², sehingga upah riil kaum buruh menjadi 57% lebih tinggi dari masa sebelum perang. Penurunan harga barang dan kenaikan upah riil kaum buruh adalah djuga terdjadi di-negeri² demokrasi Rakyat jang lain di Eropa Timur. Republik Rakyat Demokrasi Korea dengan bantuan jang banjak dan djudjur dari Uni Sovjet telah berhasil membangun pabrik² baja, besi, tekstil, sedangkan pabrik² mobil, kapal, listrik dan alat² pertanian sedang dibikin. Dalam keadaan jang sangat sukar, Republik Rakyat Demokrasi Korea selama tahun² jang lalu telah dapat mengadakan penurunan² harga barang² makanan dan manufaktur dengan 30 sampai 55% sehingga dengan demikian upah riil kaum buruh menjadi lebih dari dua kali lipat upah riil masa sebelum perang. Di Republik Rakyat Tiongkok kemadjuannya makin mengagumkan lagi. Tahun 1953, jaitu tahun pertama dari Rentjana Lima Tahun jang pertama di RRT, telah

mempertinggi seluruh hasil industri dan pertaniannya dengan 11.4% dibandingkan dengan tahun 1952. Ini mengakibatkan kenaikan dajabeli seluruh masyarakat dengan 20%. Di Uni Sovjet hasil industri tahun 1953 adalah 12% lebih tinggi daripada tahun 1952 atau kira² dua setengah kali lebih besar daripada produksi tahun 1940. Sedjak sesudah perang di Uni Sovjet sudah 7 kali diadakan penurunan harga dan tiap² penurunan harga berarti kenaikan upah riil Rakyat pekerdja Sovjet. Dengan dibukanya sentral listrik pertama jang dijalankan dengan tenaga atom pada tanggal 27 Djuni 1954, maka penggunaan tenaga atom untuk kepentingan damai sudah menjadi kenyataan di Uni Sovjet, dan dengan demikian terbukalah peluasan produksi industri jang tidak terbatas. Peluasan perdagangan luarnegeri Uni Sovjet jang sebesar 20.800 djuta rubel dalam tahun 1952 menjadi 23.000 djuta rubel dalam tahun 1953, suatu kenaikan 11%, menundjukkan bahwa hasil² industri damai Uni Sovjet djuga menguntungkan Rakyat diluar wilayah Uni Sovjet, dan dengan demikian adalah suatu jang masuk akal bahwa Uni Sovjet sungguh² dan djudjur menghendaki adanya perdagangan internasional jang normal, bebas dan luas.

Dengan demikian djelaslah bagi kita apa jang menjadi dasar politik damai Uni Sovjet, RRT dan negeri² demokrasi Rakyat lainnya. Tiap² fikiran sehat tentu terbuka untuk menerima kebenaran, bahwa pembangunan besar²an untuk kebahagiaan dan hidup damai bagi Rakyat-banjak tidak mungkin dikombinasi dengan peperangan. Politik damai di-negeri² sosialis dan demokrasi Rakyat adalah bersumber pada ekonomi damai dan menjatukan diri dengan sistem ekonomi ini berarti ikut menjiptakan perdamaian dan persaudaraan, berarti pembangunan ekonomi dan kebudayaan nasional.

Kawan², dengan mengetahui apa jang menjadi dasar politik negeri² blok Atlantik Utara jang dipelopori oleh AS dan apa jang menjadi dasar politik negeri² sosialis Uni Sovjet, RRT dan negeri² demokrasi Rakyat lainnya, menjadi djelas kenapa Partai kita senantiasa menganggap penting adanya konferensi² internasional atau regional seperti Konferensi Berlin, Konferensi Djenewa, Konferensi Kolombo (2), kenapa Partai kita menganggap penting adanya pertemuan² tokoh² berbagai negara seperti pertemuan Tjou En-lai dengan Nehru dan Tjou En-lai dengan U Nu jang telah melahir-

kan lima prinsip ko-existensi (hidup berdampingan) yang sangat terkenal itu, pertemuan Ali Sastroamidjojo dengan Nehru dan U Nu, pertemuan Nehru dengan Ho Chi Minh, pertemuan Nehru dengan Mau Tje-tung dan Tjou En-lai. Semuanya ini penting untuk meredakan ketegangan² internasional, supaya pertentangan² yang ada tidak berakibat timbulnya perang dunia baru. Dalam hubungan dengan politik internasional, Republik Indonesia telah membikin kemajuan² penting, yang belum pernah terdjadi sebelumnya. Pemerintah Indonesia ber-sama² dengan Rakjat Indonesia menjambut dengan gembira perletakan sendjata di Korea dan hasil konferensi Djenewa yang telah mendatangkan perdamaian di Indotjina. Pemerintah Indonesia dengan Rakjat Indonesia berjuang untuk menghapuskan embargo dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Demikian juga pemerintah Indonesia, ber-sama² dengan Rakjat Indonesia, telah menolak pakt agresif SEATO. Kita menjambut politik luarnegeri yang maju dari pemerintah ini sebagai kemenangan fikiran sehat yang penting dinegeri kita.

Kemenangan fikiran sehat telah menjebakkan pakt agresif MPE (Masjarakat Pertahanan Eropa) yang maksudnya untuk melegalisasi persendjataan kembali Djerman, ditolak oleh parlemen Perantjis. Tetapi sebagaimana kita ketahui, AS tidak mengindahkan fikiran² sehat, ini kita lihat di Eropa dan di Asia. Dengan tidak mengindahkan perasaan dan fikiran Rakjat Eropa, AS meneruskan pembentukan pakt agresifnya dengan mengadakan persetudjuan² agresif antara negara² Barat di London dan di Paris baru² ini, yang pada hakekatnya tidak lain daripada pelaksanaan MPE dengan nama lain. Dengan tidak mengindahkan perasaan dan fikiran Rakjat Asia, AS meneruskan pembentukan SEATO dalam konferensi di Manila. Disamping itu, dengan tidak mengindahkan perasaan dan fikiran Rakjat Asia, AS dengan giat menghidupkan kembali militerisme di Djepang sebagai kekuatan yang se-waktu² dapat dipergunakan untuk menguasai Asia. Kenyataan² ini menunjukkan, bahwa pekerdjaan untuk perdamaian dinegeri kita harus lebih diperkuat lagi. Politik luarnegeri yang maju dari pemerintah Indonesia sekarang harus mendapat sokongan dan dorongan yang lebih kuat lagi dari Rakjat Indonesia yang tjinta-damai.

Bagian yang diambil oleh Indonesia dalam Konferensi Kolombo mempunyai sifat menentukan dalam membikin Konferensi tsb. menjadi konferensi untuk memperkuat perdamaian di Asia. Konferensi ini adalah demonstrasi kekuatan keinginan damai Rakjat² Asia karena dalam konferensi ini telah dapat dikalahkan usaha² Amerika Serikat lewat Kotelawala (Sailan) dan Mohamad Ali (Pakistan) yang mau membikin konferensi tsb. menjadi bagian dari rentjana perang Amerika di Asia. Diserahkannya pelaksanaan konferensi Afro-Asia kepada Indonesia adalah bukti bertambah pentingnya kedudukan Indonesia dalam mempertahankan dan memperkuat perdamaian di Asia. Kita dapat menjetudjui diadakannya Konferensi Afro-Asia asal dengan tudjuan untuk meluaskan lima prinsip ko-existensi seperti yang sudah disetudjui oleh tiga pemimpin pemerintah Asia, Tjou En-lai, Nehru dan U Nu. Kedudukan Indonesia yang makin penting ini meletakkan tanggungjawab yang besar diatas pundak Rakjat dan pemerintah Indonesia.

Pembubaran Uni Indonesia-Belanda, sebagai hasil politik luarnegeri pemerintah sekarang, adalah gejala yang positif yang disambut dengan gembira oleh Partai kita dan seluruh Rakjat Indonesia yang berfikiran sehat. Ini adalah kemenangan politik, hasil dari persatuan dan perjuangan Rakjat yang makin kokoh. Tetapi, sebagaimana sudah sering kita katakan, dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda sadja, perjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme Belanda samasekali belum selesai. Perjuangan untuk menghapuskan kekuasaan Belanda dilapangan keuangan dan ekonomi, dan perjuangan untuk mengusir imperialisme Belanda dari Irian Barat adalah ber-puluh² kali lebih berat dan lebih sengit daripada perjuangan untuk menghapuskan Uni Indonesia-Belanda. Untuk berhasilnya perjuangan ini dibutuhkan persatuan nasional yang ber-puluh² kali lebih luas dan lebih kuat daripada yang sudah kita punjai. Rakjat Indonesia harus lebih merapatkan barisanja, lebih mengokohkan persatuannya dengan tidak pandang wanita atau lelaki, dengan tidak pandang perbedaan politik, agama dan kedudukan sosial.

Mendorong Perkembangan Melalui Djalan Nasional Jang Demokratis

Salahsatu putusan Kongres Nasional ke-V ialah bahwa Partai kita bersedia untuk meneruskan sokongannya kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo dan memberikan kepadanya semua bantuan apabila ia bersedia melaksanakan suatu program jang menguntungkan kepentingan nasional. Kongres berpendapat bahwa pemerintah Ali Sastroamidjojo mempunyai sjarat² untuk bertindak lebih maju daripada apa jang sudah ditindakkannya dan bahwa program jang diadjukan oleh Partai kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo adalah sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, dan ini adalah sjarat apabila pemerintah ini mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, djalan demokrasi dan kemadjuan bagi Indonesia.

Kongres Nasional ke-V djuga sudah menganalisa kemungkinan² perkembangan keadaan Indonesia jang tidak stabil sekarang ini. Keadaan Indonesia jang tidak stabil bisa berkembang kebeberapa djurusan, ia bisa berkembang kekiri atau kekanan, ia bisa berkembang kedjurusan jang menguntungkan Rakjat dengan menempuh djalan nasional jang demokratis, tetapi ia djuga bisa berkembang kedjurusan jang merugikan Rakjat dengan menempuh djalan jang anti-nasional dan anti-demokrasi. Adalah tergantung pada seluruh kekuatan demokratis, dan terutama tergantung kepada Partai kita, perkembangan mana jang akan terdjadi. Berhubung dengan ini, sangatlah penting bagi Partai untuk pada waktu² jang tertentu meninjau seluruh situasi politik negeri kita dan menarik kesimpulan², agar dengan demikian senantiasa dapat menguasai keadaan dan selanjutnya memimpin keadaan itu keperkembangan jang menguntungkan perdjjuangan kemerdekaan nasional dan demokrasi.

Keadaan sesudah Kongres Nasional ke-V Partai menundjukan, bahwa pada umumnya *kebebasan demokratis* lebih terdjamin daripada ketika dibawah pemerintah² reaksioner jang pernah ada sesudah persetudjuan KMB. Saja katakan pada umumnya, karena tempo² masih ada pedjabat² dipusat dan di-daerah² jang belum bisa atau sengadja tidak mau menyesuaikan diri dengan politik umum pemerintah jang memberikan kesempatan bergerak kepada

organisasi² Rakjat, kepada Partai Komunis dan partai² demokratis lainnya. Adanja kebebasan demokratis, walaupun disana-sini masih ada pembatasan² jang menjolok mata, telah memungkinkan perkembangan² jang pesat dari organisasi² massa jang demokratis dan telah menimbulkan kebangkitan massa jang besar. Disamping itu kerdjasama antara partai² demokratis makin bertambah erat, dan purbasangka „anti-Komunis” dari golongan tengah lambatlaun mendjadi berkurang. Berkembangnja gerakan Rakjat dan makin eratnja kerdjasama antara partai² demokratis merupakan kekuatan penting untuk menggagalkan tiap² usaha kaum imperialis dan kakitangannya jang dengan sekuat tenaga mau memperkuat kembali kedudukan kolonialisme di Indonesia dan mendjatuhkan pemerintah Ali Sastroamidjojo. Berkat kekuatan persatuan Rakjat inilah pertjobaan² kaum reaksioner diluar dan didalam parlemen telah mengalami kekalahan² penting jang membikin mereka kehilangan prestise. Djuga pertjobaan Tadjuddin Noor cs. dari partai PIR dalam bulan Oktober (3) baru² ini untuk menggulingkan pemerintah Ali Sastroamidjojo dan membentuk pemerintah Masjumi-PSI jang mendapat dukungan penuh dari imperialisme Belanda, Amerika, Kuomintang dan kakitangan²nja, telah dapat digagalkan berkat kekuatan persatuan nasional jang demokratis. Adanja peristiwa Tadjuddin Noor cs. sekali lagi membuktikan kepada Rakjat Indonesia betapa masih besarnya kekuasaan imperialis asing dinegeri kita, dan ini adalah bukti betapa belum sempurnanja kemerdekaan negeri kita. Tetapi apa jang sampai sekarang sudah dilakukan oleh musuh² Rakjat dan musuh² Republik Indonesia untuk mematahkan kekuatan demokratis dan mendjatuhkan pemerintah Ali Sastroamidjojo belum lagi sampai kepuntjaknja, ia akan bertambah hebat lagi di-hari² jang akan datang. Ini berhubung dengan keadaan mereka jang makin terdjepit dan matagelap. Mereka akan lebih kurangadjar lagi dalam melakukan suapan², intimidasi², provokasi² sebagai persiapan mereka untuk mengadakan kudeta. Kekuatan demokratis pasti akan dapat mengalahkan semuanya ini, asal sadsja kekuatan demokratis lebih bersatu lagi. Untuk ini faktor jang terpenting ialah kebebasan² demokratis jang didapat Rakjat dengan perdjjuangannya jang teguh dan jang dengan sadar diberikan oleh golongan² jang sekarang duduk dalam pemerintahan.

Rakjat Indonesia harus mempertahankan dengan sengit kebebasan² demokratis yang sudah didapatnja dan berdjuaug terus untuk mendapatkan kebebasan² demokratis yang lebih banjak. Tiap² pelanggaran terhadap kebebasan² demokratis oleh pedjabat² yang reaksioner harus mendapat perlawanan yang setimpal dan pemerintah harus senantiasa berfihak kepada Rakjat, djika pemerintah menganggap Rakjat sebagai sumber kekuatannja. Pendeknja, tidak boleh ada peianggaran terhadap kebebasan² demokratis yang didiamkan.

Walaupun mendapat rintangan² yang tidak sedikit dari pedjabat² dan partai² reaksioner, dan walaupun mengalami banjak kesulitan² karena kurang pengalaman dan kurang pimpinan yang tepat dan militan, persiapan untuk *pemilihan umum* yang pertama kali dinegeri kita berdjalan terus. Partai kita sudah dan sedang mengambil bagian yang penting dalam membangunkan semangat Rakjat untuk dengan aktif dan sungguh² menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Dimana Partai sudah ada dan berpengaruh, disitu pendaftaran pemilih berdjalan dengan lantjar, dan pertjobaan² membikin onar dan ketjurangan dari fihak pemimpin² partai² reaksioner segera ditelandjangi dan digagalkan. Bertambah kuatnja organisasi² dan partai² demokratis telah melenjapkan kejakinan dan harapan kaum imperialis Belanda, Amerika dan Inggeris serta kakitangan²nja akan kemenangan Masjumi-PSI dalam pemilihan umum yang akan datang. Oleh karena itu mereka dengan berbagai djalan dan terus-menerus berusaha untuk menggagalkan pemilihan umum, mereka mengadakan obstruksi² diparlemen dan menjabot persiapan² yang sedang dilakukan. Djuga pertjobaan menggulingkan pemerintah dalam bulan Oktober baru² ini oleh klik Tadjuddin Noor cs. dari partai PIR njata sekali ada hubungannja dengan kekuatiran mereka menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Bagi Rakjat dan bagi pemerintah sekarang, tidak ada sikap lain yang lebih tepat daripada sikap yang tetap teguh meneruskan semua persiapan pemilihan umum dan mematahkan tiap² rintangan yang mendjadi penghalang pelaksanaan pemilihan umum. Menjerah kepada mereka yang hendak menggagalkan pemilihan umum adalah sama dengan menjerah kepada musuh tanahair dan Rakjat Indonesia.

Tugas yang sangat berat bagi Rakjat dan pemerintah Indonesia

adalah tugas *memulihkan keamanan*. Dibanding dengan ketika pemerintah² reaksioner diwaktu yang sudah², keadaan keamanan sekarang pada umumnja mendapat kemadjuan², walaupun masih sangat banjak yang harus dikerdjakan untuk memulihkannja samasekali. Kalau pemerintah² reaksioner diwaktu yang sudah² menjokong gerombolan² teror atau bersikap tidak tegas terhadap gerombolan teror, pemerintah sekarang mempunyai ke-sungguh²an untuk membasmi semua gerombolan teror. Berkat politik pemerintah yang tegas anti-gerombolan teror, ber-angsur² hubungan antara anggota² Angkatan Perang dengan Rakjat mendjadi bertambah baik, dan di-banjak tempat yang katjau anggota² Angkatan Perang ber-sama² dengan Rakjat berdjuaug dengan teguh menghantjurkan gerombolan² DI, TII, PUSA, Gerajak Merbabu-Merapi, dan gerombolan² lainnja. Karena di-waktu² yang lalu banjak kesempatan yang sudah didapat oleh kaum imperialis Belanda, Inggeris dan Amerika dan oleh Masjumi-PSI untuk menginfiltrasi Angkatan Perang dan meluaskan gerombolan² teror, maka pekerdjaan pemulihan keamanan ini hanja bisa berhasil dengan sempurna dan dalam waktu yang tidak terlalu lama djika pemerintah tidak ragu² dan berani mengambil tindakan² yang diperlukan terhadap aparat²nja sendiri. Infiltrasi² dari kaum imperialis dan partai² pendukungnja telah membikin sangat sulit usaha mengembalikan AP mendjadi aparat yang benar² patriotik dan sungguh² mau berdjuaug ber-sama² dengan Rakjat dan untuk kepentingan Rakjat. Malahan ada klik² dalam AP yang sengadja membiarkan gerombolan meradjalela untuk mengimbangi kemadjuan gerakan Rakjat yang demokratis, yang oleh mereka dikatakan „untuk mengimbangi kemadjuan gerakan Komunis”. Tetapi, walaupun demikian, Angkatan Perang Republik Indonesia yang lahir sebagai anak revolusi Rakjat 1945-1948 mempunyai sjarat² untuk tidak mudah diadu dengan Rakjat dan dengan gerakan demokratis. Sampai sekarang pengalaman membuktikan, bahwa pemulihan keamanan sangat bergantung pada kebangkitan Rakjat di-tempat² yang dikatjau dan sangat bergantung pada bantuan yang ichlas dari Rakjat kepada tentara dan pedjabat² setempat. Dalam hubungan dengan pemulihan keamanan adalah penting artinja tindakan² pemerintah yang sudah mulai berani menggulung komplotan² Belanda dan Kuomintang. Sikap yang

teguh dan tindakan yang tegas terhadap komplotan² ini tidak kalah pentingnya dengan operasi² militer terhadap gerombolan² teror yang ada di hutan² dan gunung², karena komplotan² ini adalah bagian yang penting dalam rangka aktivitas kaum pengatjau dinegeri kita. Tiap² sukses dalam usaha pemulihan keamanan adalah pukulan terhadap kaum imperialis asing dan kakitangannya yang terus-menerus mengusahakan adanya kekatjauan² untuk menggagalkan pemilihan umum dan merobohkan Republik Indonesia.

Dilapangan *ekonomi* kita melihat adanya tindakan² pemerintah seperti menjediakan 80% dari seluruh devisa buat pedagang² warganegara Indonesia (tadinja sebagian besar devisa dibagikan kepada pedagang² besar asing, terutama Belanda), adanya andjuran dari pihak pemerintah agar distribusi barang² produksi pabrik² asing diserahkan kepada pedagang² Indonesia dan adanya kontrol terhadap impor barang² tekstil. Tindakan² ini relatif adalah tindakan² yang maju, tetapi disamping itu ia merupakan tindakan² yang setengah² dan tidak disertai persiapan² politik dan organisasi yang pantas sehingga menimbulkan keruwetan² yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menghasut dan memfitnah oleh pemimpin² dan koran² Masjumi-PSI. Ini adalah satu pengalaman, bahwa tiap² tindakan maju, walau bagaimanapun ketijlnja, haruslah disertai persiapan² yang pantas. Disamping itu tiap² tindakan harus dapat dirasakan gunanya oleh Rakjat-banjak agar dengan demikian mendapat dukungan dari Rakjat dan organisasi² Rakjat yang demokratis. Hanya dengan begini fitnahan² dan sabotase² dapat diperketjil sampai batas minimum dan akhirnya dikalahkan sama sekali. Tindakan maju walau bagaimanapun ketijlnja, tidak bisa dipisahkan dari tindakan² membersihkan aparat² negara dari pengchianat² bangsa, dari orang² yang reaksioner, yang korup dan birokratis serta mengganti mereka dengan orang² yang bersedia mengabdikan dirinya kepada kepentingan Rakjat. Tindakan lain dilapangan ekonomi yang lebih positif dan harus mendapat perhatian sungguh² ialah penolakan terhadap pengembalian tambang minyak Sumatera Utara kepada maskapai minyak BPM dan tindakan mengadakan hubungan dagang yang normal dengan negeri² demokrasi Rakjat. Penguasaan tambang minyak Sumatera Utara oleh pemerintah adalah sangat penting karena ini satu tindakan yang lang-

sung memberi pukulan kepada imperialis asing dan akan merupakan sumber penghasilan yang besar kepada Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus melepaskan samasekali sikap yang ragu² terhadap penguasaan tambang minyak Sumatera Utara. Hubungan dagang yang normal, yang masih sangat perlu lebih diperluas, merupakan satu²nja jalan buat melepaskan Indonesia dari segala matjam „bantuan” yang mengikat, dari hutang² yang berat dan dari keadaan „kekurangan dolar” atau „kekurangan pound sterling”. Hubungan dagang yang normal dengan negeri sosialis dan negeri² demokrasi Rakjat yang dilakukan setjara besar²an dan setjara konsekwen, akan meluaskan impor dan ekspor serta memungkinkan perkembangan industri negeri kita; dengan demikian dapat mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Ini mungkin, karena negeri sosialis dan negeri² demokrasi Rakjat adalah negeri² yang industrinja sudah maju dan tidak mempunyai tudjuan² imperialis terhadap Indonesia dan terhadap negeri manapun. Pendeknja, pemerintah Indonesia harus melepaskan sikap ragu²nja dalam mengadakan hubungan dagang normal. Dengan demikian djelaslah, bahwa mengenai tindakan² pemerintah dilapangan ekonomi dapat ditjatat kemajuan², tetapi kemajuan² itu tidak seimbang dengan apa yang sering dikatakan oleh orang² pemerintah untuk „mengganti susunan ekonomi kolonial dengan susunan ekonomi nasional”. Pembijtaraan tentang penggantian susunan ekonomi kolonial dengan susunan ekonomi nasional hanya akan merupakan demagogi belaka djika tidak disertai tindakan² *menghapuskan* sistem tuantanah dan kapitalis monopoli yang sekarang menguasai semua sektor ekonomi yang terpenting dinegeri kita dan yang masih leluasa mentransfer keuntungannya keluarnegeri. Dalam keadaan sekarang, bertindak tegas *mengurangi* hak² tuantanah² dan lintahdarat serta monopoli asing, dan mengadakan hubungan dagang normal yang luas dan konsekwen dengan negeri sosialis dan negeri² demokrasi Rakjat adalah satu²nja jalan yang dapat ditempuh untuk *mengurangi* kesulitan² ekonomi yang sekarang akibatnja sangat berat diderita oleh massa Rakjat yang luas.

Mengenai *perbaikan nasib* bagi kaum buruh praktis tidak ada tindakan² yang berarti. Walaupun pihak Kementerian Perburuhan ada kalanja suka menundukkan kemauan baiknja dalam meng-

hadapi tuntutan² kaum buruh, sehingga sering pemogokan tidak diperlukan karena dalam perundingan pihak pemerintah memperhatikan tuntutan² kaum buruh, tetapi sampai sekarang Undang² Darurat Tedjasukmana yang tjelaka itu masih terus berlaku. Konsep pengganti Undang² Darurat ini sudah pernah diadjudkan kepada parlemen, tetapi pemerintah terpaksa menariknya kembali, karena ditolak oleh pemimpin² buruh diparlemen berhubung tidak banjak bedanja dengan Undang² Darurat Tedjasukmana. Undang² Darurat Tedjasukmana sampai sekarang masih tetap merupakan pentungan untuk menggagalkan aksi² kaum buruh dan untuk memasukkan pemimpin² kaum buruh kedalam penjara. Oleh karena itu adalah kewajiban gerakan demokratis, terutama kewajiban serikatburuh² dan Partai kita, untuk terus berjuang guna membatalkan Undang² Darurat tsb.

Dalam bulan Djuni jl. pemerintah telah mengeluarkan „Undang² Darurat Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakjat”. Undang² Darurat ini memang pada umumnya menguntungkan kaum tani yang sudah menduduki tanah ondereming² asing, tetapi kaum tani yang mendapat tanah dengan undang² ini djumlahnja tidak banjak. Ber-puluh² djuta kaum tani masih hidup dalam keadaan lapartanah, hidup ditindas oleh kaum tuantanah dan lintahdarat. Pengusiran dan penangkapan terhadap kaum tani di beberapa tempat masih terdjadi. Kenyataan² ini meleakakan kewajiban yang berat pada pundak Partai kita untuk lebih giat mengorganisasi massa kaum tani dan membantu mereka dalam perjuangan melawan penindasan kaum tuantanah dan lintahdarat. Sebagaimana djuga pekerdjaan dikalangan kaum buruh, pekerdjaan dikalangan kaum tani adalah bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok dari Partai. Pekerdjaan inilah yang terutama akan mendjadi djaminan tertjapainja sukses² yang lebih besar bagi Partai kita dan seluruh kekuatan nasional yang demokratis.

*

Kesimpulan dari semuanya jalah, bahwa dalam lebih-kurang setengah tahun belakangan ini kita dapat mentjatat kemadjuan² sebagai hasil perjuangan Rakjat yang dimungkinkan oleh keadaan

politik dinegeri kita. Ini nampak pada politik luarnegeri yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, politik yang menghendaki perdamaian dan kerdjasama internasional yang saling menguntungkan berdasarkan lima prinsip ko-existensi yang sudah disetujui oleh Tjou En-lai dengan Nehru dan Tjou En-lai dengan U Nu. Kemadjuan² djuga nampak oleh kenyataan² dalam negeri dengan makin berkembangnja gerakan Rakjat yang demokratis dan dengan adanya tindakan² yang madju dari pemerintah diberbagai lapangan. Tetapi, mengenai keadaan dalam negeri, adalah djuga kenyataan, bahwa masih banjak pedjabat² pemerintah dipusat maupun di daerah² yang bersikap memusuhi gerakan demokratis. Disamping itu tindakan² pemerintah diberbagai lapangan belum dapat dikatakan tindakan yang penting untuk perbaikan nasib massa Rakjat yang luas.

Adalah kewajiban Partai yang penting dan berat untuk mengembangkan kemenangan² politik luar dan dalam negeri yang sudah ditjapai hingga sekarang, untuk lebih mengembangkan gerakan Rakjat dan lebih memperkuat Partai, untuk membantu dan mendorong pemerintah Ali Sastroamidjojo agar mengambil tindakan² yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Politik Partai untuk meneruskan sokongannja kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo, seperti yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V, sampai sekarang masih tetap politik yang benar.

Untuk Persatuan yang Lebih Luas Dibutuhkan Tjara Pimpinan Kolektif Didalam Partai

Kawan², bisa atau tidaknja politik perdamaian dan politik dalam negeri yang agak madju dikembangkan, adalah tergantung pada apa yang mendjadi perasaan dan fikiran Rakjat, dan sampai kemana massa Rakjat yang luas memperdjungkan tuntutan²nja setjara terorganisasi. Kita tidak boleh melupakan, bahwa disamping ber-djuta² orang yang sudah sadar akan perlunya membela perdamaian dan perlunya ada tindakan² yang madju didalam negeri, masih ber-djuta² massa Rakjat, yang sudah dan belum terorganisasi, yang terus-menerus mendjadi sasaran propagandis² dan pers yang mendukung politik kolonial Belanda dan politik perang Ame-

rika Serikat. Oleh karena itu, adalah kewajiban kaum Komunis untuk mengajak massa Rakyat supaya menjatakan perasaan dan fikirannya, agar perasaan dan pikiran merekalah yang akhirnya mendapat kemenangan. Ini adalah sjarat untuk menimbulkan gerakan yang kuat dan untuk lebih meluaskan persatuan dari semua kekuatan nasional guna perdamaian, perbaikan nasib dan kemerdekaan nasional yang penuh bagi negeri kita.

Adalah kewajiban dari semua orang yang memimpin gerakan Komunis untuk setjara kongkrit mengetahui bagaimana massa Rakyat yang luas terorganisasi, sebab² apa yang menimbulkan organisasi² itu, bagaimana organisasi² itu disusun, apa yang menjadi tujuannya, aliran politik apa yang diikuti oleh pemimpin²nja. Pengetahuan yang kongkrit tentang semuanya ini akan membantu kita dalam menemukan jalan untuk membikin kontak² guna mengadakan kerdjasama buat mentjapai tujuan kita, yaitu mengkonsentrasi seluruh kekuatan nasional yang lebih luas daripada apa yang sudah kita tjapai sekarang ini.

Di Indonesia sekarang pada pokoknya ada dua kekuatan yang tujuannya bertentangan satu sama lain. Disatu pihak ialah kekuatan nasional yang demokratis yang menghendaki perdamaian, kemerdekaan nasional, hidup rukun dan beradab. Difihaik inilah Partai kita berdiri dan merupakan elemen yang sangat penting. Difihaik lain ialah kekuatan anti-nasional dan anti-demokrasi, kekuatan yang membela kepentingan tuantanah dan lintahdarat dan yang menjadi bagian dari politik pendjadjahan Belanda dan politik perang Amerika dinegeri kita, yang menentang usaha² untuk melikwidasi samasekali kolonialisme di Indonesia. Difihaik ini pemimpin² partai² Masjumi-PSI memainkan rolnja yang penting.

Pada umumnja Rakyat kita dipengaruhi oleh tiga aliran politik, yaitu aliran Komunis, Nasionalis dan Islam. Inilah aliran² yang meresap sampai kekalangan Rakyat-banjak. Aliran sosialis kanan, sekarang terkenal dengan nama aliran „soska“, yang di Indonesia diwakili oleh PSI, tidak mempunyai pengikut yang luas dikalangan Rakyat-banjak. Tetapi dengan ini tidak berarti bahwa aliran „soska“ tidak perlu mendapat perhatian.

Disamping aliran Komunis dengan tradisi revolusionernja yang gemilang dan heroik, aliran Nasionalis dan Islam djuga mempu-

njai tradisi dalam masyarakat kita. Aliran Nasionalis dan partai politik Nasionalis mulai dikenal oleh Rakyat Indonesia sedjak permulaan abad ke-20, ia dikenal ber-sama² dengan lahirnja gerakan nasional dinegeri kita. Agama Islam sudah dikenal ratusan tahun, sedjak agama Islam datang di Indonesia, tetapi partai politik Islam baru dikenal djuga sedjak permulaan abad ke-20. Politik partai² Nasionalis dan partai² Islam tergantung pada klas² dari orang² yang memimpin partai² itu.

Mengingat adanya tradisi dari aliran politik Nasionalis dan Islam di Indonesia, sudah tentu kaum imperialis asing berusaha untuk mendudukan orang²nja dipujuk gerakan² dan partai² Nasionalis dan Islam. Dengan perantaraan orang²nja penguasa² asing berusaha untuk mempengaruhi Rakyat dan untuk mengadu-domba massa partai² Nasionalis dan Islam dengan kaum Komunis dan massa Komunis. Djika mereka tidak berhasil atau kurang berhasil dalam menggunakan sesuatu partai Nasionalis atau partai Islam, maka mereka memetjah-belah partai Nasionalis atau partai Islam itu. Inilah yang menjadi sebab kenapa terdapat banjak partai² Nasionalis dan partai² Islam di Indonesia, disamping bahwa timbulnja partai² itu djuga disebabkan hanya oleh ambisi perseorangan dari pemimpin²nja.

Mengingat proses timbulnja berbagai partai Nasionalis dan Islam dinegeri kita, dan mengingat sikap² yang berbeda dari partai² ini pada waktu² yang tertentu, maka adalah keliru djika kita menjamakan begitu sadja semua partai itu. Mereka mempunyai perbedaan², ada kalanja besar dan ada pula kalanja ketjil. Oleh karena itu adalah keliru djika kaum Komunis menolak kerdjasama dengan semua partai dan semua pemimpin Nasionalis dan Islam. Sebaliknya ialah yang benar. Kita harus tidak henti²nja menjari kontak² untuk mengadakan kerdjasama yang erat berdasarkan suatu program kongkrit yang tertentu, dan ber-sama² membuka kedok partai² dan pemimpin² Nasionalis dan Islam yang membela kepentingan tuantanah dan lintahdarat, dan yang membela politik kolonial Belanda dan politik perang Amerika Serikat.

Kebenaran tentang apa yang dikatakan diatas akan lebih djelas lagi kalau sudah dibawa kemassa, yang terorganisasi dan yang tidak terorganisasi. Tidak ada alasan samasekali bagi massa Komu-

nis, yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, untuk menolak kerdjasama berdasarkan suatu program yang kongkrit dengan massa Nasionalis dan Islam, yaitu massa partai² Nasionalis dan Islam yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Pengalaman menunjukkan, bahwa massa Nasionalis dan massa Islam tidak sedikit yang setuju pada Partai kita. Djuga massa Nasionalis dan massa Islam yang tidak setuju dengan kita, dan malahan mungkin masih menentang kita, sangat banyak yang melihat adanya persamaan kebutuhan dengan massa Komunis. Satu kenyataan yang tak dapat dibantah, bahwa antara massa Komunis dengan massa Nasionalis dan Islam lebih banyak terdapat titik² pertemuan daripada antara orang² yang memimpin mereka. Oleh karena itulah, perundingan satu dengan lain, saling mendekati dan mengadakan persetudjuan² dalam banyak hal adalah mungkin dan djalan inilah yang harus kita tempuh. Kesinilah perhatian harus kita tjurahkan, sebagai salahsatu usaha kita yang penting untuk lebih meluaskan persatuan semua kekuatan nasional. Dengan ini kita mendidik massa Rakjat supaya tidak mau dipetjahkan oleh pemimpin² Nasionalis dan Islam, yang dengan sembojan „anti-Komunis” mau mempraktekan Mac Cartyisme⁽⁴⁾ dinegeri kita dan yang mau membawa Indonesia kembali kedalam tjengkeraman peperangan dan kolonialisme. *Ini situasi negeri kita, ini soal negeri kita. Djika soal ini dapat kita petjahkan, maka akan sangat membantu kita dalam menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani dan dalam mentjiptakan persatuan yang lebih luas dari semua kekuatan nasional dinegeri kita.*

Kerdjasama antara Partai dan massa Komunis dengan partai dan massa Nasionalis dan Islam bagi kita bukan hanya sesuatu yang dapat dibatasi sampai selesainya pemilihan umum yang akan datang, sebagaimana sering dikatakan oleh pemimpin² Nasionalis dan Islam. Kita menghendaki kerdjasama djuga sampai sesudah pemilihan umum, dengan tidak peduli siapa yang akan menang nanti. Dan apa yang kita inginkan ini adalah sesuai dengan sembojan Republik kita „Bhinneka Tunggal Ika” (ber-beda² tetapi bersatu).

PSI yang mewakili aliran sosialis kanan di Indonesia bukanlah satu partai yang mempunyai pengaruh luas dikalangan Rakjat.

Aliran sosialis kanan tidak mempunyai tradisi dinegeri kita. Partai ini dibangun menurut resep kaum sosial-demokrat Eropa Barat dan pengaruhnya terbatas pada sebagian kaum intelektual, dan kebanyakannya kaum intelektual yang ambisius dan oleh karena itu sangat setuju dengan metode kerdja PSI yang mengutamakan pekerdjaan menempatkan anggota²nja di-kedudukan² penting dalam pemerintahan dan dalam pimpinan partai² lain. Karena masih banyaknja anggota² PSI yang menjelundup dalam aparat² pemerintah sipil dan militer dan dalam partai² burdjuis, maka bahaya yang dapat ditimbulkan oleh partai ini tidak boleh diketjilkan kemungkinannja seperti ber-kali² sudah dibuktikan oleh peristiwa² politik dinegeri kita. Pimpinan partai² reaksioner boleh dikatakan didjiwai dan diilhami oleh anggota² PSI yang ditempatkan didalamnya. Dengan demikian PSI memainkan rol yang penting dalam menghalangi fikiran² madju yang mungkin ada dikalangan pemimpin² partai yang diinfiltrasinja. Apakah sesudah mengetahui semuanya ini berarti, bahwa kita menolak kerdjasama dengan partai sosialis dan massa sosialis? Tidak, djuga seperti terhadap partai Nasionalis dan partai Islam beserta massanja, kita harus mentjari kontak² untuk melaksanakan kerdjasama berdasarkan program kongkrit yang tertentu. Kita djuga mengetahui, bahwa antara massa Komunis dengan massa sosialis lebih banyak terdapat titik² pertemuan daripada antara orang² yang memimpin mereka. Pada pokoknja demikian djuga sikap kita terhadap partai Katolik dan partai Protestan serta massa mereka, yang dibeberapa tempat dinegeri kita mempunyai pengaruh tertentu.

Satu hal perlu diperingatkan kepada kader² Partai, ialah supaya dalam mereka melaksanakan kerdjasama dengan partai² dan organisasi² dari berbagai aliran, kita harus mentjegah penggunaan mayoritas setjara mekanis. Untuk mendapat sukses dalam kerdjasama kita tidak boleh menjandarkan diri pada banyaknja organisasi² yang pasti akan memihak tiap² pendirian Komunis dalam lingkungan kerdjasama itu. Ini bukan tjara yang benar. Kita harus mendasarkan diri atas kebenaran politik Partai, atas kedjudjuran, kegiatan dan keuletan aktivis² Komunis. Politik Partai adalah sesuatu yang objektif, yang seharusnya djuga mendjadi politik dan pendirian dari tiap² orang yang berkemauan baik dan sadar. Djadi,

jang terpenting ialah, bahwa kerdjasama harus berdasarkan kesedaran akan kepentingan dan tujuan bersama.

Kawan², penggalangan persatuan nasional jang lebih luas tidak bisa dipisahkan dari pekerdjaan memperkuat persatuan didalam Partai, persatuan dilapangan politik, ideologi dan organisasi. Djaminan bagi persatuan nasional jang lebih luas daripada sekarang ialah djika kita memperhebat pekerdjaan meluaskan Partai keseluruhan Indonesia dan lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa, djika kita tidak henti²nja mengkonsolidasi Partai dilapangan politik, ideologi dan organisasi. Ini sudah mendjadi pendirian seluruh Partai kita.

Menurut laporan sementara jang sudah diterima oleh Sekretariat Central Comite, sampai achir bulan Oktober jang lalu Partai kita sudah mempunyai anggota dan tjalon-anggota lebihkurang 500.000 (setengah djuta) tersebar hampir diseluruh Indonesia. Dari hasil jang sudah ditjapai selama kampanye peluasan keanggotaan dan organisasi dalam setengah tahun belakangan ini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa peluasan organisasi adalah lebih sulit daripada peluasan keanggotaan. Djumlah banjaknja comite² dan organisasi² basis jang sudah ditetapkan menurut rentjana lebih sulit mentjapainja daripada mentjapai rentjana djumlah anggota. Achir tahun ini ber-sama² akan kita lihat sampai kemana hasil plan peluasan keanggotaan dan organisasi. Sukses² jang sudah didapat dalam peluasan keanggotaan dan organisasi Partai terutama disebabkan oleh benarnya program dan taktik serta garis organisasi Partai jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V jl. Mulai baiknja pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani adalah merupakan faktor jang sangat penting dalam peluasan keanggotaan dan organisasi. Kebenaran program dan taktik Partai telah menimbulkan keprtjajaan jang lebih besar dari Rakjat kepada Partai. Tidak hanya dari kalangan kaum buruh dan kaum tani, djuga dari kalangan intelektual, peladjar dan mahasiswa makin lama makin banjak jang memasuki barisan Partai.

Dengan bertambah banjak anggota dan organisasi Partai sampai beberapa kali lipat, maka berarti terbentangleh pekerdjaan jang mahaluas dan mahaberat dihadapan tiap² kader Partai. Kader² Partai belum kenal dengan sebagian besar dari orang² jang baru

masuk kedalam barisan Partai. Kader² kita harus mengenal mereka, harus mengetahui asalusul mereka, harus mengetahui apa jang mendorong mereka masuk Partai, ja, pendeknja harus mengetahui semuanya tentang mereka. Ini bukan pekerdjaan jang mudah. Belum lagi pekerdjaan mengorganisasi dan mendidik mereka, apalagi mengingat masih belum banjaknja kader Partai jang sudah mempunyai pengalaman jang lama dilapangan organisasi dan pendidikan. Padahal, sebagaimana sudah dikatakan dalam tulisan untuk memperingati ulangtahun ke-34 Partai, Partai akan mendjadi rapuh dan tidak berdaja djika tidak mengkonsolidasi diri dilapangan politik, ideologi dan organisasi. Kita sekarang terpaksa mendajung dengan apa jang ada, kita harus kerdjakan semua ini dengan kader² jang sudah dipunyai oleh Partai sekarang. Ini mungkin dan bisa, asal kader² Partai bekerdja lebih keras dan lebih sungguh² lagi dari sekarang ini, bekerdja keras untuk mengorganisasi dan mendidik anggota² dan bekerdja keras untuk meninggikan pengertian teori dan memperkuat ideologi kader² sendiri. Pekerdjaan ini berat, tetapi adakah Komunis jang tidak bekerdja berat? Dimana ada pekerdjaan berat dan sulit, disitulah tempat kita. Hanya sesudah melalui djalan jang ber-liku² dan ber-belit², suatu pekerdjaan jang berat, kita akan sampai kepada tujuan kita. Kita sudah mempunyai pengalaman dalam meluaskan keanggotaan Partai dari 10.000 mendjadi 100.000. Kita sudah menarik kesimpulan² dari pengalaman kampanye peluasan keanggotaan ini, dan pengalaman ini adalah sangat penting dalam pekerdjaan peluasan keanggotaan sekarang ini.

Partai Komunis adalah Partai jang hidup di-tengah² masjarakat. Adalah keliru djika kita mengira bahwa ideologi burdjuis dan pengaruh burdjuis hanya ada diluar Partai. Apalagi dengan banjaknja orang² baru jang masuk kedalam Partai kita, jang kebanyakan masuk dengan membawa restan² ideologi dan kebiasaan² burdjuis dan feodal kedalam Partai. Disamping itu, musuh² Partai tentu berusaha memasuki Partai kita, untuk merusak organisasi Partai dari dalam dan untuk melemahkan ideologi anggota² Partai. Kemungkinan ini tetap ada, dulu dan sekarang maupun nanti. Djuga seandainya Partai tidak mempunyai rentjana peluasan keanggotaan, kemungkinan ini tetap ada. Ini hanya bisa dilawan dengan

memperlipatgandakan kewaspadaan anggota² dan terutama kader² Partai, dan dengan memperhebat pekerdjaan ideologi didalam Partai.

Anggota² baru per-tama² harus diberi pengertian tentang apa Partai kita, bagaimana organisasi Partai kita disusun, apa kewadajiban anggota Partai dan tentang program Partai. Kepada mereka harus ditanamkan kepertjajaan dan kejakinan tentang tidak terbatasnja kekuatan massa Rakjat, tentang rol memimpin dari Partai dan tentang pentingnja front persatuan nasional. Untuk ini hasil² Kongres Nasional ke-V Partai merupakan sumber jang tidak akan kering bagi kader² jang bertugas mendidik anggota² baru. Disamping itu tiap² sikap politik Partai, jang dikeluarkan oleh CC djika jang bersifat nasional, atau jang dikeluarkan oleh Provinsi Komite djika jang bersifat provinsial, harus mendjadi bahan pendidikan politik bagi anggota. Kewadajiban mempergunakan hasil² Kongres sebagai bahan pendidikan hanja mungkin djika kader² Partai sendiri menguasai sungguh² isi semua putusan Kongres, dan ini hanja mungkin dengan adanja kursus² kader jang diadakan oleh tiap² tingkat comite. Singkatnja, kursus² kader jang selama ini sudah berdjalan, harus lebih diperhebat lagi, dibikin lebih sistimatis dan lebih praktis lagi.

Satu hal jang tidak boleh dibiarkan jalah, bahwa hasil diskusi dan putusan jang terpenting dari Kongres Nasional ke-V tentang persekutuan buruh dan tani dan front persatuan nasional sampai sekarang belum tjukup difahamkan oleh banjak kader Partai. Masih banjak kader Partai jang mengertikan persekutuan buruh dan tani dan front persatuan nasional sebagai sesuatu jang formil, jang mengira bahwa pelaksanaannja sudah tjukup dengan adanja pernajaan² formil tentang solidaritet serikatburuh² terhadap aksi² kaum tani, atau dari organisasi² tani terhadap aksi² kaum buruh, dan mengira bahwa front persatuan nasional sudah terlaksana djika pemimpin² Partai Komunis ber-sama² dengan pemimpin² partai² dan organisasi² lain sudah mengadakan rapat² dan mengeluarkan pernajaan². Pengertian jang tidak tepat tentang persekutuan buruh dan tani telah tidak mendorong Partai untuk mengetahui benar² tentang hubungan agraria didesa. Dengan tidak ada pengetahuan tentang hubungan agraria didesa kader² Partai tidak mungkin dapat

menundjukkan dengan kongkrit kepada kaum tani musuh² mereka jang sesungguhnya, jaitu tuantanah dan lintahdarat. Pengertian jang tidak tepat dari kader² tentang front persatuan nasional telah tidak mendorong Partai untuk memperbaiki pekerdjaan membantu dan mengorganisasi semua klas dari Rakjat. Sukses² Partai dan sukses² perdjjuangan nasional kita banjak tergantung pada pengertian jang tepat dari kader² Partai, sampai kader² jang paling bawah, tentang apa jang sesungguhnya dimaksudkan oleh Partai dengan persekutuan buruh dan tani dan front persatuan nasional.

Kader² Partai tingkat Seksi Komite keatas harus membiasakan diri membuatja dan mendiskusikan tulisan² klasik Marxisme-Leninisme. Pengalaman kita dengan kampanye mempeladjar tulisan Lenin *Komunisme „Sajak-Kiri“*, *Suatu Penyakit Kanak²* selama bulan Djuli dan Agustus tahun ini, menundjukkan bahwa mempeladjar tulisan klasik Marxisme-Leninisme sangat membantu kader² Partai untuk lebih mudah mengerti semua persoalan politik jang dihadapi, telah memperbesar kemampuan kader² Partai dan telah menimbulkan kegembiraan bekerdja pada kader² Partai. Kemadjuan kader² Partai ini membawa pengaruh jang baik pada seluruh pekerdjaan Partai dan pada seluruh anggota Partai. Adalah satu keteledoran, bahwa kampanye beladjar ini dibeberapa provinsi belum dilaksanakan dengan sungguh². Mempeladjar tulisan² klasik Marxisme-Leninisme adalah sjarat hidup bagi kader² Partai.

Prinsip jang tertinggi dari pimpinan Partai jalah tjara pimpinan kolektif. Ini adalah prinsip pimpinan Leninis dan ini adalah salahsatu ketentuan jang paling penting dalam Konstitusi kita. Partai kita adalah organisasi klas buruh jang militan, jang aktif berfikir, jang berdiri sendiri dan jang menjalankan hidup jang aktif. Sifat² Partai kita ini hanja bisa dipertahankan djika anggota dan kader Partai setia pada prinsip pimpinan Leninis, jaitu tjara pimpinan kolektif.

Pengalaman kita sampai sekarang menundjukkan, dimana tidak berdjalan tjara pimpinan kolektif disitu kita melihat kelemahan² Partai. Kalau ada rantai² organisasi jang lemah, maka sebab pokok biasanja tidak lain jalah karena tidak didjalankannja tjara pimpinan kolektif. Dimana kurang kesetiaan pada tjara pimpinan kolektif disitu Partai lemah dilapangan ideologi dan organisasi, Partai

tidak militan dan tidak erat hubungannya dengan massa. Kurang kesetiaan pada prinsip pimpinan Leninis telah menyebabkan banjaknya pekerjaan yang terbelengkalai, banjaknya persoalan² yang tidak terpetjahkan, timbulnya kelesuan dikalangan anggota² Partai dan timbulnya perasaan² saling menyalahkan antara anggota satu dengan anggota lain. Dengan tidak dilaksanakannya tjara pimpinan kolektif, hak² anggota yang sudah ditetapkan didalam Konstitusi menjadi dirampas, rasa tanggungjawab anggota menjadi berkurang, rol pimpinan menjadi diketjilkan dan kemenangan² yang sudah ditjapai tidak dikembangkan.

Untuk menjadikan Partai kita Partai tipe Lenin, Partai kelas buruh yang militan, yang aktif berfikir, yang berdiri sendiri dan menjalankan hidup aktif, maka tidak ada jalan lain ketjuali anggota² dan kader² Partai harus setia melaksanakan tjara pimpinan kolektif. Ini hanya bisa dijamin jika tiap² organisasi Partai, tiap² comite, departemen, bagian, fraksi, resort, grup, dsb. melaksanakan adanya rapat² periodik yang teratur dan yang disiapkan oleh tiap² anggota kolektif, dan terutama sekali oleh pemimpin kolektif itu. Tidak boleh lagi ada rapat yang hanya diadakan „jika dianggap perlu”. Ini tidak boleh ada dan sebenarnya juga tidak mungkin ada, karena siapakah yang berhak menentukan perlu atau tidaknya rapat diadakan? Tidak lain yang berhak ialah kolektif itu sendiri dan bukan masing² anggota sendiri². Jadi, perlu atau tidaknya sesuatu kolektif mengadakan rapat, kolektif itu sendiri harus berapat untuk menentukannya. Dan kalau rapat diadakan, tidak mungkin tidak ada yang harus dibicarakan, karena dalam waktu misalnya satu minggu tentu ada persoalan² mengenai aksi organisasi² massa, mengenai politik, mengenai organisasi Partai, pendeknya mengenai apa saja yang meminta perhatian, pemetjahan dan pimpinan Partai. Jadi, untuk menjamin adanya pimpinan kolektif, pertama² harus dibiasakan adanya rapat² periodik yang dipersiapkan.

Dengan membiasakan adanya rapat² periodik yang dipersiapkan dari semua organisasi Partai, kita menudju pelaksanaan tjara pimpinan kolektif sebagai sjarat yang tidak boleh tidak untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi dan organisasi, untuk membikin Partai lebih militan dan untuk mempererat hubungan Partai dengan massa. Dengan Partai yang demikian, persatuan yang lebih luas dari semua kekuatan nasional pasti akan menjadi kenyataan.

Tulisan ini adalah wawantjara kawan Aidit kepada pers berhubungan dengan penolakan resolusi tentang Irian Barat oleh PBB. Wawantjara ini menegaskan kedudukan PBB yang dikangkangi oleh Amerika Serikat, sikap negara² Barat yang mempertahankan serta menjokong kolonialisme Belanda dan sikap negara² kubu Sosialis dan Asia-Afrika yang menjadi sahabat Republik Indonesia. Kepada Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia disarankan untuk mengambil tindakan yang setimpal terhadap imperialisme Belanda yang tidak mau berunding mengenai Irian Barat.

PENOLAKAN RESOLUSI TENTANG IRIAN BARAT OLEH PBB MENELANDJANGI PBB SENDIRI DAN MENELANDJANGI NEGARA² BARAT

Dengan suara 34 setuju, 21 menentang dan 5 blanko, Sidang Umum Perserikatan Bangsa² (PBB) telah menolak resolusi tentang Irian Barat, yang berisi pengharapan supaya Indonesia dan Belanda meneruskan usaha mereka guna menyelesaikan pertentangan mengenai Irian Barat.

Isi resolusi ini adalah sangat enteng, karena hanya mengandung pengharapan supaya kedua belah pihak suka berunding. Tetapi walaupun demikian ditolak juga oleh Sidang Umum PBB. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari peristiwa ini antara lain adalah sbb.:

Pertama, bahwa dengan peristiwa ini sekali lagi dibuktikan betapa PBB sekarang dikangkangi oleh Amerika Serikat dan negara² Barat lainnya, sehingga tidak mampu mengambil putusan yang kongkrit untuk memetjahkan masalah pendjadjahan di Irian Barat dan untuk memetjahkan soal Irian Barat setjara damai. Keadaan demikian ini sudah kita lihat beberapa kali, antara lain berhubungan dengan soal Indotjina. Soal Indotjina yang begitu penting tidak dipetjahkan oleh PBB, tetapi oleh Konferensi Djenewa yang terkenal itu.

Kedua, bahwa dengan peristiwa ini menjadi lebih jelas sikap negara² Barat yang mau mempertahankan kolonialisme sampai akhir zaman. Diantara negara² yang menjetudjui resolusi tentang Irian Barat tidak nampak nama Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dsb. Amerika Serikat yang formilnya bersikap blanko sebenarnya adalah pemimpin komplotan gelap yang menentang resolusi tentang Irian Barat.

Ketiga, bahwa dengan peristiwa ini menjadi jelas pula

negara² mana yang menjadi sahabat dari Republik Indonesia. Diantara negara² yang menjetudjui resolusi Irian Barat, disamping nama negara² Asia, Afrika dan beberapa negara Amerika Latin, nampak nama negara² sosialis Uni Sovjet dan Bjelo Rusia, negara² demokrasi Rakjat Polandia dan Tjekoslowakia. Walaupun Amerika Serikat dan negara² Barat lainnya tidak suka melihat prestise Uni Sovjet menjadi naik, tetapi dengan peristiwa ini prestise Uni Sovjet dan negara² demokrasi Rakjat dengan sendirinya meningkat lebih tinggi lagi dimata semua Rakjat djadjahan dan setengah-djadjahan.

Keempat, bahwa dengan peristiwa ini menjadi jelas betapa satunja dan samanja sikap oposisi yang dipimpin Masjumi-PSI didalamnegeri dengan sikap negara² Barat dalam soal Irian Barat. Dengan mosi tidak pertjaja Jusuf Wibisono dengan kawan²nja pihak oposisi telah menikam dari belakang pemerintah Ali Sastroamidjojo yang memperdjuangkan masuknja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Setelah sidang umum PBB menolak resolusi tentang Irian Barat, apakah berarti dengan ini sudah buntu djalan bagi kita untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia? Samasekali tidak! PBB hanyalah salahsatu djalan yang dapat dan harus kita tempuh. Sebagaimana dikatakan oleh wakil Republik Indonesia di PBB, sdr. Mr. Sudjarwo, nasib kita tidak tergantung pada PBB tetapi terletak ditangan bangsa kita sendiri. Untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh sdr. Mr. Sudjarwo ini, PKI berpendapat bahwa kewadjiban kita antara lain adalah sbb.:

Pertama, kita harus memperluas dan memperkuat persatuan kita, persatuan antara sukubangsa² yang ada ditanahair kita, antara penduduk semua pulau dinegeri kita, antara berbagai aliran dan partai politik. Persatuan antara sukubangsa² sekarang harus mendapat perhatian istimewa, karena pihak Masjumi-PSI, didalam maupun diluar parlemen, dalam agitasi politiknya mempunyai kebiasaan mengadu-domba sukubangsa satu dengan sukubangsa lainnya dan mengadu-domba Rakjat di-daerah² dengan Pemerintah pusat. Ini adalah persiapan politik mereka untuk mengembalikan keadaan kezaman federal (Belanda), persiapan untuk membikin

negara² boneka diluar Djawa dan kemudian untuk mengepung pulau Djawa ber-sama² dengan negeri² asing. Ini mereka persiapan untuk menghadapi kemungkinan kekalahan mereka dalam pemilihan umum jang akan datang.

Kedua, mengkonsolidasi semangat kerdjasama dan semangat anti-kolonialisme dari negara² Asia dan Afrika dan negara² lain jang bersimpati pada perdjjuangan anti-kolonialisme.

Ketiga, supaya pemerintah membantu dan memberi keleluasaan kepada Rakjat untuk lebih kuat lagi menjatakan perasaan dan pikirannja mengenai Irian Barat dan mengenai perdjjuangan anti-kolonialisme pada umumnya.

Keempat, supaya pemerintah mengambil tindakan² jang setimpal dilapangan politik, ekonomi dan keuangan terhadap imperialisme Belanda jang tidak mau berunding mengenai Irian Barat, sesuai dengan tindakan² jang dituntut oleh rapat² Rakjat.

Selandjutnja PKI berseru supaya Rakjat Indonesia lebih waspada terhadap tindakan² jang lebih landjut jang akan diambil oleh musuh² Rakjat Indonesia diluar negeri dan agen²nja didalamnegeri.

PKI berseru supaya Rakjat mengutuk usaha² kaum oposisi jang mengadu-domba golongan Rakjat satu dengan golongan Rakjat lainnja, antara sukubangsa satu dengan sukubangsa lainnja, antara Rakjat di-daerah² dengan pemerintah pusat.

Pendaratan pasukan² Belanda dibeberapa pulau kita di Maluku adalah bukti jang kongkrit bahwa Pemerintah dan Rakjat harus lebih waspada dan lebih tegas bertindak daripada di-waktu² jang lalu.

12. Desember 1954

Artikel ini adalah katapengantar untuk penerbitan pertama madjalah *Kehidupan Partai* sebagai pengganti *PKI Buletin*. Dalam tulisan ini kawan Aidit menekankan bahwa *Kehidupan Partai* tidak hanya harus meneruskan tugas *PKI Buletin*, jaitu memuat pengumuman² Partai dan tulisan² jang penting, tetapi mengutamakan tulisan² tentang pengalaman² dan kesimpulan² jang berharga untuk perkembangan pekerdjaan organisasi, ideologi dan politik seluruh Partai. Dengan tudjuan tersebut kawan Aidit menandakan pentingnja bagi kader² untuk meninggikan pengertian teori dan memperkuat ideologi, untuk membiasakan diri membatja dan mendiskusikan tulisan² klasik tentang Marxisme-Leninisme dan untuk melaksanakan tjara pimpinan kolektif sebagai sjarat untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi dan organisasi. Kepada setiap kader ditekankan untuk membiasakan diri menuliskan pengalaman² dan kesimpulan²nja agar pengalaman lokal mendjadi nasional dan pengalaman khusus mendjadi umum.

INTRODUKSI „KEHIDUPAN PARTAI“

Sedjak Partai kita mulai dibangun kembali setjara besar²an dalam tahun 1951, banjak bukti menundjukkan bahwa ada grup², comite² dan fraksi² Partai jang mempunyai pengalaman² dan kesimpulan² jang sangat penting untuk kehidupan Partai. Sajangnja jalah bahwa pengalaman² dan kesimpulan² ini masih banjak jang „dimonopoli“, oleh grup², comite² atau fraksi² jang tertentu sadja.

Pengalaman² dan kesimpulan² dari organisasi² Partai jang tertentu belum tjukup diusahakan supaja mendjadi milik seluruh Partai. Dengan demikian, pengalaman² dan kesimpulan² jang berharga itu tidak banjak artinja untuk perkembangan pekerdjaan organisasi, ideologi dan politik seluruh Partai. Selain daripada itu pengalaman² dan kesimpulan² itu tidak diudji sampai kemana baik dan objektifnja, karena tidak mendjadi bahan diskusi dari semua organisasi Partai supaja dapat didjadikan pengalaman dan kesimpulan seluruh Partai.

Kenjataan² diatas mendorong Sekretariat Central Comite untuk memberikan djalan, agar pengalaman² dan kesimpulan² dari grup², comite² dan fraksi² jang tertentu didjadikan pengalaman² dan kesimpulan² seluruh Partai. Inilah tudjuan terpenting mengubah „PKI Buletin“ mendjadi „Kehidupan Partai“.

Disamping „Kehidupan Partai“ akan meneruskan apa jang selama ini dikerdjakan oleh „PKI Buletin“, jaitu memuat pengumuman² Partai dan terdjemahan² tulisan² jang penting, „Kehidupan Partai“ akan mengutamakan tulisan² tentang pengalaman² dan kesimpulan² jang ditulis oleh kepala² grup, sekretaris² comite atau fraksi, atau oleh kader² dan aktivis² lainnja.

Mengenai kewadajiban Partai jang urgen, Kongres Nasional ke-V memutuskan bahwa ada „dua kewadajiban Partai jang sangat urgen, jaitu *pertama*, penggalangan front persatuan nasional anti-imperialisme jang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme dan *kedua*, meneruskan pembangunan PKI

jang dibolsjewikkan, jang meluas diseluruh negeri dan jang mempunyai karakter massa jang luas, jang sepenuhnya dikonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi“.

Berhubung dengan kewadajiban jang urgen dari Partai ini Sidang Pleno ke-II Central Comite baru² ini telah mensahkan laporan Politbiro jang antara lain memuat: „*Satu kenjataan jang tak dapat dibantah, bahwa antara massa Komunis dengan massa Nasionalis dan Islam lebih banjak terdapat titik² pertemuan daripada antara orang² jang memimpin mereka. Oleh karena itulah, perundingan satu dengan lain, saling mendekati dan mengadakan persetudjuan dalam banjak hal adalah mungkin dan djalan inilah jang harus kita tempuh. Kesinilah perhatian harus kita tjurahkan, sebagai salahsatu usaha kita jang penting untuk lebih meluaskan persatuan semua kekuatan nasional*“. Selandjutnja laporan tsb. mengatakan: „*Satu hal jang perlu diperingatkan kepada kader² Partai, jalah supaja dalam mereka melaksanakan kerdjasama dengan partai² dan organisasi² dari berbagai aliran, kita harus menjegah penggunaan majoritet setjara mekanis*“. Kesimpulan ini adalah sangat penting untuk membantu seluruh Partai kita dalam pekerdjaan lebih meluaskan persatuan nasional.

Berhubung dengan bertambah banjaknja anggota dan organisasi Partai, laporan tsb. antara lain mengatakan bahwa „*Partai akan mendjadi rapuh dan tidak berdaja djika tidak mengkonsolidasi diri dilapangan politik, ideologi dan organisasi*“. Selandjutnja dikatakan bahwa mengkonsolidasi diri adalah „*mungkin dan bisa, asal kader² Partai bekerdja lebih keras dan lebih sungguh² lagi daripada sekarang ini, bekerdja keras untuk mengorganisasi dan mendidik anggota² dan bekerdja keras untuk meninggikan pengertian teori dan memperkuat ideologi kader² sendiri*“.

Mengenai pendidikan anggota² baru, laporan Politbiro tsb. antara lain mengatakan: „*Anggota² baru per-tama² harus diberi pengertian tentang apa Partai kita, bagaimana organisasi Partai disusun, apa kewadajiban anggota Partai dan tentang program Partai. Kepada mereka harus ditanamkan kepertjajaan dan kejakinan tentang tidak terbatasnja kekuatan massa Rakjat, tentang rol memimpin dari Partai dan tentang pentingnja front persatuan nasional*“. Sedangkan mengenai pendidikan bagi kader² Partai

antara lain dikatakan bahwa „Kader² Partai tingkat Seksi Komite keatas harus membiasakan diri membuat dan mendiskusikan tulisan² klasik Marxisme-Leninisme”.

Berhubung dengan pekerdjaan mengkonsolidasi Partai dilapangan politik, ideologi dan organisasi ini djuga, adalah sangat penting kesimpulan dibagian terakhir laporan tsb. jang berbunyi sbb.: „Dengan membiasakan adanya rapat² periodik jang dipersiapkan dari semua organisasi Partai, kita menudju pelaksanaan tjara pimpinan kolektif sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi dan organisasi, dan untuk membikin Partai lebih militan dan untuk mempererat hubungan Partai dengan massa. Dengan Partai jang demikian, persatuan jang lebih luas dari semua kekuatan nasional pasti akan menjadi kenyataan”.

Kesimpulan² diatas tentu sadja bukan hanya untuk ditulis dan dibuat, tetapi untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan kewadajiban² Partai jang sangat urgen dan sangat penting diatas grup², komite² dan fraksi² Partai kita akan mempunyai pengalaman² dan kesimpulan²nja sendiri. Mereka akan mengalami banyak kesulitan, tetapi mereka djuga akan mencari dan mendapatkan djalan untuk mengatasi kesulitan² tsb., akan menjimpunkan tjara² jang mereka ambil untuk mengatasi kesulitan² itu dan akan melihat hasil² dari pelaksanaan kesimpulan² jang sudah mereka ambil. Kenyataan² demikian ini sering kita dengar dari laporan² dan diskusi² dalam konferensi². Pengalaman² dan kesimpulan² ini kalau diumumkan akan berguna bagi seluruh Partai, sehingga dapat membantu perkembangan Partai kita keseluruhannja.

Dengan demikian menjadi djelaslah, bahwa tudjuan redaksi „Kehidupan Partai” hanya mungkin berhasil djika kader² dan aktivis Partai jang langsung mempunyai pengalaman dengan sungguh² membantu redaksi. Oleh karena itulah, untuk mentjapai tudjuan dari penerbitan „Kehidupan Partai”, diserukan kepada kader² dan aktivis² Partai untuk menuliskan pengalaman²nja dan kesimpulan²nja dan mengirimkannya kepada redaksi.

Banyak kader dan aktivis Partai mempunyai rasa segan untuk menulis karena belum biasa dan karena kuatir tulisannja tidak akan dimuat atau tidak mendapat perhatian redaksi. Ini sudah

tentu tidak tepat. Kebiasaan hanya bisa ditimbulkan djika dibiasakan. Kalau tidak ditjoba menulis, se-lama²nja tidak akan bisa menulis.

Tiap² Komunis harus bisa menulis. Sjarat jang terpenting ialah, asal jang ditulis itu adalah sesuatu jang benar, jang sungguh² dialami dilapangan organisasi, pendidikan dan politik Partai. Tulis sebagaimana adanya, djangan dikurangi dan djangan di-lebih²kan. Tentang bahasa jang mungkin kurang baik susunannja, adalah kewadajiban redaksi untuk membantunja.

Dengan „Kehidupan Partai” kita membikin kader² dan aktivis² Partai pandai menulis, kita membikin pengalaman² lokal menjadi nasional, kita membikin pengalaman² jang khusus menjadi umum.

Desember 1954

MENGAKTIFKAN GRUP PARTAI

Mari Kita Bikin Partai Kita Dari Gerakan Komunis
Jang Besar Mendjadi Organisasi Komunis Jang
Besar

Kenjataan jang menggembirakan jalah, bahwa Partai kita sekarang sudah mendjadi Partai jang tersebar dari Kotaradja (Atjeh) sampai ke Tuwal (dipulau Kai dekat Irian). Di-mana² Partai kita mengadakan rapat² umum senantiasa mendapat kundingan jang meluap dan meriah. Ini dibuktikan antara lain oleh rapat umum Partai di Bandung jang dihadiri oleh lk. 500.000 pengundjung, di Medan djuga oleh lk. 500.000 dan belakangan ini di Solo oleh lk. 1.000.000. Berbeda dengan partai² reaksioner, Partai melarang fungsionaris²nja menjebut angka pengundjung rapat jang tidak benar, karena ini berarti menipu dirisendiri dan akibatnja tidak lain daripada merugikan dirisendiri.

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sekarang sudah ada *gerakan* kaum Komunis jang luas dan besar, luas tersebarnja dan besar pengaruh serta pengikutnja.

Tetapi tidak boleh kita lupakan, bahwa Partai Komunis bukan hanya suatu gerakan, tetapi terutama adalah suatu *organisasi*, dan organisasi jang tidak sembarangan. Partai kita adalah organisasi Komunis dimana *tiap² anggota* terorganisasi menurut ketentuan Konstitusi dan bekerdja menurut ketentuan Konstitusi. Sebagai organisasi Komunis, Partai kita harus mendjadi organisasi jang terbaik, jang paling rapi, paling aktif dan paling berdisiplin.

Dalam kita menjambut tiap² kemadjuan Partai, tidak boleh kita lupa untuk bertanja pada dirisendiri: apakah Partai kita disamping sudah mendjadi gerakan jang besar djuga sudah mendjadi organisasi jang besar? Djawab pada pertanjaan ini senantiasa akan membikin kita ingat pada kekurangan² jang berat jang masih ada pada Partai dan akan mendjadi pendorong untuk membikin Partai kita dari gerakan jang besar mendjadi organisasi jang besar.

Adalah satu kenjataan sampai saat sekarang, bahwa jang pada umumnja sudah bekerdja dalam salahsatu organisasi Partai (menu-

Tulisan *Mengaktifkan Grup Partai* dibuat berhubung masih banjaknja anggota Partai jang belum terorganisasi dalam grup² Partai. Didjelaskan perlunja mereka tergabung dalam organisasi Partai, supaja setiap anggota Partai sungguh² dapat mendjadi elemen aktif dalam perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk perbaikan nasib, kemerdekaan nasional dan perdamaian.

Petundjuk² jang diberikan oleh kawan Aidit tentang tjara bekerdja memimpin grup bertudjuan supaja grup dapat menghidupkan organisasi basis Partai dan agar majoritet anggota Partai bisa diaktifkan. Dengan demikian Partai kita akan bisa berubah dari suatu *gerakan* Komunis jang besar mendjadi *organisasi* Komunis jang besar.

rut fasal 5 Konstitusi Partai) barulah anggota² comite² dan fraksi² Partai. Sebagian besar anggota (dan terutama sekali tjalon-anggota) belum *bekerdja aktif* disalabsatu organisasi Partai. Apakah artinja ini? *Ini artinja bahwa sebagian besar anggota Partai belum terorganisasi menurut Konstitusi Partai.* Bukankah sebagian besar anggota Partai terorganisasi didalam grup² dan bukan didalam comite² dan fraksi²?

Kita menghendaki supaja Partai kita mendjadi elemen jang aktif dalam perdjungan Rakjat Indonesia untuk perbaikan nasib, kemerdekaan nasional dan perdamaian. Ini berarti bahwa *tiap² anggota Partai* harus mendjadi elemen jang aktif, djadi tidak hanja terbatas pada anggota² comite dan fraksi sadja. Dan ini hanja mempunyai satu arti, jaitu kita harus mengaktifkan grup² Partai, dimana majoritet anggota terorganisasi.

Kita baru bisa berkata bahwa seluruh Partai sudah sungguh² mendjadi elemen jang aktif dalam perdjungan Rakjat Indonesia, djika semua anggota Partai sudah merupakan elemen jang aktif, djika semua organisasi Partai, terutama grup² jang beratus-ratus ribu itu sudah aktif. Ini keterangannya mengapa soal mengaktifkan grup mendjadi soal jang terpenting dan bersifat menentukan dalam pekerjaan mengaktifkan Partai kita.

Apakah mungkin grup diaktifkan? Bukankah anggota² baru jang tergabung dalam grup banjak jang masih butahuruf atau masih „buta politik”? Pertanyaan ini sering timbul didalam hati kader² Partai. Kadang², dengan tidak sadar, sering djuga pertanyaan² ini dikeluarkan.

Kawan², kalau kita tidak yakin bahwa anggota² baru jang tergabung didalam grup bisa dibikin aktif dalam politik, kenapa orang² baru itu kita terima masuk Partai? Kawan² ragu terhadap fasal 5 Konstitusi kita jang tidak mendjadikan „bisa batja dan tulis” sebagai sjarat untuk diterima dalam Partai kita! Kenapa orang² jang sudah memilih PKI sebagai Partainya masih kita namakan „buta politik”? Bukankah dengan mereka memilih PKI sebagai Partainya mereka sudah mempunyai sikap politik jang tepat? Mereka sudah mengambil putusan, dengan segala konsekwensinja, bahwa satu²nja djalan bagi mereka jalah djalan jang ditundjukkan oleh PKI.

Grup², dan dengan ini berarti majoritet anggota Partai, harus dan pasti dapat kita aktifkan. Ini menurut Konstitusi kita, dan ini menurut kenyataan jang sudah ada dibeberapa tempat. Tentu sadja, mengaktifkan grup tidak sama dengan mengaktifkan comite atau fraksi Partai, dimana anggota² sudah lebih madju, lebih terlatih dan lebih terdidik. Dalam mengaktifkan grup kita harus mengingat keadaan anggota² baru jang tergabung didalam grup itu.

Anggota² jang butahuruf sudah tentu per-tama² harus diberantas butahurufnja. Pemberantasan butahuruf dikalangan anggota² Partai dapat dilakukan didalam kursus² PBH (Pemberantasan Butahuruf) jang khusus diadakan untuk anggota² Partai, tetapi djuga bisa dengan mewadjabkan anggota² jang butahuruf mengikuti kursus PBH untuk umum jang diadakan oleh Partai. Atau boleh djuga mengikuti kursus² PBH jang diadakan oleh djawatan pemerintah, asal ada kontrol dari Partai bahwa anggota² Partai jang ikut kursus sungguh² melakukan kewadjabannya.

Tiap² grup diharuskan mempunyai *rapat periodiknja sendiri*, berdasarkan putusan bersama anggota² grup itu.

Per-tama² jang harus diberi pendjelasan kepada anggota² jang baru masuk jalah mengenai fasal 5 Konstitusi jang berbunyi:

„Jang dapat diterima mendjadi anggota Partai jalah setiap warganegara jang sudah berumur 18 tahun, jang menjetudjui Program dan Konstitusi Partai, masuk dan bekerdja aktif disalabsatu organisasi Partai, taat kepada putusan² Partai dan membayar uang pangkal dan iuran Partai, mengundjungi rapat² dan kursus² Partai serta membatja penerbitan² Partai.”

Dalam tulisan singkat ini khusus mau dibitjarkan tentang pelaksanaan „masuk dan bekerdja aktif disalabsatu organisasi Partai”. Jang sering tidak bisa dipetjahkan oleh kader² Partai jalah: *pekerjaan apa jang harus diberikan kepada anggota² jang baru masuk, supaja mereka merasa ada kehidupan Partai, merasa elemen jang penting didalam Partai, merasa berguna dan memang berguna bagi Partai.*

Jang sudah terang jalah bahwa Partai tidak boleh memberikan pekerjaan jang belum bisa dikerdjakan oleh anggota² baru. Kalau ini terdjadi, anggota baru akan merasa tidak mempunyai kemam-

puan, tidak merasa elemen yang penting dan berguna didalam Partai, dan achirnja akan merasa tidak perlu berada didalam Partai. Djadi pekerdjaan apakah yang pasti dapat dikerdjakan dan memang perlu dikerdjakan oleh anggota² baru?

Dalam Program Umum Konstitusi Partai antara lain dikatakan, bahwa: „Tiap² anggota Partai harus memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhan²nja yang urgen dan membantu mereka berorganisasi untuk memperdjuangkan kebutuhannja”.

Dalam rapat² pertama dari grup anggota² yang baru, djuga yang butahuruf, dapat diberi pekerdjaan yang bisa dikerdjakannja dan memang perlu dikerdjakannja, jaitu pekerdjaan „memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhannja yang urgen dst. dst.”. Mereka dapat diberi pekerdjaan mendengarkan suara orang² sekampungnja, orang² setempat bekerdjanja, tetanggannja, familinja yang bekerdja sebagai pegawai, polisi, atau tentara, pendjual² dipasar, dsb. tentang keadaan penghidupan mereka se-hari², tentang bandjir yang menimpa negeri, tentang gerombolan teror DI-TII, tentang tindakan se-wenang² dari alat² negara, tentang kekedjaman tuantanah, tentang rapat Masjumi yang baru lalu, tentang hasutan² anggota² Masjumi dilanggar, tentang kegiatan PKI, tentang partai² lain, dan tentang apa sadja yang mendjadi perasaan dan fikiran Rakjat. Tiap² anggota diwadjibkan mendengarkan suara Rakjat se-banyak²nja.

Dalam rapat grup kemudian tiap² anggota *melaporkan* apa yang didengarnja. Pada pembukaan rapat oleh kepala grup diperingatkan supaya laporan² disampaikan sebagaimana adanja, tidak dilebihi dan tidak dikurangi. Kepala grup yang bisa menulis supaya mentjatat pokok² laporan. Kepala grup yang tidak bisa menulis supaya meminta bantuan anggota yang bisa menulis untuk mentjatat, tetapi djika inipun tidak ada maka kepala grup tsb. harus dengan baik² mengingat bagian² yang penting dari laporan. Laporan² ini penting untuk ditjatat atau diingat karena perlu mendapat pemetjahan dan perlu dilaporkan kepada Recom untuk selandjutnja diteruskan kepada comite² atasannja. Dengan demikian *comite² atasan* Partai dapat mengetahui suara Rakjat, mengetahui kebutuhan urgen Rakjat dst. berdasarkan laporan yang diterimanja dari

organisasi² bawahannja. Laporan² demikian ini tentu lebih bisa dipertjaja dan lebih baik daripada pendengaran² yang didapat setjara sambillalu dan setjara kebetulan.

Grup tidak hanya harus mengetahui apakah anggota² melakukan tugas „mendengarkan setjara teliti suara Rakjat”, tetapi djuga harus mengetahui *bagaimana* tugas itu dijalankan, apakah tjara-nja sudah tjara yang se-baik²nja. Kalau tjara seorang anggota dianggap belum tjara yang se-baik²nja, maka anggota² yang lain mengadakan kritiknya, dan kritik ini dibitjarakan oleh grup dan grup membikin kesimpulan.

Sesudah semua laporan selesai dan grup sudah djuga menarik kesimpulan tentang tjara anggota² mendjalankan tugasnja, maka grup harus menentukan *sikap* terhadap suara² yang didengar dan harus menentukan *tindakan²* yang harus diambil, misalnja: mengadjak tetangga setjara gotongrojong memperbaiki djembatan yang patah, mengadjukan kepada Rukun Tetangga supaya mengirimkan delegasi kepada pemerintah setempat mengenai kebersihan kampung, mendatangi dan mengadjak bertukarfikiran anggota² Masjumi yang lantjang mulut untuk kerukunan dikampung dan ditempat bekerdja, mengadjukan kekedjaman tuantanah kepada pimpinan organisasi tani setempat, mengadjukan tindakan se-wenang² madjikan kepada pimpinan serikatburuh setempat, dst. dst. Mengenai soal² yang tidak bisa dipetjahkan dan diambil tindakan oleh grup harus disampaikan kepada Recom, dan kalau Recom djuga tidak mampu, diteruskan kepada Subsecom dst.

Mengingat pentingnja kedudukan kepala² grup dan Recom² dalam pekerdjaan mengaktifkan grup, maka djelaslah betapa pentingnja kewadjiban Subsecom² dalam hal mengadakan kursus² untuk anggota² Recom dan kepala² grup. Dalam kursus² ini soal mengaktifkan grup harus dimasukkan sebagai salahsatu atjara yang terpenting dan pengalaman pengikut² kursus harus didjadikan bahan diskusi.

Grup² yang sudah ber-bulan² umurnja, djadi sudah belasan atau puluhan kali mengadakan rapat periodik, dan anggota²nja yang butahuruf sudah mulai pandai membatja dan menulis, harus mulai membitjarakan apa Partai kita, bagaimana organisasi Partai kita disusun, apa kewadjiban anggota Partai dan apa program

Partai. Kepada mereka harus ditanamkan kepertajaan dan kejakinan tentang tidak terbatasnya kekuatan massa Rakjat, tentang rol memimpin dari Partai dan tentang pentingnja front persatuan nasional. Tiap² sikap politik Partai harus mendjadi bahan pendidikan politik anggota-anggota grup. *Semuanya ini dikerdjakan dengan tidak menghentikan kewadjan „memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhan²nja jang urgen dst. dst.”.*

Mungkin ada kawan² jang mengatakan: sering rapat grup diadakan, tetapi jang datang tidak lengkap. Apakah kalau jang datang tjuma sedikit rapat grup harus diteruskan? Djawabnja: djika jang datang kerapat grup se-kurang²nja ada 3 orang, rapat itu harus dilangsungkan. Djika diantara jang 3 orang ini kepala grup tidak ada, maka diantara 3 orang anggota grup harus dipilih pemimpin rapat grup. Putusan² rapat grup jang tidak dihadiri lengkap ini harus disampaikan kepada semua anggota grup jang tidak hadir, sambil menanyakan kenapa mereka tidak hadir dan memberitahu atjara dan tempat rapat jang akan datang.

Dengan demikian djelaslah, bahwa pekerdjaan mengaktifkan grup bukan hanya sesuatu jang penting buat Partai, tetapi adalah djuga sesuatu jang mungkin. Mungkin menurut Konstitusi Partai dan mungkin menurut pengalaman Partai dibeberapa tempat. Pekerdjaan ini memang menghendaki kesabaran dan pimpinan jang terus-menerus, tetapi djalan lain tidak ada untuk mendjadi kan grup Partai tidak hanya sebagai aparat untuk menarik iuran dan untuk menggerakkan massa djika ada rapat² umum Partai, tetapi djuga untuk menempatkan grup Partai pada tempatnja, jaitu mendjadikannja *pelaksana aktif dari pimpinan politik Recom ditempat* dimana grup itu berada.

Mengaktifkan grup² Partai berarti mengaktifkan mayoritas anggota Partai. Ini satu²nja djalan untuk membikin Partai kita dari suatu gerakan Komunis jang besar mendjadi organisasi Komunis jang besar. Djalan lain tidak ada untuk ini.

Menggugat Peristiwa Madiun adalah pembelaan jang diutjapkan oleh kawan Aidit dimuka Sidang Pengadilan Negeri, Djakarta, tgl 24 Februari 1955 mengenai Provokasi Madiun, jang pada hakekatnja merupakan pembelaan Partai Komunis dan Rakjat Indonesia jang tidak bisa dilupakan dalam sedjarah politik negeri kita. Pembelaan jang bersedjarah ini sudah berbalik mendjadi gugatan dan tidak hanya mempunyai arti nasional tetapi djuga internasional. Dengan tandas kawan Aidit menelanjangi provokasi reaksi, membongkar bahwa tangan reaksilah jang berlumuran darah serta mengungkapkan kebenaran bahwa bukan PKI, melainkan pihak reaksilah jang patut dan harus didakwa.

Tangkisan dan pembelaan Mr Suprpto dimuka Sidang Pengadilan tersebut dan protes Rakjat Indonesia terhadap proses kawan Aidit melalui berbagai matjam bentuk, baik dengan pengirimn surat² dan tilgram² maupun dengan pengumpulan uang, menundjukkan betapa eratnja hubungan PKI dengan massa Rakjat.

MENGGUGAT PERISTIWA MADIUN

Saja Membela Kehormatan Partai Saja

Saudara Ketua Pengadilan Negeri jang terhormat.

Terlebih dulu saja mengutjapkan terimakasih kepada saudara Ketua pengadilan jang sudah memimpin sidang² dimana saja di-periksa dengan baik. Kepada publik jang datang untuk menghadiri sidang ini saja djuga mengutjapkan terimakasih.

Saja yakin, bahwa sidang pengadilan sekarang tidak hanja diikuti oleh kita jang berada didalam ruangan ini, tetapi ia djuga diikuti oleh ber-djuta² orang jang berada diluar gedung ini. Ia diikuti oleh penduduk di-kota² dan di-desa², oleh kaum buruh di-pabrik² dan di-kebun², oleh para pegawai di-kantor², oleh nelajan ditepi pantai, oleh para pemuda dan peladjar kita, oleh para seniman dan inteligensia kita, pendeknja oleh segenap lapisan masjarakat Indonesia.

Perhatian jang besar terhadap perkara jang sedang diperiksa sekarang dapat kita lihat dari surat² dan tilgram² jang djumlahnja be-ribu² disampaikan kepada Pengadilan Negeri Djakarta, dan tembusannja antara lain disampaikan kepada Central Komite PKI.

Ber-djuta² orang menunggu dengan hati ber-debar² putusan apa jang akan diambil oleh sidang ini mengenai perkara jang membikin saja berkenalan dengan pengadilan.

Saja sudah tentu tidak boleh dan tidak mau mempengaruhi pengadilan ini, tetapi saja perlu menjatakan perasaan dan fikiran saja, bahwa putusan pengadilan terhadap perkara saja akan menjadi ukuran bagi Rakjat Indonesia sampai kemana keadilan dapat diharapkan dari Pengadilan Negeri ini.

Sebelum saja sampai kepada bagian pokok dari pembelaan saja, saja merasa perlu mengemukakan beberapa hal jang saja anggap aneh dan minta perhatian sidang pengadilan ini.

Sebagaimana sudah diketahui, sebelum saja sendiri tahu bahwa

saja dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Djakarta, beberapa koran dan kantorberita sudah memuat berita tentang panggilan Pengadilan Negeri Djakarta untuk saja. Saja baru mendengar kabar tentang panggilan Pengadilan Negeri untuk saja pada tanggal 30 September 1954, menurut surat panggilan jang sampai sekarang belum pernah saja batja sendiri. Kabarnja surat panggilan itu tertanggal 21 September 1954 dan dimaksudkan supaya saja menghadap Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 23 September, 1954. Tetapi anehnja, Ketua jang terhormat, buletin „Antara” tanggal 11 September, harian „Pedoman” tanggal 13 September, harian „Abadi” tanggal 13 September dan harian „Keng Po” tanggal 13 September sudah memuat berita tentang akan dihadapkannya saja kemuka pengadilan.

Mula² berita² itu saja anggap hanja sebagai bagian dari kampanye Masjumi, BKOI dan BPPI (Bekas Pedjuang Islam Indonesia) dalam menjerang PKI, karena pada waktu itu Masjumi dan organisasi² serta koran² satelitnja sedang hebat²nja menjerang PKI dengan menggunakan „Peristiwa Madiun” sebagai sendjata jang dianggapnja ampuh.

Saja tidak menuduh, tetapi pada waktu itu sungguh saja menduga bahwa Pengadilan Negeri atau Kedjaksaan Djakarta, sengadja atau tidak sengadja, sudah ikut membantu Masjumi dalam kampanye anti-Komunis. Sebab, menurut fikiran saja ketika itu, kalau tidak dari Pengadilan Negeri atau Kedjaksaan Djakarta, dari mana kantorberita „Antara” dan koran² jang saja sebutkan diatas mendapat berita bahwa saja akan dihadapkan kepengadilan, dimana saja sendiri belum mengetahui apa² tentang ini. Saja pada dasarnya tidak mempunyai rasa kurang senang terhadap saudara Dali Mutiara sebagai pribadi maupun sebagai Djaksa, tetapi dimana Masjumi mendjalankan politik anti-Komunis dengan menggunakan tjara² jang sangat kotor, maka saja tidak bisa menghilangkan ketjurigaan saja pada diri saudara Dali Mutiara sebagai anggota atau simpatisan Masjumi.

Saudara Ketua jang terhormat.

Saja dihadapkan kepengadilan ini berhubung dengan sebuah statement Politburo CC PKI jang dikeluarkan berhubung dengan peringatan PKI mengenai Peristiwa Madiun. Djadi, terang bahwa

statement jang mendjadi perkara ini ada hubungannja dengan Peristiwa Madiun. Berhubung dengan ini, dengan sungguh² saja njatakan disini, bahwa bagi saya bukanlah suatu kegembiraan atau kebahagiaan untuk berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Kalau bukan sangat terpaksa saja tidak mau berbitjara tentang peristiwa jang menjedihkan ini. Dalam pidato kedua saja diparlemen beberapa bulan jang lalu sudah saja katakan, bahwa ada dua sebab jang membikin saja tidak gembira berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Pertama, ia mengingatkan saja kembali kepada kawan² saja dan Rakjat Indonesia jang banjak mendjadi korban peristiwa ini. Kedua, ia mengingatkan saja kembali akan suatu masa dimana terdapat perpetjahan jang sangat besar didalam kubu persatuan nasional kita.

Selain daripada itu saja mengetahui, bahwa djika saja berbitjara tentang Peristiwa Madiun maka banjaklah orang jang merasa tidak enak karena ingat pada sikapnja jang lemah ketika peristiwa itu terdjadi atau ingat akan dosanja karena dengan tidak berfikir pandjang sudah membunuh teman seperdjuangannja dan membunuh pemimpin² serta saudara² sebangsanja jang belum keruan bersalah. Saja berbitjara tentang orang² jang lemah batin dan orang² jang mempunyai perasaan. Saja tidak berbitjara tentang orang² jang sampai hari ini masih mengharap akan datang lagi musim panen menghirup darah kaum Komunis seperti jang terdjadi dalam Peristiwa Madiun dulu. Saja berbitjara tentang orang² biasa jang mempunyai perasaan, terutama tentang anak² dan saudara² kita jang pada waktu terdjadi Peristiwa Madiun berada didalam Angkatan Perang. Saja tahu benar, bahwa tidak sedikit diantara mereka ini jang ikut ambil bagian dalam „pengedjaran terhadap kaum merah” se-mata² hanja ikut²an sadja atau karena perintah atasan.

Saja tahu, bahwa sekarang tidak sedikit orang biasa jang menjesali perbuatannja, setelah mendapat keterangan jang benar mengenai Peristiwa Madiun. Ja, dengan gembira dapat saja katakan, bahwa diantara orang² jang karena tidak mengertinja telah ikut dalam „pengedjaran terhadap kaum Komunis”, tidak sedikit sekarang jang sudah tidak mempunyai purbasangka lagi terhadap PKI

dan sudah berdjandji pada diri sendiri untuk tidak lagi mendjadi alat perang saudara kaum imperialis dan kakitangannja.

Singkatnja, saya tidak suka berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Tetapi, didalam keadaan dimana sekarang saja dihadapkan kemuka pengadilan ini dalam hubungan dengan sebuah statement jang memuat sikap PKI terhadap Peristiwa Madiun, saja terpaksa dimana perlu berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Saja lakukan ini bukan untuk menjakiti hati orang, bukan untuk mengingatkan orang pada saat² ia dikuasai oleh batinnja jang lemah, dan samasekali bukan untuk mengingatkan orang akan dosa²nja. Saja lakukan ini untuk membela kehormatan-Komunis saja, untuk membela kehormatan kawan² saja jang sudah mendjadi korban Peristiwa Madiun, untuk membela kehormatan Rakjat Indonesia jang memihak PKI dalam hal Peristiwa Madiun. Pendeknja, saja disini membela kehormatan Partai saja dan membela kehormatan Rakjat Indonesia jang sering dituduh dan difitnah dalam hubungan dengan Peristiwa Madiun.

Jang Didakwakan Kepada Saja

Dalam sidang pengadilan tanggal 25 November tahun jang baru lalu oleh Djaksa Dali Mutiara sudah dibatjakan idakwaan kepada saja, penanggunjdjawab statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 (dimuat dalam „Harian Rakjat” tanggal 14 September 1953) jang berkepala „Peringati Peristiwa Madiun setjara intern !” Saja didakwa sudah bersalah melanggar fasal² 134, 207, 310 dan 311 Kitab Undang² Hukum Pidana (KUHP). Saja dituduh sudah menghina dan menjerang kehormatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta.

Saja menolak semua tuduhan jang ditudjukan kepada saja, karena saja tidak merasa berbuat demikian dan saja tidak mempunyai kepentingan untuk berbuat demikian. Dalam statement Politbiro CC PKI tsb. tidak satupun perkataan jang menjebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta. Jang ada disebut jalah tentang pemerintah jang ketika statement itu dikeluarkan sudah tidak ada lagi, dan pemerintah itu adalah pemerintah jang saja namakan pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Oleh karena statement tsb. tidak memuat perkataan Wakil Presiden Re-

publik Indonesia, Drs. Moh. Hatta, maka statement itu tidak mungkin ada sangkut-pautnya dengan penghinaan terhadap diri Wakil Presiden Republik Indonesia jang manapun djuga. Oleh karena itu saja menganggap tidak mungkin tuduhan menghina Wakil Presiden Republik Indonesia ditujukan kepada saja. Selanjutnya bagian juridis dari pembelaan ini akan diutjapkan oleh advokat saja, saudara Mr. Suprpto (1).

Dalam sidang pengadilan tanggal 27 Djanuari 1955 telah saja katakan, bahwa statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 dikeluarkan tidak dimaksudkan untuk menghina, tetapi semata² untuk kepentingan umum dan pembelaan. Berpegang pada ayat 3 fasal 310 KUHP, dalam sidang tanggal 27 Djanuari itu djuga sudah saja njatakan kesediaan saja untuk membuktikan dengan saksi² bahwa Peristiwa Madiun memang provokasi dan bahwa dalam peristiwa tsb. tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. memang ber-lumuran darah. Kesediaan saja ini, jang djuga diperkuat advokat saja, saudara Mr. Suprpto, tidak mendapat persetudjuan pengadilan. Djaksa menjatakan keberatannya akan pembuktian jang mau saja adjukan dengan saksi².

Sebagai akibat penolakan Djaksa terhadap pembuktian jang mau saja kemukakan, Djaksa mentjabut tuduhannya jang bersifat „lebih subsidiair lagi”, jaitu tuduhan melanggar fasal 310 dan 311. Dengan demikian ditjabutlah kemungkinan bagi saja untuk bebas dari semua tuduhan dengan djalan membuktikan bahwa statement tsb. dikeluarkan benar² untuk mempertahankan kepentingan umum dan untuk pembelaan.

Saudara Ketua pengadilan jang terhormat.

Sekarang fasal KUHP jang ditimpakan pada saja tinggal dua, jaitu fasal² 134 dan 207. Menurut KUHP fasal 134, saja dituduh telah mengadakan „penghinaan dengan sengadja atas Radja atau Baginda Ratu”, dan menurut fasal 207 saja dituduh telah sengadja dimuka umum dengan tulisan „menghina suatu kuasa, jang di Nederland atau Indonesia atau suatu badan umum jang diadakan disana” (KUHP terdjemahan Balai Pustaka 1950). Pada pokoknya, saja dituduh menghina.

Dalam sidang pengadilan tanggal 27 Djanuari jl. sudah saja katakan, bahwa diwaktu saja membikin statement jang didjadikan

perkara ini, tidak sedikit djuga terlintas dalam fikiran saja bahwa tulisan itu akan dianggap sebagai penghinaan. Saja katakan bahwa statement itu dibuat untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan.

Saja katakan untuk kepentingan umum, karena maksud statement ini dikeluarkan, disamping untuk menghindari provokasi jang sedang disiapkan oleh fihak Masjumi, BKOI, BPPI dll. ketika itu, adalah untuk mendjelaskan kepada umum apa Peristiwa Madiun sebenarnya, sebagai sangkalan terhadap apa jang banjak disiarkan oleh lawan² politik PKI ketika itu. PKI menganggap perlu supaya umum tidak hanya mendengar keterangan tentang Peristiwa Madiun dari lawan² politik PKI, tetapi djuga dari PKI sendiri. PKI berpendapat, bahwa apa jang disiarkan oleh lawan² politik PKI mengenai Peristiwa Madiun adalah pemutarbalikan kenyataan jang sesungguhnya, adalah penipuan dan fitnahan. Oleh karena itu umum harus diberi keterangan jang benar oleh fihak PKI sendiri.

Statement tsb. terpaksa dikeluarkan untuk pembelaan, karena pada waktu itu PKI sedang diserang oleh lawan² politik PKI. Tentang serangan ini saja persilahkan saudara Hakim pengadilan ini membuat *harian „Abadi” tanggal 4 September 1953*, dimana dimuat tuntutan persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia (BPPI), Djokjakarta, jang dibagian „mengingat” antara lain menjebut tentang „pemberontakan kaum Komunis PKI cs. di Madiun dengan memproklamirkan sebuah negara Komunis jang dipimpin oleh Musso-Amir, sesuai dengan instruksi imperialis Rusia”; bahwa „Pemberontakan itu merupakan penghianatan dan kejahatan besar terhadap negara dan Rakjat Indonesia”. Dibagian „memutuskan”, antara lain dikatakan bahwa BPPI mengusulkan dan mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya „menetapkan hari pemberontakan kaum Komunis PKI cs. di Madiun tanggal 18 September itu mendjadi hari berkabung nasional” dan „supaya seluruh Rakjat diperintahkan menaikkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung”.

Dalam *harian „Abadi” tanggal 4 September 1953* itu djuga dikatakan bahwa pada tanggal 18 September 1953 akan diadakan pawai jang dinamakan „Pawai Duka”, jang dilakukan dengan

„penuh chidmat” dan disertai pukulan genderang tanda berkabung dan bersedih.

Dalam harian „Pedoman” tanggal 7 September 1953 dimuat pengumuman BKOI Djakarta Raja, jang mengenai Peristiwa Madiun antara lain mengatakan, bahwa „Beratus djuta rupiah kekajaan negara telah dirampok, sesudah kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun, mereka mendirikan pemerintahan Sovjet disana, dan melakukan pembersihan. Waktu itu berlakulah kekedjamaan jang tidak ada taranja. Ulama² Islam jang tidak terhitung banjaknja, pegawai² negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan”. BKOI, menurut harian „Pedoman” tsb., djuga mendesak supaya Pemerintah Republik Indonesia berbuat seperti jang diusulkan oleh persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia di Djokjakarta (lihat „Abadi” tanggal 4 September 1953).

Harian „Abadi” tanggal 10 September 1953 memuat pengumuman „Liga Pembela Demokrasi” (2) jang tidak demokratis itu, jang isinja pada pokoknja sama sadja dengan pengumuman persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia dan pengumuman BKOI jang tersebut diatas.

Djadi djelaslah, bahwa beberapa hari sebelum statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 dikeluarkan, sudah tersiar lebih dulu dalam koran² serangan² terhadap PKI dengan Peristiwa Madiun sebagai sendjata. Dari serangan² ini dua kemungkinan bisa timbul: pertama, umum bisa terpengaruh oleh keterangan² lawan politik PKI mengenai Peristiwa Madiun. Kedua, anggota² dan pengikut² PKI bisa marah karena fitnahan² tsb. dan bisa bertindak diluar keinginan pimpinan PKI sendiri. Untuk menghindari dua kemungkinan inilah statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 dikeluarkan. Dengan ini saja merasa bahwa Partai saja sudah bertindak untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan. Dari keterangan saja dibawah nanti akan menjadi djelas, bahwa apa jang dituduhkan kepada PKI dan kaum Komunis mengenai Peristiwa Madiun oleh fihak Masjumi, BKOI, BPII dll. itu adalah palsu dan fitnahan belaka.

Saudara Ketua jang terhormat.

Saja memprotes kalau perkara jang membawa saja kepengadil-

an ini dianggap sebagai perkara kedjahatan. Tidak banjak perkara jang sifat politiknya lebih terang daripada perkara jang sekarang sedang diperiksa. Perkara ini adalah perkara politik. Ia adalah perkara politik dilihat dari kenyataan, bahwa jang dijadikan perkara ialah statement politik dari suatu partai politik, jaitu PKI. Ia adalah perkara politik, karena perkara jang sudah daluwarsa ini, djustru dibikin heboh dan kemudian dibawa kepengadilan pada saat Masjumi dan organisasi² serta koran² satelitnja sedang ramai² membikin serangan terhadap kaum Komunis dengan menggunakan Peristiwa Madiun sebagai sendjata jang dikiranjanya ampuh. Ia adalah perkara politik, karena perkara ini mengenai kepentingan politik dari ber-djuta² Rakjat Indonesia jang sudah menjatakan perasaan dan fikirannja dengan be-ribu² surat dan tilgram mengenai perkara ini.

Dalam bagian primair dari tuduhan djaksa dikatakan bahwa saja dengan sengadja telah menghina dengan surat terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, jaitu Drs. Moh. Hatta, karena statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 itu antara lain memuat kata² provokasi, keganasan, „berdjasa”, berlumuran darah dan „kepahlawanan”.

Diatas sudah saja katakan bahwa statement tsb. tidak dikeluarkan untuk menghina. Satu hal jang benar ialah bahwa statement ini ditulis dengan kata² jang tegas, jang meyakinkan, jang keras. Kata² ini adalah keras karena ia menggambarkan kebenaran. Kekerasan kata² ini akan lebih terasa lagi bagi tiap² orang jang tidak mau mengakui kebenaran jang dinjatakan oleh kata² ini.

Selain daripada itu kami tidak bisa menggunakan kata² jang samar² dan ber-belit² untuk menjatakan perasaan dan fikiran kami jang benar terhadap perbuatan² jang tidak kami sukai dan tidak disukai oleh Rakjat. Kami terpaksa menggunakan kata² jang keras terhadap orang² jang memusuhi kami, karena mereka terlebih dulu bertindak keras terhadap kami. Kekerasan kata² kami adalah kekerasan hati kami, dan ini adalah penting, adalah sjarat hidup bagi kami dalam berhadapan dengan musuh² kami jang biasa bertindak keras dan se-wenang² terhadap kami.

Kami menggunakan perkataan *provokasi* karena jang kami maksud memang provokasi, kami menggunakan perkataan *keganas-*

an pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir karena kami berpendapat bahwa pemerintah itu memang ganas, kami mengatakan bahwa pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir telah „berdjasa” menimbulkan perang saudara karena dengan menimbulkan perang saudara pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir memang sudah „berdjasa” pada golongan dan pada klasnja, kami katakan bahwa tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. *berlumuran darah* karena jang kami maksudkan memang demikian, kami berkata tentang „*kepahlawanan*” pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir dalam membasmi kaum Komunis dan kaum patriot karena jang kami maksudkan memang pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir adalah „pahlawan” dimata klas dan golonganja. Kata² dan kalimat² jang keras kami pakai tidak untuk menghina, tetapi untuk menjatakan apa jang sesungguhnya ada dan terdjadi. Kami tidak akan menjebutnja Si Dul kalau jang kami maksudkan ialah Siti Aminah, demikian djuga kami tidak akan menjebut suatu perbuatan dilakukan dengan sarung tangan sutera kalau perbuatan itu memang suatu provokasi, memang ganas dan memang berlumuran darah. Apakah menghina kalau orang menjebutkan nama Si Dul kalau jang dimaksudkannya memang Dul? Menurut fikiran saja, adalah suatu kesalahan kalau Si Dul disebut Siti Aminah, demikian djuga adalah satu kesalahan kalau suatu provokasi, suatu perbuatan ganas dan berlumuran darah disebut perbuatan dengan memakai sarung tangan sutera atau perbuatan ramahtamah. Tidak, saudara Ketua pengadilan, Peristiwa Madiun sungguh bukan perbuatan ramahtamah dan sungguh bukan perbuatan jang dilakukan dengan sarung tangan sutera.

Kami menamakan kabinet ke-VI Republik Indonesia, jang dibentuk dalam bulan Djanuari 1948, kabinet atau pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Ini tidak berarti bahwa kami tidak mengetahui, bahwa dalam kabinet ke-VI Republik Indonesia duduk djuga orang² dari partai atau aliran lain, ketjuali aliran Hatta-Sukiman-Natsir. Kami tahu bahwa dalam kabinet ini duduk djuga orang² dari partai² nasionalis, katolik, sosialis kanan, dsb., sebagaimana kami tahu djuga bahwa jang memegang rol terpenting dalam kabinet ini ialah Drs. Moh. Hatta dan orang² Masjumi. Pada hakekatnja kabinet ke-VI Republik Indonesia adalah kabinet Masjumi jang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Sedjak terbentuknja pada tanggal

29 Djanuari 1948, kabinet ini sepenuhnya mendjalankan politik Masjumi, dan Provokasi Madiun adalah pelaksanaan politik Masjumi jang paling penting, jaitu politik mengedjar dan membunuh kaum Komunis, politik jang sampai hari ini masih tetap mendjadi politik pemimpin² Masjumi.

Peristiwa Madiun Memang Provokasi

Saja katakan bahwa Peristiwa Madiun adalah provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Saja masih ingat, bahwa pada permulaan bulan Djuli 1948, djadi sebelum terdjadi pentjulikan² di Solo pada permulaan bulan September 1948, komandan TNI Divisi IV, Kolonel Sutarto, telah dibunuh setjara pengetjut dengan tembakan dari belakang. Dugaan orang banjak mengenai teror terhadap Kolonel Sutarto ini adalah karena saudara ini termasuk salahseorang perwira tinggi jang tidak menjetudjuai apa jang dinamakan „rasionalisasi” dalam tentara jang mau diadakan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir ketika itu. Pada waktu itu banjak perwira jang menentang „rasionalisasi” TNI model pemerintah Hatta, karena rasionalisasi ini djika dilaksanakan berarti menjingkirkan elemen² kerakjatan dari TNI. Sampai kemana pengusutan jang sudah dilakukan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir mengenai teror terhadap Kolonel Sutarto, sampai sekarang tidak diketahui oleh umum. Oleh karena itu, saja tidak heran kalau banjak orang menarik kesimpulan bahwa pembunuhan atas Kolonel Sutarto adalah termasuk pelaksanaan politik „rasionalisasi” pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir dengan tjara jang spesial.

Banjak penduduk kota Solo jang tidak hanja tidak bisa melupakan pembunuhan terhadap diri Kolonel Sutarto, tetapi djuga tidak bisa melupakan peristiwa pentjulikan terhadap dua orang anggota PKI, jaitu kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo, pada tanggal 1 September 1948. Dalam hubungan dengan provokasi Madiun saja merasa perlu mengemukakan beberapa kedjadian di Solo, karena, sebagaimana antara lain dikatakan dalam pidato Presiden Sukarno tanggal 19 September 1948, bahwa peristiwa Solo dan peristiwa

Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan.

Pentjulikan atas diri kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo dimulai dengan kedatangan orang bernama Alip Hartojo, seorang dari bagian penjelidik pemerintah, dirumah kawan² Slamet Widjaja pada tanggal 1 September 1948 djam 6 sore. Alip Hartojo antara lain mengatakan kepada kawan Slamet Widjaja: „*Awas, sekarang orang² PKI dan termasuk orang² golongan kiri semuanya akan dibersihkan oleh pemerintah Hatta, saja sudah pegang rentjananja*”. Bagi perasaan saja sendiri memang suatu keanehan bahwa seorang penjelidik pemerintah berkata demikian terus terang. Tetapi rasa aneh ini mendjadi lenjap setelah saja mengetahui bahwa Slamet Widjaja biasanja adalah sahabat karib pribadi dari Alip Hartojo, dan setelah saja mengetahui proses selanjutnja. Apa jang terdjadi kemudian adalah tjotjok dengan apa jang dikatakan oleh Alip Hartojo ini.

Ketika kawan Slamet Widjaja minta supaya rentjana pemberitahuan pemerintah Hatta itu ditundjukkan kepadanya, Alip Hartojo mengatakan: „*Djangan disini mas, onveilig (tidak aman - DNA). Disana sadja, dirumah makan Mien Satu (sebuah rumah makan dimuka kantor Keresidenan Surakarta, disebelah Barat prapatan Warungpelem - DNA). Nanti sebelum masuk kerumah makan saja menunggu diprapatan Warungpelem. Saudara dari prapatan Warungpelem supaya pergi dulu menjamperi saudara Pardijo dirumahnya (dikampung Sudiropradjan - DNA). Sesudah itu nanti kita bertiga (maksudnja Widjaja, Pardijo dan Alip Hartojo - DNA) ber-sama² dari prapatan Warungpelem kerumah makan Mien Satu*”.

Dengan djandji seperti diatas, Alip Hartojo dan Slamet Widjaja meninggalkan rumah Slamet Widjaja dengan naik betjak jang sudah disediakan oleh Alip Hartojo. Sesudah sampai diprapatan Warungpelem ke-dua²nja turun dari betjak. Kawan Slamet Widjaja dengan djalan kaki menudju kerumah kawan Pardijo dikampung Sudiropradjan. Dari sini kawan Slamet Widjaja dan kawan Pardijo menudju ketempat Alip Hartojo, jang menunggu mereka. Tetapi anehnja, setelah bertemu dengan Alip Hartojo, mereka tidak dibawa ke Barat, tetapi mereka berdua dengan dirangkul oleh Alip

Hartojo dibawa ke Utara, dimana lebih kurang 50 meter sebelah Utara prapatan tsb. sudah menunggu sebuah truk tanpa kap dan pintu belakangnja tertutup, sehingga sedjumlah anggota tentara jang duduk didalamnya hanja kepalanja sadja jang kelihatan. Setelah kira² 5 meter lagi akan sampai ketruck tsb., tentara jang duduk didalam truk itu dengan serentak turun dari pintu belakang jang tadinja tertutup. Kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo masing² dipukuli dengan popor senapan, diikat erat² dan kemudian dilemparkan keatas mobil. Sedangkan Alip Hartojo tidak di-apa²kan, malahan dia tertawa ber-sama² dengan pentjulik² jang lain. Ini terdjadi kira² djam 18.30 hari tsb. diatas.

Dari tempat kedjadian diatas kawan Slamet Widjaja dan Pardijo diangkut kepabrik gula Tasikmadu, dimana bermarkas sepasukan tentara. Dalam keadaan terikat, dimarkas tentara tsb. mereka terus dipukuli dan ditanjai dengan kasar: „Kamu djago Solo, ja”, „Kamu kepala FDR, ja”, dsb.

Pada tanggal 8 September 1948 djam 8 malam kawan Slamet Widjaja diambil dari tempat tahanan oleh kira² 5 orang pradjurit bersendjata dan dengan mata ditutup ia dibawa kesuatu tempat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini ditanyakan padanja: „*Apakah saudara tahu dimana saudara sekarang berada?*”, „*Tjoba saudara terangkan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan formasi FDR. Saja tanjakan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan formasi FDR Solo, karena saja tahu saudara mendjadi anggota pengurus Seksi Komite PKI dan anggota Sekretariat FDR*”.

Dari kedjadian diatas djelaslah, bahwa pentjulikan atas dua orang anggota PKI tsb., kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo, bukan dilakukan oleh gerombolan liar, tetapi oleh aparat pemerintah sendiri. Pentjulikan ini bukan pentjulikan biasa, tetapi pentjulikan politik, karena jang ditjulik tidak hanja diambil isi kantongnja. tetapi kepadanya ditanyakan susunan pengurus Seksi Komite PKI Solo dan FDR Solo. Mungkin ada orang jang mengatakan, bahwa itu adalah tindakan aparat pemerintah setempat dan pemerintah pusat tidak tahu menahu. Ini adalah omong kosong.

Bahwa kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo ditjulik oleh aparat resmi dan dengan sepengetahuan pemerintah pusat mendjadi lebih djelas setelah mereka pada tanggal 24 September 1948, ber-sama²

dengan Letnan Kolonel Suharman dan saudara Prodjosudodo, juga perwira TNI, oleh KMK di Solo diserahkan kepada KMK Djokja dan dimasukkan kedalam kamp resmi di Danuredjan, Djokjakarta. Di kamp Danuredjan saudara² ini bertemu dengan tawanan² lainnya dari pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, yang terdiri dari orang² PKI dan orang² kiri lainnya. Kenyataan ini tjo-tjok dengan yang diutarakan oleh Alip Hartojo kepada kawan Slamet Widjaja pada tanggal 1 September 1948, yaitu bahwa „orang² PKI dan termasuk orang² golongan kiri semuanya akan dibersihkan oleh pemerintah Hatta”. Bukti lagi bahwa mereka ditjuluk dengan sepengetahuan pemerintah pusat ialah, bahwa mereka selama didalam tahanan pernah diperiksa oleh orang dari Kedjaksan Agung.

Selama didalam tahanan kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo serta lain²nja diperbolehkan berkirin surat kepada keluarga dan menerima surat dari keluarga. Kenyataan ini dan kenyataan² lain yang sudah dikemukakan diatas membantah utjapan Walikota Solo, Sjamsuridjal, yang biasa mengatakan „saja tidak tahu menahu, dan pemerintah tidak merentjanakan pentjulikan”. Utjapan ini ber-kali² dikeluarkannya dimuka para isteri saudara² yang ditjuluk, ketika para isteri ini beserta anak²nja berdemonstrasi ke Balai Kota Solo meminta pertanggungjawab Sjamsuridjal mengenai pentjulikan² atas suami dan ajah mereka.

Saudara Ketua pengadilan yang terhormat.

Saja kemukakan kenyataan² diatas adalah untuk membuktikan betapa benarnya apa yang dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya tanggal 19 September 1948, bahwa Peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan. Saja kemukakan ini supaya umum menjadi mengerti kenapa kami kaum Komunis mengatakan bahwa Peristiwa Madiun adalah provokasi, bahwa kami menggunakan kata² „provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir” bukanlah dimaksudkan untuk menghina, tetapi untuk menjatakan apa yang sesungguhnya ada dan kedjadian.

Pentjulikan dan penganiayaan terhadap diri kawan² Slamet Widjaja dan Pardijo diikuti oleh kedjadian² lain yang sifatnya serupa. Pada tanggal 7 September 1948 dilakukan pentjulikan ter-

hadap diri 5 orang perwira TNI, yaitu Major Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Sapardi, Kapten Suradi dan Letnan Muljono. Mereka ditjuluk oleh Alip Hartojo dan pasukan tentara yang bermarkas di Srambatan, Solo. Sampai sekarang tentang perwira² TNI yang ditjuluk ini tidak ada kabar beritanya. Kesimpulan satu²nja yang tidak meragukan lagi ialah, bahwa mereka sudah dibunuh oleh aparat pemerintah yang mentjuluk mereka. Mereka dibunuh walaupun Panglima Besar Sudirman sudah memerintahkan kepada Komando CPM Djawa untuk mengusut dan menuntut yang bersalah mengenai pentjulikan perwira² tsb.

Siapa yang bertanggungjawab atas pentjulikan dan pembunuhan ini? Saja kira bukan kaum Komunis, tetapi pemerintah yang berkuasa ketika itu, dan pemerintah itu ialah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Perlu saja peringatkan, bahwa mereka, kelima perwira ini, sebagaimana juga Kolonel Sutarto yang diteror setjara pengetjut itu, adalah pedjuang² kemerdekaan sedjak zaman pendjadjahan Belanda sebelum perang dunia ke-II, selama zaman pendjadjahan Djepang dan selama revolusi nasional kita. Mereka adalah putera² Indonesia yang terbaik dari sukubangsa Djawa. Mereka ditjintai oleh anak buahnya.

Satu lagi hendak saja kemukakan mengenai pentjulikan² di Solo ini. Letnan Kolonel Suharman yang namanya saja sebut diatas ditawan pada tanggal 9 September 1948, ketika ia ditugaskan oleh atasannya untuk menanjakan kepada Alip Hartojo tentang 5 orang perwira yang ditjuluk itu. Tetapi malang bagi Letnan Kolonel Suharman, ia juga ditjuluk, dimasukkan kemarkas tentara di Srambatan (Solo), dan kemudian sesudah mengalami banjak kedjadian yang pahit dan tidak enak, pada tanggal 24 September 1948, ia ber-sama² dengan saudara² Slamet Widjaja, Pardijo dan Prodjosudojo diserahkan kepada KMK Djokja dan dimasukkan kedalam kamp resmi di Danuredjan.

Saudara Ketua yang terhormat.

Berhubung dengan pentjulikan² yang terdjadi di Solo, pada tanggal 9 September 1948 Panglima Besar Sudirman memberi izin kepada Letnan Kolonel Suadi, ketika itu Komandan Divisi IV, menggantikan kedudukan Kolonel Sutarto, untuk mengambil tindakan terhadap kekatjauan² di Solo. Berdasarkan izin Panglima

Besar ini pada tanggal 10 September 1948 telah disampaikan ultimatum kepada Bataljon yang melakukan pentjulikan² itu yang isi pokoknja sbb.: *Djika sampai pada tanggal 13 September 1948, pukul 14.00 lima orang yang ditjuluk tidak dilepaskan, maka pengempuran akan dimulai.* Ultimatum ini disebarkan diseluruh kota Solo dan diikuti oleh manuver militer dibawah pimpinan Komandan Sektor seluruh Surakarta, Major Slamet Rijadi. Sebelum batas waktu ultimatum habis, pada djam 12.30 Major Sutarno, yang datang kemarkas fihak tentara di Srambatan dengan membawa tugas dari Divisi IV untuk mengadakan perundingan, ditembak ketika turun dari truk, sehingga Major Sutarno beserta beberapa orang pengawalnja mati seketika.

Ultimatum tsb. diatas tidak diindahkan oleh Bataljon yang bersangkutan. Sebagai akibatnja, pada tanggal 13 September pukul 14.00 tepat pertempuran mulai meletus antara pasukan² dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan² pentjulik.

Pertempuran berdjalan dengan sengit sampai sore. Tiba² pada pukul 18.00 tanggal 13 September Panglima Besar memerintahkan supaya diadakan gentjatan sendjata. Perintah gentjatan sendjata disaksikan oleh pembesar² sipil dan militer. Perintah gentjatan sendjata ini ditaati oleh pasukan² Divisi IV, tetapi pasukan² fihak lain terus bergerak menduduki kota Solo. Akibatnja, pada tanggal 15 September 1948 djam 18.00 terdjadi lagi pertempuran antara pasukan² dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan² pentjulik.

Kemudian terdjadilah suatu peristiwa yang sangat aneh, jaitu pemerintah pusat membenarkan fihak pasukan² pentjulik, sedangkan Letnan Kolonel Suadi dengan pasukan² yang dibawah komandnja ditjap oleh pemerintah pusat sebagai „pengatjau”. Pemerintah pusat menjerukan dengan melalui radio dan surat² selebaran supaya Rakjat membantu pasukan² tentara yang sudah melakukan pentjulikan². Pasukan² ini dianggap sebagai pasukan² yang bertugas resmi dan berkewajiban untuk menghantjurkan apa yang dinamakan oleh pemerintah „pengatjau²” dari Divisi IV. Oleh pemerintah pusat Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer Djawa Tengah, sedangkan Letnan Kolonel Suadi, Komandan Divisi IV dengan pasukannja terus dikedjar.

Saudara Ketua yang terhormat.

Mengenai peristiwa Solo tjukup sekian sadja. Tidak usah saja teruskan, karena ia mengingatkan kita kembali akan perpetjahan yang sangat besar dalam masjarakat kita ketika itu, tidak hanja perpetjahan dikalangan politik, tetapi djuga perpetjahan dikalangan Angkatan Perang, aparat yang paling penting dari revolusi nasional kita.

Walaupun tidak banjak yang saja kemukakan mengenai Peristiwa Solo, tetapi sekedar tjukuplah untuk mengerti latarbelakang dari ketegangan² politik dan militer ketika itu, untuk mengerti latarbelakang dari provokasi Madiun.

*

Diatas sudah saja katakan, bahwa Peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan. Peristiwa Madiun hanjalah kelandjutan dari Peristiwa Solo. Pertentangan yang tadjam diluar dan didalam Angkatan Perang yang ditimbulkan oleh pentjulikan² dan pembunuhan² di Solo mendjalar keseluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia di Djawa Tengah dan Djawa Timur. Pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir tidak mampu dan tidak mau bertindak untuk meredakan pertentangan² ini.

Tadjamnja pertentangan diluar dan didalam Angkatan Perang sangat terasa di Madiun sedjak terdjadinja pembunuhan setjara teror terhadap Kolonel Sutarto di Solo.

Pada pagi hari tanggal 28 Djuli 1948 saudara Wirosudarmo, buruh kereta-api yang sedang menudju stasion tempatnja bekerdja, telah ditembak mati oleh seorang anggota tentara. Djenazah saudara Wirosudarmo dimakamkan didesa Oro² Ombo dengan mendapat penghormatan dari SBKA Tjabang Madiun dan dari banjak penduduk Madiun. Dalam upatjara pemakaman ini beberapa wakil partai dan organisasi massa menjatakan protesnja terhadap pembunuhan yang se-wenang² ini.

Tidak berapa lama sesudah kedjadian penembakan terhadap buruh kereta-api, terdjadi pula penganiajaan terhadap seorang buruh kantor Balai Kota Madiun oleh seorang perwira tentara.

Serikatburuh Daerah Autonomi (Sebda) menuntut supaya anggota tentara yang memukul itu meminta maaf. Tetapi hal ini tidak kedjadian, karena itu kaum buruh dibawah pimpinan Sebda mengadakan aksi duduk. Setelah aksi berdjalan, fihak pasukan tentara yang bersangkutan mau berunding dengan diwakili oleh seorang perwira, tetapi perundingan ini djuga tidak berhasil. Oleh Sebda persoalan ini diserahkan kepada Sobsi Madiun. Sobsi Madiun menguatkan putusan Sebda. Atas permintaan Sobsi diadakan perundingan lagi, dan sebagai hasilnya, anggota tentara yang bersangkutan bersedia meminta maaf.

Dari kedjadian² diatas dapat kita tarik kesimpulan betapa tegangnja keadaan di Madiun ketika itu. Ketegangan ini mendjadi lebih hebat lagi dengan tersiarnja berita di Madiun tentang pen-tjulikan dan pembunuhan di Solo oleh pasukan² tentara dengan bantuan Alip Hartojo. Puntjak ketegangan ini jalah adanja pertempuran antara pasukan² didalam angkatan darat sendiri, jaitu antara Brigade 29 yang tidak menjetudjui perbuatan se-wenang² seperti tsb. diatas dengan pasukan² Siliwangi dan Mobrig. Pertempuran ini terdjadi pada tanggal 18 September 1948, dimulai djam 1 tengah malam dan berachir djam 8 pagi tanggal 18 September itu djuga dengan dilutjutinja pasukan² Siliwangi dan Mobrig oleh Brigade 29. Dalam pertempuran ini telah gugur Letnan Sapari dari Bataljon 11 Brigade 29 dan Kapten Djaja dari CPM.

Dalam keadaan keruh seperti diatas Kepala Daerah, Residen Madiun saudara Samadikun, tidak ada di Madiun, beliau sedang bepergian ke Djokja. Walikota Madiun pada waktu itu sedang menderita sakit, djadi non-aktif. Wakil Residen ternjata tidak bisa menguasai keadaan. Dalam keadaan demikian, partai² yang terga-bung dalam FDR dan organisasi² massa yang menjokong FDR mendesak supaya kawan Supardi, Wakil Walikota Madiun, bertindak untuk sementara sebagai Residen selama Residen belum kembali.

Sebabnja maka kawan Supardi yang didesakkan oleh partai² dan organisasi² kiri jalah karena kawan Supardi adalah djuga seorang yang mendjabat kedudukan dalam pemerintahan dan pada waktu itu mempunyai keberanian untuk tampil kedepan buat mengatasi keadaan. Pengangkatan kawan Supardi sebagai Residen se-

mentara ternjata djuga disetudjui oleh Letnan Kolonel Sumantri (komandan Subteritorial Madiun), oleh Wakil Residen Madiun kawan Sidharto, oleh Walikota Madiun saudara Purbosisworo, jang masing² memberikan tandatangannja sebagai tanda persetudjuan. Djuga pimpinan Djawatan² penting seperti Djawatan Kereta Api, PTT, Gas dan Listrik dsb. memberikan persetudjuannja.

Disamping menjatakan persetudjuannja mengangkat kawan Supardi sebagai Residen sementara, partai² dan organisasi Rakjat telah mendorong pimpinan pemerintah daerah Madiun supaya melaporkan kedjadian di Madiun kepada Pemerintah Pusat di Djokja, dengan didahului oleh tilgram kepada Pemerintah Pusat sebagai pemberitahuan sementara dan meminta instruksi tentang apa jang harus dilakukan lebih landjut. Oleh pemerintah daerah Madiun tilgram sudah dikirimkan kepada Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dan kepada Menteri Dalam Negeri. Selain dari mengirim tilgram, pemerintah daerah Madiun djuga berusaha mengirimkan kurir-tjepat kepada Pemerintah Pusat untuk membawa berita dan laporan tertulis berkenaan dengan kedjadian di Madiun itu.

Peristiwa inilah, jaitu peristiwa diangkatnja kawan Supardi dari Wakil Walikota mendjadi Residen sementara untuk mengatasi keadaan keruh di Madiun jang di-besar²kan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat menamakannja tindakan „merobohkan pemerintah Republik Indonesia”, tindakan „mengadakan kudeta dan mendirikan pemerintahan Sovjet” dan matjam² lagi. Berdasarkan peristiwa inilah, atas tanggungdjawab sepenuhnya dari pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, pada tanggal 19 September 1948 oleh Presiden Sukarno diadakan pidato jang berisi seruan kepada seluruh Rakjat untuk ber-sama² membasmi „kaum pengatjau”, maksudnja membasmi kaum Komunis, orang² progresif lainnja serta pengikut² mereka.

Untuk lebih mendjelaskan lagi bahwa PKI dan FDR tidak mempunyai rentjana buat mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun, perlu saja kemukakan bahwa ketika terdjadi pertempuran dan perlutjutan dikalangan tentara, dan ketika terdjadi pengangkatan kawan Wakil Walikota Supardi mendjadi Residen sementara, kawan² Musso, Amir Sjarifuddin, Harjono, dll. tidak berada

di Madiun. Pada waktu itu rombongan kawan Musso sedang melaksanakan program perdjalanannya PKI dan sedang berada di Purwodadi. Rombongan kawan Musso sampai di Madiun baru pada tanggal 18 September tengah malam. Kawan Musso datang atas permintaan pimpinan FDR di Madiun berhubungan dengan hangatnya keadaan. Kawan Musso adalah salah seorang yang paling menjetudji supaya tcepat memberi laporan dan meminta instruksi lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat mengenai apa yang sudah terjdadi di Madiun.

Dari keterangan² diatas djelaslah, bahwa tidak benar samasekali apa yang dikatakan oleh lawan² politik PKI bahwa „PKI merebut kekuasaan di Madiun”, bahwa „PKI mendirikan pemerintahan Sovjet di Madiun”, dsb. dsb. Dengan alasan² inilah saja berani mengatakan bahwa berita² yang dimuat dalam harian „Abadi”, „Pedoman” dan „Keng Po” mengenai Peristiwa Madiun pada permulaan September 1953 adalah pemalsuan dan fitnahan. Dan untuk melawan pemalsuan dan fitnahan inilah Politbiro CC PKI mengeluarkan Statement tanggal 13 September 1953, statement yang sekarang dijadikan perkara.

Tidak mungkinja PKI mengadakan kudeta dan mendirikan Sovjet di Madiun, tidak hanya karena dua tindakan itu bertentangan dengan teori kaum Komunis, tetapi djuga bertentangan dengan andjuran² kawan Musso setelah ia kembali dari luarnegeri. Saja masih ingat ketika kawan Musso mengusulkan kepada Central Komite PKI supaya PKI mengirim surat kepada Pimpinan Pusat Masjumi dan PNI untuk menggalang front persatuan nasional. Usul kawan Musso ini diterima oleh CC PKI dan surat dikirimkan kepada kedua partai tsb. Pimpinan Pusat Masjumi, dengan suratnja yang ditandatangani oleh Mr. Kasman Singodimedjo, menolak adjakan PKI untuk bersatu. Saja masih ingat ketika kawan Musso bertemu dengan Presiden Sukarno di Istana Djokjakarta. Ketika itu Presiden Sukarno meminta supaya kawan Musso membantu memperkuat negara dan melantjarkan roda revolusi. Dengan pasti kawan Musso mendjawab: „*Itu memang kewadjaban. Ik kom hier om orde te scheppen* (saja datang untuk mengadakan ketenteraman — DNA)”. (Madjalah „Revolusioner”, 19 Agustus 1948, tahun ke-III No. 14). Selain daripada itu saja masih ingat

akan Konferensi PKI bulan Agustus 1948 yang dipimpin oleh kawan Musso sendiri. Dalam Konferensi ini disahkan sebuah resolusi yang bernama „*Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*”, yang bersama ini saja lampirkan; tiap orang dapat mengetahui bahwa dalam resolusi ini tidak ada program untuk mengadakan kudeta atau untuk mendirikan pemerintah Sovjet.

Djadi, saudara Ketua yang terhormat, PKI tidak mempunyai rentjana dan tidak mungkin mempunyai rentjana untuk mengadakan kudeta dan untuk mendirikan Republik Sovjet di Madiun. Dan lagi, apa yang terjdadi di Madiun adalah bukan kudeta dan bukan bibit² Sovjet. Apa yang terjdadi di Madiun dengan pengangkatan kawan Supardi menjadi Residen sementara adalah satu tindakan konstruktif dari golongan kiri untuk mengatasi keadaan ketika itu.

Peristiwa Madiun yang berdarah tidak akan terjdadi kalau langau yang ketjil ini tidak disunglap menjadi gadjah, kalau maksud baik dari golongan kiri ini tidak sengadja diterima setjara salah oleh Pemerintah Pusat sebagai sesuatu yang kebetulan untuk mendapatkan dalih guna menghitamkan kaum Komunis, dan dengan demikian mendapat „alasan” mengerahkan segenap kekuatan negara untuk mengedjar dan membasmi kaum Komunis.

Djuga ada orang yang suka menghubungkan kedjadian di Madiun pada tanggal 18 September '48 dengan apa yang mereka namakan „program FDR” untuk „menimbulkan kekatjauan dimana²” atau apa yang mereka namakan program FDR untuk „menggerakkan segenap organisasi djahat, supaya giat melakukan penggedoran², pentjurian² diwaktu malam dan siang hari”. Djika kedjadian di Madiun itu mau dihubungkan dengan apa yang mereka namakan „program FDR” yang begitu matjamnja, maka disini dapat saja djawab, bahwa program FDR yang sesungguhnya adalah sangat berlainan dengan „program FDR” yang palsu yang dengan giat disebarkan oleh kaum provokator. Tentang adanya pemalsuan terhadap program FDR, oleh Sekretariat Pusat FDR sudah diadakan pengumuman dibeberapa surat kabar di Djokja ketika itu. Selain daripada itu Sekretariat Pusat FDR sudah mengadukan pemalsuan ini kepada fihak kepolisian di Djokjakarta, dan Sekretariat FDR Solo sudah mengadukannja kepada fihak polisi-

an di Solo. Program FDR ini dikirim oleh Sekretariat Pusat FDR kepada FDR² Daerah dengan melewati pos, djadi samasekali tidak mempunyai sifat rahasia.

*

Saudara Ketua jang terhormat.

Adalah suatu kebanggaan bagi saja, bahwa sesudah Pemerintah Pusat menjerukan kepada semua aparat pemerintah untuk membasmi kami kaum Komunis, sesudah Menteri Dalam Negeri Sukiman menjatakan „perang sabil” terhadap kaum Komunis, kawan Musso pada waktu itu tidak memberi komando kepada kami supaya ber-dujun² datang kepada alat² pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir menjerahkan batangleher untuk dipantjung atau menjerahkan diri untuk ditembak. Tidak, kawan Musso dalam pidatonja mendjawab Pemerintah Pusat, memberi komando kepada kami kaum Komunis untuk mengadakan perlawanan jang gagahberani. Kami tidak menjerah dan tidak minta ampun, karena kami tidak bersalah. Pentjulikan² dan pembunuhan² di Solo sudah menggambarkan pada kami bahwa darah kami mau dihirup, sebagaimana halnja dengan darah perwira² TNI jang ditjulik dan dibunuh itu. Kami tidak mau diperlakukan demikian. Boleh hirup darah kami, tetapi lalu dulu perdjjuangan melawan kami.

Demikian djawaban kami kaum Komunis kepada pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir jang sudah mengerahkan segenap kekuatannja untuk membasmi kami. Kami kalah dalam mengadakan perlawanan, karena kami memang tidak berniat untuk berperang melawan pemerintah Republik Indonesia. Tenaga Rakjat jang kami mobilisasi kami tudjukan untuk melawan tentara kolonial Belanda. Tetapi sebaliknya, pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir mengerahkan segenap tenaganya untuk membasmi kaum Komunis, jang kemudian ternjata disambut baik dan dibantu oleh kaum kolonialis Belanda (lihat interviu Van Mook kepada „ANP” tanggal 21-9-’48 dan interviu Letnan-djendral Spoor kepada „Reuter” tanggal 21-9-’48 — dimuat djuga dalam „Buku Putih tentang Peristiwa Madiun” (3), halaman 17).

Tetapi, disamping kami mengalami kekalahan, kami sudah

memberi didikan pada Rakjat, didikan bahwa kaum Komunis dalam keadaan jang bagaimanapun sulitnja tetap mempertahankan pendiriannja, tetap berfihak kepada Rakjat jang tidak suka diperlakukan se-wenang² seperti jang sudah terdjadi terhadap perwira² TNI di Solo; walaupun untuk sikapnja ini kaum Komunis harus mempertaruhkan njawanja.

Dalam perdjjuangan melawan pengedjaran dan pembasmian jang dilakukan oleh pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir ketika itu, kawan Musso akan mendjadi kebanggaan kami jang abadi. Saja, sebagai anak sukubangsa Melaju dan sebagai putera Indonesia jang sedjati, saja menundukkan kepala saja dihadapan putera sukubangsa Djawa jang besar ini, pahlawan Rakjat Indonesia jang gagahberani. Musso adalah tjontoh bagi tiap² Komunis dan bagi tiap² patriot, bagaimana seharusnya seorang Komunis dan seorang putera bangsa berkorban untuk membela tjita² Rakjat dan membela kebenaran. Berbahagialah mereka jang memiliki semangat dan keberanian jang besar seperti kawan Musso, mereka adalah radjawali² gunung jang berhak akan tempat jang se-tinggi²nja. Mereka adalah manusia² jang tetap akan hidup dalam hati Rakjat Indonesia, dan pada siapa Rakjat Indonesia bisa mempertjajakan nasibnja.

Dari kedjadian² di Solo seperti pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto, pentjulikan terhadap kawan² Slamet Widjaja dan Pardiyo, pentjulikan dan pembunuhan atas 5 orang perwira TNI, pentjulikan atas diri Letnan Kolonel Suharman, pembunuhan terhadap buruh kereta-api di Madiun, penganiajaan terhadap buruh kantor Balai Kota Madiun, djelaslah betapa luasnja pekerdjaan kaum provokator ketika itu. *Tetapi, walaupun demikian mereka tidak berhasil untuk mendapatkan alasan sah guna mengedjar dan membunuh kaum Komunis.*

Mereka mengadakan pengedjaran dan pembunuhan terhadap kaum Komunis dengan tidak ada alasan sah. Satu²nja jang dapat mereka gunakan sebagai dalih ialah desakan FDR Madiun supaya Wakil Walikota Supardi bertindak sebagai Residen sementara. Tetapi ini sangat mentertawakan, karena pengangkatan kawan Supardi mendjadi Residen sementara adalah dengan persetudjuan pembesar² sipil dan militer jang berkuasa di Madiun ketika itu.

Tidak ada yang lebih mentertawakan daripada menamakan peristiwa ini sebagai tindakan untuk „merobohkan negara”, apalagi kalau tindakan ini dikatakan „mengadakan kup dan mendirikan pemerintah Sovjet”. Sovjet ialah dewan kaum buruh, kaum tani dan tentara. Tidak bisa masuk di akal bahwa pada waktu itu pemerintah daerah Madiun yang dipimpin oleh Residen sementara Supardi telah mendirikan dewan kaum buruh, kaum tani dan tentara sebagai badan kekuasaan yang tertinggi. Sovjet adalah dewan perwakilan Rakyat suatu negara sosialis, yaitu negara dimana tidak dimungkinkan lagi alat² produksi berada ditangan perseorangan. Tidak bisa masuk di akal, bahwa pada waktu itu pemerintah daerah Madiun yang dipimpin oleh Residen sementara Supardi mempunyai rentjana (apalagi pelaksanaan) untuk menasionalisasi semua alat produksi.

Dengan keterangan² diatas, maka untuk sementara selesailah kewajiban saja memberikan bukti², bahwa Peristiwa Madiun adalah suatu provokasi. Yang bertanggungjawab atas perbuatan² provokatif seperti sudah diterangkan diatas, tidak lain ialah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang berkuasa ketika itu.

Tangan Yang Berlumuran Darah

Dalam harian „Pedoman” tanggal 7 September 1953 dimuat pengumuman BKOI yang antara lain mengatakan bahwa „sesudah kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun” maka belakulah „kekedjamaan yang tidak ada taranja”. Selandjutnja pengumuman itu mengatakan, bahwa „Ulama² Islam yang tidak terhitung banjaknja, pegawai² negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diluar peri-kemanusiaan”. Ini adalah di-lebih²kan dan ini adalah pemutarbalikan kenjataan. Kekedjamaan yang tidak ada taranja bukan mulai dengan apa yang dinamakan „kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun”, tetapi mulai dengan pembunuhan setjara teror terhadap Kolonel Sutarto dan pentjulikan serta pembunuhan terhadap 5 perwira TNI di Solo. Untuk membantah pemutarbalikan ini, dalam statement Politbiro CC PKI dikatakan, bahwa bukan PKI yang bertindak kedjam, tetapi tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. yang ber-

lumuran darah. Mungkin kata² yang kami gunakan ini tidak enak didengar oleh mereka yang bersangkutan, tetapi kata² ini benar.

Dalam menerangkan Peristiwa Solo sudah saja kemukakan tentang ditjuluk dan dibunuhnja 5 orang perwira TNI oleh aparat pemerintah Hatta yang resmi. Peristiwa berdarah ini telah menimbulkan kedjadian² berdarah yang lain, yaitu pertempuran antara pasukan dibawah pimpinan Divisi IV dengan pasukan tentara yang mengadakan pentjulikan dengan bantuan Alip Hartoyo.

Saja tidak akan menjebutkan banjak tjontoh mengenai kelanjutannya dari apa yang sudah saja terangkan diatas. Saja hanya akan menjebutkan dua tjontoh didua tempat sadja, yaitu kedjadian pembunuhan di Ngaliyan dan pembunuhan di Magelang. Dengan hanya mengemukakan dua tjontoh ini tidak berarti, bahwa saja tidak berbitjara tentang pembunuhan kedjam di-tempat² lain, seperti di Malang⁽⁴⁾, Kediri, Pati, Blora, Rembang, Kudus, Purwodadi, Tjepu, dll. Saja hanya mengemukakan dua tjontoh ini, untuk menghemat waktu. Disamping itu saja anggap dua tjontoh ini tjukup representatif untuk mentjerminkan perbuatan² kedjam di-tempat² lain oleh aparat² suatu pemerintah yang katanja berdasarkan hukum.

Saudara Ketua pengadilan yang terhormat.

Mengenai kedjadian di *Ngaliyan*. Ngaliyan adalah sebuah desa dikelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Keresidenan Surakarta. Pada waktu itu tengah malam tanggal 19 Desember 1948. Lubang untuk mengubur Mr. Amir Sjarifuddin dengan 10 orang kawannja, yang digali atas perintah tentara oleh kira² 20 orang penduduk desa Karangmodjo belum selesai. Menurut perintah, satu lubang yang akan memuat 11 orang itu harus kira² 170 cm dalamnja.

Pada waktu itu kawan *Amir Sjarifuddin* berpakaian pijama putih strip biru, tjelana hidjau pandjang, dan membawa buntelan sarung; kawan *Maruto Darusman* berpakaian djas tjoklat dan tjelana putih pandjang; kawan *Suripno* berbadju kaos dan bersarung; kawan *Oey Gee Hwat* bertjelana putih, kemedja putih dan djas putih yang sudah kotor; kawan² lainnja ialah *Sardjono*, *Harjono*, *Sukarno*, *Djokosujono*, *Katamhadi*, *Ronomarsono* dan *D. Mangku*.

Sambil menunggu lubang selesai digali, kawan Amir Sjarifud-

din menanjakan kepada seorang Kapten TNI jang ada disitu: Saja ini mau diapakan?

Djawab Kapten itu: Saja tentara, tunduk perintah, disiplin.

Setelah selesai lubang digali, orang² jang menggali disuruh pergi dan jang disuruh tinggal hanja 4 orang jang kemudian ternjata digunakan untuk menguruk lubang itu kembali.

Kemudian seorang letnan menerangkan adanja surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto mengenai pembunuhan atas 11 orang itu.

Bung Amir menanjakan antara lain: apakah saudara sudah mengichlaskan saja dan kawan² saja?

Letnan itu mendjawab: saja tinggal tunduk perintah.

Kawan Amir bitjara lagi: apakah saudara sudah memikirkan jang lebih djernih?

Letnan: tidak usah banjak bitjara.

Kawan Djokosujono menjisip: saja tidak menjalahkan saudara, tetapi dengan ini negara jang rugi.

Letnan memerintah anak buahnja supaja masing² mengisi bedilnja.

Kawan Amir menghampiri si Letnan, sebelum sampai ia terpeleset sedikit, sambil menepuk badan Letnan ia berkata: beri kami waktu untuk bernjanji sebentar.

Letnan mendjawab: boleh, tapi tjepat²!

Kawan Suripno menjisip: apa saja boleh mengirimkan surat untuk isteri saja, biar ia tahu.

Letnan: ja, tidak berkeberatan.

Kemudian kawan² menulis surat. Sesudah selesai, surat² itu satu persatu diserahkan kepada Letnan.

Sesudah surat diserahkan ber-sama² 11 orang menjanjakan lagu Indonesia Raja dan Internasional.

Setelah selesai bernjanji bung Amir menjerukan: bersatulah kaum buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu!

Kawan Suripno: Saja bela dengan djiwa saja, aku untukmu!

Kemudian mulailah kesebelas orang jang gagahberani ini ditembak satu persatu, dimulai dengan menembak kawan Amir Sjarifuddin, kemudian kawan Maruto Darusman, Oey Gee Hwat. Djokosujono, dst.

Dari kedjadian diatas kita ketahui, bahwa anggota² Angkatan Perang melakukan penembakan itu atas perintah atasannja, dalam hal ini perintah Gubernur Militer. Jang bertanggungjawab atas semuanya ini bukan anak² jang mengisi peluru bedilnja dan menembak kawan Amir dkk sesudah mendapat komando, tetapi jang bertanggungjawab sepenuhnya ialah pemerintah jang pada waktu itu berkuasa, pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Sampai sekarang, baik PKI maupun keluarga mereka jang dibunuh belum pernah diberitahu tentang proses verbal dan vonnis jang didjatuhkan pada kesebelas patriot tersebut diatas. Satu²nja surat resmi, tetapi tidak ditunjukkan kepada keluarga korban satu persatu, ialah surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta tanggal 20 September 1950, ditandatangani oleh Komisaris Polisi II, Sempu Muljono, jang memuat keterangan bahwa betul pada hari Minggu tanggal 19-20 Desember 1948 djam 23.30 oleh Pemerintah telah diberikan hukuman setjara militer kepada 11 orang tersebut diatas. Bagaimana prosedur hukuman setjara militer itu samasekali tidak diterangkan.

Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta tertanggal 20 September 1950 itu, maka oleh saudara Mr. A.M. Tambunan dan kawan Njonja Mudigdio sudah ditanjakan lewat parlemen kepada pemerintah pada tanggal 20 Desember 1950 sbb.:

- 1) Siapakah jang dimaksud dengan „Pemerintah” dalam surat tsb. diatas?
- 2) Dapatkah Pemerintah memberikan hukuman setjara militer itu?
- 3) Pengadilan manakah jang mengadili 11 orang itu?
- 4) Bagaimana bunji keputusan pengadilan (vonnis) itu?
- 5) Apakah tuduhan djaksa (djaksa tentara) dan berdasarkan fasal² mana Kitab Undang² Hukum Pidana (Tentara)?

Pertanjaan² ini diulangi dalam pidato saudara Mr. A.M. Tambunan dimuka parlemen pada tanggal 23 Djanuari 1951.

Sekarang mengenai kedjadian berdarah di *Magelang*. Dimulai dengan kedjadian tanggal 21 September 1948. Pada kira² djam 6 sore hari itu, datang Komandan STC Kedu, Sarbini, ketempat tahanan militer dan memberi keterangan bahwa ia mendapat tugas untuk melindungi mereka jang ditahan karena sesuatu hal. Dikatakannja, bahwa mereka jang dilindungi tidak perlu kuatir dan per-

lakukan baik akan ditanggungi. Keterangan ini diberikan dimuka beberapa orang tahanan, karena jang ditahan belum banjak ketika itu. Diantara jang ditahan itu terdapat saudara Suprodjo, bekas Menteri Sosial, dan saudara Sukarmo, bupati Kendal.

Memang benar, kira² selama satu minggu sesudah keterangan Komandan STC, Sarbini, makanan dan minuman serta rokok dijamin. Tetapi, lama kelamaan, perlakuan makin djelek, apalagi sesudah dalam ruangan kamar saudara Suprodjo dan Sukarmo ditempatkan kira² 75 orang tahanan. Penjagaan diperkeras, makanan menjadi sangat kurang, sehingga menimbulkan protes² sampai diadakan mogok makan. Atas permintaan orang tahanan, keluarga diperkenankan mengirim makanan ketempat tahanan.

Selama dalam tahanan, kepada jang ditahan diajukan pertanyaan² sekitar: apakah mereka menjadi anggota organisasi jang bertujuan menjatuhkan pemerintah dengan kekerasan, dan apakah mereka menjadi anggota sesuatu organisasi jang bertujuan kedjahatan. Pertanyaan² ini sesuai dengan Program Kampanje FDR jang sudah dipalsu dan jang sudah diurus oleh FDR dengan fihak kepolisian. Pertanyaan² diatas dijawab dengan singkat: tidak! Ada jang memberi keterangan, bahwa mereka adalah anggota Partai Sosialis atau partai lain jang berkedudukan legal.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tahanan jang satu kamar dengan saudara Suprodjo dan Sukarmo disuruh berkumpul. Pengurus tahanan mengemukakan bahwa orang² tahanan harus bersiap² untuk pindah tempat. Orang² tahanan dibagi menjadi 3 golongan, golongan A, B dan C. Golongan C boleh pulang dan golongan B dipindah kekamp Mendut, diluar kota Magelang. Sedangkan golongan A, jang terdiri dari anggota² FDR Magelang semua 41 orang, diantaranya seorang wanita, dipindahkan kependjara Magelang. Orang² jang dipindahkan kependjara Magelang ini belum selesai diperiksa oleh jang berwadjib.

Rombongan 41 orang ini dalam perdjalanan menudju kependjara diantar oleh 2 orang pradjurit jang masih muda dan nampaknja peramah. Kalau 41 orang ini mau melarikan diri bukanlah soal jang sulit ketika itu. Tetapi, karena merasa tidak bersalah mereka menganggap tidak perlu untuk melarikan diri. Djika orang tahanan berdjalan terpentjar, pradjurit jang mengantar tidak me-

nampakkan kemarahannja. Malahan, sebelum sampai kependjara, saudara Suprodjo dengan seorang tahanan lagi minta permissi kepada pradjurit jang mengantar untuk mampir dirumahnja buat pamitan. Permintaan ini diluluskan dan mereka mampir dirumah dengan tidak didjaga. Kemudian, sesudah pamitan saudara Suprodjo dengan kawannja menjusul kependjara dengan tidak diantar. Kenyataan ini perlu saja kemukakan untuk menundjukkan sekali lagi, bahwa orang² FDR jang ditahan itu tidak seudjung rambut merasa dirinja bersalah dan oleh karena itu tidak menaruh ketjurigaan sedikit djuga kepada alat² pemerintah jang menangkap mereka.

Setelah sampai dipendjara, 40 orang dimasukkan kedalam 2 sel sedangkan seorang wanita jang tadinja ikut tidak dimasukkan. Penjagaan dihalaman pendjara sangat keras, dilakukan oleh pasukan bersendjata dengan satu mitraljur ditudjukan kepada sel. Kira² djam 5 sore kelihatan 4 orang mengangkat trekbom jang besar dan dimasukkan kedalam salahsatu kamar. Kira² djam 6.30 orang pendjara „biasa”, jang terdiri dari pentjuri dan pendjahat, dikeluarkan dari pendjara. Kira² djam 9 malam, ke-40 orang tahanan itu dipindahkan dan dimasukkan kedalam satu sel dibagian tengah pendjara.

Malam tanggal 19 Desember 1948 itu sangat gelap didalam dan disekitar pendjara Magelang. Sepasukan ketjil tentara dengan membawa obor memetjahkan kegelapan itu. Mereka bersendjatakan karaben. Kira² djam 9.30 malam pintu sel dibuka dan satu demi satu orang² tahanan ditarik keluar. Sesudah diluar tangan mereka diikat dibelakang badan dan dimasukkan kekamar lain. Salah seorang jang sedang diikat memprotes: „Kita belum diadili sudah mau dibunuh. Kalau begitu tidak ada pengadilan”. Seorang lagi, ketika sedang diikat djempol-sama-djempolnja dibelakang badan bertanya: „Mau diapakan ini”. Pertanyaan ini dijawab dengan kasar: „Diam!” Lalu jang bertanya ini dimasukkan kedalam sel dimana sudah berkumpul teman² lain jang sudah diikat tangannja. Mereka dipaksa supaya duduk bersila menghadap tembok kamar pendjara. 40 orang dibagi dalam tiga kamar. Ketika itu tentara Belanda sudah ada jang masuk kota Magelang.

Terdengar suara pemimpin pasukan: „Ini badjingan?”. Kemu-

dian ia memberi komando: „Bersiaaaaap !” Dibelakang tiap² orang, dengan djarak kira² 1,5 meter, berdiri satu orang dengan karaben. Sesudah kedengaran kokang, komandan memberi perintah: „Atas-nama Negara..... tembak !” Demikianlah, orang² jang belum selesai diperiksa ini, hanja dengan perkataan „atasnama negara” didjatuhi hukuman tembak. Kebanyakan mereka petjah kepalanja dan otaknja keluar. Sesudah selesai menembak semua, tetapi di-antaranja ada kurang tepat tembakannja, pendjara dikuntji dengan gembok dari luar.

Tidak berapa lama kemudian, dari djendela pendjara dilemparkan botol² berisi bensin dan lim (brandflessen). Dari luar pendjara diusahakan untuk membakar pendjara, api sudah mulai bernjala² memakan tumpukan kaju jang memang sudah disediakan dimuka pintu kamar pendjara. Tetapi malang bagi tukang bakar dan tukang bunuh itu, pekerdjaan mereka sia², karena hudjan turun.

Djuga mengenai hukuman mati jang didjatuhkan pada 40 orang diatas saja memindjam pertanjaan saudara A.M. Tambunan: pengadilan manakah jang mengadili 40 orang itu? Bagaimana bunji keputusan pengadilan (vonnis) itu? Apakah tuduhan djaksa (djaksa tentara) dan berdasarkan fasal² mana Kitab Undang² Hukum Pidana (Tentara)?

Sampai sekarang jang diketahui oleh Rakjat, jalah, bahwa mereka sudah dibunuh dengan tidak diadili lebih dulu. Kita bisa mengatakan bahwa Residen Kedu, Salamun, Komandan STC, Sarbini, Kepala Polisi Kedu, Sukardjo, bertanggungjawab atas kedjadian ini, tetapi tidak boleh kita lupakan bahwa mereka berbuat semuanja atas perintah atasan. Sebagaimana djuga dengan kedjadian di Ngaliyan dan di-tempat² lain, jang bertanggungjawab atas pembunuhan dipendjara Magelang ini adalah pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir. Penguasa² pemerintah inilah jang tangannja berlumuran dengan darah dan petjahan otak manusia.

Dengan mendjadi terangnya dua peristiwa pembunuhan diatas, jaitu jang di Ngaliyan dan Magelang, maka djelaslah bahwa perkataan „berlumuran darah” dalam statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 samasekali bukan dimaksudkan untuk menghina, tetapi se-mata² untuk memformulasi apa jang sebenar-

nja terdjadi. Dengan ini mendjadi djelas, bahwa memang benar dalam Peristiwa Madiun tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs. berlumuran darah.

Sebelum saja menutup keterangan saja mengenai tangan orang jang berlumuran darah dalam Peristiwa Madiun, perlu saja kemukakan bahwa pembunuhan² kedjam di Ngaliyan, Magelang, Malang, Kediri, dan banjak tempat² lain lagi, dilakukan sesudah pidato Presiden Sukarno dalam bulan November 1948 jang menjatakan, bahwa *putusan hukuman mati harus oleh Pemerintah Pusat dan semua hukuman harus berdasarkan putusan pengadilan*. Djuga perlu saja kemukakan, bahwa menurut putusan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), jaitu parlemen sementara kfta ketika itu, kekuasaan penuh (plein pouvoir) selama 3 bulan jang diberikan kepada Presiden Sukarno hanja berlaku sampai tanggal 15 Desember 1948. Pembunuhan² jang saja terangkan diatas dilakukan sesudah tanggal 15 Desember 1948, *setelah kekuasaan penuh tiada lagi ditangan Presiden Sukarno*. Dua hal jang saja kemukakan ini lebih membikin terang, bahwa pembunuhan² itu benar² adalah perbuatan se-wenang², dan sepenuhnya atas tanggunggjawab pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Jang tidak boleh dilupakan, saudara Ketua, jalah bahwa pembunuhan² jang membikin berdiri bulu kuduk itu dilakukan berdasar berita jang belum pasti. Ini nampak dalam pidato Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta ketika meminta kekuasaan penuh pada BPKNIP, jang antara lain berbunji: „Tersiar pula berita — entah benar entah tidak — bahwa Musso akan mendjadi Presiden Republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin Perdana Menteri”. Ja, tindakan² diambil berdasar berita *entah benar entah tidak*, tetapi jang mati sudah pasti.

Djaga Persatuan Nasional Seperti Kita mendjaga Bidjimata Kita

Saudara Ketua pengadilan jang terhormat.

Sekarang sampailah saatnja saja mengachiri pembelaan saja.

Dibagian pendahuluan dari pembelaan saja ini sudah saja katakan bahwa bagi saja bukanlah suatu kegembiraan dan kebahagiaan untuk berbitjara tentang Peristiwa Madiun. Dimuka pengadilan ini

saja terpaksa berbitjara tentang peristiwa jang mengerikan ini, peristiwa pentjulikan dan pembunuhan jang dilakukan oleh suatu pemerintah jang katanja berdasarkan hukum. Saja terpaksa berbitjara untuk membela kehormatan-Komunis saja, untuk membela kehormatan kawan² saja jang sudah mendjadi korban Peristiwa Madiun, untuk membela kehormatan Rakjat Indonesia jang memihak PKI mengenai pendirian terhadap Peristiwa Madiun.

Dengan keterangan² saja diatas mendjadi djelas apa jang saja katakan dibagian pendahuluan dari pembelaan saja, jaitu bahwa statement Politbiro CC PKI tanggal 13 September 1953 dikeluarkan se-mata² untuk kepentingan umum dan pembelaan. Nama baik PKI dan nama baik pemimpin² PKI mendjadi ditjemarkan dengan adanja fitnahan² terhadap PKI jang dimuat didalam harian² „Abadi” dan „Pedoman” beberapa hari sebelum statement tsb. dikeluarkan. Sekarang mendjadi terang, bahwa „kekedjaman jang tidak ada taranja” bukan dimulai oleh anggota² PKI, tetapi dimulai dengan pentjulikan dan pembunuhan di Solo oleh aparat² resmi pemerintah. Sekarang mendjadi djelas, bahwa „kekedjaman jang tidak ada taranja” bukan dilakukan oleh PKI, tetapi dilakukan terhadap PKI.

Kami sudah sedjak lama, ber-tahun² sebelum Masjumi melakkannya, sudah memperingati hari 18 September saban tahun sebagai hari berdukatjita. Kami setudju kalau pemerintah memutuskan supaya tanggal 18 September saban tahun diperingati dengan penuh chidmat dan dengan menaikkan bendera nasional setengah tiang sebagai tanda berdukatjita seluruh bangsa.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati korban² jang ditembak mati di Ngaliyan, Magelang, Kediri, Malang, Pati, Tjepu dan banjak tempat lagi.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati Musso, Amir Sjarifuddin, Harjono, Suripno, Wiroreno dan banjak lagi pahlawan² Rakjat jang namanja akan tetap hidup didalam hati dan nadi putera² Indonesia jang mempunyai perasaan dan darah kebangsaan.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati anak² dan saudara² kita anggota Angkatan

Perang jang mendjadi korban politik perang saudara pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun untuk memperingati semua jang mendjadi korban Peristiwa Madiun.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun supaya kita senantiasa ingat, bahwa kita harus waspada dan senantiasa bersikap kuat dalam melawan tiap² provokasi.

Kita harus berkabung pada tanggal 18 September saban tahun supaya kita senantiasa ingat, bahwa kita tidak mau dipetjah-belah, bahwa kita harus mendjaga persatuan nasional kita seperti kita mendjaga bidjimata kita.

Kalau kita bersatu tidak ada jang akan rugi, ketjual musuh kita, semua kaum pendjadjah.

Saudara Ketua pengadilan jang terhormat.

Saja sudah berbitjara, saja sudah menjatakan perasaan dan fikiran saja. Sekarang saja mengharap saudara menjatakan perasaan dan fikiran saudara. Saja njatakan harapan ini, karena saja yakin saudara mempunyai dua milik kita jang besar ini, jaitu perasaan dan fikiran.

Tulisan ini adalah tanjadjawab kawan Aidit dengan wartawan kantorberita „Antara” mendjelang Konferensi 29 negara Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung dari tgl. 18 hingga 24 April 1955. Konferensi setjara bulat mengutuk kolonialisme dalam segala bentuknja. Ia melahirkan semangat Bandung, yang terkenal dengan Dasa Silanja, jaitu 10 prinsip yang menggambarkan semangat setiakawan Rakjat² Asia-Afrika dalam melawan imperialisme, untuk kemerdekaan nasional dan perdamaian dunia.

Suksesnja Konferensi ini membuktikan bahwa Rakjat² Asia-Afrika telah bangkit dan berdjuaug bersama-sama melemparkan belenggu kolonialisme dan merebut kemerdekaan nasionalnja. Dengan tepat kawan Aidit menandakan bahwa dengan konferensi ini Rakjat² Asia-Afrika mulai membikin sedjarahnja sendiri setjara kolektif.

DI BANDUNG NEGERI² ASIA-AFRIKA MULAI MEMBIKIN SEDJARAH SENDIRI SETJARA KOLEKTIF

Pertanyaan: Bagaimana perasaan saudara berhubung dengan akan dilangsungkannja Konferensi negeri² Asia dan Afrika di Bandung?

Djawab: Saja kira perasaan saja sama sadja dengan perasaan tiap² putera Indonesia yang dapat memberi nilai yang tepat pada peristiwa penting, besar dan bersedjarah ini.

Disatu fihak saja merasa bangga bahwa peristiwa ini berlangsung di Indonesia. Kebanggaan yang wadjar ini tidak pada tempatnja saja sembunjikan. Disukai atau tidak, disetudjui atau ditentang, peristiwa ini akan menaikkan prestise Indonesia. Tetapi yang lebih penting jalah, bahwa dengan peristiwa ini negeri² Asia-Afrika mulai membikin sedjarahnja sendiri setjara kolektif. Ini akan merupakan sumbangan yang tak ternilai buat keselamatan dan kemadjuan kemanusiaan, dan peradaban.

Difihak lain, saja merasakan betapa besarnya tanggungdjawab yang dipikulkan pada pundak Rakjat dan Pemerintah Indonesia sebagai tuanrumah dalam merealisasi tjita² baik yang dikandung oleh lima negara pengambil inisiatif Konferensi Asia-Afrika ini. Kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam mendjadikan Konferensi ini satu sukses dan pengertian Rakjat Indonesia akan pentingnja Konferensi ini adalah djaminan bahwa Konferensi akan berdjalan dengan baik.

Dengan perasaan inilah saja mengutjapkan selamat datang di Indonesia dan selamat berkonferensi kepada semua Ketua dan anggota delegasi Konferensi Asia-Afrika.

Pertanyaan: Apakah saudara yakin bahwa Konferensi Asia-Afrika akan berhasil?

Djawab: Dalam dunia dimana terdapat bisul² yang se-waktu² bisa meletus mendjadi peperangan dunia baru, adanja sadja per-

temuan antara negara² jang mau berunding tentang soal² perdamaian, persahabatan dan kerdjasama internasional sudah merupakan sukses. Djadi persoalannya bukan lagi apakah akan berhasil atau tidak, tetapi bagaimana supaya dalam konferensi akbar ini se-banyak²nja fikiran² sehat dapat dikemukakan dan dipertimbangkan.

Walaupun negeri² jang akan berkumpul di Bandung ber-beda² sistim politik dan ekonominya, tetapi dalam prinsipnja, sedikit atau banyak, semuanya mempunyai kepentingan dalam melawan kolonialisme dan melawan bahaya peperangan dunia baru. Oleh karena itulah saja yakin, bahwa konferensi ini akan mentjapai sukses² jang berada diluar dugaan negeri² jang tidak mau mengerti perasaan dan fikiran Rakyat dibenua Asia dan Afrika.

Pertanyaan: Apakah dengan Konferensi Asia-Afrika tidak berarti Pemerintah Indonesia meng-hambur²kan uang seperti dikatakan oleh setengah orang?

Djawab: Kalau orang menganggap perlu mengeluarkan ongkos untuk pesta perkawinan, maka tidaklah perlu di-ribut²kan kalau ongkos djuga harus dikeluarkan untuk Konferensi dari negeri² dimana akan dibitjarakan nasib hampir tigaperempat penduduk dunia. Menurut fikiran saja ongkos konferensi ini tidak akan sampai 1 promil (seperseribu) dari kerugian jang dapat diakibatkan oleh bombardemen dengan satu bom atom di Djakarta atau di Bandung.

Pertanyaan: Apakah harapan² saudara pada Konferensi Asia-Afrika?

Djawab: Saja mengharap supaya Konferensi Asia-Afrika di Bandung dijadikan permulaan jang penting bagi negeri² Asia-Afrika dalam membikin sedjarahnya sendiri setjara kolektif, sebagai sumbangan kedua benua ini kepada perdamaian dan peradaban dunia.

Saja yakin, djika semua negeri setia kepada 5 prinsip ko-existensi setjara damai jang terkenal itu, maka akan terbuka kemungkinan² jang tidak terbatas untuk bekerjasama dilapangan politik, ekonomi, ilmu dan kebudajaan antara negeri² Asia dan Afrika dan antara negeri² diseluruh dunia. Kejakinan inilah jang mendjadi dasar harapan² saja.

Artikel ini adalah pidato kawan Aidit pada ulangtahun ke-35 PKI, tgl. 23 Mei 1955. Dalam artikel ini diuraikan sedjarah singkat perkembangan PKI, sedjarah berdirinya sampai tahun 1955 jang dinjatakan sebagai sedjarah jang banyak mengalami pergolakan, banyak pengorbanan, tetapi sebagai sedjarah jang heroik. Meskipun didjelaskan setjara singkat, tapi karena telah mentjakup soal² jang pokok, tulisan ini sudah merupakan bantuan jang berharga untuk mengetahui sedjarah Partai. Djuga dianalisa mengenai kegagalan Revolusi Agustus 1945 dan disimpulkan bagaimana kita seharusnya memimpin Revolusi Agustus 1945 pada waktu itu.

Ditandaskan tentang mutlaknja Partai dengan sekuat tenaga bekerja untuk memperluas dan memperkuat front persatuan nasional serta untuk pembangunan dan pembolsjewikan dirinya. Selandjutnja ditegaskan bahwa kedua tugas pokok Partai itu berhubungan erat satu sama lain.

LAHIRNJA PKI DAN PERKEMBANGANNJA

Partai Komunis Indonesia (PKI) dibentuk pada tanggal 23 Mei 1920. Djadi tanggal 23 Mei tahun 1955 ini adalah ulang-tahun PKI jang ke-35.

Lahirnja PKI 35 tahun jang lalu adalah lahirnja satu Partai klas buruh Indonesia. Perkembangan Partai ini adalah perkembangan sedjarah klas buruh Indonesia dalam memimpin kaum tani dan massa Rakjat lainnja dalam perdjungan perwira melawan imperialisme dan kakitangannja, dalam perdjungan untuk menumbangkan kekuasaan reaksioner dan mendirikan kekuasaan Rakjat jang bersendikan persekutuan majoritet dari Rakjat, jaitu persekutuan kaum buruh dan tani. Hanja kekuasaan Rakjat jang demikian ini memungkinkan tertjapainja Indonesia sosialis dikemudian hari.

Sedjarah 35 tahun PKI bukanlah sedjarah jang tenang dan damai, tetapi sedjarah jang mengalami banjak pergolakan, banjak marabahaja, banjak kesalahan dan banjak pengorbanan. Tetapi djuga sedjarah jang heroik, jang gembira, jang banjak peladjaran dan jang mentjatat sukses².

Perkembangan PKI selama 35 tahun dapat dibagi sebagai berikut:

- I. Pembentukan Partai Dan Perdjungan Melawan Teror Putih Pertama (1920 — 1926).
- II. 20 Tahun Dibawah Tanah Dan Front Anti-fasis (1926 — 1945).
- III. Revolusi Agustus dan Perdjungan Melawan Teror Putih Kedua (1945 — 1951).
- IV. Peluasan Front Persatuan Dan Pembangunan Partai (1951 —).

Pembentukan Partai Dan Perdjungan Melawan Teror Putih Pertama (1920 — 1926)

PKI adalah sintese dari gerakan buruh Indonesia dengan Marxisme-Leninisme. PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 bukanlah sebagai sesuatu jang kebetulan, tetapi sesuatu jang objektif. PKI lahir dalam zaman imperialisme, sesudah di Indonesia ada klas buruh, sesudah di Indonesia dibentuk serikatburuh² dan dibentuk ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereniging), sesudah Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia tahun 1917. PKI adalah anak zaman jang lahir pada waktunja.

Bahwa lahirnja PKI karena keharusan zaman mendjadi djelas dari tulisan kawan Stalin dalam bukunja „*Dasar² Leninisme*” sbb.: „*Imperialisme jalah eksploitasi jang paling tidak kenal malu dan penindasan jang paling tidak berperikemanusiaan terhadap beratus² djuta manusia jang mendiami koloni² jang luas dan negeri² jang tergantung. Tudjuan eksploitasi dan penindasan ini jalah untuk mendapat keuntungan² luarbiasa. Tetapi dalam mengexploitasi negeri² ini imperialisme terpaksa membikin djalan² kereta-api, pabrik² dan perusahaan² disitu, mentjiptakan pusat² industri dan perdagangan. Timbulnja suatu klas kaum proletar, muntjulnja inteligensia bumiputera, bangunnja kesadaran nasional, tumbuhnja gerakan untuk kemerdekaan — demikianlah akibat² jang tidak dapat dihindari dari 'politik' ini. Pertumbuhan gerakan revolusioner disemua koloni dan negeri² tergantung dengan tidak ada ketjualinja membuktikan dengan djelas kenyataan ini. Keadaan ini adalah penting bagi proletariat karena ia dengan radikal melemahkan kedudukan kapitalisme dengan mengubah koloni² dan negeri² tergantung dari tjadangan² imperialisme mendjadi tjadangan² revolusi proletar.”*

Apa jang dikatakan oleh kawan Stalin ini sepenuhnya sesuai dengan apa jang terdjadi di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Berhubung dengan penanaman kapital di Indonesia pada permulaan abad ke-20 meningkat dengan tjepat, kapital kolonial terpaksa mengadakan perubahan besar dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Terpaksa diadakan industri² untuk mengerdjakan bahan²

mentah seperti gula dan karet, terpaksa dibikin pelabuhan², dja-lan² kereta-api dan bengkel² reparasi. Djadi, walaupun imperialisme berusaha mempertahankan hubungan feodal, tidak bisa di-tjegah bahwa tendens kapitalis djuga merasuk ke-tengah² masja-rakat Indonesia. Dengan demikian timbullah klas² baru dalam masjarakat Indonesia, antara lain klas proletar. Ini merupakan dasar baru untuk perdjjuangan kemerdekaan Indonesia, dan atas dasar baru inilah berdirinja PKI. Pemberontakan² kaum tani jang tidak teratur dan terus-menerus mengalami kekalahan, sekarang diganti oleh perdjjuangan proletariat jang terorganisasi dan jang memimpin kaum tani dan klas² revolusioner lainnja.

Bahwa lahirnja PKI didahului oleh berdirinja serikatburuh² dan ISDV dapat diterangkan sbb.: dalam tahun 1905 berdiri serikatburuh kereta-api jang bernama SS-Bond. Dalam tahun 1908 berdiri VSTP (Vereniging van Spoor- en Tramweg Personeel), suatu serikatburuh kereta-api jang militan. Tetapi kemadjuan kesadaran klas buruh Indonesia sudah menghendaki organisasi jang tidak hanya membatasi diri pada perdjjuangan serikatburuh. Bulan Mei 1914 di Semarang berdirilah ISDV, organisasi politik jang menghimpun intelektuil² revolusioner Indonesia dan Belanda jang bertudjuan menjebarkan Marxisme dikalangan kaum buruh dan Rakjat Indonesia. ISDV inilah jang pada tanggal 23 Mei 1920 melebur diri mendjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mengenai Revolusi Sosialis Oktober Besar tahun 1917 jang mendorong berdirinja PKI saja hanya hendak memindjam per-kataan kawan Mau Tje-tung sbb.:

„Salvo Revolusi Oktober menjedarkan kita akan Marxisme-Leninisme. Revolusi Oktober membantu orang² progresif di Tiongkok dan diseluruh dunia untuk menerima pandangan dunia proletar sebagai alat meramalkan masadepan daripada suatu nasion dan memikirkan kembali masalah²nja sendiri.”

Dengan berdirinja PKI teranglah bahwa orang² progresif Indo-nesia tidak ketinggalan dalam menjambut salvo Revolusi Oktober jang besar itu. Dengan perkataan lain, orang² progresif Indonesia dan massa Rakjat Indonesia jang revolusioner tepat pada waktu-nja ikut memperkuat front revolusioner baru jang menentang impe-rialisme dunia. Dengan ini perdjjuangan untuk kemerdekaan Indo-

nesia mendjadi bagian jang tidak bisa dipisahkan dari perdjjuangan proletariat sedunia untuk menghantjurkan kapitalisme.

Tentang tugas kaum Komunis Indonesia sudah djelas dari se-ruan Lenin bulan November 1919 kepada kaum Komunis dari nasion² Timur sbb.:

„Dihadapanmu”, kata Lenin, „terletak suatu tugas jang tidak pernah dihadapi oleh kaum Komunis diseluruh dunia. Tugas ini ialah dengan bersandar pada teori dan praktek umum dari Ko-munisme, kamu harus menjesuaikan dirimu dengan keadaan² isti-mewa jang tidak terdapat di-negeri² Eropa dan hendaknja tja-kap mengenakan teori dan praktek ini pada keadaan², dimana massa jang pokok adalah tani, dan masalah perdjjuangan jang perlu dipetjahkan ialah masalah perdjjuangan jang bukan me-lawan kapital, melainkan melawan sisa² dari Zaman Tengah.”

Dari seruan Lenin ini djelas bahwa kaum Komunis di Timur, djadi djuga kaum Komunis Indonesia, tidak hanya harus menjan-darkan diri pada „teori dan praktek umum dari Komunisme”, tetapi djuga harus menjesuaikan diri dengan „keadaan² istimewa jang tidak terdapat di-negeri² Eropa”, dan dengan ini jang dimak-sudkan Lenin ialah kaum tani.

PKI adalah Partai dari klas jang baru, jaitu klas buruh, jang diperlukan untuk memikul pertanggungandjawab sebagai pemim-pin. Apa sebab klas buruh memikul pertanggungandjawab sebagai pemimpin? Klas buruh Indonesia walaupun djumlahnja tidak banjak (kira² 6.000.000 penerima upah dan diantaranya kira² 500.000 buruh modern atau proletariat), tapi ia berlainan dengan kaum tani, karena klas buruh mewakili kekuatan produktif jang baru; klas buruh djuga tidak seperti klas burdjuis, sebab klas buruh mempunjai tekad perdjjuangan jang konsekwen, karena klas ini menderita tiga matjam tindasan, jaitu tindasan imperialisme, feo-dalisme dan kapitalisme. Karena lapangan pekerdjaannja klas buruh adalah klas jang paling berdisiplin, dan karena tidak me-miliki alat produksi klas buruh adalah klas jang paling konsekwen dan tidak individualistis. Oleh karena itulah klas buruh, walaupun djumlahnja tidak banjak, harus memikul pertanggungandjawab memimpin.

Berdirinja PKI, jang kemudian terkenal sebagai kampiun anti-

imperialisme Belanda, tidak hanya disambut dengan hangat oleh kaum buruh dan kaum tani Indonesia, tetapi juga oleh golongan² Rakjat lainnja. Djuga dari kalangan massa tentara dan matros PKI mendapat sambutan. PKI berkembang sangat tjepat.

Dalam waktu jang tidak lama kaum Komunis sudah mempunjai pengaruh jang besar didalam PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) jang kongresnja dalam bulan Agustus 1920 di Semarang dihadiri oleh 22 serikatburuh dengan anggota seluruhnja 72.000. Pengaruh kaum Komunis berkembang terutama dengan melalui VSTP jang militan. Ini adalah permulaan tradisi PKI jang baik dalam gerakan buruh.

Dalam tahun 1920 di Djawa dan di Sumatera terdjadi pemogokan², jang umumnja berachir dengan kemenangan kaum buruh. Kemenangan² ini memberikan semangat dan kegembiraan berdjua-ang pada kaum buruh, mendidik kaum buruh akan pentingnja organisasi dan disiplin, dan membukakan pada kaum buruh dan Rakjat umumnja kebobrokan peraturan perburuhan kolonial dan pemerintah kolonial.

Kemadjuan² jang ditjapai oleh gerakan buruh membikin kuatir pemerintah, dan jang lebih menguatirkan lagi, bahwa pengaruh Komunis makin besar. Pemerintah berusaha mempengaruhi Serikat Islam (SI) dan mempertadjam pertentangan antara kaum Komunis (PKI) dengan SI. Aliran² reformis dalam PPKB disokong oleh pemerintah Belanda dan dengan demikian mempertadjam pertentangan antara aliran revolusioner dan aliran reformis.

Dalam Kongres PKI di Kota Gede, Djokjakarta, bulan Desember 1924 ditjatat bahwa PKI mempunjai 38 Seksi jang meliputi 1.140 anggota, sedangkan Serikat Rakjat, „onderbouw” (1) PKI, mempunjai 46 Seksi dan meliputi 31.000 anggota. Djumlah anggota PKI 1.140 dalam tahun 1924 adalah sangat banjak djika dibandingkan dengan anggota Partai Komunis Tiongkok jang hanya berdjumlah 900 sebelum Pergerakan „30 Mei” tahun 1925.

Ini adalah bukti bahwa PKI berkembang dengan tjepat walaupun mendapat rintangan² jang besar dari pemerintah kolonial Belanda. Tjepatnja perkembangan Serikat Rakjat menunjukkan sambutan kaum tani jang hangat terhadap PKI, karena keanggotaan Serikat Rakjat terutama terdiri dari kaum tani.

Tetapi simpati jang luas dari massa dan anggota Partai jang banjak tidak dapat dikonsolidasi oleh Partai. Partai memang telah berbuat jang penting dengan membangunkan semangat anti-imperialisme Belanda dikalangan Rakjat, tetapi Partai tidak mampu mengkonsolidasi apa jang sudah ditjapainja.

Kesalahan pokok pemimpin² PKI ketika itu ialah bahwa mereka telah mendjadi mangsa dari sembojan² ke-kiri²an, tidak berusaha keras untuk mendjelaskan keadaan, mau memetjahkan semua soal dengan satu kali pukul seperti: melikwidasi feodalisme, melepaskan diri dari Belanda, menghantjurkan semua kaum imperialis, menggulingkan pemerintah jang reaksioner, melikwidasi kaum tani kaya, melikwidasi kaum burdjuis nasional. Dengan sendirinja, akibat semua ini ialah timbul persatuan diantara musuh jang sedjati dengan jang bisa mendjadi musuh untuk bangkit melawan Partai. Ini berakibat Partai mengisolasi diri sendiri dan ini sangat melemahkan Partai. Partai tidak tjukup mengarahkan perhatian anggota²nja kepada pekerdjaan² praktis jang ketjil², jang remeh² jang ada hubungannja dengan kebutuhan se-hari² dari kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektuil pekerdja. Padahal hanya disini, dalam pekerdjaan ini, Partai bisa mempersatukan massa pekerdja jang luas disekeliling Partai. Sudah tentu pekerdjaan ini bukannya pekerdjaan jang menjenangkan atau enak dan tanpa kesukaran². Tetapi, djalan lain tidak ada untuk mengeratkan hubungan Partai dengan massa pekerdja.

Sebagaimana dikatakan dalam „Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”, jaitu laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V PKI bulan Maret 1954, dalam tingkat pertama ini:

„Partai masih gelap samasekali tentang perlunya bersatu dengan burdjuasi nasional, dimana slogan Partai ialah 'sosialisme sekarang djuga', 'Sovjet Indonesia', dan 'diktatur proletariat'. Penjelewanan kekiri daripada Partai ini dikritik setjara tepat dan kena oleh Stalin dalam pidatonja dimuka peladjar² Universitas Rakjat Timur pada tanggal 18 Mei 1925, dimana dikatakan-
nja bahwa penjelewanan kekiri ini mengandung bahaya mengisolasi Partai dari massa dan mengubah Partai mendjadi sekte.”

Penjakit „Komunisme 'Sajap Kiri' ” jang menghinggapi Partai memang telah mengubah Partai mendjadi suatu sekte, telah meng-

isolasi Partai dari massa Rakjat yang luas, dan ini memudahkan kekuasaan kolonial yang ganas untuk menghantjurkan Partai. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh kawan Stalin bahwa „Perjuangan yang teguh melawan penjeleewangan ini adalah sjarat yang perlu untuk melatih kader² yang sungguh² revolusioner bagi tanah² djadjahan dan negeri² tergantung di Timur”. Kebenaran perkataan kawan Stalin ini sangat dirasakan dalam perkembangan PKI selanjutnya.

Mengenai pembangunan Partai ketika itu belum mungkin mendapat perhatian yang sungguh² dari pimpinan Partai. Pendidikan teori Marxisme-Leninisme tidak diadakan didalam Partai, elemen² oportunis menjelundup dan berkuasa didalam pimpinan Partai, kritik dan selfkritik serta tjara pimpinan kolektif belum dikenal oleh Partai. Kenjataan ini menjebabkan Partai sangat lemah dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Dalam keadaan dimana Partai terisolasi dari massa dan dalam keadaan dimana organisasi Partai masih sangat lemah, krisis makin memuntjak di Indonesia, penghidupan Rakjat makin lama makin merosot dan perlawanan² Rakjat yang tidak terorganisasi terhadap alat² pemerintah makin banyak. Dalam keadaan demikian inilah provokasi² dari pemerintah kolonial Belanda datang ber-tubi² dalam bentuk² pemetjatan terhadap kaum pemogok, penangkapan terhadap kaum tani, pembubaran sekolah² yang didirikan oleh PKI atau Serikat Rakjat, pelarangan terhadap surat kabar² kaum buruh, penangkapan terhadap pemimpin² kaum buruh, dll. Terutama untuk menghadapi kaum tani, Belanda membikin gerombolan² teroris seperti misalnja „Sarekat Hedjo” di Priangan. Semuanya ini menjebabkan timbulnja pemberontakan Rakjat tanggal 12 November 1926 di Djawa dan permulaan 1927 di Sumatera. Setelah pemberontakan ini terdjadi PKI tampil kedepan untuk sedapat mungkin memberikan pimpinannya. Sikap PKI yang segera memberikan pimpinan kepada pemberontakan Rakjat ini adalah sikap yang tepat.

Selama dan sesudah pemberontakan itu kelemahan² Partai menjadi sangat menondjol, misalnja tidak ada kebulatan dalam pimpinan Partai mengenai pemberontakan itu, tidak ada persiapan untuk menjelamatkan kader² dan pimpinan Partai, tidak ada koordinasi antara aksi disatu tempat dengan aksi ditempat lain, tidak

ada hubungan antara aksi didesa dengan aksi dikota, dll. Selain daripada itu ada lagi orang seperti Tan Malaka, pada waktu itu adalah salahseorang pemimpin PKI, yang tidak bertindak tegas sebelum pemberontakan dimulai, tetapi menjalahkan pemberontakan sesudah pemberontakan terdjadi. Lebih daripada itu, dia dengan kliknja terang²an melakukan praktek trotskis dengan mendirikan partai baru, Pari (Partai Republik Indonesia), didalam keadaan dimana PKI sedang menghadapi teror putih dari pemerintah kolonial dan kakitangannya. Perpetjahan didalam PKI ini lebih menjulitkan pekerdjaan PKI yang sudah sulit itu dan memudahkan politik petjahbelah Belanda didalam PKI dan didalam gerakan kemerdekaan nasional pada umumnya.

Ribuan anggota dan fungsionaris PKI di-kedjar² dan dihukum, diantaranya ada yang digantung. Banjak yang dibuang ke-tengah² rawa Digul di Irian. Hanya beberapa orang pemimpin PKI berhasil menjelamatkan diri keluar negeri, diantaranya anggota Central Comite PKI, kawan Musso.

Anggota² dan fungsionaris² PKI, walaupun mereka belum lama menjadi anggota Partai, umumnya mempunyai semangat Partai yang kuat. Dengan tiada menjesal dan dengan senjuman dibibir mereka menudju ketiang gantungan, menerima putusan hukuman pendjara atau pengasingan ketanah pembuangan. Politik PKI yang konsekwen anti-imperialisme Belanda dan sikap yang gagahberani dari anggota² dan fungsionaris² PKI dalam menghadapi kekuasaan kolonial ketika itu mengangkat prestise politik PKI dimata pedjuang² kemerdekaan yang sedjati dan dimata Rakjat Indonesia. Ini membesarkan kepertjajaan dan ketjintaan Rakjat tertindas Indonesia kepada PKI.

Pemberontakan tahun 1926 berachir dengan kekalahan PKI dan Rakjat Indonesia yang revolusioner. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilupakan, bahwa pemberontakan ini telah menundjukkan kepada Rakjat Indonesia, bahwa Belanda bisa dibikin kalangkabut, bahwa kekuasaan kolonial dapat digoangkan, bahwa kekuasaan ini bukan kekuasaan yang mutlak. Oleh karena itu pemberontakan tahun 1926 mempunyai arti yang luarbiasa besarnya dalam meningkatkan kesadaran politik Rakjat Indonesia.

Kesimpulan dari semuanya ialah, bahwa pimpinan PKI belum

mampu memperpadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia, karena pimpinan PKI belum memiliki teori Marxisme-Leninisme dan belum mempunyai pengertian tentang keadaan sedjarah dan masjarakat Indonesia, tentang tanda² istimewa revolusi Indonesia dan tentang hukum² revolusi Indonesia. Akibatnja ialah, bahwa Partai tidak mengetahui tuntutan pokok jang objektif dari Rakjat Indonesia, tuntutan jang menghendaki lenjapnja imperialisme dan feodalisme serta terwujudnja kemerdekaan nasional, demokrasi dan kebebasan. Selanjutnja pimpinan Partai tidak menginsjafi bahwa untuk mentjapai tuntutan pokok ini harus digalang front persatuan jang luas antara klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil kota dan burdjuasi nasional, jang bersendikan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh. Dari tidak adanja pengertian tentang semuanya ini timbullah dikalangan pimpinan Partai ketika itu fikiran² keliru jang mengira bahwa „kaum tani tidak bisa dipertjaja dalam semua aksi“, bahwa „kaum pertengahan dan kaum terpeladjar sudah mendjadi alat kaum modal“, bahwa PKI harus „anti semua kapitalisme“, bahwa sembojan PKI adalah „sosialisme sekarang djuga“, „Sovjet Indonesia“, „diktatur proletariat“ dsb.

Walaupun dalam tingkat ini organisasi Partai berkembang, tetapi Partai tidak diperkokoh. Anggota² dan kader² Partai tidak diperteguh dalam ideologi dan politik, dan mereka tidak mendapat pendidikan Marxisme-Leninisme jang diperlukan. Elemen² jang aktif didalam Partai tidak dapat didjadi tulang punggung Partai. Dalam keadaan genting menghadapi provokasi dan teror putih pertama elemen² jang berkuasa didalam pimpinan Partai tidak dapat memimpin seluruh Partai untuk menjelamatkan Partai.

Pokoknja, PKI dalam tingkat pertama ini tidak berpengalaman dalam dua soal pokok, jaitu (1) dalam soal front persatuan dan (2) dalam soal pembangunan Partai.

II

20 Tahun Dibawah Tanah Dan Front Anti-Fasis (1926 — 1945)

Sesudah pemberontakan tahun 1926 PKI dinjatakan dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Berhubung dengan PKI tidak

bisa lagi bekerdja legal dan karena tertarik oleh slogan² kiri, massa revolusioner jang tadinja dipimpin oleh PKI menjambut partai nasionalis kiri, PNI (Partai Nasional Indonesia), jang didirikan dalam tahun 1927. Kader² dan anggota² PKI banjak jang memasuki partai kiri ini disamping memasuki organisasi² massa. Tetapi kegiatan² kader² dan anggota² PKI ketika itu tidak dipimpin baik, karena PKI belum mempunyai pimpinan sentral jang baru.

Sedjak kekalahan pemberontakan tahun 1926 mulailah masa menurun dalam gerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda ternjata tidak hanja menindas PKI dan organisasi² massa revolusioner jang berada dibawah pimpinan PKI, tetapi djuga menindas PNI, dengan melakukan matjam² provokasi, merintang² segala aktivitetnja dan mengasingkan pemimpin²nja.

Kesempatan dimana PKI dan partai nasionalis kiri dipukul oleh pemerintah kolonial, digunakan oleh kaum nasionalis kanan jang mempunyai kekuatan pokok dalam Partai Bangsa Indonesia (PBI)(2) untuk mempererat kerdjasamanja dengan pemerintah Belanda. Mereka memusatkan pekerdjaannja pada apa jang mereka namakan pekerdjaan „positif“, jang maksudnja ialah mendirikan koperasi², sekolah², perkumpulan² dagang, dsb. Sampai batas² tertentu kaum nasionalis kanan berhasil meluaskan pekerdjaannja di beberapa daerah sampai ke-desa². Belanda suka menamakan mereka „kaum nasionalis jang sehat“, karena aktivitetnja tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah Belanda, dan oleh karena itu djuga mendapat fasilitas² jang diperlukan dari pemerintah Belanda.

Tetapi masa menurun dalam gerakan kemerdekaan tidak memakan waktu jang pandjang. Krisis dunia jang diikuti oleh kemelatan Rakjat banjak, oleh penghematan, kenaikan padjak, massa onslah, dsb. menghalangi kerdjasama jang tenteram antara kaum nasionalis kanan dengan pemerintah Belanda. Suara² radikal dari kalangan kaum buruh, kaum tani dan intelektuil makin lama makin njaring. Zaman krisis ini terkenal dengan nama „zaman malaise“, atau kaum tani Indonesia menamakannja „zaman meleset“.

Laksana petjutan halilantar dipanas terik terdjadilah dalam bulan Februari 1933 pemberontakan anak kapal „Zeven Provincien“ jang mendapat sambutan hangat dari kaum buruh dibanjak

negeri. Kedjadian ini merupakan peristiwa jang penting dalam membangunkan kembali semangat perlawanan Rakjat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Kemudian dalam bulan Djuli 1933 mengantjam pemogokan kereta-api di Djawa, jang dengan sangat sulit dapat ditjegah oleh pemerintah Belanda dengan bantuan kaum reformis Indonesia.

Di-daerah² timbul perlawanan² Rakjat, kebanyakannja sebagai tindakan² dan aksi² perseorangan, sebagai bukti bahwa semangat perlawanan sedang menaik. Penindasan Belanda terhadap aksi² kaum buruh dan perlawanan² Rakjat mendjadi dipermudah, karena PKI belum berhasil menjusun kembali pimpinan sentralnja setjara baik.

Sedjak tahun 1932 PKI jang bekerdja dibawah tanah berdasarkan aktivitetnja pada program 18 fasal, jang antara lain berbunyi: kemerdekaan penuh bagi Indonesia, pembebasan segera semua tahanan politik dan melikwidasi konsentrasikamp Boven Digul, hak mogok dan hak demonstrasi, upah sama buat pekerdjaan jang sama, berdjuang melawan tiap² penurunan upah, sokongan negara untuk kaum penganggur, tanah untuk kaum tani dan sita tanah kaum imperialis, tuantanah dan lintahdarat, menentang perang imperialis jang baru, dsb. Program ini dibuat sebelum kaum fasis (nasional-sosialis) berkuasa di Djerman.

Dalam bulan Maret 1933 kaum fasis Djerman dibawah pimpinan Hitler naik panggung pemerintahan. Kawan Stalin dalam Kongres ke-17 Partai Komunis Uni Sovjet antara lain mengatakan bahwa kemenangan fasisme di Djerman ini

„..... tidak boleh hanya dipandang sebagai gedjala kelemahan klas buruh dan sebagai akibat pengchianatan kaum sosial demokrat terhadap kaum buruh, jang memberi djalan untuk fasisme; ia djuga harus dipandang sebagai gedjala kelemahan burdjuasi, sebagai gedjala kenyataan bahwa burdjuasi sudah tidak mampu lagi memerintah dengan metode² parlementerisme dan demokrasi burdjuis jang lama, dan, sebagai konsekwensinja, terpaksa dalam politik dalamnegerinja menempuh djalan metode pemerintahan jang teroristis — ia harus dianggap sebagai gedjala kenyataan bahwa burdjuasi sudah tidak mampu lagi menemukan djalan keluar dari keadaan sekarang dengan

berdasarkan politik luarnegeri jang damai, dan, sebagai konsekwensinja, ia terpaksa mengambil djalan menudju kepolitik perang.”

Dengan perkataan lain, untuk mengatasi krisis ekonomi jang sangat dalam, untuk mengatasi krisis umum kapitalisme jang bertambah tadjam dan massa Rakjat pekerdja jang mendjadi makin revolusioner, burdjuasi jang berkuasa mentjari pembelaan pada fasisme.

Dengan fasisme kaum imperialis berusaha melemparkan beban krisis *seluruhnja* pada pundak Rakjat pekerdja. Mereka berusaha memetjahkan masalah pasar dengan djalan memperbudak nasion² jang lemah, dengan lebih mengintensifkan penindasan kolonial dan mem-bagi² kembali dunia dengan mengadakan perang baru. Mereka mau merintangi pertumbuhan kekuatan² revolusi dengan menghantjurkan gerakan revolusioner kaum buruh dan tani serta dengan mengadakan serangan militer pada Uni Sovjet — benteng proletariat dunia.

Kawan Dimitrov dalam pidatonja dimuka Kongres ke-VII Komintern dalam bulan Agustus 1935 antara lain mengatakan, bahwa:

„Fasisme Hitler bukan hanya nasionalisme burdjuis, tetapi adalah sovinsisme kebinatangan. Ia adalah sistim pemerintahan gangsterisme politik, suatu sistim provokasi dan penjiksaan jang dilakukan pada kaum buruh dan elemen² revolusioner dari kaum tani, burdjuasi ketjil dan inteligensia. Ia adalah tjara barbar dan kebinatangan Zaman Tengah, ia adalah agres² jang tak terkendalikan dalam hubungan dengan nasion² lain.”

Perubahan situasi internasional dengan berkuasanja kaum fasis di Djerman berpengaruh besar pada keadaan politik di Indonesia. Uni Sovjet mengarahkan perdjjuangannja terutama pada pembentukan front perdamaian terhadap negara² agresor, dan Komintern dalam kongresnja bulan Agustus 1935 di Moskow menerima sebuah program jang ditujukan untuk membentuk front Rakjat dan pemerintah Rakjat guna menentang perang dan fasisme. Ini berarti diperlukan kerdjasama jang lebih luas antara kaum Komunis dengan elemen² burdjuis jang demokratis.

Untuk menjampaikan garis politik anti-fasis ini, dalam tahun

1935 kawan Musso kembali ke Indonesia dari luarnegeri. Kawan Musso tidak hanya menjampaikan garis politik yang baru ini, ia juga berhasil menghimpun kembali kader² PKI dan membangun Central Komite PKI yang baru. Tetapi kawan Musso tidak bisa lama berada di Indonesia, ia harus segera meninggalkan Indonesia lagi karena djdjaknja sudah ditjium oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian kawan Musso tidak sempat berbuat banyak untuk pembangunan Partai, sehingga pemimpin² PKI harus bekerdja dengan tidak ada pegangan yang kuat untuk membangun Partai tipe Lenin.

Atas inisiatif beberapa orang nasionalis kiri dan beberapa orang Komunis didirikan organisasi Rakjat yang legal dengan nama *Gerindo* (Gerakan Rakjat Indonesia). Berdirinja Gerindo memberikan kekuatan baru kepada gerakan kemerdekaan nasional dan gerakan anti-fasis. Atas inisiatif Gerindo dan beberapa partai demokratis lainnja, telah dibentuk *Gapi* (Gabungan Politik Indonesia), jaitu front persatuan dari partai² yang bertujuan terbentuknja parlemen bagi Indonesia dan yang menawarkan kerdjasama dengan pemerintah Belanda untuk melawan fasisme, terutama fasisme Djepang yang mengantjam Rakjat Asia.

Tanggal 23-25 Desember 1939 Gapi mengadakan *Kongres Rakjat Indonesia* di Djakarta yang dihadiri juga oleh organisasi² yang bukan partai politik seperti serikatburuh², organisasi² sosial, dsb., dimana soal parlemen mendjadi atjara yang terutama. Adanja parlemen bagi Indonesia dianggap penting oleh Kongres sebagai sjarat untuk membangunkan kekuatan Rakjat dalam menghadapi bahaya fasisme. Kemudian Kongres Rakjat Indonesia, atas putusan pemimpin²nja, didjadikan *Madjelis Rakjat Indonesia* yang dianggap mewakili segenap Rakjat Indonesia. Ini adalah persiapan untuk satu parlemen. Tetapi kenyataan ini dianggap sepi oleh pemerintah Belanda. Adjakan Gapi dan Madjelis Rakjat Indonesia kepada Belanda untuk bekerdjasama dalam menghadapi serangan fasisme Djepang tidak disambut oleh Belanda sampai saat Belanda menjerah pada Djepang tanggal 9 Maret 1942.

Kerdjasama yang luas antara pemimpin-pemimpin partai² dan organisasi², tetapi tidak didukung oleh massa Rakjat yang luas, telah menyebabkan gagalnja tuntutan untuk mendapatkan par-

lemen dan telah menyebabkan gagalnja pergerakan Rakjat memaksa pemerintah Belanda untuk ambil bagian yang aktif dalam perdjuangan anti-fasis ber-sama² dengan Rakjat Indonesia. Ini disebabkan karena PKI belum merupakan Partai yang berakar dimassa, yang dapat menghimpun dan menggerakkan massa Rakjat luas, terutama kaum buruh dan kaum tani. Resolusi² Gapi dan Madjelis Rakjat Indonesia tidak pernah diikuti oleh aksi² massa yang berupa demonstrasi atau aksi² lainnja, yang merupakan tekanan yang berarti pada pemerintah kolonial Belanda.

Akibat front anti-fasis yang tidak tjukup kuat di Indonesia, balatentara Djepang dapat menduduki Indonesia dengan tiada perlawanan, tidak hanya tiada perlawanan dari tentara Belanda, tetapi juga dari gerakan Rakjat. Materiil maupun moril Rakjat kurang tjukup disiapkan dalam menghadapi fasisme Djepang. Kelanjutannja jalah, bahwa pada permulaan PKI berada dalam kedudukan terisolasi dalam perlawanannja terhadap fasisme Djepang. Pada permulaan pendudukan Djepang anggota² Central Komite PKI dan kader² penting PKI banyak yang ditangkap oleh Djepang, dan diantaranya mendapat hukuman mati.

Beberapa bulan sesudah pendudukan Djepang, berdasarkan pengalamannja sendiri Rakjat Indonesia baru sadar akan kekejaman dan kebinatangan fasisme Djepang. Semangat anti-Djepang makin lama makin meluas di-tengah² Rakjat, organisasi² anti-fasis tumbuh di-mana², dan banyak yang berada dibawah pimpinan anggota² dan kader² PKI yang ketika itu diantaranya banyak yang hidup dalam buruan mata² Djepang. Penguberan terhadap kaum Komunis dilakukan oleh Djepang dengan tidak henti²nja. Karena tidak rapinja organisasi, sering juga Djepang menangkap kader² PKI yang penting. Tetapi, walaupun demikian, keganasan Djepang tidak memadamkan perlawanan Rakjat. Di-mana² timbul pemberontakan seperti di Singaparna, Indramaju, Semarang, dll. Juga dikalangan tentara Peta (Pembela Tanah Air) timbul pemberontakan², dan yang sangat terkenal jalah pemberontakan tentara Peta di Blitar, Kediri.

Mengenai front anti-fasis sebelum dan sesudah Djepang menduduki Indonesia, dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V PKI antara lain dikatakan sbb.:

„Front anti-fasis (sebelum pendudukan Djepang, DNA) tidak hanya berhasil menarik burdjuasi nasional, tetapi djuga sebagian dari burdjuasi komprador merupakan tambahan kekuatan dalam front anti-Djepang. Tetapi setelah balatentara Djepang menduduki Indonesia, sebagian besar burdjuasi nasional dan boleh dikatakan semua burdjuasi komprador mendjalankan politik bekerdjasama dengan Djepang. Burdjuasi nasional mendjalankan politik kerdjasama dengan Djepang, setelah mereka melihat bahwa kekuatan Rakjat melawan Djepang tidak begitu kuat dan mereka mempunyai illusi bahwa Djepang akan memberikan 'kemerdekaan' kepada Indonesia.”

Tetapi dengan meningkatnja semangat anti-Djepang, dan apalagi setelah terdjadi pemberontakan² kaum tani dan tentara, makin lama makin kendor kesetiaan kakitangan Djepang kepada tuannja. Dan achirnja tidak sedikit orang² jang berkedudukan penting mengadakan hubungan² dengan gerakan anti-Djepang dibawah tanah. Golongan mahasiswa dan peladjar Indonesia djuga ambil bagian jang penting dalam mengadakan perlawanan² terhadap Djepang.

Kesimpulan dari semuanja jalah, bahwa walaupun semangat anti-Djepang dan anti-Belanda dari Rakjat meluap, walaupun prestise politik Partai sangat tinggi karena politik anti-fasisnja jang konsekwen, walaupun situasi didalam dan diluarnegeri sangat baik untuk suatu revolusi, tetapi tugas untuk menghadapi revolusi jang meletus dalam bulan Agustus 1945 adalah sangat berat bagi Partai, karena Partai tidak menjimpulkan pengalaman²nja dalam tingkat pertama dan tingkat kedua mengenai front persatuan, dan karena masih tetap tidak berpengalaman dalam soal pembangunan Partai. Disamping itu Partai djuga tidak berpengalaman dalam perdjjuangan bersendjata, sesuatu jang sangat diperlukan bagi Partai jang berada didalam Revolusi.

III

Revolusi Agustus Dan Perdjjuangan Melawan Teror Putih Kedua (1945 — 1951)

PKI berada dalam Revolusi Agustus dalam keadaan dimana belum menjimpulkan pengalaman²nja mengenai front persatuan,

dimana masih tetap tidak berpengalaman dalam pembangunan Partai dan tidak berpengalaman dalam perdjjuangan bersendjata.

Atas desakan massa dengan djurubitjaranja pemimpin² revolusioner jang masih muda², diantaranya terdapat anggota² PKI jang selama pendudukan Djepang memimpin organisasi² dibawah tanah, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 ini adalah pendjelmaan hasrat merdeka Rakjat Indonesia jang selama pendjadjahan Belanda belum pernah padam dan dalam masa pendudukan Djepang hasrat ini bertambah besar.

Kaum buruh, kaum tani, golongan pemuda dan peladjar progresif Indonesia, dengan mengambil tjontoh dari banjak negeri di Eropa jang membebaskan diri dari imperialisme sesudah tentara fasis dikalahkan, serta mendapat inspirasi dari perdjjuangan kemerdekaan jang besar dari Rakjat Tiongkok, mengerti akan kemungkinan² suatu revolusi jang telah ditentukan oleh sedjarah. Pada saat proklamasi dinjatakan, ketjuali tentara Djepang jang sudah kalah, tidak ada pasukan tentara lainnja di Indonesia (ketjuali di Irian Barat). Situasi jang baik ini digunakan setjara tepat oleh Rakjat Indonesia.

Kaum buruh, kaum tani, golongan pemuda dan peladjar progresif dengan gigih mempertahankan Republik Indonesia, mula² melawan tentara Djepang, kemudian melawan tentara Inggeris, dan dalam dua perang kolonial melawan tentara Belanda.

Walaupun perdjjuangan Rakjat Indonesia ini banjak mengalirkan darah patriot² dan walaupun diadakan ber-matjam² pertjobaan militer oleh imperialis Belanda untuk menghantjurkan Republik, tetapi Republik tetap berdiri.

Belanda hanya berhasil dalam usahanja untuk melemahkan Republik dengan menggunakan penasehat² Inggeris dan Amerika serta bantuan kakitangannja orang² Indonesia sendiri, dengan menempuh djalan pandjang, djalan „perundingan setjara damai”, intrik dan provokasi, persetudjuan² jang menguntungkan imperialisme dibawah antjamaan meriam dan bom.

Kaum sosialis kanan dibawah pimpinan Sutan Sjahrir, jang sedjak permulaan revolusi sudah menguasai pemerintahan, adalah pemegang² rol penting dalam melajani politik „perundingan setjara

damai” dibawah antjaman meriam dan bom. Ini dimungkinkan, karena massa Rakjat Indonesia, berhubung dengan penindasan kolonial jang lama, tak dapat mempunyai barisan jang tjukup menguasai adjaran² revolusioner dari Marx, Engels, Lenin dan Stalin.

Revolusi Agustus adalah revolusi front persatuan nasional, dimana pukulan dipusatkan dan ditudjukan pada imperialisme asing dan dimana burdjuasi nasional memberikan sokongannya kepada revolusi.

Mengenai front persatuan nasional selama revolusi (1945-1948) dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V PKI antara lain dikatakan bahwa:

„Burdjuasi nasional kembali masuk kedalam front persatuan setelah melihat bahwa kekuatan Revolusi Rakjat adalah besar. Revolusi Rakjat jang mempunyai kekuatan besar telah membikin burdjuasi nasional pada tahun² permulaan revolusi mempunyai sikap jang teguh.”

Tetapi, dikatakan lebih landjut, „Kelemahan Partai dilapangan politik, ideologi dan organisasi menjebabkan Partai tidak mampu memberikan pimpinan kepada keadaan objektif jang sangat baik ketika itu”.

Mengenai Partai, dalam hubungan dengan burdjuasi nasional ini dikatakan bahwa:

„Dalam revolusi ini Partai telah meninggalkan kebebasannya dalam politik, ideologi dan organisasi dan Partai tidak mementingkan pekerdjaannya dikalangan kaum tani, dan inilah sebab pokok dari kegagalan revolusi. Lemahnya pimpinan revolusi menjebabkan revolusi terus-menerus mengalami kekalahan² dilapangan militer, politik dan ekonomi dan kekalahan² ini telah membikin ragu burdjuasi nasional dan akhirnya mereka memilih fihak kaum komprador dan imperialis. Resolusi 'Djalan Baru Untuk Republik Indonesia' jang disahkan oleh Konferensi PKI bulan Agustus 1948 adalah djalan keluar dari keadaan sulit jang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu. Tetapi pelaksanaan resolusi ini didahului oleh provokasi pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir jang menelorkan 'Peristiwa Madiun'.”

Satu hal jang sangat menguntungkan jalah, bahwa pada per-

mulaan revolusi dapat didatangkan dari Australia dan Eropa buku² teori mengenai Marxisme-Leninisme. Tetapi buku² teori ini ditulis dalam bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggeris dan Belanda, sehingga hanja terbatas sekali kader² jang dapat mempeladjarinja. Pekerdjaan mentendjemahkan buku² teori kedalam bahasa Indonesia sangat kurang mendapat perhatian dari elemen² jang berkuasa didalam pimpinan Partai ketika itu. Tetapi walaupun demikian, buku² teori ini telah memungkinkan lahirnja tulang punggung Partai dari kalangan kader² Partai jang mempunyai kesempatan mempeladjar sendiri buku² ini. Walaupun tidak mungkin dalam djumlah jang banyak, tetapi ini adalah kemungkinan pertama kali bagi PKI untuk melahirkan tulang punggung jang berteori dari kalangannya, dan ini merupakan salahsatu djaminan jang penting untuk perkembangan PKI selanjutnja.

Selama revolusi Partai mempunyai kekuatan² bersendjata, tetapi Partai tidak mampu menguasainya. Setjara tidak teratur kader² Partai mempeladjar ilmu kemiliteran dan ilmu peperangan revolusioner. Beladjar dari perang revolusioner Rakjat Tiongkok, kawan Amir Sjarifuddin, jang beberapa kali mendjabat Menteri Pertahanan dalam pemerintahan, berdjuaug untuk memenangkan fikiran, bahwa perang gerilja adalah salahsatu bentuk perdjuaugan jang tepat untuk memenangkan revolusi. Kawan Amir Sjarifuddin harus berdjuaug keras melawan fikiran² dari pemimpin² militer jang memandang rendah perang gerilja. Disatu fihak kawan Amir Sjarifuddin berhasil memenangkan fikirannya, tetapi difihak lain pelaksanaannya mendapat rintangan² karena ditentang oleh mereka jang menganggap rendah perang gerilja, karena kekurangan kader militer jang mengerti, dan karena dipersulit oleh tidak adanya politik front persatuan dan politik pembangunan Partai jang tepat.

Salahsatu kesalahan pokok Partai dalam beladjar dari revolusi Tiongkok ketika itu ialah, bahwa Partai hanja berusaha untuk mengetahui persamaan antara revolusi Tiongkok dan revolusi Indonesia, tetapi tidak berusaha untuk mengetahui perbedaan², tidak melihat keadaan jang khusus di Indonesia.

Menurut pengalaman di Tiongkok, untuk suatu negeri jang terbelakang seperti Indonesia, peperangan gerilja, pembentukan daerah² gerilja bebas dan pengorganisasian tentara pembebasan

Rakjat dalam daerah² ini adalah satu diantara bentuk perjuangang jang tepat untuk mentjapai kebebasan nasional jang penuh. Tetapi di Indonesia bentuk perjuangang ini tidak mendapat kemungkinan se-luas²nja seperti di Tiongkok. Ini disebabkan oleh karena keadaan² khusus di Indonesia.

Sjarat² jang paling menguntungkan untuk bentuk peperangan gerilja ialah daerah² jang luas, daerah pegunungan dan hutan² jang luas serta jang djauh letaknja dari kota² dan djalan² perhubungan. Keadaan di Indonesia hanja memenuhi sebagian dari sjarat² ini.

Selandjutnja, dari pengalaman kaum Komunis Tiongkok dapat kita ketahui bahwa kaum Komunis Tiongkok mendapat daerah belakang jang bisa dipertjaja hanja setelah mereka mentjapai daerah Tung Pei (Mantjuria) jang berbatasan dengan Uni Sovjet. Setelah mereka mendapatkan Uni Sovjet sebagai daerah belakangnja, Tjiang Kai-sjek tidak bisa lagi mengepung kekuatan² revolusi Tiongkok. Lagi pula setelah bisa menghindarkan diri dari bahaya kepungan musuh, maka kaum Komunis Tiongkok berada dalam kedudukan mengadakan serangan² berentjana terhadap pasukan² Tjiang Kai-sjek.

Revolusi Indonesia tidak mempunyai sjarat² demikian itu. Indonesia adalah negeri jang terdiri dari pulau². Tentara pembebasan Rakjat tidak bisa menjandarkan diri pada negara tetangga jang bersahabat sebagai daerah belakangnja.

Apakah dengan mengemukakan kenyataan² diatas berarti bahwa peperangan gerilja tidak bisa digunakan di Indonesia? Samasekali tidak demikian. Tetapi jang seharusnya kita lakukan, untuk membikin tjara peperangan gerilja lebih efektif dalam keadaan² jang berlangsung di Indonesia, ialah mengkombinasi tjara peperangan gerilja dengan aksi² revolusioner kaum buruh di-kota² jang diduduki oleh musuh, dengan aksi² pemogokan ekonomi dan politik jang bersifat umum. Dalam keadaan² seperti di Indonesia, adalah mempunyai arti jang istimewa pemogokan² kaum buruh disemua lapangan perhubungan, jaitu kereta-api, mobil, lautan, udara, sebab pemogokan² umum oleh proletariat di-lapangan² ini bisa sangat melemahkan musuh revolusi dan dengan demikian berarti memberi bantuan jang kuat kepada perjuangang gerilja. Pekerdjaan didae-

rah pendudukan Belanda jang ditudjukan untuk mengorganisasi kaum buruh dan memimpin aksi² kaum buruh sangat tidak mendapat perhatian kaum Komunis selama Revolusi Agustus.

Selain daripada itu, selama Revolusi Agustus PKI tidak melakukan pekerdjaan jang intensif dikalangan tenaga² bersendjata Belanda jang tidak sedikit terdiri dari anak² kaum tani dan kaum buruh jang bisa ditarik kefihak revolusi. Padahal pekerdjaan revolusioner jang intensif di-tengah² kekuatan bersendjata musuh dapat sangat melemahkan kekuatan musuh dan ini berarti bantuan jang penting kepada perjuangang gerilja.

Djadi, peperangan gerilja selama Revolusi Agustus bisa meluas dan dikonsolidasi djika PKI ketika itu meletakkan pemetjahannja dalam pekerdjaan mengkombinasi tiga bentuk perjuangang, jaitu perjuangang gerilja didesa (terutama terdiri dari kaum tani), aksi² revolusioner oleh kaum buruh di-kota² jang diduduki oleh Belanda dan pekerdjaan jang intensif dikalangan tenaga bersendjata Belanda.

Kekalahan² dalam perjuangang bersendjata dan kendornja semangat revolusioner didalam kekuatan bersendjata senantiasa berakibat mundurnja pekerdjaan front persatuan dan pembangunan Partai. Tanda² kekalahan Revolusi Agustus nampak setelah beberapa bagian dari kekuatan bersendjata, dengan dikendalikan oleh orang² reaksioner, menentang gerakan kaum buruh dan kaum tani.

Dalam keadaan dimana Revolusi Agustus hampir kalah, PKI dalam Konferensinja bulan Agustus 1948, atas usul kawan Musso, mensahkan sebuah resolusi jang bernama „*Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*” sebagai djalan keluar dari keadaan pelik jang dihadapi oleh Republik Indonesia ketika itu.

Resolusi „Djalan Baru” telah mengingatkan Partai akan kewadajiban²nja jang terpenting, jang selama Revolusi Agustus dilalakan atau tidak dikerdjakan samasekali.

Mengenai *front persatuan* dikatakan bahwa selama revolusi „*kaum Komunis telah lalai mengadakan front nasional sebagai sendjata revolusi nasional terhadap imperialisme. Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan front nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum faham sungguh² tentang teknik untuk membentuknja. Beberapa matjam bentuk front nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi se-*

lalu tinggal diatas kertas belaka, hanja berupa konvensi diantara organisasi² atau diantara pemimpin² sadja, sehingga djikalau ada sedikit perselisihan diantara pemimpin² front nasional itu lalu menjebabkan bubarnja. PKI berkejakinan, bahwa pada saat ini Partai klas buruh tidak dapat menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi burdjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerdja bersama dengan partai² lain. Kaum Komunis sudah semestinja harus berusaha mengadakan persatuan dengan anggota² partai² dan organisasi² lain. Satu²nja persatuan sematjam itu jalah front nasional."

Mengenai inisiatif jang harus diambil oleh kaum Komunis dalam membentuk front nasional dikatakan, bahwa inisiatif ini *„sekali-kali tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinja, melainkan PKI harus mejakinkan dengan setjara sabar kepada orang² jang tulus hati, bahwa satu²nja djalan untuk mendapat kemenangan jalah membentuk front nasional jang disokong oleh semua Rakjat jang progresif dan anti-imperialis. Tiap Komunis harus jakin benar², bahwa dengan tidak adanja front nasional kemenangan tidak akan datang."*

Mengenai perdjjuangan bersendjata dikatakan dalam resolusi „Djalan Baru", bahwa perdjjuangan ini harus diutamakan. Perdjjuangan bersendjata harus diutamakan karena imperialis Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernja. Selandjutnja dikatakan bahwa

„Tentara sebagai alat kekuasaan negara jang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader² dan anggota²nja harus diberi pendidikan istimewa jang sesuai dengan kewadajiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela revolusi nasional kita jang berarti pula membela kepentingan Rakjat pekerdja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh Rakjat. Tentara harus dipimpin oleh kader² jang progresif. Dengan sendirinja dan terutama dikalangan kader²nja harus dibersihkan dari anasir² jang reaksioner dan kontra-revolusioner."

Resolusi tsb. mengkritik kelalaian memberikan djaminan kepada anggota² ketentaraan dan kepolisian-negara chususnya, dan kepada

Rakjat pekerdja umumnja (buruh dan pegawai negeri), sehingga menyebabkan terlantarnja nasib mereka.

Mengenai Partai dikatakan bahwa kesalahan pokok dari kaum Komunis jalah telah mengetjilkan rol PKI sebagai satu²nja kekuatan jang seharusnja memegang pimpinan klas buruh dalam mendjalankan revolusi. Berdasarkan kesalahan ini resolusi „Djalan Baru" mengatakan bahwa PKI memutuskan memadjukan usul:

„supaja diantara tiga Partai jang mengakui dasar² Marxisme-Leninisme (PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia — DNA) jang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat serta telah mendjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, se-lekas²nja diadakan fusi (peleburan), sehingga mendjadi satu Partai Klas buruh dengan memakai nama jang bersedjarah, jaitu Partai Komunis Indonesia....."

Berhubung dengan sokongan PKI kepada politik reaksioner kaum sosialis kanan jang dipelopori oleh Sutan Sjahrir, resolusi „Djalan Baru" menjatakan bahwa dengan menjokong politik kaum sosialis kanan itu, PKI sudah membikin dua matjam kesalahan:

Kesalahan pertama, bahwa PKI tidak memahami adjaran revolusioner, *„bahwa revolusi nasional anti-imperialis dizaman sekarang ini sudah mendjadi bagian dari revolusi proletar dunia", bahwa „revolusi nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga² anti-imperialis lainnja didunia, jaitu perdjjuangan revolusioner diseluruh dunia, baik di-negeri² djadjahan atau negeri setengah-djadjahan, maupun di-negeri² kapitalis*

Kesalahan kedua, bahwa oleh PKI *„tidak tjukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Uni Sovjet dan imperialisme Inggris-Amerika, setelah Uni Sovjet berhasil dengan sangat tjepatnja menduduki seluruh Mantjuria. Pada waktu itu sudah ternjata kedudukan Uni Sovjet jang sangat kuat dibenua Asia, jang mengikat banjak tenaga militer imperialisme Amerika, Inggeris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakjat Indonesia untuk memulai revolusinja. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah mem-besar²kan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnja dan mengetjilkan kekuatan revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnja."*

Resolusi menjatakan bahwa PKI mengubah politiknya, jaitu

dengan tegas membatalkan persetudjuan Linggardjati dan Renville, jang dalam prakteknja telah mendjadi sumber dari ber-matjam² keruwetan diantara pemimpin² dan Rakjat djelata. Penolakan persetudjuan Linggardjati dan Renville berarti djuga selfkritik jang keras dikalangan PKI.

Disimpulkan dalam resolusi tsb. bahwa kesalahan² prinsipiil PKI selama Revolusi Agustus ialah karena lemahnja ideologi Partai. Berhubung dengan ini diputuskan bahwa anggota² Partai harus mempeladjar teori Marxisme-Leninisme. Tiap² Komunis diwadajibkan membatja dan mempeladjar teori revolusioner dan diwadajibkan mengadakan kursus² dikalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaja dengan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori jang tidak dihubungkan dengan massa tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya jang berhubungan erat dengan massa merupakan kekuatan jang mahahebat.

Demikianlah, dengan resolusi „Djalan Baru” diletakkan dasar² untuk pekerdjaan jang lebih baik dari PKI dilapangan front persatuan, perdjuaan bersendjata dan pembangunan Partai. Resolusi „Djalan Baru” merupakan hukuman jang tidak mengenal ampun terhadap oportunisme didalam dan diluar Partai. Ia adalah langkah penting untuk menjelamatkan revolusi Indonesia jang sedang dalam bahaya dan langkah penting jang pertama untuk membangun Partai tipe Lenin.

Politik baru PKI telah memungkinkan timbulnja pasang baru dalam revolusi Indonesia. Rapat² umum jang diadakan oleh PKI, dimana program baru PKI didjelaskan, mendapat kundjungan puluhan sampai ratusan ribu orang. Massa menjambut adjakan PKI dengan antusias untuk meneruskan peperangan kemerdekaan melawan imperialisme Belanda. Kedok pemerintah reaksioner jang berkuasa ketika itu dan kedok partai Masjumi jang anti-Komunis mulai terbuka dihadapan massa. Massa mulai memahami bahwa djalan baru jang ditundjukkan oleh PKI adalah satu²nja djalan untuk memenangkan revolusi.

Takut akan pasang baru dalam revolusi Indonesia, imperialisme Belanda dan Amerika dengan kakitangannja orang² Indonesia mempergiat usahanja dan menetapkan tindakan²nja untuk

menghantjurkan PKI dan gerakan kemerdekaan jang dipimpin oleh PKI.

Achirnja bulan Agustus 1948 timbul provokasi² di Solo dan kemudian di beberapa tempat lain. Perwira² tentara jang revolusioner dibunuh setjara pengetjut. Kantor² serikatburuh² dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) diduduki dengan paksa oleh pasukan tentara jang tertentu. Kaum sosialis kanan, kaum trotskis dan partai Masjumi merupakan pembantu² imperialis jang giat dalam merealisasi politik anti-Komunis.

Dalam pertengahan September 1948 terdjadi insiden di Madiun dikalangan tentara, antara golongan jang menjetudjui politik reaksioner dan provokatif dari pemerintah ketika itu dengan golongan jang tetap setia pada revolusi. Kedjadian ini ditiup oleh pemerintah Hatta dengan mengatakan, bahwa di Madiun terdjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan kaum Komunis mendirikan negara Sovjet. Dengan alasan dusta ini pemerintah menjerukan kepada semua aparatnja untuk mengedjar, menangkap dan membunuh anggota² serta pengikut² PKI. Dengan ini mengamuklah teror putih jang kedua, duplikat teror putih pemerintah Belanda tahun 1926-1927. Tetapi jang kedua ini lebih kedjam dan lebih ganas dari jang pertama. Djuga anggota² Masjumi dimobilisasi untuk mengedjar, menangkap dan membunuh Komunis. Dalam keadaan demikian tidak ada djalan lain bagi kaum Komunis ketjuali mengangkat sendjata dan membela diri dengan sekuat tenaga terhadap teror putih jang sedang mengamuk.

Provokasi Madiun adalah satu persiapan untuk perang kolonial Belanda jang baru jang terdjadi dalam bulan Desember 1948, dan semuanya ini merupakan persiapan untuk memaksa Indonesia lebih djauh berkapitulasi kepada imperialisme Belanda. Memang, tidak lama kemudian diadakan gentjatan sendjata dengan Belanda jang diikuti oleh Konferensi Medja Bundar dinegeri Belanda.

Selama peperangan melawan Belanda pada achir tahun 1948 sampai permulaan tahun 1949 kader² dan anggota² PKI, termasuk mereka jang dikeluarkan atau melarikan diri dari pendjara² pemerintah Hatta, dengan gagahberani mengambil bagian dalam membela Republik Indonesia di-front² terdepan. Kenjataan ini membuka mata Rakjat akan kepalsuan fitnahan² kaum reaksioner jang

dilemparkan kepada PKI selama „Peristiwa Madiun”. Perlawanan PKI yang gigih terhadap tentara Belanda menaikkan prestise politik PKI dimata Rakjat dan ini telah membikin pemerintah tidak mungkin mengeluarkan PKI dari undang².

Pada tanggal 2 November 1949 ditandatangani persetujuan KMB yang chianat oleh fihak Indonesia dan fihak keradjaan Belanda. Selama perundingan Amerika Serikat menempatkan Merle Cochran di Nederland, sebagai tukang bagi instruksi kiri dan kanan.

Keadaan front persatuan sedjak Provokasi Madiun (1948) sampai turunpanggunja pemerintah Masjumi, kabinet Sukiman (1951), dalam laporan umum kepada Kongres ke-V PKI dikatakan bahwa:

„burdjuasi nasional memisahkan diri dari front persatuan anti-imperialisme dan memihak pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir yang memprovokasi 'Peristiwa Madiun'. Burdjuasi nasional ikut berkapitulasi kepada imperialisme dengan menjetudjuai persetujuan KMB yang chianat Politik burdjuasi nasional yang memisahkan diri dari front persatuan terasa sangat berat bagi Partai, karena Partai, berhubung kelemahan pekerdjaannya dikalangan kaum tani, belum dapat bersandar kepada kaum tani. Keadaan ini memaksa Partai mendjalankan taktik untuk mendapatkan waktu guna menarik kembali burdjuasi nasional kedalam front persatuan anti-imperialisme dan untuk memperbaiki serta memperkuat pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Kebenaran taktik Partai ini dibuktikan oleh perkembangan politik dalam negeri yang baru yang dimulai dalam tahun 1952.”

Kesimpulan dari semuanya ialah:

Revolusi Agustus (1945-1948) telah mengalami kekalahan karena PKI dalam menghadapi revolusi ini masih belum menjimpulkan pengalaman²nja dalam soal front persatuan dan tidak berpengalaman dalam soal perdjjuangan bersendjata dan dalam soal pembangunan Partai.

Tetapi walaupun revolusi ini kalah, ia telah membikin PKI berpengalaman dalam front persatuan. Revolusi ini telah memberikan pengalaman yang penting kepada PKI tentang sifat bimbang

burdjuasi nasional, bahwa dalam keadaan yang tertentu klas ini bisa ikut dan bersikap teguh berfihak kepada revolusi, tetapi dalam keadaan lain ia bisa gontjang dan mengchianat. Oleh karena itu proletariat dan PKI harus senantiasa tidak henti²nja menarik burdjuasi kedalam revolusi, tetapi djuga harus ber-djaga² akan kemungkinan mereka mengchianati revolusi. Sifat dualisme dari burdjuasi nasional Indonesia sangat mempengaruhi garis politik dan pembangunan Partai. Madju mundurnja Partai dan madju mundurnja revolusi banjak tergantung pada hubungan Partai dengan burdjuasi nasional. Demikianlah pula sebaliknya.

Dalam berserikat dengan burdjuasi nasional Partai tidak boleh meninggalkan kebebasannya dan tidak boleh melengahkan sekutu yang paling bisa dipertjaja, yang paling banjak djumlahnja, jaitu kaum tani.

Revolusi ini djuga telah membikin PKI mendjadi berpengalaman mengenai soal pembangunan Partai, telah membikin kader² PKI lebih mengerti tentang keadaan masjarakat Indonesia, tentang tanda² istimewa dan hukum² revolusi Indonesia, telah memungkinkan kader² PKI mempeladjar teori Marxisme-Leninisme dan beladjar memperpadukan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia.

Djuga satu pengalaman, bahwa dalam revolusi, perdjjuangan bersendjata adalah bentuk perdjjuangan yang terpenting. Perkembangan Partai, disamping sangat tergantung pada front persatuan, djuga sangat tergantung pada perdjjuangan bersendjata. Madju mundurnja perdjjuangan bersendjata sangat berpengaruh pada madju mundurnja front persatuan dan Partai.

Walaupun tidak setjara lengkap, pengalaman² selama revolusi telah disimpulkan dalam resolusi „Djalan Baru”. Resolusi „Djalan Baru” merupakan langkah pertama yang penting dalam mentjiptakan satu Partai Komunis yang dibolsjewikkan, yang meluas keseluruh negeri, yang berhubungan erat dengan massa dan yang diperkokoh dalam ideologi, politik dan organisasi.

„Peristiwa Madiun” telah membikin kader² dan anggota² PKI mendjadi lebih waspada dan lebih militan.

Peluasan Front Persatuan Dan Pembangunan Partai (1951 —)

Periode ini dimulai dengan *Sidang Pleno Central Comite* dalam bulan April 1951 yang berhasil merentjanakan Konstitusi PKI. Rentjana Konstitusi ini setelah disampaikan kepada organisasi² bawahan telah menimbulkan diskusi yang luas didalam Partai. Dengan tidak menunggu pensahannja oleh Kongres, seluruh Partai serempak bersedia menggunakan rentjana Konstitusi ini sebagai pegangan dalam aktivitas pembangunan Partai se-hari², dan pengalaman² praktis yang didapat dari pelaksanaan Konstitusi ini akan dijadikan bahan² untuk membikin amandemen².

Diskusi dan pelaksanaan rentjana Konstitusi PKI sangat mendorong perkembangan Partai, meninggikan tingkat politik anggota² Partai, menghidupkan demokrasi intern Partai, menghidupkan kritik dan selfkritik didalam Partai, memperkuat disiplin, ideologi dan kesatuan tenaga Partai. Partai mulai mengerti dan mulai melaksanakan dua tugasnja yang pokok, jaitu: tugas penggalangan front persatuan dan tugas pembangunan Partai. Semuanja ini terdjadi dibawah kekuasaan pemerintah reaksioner, pemerintah Sukiman (Masjumi).

Karena sedar akan bahaya yang mengantjam dari gerakan Rakjat revolusioner dan dari PKI yang sedang tumbuh, karena melihat bahwa „Provokasi Madiun” ternjata tidak „mematikan” gerakan revolusioner dan PKI, kaum imperialis asing dan kaum reaksioner dalamnegeri mendjadi matagelap dan membikin komplotan lagi untuk menghantjurkan PKI. Sekarang tidak dengan provokasi di Solo atau di Madiun, tetapi dengan satu „serangan” terhadap pos polisi di Tandjung Priok, yang oleh pemerintah Sukiman diproklamasikan sebagai „serangan Komunis” ! Kira² 2000 orang Komunis dan orang² progresif lainnja ditangkap dan dimasukkan kedalam pendjara. Tetapi atas desakan Rakjat, sesudah ber-bulan² meringkuk didalam pendjara, semua dikeluarkan dengan tak seorangpun bisa dihadapkan kemuka pengadilan. Gagalnja Sukiman (Masjumi) dengan Razzia Agustusnja menundjukkan bahwa gerakan

revolusioner di Indonesia sudah bangun kembali dan mempunyai kekuatan.

Masih didalam suasana Razzia Agustus, pada permulaan tahun 1952, PKI mengadakan *Konferensi Nasional* yang membitjarakan setjara mendalam politik terhadap pemerintah Sukiman. Konferensi memutuskan bahwa pemerintah Sukiman harus didjatuhkan dengan membentuk front anti-pemerintah Sukiman yang luas, dengan berusaha menarik burdjuasi nasional. Mengenai gerombolan DI-TII yang pada waktu itu melakukan teror besar²an di Djawa Barat dan Djawa Tengah, Konferensi berpendapat bahwa gerombolan² ini adalah alat kaum imperialis dan kaum reaksioner dalamnegeri untuk mendjepit gerakan Rakjat revolusioner diantara kekuatan² reaksioner yang ada di-kota² dengan yang ada di-desa², agar dengan demikian kaum reaksioner dapat menghantjurkan gerakan revolusioner dan dapat berkuasa penuh atas seluruh negeri. Konferensi memutuskan, supaya segenap kekuatan Partai dikerahkan, dan bersama² dengan aparat² negara dan partai² serta organisasi² demokratis lainnja menghantjurkan gerombolan² teroris DI-TII. Selain daripada itu Konferensi mengambil putusan² penting untuk memperkuat ideologi dan organisasi Partai. Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas Partai yang berat dan pelik ketika itu, Konferensi memutuskan untuk meluaskan keanggotaan Partai.

Dengan desakan yang terus-menerus dari gerakan Rakjat yang demokratis, dengan makin tjondongnja burdjuasi nasional kekiri, dan sebagai hasil dari pertentangan² dikalangan golongan² yang berkuasa didalamnegeri, pemerintah Sukiman terpaksa turun panggung dan pada tanggal 1 April 1952 berdirilah pemerintah Wilopo (PNI) yang segi² politiknya yang madju disokong oleh PKI. Dalam pemerintah Wilopo ini duduk djuga menteri² dari Masjumi dan PSI. Karena tindakan² menteri² dari Masjumi dan PSI yang anti-Rakjat, seluruh kekuatan demokratis, termasuk PNI sendiri, mendjatuhkan kabinet Wilopo. Atas desakan yang lebih kuat dari Rakjat, pada tanggal 30 Djuli 1953 berdirilah pemerintah Ali Sastroamidjojo (PNI) tanpa Masjumi-PSI. PKI menjokong segi² yang madju dari politik pemerintah Ali Sastroamidjojo.

Terbentuknja pemerintah yang politiknya mempunyai segi² madju dan yang disokong oleh klas buruh dan Rakjat-banjak, membuktikan

kan adanya gelombang naik gerakan revolusioner di Indonesia. Ini menunjukkan makin bersatunya kekuatan² nasional, termasuk burdjuasi nasional, dalam menghadapi kekuatan² reaksioner dari luar dan dalam negeri. Dalam keadaan demikian, sampai batas² tertentu gerakan revolusioner dan PKI dapat berkembang.

Dalam gelombang naik gerakan revolusioner ini, dalam bulan Oktober 1953 diadakan *Sidang Pleno Central Komite PKI*, sebagai persiapan untuk Kongres Nasional ke-V PKI. Dalam Sidang Pleno ini dimasukkan amandemen² untuk perbaikan rentjana Konstitusi, dibikin rentjana Program PKI, laporan umum kepada Kongres dan putusan terhadap Tan Ling Djie-isme, yaitu aliran oportunis di dalam Partai yang mau mengembalikan garis politik dan organisasi Partai kepada keadaan sebelum ada resolusi „Djalan Baru”. Sidang Pleno Central Komite ini telah merumuskan usul² kepada Kongres untuk memecahkan semua masalah penting dan pokok dari revolusi Indonesia.

Dalam bulan Maret 1954 dilangsungkan *Kongres Nasional Ke-V PKI* yang bersedjarah dengan tudjuan untuk menjawab semua masalah penting dan pokok revolusi Indonesia, untuk pekerjaan yang lebih baik dari Partai dalam menggalang front persatuan, untuk menjawab semua masalah pokok pembangunan Partai dan untuk mengeratkan hubungan PKI dengan massa. Dalam Kongres ini disahkan semua dokumen yang dirantjangkan oleh Sidang Pleno Central Komite bulan Oktober 1953. Disamping itu disahkan pula Manifes Pemilihan Umum PKI dan diputuskan untuk memperluas keanggotaan dan organisasi Partai.

Setelah menganalisa keadaan masyarakat Indonesia, dalam Program PKI ditetapkan bahwa Indonesia sekarang adalah negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal. Berhubung dengan itu dikatakan :

„Selama keadaan di Indonesia masih tetap tidak berubah, artinya, selama kekuasaan imperialisme belum digulingkan dan sisa² feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin membebaskan diri dari keadaan melarat, terbelakang, pinjtang dan tak berdaya dalam menghadapi imperialisme. Kekuasaan imperialisme dan sisa² feodalisme tidak akan hapus di Indonesia selama kekuasaan negara dinegeri kita dipegang oleh

tuantanah dan komprador yang berhubungan erat dengan kapital asing karena mereka mau mempertahankan penindasan imperialis dan sisa² feodal dinegeri kita, karena mereka paling takut kepada Rakjat Indonesia.

„Djika Indonesia mau madju dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal mendjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan madju, maka adalah soal yang pokok, diatas se-gala²nja, untuk mengganti pemerintah tuan² feodal dan komprador dan mentjiptakan pemerintah Rakjat, pemerintah Demokrasi Rakjat.”

Mengenai pemerintah Rakjat dikatakan dalam Program PKI, bahwa pemerintah ini:

„akan merupakan pemerintah front persatuan nasional, yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan klas buruh. Mengingat terbelakangnja ekonomi negeri kita, PKI berpendapat bahwa pemerintah ini harus tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakjat. Pemerintah ini bukannya harus melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, yang mampu memberikan tanah dengan tjuma² kepada kaum tani, yang mampu mendjamin hak² demokrasi bagi Rakjat, suatu pemerintah yang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, yang mampu meninggikan tingkat hidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran. Dengan singkat, ia akan merupakan suatu pemerintah Rakjat yang mampu mendjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannja melalui djalan demokrasi dan kemadjuan.”

Tetapi bagaimana djalannja untuk keluar dari keadaan setengah-djadjahan dan setengah-feodal dan untuk membentuk pemerintah Rakjat? Program PKI menjawab:

„Djalan keluar terletak dalam mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakjat di pihak lain. Djalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani.”

Tentang rol kaum buruh dalam mengubah imbalan kekuatan ini dikatakan :

„Klas buruh harus memelopori perjuangan seluruh Rakjat. Untuk tujuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivetnja, mendidik dirinja sendiri dan menjadi kekuatan yang besar dan sadar. Klas buruh tidak hanya harus melakukan perjuangan untuk memperbaiki tingkat hidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugasnja ketingkat yang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perjuangan klas² lainnja. Klas buruh harus membantu perjuangan kaum tani untuk tanah, perjuangan inteligensia untuk hak²nja yang pokok, perjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perjuangan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan² demokratis. Rakjat bisa mentjapai kemenangan hanya apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan yang bebas, sadar, matang dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin perjuangan seluruh Rakjat, hanya apabila Rakjat sudah melihat klas buruh sebagai pemimpinnja.”

Berdasarkan analisa terhadap klas² didalam masyarakat Indonesia, Program PKI membikin djelas kawan dan lawan yang sungguh² didalam revolusi. Berdasarkan analisa ini djuga Kongres Nasional ke-V PKI memutuskan meletakkan kewajiban penting diatas pundak PKI, jaitu kewajiban membentuk front persatuan semua kekuatan nasional dari revolusi, jaitu kaum buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional. Front persatuan ini harus terbentuk berdasarkan persekutuan buruh dan tani, se-luas²nja dan hasil perjuangan revolusioner massa. Inilah sjarat bagi Rakjat Indonesia untuk mendirikan suatu pemerintah Rakjat, untuk mengalahkan lawan² revolusi, jaitu kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador.

Untuk menggalang front persatuan nasional yang sungguh², kewajiban PKI yang per-tama² ialah menarik kaum tani kedalam front persatuan nasional. Tentang ini dikatakan dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V :

„..... agar kaum tani dapat ditarik, kewajiban yang terdekat kaum Komunis Indonesia ialah melenjapkan sisa² feodalisme Langkah pertama dalam pekerdjaan dikalangan

kaum tani ialah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan se-hari², untuk mendapatkan tuntutan-bagian kaum tani. Dengan demikian berarti mengorganisasi dan mendidik kaum tani kearah tingkat perjuangan yang lebih tinggi. Inilah dasar untuk membentuk persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan nasional yang kuasa.”

Mengenai perjuangan parlementer dan sokongan PKI kepada pemerintah Wilopo dan kemudian pemerintah Ali Sastroamidjojo Program PKI menjatakan :

„PKI memandang pekerdjaan dalam parlemen bukan sebagai pekerdjaan Partai yang pokok dan tidak memandang perjuangan parlementer sebagai satu²nja bentuk perjuangan.”

Tetapi ini tidak berarti bahwa PKI mengabaikan pemilihan umum dan perjuangan parlementer, dan bahwa PKI mengambil sikap yang satu dan sama terhadap pemerintah² yang ada sampai sekarang dan terhadap pemerintah² yang akan ada dikemudian hari sampai terbentuknja pemerintah Demokrasi Rakjat.

„PKI”, kata program tsb., „mendasarkan politiknja atas analisa Marxis mengenai keadaan yang kongkrit dan perimbangan kekuatan. PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian yang paling aktif dalam perjuangan parlementer. PKI, sadar sepenuhnya akan tanggungjawab politiknja, mendjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh²-an. PKI bukannya tidak mem-beda²kan sikap terhadap tiap² pemerintah yang lampau. Dalam keadaan² yang tertentu Partai beroposisi terhadap pemerintah dan berseru kepada massa untuk menggulingkannja, dalam keadaan² lain Partai menjokong pemerintah dan dalam keadaan² yang lain lagi turut dalam pemerintah.”

Perjuangan parlementer dan sokongan PKI kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo djuga harus ditudjukan untuk memperluas dan memperkuat front persatuan nasional.

Sebagaimana dikatakan dalam laporan umum kepada Kongres Nasional ke-V, kewajiban menggalang front persatuan adalah kewajiban urgen yang pertama dari PKI.

Kewajiban urgen yang kedua dari PKI ialah meneruskan pembangunan PKI yang meluas keseluruh negeri, yang mempunyai

karakter massa yang luas dan yang sepenuhnya dikonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Mengenai ini Kongres mengingatkan akan perkataan kawan Stalin, bahwa kalau kita mau menang dalam revolusi kita harus mempunyai Partai revolusioner tipe Lenin.

Partai demikian tidak mungkin dibentuk jika PKI tidak menguasai teori Marxisme-Leninisme. Peranan pelopor dari Partai hanya mungkin jika Partai dipimpin oleh teori yang maju. Hanya Partai yang menguasai teori Marxisme-Leninisme yang bisa memelopori dan memimpin kelas buruh dan massa Rakyat banyak lainnya.

Kongres juga berpendapat bahwa PKI hanya bisa memenuhi kewajiban sedjarah yang besar dan berat jika Partai terus menerus melakukan perjuangan yang tidak kenal ampun terhadap kaum oportunis kanan maupun „kiri” didalam barisannya sendiri. Berdasarkan ini Kongres membenarkan dan memperkuat putusan sidang Central Komite bulan Oktober 1953 mengenai Tan Ling Djie-isme. Kongres membikin resolusi khusus mengenai Tan Ling Djie-isme dan menjimpulkan, bahwa „Tan Ling Djie-isme sebenarnya sudah berkuasa didalam PKI selama revolusi tahun 1945-1948 dan sampai pada permulaan tahun 1951”. Kongres menetapkan bahwa:

„Tan Ling Djie-isme dilapangan ideologi adalah subjektivisme, adalah aliran dogmatis dan empiris didalam Partai, yang telah menjebabkan Partai membikin kesalahan² kanan dan 'kiri' yang sangat merusak pertumbuhan Partai dan pertumbuhan gerakan revolusioner.”

Kongres memperingatkan bahwa Partai tidak boleh sombong jika mentjapai kemenangan², Partai harus senantiasa melihat kekurangan² didalam pekerdjaannya, Partai harus berani mengakui kesalahan²nya dan dengan terang²an dan jujur memperbaiki kesalahan²nya. Partai akan menjadi tak terkalahkan jika Partai tidak takut pada kritik dan selfkritik, jika Partai tidak menjembunkan kesalahan² dan kekurangan² dalam pekerdjaannya, jika Partai mengadakan dan mendidik kader²nya menarik pelajaran dari kesalahan² pekerdjaan Partai dan pandai memperbaikinya tepat pada waktunya.

Karena Indonesia adalah negeri burjuis ketjil, artinja negeri,

dimana perusahaan² pemilik² ketjil masih sangat banyak terdapat, maka ideologi burdjuasi ketjil, yaitu subjektivisme, mempunyai basis sosial yang kuat. Makaitu Kongres menetapkan bahwa bagi Partai adalah sangat penting melawan subjektivisme didalam Partai. Kedua matjam subjektivisme, yaitu dogmatisme dan empirisme, adalah sama² berbahajanya didalam Partai, bisa menjebabkan Partai menjalankan oportunisme kanan dan „kiri”. Subjektivisme hanya bisa dilawan jika Partai mengadakan anggota²nya memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam menghitung kekuatan kelas, dan jika Partai memimpin perhatian anggota² kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi.

Untuk mempersatukan massa pekerdja yang luas disekeliling Partai, Partai harus mengarahkan perhatian anggota²nya kepada pekerdjaan² praktis yang ketjil², yang remeh² yang ada hubungannya dengan kebutuhan sehari² dari kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektual pekerdja. Pekerdjaan ini bukanlah pekerdjaan yang menjenangkan atau enak dan tanpa kesukaran². Tetapi hanya inilah jalan untuk mengeratkan hubungan Partai dengan massa dan untuk tidak lagi menjadikan Partai mangsa dari sembojan² kekiri-kirian.

Demikian pokok² yang diputuskan untuk membangun Partai. Dengan ini kewajiban kedua yang urgen dari PKI menjadi jelas. Dengan ini berarti PKI beladjar dari pengalamannya sendiri untuk membangun dan menjadikan dirinya Partai tipe Lenin.

Mengenai front persatuan dan pekerdjaan PKI untuk front persatuan sedjak tahun 1951 oleh Kongres disimpulkan sbb.:

„..... persatuan dengan burdjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan kaum buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunyai fondamen yang kuat. Dalam tingkat ini Partai dengan keras harus melawan penjelewengan kekanan yang memberi arti yang ber-lebih²an kepada persatuan dengan burdjuasi nasional dengan mengetjilkan arti pimpinan kelas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaja ini jalah bahaja melepaskan sifat bebas dari Partai, bahaja meleburkan diri dengan burdjuasi. Disamping itu, sudah tentu Partai juga harus dengan keras mentjegah penjelewengan kekiri, mentjegah

sektarisme, jaitu sikap jang tidak mementingkan politik front persatuan dengan burdjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga. Karena klik burdjuasi komprador bersandar pada imperialisme jang berlainan, dan karena politik Partai sekarang ini per-tama² ditunjukkan kepada imperialisme Belanda dan bukan kepada semua imperialisme asing, maka telah timbul pertentangan jang bertambah tadjam dikalangan kaum imperialis sendiri dan pertentangan² ini dengan sendirinja djuga timbul dikalangan komprador²nja. Terbentuknja front persatuan dengan burdjuasi nasional ini membukakan kemungkinan² baru bagi perkembangan dan pembangunan Partai dan bagi pekerdjaan Partai jang terdekat, jaitu menggalang persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodalisme. Pembangunan Partai dan penggalangan persekutuan kaum buruh dan kaum tani adalah djaminan bagi pimpinan proletariat atas front persatuan nasional."

Kongres Nasional ke-V PKI, beladjar dari sedjarah PKI jang pandjang, dan berpedoman pada Marxisme-Leninisme, telah melikwidasi periode sebelum tahun 1951 didalam PKI. Dengan berhasilnja Kongres ini setjara definitif zaman lama jang gelap dari Partai sudah ditutup untuk se-lama²nja, dan periode baru berkembang dengan suburnja, periode jang dimulai dalam tahun 1951.

Dalam bulan November 1954, dengan dilangsungkannja *Sidang Pleno ke-II Central Komite*, periode baru ini dikembangkan dengan putusan untuk lebih memperluas front persatuan. Berdasarkan analisa keadaan politik di Indonesia, sidang Central Komite ini menetapkan bahwa PKI sudah menjadi kekuatan nasional jang penting dan besar, jang tidak mungkin diabaikan oleh kawan maupun lawan. Berdasarkan analisa sedjarah dan keadaan kepartaian di Indonesia Central Komite memutuskan supaja PKI aktif mengusahakan adanya kerdjasama antara PKI dengan partai² lain, terutama dengan partai² Nasionalis dan partai² jang berdasarkan Islam. Tentang ini dikatakan dalam putusan tsb. a.l.:

„Kerdjasama antara Partai dan massa Komunis dengan partai dan massa Nasionalis dan Islam bagi kita bukan hanya sesuatu jang dapat dibatasi sampai selesainja pemilihan umum jang akan datang, sebagaimana sering dikatakan oleh pemimpin²

Nasionalis dan Islam. Kita menghendaki kerdjasama djuga sampai sesudah pemilihan umum, dengan tidak perduli siapa jang akan menang nanti. Dan apa jang kita inginkan ini adalah sesuai dengan sembojan Republik kita 'Bhinneka Tunggal Ika' (ber-beda² tetapi bersatu)."

Putusan penting jang lain dari Central Komite ialah tentang tjara pimpinan kolektif

„sebagai sjarat jang tidak boleh tidak untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan ideologi dan organisasi, untuk membikin Partai lebih militan dan untuk mempererat hubungan Partai dengan massa. Dengan Partai jang demikian, persatuan jang lebih luas dari semua kekuatan nasional pasti akan menjadi kenyataan."

Dari seluruh uraian diatas djelaslah, bahwa selama 35 tahun proses pembangunan dan pembolsjewikan Partai adalah sangat erat hubungannja dengan garis politik Partai, dengan tepat atau tidak tepatnja Partai memetjahkan masalah front persatuan, terutama dalam mengatur hubungannja dengan burdjuasi nasional. Sebaliknya, semakin Partai dibolsjewikkan, maka semakin tepatlah garis politik Partai dan semakin tepat pula Partai dapat memetjahkan masalah front persatuan, terutama dalam mengatur hubungannja dengan burdjuasi nasional.

Setia pada sedjarahnja jang heroik dan patriotik, beladjar dari pengalamannja jang didapat dengan pengorbanan putera² Indonesia jang terbaik dan berpedoman pada Marxisme-Leninisme jang kreatif, PKI meneruskan tugas sedjarahnja. Dalam keadaan sekarang, PKI tidak akan henti²nja dan dengan sekuat tenaganya bekerja untuk memperluas dan memperkuat front persatuan nasional. Disamping itu, dengan tidak henti²nja dan dengan sekuat tenaganya PKI akan meneruskan pembangunan dan pembolsjewikan dirinya, sebagai djaminan pokok untuk selamat dan suksesnja front persatuan nasional.

Tulisan ini adalah pidato kawan Aidit di muka Sidang Pleno ke-III CC PKI pada tgl 7 Agustus 1955 pada saat menjelang pemilihan umum untuk parlemen yang pertama. Untuk dapat mempertahankan azas demokrasi Republik Indonesia, kawan Aidit menjerukan untuk menjegah terbentuknya pemerintah reaksioner dan untuk memenangkan front nasional dalam pemilihan umum. Dengan tegas dikemukakan pula koreksi terhadap Manifes Pemilihan Umum yang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V PKI dan pentingnya bagi Partai untuk melipatgandakan aktivitasnya disegala lapangan. Untuk suksesnya pekerjaan Partai ini sangat diperlukan sebagai syarat dikembangkannya kritik dan selfkritik dan ditinggikannya tingkat ideologi Partai.

UNTUK KEMENANGAN FRONT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM

Dan Kewajiban Mengembangkan Kritik

Serta Meningkatkan Tingkat Ideologi Partai

Saat pemilihan umum untuk parlemen yang pertama sudah makin dekat. Ini berarti bahwa kita mendekati saat bersedjarah dalam perjuangan politik bangsa kita. Bukankah hasil pemilihan nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan politik negeri kita? Ia akan sangat mempengaruhi perjuangan Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, untuk menjelamatkan perdamaian, untuk menjelamatkan demokrasi dan untuk memperteguh persatuan semua kekuatan nasional.

Pemilihan umum yang akan datang adalah sangat penting artinya. Djika tidak demikian, tidak akan kaum imperialis membikin „persekutuan sutji” diantara mereka sendiri dan dengan kaum reaksioner didalamnegeri untuk menjatuhkan kabinet Ali-Arifin, agar dengan demikian pemilihan umum dapat digagalkan, atau se-kyang²nja tidak dilangsungkan dibawah pemerintah Ali-Arifin yang mendapat sokongan Rakjat. Djadi teranglah, bahwa djatuhnya kabinet Ali-Arifin baru² ini bukan se-mata² karena kekuatan kaum reaksioner didalamnegeri, tetapi karena permainan politik yang dikemukakan dari luar (1).

Situasi internasional dimana negeri kita sekarang berada menunjukkan, disatu pihak adanya tanda² yang penting mengenai kemajuan perjuangan umatmanusia untuk perdamaian dan untuk hidup berdaulat dinegeri masing². Sedjak sesudah Sidang Pleno ke-II Central Komite dalam bulan November 1954, kemajuan ini ditandai oleh kedjadian² penting seperti antara lain: suksesnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, diadakannya pernyataan bersama oleh PM Ali Sastroamidjojo dan PM Tjouw En-lai, ditandatanganinya perdjandjian perdamaian dan pemulihan kedaulatan

Austria oleh Empat Besar dan Austria, dinormalkannya hubungan URSS-Jugoslavia, bertambah eratnja hubungan URSS-India dengan kunjungan PM Nehru ke Moskow, adanya undangan Uni Sovjet kepada Adenauer untuk berkunjng ke Moskow guna membitjarakan soal mengadakan hubungan diplomatik, ekonomi dan kebudayaan antara Uni Sovjet dan Republik Federal Jerman, berhasilnja Konferensi para kepala pemerintah Empat Besar di Djenewa baru² ini dan jang terachir diadakannya perundingan RRT-Amerika Serikat. Disamping itu suksesnja Kongres Perdamaian Dunia di Helsinki dan suksesnja Kongres Ibu Sedunia di Lausanne menambah bukti² tentang kemajuan perjuangan untuk perdamaian.

Kedjadian² tersebut diatas menundjukkan betapa makin teguhnya kemauan Rakjat diseluruh dunia untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan disemua negeri. Ia djuga menundjukkan betapa benarnya dalil tentang mungkin dan perlunya negara² hidup berdampingan setjara damai dan betapa kesungguhan Uni Sovjet dalam meredakan ketegangan internasional, menormalkan hubungan negara², mentjegah dan membikin tidak mungkinnja perang atom, dan dalam mentjiptakan keamanan kolektif di Eropa.

Berlangsungnja dan suksesnja Konferensi AA, pernajaan bersama Ali-Tjou, tertjapainja persetudjuan Indonesia-RRT mengenai soal dwikewarganegaraan, bertambah baiknja hubungan ekonomi dan kebudayaan antara Republik Indonesia dengan negara² demokrasi Rakjat, hadirnja delegasi² Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional untuk perdamaian, terkumpulnja kira² 3 djuta tandatangan anti-perang atom, semuanya ini menundjukkan bertambah besarnja kekuatan Rakjat Indonesia untuk perdamaian, untuk kemerdekaan nasional dan kedaulatan negerinja.

Difihak lain kita melihat bahwa keinginan baik umatmanusia jang djudjur akan perdamaian mendapat tentangan dan perlawanan dari negara² imperialis jang dipelopori oleh Amerika Serikat. Klik² agresor melakukan segala matjam intrik untuk membendung keinginan damai dan hidup aman umatmanusia. Mereka sudah memaksakan dan terus berusaha memaksakan pakt² militer jang dikutuk oleh Rakjat diseluruh dunia seperti NATO, SEATO, dsb.

Pemerintah Ali-Arifin, berkat dukungan dan dorongan jang

teguh dari Rakjat, telah berhasil mentjegah masuknja Republik Indonesia kedalam SEATO. Tetapi dengan tidak ikutnja Republik Indonesia didalam pakt SEATO, tidak berarti negara² SEATO berdiam diri. Dengan djalan lain konsep SEATO didjalkan di Indonesia. Dengan melalui djalan² subversif, dengan djalan membikin „persekutuan sutji” diantara kaum imperialis dengan kaum reaksioner didalamnegeri, negara² SEATO mendjalkan konsepnja di Indonesia, per-tama² ditudjukan untuk mendjatuhkan pemerintah Ali-Arifin, dan berhasilnja ini dianggapnja sebagai pembuka djalan untuk menarik Indonesia kedalam SEATO. Pembentukan „persekutuan sutji” sematjam ini adalah sedjiwa dengan putusan Konferensi SEATO di Bangkok dalam bulan Februari 1955, dimana atas usul Amerika Serikat terang²an disetudjui rentjana untuk melatih komplotan² spion dari kalangan bangsa² Asia untuk bekerdja dibawah tanah, sebagai bagian dari kegiatan spionase Amerika Serikat jang makin meningkat di-negara² Asia.

Akan tetapi, persekutuan jang dibikin negara² SEATO di Indonesia, sebagaimana djuga di-tempat² lain, adalah suatu „monster-verbond” („komplotan bandit²”) dimana satu dengan lainnja saling bertentangan karena masing² mempunyai tudjuan hendak menegakkan kekuasaan sendiri². Ini sangat nampak sesudah kabinet Ali-Arifin djatuh ! Persekutuan jang tadinja dianggap „sutji” telah berubah mendjadi pertarungan jang sengit untuk kekuasaan sendiri², masing² mau memenangkan djago dan tukangpukulnja. Badan „Kerdjasama Oposisi” (KSO), walaupun sudah mengganti namanya dengan „Kerdjasama Organisasi” (djuga disingkat KSO), tidak dapat mempertahankan keutuhannja, masing² menondjalkan dirinja sendiri, mengemukakan sikap² politik sendiri², sesuai dengan apa jang diminta oleh madjikannya masing². Pokoknja, disamping mereka membutuhkan „persekutuan sutji” untuk mematahkan kekuatan Rakjat Indonesia, masing² bergulat untuk menempatkan diri pada putjuk pimpinan kekuasaan negara, pos jang terpenting guna melitjinkan djalan buat kepentingan ekonomi sang madjikan.

Tetapi, di Indonesia tidak hanja ada pertarungan antara kekuatan² reaksioner jang dikendalikan oleh negeri² asing. Di Indonesia ada dan terus tumbuh kekuatan elemen jang objektif, jang lahir dari kandungan Rakjat Indonesia sendiri, jaitu kekuatan per-

satuan Rakjat dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, mentjegah peperangan dan fasisme. Kekuatan ini, tidak akan membiarkan Indonesia djatuh kedalam kekuasaan boneka² negara asing. Berbeda dengan „persekutuan sutji” kaum reaksioner jang petjah ketika sudah sampai waktunja untuk menentukan jang mana akan memegang kekuasaan, kekuatan Rakjat makin erat bersatu dan makin bulat tekadnja dalam menjelamatkan Indonesia dari bentjana keruntuhan jang besar ini.

Dengan demikian djelaslah, bahwa soal mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan soal memenangkan front nasional dalam pemilihan umum jang akan datang, bukan hanja persoalan PKI menghadapi Masjumi-PSI, tetapi persoalan Rakjat Indonesia seluruhnja, persoalan kekuatan demokratis Indonesia seluruhnja, menghadapi berbagai kekuatan asing dengan boneka²nja, menghadapi kekuatan negara² SEATO dengan partai² dan klik² reaksioner didalamnegeri.

Kenjataan diatas membuktikan betapa objektifnja, betapa ia merupakan keharusan dan kebutuhan, kewadajiban Rakjat Indonesia untuk lebih memperkuat dan memperluas persatuannja. Hanja kekuatan front persatuan dari semua sektor tenaga nasional jang mampu mengalahkan intrik² dan pertjobaan² boneka² asing untuk menempati pos² tertinggi diputjuk pimpinan kekuasaan Republik Indonesia.

Mengapa Front Nasional Harus Menang

Front Nasional berarti kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi, perbaikan nasib dan persatuan Rakjat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut kepentingan bagian terbesar Rakjat Indonesia, adalah satu kebutuhan dan keharusan tertjapainja kemenangan front nasional dalam pemilihan umum nanti. Hanja dengan demikian dapat dipertahankan, diselamatkan dan dikembangkan azas² demokrasi Republik Indonesia. Hanja dengan demikian bendera Revolusi Agustus 1945, sang merah-putih kita, dapat terus berkibar tinggi mendjulang diangkasa. Hanja dengan demikian kita dapat mentjegah dinodainja atau digantinja sang merah-putih dengan bendera lain.

Sebaliknya, kalau bukan front nasional jang menang, maka azas² demokrasi Republik Indonesia akan di-indjak² dan bendera nasional akan dinodai oleh perbuatan elemen² kolonialis, penghasut² perang, elemen² fasis dan tukang² petjahbelah.

Untuk waktu jang sangat lama Rakjat Indonesia tidak akan lupa dengan apa jang sudah terdjadi dibawah kekuasaan reaksioner jang dipelopori Masjumi-PSI sedjak achir tahun 1948 sampai djatuhnja pemerintah Sukiman tahun 1952. Rakjat Indonesia tidak akan melupakan perang saudara dan pembunuhan massal dalam tahun 1948, tidak akan melupakan persetudjuan KMB jang chianat, Undang² larangan mogok, penangkapan massal Razzia Agustus 1951, penandatanganan pakt perang MSA, embargo terhadap RRT, meradjalelanja gerombolan DI-TII, pengguntingan uang Rakjat, birokrasi dan korupsi jang tidak kalah hebatnja dari selama kabinet Ali-Arifin, dan banjak lagi. Semuanja harus kita ingatkan kembali karena kita tidak menghendaki terulangnja lagi, walaupun dalam bentuk lain.

Tetapi, berkat persatuan dan kekuatannja, Rakjat Indonesia djuga sudah mempunyai pengalaman jang lain, jaitu ketika awal kekuasaan pemerintah Wilopo dan selama kekuasaan pemerintah Ali-Wongso (kemudian Ali-Arifin) jang didukung oleh Rakjat. Selama kekuasaan ini, pada umumnja dan sampai batas² jang tertentu kebebasan demokratis terdjamin, politik perdamaian didjalkan dengan sungguh², gerombolan DI-TII dinjatakan sebagai musuh Republik dan dibasmi dengan sekuat tenaga, terhadap elemen² subversif dan anti-demokratis diambil tindakan, rentjana Undang² Pembubaran Uni Indonesia-Belanda sudah disiapkan (demikian djuga rentjana Undang² penyelesaian dwikewarganegaraan, rentjana Undang² pemerintah daerah, rentjana Undang² pengganti Undang² larangan mogok Tedjasukmana), tambang minjak Sumatera Utara tetap diusahakan Pemerintah, perdjjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dilakukan dengan sungguh² dalam batas² kemampuan jang ada, dsb. Untuk mengatasi keadaan ekonomi jang bertambah djelek, jang disebabkan oleh persetudjuan KMB, sabotase², birokrasi dan korupsi, pemerintah Ali-Arifin berusaha memperbesar produksi bahan makanan dan mulai meluaskan hubungan

dagang dengan negeri² demokrasi Rakjat di Eropa dan dengan RRT.

Satu kenyataan jang djuga menggembirakan jalah, bahwa selama pemerintah Ali-Arifin telah berkembang persatuan Rakjat untuk mempertahankan kemerdekaan nasional dan menjegah peperangan, dalam bentuk Badan² Kerdjasama di-daerah², dalam bentuk Kongres Rakjat Seluruh Indonesia, pengiriman delegasi keluar-negeri untuk perdamaian, untuk persahabatan dan kebudayaan. Ini perlu kita kemukakan untuk mengudji kebenaran politik Partai jang mempertahankan kabinet Ali-Arifin sampai saat jang terachir dan untuk mengerti apa sebabnja politik ini disokong oleh bagian jang terbesar dari Rakjat.

Kritik jang sering dilantjarkan oleh Partai kepada pemerintah Ali-Arifin jalah berhubung pemerintah ini kurang tegas dalam berbagai langkahnja, sehingga keadaan² jang djelek dilapangan ekonomi dan keuangan tidak dapat dilikwidasi, sehingga elemen² anti-demokratis, elemen² subversif, tukang² sabot dan koruptor² masih leluasa memainkan rolnja. Kelemahan² pemerintah telah digunakan oleh fihak oposisi untuk membikin Rakjat mendjadi ragu dalam memberikan sokongannja kepada pemerintah dan untuk menarik sebagian dari pimpinan angkatan bersendjata, kefihak oposisi. Sudah tentu oposisi dengan sengadja menutup mata mengenai segi² positif dari pemerintah Ali-Arifin.

Pada pokoknja, kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam-negeri telah mengambil keuntungan dari tindakan² alat² negara dibeberapa tempat jang membatasi gerakan Rakjat dan dari tindakan pemerintah jang tidak tegas diberbagai lapangan. Sebaliknya, karena pemerintah dengan tegas mendjalankan politik luar-negeri jang madju, fihak oposisi tidak berdaja memukul pemerintah dari djurusan ini. Ini adalah satu pengalaman dan satu pelajaran bagi pemerintah² demokratis di-hari² jang akan datang. Ini adalah peladjaran jang penting bagi Partai kita.

Pemerintah Ali-Arifin telah menjerahkan mandatnja pada tanggal 24 Djuli jang lalu. Pemerintah ini djatuh bukan karena perimbangan suara didalam parlemen, tetapi karena faktor jang berada diluar parlemen, oleh faktor angkatan bersendjata. Ini satu pelajaran bagi kita, bahwa kaum reaksioner didalam keadaan terdije-

pit dan takut pada perkembangan gerakan Rakjat, dengan tidak merasa kehilangan muka, melemparkan pandji² demokrasi burdjuis. Ini berarti bahwa mereka sudah ber-siap² untuk melangkah dari sistim diktatur burdjuis jang tidak terang²an kesistim diktatur burdjuis jang terang²an, kesistim fasis. Dengan mendjalankan sistim ini mereka mau meletakkan beban krisis *seluruhnja* diatas pundak Rakjat, karena sistim ini berarti ditjabutnja hak Rakjat untuk membela diri, untuk menjatakan perasaan, fikiran dan kehendaknja. Mereka sudah tidak mampu untuk kembali berkuasa dengan menggunakan metode² parlementerisme dan demokrasi burdjuis jang lama, dan oleh karena itu mereka melemparkan pandji² demokrasi ini. Ini sangat nampak dari pernyataan² mereka jang menginginkan pemerintah jang tidak bertanggungjawab kepada parlemen, jang menginginkan pemerintah jang berdiri atas „izin” bajonet.

Apakah djawab Partai kita dan seluruh kekuatan demokratis dinegeri kita terhadap usaha² kaum reaksioner untuk mendirikan suatu pemerintah jang tidak bertanggungjawab kepada parlemen? Djawab kita jalah: PKI, dan bersama dengan PKI seluruh Rakjat pekerdja, hanja menjetudjui pemerintah jang bertanggungjawab kepada parlemen, dan dalam hubungan dengan imbalanced kekuatan jang ada sekarang, mengusahakan terbentuknja pemerintah jang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin.

PKI tidak pernah berkeberatan mengenai penggantian pemerintah, asal gantinya lebih baik. Demikian djuga dengan penggantian pemerintah Ali-Arifin. Menurut pengalaman sedjak achir tahun 1948, pemerintah jang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin tidak mungkin pemerintah jang dipimpin oleh Masjumi-PSI jang anti-demokratis.

Kita mempertahankan sistim demokrasi parlementer, bukan hanja karena sistim politik ini lebih baik daripada sistim diktatur burdjuis jang terang²an, tetapi karena sistim ini djuga berhubungan langsung dengan perdjuaan massa Rakjat untuk kepentingan se-hari²nja, untuk tuntutan²-bagiannja. Dalam hubungan dengan inilah kaum Komunis harus mendjelaskan sikap politiknya kepada massa. Tjontoh² sudah tjukup banyak jang membuktikan bahwa massa Rakjat dinegeri kita djuga dapat menggunakan parlemen

sebagai salahsatu bentuk perjuangannya, untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Bentuk perjuangan ini akan lenjap jika terbentuk pemerintah yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen dan yang tidak menjamin kebebasan demokratis bagi Rakyat.

Dari kenyataan diatas jelashlah apa yang menjadi tugas politik Partai kita yang terdekat pada waktu sekarang. Pertama, menjegah terbentuknya pemerintah reaksioner dan mengusahakan terbentuknya pemerintah yang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin. Yang kita maksudkan dengan „pemerintah yang lebih baik” dalam situasi sekarang ialah pemerintah sematjam pemerintah Ali-Arifin dengan komposisi orang² yang lebih maju dan lebih tjakap, sehingga dapat menjamin pelaksanaan program yang demokratis dari pemerintah. Kedua, memenangkan front nasional dalam pemilihan umum yang akan datang, sebagai syarat untuk terbentuknya Pemerintah Koalisi Nasional yang didukung dengan teguh oleh seluruh kekuatan demokratis.

Hanya dengan melakukan tugas seperti tersebut diatas, kita dapat menyelamatkan azas demokrasi dari Republik Indonesia. Inilah tugas untuk mempertahankan kemerdekaan nasional kita, untuk ikut menyelamatkan perdamaian, untuk menyelamatkan demokrasi dan memperteguh persatuan. Tugas ini adalah sesuai dengan Undang² Dasar Republik Indonesia dan sesuai dengan program Partai kita dalam keadaan sekarang.

Sebabnja Kita Mengoreksi Manifestasi Pemilihan Umum

Pada tanggal 22 Djuni 1955 Politbiro Central Komite setjara mendalam telah mendiskusikan Manifestasi Pemilihan Umum (MPU) PKI dalam hubungan dengan tugas politik PKI sampai waktu segera sesudah pemilihan umum yang akan datang. Pada tanggal 24 Djuni yang lalu diumumkan resolusi Politbiro Central Komite yang berkepala „*Lewat Pemilihan Umum Yang Akan Datang Membentuk Pemerintah Koalisi Nasional*”.

Dalam resolusi Politbiro tersebut dengan tegas dikatakan, bahwa „*Pemerintah Koalisi Nasional bukan pemerintah diktatur Rakyat*” dan bahwa „*program pemerintah Koalisi Nasional yang diinginkan oleh PKI bukanlah program demokrasi Rakyat, tetapi program yang*

pokoknja sama dengan tuntutan PKI kepada pemerintah Ali Sastroamidjojo”.

Berhubung dengan resolusi tersebut mungkin timbul pertanyaan: „Apakah resolusi ini tidak bertentangan dengan putusan Kongres Nasional ke-V?”, „Apakah dengan ini tidak berarti kita mundur?”, „Bagaimana slogan² kita untuk pemilihan umum?”, dan „Bagaimana kedudukan MPU yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V?”.

Sebagaimana kita ketahui, Kongres Nasional ke-V Partai bulan Maret 1954 telah melahirkan sejumlah dokumen², antara lain MPU. Sesudah Kongres Nasional ke-V semua aktivitas Partai didasarkan atas putusan² Kongres tersebut. Putusan Kongres Nasional ke-V telah menjepatkan perkembangan Partai. Ini nampak dari peluasan anggota dan organisasi Partai, dan dari meningkatkan pengaruh dan prestise politik Partai.

Berhubung dengan pertanyaan „Apakah resolusi ini tidak bertentangan dengan putusan Kongres Nasional ke-V?”, maka jawabnja ialah: Ja dan tidak. Resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni 1955 bisa dianggap bertentangan dalam arti bertentangan dengan MPU, yang djuga diputuskan oleh Kongres. Tetapi ia tidak bertentangan, malahan sesuai dengan putusan Kongres, dalam arti sesuai dengan Program PKI, jaitu dokumen utama yang djuga disahkan oleh Kongres.

Apakah buktinja bahwa resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni yang lalu sesuai dengan Program PKI? Buktinja ialah, bahwa dalam Program PKI dengan djelas dikatakan bahwa:

„*Pemerintah Demokrasi Rakyat akan merupakan suatu pemerintah yang samasekali baru jika dibandingkan dengan semua pemerintah yang ada sebelumnya*”, dan bahwa „*Djalan keluar terletak dalam mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, kelas tuantanah dan burjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakyat difihak lain. Jalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani*”.

Selanjutnja dikatakan bahwa „*Hanya satu front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh kelas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakyat*

jang se-luas2nja dan perdjungan revolusioner massa, akan memungkinkan Rakjat Indonesia mendirikan Pemerintah Demokrasi Rakjat jang akan mendjalankan program Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menudju kemenangan”.

Djadi djelaslah apa jang mendjadi sjarat2 Pemerintah Demokrasi Rakjat, dan sjarat2 itu masih harus kita tjiptakan.

Mengenai perdjungan parlementer dikatakan dalam Program PKI, bahwa:

„Sedjarah perdjungan pembebasan nasional Rakjat Indonesia, sebagaimana djuga sedjarah perdjungan Rakjat negeri2 lain, menundjukkan bahwa perdjungan parlementer sadja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk sesuatu Pemerintah Demokrasi Rakjat”, dan dikatakan djuga bahwa „PKI memandang pekerdjaan dalam parlemen bukan sebagai pekerdjaan Partai jang pokok dan tidak memandang perdjungan parlementer sebagai satu2nja bentuk perdjungan”, walaupun „PKI telah mengambil bagian dan terus akan mengambil bagian jang paling aktif dalam perdjungan parlementer”.

Djadi djelaslah, bahwa resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni jang lalu tidak menjalahi putusan Kongres, tetapi sebaliknya, untuk mengoreksi MPU jang menjalahi program Partai.

Saja kira, ada kawan2 kita jang bertanja: Apakah tidak perlu dibawa kekongres dulu, karena MPU adalah putusan Kongres? Bahwa soal ini harus dikemukakan kepada kongres jang akan datang, sudah pasti. Tetapi adalah tidak benar kalau sesuatu putusan kongres jang menurut teori dan menurut kenyataan se-hari2 adalah salah, dan apalagi terang bertentangan dengan program Partai, akan dibiarkan oleh pimpinan Partai dalam waktu jang lama, sampai kongres jang akan datang.

Berhubung dengan pertanyaan „Apakah dengan ini tidak berarti kita mundur?”, maka djawabnja ialah: bahwa disini tidak ada persoalan mundur, tetapi soalnya ialah mengoreksi kesalahan, dan tiap2 pekerdjaan mengoreksi kesalahan berarti kemadjuan. Ja, tetapi apakah dengan koreksi ini kita tidak mundur dari djandji jang sudah kita berikan kepada Rakjat berdasarkan MPU. Memang, Pemerintah Demokrasi Rakjat adalah lebih mendjamin kepentingan Rakjat daripada Pemerintah Koalisi Nasional. Tetapi, dalam

menghadapi pemilihan umum kita harus mengemukakan program jang memang mungkin dilaksanakan segera sesudah pemilihan umum, dengan tidak menghentikan propaganda kita, bahwa tudjuan kita adalah lebih djauh dari itu. Kewadajiban kita ialah, disamping menerangkan persamaan program kita dengan program Pemerintah Koalisi Nasional, djuga menerangkan perbedaannja, jaitu bahwa program Partai adalah lebih mendjamin kepentingan Rakjat banjak.

Berhubung dengan pertanyaan „Bagaimana slogan2 kita untuk pemilihan umum?”, maka djawabnja ialah: bahwa slogan2 kita untuk pemilihan umum jang akan datang harus kita sesuaikan dengan program untuk Pemerintah Koalisi Nasional. Dengan demikian slogan2 pemilihan umum kita adalah slogan2 aksi jang kongkrit. Oleh karena itu slogan2 ini akan merupakan kekuatan dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa disekeliling Partai.

Berhubung dengan pertanyaan: „Bagaimana kedudukan MPU jang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V?”, maka djawabnja ialah: bahwa dengan keluarnja resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni jang lalu dokumen tersebut tidak berlaku lagi sebagai Manifes untuk Pemilihan Umum jang akan datang. Tetapi apakah dengan demikian berarti MPU samasekali tidak berguna untuk keperluan lain? Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menerangkan sistim demokrasi Rakjat kepada anggota2 baru, karena ia ditulis lebih populer dan bersifat polemis.

Demikianlah djawaban pada pertanyaan2 jang banjak timbul ketika comite2 dan fraksi2 mendiskusikan resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni 1955.

Selain daripada itu, penting untuk dikemukakan disini, bahwa kalau kita mempelajari putusan2 Sidang Pleno ke-II Central Comite jang dilangsungkan dalam bulan November 1954, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa putusan2 Sidang Pleno tersebut tidak didjiwai oleh MPU, tetapi didjiwai oleh Program PKI, dokumen jang terpenting jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V. Ini menundjukkan, bahwa sebenarnja Partai kita sudah agak lama merasakan adanja putusan Kongres jang „sumbang”, tetapi hal ini tidak segera didiskusikan, diformulasi dan didjadikan putusan.

Bahwa Sidang Pleno ke-II CC tidak didiawai oleh MPU nampak dari apa yang antara lain dimuat dalam laporan sbb.: „Kerdjasama antara Partai dan massa Komunis dengan partai² dan massa Nasionalis dan Islam bagi kita bukan hanya sesuatu yang dapat dibatasi sampai selesainya pemilihan umum yang akan datang, sebagaimana sering dikatakan oleh pemimpin² Nasionalis dan Islam. Kita menghendaki kerdjasama djuga sampai sesudah pemilihan umum, dengan tidak perduli siapa yang akan menang nanti. Dan apa yang kita inginkan ini adalah sesuai dengan sembojan Republik kita 'Bhinneka Tunggal Ika' (ber-beda² tetapi bersatu)“.

Dalam kita menjatakan kehendak kita bekerjasama dengan „partai² dan massa Nasionalis dan Islam“, djuga sampai sesudah pemilihan umum, dapat kita gambarkan partai² mana yang kita maksudkan itu.

Djadi sekarang djelaslah apa sebabnja kita harus mengoreksi MPU. Tindakan Politbiro CC dengan resolusinja tanggal 24 Djuni tersebut telah membikin salahsatu putusan Kongres Nasional ke-V yang tidak objektif mendjadi objektif. Karena objektifnja, ia pasti akan lebih memadjukan pekerdjaan Partai. Disamping akan sangat membantu pekerdjaan Partai dalam mempersatukan semua kekuatan nasional, resolusi tersebut djuga telah menimbulkan aktivitet yang besar dikalangan kader² Partai dalam mendiskusikan teori revolusi ditanah djadjahan dan setengah-djadjahan. Oleh karena itu, resolusi Politbiro tersebut samasekali tidak melemahkan Partai, tetapi sebaliknya. Disamping akan memperkuat front persatuan, pelaksanaan dan diskusi² mengenai resolusi tersebut akan menambah pengertian Partai tentang Revolusi Indonesia, akan memperkuat ideologi Partai dan meninggikan prestise pimpinan Partai dimata anggota² dan dimata Rakjat.

Ada beberapa gelintir trotskis yang mengatakan: „Lihat orang² PKI itu, tidak pernah berhenti membikin kesalahan, sekarang sudah mengoreksi diri lagi!“ Mereka tidak sadar, bahwa dengan utjapan ini sama sadja dengan mereka mengatakan, bahwa kaum Komunis tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Memang, kita kaum Komunis tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti memperbaiki diri, karena kita ingin dari baik mendjadi lebih baik. Dan untuk ini sjaratnja ialah mengamalkan kritik dan selfkritik. Ini

salahsatu perbedaan yang penting antara kaum Komunis dan kaum trotskis.

Melipatgandakan Aktivitet Disemua Lapangan Pekerdjaan Partai

Sebagaimana sudah dikatakan diatas, untuk memenangkan front nasional dalam pemilihan umum yang akan datang, kewajiban kita yang per-tama² dan yang terpenting ialah: mentjegah terbentuknja pemerintah yang reaksioner.

Kewadajiban mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner adalah satu dan tidak bisa dipisahkan dari kewajiban memenangkan front nasional dalam pemilihan umum yang akan datang. Kemenangan front nasional akan lebih terdjamin djika pemilihan umum dilangsungkan dibawah pemerintah yang tidak reaksioner. Pemerintah reaksioner tidak hanya akan berusaha menunda pemilihan umum, tidak hanya akan merombak panitia² pemilihan yang sudah tersusun setjara demokratis, tetapi akan membikin segala matjam perbuatan anti-demokratis untuk mengalahkan blok demokratis.

Kelirulah djika orang mengira bahwa terbentuknja pemerintah reaksioner hanya akan merugikan PKI, dan tidak akan merugikan partai² Nasionalis, partai² Islam dan partai² lain yang mempertahankan azas² demokrasi. Pemerintah reaksioner memang menu-djukan pukulannja yang pokok kepada benteng demokrasi yang paling mereka takut, yaitu PKI. Tetapi ini hanya permulaan untuk menghantjurkan benteng² demokrasi yang lain. Dari kenyataan ini djelaslah, betapa objektifnja dan masuk akalnja djika seluruh kekuatan demokratis aktif mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan aktif mengusahakan terbentuknja pemerintah yang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin, lebih baik dalam komposisi orang²nja dan lebih tegas dalam melaksanakan program²nja yang madju.

Pekerdjaan mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan pekerdjaan memenangkan front nasional dalam pemilihan umum hanya mungkin djika Partai melipatgandakan aktivitetnja disegala lapangan, dilapangan mengorganisasi dan memobilisasi massa, dilapangan memperkuat organisasi dan ideologi Partai. Kepasifan

adalah makanan yang empuk bagi fasisme. Fasisme harus ditjegah dan dilawan dengan melipatgandakan aktivitet, melipatgandakan keberanian dan kewaspadaan.

Dalam keadaan yang bagaimanapun, kita harus berpendirian, bahwa faktor yang menentukan dalam menetapkan haridepan kita setjara tepat, ialah pekerdjaan kita untuk mengadjak massa Rakjat menjokong program mempertahankan kemerdekaan nasional, demokrasi, perdamaian dan perbaikan nasib se-hari². Jang bisa menarik massa kedalam perdjungan ini, sebagai sjarat untuk mejakinkan massa akan kebenaran program ini, ialah aksi² massa sendiri. Untuk ini kita harus merumuskan setjara presis dan mewudjudkan tuntutan² kongkrit yang tertentu serta melaksanakan aksi² dimana massa yang luas mempunyai kepentingan dan memberikan sokonganja.

Di-tengah² keadaan dimana kaum reaksioner terus-menerus dalam rapat², koran², brosur², dsb. mengusahakan supaja Rakjat mendjadi atjuh tak-atjuh terhadap persatuan, dimana kaum reaksioner meng-edjek² tiap² usaha untuk persatuan, adalah kewadajiban kita untuk menundjukkan dan mejakinkan Rakjat bahwa persatuan adalah mungkin dan dapat diadakan. Dalam keadaan seperti ini adalah penting untuk mengemukakan tjontoh² persatuan yang pernah ada dalam sedjarah perdjungan Rakjat Indonesia dan tjontoh² se-hari² yang membuktikan bahwa persatuan perlu, mungkin dan dapat diadakan untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan, tanpa mengenal perbedaan agama, kejakinan politik, sukubangsa dan kedudukan sosial.

Kita harus menundjukkan kepada Rakjat wujud persatuan yang sudah kita punjai, jaitu organisasi² massa yang besar dan kerjasama dulu dan sekarang antara Partai kita dengan partai² Nasionalis, Islam dan partai² lain yang demokratis. Kita harus resapkan didalam hati dan fikiran Rakjat, bahwa tidak benar dan berbahaya sekali apa yang sering diutjapkan oleh pemimpin² Masjumi-PSI, yang mengatakan bahwa Rakjat tidak bisa bersatu karena perbedaan agama, ideologi, politik, sukubangsa dan kedudukan sosial. Djustru karena adanya perbedaan inilah maka timbul problem bagaimana mempersatukan Rakjat, dan timbulnja problem

ini ialah karena kejakinan bahwa soal persatuan adalah soal kebutuhan dan keharusan yang objektif.

Bagi kita kaum Komunis, persatuan bukanlah hanya setjarik kertas atau omong² tentang tudjuan² yang bagus². Bagi kita persatuan adalah kebutuhan, adalah metode kerdja dan metode perdjungan. Kita yakin, bahwa yang terpenting dan yang menentukan untuk tertjiptanja persatuan ialah keharusan akan persatuan untuk melipatgandakan kekuatan dan kemampuan massa guna bertahan terhadap lawan dan mengalahkan lawan.

Terlalu banjak titik² pertemuan yang dapat mempersatukan massa seperti: upah yang terlalu rendah, perlakuan madjikan yang se-wenang², bunga uang yang tinggi, sewatanah yang mendjerat leher, kenaikan harga barang, antjaman mati konjol karena peperangan, antjaman gerombolan teroris, pengekangan hak² demokrasi, peraturan² pemerintah pusat atau daerah yang merugikan, dan masih banjak lagi. Berdasarkan titik² pertemuan inilah kita menggalang persatuan massa.

Sendjata kaum reaksioner yang sekarang paling banjak digunakan untuk memetjahbelah persatuan nasional ialah agama, se-olah² kaum Komunis ada didunia dengan tudjuan untuk merusak agama dan mengganggu kebebasan beragama. Sesungguhnja tjara memfitnah sematjam ini hanya meneruskan tjara yang dulu dipakai oleh kaum kolonialis Belanda dan kaum fasis Djepang, sehingga bagi Rakjat mudah mengetahui darimana dan kemana angin bertiup. Akan tetapi, karena kita belum mempunyai kesempatan dan waktu yang tjukup untuk membikin fitnahan ini mendjadi tidak berdaja, maka adalah keliru sekali kalau kita sekarang menganggap „sepi” fitnahan sematjam itu. Oleh karena itu, kita harus meneruskan dan melipatgandakan kegiatan kita dalam mendjawab dan membuktikan dengan perbuatan kita se-hari², bahwa kaum Komunis tidak berdjung melawan agama, bahwa program kita untuk kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan perbaikan nasib se-hari² tidak berarti tantangan terhadap agama manapun.

Kita harus memakukan didalam kesedaran massa, bahwa bukan agama, tetapi pandji² „anti-Komunisme” yang dikibarkan oleh Masjumi-PSI, inilah yang menjebabkan kita dengan sekuat tenaga melawan politik anti-demokratis dari partai² ini. Kita lakukan ini

karena kita tahu bahwa politik „anti-Komunisme” Masjumi-PSI adalah perintang yang paling besar dalam usaha menggalang persatuan dikalangan Rakjat, bahwa politik ini sesungguhnya ditudjukan untuk membendung dan mematahkan seluruh kekuatan patriotik dan demokratis.

Kedjadian² dibanjak negeri, dan djuga pengalaman dinegeri kita, membuktikan bahwa tidak pernah politik „anti-Komunisme” dihentikan sesudah Partai Komunis dilarang dan pemimpin²nja dimasukkan kedalam penjara atau dibunuh. Politik ini pasti diikuti oleh politik menghanturkan kekuatan patriotik dan demokratis lainnja. Patriot² dan demokrat² non-Komunis yang djudjur ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah „Komunis”. Bukankah pedjuang² kemerdekaan Indonesia yang non-Komunis dizaman pendjadjahan Belanda ditangkap dan diasingkan karena mereka dituduh „Komunis”? Kenjataan² ini tidak hanya menundjukkan tempat yang terhormat bagi kaum Komunis dalam melawan kolonialisme, tetapi djuga menundjukkan bahwa politik „anti-Komunisme” dari Masjumi-PSI atau dari manapun, tidak bisa berakibat lain ketjuali mentjiptakan sjarat untuk timbulnja front demokratis. Tinggal tergantung pada Partai kita sampai kemana kemampuan mendjelaskan kebenaran sedjarah dan kebenaran yang aktuil ini kepada massa dan kepada pemimpin² partai² demokratis, sebagai sjarat untuk membangkitkan kekuatan demokratis tersebut.

Sendjata kaum reaksioner yang djuga banjak digunakan untuk memetjahbelah persatuan nasional ialah fitnahan, se-olah² PKI bukan elemen nasional, se-olah² segala gerakgerik PKI adalah dikenalikan dari luarnegeri, dari „Peking” dan dari „Moskow”. Padahal, kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri tahu benar, bahwa PKI erat hubungannja dengan massa Rakjat, djadi bahwa PKI adalah kekuatan nasional yang terpenting. Djustru karena mereka mengetahui ini, maka mereka berkepentingan untuk memisahkan PKI dari kekuatan nasional lainnja, agar dengan demikian kekuatan nasional mendjadi takberdaja. Fitnahan yang bertudjuan memetjahbelah ini harus kita lawan dengan djalan membuktikan kepada Rakjat, bahwa PKI adalah elemen yang objektif dari situasi negeri kita sendiri. Kita harus membuktikan ini dengan

keterangan² kita yang masuk akal dan dengan perbuatan kita sehari².

Kebenaran garis politik, aktivitet sehari² dan pimpinan Partai kita kepada massa, akan membuktikan bahwa djustru tukang² fitnah itulah yang sebenarnja mewakili kepentingan negeri² asing di Indonesia. Akan mendjadi terang bagi Rakjat bahwa „Moskow” (Uni Sovjet) dan „Peking” (RRT) tidak mempunyai kepentingan untuk menanam „agen” atau „komprador” di Indonesia, karena kedua negeri ini tidak mempunyai kepentingan untuk menguasai ekonomi negeri² lain, djuga tidak mempunyai kepentingan untuk menguasai ekonomi Indonesia. Tetapi kaum imperialis Belanda, Amerika, Inggeris dll. yang mempunyai banjak tanaman-modal di Indonesia, yang tidak pernah diserang oleh tukang² fitnah, djustru merekalah yang mempunyai kepentingan untuk menanamkan agen² atau komprador²nja di Indonesia. Kewadajiban terpenting dari agen² atau komprador² ini ialah memetjahbelah potensi nasional Rakjat Indonesia. Dari kenjataan² ini dan dari pengalaman²nja sendiri, massa akan menarik kesimpulan bahwa tuduhan „agen luarnegeri” kepada kaum Komunis sebenarnja hanya untuk menutupi perbuatan tukang² fitnah itu sendiri.

Sekali lagi, kewadajiban kita ialah, memakukan kesedaran pada massa, bahwa PKI adalah elemen yang objektif dari situasi negeri kita sendiri. Pekerdjaan ini akan sangat dibantu oleh kenjataan, bahwa sedjarah perdjjuangan Partai kita adalah sedjarah yang heroik dan patriotik.

Pekerdjaan melipatgandakan aktivitet dilapangan mengorganisasi dan memobilisasi massa tidak mungkin kita lakukan dengan baik, djika bersamaan dengan itu kita lengah memperkuat organisasi dan ideologi Partai. Tugas² mengenai ini sudah dirumuskan dengan djelas dalam putusan² yang diambil dalam Kongres Nasional ke-V dan dalam Sidang Pleno ke-II Central Komite. Dalam kesempatan ini saja hanya hendak menekankan beberapa soal.

Mengenai organisasi. Sesudah kita dengan sukses meluaskan keanggotaan dan organisasi Partai, yang terpenting ialah membikin tiap² anggota dan organisasi kita mendjadi elemen yang aktif dalam mendjalankan putusan² Partai. Untuk ini yang terpenting ialah melaksanakan tjarakerdja kolektif didalam semua komite, fraksi

dan grup Partai. Lebih² soal mengaktifkan grup² Partai harus mendapat perhatian dan pimpinan istimewa. Sangat tergantung pada soal mengaktifkan grup² inilah, akan terjawab pertanyaan, apakah Partai kita dari suatu gerakan yang sudah besar sekarang akan menjadi organisasi yang besar, akan menjadi *Partai* yang besar, dimana tiap² anggota dan tiap² organisasi Partai adalah elemen yang aktif dalam menjalankan politik dan putusan² lainnya dari Partai. Inilah syarat untuk menjadikan Partai kita tulang punggung gerakan Rakjat sampai ke-basis² organisasi² massa.

Dalam Sidang Pleno ke-II Central Komite kita menekankan tentang pentingnya tjarakerdja kolektif. Pengalaman kita menunjukkan bahwa tjarakerdja kolektif baru besar artinya jika disertai oleh diskusi² yang kritis. Syarat untuk dari baik menjadi lebih baik, sebagai sudah dikatakan diatas, ialah mengamalkan kritik dan selfkritik. Untuk perkembangan Partai kelas buruh dan untuk perkembangan gerakan Rakjat, kritik adalah satu keharusan. Kita harus mengutarakan „selamat datang” pada tiap² kritik. Oleh karena itu kita harus menjalankan saling kritik. Ini tidak hanya bukti bahwa kita kuat, tetapi juga bukti bahwa kita ingin menjadi lebih kuat, karena oleh kritik kita menjadi lebih mampu untuk bekerja dan berjuang. Dengan mengamalkan kritik dan selfkritik didalam Partai kepertajaan Rakjat kepada kita akan menjadi lebih besar, karena mengetahui bahwa dalam pimpinan Partai duduk orang² yang mempunyai kesungguhan, yang dengan sungguh² mempelajari semua persoalan dan menjarikan pemetjahannya dilihat dari sudut keharusan dan kewajiban yang dihadapi oleh seluruh Rakjat.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan² Partai yang masih besar dalam membantu perjuangan kaum tani untuk kebutuhan sehari², untuk mendapatkan tuntutan²-bagian mereka. Demikian juga mengenai pekerjaan Partai dikalangan kaum buruh, inteligensia dan kelas² serta golongan² lain dari Rakjat. Pekerjaan Partai untuk perdamaian dan untuk mempertahankan kebebasan demokratis dari Rakjat masih banyak kekurangannya. Dalam menggalang kerdjasama dengan partai² dan organisasi² lain, kader² kita masih sering menunjukkan kekakuan, disamping mereka yang suka „kehilangan diri sendiri”.

Masih sering kita melihat, bahwa kader² Partai melakukan pekerjaannya sebagai mesin, tidak dengan sepenuh jiwa dan tidak dengan gairah. Bekerja sebagai mesin, tidak dengan sepenuh jiwa dan tidak dengan gairah tidak bisa berakibat lain ketjuali akan membawa semangat birokrasi didalam kantor² Partai dan kantor² organisasi massa serta dalam tjara bekerja fungsionaris² Partai. Bekerja demikian tidak mungkin produktif dan kader yang demikian tidak mungkin kreatif.

Kita harus tjakap menemukan tiap² kesalahan dan kekurangan kita, menerangkannya dengan jelas dan mengoreksinya. Ini kita lakukan dalam badan² kolektif dimana kita mengadakan diskusi² yang kritis. Tetapi, ini saja tentu tidak tjukup. Untuk menemukan kesalahan² dan kekurangan², kita harus mempunyai pengetahuan teori dan ketjaksanaan politik serta organisasi yang luas. Ini hanya mungkin jika kita menguasai Marxisme-Leninisme dan mengetahui bagaimana seharusnya kita bekerja. Ini terutama bagi kader² yang memegang pimpinan Partai. Kita harus lebih banyak membaca, belajar dan berdiskusi. Untuk ini sudah ada harian Partai, brosur² dan penerbitan² lain dari Partai.

Kita menentang dogmatisme. Oleh karena itu, tiap² pendirian politik dan hasil pekerjaan Partai harus didiskusikan setjara mendalam dan setjara kolektif. Semua Komunis harus melakukan ini, semua bisa dan semua harus ambil bagian dalam diskusi² mengenai putusan Partai, mengenai pelaksanaan putusan dan mengenai hasil pekerjaan. Inilah syarat mutlak supaya Partai senantiasa aktif, senantiasa mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang dilakukannya, dan karenanya mampu menunaikan tugas² yang dihadapkan kepadanya.

Diskusi² mengenai kritik terhadap MPU adalah tjontoh yang hidup bahwa diskusi² yang kritis membikin Partai lebih bersatu dan lebih kuat, karena dalam diskusi² ini telah dipadukan pengalaman² praktis kita dengan teori² kita yang ditulis didalam buku² klasik kita. Dari diskusi² ini kita rasakan benar bahwa dasar yang menentukan mengenai persatuan didalam Partai ialah kedjernihan dalam ideologi, pengertian tentang dasar² pokok ajaran kita, yang menjadi sumber garis politik dan yang menentukan arah pekerjaan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa pekerjaan kita untuk memenangkan front persatuan dalam pemilihan umum dan untuk melaksanakan putusan² yang lain dari Partai, hanya mungkin jika kita tidak henti²nja mengembangkan kritik dan meningkatkan tingkat ideologi Partai. Inilah pula yang harus menjadi pegangan kita, dalam keadaan yang bagaimanapun Partai berada. Inilah syarat untuk memperkuat disiplin Partai, untuk menanamkan solidaritet Komunis yang mesra didalam Partai dalam keadaan biasa, apalagi didalam keadaan yang se-sukar²nja bagi Partai dan bagi massa.

Artikel berikut adalah analisa kawan Aidit mengenai hasil sementara pemilihan DPR tgl 29 September 1955, yang berakhir dengan kemenangan front persatuan dan kekalahan kombinasi Masjumi-PSI. Analisa ini menunjukkan penilaian yang tepat tentang pemilihan umum yang pertama itu. Analisa ini juga menunjukkan tugas Rakyat Indonesia untuk menjelamatkan dan mengkonsolidasi kemenangan front persatuan dengan jalan membentuk Pemerintah Koalisi Nasional yang menjalankan politik anti-kolonialisme, menjunjung hak² demokrasi, yang didukung oleh seluruh kekuatan nasional.

SELAMATKAN DAN KONSOLIDASI KEMENANGAN FRONT PERSATUAN

Berdasarkan angka² jang sudah terkumpul dan sudah diumumkan dalam surat kabar², terutama angka² pulau Djawa dan Sumatera, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat (DPR) tanggal 29 September jang baru lalu akan berhasil dengan muntjulnja 4 partai besar, jaitu PNI, NU, PKI dan Masjumi. Djuga sudah djelas bahwa Masjumi mendapat tempat keempat dipulau Djawa, sedangkan untuk seluruh Indonesia kemungkinan besar PNI mendapat tempat nomor satu.

PSI jang selama ini merupakan partner Masjumi jang paling akrab menderita kekalahan besar, sehingga kombinasi Masjumi-PSI untuk selanjutnja mendjadi kombinasi jang impoten. PKI dan NU jang menurut susunan parlemen sementara merupakan dua partai ketjil, muntjul dari gelanggang pemilihan sebagai partai besar.

Kenjataan² diatas sudah memungkinkan pembikinan analisa mengenai hasil sementara pemilihan DPR jang baru lalu.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Membuktikan Kemampuan Berorganisasi Rakjat Dan Kemampuan Angkatan Bersendjata Republik Dalam Mendjaga Keamanan

Pemilihan untuk DPR jang baru lalu pada umumnja berdjalan dengan lantjar, walaupun sangat banjak mendapat rintangan. Dari kenjataan ini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Rakjat Indonesia sudah sampai pada taraf jang agak madju dalam berorganisasi. Kemampuan berorganisasi Rakjat ini berada diluar dugaan kaum reaksioner didalamnegeri dan kaum imperialis diluarnegeri. Apa jang tadinja mereka bajangkan, tentang ketidakmampuan panitia² penjelenggara dan tentang kemungkinan² kekatjauan mendjadi ter-sapu samasekali. Kemampuan berorganisasi berbagai golongan

Rakjat ini adalah sangat penting dalam hubungan dengan mengorganisasi pekerdjaan² pembangunan dan pekerdjaan² jang berguna lainnja di-hari² jang akan datang.

Selain daripada itu, pelaksanaan pemilihan jang baru lalu djuga menundjukkan kemampuan alat² negara, terutama angkatan bersendjata Republik, dan menundjukkan betapa mungkinnja kerdja-sama antara panitia² penjelenggara jang lahir dari organisasi² Rakjat dengan alat² negara. Apa jang telah dilakukan oleh angkatan bersendjata Republik dengan mendjaga keamanan pemilihan umum, adalah prestasi jang tidak kalah besarnya daripada kewiraan angkatan bersendjata Republik dalam melawan agresi² kolonial Belanda dimasa jang lampau.

Djuga dalam menjelamatkan hasil² pemilihan umum angkatan bersendjata Republik dapat menundjukkan prestasinja jang penting, apa lagi mengingat bahwa kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri sangat tidak senang pada hasil pemilihan umum DPR jang baru lalu.

Pada tempatnja kita semua, disamping mengutjapkan terima kasih kepada pemilih partai masing², djuga menjampaikan salut kepada angkatan bersendjata Republik.

Partai² Demokratis Mendapat Kemenangan Jang Mejakinkan

Dengan pemilihan untuk DPR jang baru lalu PKI tidak mempunyai tudjuan jang lebih daripada: *memenangkan PKI dan partai² demokratis lainnja dan mengalahkan kombinasi Masjumi-PSI jang anti-persatuan, anti-demokratis dan anti-Komunis. Pokoknja: memenangkan front persatuan anti-kolonialisme. Ini djelas dari slogan jang diadjukan PKI dalam kampanye dan program pemilihan.*

PKI bertudjuan memenangkan partai² demokratis, karena hanja dengan ini terbuka pintu jang lebar untuk memperkuat dan memperluas persatuan nasional anti-kolonialisme, untuk menghentikan aktivitas teror dari gerombolan DI-TII, untuk mempertahankan dan mengembangkan azas² demokrasi Republik Indonesia, untuk

perbaikan ekonomi negeri dan perbaikan nasib hidup Rakjat, dan untuk ikut menjelamatkan perdamaian dunia.

Apakah Rakjat Indonesia mentjapai tudjuannja dengan hasil pemilihan jang baru lalu? Ja, Rakjat Indonesia mentjapai tudjuannja. Kombinasi Masjumi-PSI jang anti-persatuan, anti-demokratis dan anti-Komunis dikalahkan oleh partai² jang mendjalankan politik persatuan dan politik nasional jang demokratis.

Berbeda dengan Masjumi-PSI, semua partai demokratis, seperti PKI, PNI, PSII dan NU, menekankan pidato kampanye pemilihan pada persatuan bangsa dan pada pentingnja kerdjasama antara partai² dan golongan², pada pentingnja pemulihan keamanan, pada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, pada pentingnja menjelamatkan azas² demokrasi Republik dan pada pentingnja kerdjasama jang saling menguntungkan antara bangsa² di dunia. Djadi bertentangan samasekali dengan pidato² kampanye pemimpin² Masjumi-PSI jang ditekankan pada pertentangan dan permusuhan antara Rakjat dengan Rakjat, jang berdjaja memberi dorongan kepada gerombolan teroris DI-TII, jang tidak menggugat kepentingan politik dan ekonomi kaum kolonialis Belanda. Adanja Front Anti-Komunis (FAK) dan Front Anti-Marhaenis (FAM) jang dipimpin oleh orang² Masjumi menundjukkan ketiadaan toleransi dan kementahan untuk demokrasi.

Rakjat Indonesia, sebagaimana djuga Rakjat² negeri² lain, adalah toleran, tjinta persatuan dan serasi untuk demokrasi. Oleh karena itu, hasil pemilihan jang baru lalu menundjukkan bahwa bagian jang sangat besar dari Rakjat Indonesia menolak politik dan tjara² jang digunakan oleh Masjumi-PSI. Inilah sebab pokok jang membikin kombinasi Masjumi-PSI menderita kekalahan mutlak dari partai² jang mereka musuhi dan mereka serang habis²an selama kampanye untuk DPR jang baru lalu.

Kemenangan NU Menundjukkan Ketjenderungan Massa Islam Kepada Demokrasi

Sungguh menarik perhatian jalah kemenangan NU jang diluar dugaan orang banyak. Tetapi sebenarnja, ini adalah wadjar mengingat tradisi Islam di Indonesia jang sudah ber-abad² dan tradisi

NU sendiri jang sudah berpuluh tahun. Tetapi kemenangan NU tidak hanja karena tradisinja sadja.

Kita sering mendengar orang berkata bahwa NU adalah „kolot”, „kurang demokratis” atau „kurang modern” dalam soal² keagamaan, hal mana PKI tidak akan mentjampurinja. Tetapi jang njata jalah, bahwa dalam soal-soal politik, terutama dalam pidato² pemimpin² NU selama kampanye pemilihan umum DPR jang baru lalu NU menundjukkan toleransi dan kesediaan mewujudkan demokrasi dan mendjalankan politik jang bersifat nasional anti-kolonialisme. Kesediaan NU mewujudkan demokrasi dan mendjalankan politik jang bersifat nasional djuga nampak ketika partai ini duduk dalam kabinet Ali-Arifin. Politik demikian ini tidak bisa diragukan, pasti lebih tjotjok bagi massa Islam Indonesia daripada politik Masjumi jang anti-persatuan, jang senang pada permusuhan dan mengandjurkan permusuhan antara Rakjat dengan Rakjat, jang anti-demokratis dan jang anti-nasional.

Ada orang berpendapat bahwa perpindahan massa Islam dari Masjumi ke NU membuktikan bertambah konservatifnja massa Islam. Ini tidak benar, karena politik NU selama kabinet Ali-Arifin dan politik jang dikemukakan oleh pemimpin² NU dalam pidato² kampanye pemilihan samasekali tidak konservatif, malah menundjukkan kesediaan NU bekerjasama dengan partai² demokratis, djuga dengan PNI dan PKI, tentu sadja dengan sjarat tidak merugikan agama Islam.

Djadi, dalam soal² politik, apa jang kita lihat sampai sekarang, NU adalah lebih demokratis dan lebih nasional daripada Masjumi-PSI, sehingga banjaknja pemilih NU merupakan bukti ketjenderungan massa Islam kepada demokrasi. Penjesuaian agama Islam dengan sifat khusus Indonesia serta politik anti-kolonialisme NU lebih menarik massa Islam daripada „modernisme” Masjumi dila-pangan agama dan penjesuaian politik partai ini dengan kepentingan kapital monopoli asing.

Selama NU mendjalankan politik persatuan anti-kolonialisme, politik jang nasional dan demokratis seperti jang didjalankannja selama kabinet Ali-Arifin dan seperti jang dikemukakan oleh pemimpin²nja dalam kampanye pemilihan, apalagi djika NU bersikap tegas terhadap gerombolan² teror jang memakai kedok Islam, maka

NU akan mendjadi partai Islam jang terpenting dan terbesar di Indonesia.

Djuga PSII dan Perti akan mendapat kemadjuan² penting sebagai partai Islam di-waktu² jang akan datang, selama partai² ini setia kepada tradisinja dan politiknya jang demokratis dan progresif.

Kemenangan PNI Adalah Bukti Kuatnja Semangat Anti-Kolonialisme Rakjat Indonesia

Usaha Masjumi-PSI untuk menjatuhkan PNI dalam kampanye pemilihan umum dengan memakai sembojan „anti-korupsi” dan „anti-lisensi istimewa” tidak berhasil. Rakjat Indonesia sudah tju-kup mengerti bahwa sembojan² tsb. samasekali bukan ditujukan untuk membasmi korupsi, tetapi lebih banjak untuk menutupi pembelaan Masjumi-PSI terhadap modal monopoli asing dan terhadap gerombolan teroris DI-TII.

PNI adalah partai nasionalis jang tertua jang hidup hingga sekarang, dan menurut tradisinja PNI adalah anti-kolonialisme. Pengalaman menundjukkan, bahwa untuk tudjuan anti-kolonialisme PNI menganggap adalah satu keharusan bekerdjasama dengan semua partai jang berdjuaug untuk kemerdekaan nasional, djadi djuga dengan PKI. Sifat anti-kolonialisme dari PNI ini sampai waktu achir² ini tetap dipertahankan dan dibuktikan dengan politik anti-kolonialisme selama kabinet Ali-Arifin, terutama dengan berlangsungnja konferensi Asia-Afrika di Bandung jang berhasil merumuskan politik anti-kolonialisme, politik perdamaian dan politik kerdjasama jang saling menguntungkan antara negara² Asia-Afrika.

Selama kabinet Ali-Arifin PNI telah menundjukkan perbedaan politiknya jang penting dan besar daripada politik Masjumi-PSI. Inilah antara lain faktor terpenting jang telah memungkinkan PNI muntjul sebagai partai terbesar dari kantjah pemilihan DPR jang baru lalu.

Selama PNI setia kepada tradisinja jang demokratis dan anti-kolonialisme, dan selama PNI berpegang teguh pada politik luar-negerinja jang dirumuskan oleh konferensi A-A di Bandung, dan

apalagi djika PNI berhasil membersihkan diri dari elemen² korup, maka PNI akan tetap mendjadi partai nasionalis jang terpenting.

Kemenangan PKI Berarti Kemenangan Politik Persatuan Nasional Dan Membuktikan Eratnja Hubungan PKI Dengan Massa Rakjat Pekerdja

PKI jang umurnja sudah 35 tahun, tetapi selama 20 tahun (1926-1945) terpaksa bekerdja dibawahtanah karena diillegalkan pemerintah kolonial, dan pada tahun² belakangan ini sering mendapat pukulan² hebat dari pemerintah² reaksioner, terutama tahun 1948 dan 1951, telah keluar dari gelanggang pemilihan DPR jang baru lalu sebagai salahsatu partai besar. Ini adalah berkat kesetiaan anggota² dan kader² PKI kepada tjita²nja, berkat kebenaran garis politik PKI, berkat kesetiaan dan ke-sungguh²an PKI membela kepentingan se-hari² massa Rakjat pekerdja, dan berkat per-djuangan PKI jang tidak henti²nja untuk persatuan Rakjat pekerdja dan persatuan seluruh bangsa.

Untuk pemilihan DPR jang baru lalu PKI telah mengemukakan program jang kongkrit jang akan diperdjuangkan oleh anggota² PKI jang duduk dalam parlemen baru nanti. PKI mengharapkan kontrol dari massa sampai kemana anggota² PKI memperdjuangkan program jang sudah dikemukakan oleh PKI kepada massa dalam kampanye pemilihan.

Angka² jang tinggi jang ditjapai PKI dibanjak kota² di Djawa dan di-tempat² pemusatan kaum buruh di Djawa dan Sumatera, membuktikan eratnja hubungan PKI dengan massa kaum buruh. Sebaliknya pekerdjaan dikalangan kaum tani dan wanita, terutama diluar Djawa Timur dan Djawa Tengah, meminta perhatian jang banjak dan sungguh² dari PKI.

Politik anti-kolonialisme, politik perdamaian, politik membela dan mengembangkan azas² demokrasi dari Republik, dan politik persatuan nasional jang didjalankan oleh PKI, tidak hanja telah dapat menarik ber-djuta² kaum buruh dan kaum tani untuk memilih PKI, tetapi djuga telah dapat menarik pemilih² dari kalangan pegawai negeri, kalangan inteligensia, seniman, pradjurit dan polisi.

Kekalahan Masjumi-PSI Berarti Kekalahan Kaum Imperialis Asing

Dengan tidak ditutup-tutupi koran² imperialis diluarnegeri, baik di Eropa maupun di Amerika, telah menjatakan kesedihan dan keketjewaannya berhubung dengan kekalahan kombinasi Masjumi-PSI. Adalah diluar dugaan mereka, bahwa djago mereka Masjumi-PSI tidak mentjapai majoritet dalam parlemen baru. Harga saham maskapai² monopoli asing yang beroperasi di Indonesia mendadak merosot mendengar kekalahan² yang diderita kedua partai ini. Negara² yang terikat oleh persekutuan perang SEATO sudah menjatakan keketjewaannya dengan kekalahan kombinasi Masjumi-PSI.

Dengan adanya kenyataan² seperti tsb. diatas maka lenjaplah ke-ragu²an bahwa Masjumi-PSI memang mewakili kepentingan kapital monopoli asing di Indonesia. Sikap marah dan ketjewa dari kaum imperialis asing lebih lebar membuka tabir yang selama ini menutupi kedua partai ini.

Dengan ini menjadi djelas rol apa yang dimainkan oleh gerombolan² DI-TII yang dalam pemilihan DPR yang baru lalu membantu Masjumi, dan menjadi makin djelas pula rol apa yang dimainkan oleh Sumitro (PSI) dengan politik perekonomiannya yang bangkrut.

Jang tambah meyakinkan lagi, bahwa pemilihan DPR yang baru lalu berachir dengan kekalahan kaum imperialis, jalah tidak terpilihnya golongan komprador dalam parlemen sementara sekarang ini, seperti PIR Hazairin dan Fraksi Demokrat (1).

Tetapi harus mendapat perhatian, bahwa kalahnya kaum sosialis kanan (PSI) tidak berarti bahwa rol mereka akan segera lenjap dari dunia politik Indonesia. Dengan sedikit kursi yang mereka dapat diparlemen baru dan dengan „keahlian” mereka dalam melakukan berbagai intrik dan intimidasi, mereka akan meneruskan rolnya dalam mendalangi Masjumi, dalam menginfiltrasi partai² lain dan menginfiltrasi angkatan bersendjata, dan dalam memetjah-belah gerakan buruh dan persatuan Rakjat. Masih pandjang waktunya dimana Masjumi sangat membutuhkan bantuan „keahlian”

kaum sosialis kanan dalam „melawan komunisme” dan „melawan nasionalisme”.

Pemerintah Jang Bagaimana Sesudah Terbentuk Parlemen Baru ?

Setelah ada tanda² bahwa Masjumi tidak lagi akan menjadi partai jang pertama, pemimpin Masjumi bukannya mengadakan koreksi terhadap politiknya yang anti-demokratis dan anti-persatuan yang tidak populer itu. Sebaliknya, dengan dikendalikan oleh kedutaan asing di Djakarta dan dengan bisikan kaum sosialis kanan yang hampir sekarat, pemimpin² Masjumi dengan bernafsu meneruskan politik reaksionernya, sekarang dengan sembojan² „menegakkan kekuasaan blok Islam” atau „menegakkan kekuasaan blok ke-Tuhanan”. Dengan mentjontoh kaum kolonialis Belanda dan kaum imperialis Amerika, mereka mentjoba menakut-nakuti orang kirikanannya dengan „bahaja komunisme”. Ini mereka lakukan untuk membenarkan komplotan² reaksioner yang sudah dan sedang mereka adakan.

Mereka bukannya tidak tahu, bahwa djika perbuatan mereka diteruskan maka keadaan akan menudju kesuatu „perang agama” atau „perang saudara”. Djustru karena mereka tahu ini, maka mereka giat melakukannya, karena kekatjauan di Indonesia akan merupakan bantuan langsung bagi intervensi imperialis Belanda dan Amerika. Djika ini terdjadi mereka mengharapkan akan dapat memainkan rol pertama kembali dalam dunia politik di Indonesia dan akan dapat mengangkat kembali kedudukan kaum sosialis kanan.

Mereka mengemukakan sembojan „menegakkan kekuasaan blok Islam” atau „menegakkan kekuasaan blok ke-Tuhanan” dengan dalih bahwa ini untuk „membendung bahaja komunisme” dan untuk mentjiptakan „Konstitusi Islam” dalam sidang Konstituante yang akan datang. Mereka mentjoba menarik pemimpin² partai Islam dan partai² agama lainnya supaya mau ber-sama² mereka berbuat seperti mereka, jaitu „mengkafirkan” kaum Komunis dan kaum Marhaenis (Nasionalis) serta memperkuat Front Anti-Komunis (FAK) dan Front Anti-Marhaenis (FAM) mereka.

Kegiatan pemimpin² Masjumi untuk membikin blok² ini membahayakan azas² demokrasi Republik Indonesia, membahayakan Pantjasila dan bertentangan dengan sembojan Republik kita „Bhinneka Tunggal Ika”.

Politik anti-demokratis, anti-persatuan dan anti-nasional dari pemimpin² Masjumi hanya dapat dikalahkan dengan politik persatuan anti-kolonialisme dan politik membela serta mengembangkan azas² demokrasi Republik Indonesia. Dalam hubungan dengan politik ini, sekarang mulai timbul pertanjan disana-sini: bagaimana sebaiknya pemerintah sesudah terbentuk Parlemen baru nanti?

PKI berpendapat bahwa musuh Rakjat Indonesia jang pokok sekarang ialah sisa² kolonialisme Belanda dilapangan ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Untuk melikwidasi samasekali sisa² kolonialisme Belanda ini, seluruh kekuatan nasional harus dipersatukan. Untuk tudjuan ini PKI tidak pernah menolak bekerdjasama dengan partai manapun, djuga tidak pernah menolak bekerdjasama dengan Masjumi.

Supaja kekuatan nasional dapat dikonsentrasi setjara maximal agar seluruh kekuatan bangsa dapat seluruhnja dipukulkan pada kolonialisme Belanda, maka pemerintah jang sebaiknya menurut PKI ialah:

Pemerintah Koalisi Nasional jang mendjalankan politik anti-kolonialisme dari kabinet Ali-Arifin, jang dipimpin oleh PNI dan NU, dan dimana didalamnja duduk djuga PKI, Masjumi, PSII, Parkindo serta partai² dan golongan² lainnja. Dengan kombinasi ini Pemerintah praktis tidak menghadapi oposisi, seluruh kekuatan bangsa dapat ditudjukan untuk melawan musuh dari luar dan untuk pembangunan dalamnegeri.

Kalau partai² demokratis jang menang sekarang tetap setia kepada apa jang sudah mereka utjapkan dalam pidato² kampanye pemilihan DPR jang baru lalu, maka pemerintah sesudah terbentuk DPR baru nanti pasti akan lebih madju dan lebih tegas tinakannja daripada kabinet Ali-Arifin jang lalu. Ini mungkin dan ini patut diusahakan.

Selamatkan dan konsolidasi kemenangan front persatuan!

Djakarta, 10 Oktober 1955

Artikel ini adalah pidato kawan Aidit dimuka Sidang Politburo jang diperluas pada tgl. 8 November 1955. Pidato ini menjimpulkan pengalaman² terpenting dari pemilihan umum untuk DPR pada tgl 29 September 1955 dan menundjukkan tugas Partai untuk mengkonsolidasi kemenangan Partai dan front persatuan dalam pemilihan itu sebagai langkah untuk memenangkan Partai dan front persatuan dalam pemilihan untuk Konstituante pada tgl. 15 Desember 1955. Perdjuangan untuk memenangkan Partai dan front persatuan dalam pemilihan untuk Konstituante pada hakekatnja adalah perdjuangan untuk mempertahankan Republik Proklamasi 1945.

PERTAHANKAN REPUBLIK PROKLAMASI 1945 !

Kawan², sidang Politbiro kali ini adalah sidang yang istimewa. Sebagaimana sudah kita putuskan dalam sidang Politbiro yang lalu, kalau keadaan mengizinkan sudah seharusnja kita memanggil Sidang Pleno Central Komite untuk mendiskusikan dan memberi nilai politik yang tepat kepada kenyataan politik yang penting, yaitu hasil pemilihan Parlemen tanggal 29 September yang lalu. Tetapi kita sudah seia-sekata, bahwa sidang Central Komite tidak mungkin kita adakan, mengingat kesibukan anggota-anggota CC yang bertugas memimpin Komite² Provinsi atau setingkat Provinsi, berhubungan dengan sudah sangat dekatnja hari pemungutan suara untuk Konstituante (15 Desember 1955). Sidang Politbiro kali ini, yang juga dihadiri oleh anggota² Central Komite bukan-anggota Politbiro yang bertempat tinggal di Djakarta, kita adakan untuk melaksanakan tugas politik Sidang Pleno Central Komite yang tidak mungkin diadakan itu. Disinilah letak keistimewaan sidang kita ini.

Laporan² mengenai pengalaman Partai dalam mengorganisasi dan memobilisasi massa dalam pemilihan untuk Parlemen dari sebagian besar daerah² sudah sampai pada Sekretariat CC. Laporan² ini sudah didiskusikan oleh Sekretariat CC dengan Panitia Pemilihan Central (PPC) Partai dan wakil² dari beberapa Komite Provinsi. Diskusi² sudah mengambil kesimpulan² dan berdasarkan kesimpulan² itu sudah dibikin petundjuk² baru untuk memenangkan Partai dalam pemilihan untuk Konstituante yang akan datang.

Mengenai hasil pemilihan, sebagaimana kawan² sudah mengetahui, Partai kita keluar dari kotak suara sebagai salahsatu diantara 4 partai besar (yang lainnja PNI, NU dan Masjumi). Walaupun penghitungan suara belum selesai, sekarang sudah dapat dipastikan bahwa di-pulau² Djawa dan Sumatera, dua pulau besar yang terpenting dinegeri kita dimana terdapat lebih dari 75% dari penduduk negeri kita (63 djuta dari 80 djuta), dan dimana terdapat 80% dari seluruh pemilih yang terdaftar (35.994.867 dari 43.104.

464 pemilih), PKI dengan tidak bergabung dengan partai demokratis lainnja berhasil mengalahkan Masjumi. Partai menempati tempat nomor 4 untuk seluruh Indonesia disebabkan masih sangat barunja perkembangan Partai diluar pulau² Djawa dan Sumatera. Tapi satu kenyataan, bahwa Partai sudah tersebar diseluruh negeri, sampai² dipedalaman Kalimantan, di-pulau² ketjil Nusatenggara dan Maluku, dimana penduduknja barangkali baru pada bulan² belakangan ini sadja untuk pertama kalinya melihat lambang Partai.

Pendeknja, hasil pemilihan untuk Parlemen yang lalu telah menempatkan Partai kita pada posisi yang lebih kuat didalam dan diluar parlemen. Didalam parlemen Partai akan mendapat tambahan kursi lebih dari 100% (dalam Parlemen Sementara sekarang 17 kursi). Adanja lebih dari 6 djuta pemilih palu-arit, yaitu kira² 20% dari semua suara yang sah, yang tersebar diseluruh negeri adalah djawaban yang djitu pada dongengan² kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri, yang mengatakan bahwa Indonesia tidak subur untuk Partai Komunis karena „Rakjat Indonesia sebagian besar beragama” atau karena „Rakjat Indonesia sangat terikat pada adat”. Kita yakin bahwa mereka sendiri tidak pertjaja pada dongengannya, karena mereka djuga tahu bahwa Rakjat Rusia dizaman Tsar dan Rakjat Tiongkok dizaman Tjiang Kai-sjek, yang djuga beragama dan terikat pada adat, telah bangun dan memenangkan Revolusi dibawah pimpinan Partai Komunis. Dongengan² perlu mereka sebar untuk memfitnah se-olah² kaum Komunis adalah „tukang rusak agama” dan „tukang rusak adat”. Tetapi, angka² yang didapat PKI dalam pemilihan menunjukkan bahwa Rakjat Indonesia sudah mulai kritis terhadap dongengan² perampok² minyak, karet, timah, kopi dan lain² hasil bumi dan hasil keringat Rakjat Indonesia.

Kemenangan front persatuan dan kemenangan Partai Komunis dalam pemilihan yang lalu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya subur untuk flora dan fauna, tetapi djuga subur untuk semua tjita² yang baik, seperti untuk tjita² kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan persatuan. Djuga untuk Partai Komunis yang selamanya ber-tjita² baik, Indonesia adalah subur. Sebaliknya, kekalahan kombinasi Masjumi-PSI adalah bukti bahwa Indonesia

bukan tanah yang subur untuk politik anti-Rakjat, politik membela kolonialisme, politik tjari untung dengan membantu politik perang Amerika, politik anti-demokrasi dan anti-Komunis.

Melihat hasil yang didapat oleh Partai kita dalam pemilihan untuk Parlemen yang lalu samasekali tidak ada tempat untuk pesimisme sebagaimana juga tidak ada tempat untuk optimisme yang keterlaluan sampai menjadi lupa daratan. Yang ada tjuma tempat untuk bekerdja lebih keras lagi, tempat untuk mengadakan aksi² politik yang didukung oleh massa yang luas, untuk agitasi dan propaganda, untuk menjelaskan sesuatu setjara benar, untuk mempersatukan, memobilisasi dan mengorganisasi perdjuaan Rakjat. Untuk pekerdjaan besar ini harus diusahakan supaya semua Komunis dan semua kekuatan demokratis mengambil bagian.

Pemilihan Parlemen Yang Pertama Adalah Manifestasi Yang Sungguh² Dari Demokrasi Dan Kemenangan Demokrasi Yang Besar

Kawan², pemilihan umum dinegeri kita dilangsungkan dalam keadaan internasional yang sudah menjadi djauh lebih reda dan djauh lebih menenteramkan hidup manusia, sebagai akibat yang logis dari kemadjuan gerakan perdamaian, daripada kedjadian² internasional yang penting seperti Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955 dan Konferensi Para Kepala Pemerintah Empat Besar di Djenewa dalam bulan Djuli 1955. Kekuatan perdamaian terlalu besar untuk membiarkan begitu sadja dunia dibakar untuk ketiga kalinya dalam perang dunia oleh klik² agresor dari kalangan yang berkuasa di Amerika Serikat. Perlawanan Rakjat Maroko dan Aldjazair terhadap perang kolonial yang dilantarkan oleh Perantjis, demikian juga perlawanan bangsa² Arab di Timur Tengah terhadap intervensi dan agresi Amerika dan Inggris adalah bukti kebangkitan yang makin hebat dari perdjuaan kemerdekaan bangsa² terdjadjah dan setengah-terdjadjah. Semangat anti-perang dan anti-kolonialisme itulah yang mendjiwai Rakjat² dari dunia kita sekarang.

Tetapi adalah juga satu kenyataan, bahwa bersamaan dengan makin menaiknja semangat anti-perang dan anti-kolonialisme makin

menaik pula kekalahan kaum penghasut perang dan kaum pendjadjah. Kekatjauan² yang timbul di Korea, Indotjina, Djerman dan belakangan ini juga di Timur Tengah adalah bukti² kekalahan kaum imperialis untuk tetap mengatjau perdamaian, memetjahbelah persatuan Rakjat dan menindas gerakan kemerdekaan. Juga usaha² mereka untuk menggagalkan pemilihan umum dinegeri kita dan untuk merangkul pemerintah Masjumi-PSI-Federalis, adalah dalam rangkaian pekerdjaan mereka untuk memperluas blok perang, untuk kepentingan intervensi dan untuk menindas gerakan kemerdekaan. Kita sudah dapat mentjegah usaha mereka yang mau menggagalkan pemilihan umum yang pertama dinegeri kita, walaupun demikian kita harus tetap waspada dalam usaha menjelamatkan dan mengkonsolidasi kemenangan Rakjat yang ditjapai dalam pemilihan umum yang lalu.

Kawan², pemilihan umum yang pertama dinegeri kita merupakan manifestasi yang sungguh² dari demokrasi dan harus dipandang sebagai sukses yang besar dari demokrasi. Sebagaimana sudah kita ketahui, sebelum pemilihan umum dilangsungkan, kaum imperialis asing dan kaum reaksioner dalam negeri sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggagalkan pemilihan umum, antara lain dengan menjatuhkan kabinet Ali-Arifin. Dengan tidak setjara parlementer mereka berhasil menjatuhkan kabinet Ali-Arifin, tetapi mereka tidak berhasil menggagalkan pemilihan umum. Lebih dari 75% dari orang yang berhak pilih telah memberikan suaranya. Sampai batas² tertentu Undang² Pemilihan kita dan praktek pada hari pemungutan suara memperlihatkan adanya sifat bebas dan rahasia. Untuk negeri yang belum merdeka penuh seperti negeri kita, ini adalah satu prestasi. Suara yang mungkin lebih dari 70% yang didapat oleh PKI, PNI, NU, PSII, dan lain² partai bekas pendukung kabinet Ali-Arifin, yang semuanya beberapa bulan yang lalu pernah ber-sama² dan berhasil mempertahankan sistim demokrasi parlementer dan menentang pembentukan pemerintah yang tidak bertanggungjawab pada parlemen, menundjukkan kemenangan yang besar dari demokrasi. Sebaliknya, kekalahan kombinasi Masjumi-PSI yang beberapa waktu yang lalu berusaha keras untuk menghapuskan sistim demokrasi parlementer dan menggagalkan pemilihan umum, membuktikan kekalahan partai² yang anti-demo-

kratis. Singkatnja, pemilihan untuk parlemen jang lalu dengan jelas menunjukkan pilihan Rakjat Indonesia, jaitu demokrasi.

Dengan menjatakan hal diatas, samasekali tidak boleh kita lupa-kan, bahwa pemilihan umum bukanlah kuntji wasiat untuk men-tjapai tudjuan² revolusioner Rakjat. Masih ada kader² dan ang-gota² Partai jang memberi nilai terlalu tinggi kepada perdjuaan parlementer, jang mengira bahwa dengan pemilihan umum akan dapat dibentuk pemerintah jang bersedia mendjalankan program Demokrasi Rakjat. Tentang tidak benarnja fikiran ini sudah di-terangkan dalam program Partai dan sudah dikupas sekali lagi dalam Sidang Pleno ke-III Central Comite. Dengan pemilihan umum, kita tidak bertudjuan untuk suatu revolusi baru, tetapi kita hanja memperdjuaan kebebasan demokratis jang lebih luas, memperdjuaan suatu pemerintahan demokratis jang tidak ber-tindak se-wenang² terhadap gerakan Rakjat, pendeknja, satu ke-adaan jang memungkinkan perkembangan gerakan Rakjat untuk membela kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan per-baikkan nasib. Djuga Pemerintah Koalisi Nasional jang kita usul-kan bukan pemerintah revolusi. Kawan² kita jang tidak mengerti ini adalah tidak mengerti program Partai, dan mereka pasti akan ketjewa karena tidak mentjapai „tudjuannya” dengan pemilihan umum.

Selama kampanye pemilihan ada kalanja kita memakai perkata-an Presiden Sukarno jang mengatakan, bahwa pada tanggal 29 September 1955 „Rakjat akan mendjadi hakim”. Kita tidak per-nah mengertikan kalimat ini, bahwa hari pemungutan suara untuk parlemen akan membawa Rakjat kesinggasana kekuasaan dan akan menghakimi musuh²nja. Kita memberikan arti jang terbatas pada utjapan „Rakjat akan mendjadi hakim” ini, jaitu bahwa pada hari pemungutan suara untuk parlemen, Rakjat akan menghakimi Par-lemen Sementara, jang dibentuk tidak atas pilihan Rakjat, tetapi sebagai hasil persetudjuan KMB jang chianat. Dalam artian ini, memang pada tanggal 29 September jang lalu Rakjat Indonesia, termasuk anggota² Angkatan Perang, sudah mendjadi hakim. Par-lemen hasil persetudjuan KMB tinggal menunggu waktunja untuk dilikwidasi, sebagian besar agen² kolonialisme jang duduk dalam parlemen berkat kekuasaan Belanda tempo hari harus angkat kaki.

Pemilihan umum jang lalu djuga berachir dengan kekalahan pem-bela² gerombolan DI-TII, pembela² intervensi asing dan pembela² pakt perang SEATO dalam parlemen.

Pemilihan umum adalah penting, ja, sangat penting. Tetapi, se-penting²nja pemilihan umum ia tidak akan mengambil oper rol revolusi. Didalam pemilihan umum Rakjat menjatakan keinginan-nja tidak dalam bentuk revolusioner, tetapi dalam bentuk demo-krasi jang tenang. Adalah keliru djika kita mengharapkan suatu revolusi dari pernajaan jang diberikan dalam bentuk demokrasi jang tenang. Tetapi adalah djuga keliru djika kita tidak melihat pentingnja pernajaan jang diberikan oleh Rakjat dalam bentuk demokrasi jang tenang, jang sebagaimana sudah kita lihat sendiri, memberikan kedudukan baru pada Partai kita dan memberikan perspektif baru untuk perkembangan gerakan Rakjat.

Diatas kita katakan, bahwa pemilihan umum jang lalu berachir dengan kemenangan front persatuan dan kemenangan Partai kita, pendeknja kemenangan partai² demokratis. Ini adalah satu kenja-taan pada waktu ini. Tetapi, berdasarkan pengalaman Rakjat Indo-nesia sendiri, adalah keliru kalau kita beranggapan bahwa partai² lain, jang sekarang bersedia bekerdjasama dengan kita, dalam tiap² keadaan dan tiap² waktu akan terus mendjalankan politiknya jang demokratis. Kita mengharapkan dan berusaha supaya partai² itu tetap mendjalankan politik jang demokratis. Tetapi, dalam Kongres Nasional ke-V Partai sudah kita analisa dan kita tetapkan watak partai² lain itu dalam kita menganalisa dan menetapkan watak burdjuasi nasional, jaitu bahwa burdjuasi nasional dalam keadaan tertentu dan sampai batas² tertentu, dapat mengambil bagian dalam perdjuaan melawan imperialisme, tetapi karena lemahnja bur-djuasi nasional Indonesia dilapangan ekonomi dan politik, maka dalam keadaan sedjarah tertentu burdjuasi nasional jang wataknya bimbang itu bisa gojang dan tidak konsekwen melawan imperia-lisme. Oleh karena kita sudah mengetahui hal ini, maka kita harus senantiasa memperhitungkan kemungkinan, bahwa dalam keadaan tertentu burdjuasi nasional tidak ikut dalam front persatuan, dalam keadaan lain lagi mungkin ikut. Ini penting kita ketahui dan kita sedari untuk mengikuti dan memimpin perkembangan selandjutnja. Kita hanja bisa dengan baik mendjalankan politik front persatuan

kita, djika kita dengan djudjur dan sungguh² bekerdja untuk persatuan, dengan tidak lupa mengadakan kritik² jang perlu terhadap politik partai² lain jang merugikan persatuan dan merugikan Rakjat. Kita mengkritik mereka dan kita djuga bersedia menerima kritik dari mereka dengan tudjuan untuk memperluas dan memperkuat front persatuan. Sikap diam terhadap partai² lain jang merugikan persatuan dan merugikan Rakjat adalah tidak menguntungkan persatuan.

Hasil pemilihan umum jang lalu membenarkan salahsatu kesimpulan jang diambil oleh Sidang Pleno ke-II CC jang mengatakan bahwa „Pada umumnja Rakjat kita dipengaruhi oleh tiga aliran politik, jaitu aliran Komunis, Nasionalis dan Islam. Inilah aliran² jang meresap sampai kekalangan Rakjat banjak. Aliran sosialis kanan, sekarang terkenal dengan aliran 'soska' (sosialis kanan), jang di Indonesia diwakili oleh PSI, tidak mempunyai pengikut jang luas dikalangan Rakjat-banjak". Tetapi kekalahan PSI tidak boleh diartikan bahwa rol kaum sosialis kanan akan segera lenjap dari panggung politik Indonesia. Mereka akan meneruskan politik menginfiltrasi dan memperkuda partai² lain, politik memetjahbelah gerakan Rakjat, politik anti-demokrasi dan anti-Komunis. Hasil pemilihan umum jang lalu akan lebih menjederhanakan pembagian massa Rakjat dalam organisasi², dan ini akan membantu kita untuk mengetahui setjara kongkrit bagaimana massa Rakjat jang luas terorganisasi, sebab² apa jang menimbulkan organisasi² itu, bagaimana organisasi² itu disusun, apa jang mendjadi tudjuannja, aliran politik apa jang diikuti oleh pemimpin²nja. Pengetahuan tentang ini penting untuk memperbaiki pekerdjaan menggalang persatuan, untuk membikin kontak² guna mengadakan kerdjasama buat mengkonsentrasi seluruh kekuatan nasional.

Dalam analisa kita mengenai hasil sementara pemilihan untuk Parlemen jang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober jang lalu, sudah didjelaskan arti politik dari kemenangan NU, PNI, dan PKI, dan djuga diterangkan arti politik dari kekalahan blok Masjumi-PSI. Sekarang apa watak klas daripada kemenangan dan kekalahan itu? Watak klas kemenangan PKI dan kekalahan kombinasi Masjumi-PSI sudah djelas, jaitu jang satu kemenangan politik proletariat dan jang lain kekalahan politik burdjuasi kom-

prador dari pemimpin² Masjumi-PSI. Jang kurang dimengerti oleh banjak kawan² kita ialah watak klas kemenangan PNI dan NU. Untuk mengerti ini kita harus ingat kembali kepada salahsatu kesimpulan Kongres Nasional ke-V mengenai masjarakat kita.

Salahsatu kesimpulan jang kita ambil dalam Kongres ke-V mengenai masjarakat kita ialah sebagai berikut: „Indonesia adalah negeri burdjuis ketjil, artinja negeri, dimana perusahaan pemilik² ketjil masih sangat banjak terdapat, terutama pertanian perseorangan jang kurang produktif". Mengukur kekuatan masjarakat dengan tidak memperhitungkan kenyataan ini adalah keliru. Sesuatu partai, jang mungkin organisasinja tidak begitu baik, jang pimpinannya sudah terang tidak hanja terdiri dari elemen burdjuis ketjil, tetapi dalam kampanye pemilihannya mewakili pikiran dan perasaan klas ini, jang umumnja „tidak kesana dan tidak kemari", jang umumnja mentjari „djalan tengah" jang „paling selamat", bisa mendapat pemilih jang banjak. Dalam mengukur kekuatan masjarakat kawan² kita sering lupa memperhitungkan faktor objektif ini, oleh karena itu tidak mungkin memahami kemenangan PNI dan NU. Padahal djustru faktor ini pulalah jang menjebakkan Partai kita menugaskan pada dirinja untuk menarik burdjuasi ketjil, terutama kaum tani, se-banjak²nja disekitar Partai djika Partai hendak menghimpun bagian terbesar dari Rakjat.

Kemenangan demokrasi dalam pemilihan jang lalu tidak hanja membuka perspektif baru untuk pekerdjaan menggalang front persatuan, tetapi djuga untuk meluaskan keanggotaan dan organisasi Partai. Sekarang kita mengetahui dengan kongkrit ditempat mana terdapat pemilih Partai jang banjak, dimana jang kurang dan dimana jang belum ada samasekali. Berdasarkan pengetahuan kita dan analisa kita tentang semuanya ini, kita tetapkan program kerdja kita jang baru, kita didik kader² baru dan tetapkan kader² jang berpengalaman untuk memimpin pelaksanaan program itu.

Dalam kita menjatakan bahwa hasil pemilihan jang lalu harus dipandang sebagai manifestasi jang sungguh² dari demokrasi dan sebagai sukses jang besar dari demokrasi, samasekali tidak boleh kita lupakan adanya pembatasan² manifestasi demokrasi itu, tidak hanja dilihat dari kenyataan selama persiapan dan pada hari pemu-
ngutan suara, tetapi djuga dilihat dari sudut umum, jang menjata-

kan bahwa tidak mungkin pemilihan berlangsung benar² demokratis selama kekuasaan masih berada dalam tangan partai² reaksioner. Ini dibuktikan oleh kenyataan² diluar negeri dan oleh kenyataan² di negeri kita sendiri selama pemilihan jang lalu.

Walaupun Undang² Pemilihan kita agak madju, tetapi pelaksanaan undang² ini berat sebelah jang bersifat merugikan Partai kita. Dalam Panitia Pemilihan Indonesia (Pusat), dibanjak Panitia Pemilihan (Provinsi) dan panitia² penjelenggara jang lebih bawah, PKI tidak duduk. Ini berarti mengurangi hak kontrol dari PKI dalam pelaksanaan Undang² Pemilihan jang agak madju itu. Apalagi kalau mengingat bahwa di Djawa Barat banjak tempat² dimana sesudah pemungutan suara, surat² suara tidak dibatjakan dimuka umum, tetapi terus dibawa kepanitia jang lebih atasan.

Partai² pemerintah mempunyai kelebihan dari Partai Komunis, jaitu pengaruh politik mereka dalam aparat² negara jang memberikan banjak fasilitas pada mereka dan dapat membantu mereka dalam menambah djumlah pemilih setjara tidak wadjar. Walaupun ada larangan, tetapi mereka setjara leluasa menggunakan milik djawatan² pemerintah dan menggunakan „pengaruh” sebagai orang pemerintah. Tentu sadja ini dilakukan dengan seribu satu akal sehingga tidak dapat dituntut menurut undang².

Partai² jang berkuasa mempunyai orang²nja jang dapat digunakan untuk mendapatkan fonds pemilihan. Satu kenyataan, bahwa umumnja partai² lain membelandjai keperluan kampanye pemilihannja tidak dengan uang jang didapat dari sokongan anggota² dan sokongan dari massa. Kita tidak berketjil hati karena ini, malahan kita berkejakinan bahwa djalan jang kita tempuh adalah djalan jang se-baik²nja, jang menundjukkan perbedaan kwalitatif antara hasil jang kita dapat dengan hasil jang didapat oleh partai² lain. Partai² reaksioner berusaha memfitnah se-olah² Partai kita ikut menjuap pemilih² seperti jang memang mereka perbuat, tetapi Rakjat tidak mungkin pertjaja, karena tahu betul bahwa PKI mendapat uang djustru dari sokongannja. Dan bukanlah sesuatu jang kebetulan kalau Rakjat mengatakan bahwa PKI menang karena kedjudjuran. Rakjat berkata demikian, karena mereka mempunyai pengalaman sendiri atau melihat sendiri bagaimana kaum Komunis mendapatkan uang atau bantuan tenaga, mulai dari petani sam-

pai seniman, mulai dari buruh pabrik sampai sardjana, untuk kampanye pemilihannja.

Selain daripada itu, segala apa jang tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan oleh orang² Komunis, oleh partai² lain digunakan dengan se-leluasa²nja, jaitu mesdjid, geredja, djawatan agama, dan sebagainja. Dengan melewati semuanya ini mereka mengintimidasi dan menteror pemilih². Dengan menggunakan semuanya ini mereka menjerang partai² lawannja dengan se-sengit²nja, dan dengan menggunakan ini pulalah mereka mendjandjikan sorga bagi pemilih² jang memilih partai mereka. Untuk menarik pemilih mereka tidak mengutamakan program jang kongkrit, jang akan mereka kerdjakan segera sesudah mereka terpilih mendjadi anggota parlemen. Masjumi, misalnja, lebih mengutamakan sembojan² jang abstrak daripada sembojan² mengenai perbaikan ekonomi Rakjat. Lebih dari itu Masjumi memobilisasi apa sadja jang dapat mereka mobilisasi, mulai dari ajat² Qur'an sampai kekotoran manusia untuk mengalahkan partai² lawannja. PKI tidak iri hati karena PKI tidak bisa memobilisasi begitu banjak hal² jang dapat dimobilisasi oleh Masjumi. Djuga dalam pemilihan² jang akan datang PKI tetap akan tampil kedepan dengan program² jang kongkrit, jang pelaksanaannja dapat dikontrol oleh Rakjat. Selandjutnja, PKI akan terus berdjuaag supaja agama dan perbedaan agama tidak digunakan untuk mempertadjam pertentangan dikalangan Rakjat dan menarik keuntungan dari pertentangan jang tadjam itu. PKI mengharap kepada partai² jang berdasarkan keagamaan jang berkemauan baik terhadap Rakjat, untuk dimana mungkin menudjukan dalil² keagamaan guna lebih mempersatukan seluruh Rakjat jang bermatjam ragam agama dan kejakinnja.

Satu kenyataan, bahwa dimana gerombolan teror DI-TII masih memainkan rolnja, dimana Rakjat belum tjukup bangkit dan mengadakan perlawanan dengan sengit, disitu Masjumi mendapat kemenangan, seperti diberbagai tempat di Djawa Barat, Atjeh dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya, partai² demokratis harus menerima kalah dari Masjumi. Ini djuga bukti betapa tidak demokratisnja Undang² Pemilihan dalam pelaksanaannja.

Partai² lain jang dikalangan anggotanja banjak terdapat tuan-tanah, lintahdarat, madjikan dan pemilik rumah sewaan, telah

melakukan intimidasi² terhadap pemilih², terutama terhadap simpatisan² PKI. Mereka telah mengantjam pemilih², terutama simpatisan² PKI, akan mentjabut tanahnja, akan mensita miliknya, akan mengeluarkannya dari perusahaan dan akan mengusirnya dari rumah sewaan, djika tidak memilih partai si-tuantanah, si-lintah-darat, dan si-madjikan dan si-pemilik rumah sewaan. Mereka ada kalanja menjewa sedjumlah tukang pukul untuk memaksakan keinginanja, dan tukang² pukul ini berkeliaran didekat tempat² pemungutan suara dengan pandangan dan tingkah-laku jang mengantjam.

Demikianlah beberapa bukti jang menundjukkan watak terbatas dari manifestasi demokrasi dalam pemilihan jang baru lalu, jang tidak boleh kita lupakan, djuga walaupun front persatuan dan Partai menang dalam pemilihan. Karena watak terbatas ini adalah tidak bisa dipisahkan dari sistim demokrasi burdjuis, dinegeri mana dan kapan sadjapun, maka kita tidak boleh henti²nja menerangkan watak terbatas ini kepada Rakjat. Dan kelandjutannya, bahwa kita djuga tidak boleh henti²nja terus berdjuaug untuk pemilihan jang lebih demokratis.

Tidak bisa diragukan, kalau pemilih² benar² bebas menjatakan pilihannya dan haksama semua penduduk dihormati, terang Partai kita akan mendapat hasil lebih dari 1,5 kali daripada apa jang ditjapai sekarang. Ini diluar simpatisan² PKI jang karena berbagai sebab banjak jang tidak terdaftar dan diluar jang tidak bisa sampai kekotak suara karena ditjegal oleh DI-TII ditengah djalan.

Tetapi, walaupun demikian, pemilihan jang lalu adalah manifestasi jang sungguh² dari demokrasi dan Partai kita mentjapai kemenangan. Ini adalah kenyataan jang penting, kenyataan jang akan mentjiptakan kondisi² baru untuk perkembangan perdjuaugan politik dinegeri kita. Akibatnja ialah, bahwa djuga akan terjipta kondisi² baru untuk perkembangan Partai kita, untuk pekerjaan Partai menarik sebagian besar kaum buruh dan se-banjak²nja Rakjat pekerdja, untuk meluaskan kerdjasama dan aksi² ekonomi dan politik dari massa Komunis dengan massa partai² Nasionalis, Islam, Kristen, dan sebagainya. Singkatnja, untuk mengkonsolidasi Partai dilapangan organisasi dan politik.

Rakjat Indonesia Menginginkan Adanja Perubahan Dalam Politik Dan Penghidupan

Kawan², hasil pemilihan umum jang lalu tidak hanja membuktikan kewaspadaan demokrasi dan kesedaran demokrasi jang tinggi dari Rakjat Indonesia, tetapi jang lebih penting lagi, ia menundjukkan betapa dalam rasa tidak puas Rakjat Indonesia pada pemerintah sekarang dan pada keadaan jang buruk sekarang. Ini dibuktikan tidak hanja dari banjaknja pemilih² PKI, tetapi djuga dari banjaknja pemilih² PNI dan pemilih² dari massa Islam jang sudah bosan dengan Masjumi, jang selama ini terkenal sebagai partai Islam jang dalam parlemen berlipatganda lebih besar dari semua partai Islam lainnya digabungkan. Massa jang bosan dengan Masjumi ini kebanyakan memilih NU, PSII dan PERTI jang prestisenja dimata massa Islam sangat menaik selama Kabinet Ali-Arifin. NU, PSII dan PERTI masing² pasti akan mendapat kursi jang lebih banjak dalam parlemen daripada djumlah jang sekarang dipunjainja. Adalah diluar dugaan orang banjak bahwa Masjumi keluar dari kotak suara sebagai No. 4 dipulau Djawa, dimana terdapat sebagian besar dari penduduk Indonesia.

Terbuktilah, bahwa di-tempat² dimana Rakjat sudah „menge-nal” politik Masjumi, maka Masjumi tidak mendapat suara jang banjak. Ini adalah bukti jang njata dari ketidakpuasan massa Islam pada Masjumi, partai jang memimpin pemerintah sekarang.

Rasa tidak puas jang dalam dari massa terhadap kabinet sekarang dan terhadap keadaan sekarang sangat nampak dari kenyataan tidak didapatnja kursi oleh PIR-Hazairin dan oleh orang² dari Fraksi Demokrat (Federalis) jang sekarang menduduki tempat jang penting dalam kabinet Burhanuddin Harahap (BH). Ini djuga dinjatakan oleh Rakjat Indonesia dengan djumlah kursi jang akan didapat oleh PSI, jang pasti djauh lebih kurang dari kursi jang dimiliki oleh partai ini dalam Parlemen Sementara sekarang.

Dalam pemilihan umum tanggal 29 September jang lalu Rakjat Indonesia menjatakan perasaan tidak puasnja memang tidak dalam bentuk revolusioner, tetapi dalam bentuk demokrasi jang tenang. Rasa tidak puas Rakjat pada kabinet BH sangat nampak ketika angka² sementara mengenai hasil pemilihan diumumkan.

Rakjat bergembira dan bersorak djika mendengar Masjumi-PSI menderita kekalahan disesuatu tempat. Sebaliknya, pemimpin² Masjumi tidak djadi memotong kambing dan kerbau jang sudah disediakan karena mendengar kekalahan²nja, pemimpin² PSI membatalkan atjara dansa untuk menjambut kemenangannya, para pemimpin partai² dan koran² pemerintah pada marah² dan menjtjuti-maki Rakjat serta mem-bodoh²kan Rakjat karena Rakjat tidak memenangkan kombinasi Masjumi-PSI. Kaum imperialis asing dan kakitangannya pada djengkel dan marah² melihat kemenangan partai² oposisi, sedangkan sebagian besar Rakjat tertawa geli melihat kedjengkelan kaum imperialis asing dan kakitangannya itu.

Hasil pemilihan jang lalu tidak hanja membuktikan tidak puasanya Rakjat pada pemerintah sekarang, pada keadaan sekarang dan pada Masjumi-PSI-Federalis, tetapi djuga djelas menundjukkan bahwa Rakjat menghendaki perubahan pemerintahan dan perubahan keadaan, terutama perubahan mengenai penghidupannya jang tjelaka. Setjara kongkrit dapat kita katakan, bahwa hasil pemilihan jang lalu menundjukkan bahwa Rakjat Indonesia menginginkan adanya perubahan mengenai Parlemen Sementara, mengenai kabinet BH, mengenai kekatjauan jang disebabkan oleh gangguan gerombolan DI-TII, mengenai pengangguran dan semi-pengangguran jang ber-djuta², mengenai upah jang terlalu rendah, mengenai politik perekonomian dan keuangan jang bangkrut, mengenai politik luarnegeri jang pro-kolonialisme Belanda dan pro-SEATO, mengenai sewatanah jang sangat tinggi untuk para petani, mengenai irigasi jang tidak terurus baik, mengenai harga barang keperluan se-hari² jang terus membubung tinggi, mengenai tingginya sewarumah, mengenai kurangnya rumah sekolah untuk anak², dan mengenai banjak hal lagi.

Karena menginginkan perubahan maka kira² 70% pemilih memberikan suaranya kepada PKI, PNI, NU, PSII, dan lain² jang mendapat keprtajaan para pemilihnya akan dapat mengadakan perubahan. Untuk selandjutnja, hanja pemerintah jang dapat mengadakan perubahan dan menempuh djalan jang baru dalam politik negara jang akan mendapat sokongan Rakjat, dan hanja partai jang memperdjuangkan pemerintah jang demikian itulah

jang selandjutnja akan mendapat keprtajaan Rakjat. Kalau nanti ada pemerintah jang tidak berdaja untuk membikin keadaan lebih baik, untuk mengadakan arah baru dalam politik, maka pemerintah sematjam itu dan partai² jang mendukung pemerintah itu akan menjetjewakan Rakjat dan lambat-laun akan kehilangan keprtajaan Rakjat.

Pemilih² mau antré ber-djam², ada jang dalam panas terik dan ada pula jang dalam hudjan lebat, bukan per-tama² karena senang pada tandagambar partai jang dipilihnja, tetapi karena mempunyai kejakinan bahwa partai jang dipilihnja itu djika memegang kekuasaan, akan mampu mengadakan perubahan, dari keadaan jang djelek mendjadi baik atau se-tidak²nja agak baik. Djuga sebagian besar pemilih² Masjumi mempunyai harapan demikian, karena pemimpin² Masjumi dalam kampanye pemilihannya, disamping mendjandjikan sorga sesudah mati, djuga mendjandjikan perbaikan keadaan selagi hidup. Pemilih² Masjumi tentu sadja tidak akan menuntut sorga dari pemimpin² Masjumi, karena untuk itu mereka harus mati lebih dulu, tetapi perubahan keadaan penghidupan sudah terang mendjadi tuntutan mereka sebagaimana djuga mendjadi tuntutan pemilih² PKI, PNI, NU, Parkindo, PSII, Baperki, PERTI dan partai² lainnja.

PKI dalam program pemilihannya dengan tegas mentjantumkan hal² jang kongkrit, sebagai keterangan PKI kepada Rakjat mengenai apa jang akan dilakukan oleh anggota² PKI djika terpilih mendjadi anggota parlemen. Program Pemilihan PKI adalah program jang mendjamin perubahan keadaan, misalnja program supaya diberikan kebebasan demokratis jang se-luas²nja bagi Rakjat dan organisasi² Rakjat, supaya didjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan²nja jang sah, supaya keadaan kaum tani diperbaiki dengan mewadajiban tuantanah menurunkan sewatanah dan supaya tanah² kosong jang tidak dikerdjakan dibagikan dengan tjuma² kepada kaum tani tak-bertanah dan tani miskin, supaya gerombolan „Darul Islam” dibasmi, supaya pemerintahan desa dan daerah didemokrasikan, supaya pengchianat² bangsa, penggelap² dan koruptor² disingkirkan dari djabat²an pemerintah, supaya diadakan usaha untuk meninggikan panen padi dan perlindungan untuk industri nasional, supaya

djumlah sekolah ditambah, supaya Uni Indonesia-Belanda dibubarkan, supaya pemerintah menjalankan politik perdamaian yang konsekwen, dan sebagainya.

Program Pemilihan PKI yang menjamin akan adanya perubahan tetap menjadi pegangan tiap² anggota PKI, sebagai pedoman aktivitasnya didalam dan diluar parlemen. Satu langkah-pun PKI tidak akan mundur untuk memperjuangkan program yang sudah dikemukakannja kepada Rakjat dalam kampanye pemilihan. PKI akan dengan gigih memperjuangkan terlaksananya program itu. PKI menganggap adalah sangat adil djika Rakjat menginginkan perubahan kearah perbaikan.

Mengenai ketidakpuasan yang dalam dari Rakjat terhadap kabinet BH dan mengenai keinginan Rakjat akan adanya perubahan dalam pemerintahan, supaya ada pemerintahan yang menempuh djalan baru, maka PKI sudah mengemukakan pendapat untuk pembentukan suatu Pemerintah Koalisi Nasional yang luas, yang menjalankan program anti-kolonialisme dari kabinet Ali-Arifin tempo hari. PKI sengadja tidak mengemukakan program baru dan program yang lebih tinggi, tetapi mengambil program kabinet Ali-Arifin sebagai dasar, karena PKI berpendapat bahwa ini adalah djalan yang se-mudah²nja dan yang paling masuk akal, karena program kabinet Ali-Arifin sudah disetudjui oleh PNI, NU, PKI, PSII, PERTI dan golongan² demokratis lainnja. Selain daripada itu, kabinet Ali-Arifin djatuh bukan karena programnja tidak disetudjui oleh parlemen, tetapi karena faktor diluar parlemen, jaitu faktor Angkatan Darat. Tergantung pada Masjumi, Parkindo, dan lain² apakah bisa menjetudjui komposisi dan program anti-kolonialisme dari Pemerintah Koalisi Nasional yang luas itu.

Hasrat persatuan PKI begitu besarnya dan politik persatuan oleh PKI dijalankan dengan begitu konsekwen, sehingga PKI tidak mempunyai keberatan untuk duduk dalam satu pemerintahan dengan Masjumi berdasarkan satu program anti-kolonialisme yang bahkan sudah pernah dijalankan di Indonesia.

PKI mempunyai hak penuh untuk tjuriga sampai kemana Masjumi akan sungguh² menjalankan politik anti-kolonialisme, berdasarkan pengalaman ber-tahun² dimana Masjumi (dan PSI) dengan gigih menjalankan politik membela modal asing dan

membela DI. Hal ini tidak menjadi halangan, karena dengan ikut sertanja PKI dalam pemerintah merupakan kontrol yang kuat terhadap kemungkinan Masjumi menjalankan politik membela modal asing dan membela DI. Djika PKI duduk dalam pemerintah, maka PKI dapat mengajukan kritik²nja tidak hanya diluar pemerintah, tetapi djuga didalam pemerintah, terhadap partai² yang tidak konsekwen menjalankan politik anti-kolonialisme. Berdasarkan pengalaman yang memberi alasan untuk tjuriga pada Masjumi maka PKI berkeberatan dibentuknja pemerintah dimana Masjumi ikut sedangkan PKI tidak, karena pemerintah yang demikian itu tidak mungkin menjalankan program yang maju, tidak mungkin mendatangkan perubahan yang baik, karena politik Masjumi yang pro-modal asing dan pro-DI.

PKI mengusulkan kabinet Koalisi Nasional yang luas, karena PKI tahu bahwa bagian yang sangat besar dari Rakjat menghendaki adanya perubahan keadaan sekarang, dan perubahan keadaan hanya mungkin djika terbentuk pemerintah front persatuan yang anti-kolonialisme, yang menjamin hak² demokrasi dan yang menjalankan politik luarnegeri yang benar² mempertahankan perdamaian. Sedjak gagalnja Revolusi Agustus, Rakjat sudah mempunyai pengalaman, bahwa komposisi pemerintah yang sudah² seperti komposisi Masjumi-PSI (kabinet Natsir), Masjumi-PNI (Sukiman), PNI-Masjumi-PSI (Wilopo), PNI-NU (Ali-Arifin) dan komposisi Masjumi-PSI-Federalis (Burhanuddin Harahap), semuanya tidak bisa mendatangkan perubahan yang dapat menimbulkan perbaikan keadaan, terutama yang mengenai penghidupan Rakjat. Pendeknja, harus ada komposisi baru untuk menimbulkan keadaan baru sesudah pemilihan parlemen baru. Inilah pada umumnya yang diinginkan oleh bagian terbesar dari para pemilih, orang² sipil maupun militer, ketika mereka memberikan suaranya.

PKI berpendapat, bahwa djika terbentuk kabinet Koalisi Nasional, dimana aliran² politik terpenting dalam masyarakat diwakili seperti aliran politik Islam, Kristen, Nasionalis dan Komunis, maka mulailah sedjarah baru di Indonesia, dimana persatuan Rakjat dalam bentuk baru akan dengan tjepat menjadi lebih kuat. Djika ini terdjadi tidak satu golonganpun dari Rakjat Indonesia yang

akan dirugikan. Jang akan rugi hanja kaum imperialis asing dan kakitangannja.

Waktu belakangan ini, terutama dalam hubungan dengan pembentukan kabinet baru, orang suka me-njebut² tentang „perdamaian nasional” diantara berbagai partai dengan mengexklusifkan Partai Komunis. Perdamaian nasional sematjam itu, ketjuali bersifat se-kurang²nja tidak bersahabat dengan lebih dari 6 djuta Rakjat Indonesia jang memilih Komunis, djuga merupakan bibit jang sangat berbahaja, jang djika diteruskan akan mendjadi sematjam Front Anti-Komunis model Isa Anshary (Masjumi). Pengandjur² „perdamaian nasional” tanpa Komunis pada hakekatnja adalah pengandjur² front anti-Komunis dan ini berarti mereka berbuat melanggar Undang² Dasar Sementara jang mendjamin adanja hak² demokrasi dan hak² azasi manusia. Dan djika perbuatan ini diteruskan, maka tidak bisa tidak mereka akan mendjadi pengandjur² peperangan dalamnegeri.

PKI menang dalam pemilihan jang lalu antara lain karena politik persatuannja, oleh karena itu PKI akan meneruskan politik persatuannja, djuga dalam melawan politik „perdamaian nasional” tanpa Komunis. PKI akan lebih sungguh² lagi memperdjuangkan adanja perdamaian nasional atau perdamaian dalamnegeri dengan bekerdja lebih keras lagi untuk persatuan nasional dengan tidak memandang perbedaan agama, ideologi, kejakinan politik dan suku-bangsa. Untuk ini PKI akan terus mendjalankan politiknya jang bersifat mendidik Rakjat supaya Rakjat tidak mau disuruh memusuhi Rakjat, supaya Rakjat menolak persiapan front anti-Komunis jang memakai kedok „perdamaian nasional”, supaya Rakjat dengan gigih memperdjuangkan adanja persatuan nasional dari semua kekuatan nasional untuk dengan sungguh² menghapuskan sisa² kolonialisme dan dengan sungguh² memperdjuangkan masuknja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Konsolidasi Kemenangan Partai Dan Kemenangan Front Persatuan

Sukses jang ditjapai oleh Partai dalam pemilihan jang lalu adalah hasil jang pasti dari pekerdjaan jang dilakukan oleh Partai kita

sampai sekarang, hasil dari pelaksanaan garis politik dan garis organisasi Partai jang benar jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, hasil politik persatuan dan politik jang berorientasi kepada Rakjat, hasil dari sokongan Rakjat kepada garis politik ini, hasil dari perdjjuangan Partai jang terus-menerus untuk kepentingan² vital dari klas pekerdja. Adalah benar, dan ini djuga diakui oleh banjak orang jang djudjur diluar Partai kita, bahwa kemenangan PKI adalah berkat politik persatuannja dan berkat hubungannja jang erat dengan Rakjat.

Kemenangan baru merupakan kemenangan, djika kemenangan itu dapat dikonsolidasi. Djika kemenangan tidak dikonsolidasi, maka ini tidak hanja bisa berakibat pembuangan enersi jang pertjuma, tetapi djuga bisa berbalik mendjadi kekalahan. Mengkonsolidasi kemenangan adalah pekerdjaan jang sangat besar, sesuatu jang hanja bisa kita tjapai djika kita kerdjakan dengan inspirasi baru, enersi baru, dengan antusiasme, dengan gembira dan dengan tidak mementingkan diri sendiri.

Untuk mengkonsolidasi kemenangan haruslah kita beladjar dari pengalaman kita. Beladjar dari pengalaman adalah kuntji buat sukses jang akan datang. Dan peladjaran jang terpenting jang kita dapat jalah, bahwa kita mentjapai sukses karena adanja politik jang tepat jang kita laksanakan, adanja kenjataan bahwa kita senantiasa bekerdja untuk mengadakan hubungan² jang erat antara massa pekerdja dengan Partai. Dan kita mengetahui bahwa ini hanja dapat kita tjapai dengan melalui perdjjuangan se-hari² melawan semua jang mendjadi perintang kemadjuan masjarakat, melawan ketidakadilan dan melawan kemiskinan.

Pendeknja, kuntji kemenangan jalah mendjadikan Partai kita benar² Partai tipe baru, Partai jang erat hubungannja dengan massa, jang tersebar diseluruh negeri dan jang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Sebagai Partai Komunis jang sudah dewasa, Partai kita harus memenuhi semua sjarat jang dibutuhkan oleh Partai Komunis, dan jang terpenting sekarang jalah bahwa kita, dalam mentjapai sukses, walaupun bagaimana besarnja, tidak boleh buta terhadap kelemahan² jang masih ada didalam Partai. Lupa akan kelemahan mem-

bikin orang mendjadi sombong, orang sombong mesti lengah, dan orang lengah mudah dikalahkan.

Disana-sini kita melihat adanya gejala² kelemahan ideologi yang masih terdapat pada kader² dan anggota² Partai. Mereka di-umbang-ambingkan oleh angka² hasil pemungutan suara. Mereka melondjak tinggi dan optimismenja memuntjak djika mendengar angka² yang tinggi yang ditjapai oleh Partai, tetapi mereka teng-gelam kedasar lautan yang dalam dan pesimismenja men-djadi² djika mendengar angka² rendah yang ditjapai oleh Partai. Dalam hal yang pertama bisa berakibat mereka selandjutnja mengetjilkan kekuatan partai² lain, dalam hal yang kedua bisa berakibat mereka selandjutnja melihat semuanya gelap. Mereka memudji kebenaran politik Partai setinggi langit kalau ingat pada angka² yang tinggi, tetapi mereka menjalahkan kiri dan kanan kalau ingat angka² yang rendah untuk Partai. Mereka tidak berdiri diatas bumi yang njata dengan ketadjaman Komunis memperhatikan segala sesuatu, mem-peladjar, mendiskusikan dan menarik kesimpulan dari sesuatu ke-adaan dengan tenang. Saja tidak mengatakan bahwa kader² yang demikian itu banyak, tetapi ada. Dengan ini samasekali tidak ber-arti bahwa kita menjetudjui sikap kader² dan anggota² Partai yang atjuh-tak-atjuh, yang tidak ambil pusing apakah angka² Partai tinggi atau rendah, karena ini samasekali bukan sikap anggota Par-tai. Orang demikian adalah „orang asing” didalam Partai.

Disuatu tempat dimana Partai „leading” (nomor 1) fungsio-naris² Partai pada gembira, salah seorang diantaranya berkata: „Disinilah terbukti kebenaran politik persatuan dari Partai, disini-lah terbukti kebenaran sikap kita didaerah ini yang tidak mem-balas serangan² pemimpin² partai² demokratis lainnja terhadap Partai kita”. Ditempat lain, dimana Partai tidak „leading” fung-sionaris² Partai kurang gembira, salah seorang diantaranya berkata: „Disinilah salahnja politik persatuan dari Partai yang tidak meng-izinkan kita didaerah ini menjerang kembali serangan² pemimpin² partai² demokratis lainnja terhadap Partai kita”. Ini adalah dua tjontoh, dan ke-dua²nja adalah kesimpulan yang keliru.

Kawan², kapankah Partai kita melarang kita membalas atau menjerang kembali serangan² dari fihak partai² lain yang menje-rang politik Partai kita? Bukankah kewadajiban kita, disamping

mengusahakan dengan sekuat tenaga tertjiptanja persatuan, harus berani mengkritik mereka yang dalam kata² mau bekerdjasama dengan kita, tetapi dalam perbuatan merusak persatuan dan me-rugikan Rakjat? Jang sering diperingatkan oleh Partai jalah, supaja kita, dalam membalas serangan atau menjerang kembali tidak boleh melupakan bahwa apa yang kita lakukan adalah dalam rang-ka politik persatuan. Artinja dalam mengajukan kritik, kita tidak boleh mendjadi panas, mendjadi terprovokasi dan ikut seperti mereka merusak persatuan dan merugikan Rakjat. Banjak tjara² yang sudah kita ketemukan dalam mengajukan kritik dalam rang-ka persatuan. Politik persatuan dengan tidak mendjalankan kritik adalah politik persatuan yang menudju keliangkubur. Politik per-satuan kita adalah politik persatuan yang menudju Indonesia baru, dan ini hanya mungkin djika dilakukan setjara kritis. Tetapi diatas se-gala²nja, faktor kemenangan kita dalam pemilihan yang lalu jalah: perbuatan Partai untuk Rakjat dan kesungguhan Partai mengorganisasi dan memobilisasi pemilih.

Kita harus menjambut dengan gembira tiap² kemadjuan demo-kratis yang ada didalam partai² Nasionalis, Kristen, Islam dan par-tai² lainnja. Tetapi dimana ada pertentangan antara apa yang di-katakan oleh anggota² partai² ini dengan perbuatannja, antara dalil² pokok yang mereka kemukakan dengan kesimpulan yang mereka ambil, maka kita harus menundjukkan adanya pertentangan itu. Sebagai tjontoh, mereka mengatakan bahwa untuk „menjele-saikan revolusi nasional” dan untuk merebut Irian Barat harus digalang persatuan nasional yang luas. Tetapi dalam praktek mereka lebih banjak berbuat yang merugikan persatuan nasional dengan membawa perhatian pengikut²nja tidak pada perlawanan terhadap kolonialisme tetapi terhadap apa yang mereka namakan „bahaja komunisme”. Dalam praktek mereka bukan mengusahakan terhim-punnja semua kekuatan politik dan sosial dari Rakjat, tetapi mereka mengusahakan „perdamaian nasional” dengan mengexklusifkan kaum Komunis, yang berarti mengexklusifkan kekuatan politik dan sosial yang militan dan konsekwen anti-kolonialisme. „Perdamaian nasional” tanpa Komunis bukanlah persatuan nasional, tetapi usaha memetjah kekuatan masyarakat mendjadi dua. Dengan ini bukan hanya Irian Barat tidak akan mungkin dimasukkan kedalam wilayah

kekuasaan Republik, tetapi seluruh Indonesia akan dikuasai oleh Belanda dan Amerika dengan bantuan kakitangannya didalam negeri. Tjontoh jang lain, mereka berdalil dan berbitjara tentang perlunya mendatangkan kesedjahteraan bagi Rakjat. Tetapi dalam perbuatan mereka menentang dalil dan perkataannya sendiri.

Mereka menentang, atau se-kurang²nja tidak aktif membantu, djika ada kaum buruh menuntut dan beraksi untuk mendapat sekedar kenaikan upah atau sekedar perbaikan djaminan sosial, djika ada kaum tani menuntut tanah kosong jang tidak dikerdjakan untuk digarap atau djika kaum tani menuntut penurunan sewatanah. Mereka berdalil dan berbitjara tentang pentingnya persatuan Rakjat, tetapi dalam perbuatan mereka memetjahbelah serikatburuh dan serikattani.

Pendeknja, kita menginginkan supaya tidak hanja perbuatan kita tetapi djuga perbuatan sekutu² kita sesuai dengan apa jang dikatakan dan sesuai dengan dalil² pokok jang sudah sama² diterima sebagai satu kebenaran.

Pada sebagian kawan² kita mungkin ada perasaan kurang senang dengan angka² jang rendah jang didapat oleh Partai di-daerah² diluar Djawa-Sumatera, sehingga posisi Partai jang baik di Djawa-Sumatera tidak bisa dipertahankan sesudah didjumlah semua suara jang didapat Partai untuk seluruh negeri. Sudah tentu tidak ada kawan² kita jang menyalahkan kader² dan anggota² Partai diluar Djawa-Sumatera. Dengan pengalaman²nja jang sangat terbatas dilapangan organisasi dan politik, kawan² disana sudah bekerdja keras untuk memenangkan Partai. Tetapi harus kita ketahui, bahwa Partai kita disana belum lama dibangun, masih belum tjukup berakar dikalangan masyarakat, dan dibanjak tempat lambang Partai baru dikenal oleh Rakjat pada bulan² belakangan ini. Kenyataan ini harus mendjadi dorongan bagi daerah² dimana Partai sudah lebih madju, untuk bekerdja lebih keras guna mengimbangi kelemahan disana dan untuk memberi bantuan jang kongkrit, terutama bantuan kader². Fikiran jang sempit, jang hanja mementingkan kemadjuan Partai di daerah sendiri sadja, misalnja kemadjuan di Djawa sadja, bukanlah fikiran Komunis jang baik. Partai kita adalah Partai untuk seluruh negeri, kekurangan ditem-

pat jang satu harus diisi oleh tempat jang lain, solidaritet Indonesia harus ada pada tiap² anggota Partai.

Kenyataan² diatas meletakkan tugas² dalam mengkonsolidasi Partai sebagai berikut:

Pertama, pendidikan ideologi harus lebih diperhatikan, dan ini harus kita mulai dengan pendidikan ideologi dikalangan kader² Partai. Tjara² memimpin diskusi dan memberi kursus jang dingin, jang tidak didjiwai oleh semangat tjinta Partai dan tjinta Rakjat jang ber-njala² dari pemimpin diskusi dan pemberi kursus harus dihentikan. Diskusi dan kursus jang tidak mempunyai watak klas Partai tidak mungkin berhasil dan tidak mungkin meninggikan tingkat ideologi kader-kader dan anggota-anggota. Sukses dari diskusi dan kursus-kursus sangat tergantung pada semangat tjinta Partai dan tjinta Rakjat dari pemimpin diskusi dan pemberi kursus. Selandjutnja pimpinan kolektif harus dianggap sebagai satu²nja tjara jang benar dalam memberikan pimpinan, dan ini hanja mungkin djika ada diskusi² periodik jang dipersiapkan setjara baik dan jang dilakukan dengan kritis. Kritik dari bawah harus didorong oleh pimpinan dan demokrasi intern Partai harus lebih dikembangkan. Ketjongkakan dan rasa puas-diri djika mendapat sukses harus ditindas, demikian djuga rasa tak mampu dan patahati djika mengalami kegagalan.

Kedua, program dan politik Partai harus mendjadi milik semua anggota Partai, dalam arti difahamkan benar². Putusan² Partai jang diambil dalam Kongres Nasional ke-V, dalam sidang² Central Komite dan sidang² Politbiro, harus dipeladjadi dan didiskusikan setjara mendalam oleh organisasi² Partai disemua tingkatan. Kader² tinggi Partai harus membiasakan diri dengan tulisan² klasik tentang Marxisme-Leninisme. Tiap² komite harus merentjanakan, mendjelaskan, memimpin dan mengontrol pelaksanaan program peladjaran. Hanja dengan ini kita dapat membikin seluruh anggota Partai mengerti program dan politik Partai sebagai sjarat untuk membikin semua anggota Partai mengambil bagian jang aktif dalam pelaksanaan program dan politik Partai.

Ketiga, keanggotaan dan organisasi Partai harus lebih diluaskan, sebagai sjarat untuk dapat memimpin gerakan revolusioner diseluruh daerah masing² dan diseluruh negeri. Dengan kewas-

padaan jang tinggi kita membuka pintu Partai kita untuk masuknja orang² baru, terutama dari kalangan kaum buruh, kaum tani, pemuda, peladjar dan wanita. Peluasan keanggotaan dikalangan kaum tani adalah sjarat untuk bekerdja lebih baik dalam membela kepentingan se-hari² kaum tani, jang sampai sekarang belum dapat dibanggakan. Ini kita lakukan ber-sama² dengan kita meluaskan organisasi² massa dari Rakjat, jang harus kita tjapai terutama dengan mempersatukan mereka melalui perjuangan membela kepentingan se-hari² mereka. Pelaksanaan semuanya ini hanya mungkin djika ada pimpinan dan ada kontrol jang terus-menerus dari comite² Partai dan djika grup² Partai mendjadi elemen jang aktif dan mendjadi pimpinan jang riil ditempat masing².

Kawan², demikianlah beberapa tugas untuk mengkonsolidasi kemenangan Partai dalam pemilihan umum jang lalu. Hanja dengan mengerdjakan ini kemenangan itu dapat diikuti oleh kemenangan² jang lain. Dan hanja dengan mengerdjakan ini kemenangan front persatuan dapat kita konsolidasi.

Dalam hubungan dengan mengkonsolidasi kemenangan front persatuan beberapa soal lagi perlu dikemukakan.

Diantara kader² Partai masih ada jang suka mengadakan pikiran, apakah tidak sebaiknya djika Central Comite Partai membikin kontrak dengan Pimpinan Pusat partai² lain jang berisi persetujuan supaya masing² partai dari atas sampai kebawah wadajib melakukan ini atau tidak boleh melakukan itu. Usul ini tidak mungkin dilaksanakan karena sering terdapat perbedaan² besar atau ketjil antara pimpinan pusat partai² lain dengan pimpinan daerahnja. Usul ini timbul karena tidak tahu dimana letak kuntji kerdjasama antara Partai kita dengan partai² lain. Pengalaman² kita menunjukkan, bahwa persesuaian dan kerdjasama dengan partai² lain harus timbul dan diperbaharui atas dasar aksi² politik dan dari aksi² politik. Ini kita alami ketika aksi membubarkan negara² bagian bikinan Belanda, ketika mendesak pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo, ketika menuntut supaya pemerintah mendjalankan politik jang tegas terhadap gerombolan DI-TII, ketika menuntut pembubaran Uni Indonesia-Belanda, ketika mempertahankan sistim demokrasi parlementer waktu sistim ini berada dalam bahaya beberapa bulan jang lalu, dan sekarang dalam

menuntut pembubaran kabinet BH. Kita sering mengalami bahwa program² kerdjasama jang dibikin oleh partai kita dengan partai² lain tetap tinggal diatas kertas, sedangkan mengenai pelaksanaannja tidak terdjadi apa², karena timbulnja perumusan² itu tidak atas dasar aksi² politik dan tidak dari aksi² politik.

Soal lain jalah, bahwa masih ada sadja kader Partai jang dalam hubungan kerdjasama dengan partai² lain masih suka mendiskusikan setjara abstrak mengenai persoalan tuntutan mana jang lebih madju, sehingga sering terdjadi kerdjasama mendjadi bujar karena kita mendesak tuntutan jang lebih madju itu, atau djika tuntutan jang lebih madju itu dapat dirumuskan, maka tuntutan jang lebih madju itu hanya tinggal diatas kertas sadja. Tuntutannja lebih madju, tetapi keadaan tidak bertambah madju ! Seharusnya kita tidak mendiskusikan setjara abstrak tuntutan mana jang lebih madju, tetapi kita harus memilih tuntutan jang dalam keadaan tertentu bisa lebih tepat, dalam arti bahwa gerakan dan kemungkinan adanya perkembangan baru dapat didorong kedepan. Berdasarkan pendirian inilah kita mengemukakan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional jang mendjalankan politik anti-kolonialisme kabinet Ali-Arifin. Berdasarkan pendirian ini pulalah, dalam memimpin aksi² ekonomi massa kita menggunakan sembojan „tuntutan ketjil, tapi berhasil”.

Pengalaman kita sudah tjukup banjak untuk sampai kepada kesimpulan, bahwa program jang baik sadja tidaklah tjukup, tetapi harus ada kekuatan masjarakat (kekuatan sosial) jang mendjamin bahwa program itu dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, kita tidak tjukup hanja mengetahui dan menundjuk-nundjuk dimana adanya kekuatan masjarakat itu, tetapi kita harus menghimpun dan memobilisasinja.

Pendeknja, dalam hubungan dengan mengkonsolidasi kemenangan front persatuan dalam pemilihan jang lalu, kita harus dengan konsekwen mendjalankan politik front persatuan nasional untuk menudju kerdjasama semua kekuatan sosial dan politik dari Rakjat kita. Kita lakukan semuanya melalui djalan² jang masuk akal, jang demokratis dan jang kongkrit. Dalam mendjalankan politik persatuan kita tidak boleh berbuat jang djanggal dan aneh dimata orang² jang sepantasnja bersatu dengan kita.

Dengan demikian menjadi lebih teranglah kewajiban² kita dalam mengorganisasi lebih kokoh front persatuan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional negeri kita, untuk mempertahankan perdamaian, demokrasi dan untuk perbaikan nasib Rakyat pekerja. Hasil pemilihan yang lalu membukakan kemungkinan² yang baru dan lebih baik untuk pelaksanaan kewajiban ini. Dengan langkah² baru, dengan pasti dan berani kita meneruskan politik persatuan kita sebagai syarat mutlak untuk tertjapainja tudjuan² yang urgen dan tudjuan² jangka panjang dari Rakyat Indonesia.

Segenap Kekuatan Untuk Memenangkan Partai Dan Front Persatuan Dalam Pemilihan Konstituante

Kawan², tidak lama lagi Rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih akan menuju ke kotak suara untuk memilih anggota² Konstituante. Ini berarti pekerjaan berat dihadapkan pada Rakyat dan Partai kita. Kita harus bekerja keras untuk memenangkan Partai dan memenangkan front persatuan dalam pemilihan Konstituante yang akan datang. Banyak tergantung pada hasil pemilihan Konstituante ini, apakah sifat² demokratis dan anti-kolonialisme dari Republik Indonesia akan dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Kemenangan Partai dalam pemilihan Konstituante nanti pada pokoknya tergantung pada dua hal. Pertama, pada kebenaran politik Partai dan kedua, pada persiapan organisasi dalam pekerjaan memobilisasi massa untuk memenangkan Partai.

Mengenai persiapan dilapangan politik, sebagaimana sudah diketahui, Sidang Pleno ke-II Central Komite yang dilangsungkan dalam bulan November 1954 sudah membentuk satu „Panitia PKI Perantjang Konstitusi Republik Indonesia”. Panitia ini memang belum menghasilkan rentjana Konstitusi yang lengkap, tetapi mengenai pokok² yang penting sudah ada kesimpulan² yang sudah mendapat persetujuan Politburo Central Komite.

Pada pokoknya, dalam menetapkan Konstitusi yang bagaimana yang akan diperjuangkan oleh PKI dalam sidang Konstituante nanti, „Panitia Perantjang Konstitusi” dan Politburo berpokok pang-

kal pada: mempertahankan Republik yang diproklamasikan oleh Revolusi Agustus 1945 (singkatnja: Mempertahankan Republik Proklamasi).

Dalam mempertahankan Republik Proklamasi berarti sudah termasuk mempertahankan prinsip, bahwa kedaulatan ada pada Rakyat, bahwa Rakyat menjalankan kedaulatannya dengan melewati parlemen dan bahwa semua penduduk adalah sama dihadapan Undang².

PKI mempertahankan Republik Proklamasi karena Republik Proklamasi selama revolusi Rakyat tahun 1945-1948 terbukti adalah alat perjuangan yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan persatuan seluruh Rakyat dengan tidak memandang perbedaan keturunan, suku-bangsa, laki² atau wanita, agama, filsafat, dan kejakinan politik. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan Republik, dimana didalamnya semua agama dan kejakinan dihormati.

Semua unsur Republik Proklamasi yang dapat mengikat bagian terbesar dari Rakyat akan dipertahankan dengan gigih oleh PKI dalam sidang Konstituante. Unsur² itu antara lain ialah: bendera nasional Merah-Putih, lagu kebangsaan Indonesia-Raya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan disamping bahasa masing² sukubangsa, lambang Republik „Bhinneka Tunggal Ika”.

PKI akan tetap mempertahankan negara kesatuan yang daerahnya meliputi seluruh wilayah „Hindia Belanda” dulu. Dalam negara kesatuan ini tiap² sukubangsa mendapat hak otonomi yang se-luas-luasnya.

Isi dari pasal² mengenai ekonomi yang dimuat dalam Undang² Dasar Sementara yang bertudjuan untuk melikwidasi ekonomi kolonial akan dipertahankan oleh PKI.

Sedjak sekarang sudah dapat kita bajangkan, bahwa dalam kampanye pemilihan untuk Konstituante akan banyak dipersoalkan orang apakah Konstituante nanti akan melahirkan „Negara Pantjasila” atau „Negara Islam”. Yang manakah yang akan diperjuangkan oleh PKI? Kalau dengan „Negara Pantjasila” diartikan Republik Proklamasi maka sudah terang apa yang akan diperjuangkan oleh PKI. PKI tidak menghendaki Republik Proklamasi

diganti dengan „Negara Islam” atau „Negara DI”, seperti yang di-andjur²kan oleh pemimpin² Masjumi.

Beberapa pemimpin nasionalis suka mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui „Darul Islam” dan „Darul Komunis”. Dari sini dapat ditarik kesimpulan se-olah² ada golongan, tentu yang dimaksudkan ialah PKI, yang mau mendirikan „Darul Komunis”. Mengenai ini sudah sering kita jelaskan, dan terus akan kita jelaskan, bahwa PKI sekarang maupun dikemudian hari tidak bermaksud mendirikan „Negara Komunis”. Dalam kamus kaum Komunis tidak ada istilah „Negara Komunis” atau „Darul Komunis”. Djadi, dalam Konstituante yang akan datang PKI tidak memperjuangkan terbentuknya satu „Negara Komunis” di Indonesia, tetapi PKI juga tidak menghendaki terbentuknya „Negara Islam” atau „Negara DI”, „Negara Kristen”, „Negara Marhaenis”, atau negara apa yang bukan „Negara Pantjasila” dalam arti Republik Proklamasi. Djelasnya, PKI tidak menghendaki kekuasaan satu partai atau satu golongan, tetapi PKI memperjuangkan kekuasaan dari seluruh Rakyat Indonesia.

Demikian dengan singkat pegangan propagandis² Komunis dalam kampanye pemilihan Konstituante. Dengan ini jelas pula politik apa yang akan dikemukakan oleh PKI dalam sidang Konstituante nanti. PKI bersedia membikin front dengan partai mana dan dengan siapa saja yang bertudjuan mempertahankan Republik Proklamasi, dimana kedaulatan ada pada Rakyat, dimana dijamin hak sama bagi semua penduduk, hak mempunyai milik dan hak untuk memeluk agama dan kejakinan yang disukai. Dijamin demikian ini terang ada selama revolusi Rakyat tahun 1945-1948.

Untuk memperbaiki persiapan organisasi dalam pekerjaan memobilisasi massa, kita harus menarik pelajaran se-baik²nya dari pengalaman kita mengorganisasi dan memobilisasi massa dalam pemilihan untuk parlemen yang lalu. Kita harus menarik pelajaran dari pengalaman kita yang banyak dalam menarik dan mengkongkritkan pemilih, menjaga supaya pemilih² Partai tetap pendiriannya, memperbaiki agitasi dan propaganda Partai, memobilisasi seniman² anggota dan simpatisan Partai, menemukan dan merealisasi tjara² yang praktis dan efektif dalam mengumpulkan fonds pemilihan Partai, dan banyak lagi. Kita tarik pelajaran

dari pengalaman² kita dengan maksud untuk mempertinggi mutu pekerjaan Partai sebagai sjarat untuk mentjapai hasil yang lebih baik. Kesimpulan² yang sudah diambil dan dijadikan pedoman untuk pekerjaan selanjutnya harus dilaksanakan dengan sungguh², dengan pimpinan dan kontrol yang terus-menerus.

Mengingat kekalahan yang diderita oleh partai² reaksioner di berbagai daerah, terutama kekalahan yang diderita oleh kombinasi Masjumi-PSI, kaum reaksioner dalam negeri dengan bantuan penuh dari kaum imperialis asing akan mempertegang keadaan dengan intimidasi² dan dengan provokasi². Dengan sistimatis mereka akan mempengaruhi opini umum tentang apa yang mereka namakan „bahaya komunisme”, dengan maksud supaya Rakyat melupakan musuhnja yang sedjati, yaitu kolonialisme Belanda yang sudah menjadi embel² imperialisme Amerika. Ketjurangan² akan mereka lipatgandakan. Semuanya ini meminta kewaspadaan dan militansi yang lebih tinggi dari semua anggota Partai, terutama dari pemimpin² dan kader² Partai.

Kawan², marilah kita hadapi pekerjaan yang berat ini dengan sepenuh hati, marilah kita kerahkan semua kekuatan yang ada pada kita untuk memenangkan Partai dan front persatuan dalam pemilihan Konstituante yang akan datang. Ini adalah perjuangan yang penting untuk mempertahankan kemerdekaan nasional negeri kita, untuk perdamaian, demokrasi dan perbaikan nasib Rakyat pekerja. Dengan berorientasi kepada Rakyat Indonesia yang besar dan heroik, kita yakin bahwa Partai kita ber-sama² dengan Rakyat, akan berhasil mempertahankan Republik Proklamasi, akan berhasil mempertahankan dan mengembangkan sifat² demokratis dan anti-kolonialisme dari Republik ini.

KETERANGAN - KETERANGAN

MENGATASI KELEMAHAN KITA

1. *Tangkapan2 tahun 1926/1927* — penangkapan besar2an yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah dengan kedjam menindas pemberontakan Rakjat yang meletus pada 12 November 1926 di Djawa dan permulaan tahun 1927 di Sumatera. Puluhan ribu Rakjat dipendjarakan, dibuang atau digantung mati. Mengenai arti pemberontakan Rakjat ini, lihat juga tulisan: *Lahirnja PKI dan Perkembangannja* (Djilid I, *Pilihan Tulisan D.N. Aidit*) dan *12 November dan Perdjuaan Nasional Anti Kolonialisme* (Djilid II, *Pilihan Tulisan D.N. Aidit*).
- Tangkapan2 tahun 1936* — penangkapan2 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap kader2 PKI yang waktu itu bekerja illegal atau yang dianggap oleh polisi Belanda pernah berhubungan dengan kawan Musso setelah ia datang dengan illegal ke Indonesia pada tahun 1935.
- Provokasi Madiun* — dalam pertengahan September 1948 terdjadi insiden di Madiun dikalangan tentara, antara golongan yang menjetudju politik reaksioner dan provokatif pemerintah Hatta dengan golongan yang tetap setia pada revolusi. Peristiwa ini dipergunakan oleh pemerintah Hatta untuk menuduh kaum Komunis telah merebut kekuasaan dan mendirikan negara Sovjet. Dengan alasan palsu ini pemerintah mengerahkan segala aparatnja untuk mendedjar, menangkap dan membunuh anggota2 serta pengikut2 PKI. Sebetulnja provokasi Madiun tidak lain daripada persiapan untuk perang kolonial Belanda bulan Desember 1948 dan untuk memaksa Indonesia lebih djauh berkapitulasi kepada imperialisme Belanda. Mengenai provokasi Madiun ini, lihat juga tulisan2: *Menggugat Peristiwa Madiun* (Djilid I, *Pilihan Tulisan D.N. Aidit*) dan *Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948) — Peristiwa Sumatera (1956)* (Djilid II, *Pilihan Tulisan D.N. Aidit*).
2. *Kawan Musso* — anggota Central Komite PKI yang setelah kegagalan pemberontakan 12 Nopember 1926 terpaksa meninggalkan Indonesia. Pada tahun 1935 kawan Musso kembali setjara illegal dari luarnegeri. Dibawah pimpinan kawan Musso PKI yang telah mengalami kerusakan banjak dan belum bisa segera terhimpun kembali sesudah teror pemerintah kolonial Belanda tahun 1926/1927 dibangun kembali dan mendapat garis politik yang tepat melawan fasisme. Tak lama kemudian kawan Musso terpaksa meninggalkan Indonesia lagi dan baru kembali pada tahun 1948 setelah Revolusi Agustus. Dalam Konferensi PKI bulan Agustus 1948 ia dipilih sebagai sekretaris djendral Partai. Kawan Musso gugur dalam perdjuaan melawan teror provokasi Madiun.
- Djalan Baru untuk Republik Indonesia* — Resolusi yang atas usul kawan Musso disahkan oleh Konferensi PKI pada bulan Agustus 1948. Resolusi ini mengkritik dan mengoreksi kelemahan ideologi, politik dan organisasi Partai yang menjejalkan Partai tidak mampu memberikan pimpinan kepada revolusi. *Resolusi Djalan Baru* mendjadi pedoman pokok bagi Partai untuk melepaskan diri dari penjelewengan2 „kiri” dan kanan, sehingga mendjadi Partai yang besar dan kuat.
3. *Peraturan Larangan Mogok* — dikeluarkan oleh pemerintah Natsir dalam rangka SOB (Keadaan Bahaja dan Perang). Pada tahun 1950 peraturan ini ditjabut tetapi diganti oleh peraturan yang sama reaksionernja, jaitu Peraturan No. 16 Tedjasukmana.
4. *Kewadjaban Kita* — editorial dalam *Bintang Merah* No. 5, tahun VII, 1 Maret 1951, hlm. 127.
5. *Bintang Merah*, No. 5, tahun VII, 1 Maret 1951, hlm. 129.
6. *Bintang Merah* no. 6-7, tahun VII, 15 Maret — 1 April 1951, hlm. 166 yang berdjulud *Program PKI untuk Pemerintah Nasional Koalisi*.
7. *BPP* — Badan Permusjawaratan Partai2, didirikan pada tanggal 31 Maret 1951 di Djakarta, dan meliputi 11 Partai. Peraturan Dasar BPP a.l. mendjelaskan tentang tudjuan, usaha dan keanggotaan. Dalam fasal usaha didjelaskan bahwa permusjawaratan dilakukan atas dasar persaudaraan yang ichlas dan kedjurdjuran dengan senantiasa sungguh2 mengingat kepentingan Rakjat dan negara. Mengenai putusan dinjatakan bahwa putusan yang mengikat semua anggota hanjalah putusan yang diambil dengan suara bulat.
- Program Bersama BPP antara lain menghendaki:
 - politik luarnegeri yang benar2 bebas dan damai
 - melepaskan Indonesia dari persetudjuan KMB
 - mendjamin pelaksanaan demokrasi bagi Rakjat.
8. *Ch. O. van der Plas* — seorang Gubernur Provinsi Djawa Timur pada masa pemerintah kolonial Belanda. Ia pura2 memeluk agama Islam dengan maksud memikat hati Rakjat Indonesia dan me-mata2i pedjuang2 melawan imperialis Belanda.
9. Pembakaran gudang tembakau di Besuki sesungguhnya dilakukan oleh kakitangan imperialis sendiri, tetapi dituduhkan kepada PKI supaya mendapat alasan untuk menindas gerakan progresif di Indonesia. Berkat kewaspadaan Rakjat Indonesia provokasi ini dapat digagalkan.
10. *Pemerintah Sukiman-Wibisono* — pemerintah yang dibentuk setelah pemerintah Natsir djatuh pada tgl. 20 April 1951. Dalam kabinet ini tokoh2 Masjumi seperti Sukiman dan Jusuf Wibisono memainkan peranan terpenting mendjalankan politik yang reaksioner. Pada bulan Agustus 1951 pemerintah Sukiman ini melantjarkan Razzia Agustus yang menangkap dan bertudjuan menghabiskan kekuatan progresif.
11. *Peristiwa Besuki* lihat keterangan no. 9.
- Peristiwa Tandjung Priok* — kaum reaksi mengupahi beberapa orang untuk melakukan serangan terhadap pos Polisi di Tandjung Priok dengan memakai kain leher merah yang berpallu-arit. Kedjadian ini didjadi alasan oleh pemerintah Sukiman untuk mendjalankan Razzia Agustus. Kewaspadaan Rakjat dapat membuka niat busuk ini sehingga tidak satupun dari tawanan2 Razzia Agustus dapat dibawa kepengadilan.
- Peristiwa Bogor* — peristiwa pembakaran pasarmalam yang bertudjuan sama dengan peristiwa Tandjung Priok, Besuki dll.
12. Lenin, *Komunisme „Sajap Kiri”, suatu Penyakit Kanak2*, Penerbitan Jajasan Pembaruan th. 1955, hlm. 57 — 58.
13. *SOBSI* — Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia didirikan pada

tahun 1946 di Djokja dan mengadakan Kongres ke-I pada tahun 1947 di Malang. Sedjak semula SOBSE memimpin kaum buruh Indonesia dalam perjuangannya melawan imperialisme Belanda dan kakitangannya. Anggota SOBSE berdjumlah 2.6 djuta.

14. *RTI* — Rukun Tani Indonesia didirikan 6 Februari 1949 dan berpusat di Djakarta. Programnya ialah mengusahakan koperasi alat2 pertanian dan mempertahankan tanah yang telah diduduki oleh kaum tani. Mula2 anggotanya 15.000, kemudian mendjadi 120.000 orang dan bergerak didaerah pendudukan Belanda terutama di Djawa Barat. Waktu fusi dengan BTI pada 25 September 1953, RTI dibubarkan.
- BTI* — Barisan Tani Indonesia didirikan tgl. 25 November 1945 di Djokjakarta. Anggotanya sebelum fusi ialah 240.000 dan merupakan organisasi tani yang terbesar yang meluas diseluruh Indonesia. Setelah fusi dengan RTI dan SAKTI, BTI makin meluas dan sekarang anggotanya kl. ada 3,5 djuta orang.
15. *Pemuda Rakjat* — organisasi pemuda revolusioner yang didirikan pada tgl. 10 November 1945 di-tengah2 revolusi dengan nama PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia). Pesindo dengan aktif turut serta dalam perjuangan bersendjata melawan Belanda. Dalam Kongresnya yang ke-III bulan November th. 1950 di Djakarta nama Pesindo diganti dengan Pemuda Rakjat.
- Gerwis* — Gerakan Wanita Indonesia Sedar, organisasi wanita progresif yang didirikan pada th. 1950 di Semarang. Kemudian dalam Kongresnya yang ke-II di Djakarta pada th. 1954, Gerwis berganti nama mendjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).
16. *Perang2 kolonial* — perang yang dilantjarkan oleh kaum kolonialis Belanda terhadap Rakjat Indonesia pada tgl. 21 Djuli 1947 (clash pertama) dan pada 19 Desember 1948 (clash kedua).
17. *Pemogokan Delanggu* — pemogokan kaum buruh perkebunan (Saribupri) yang terbesar dan yang pertama setelah Revolusi Agustus di Indonesia, berlangsung dari tgl. 27 Mei — 30 Djuli 1948 dibawah pimpinan Kesatuan Komando Aksi Sobse-BTI. Pemogokan ini mendapat sokongan dari massa luas, terutama kaum tani dan karena ditindas oleh tentara pemerintah Hatta yang reaksioner, terpaksa pemogokan meningkat mendjadi perlawanan bersendjata dan berachir dengan kemenangan kaum buruh. Delanggu adalah kota ketjil (ibu kota kawedanan) dimana sebagian besar penduduknya adalah buruh perkebunan.
18. *FPT* — Front Persatuan Tani, jaitu Gabungan Pusat2 Organisasi Tani BTI-RTI-SAKTI yang didirikan pada tahun 1952 dengan suatu program bersama sebagai koordinasi aksi kaum tani menghadapi tindakan2 reaksioner dari tuantanah dan sisa2 peraturan kolonial. Setelah fusi BTI dan RTI pada th. 1953, FPT dibubarkan.

MENEMPUH DJALAN RAKJAT

1. 20 Mei — Hari Kebangunan Nasional. Pada hari itu tahun 1908 berdiri Budi Utomo, jaitu organisasi nasional yang pertama dan yang menandakan proses lahirnya nasion Indonesia. Peristiwa ini merupakan tonggak sedjarah yang permulaan dalam proses perkembangan gerakan kemerdekaan nasional Indonesia.

2. *merendahkan dan menghinia bangsa Indonesia* — Pada bulan November 1913 bangsa Belanda bermaksud merajakan genap 100 tahun lepasnya Belanda dari pendjadjahan Perantjis. Untuk perajaan ini di beberapa daerah diadakan pemungutan uang dari Rakjat. Ini di anggap oleh Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjiptomangunkusumo dan kawan2nya sebagai penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang sedang didjadjah oleh Belanda.
3. *ISDV* — Indische Sociaal-Democratische Vereniging (Perkumpulan Sosial Demokratis Hindia), organisasi politik yang menghimpun intelektual revolusioner Indonesia dan Belanda dan yang bertudjuan menjabarkan Marxisme dikalangan Rakjat Indonesia, terutama dikalangan kaum buruh. Sedjak berdirinya ISDV dalam bulan Mei 1914 mulailah di Indonesia berlangsung perpaduan antara Marxisme dengan gerakan revolusioner Rakjat Indonesia.
4. *BPP* — Lihat keterangan no. 7 pada tulisan *Mengatasi Kelemahan Kita*.
5. *KMB* — Konferensi Medja Bundar, ialah konferensi di Den Haag yang menghasilkan persetudjuan yang pintjang dan kolonial antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hatta dan Sultan Hamid dengan pemerintah Belanda pada tgl. 2 November 1949. Persetudjuan KMB merestorasi kekuasaan ekonomi imperialis di Indonesia, terutama Belanda, membiarkan Belanda mendjadjah Irian Barat, yang menjabarkan Indonesia mendjadi negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal.
- Embargo* — Larangan berdagang dengan RRT yang dipaksakan oleh imperialis Amerika Serikat dan yang disetudjai oleh Menteri Luar-negeri Subardjo (Masjumi) dari pemerintah Sukiman yang reaksioner.
- Frisco* — Perdjangjian San Fransisco yang dilangsungkan antara Menlu Subardjo dengan kaum imperialis A.S. yang membikin Indonesia mendjadi sumber bahan mentah, pasar barangdagangan, tempat penanaman modal asing dan sebagai pangkalan perang A.S.
- MSA* — Mutual Security Act, perdjangjian „saling-bantu” yang djuga ditandatangani oleh Menlu Subardjo dengan A.S. yang tudjuannya sama seperti perdjangjian Frisco. Perdjangjian Frisco dan MSA mendapat tentangan keras dari Rakjat sehingga Subardjo djatuh.
6. *Peraturan no. 16 Tedjasukmana* — suatu undang2 darurat tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang dibikin oleh Menteri Perburuhan Tedjasukmana dari kabinet Natsir. Undang2 tsb sangat membatasi aksi2 kaum buruh, sehingga terkenal sebagai „Larangan mogok dengan badju baru”.
7. Lenin, *Nasib Sedjarah Adjaran Karl Marx*, dalam *Pustaka Ketjil Marx* no. 1, Penerbitan Jajasan „Pembaruan”, tahun 1955, hlm. 20.
8. Lenin, *Komunisme „Sajap Kiri”*, Suatu Penjakit Kanak-kanak, Penerbitan Jajasan „Pembaruan”, tahun 1955 hlm. 50.
9. *SOBRI* — Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia, suatu gabungan Serikat Buruh yang didirikan oleh Partai Murba pada tahun 1951.
10. *ICFTU* — International Confederation of Free Trade Unions (Gabungan SB2 Merdeka Sedunia) didirikan bulan Desember 1949. Pemimpin2nya a.l. Deaken dan Cary, pemimpin2 SB Inggris yang reformis. Organisasi ini menjetudjai Plan Marshall untuk Eropa dan didirikan guna memetjahkan gerakan buruh internasional.

11. *Provokasi Agustus 1951* — Provokasi² dan razzia pemerintah Sukiman untuk menghantarkan gerakan demokratis.
12. Lenin, *Imperialisme, Tingkat Tertinggi Kapitalisme*, Penerbitan Jajasan „Pembauran”, th. 1958, hlm. 178.
13. *Bintang Merah* No. 6-7, tahun ke VII, 15 Maret—1 April 1951, tulisan *PKI Menghendaki Pemerintah Nasional Koalisi jang Bebas dari KMB*, halaman 165.
14. *Bintang Merah* No. 6-7, tahun ke VII, 15 Maret — 1 April 1951, hlm. 189.

FRONT PERSATUAN NASIONAL DAN SEDJARAHNJA

1. *Digul* — Tempat buangan di Irian jang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah pemberontakan Rakjat tahun 1926-1927 ditindas. Letaknja di-tengah² hutan rimbaraja, tempat sarang njamuk malaria. Banjak pedjuang jang dibuang ketempat ini mati atau rusak kesehatannja.
2. *Poenale sanctie* — suatu ketentuan hukuman dari pemerintah kolonial Belanda terhadap buruh kontrak. Menurut Ordonansi Kuli tahun 1880, mereka jang menolak bekerdja atau melarikan diri karena tak tahan siksaan, bisa dihukum sekehendak madjikkannja. Poenale sanctie telah menjebakkan dari tiap 100 buruh, 30 orang mati. Atas perlawanan Rakjat dan tekanan opini dunia, maka peraturan ini dihapuskan pada tahun 1941.
3. Walaupun api peperangan sudah mendjilat wilajah Indonesia, tapi Belanda tetap menolak bekerdjjasama dengan Rakjat Indonesia melawan fasisme Djepang dan lebih suka menjerahkan tanahair kita dengan tiada perlawanan jang berarti.
4. *Konsentrasi Nasional* — front persatuan nasional jang didirikan di Djokjakarta pada tahun 1947 guna menghimpun seluruh kekuatan nasional untuk membela Republik Indonesia terhadap serangan² imperialis Belanda. Badan ini diketuai oleh Sardjono (PKI) dan penulisnja Mangunsarkoro (PNI). Pertentangan antara Partai² dan organisasi² massa jang tergabung dalam Konsentrasi Nasional menjebakkan front ini sangat lemah.
5. *Pernyataan Bersama 20 Mei 1948* — suatu piagam jang ditandatangani di Djokja bertepatan dengan ulangtahun ke-40 Hari Kebangunan Nasional. Piagam ini berisi ikrar Partai² dan organisasi² massa untuk menggalang front persatuan nasional melawan imperialisme Belanda.

BELUM PERNAH KEADAAN DALAMNEGERI SESUDAH KMB BEGITU BAIK SEPERTI SEKARANG

1. *putusan Politbiro jang bersedjarah* — putusan sidang Politbiro pada akhir tahun 1952 untuk mengirimkan kawan² Aidit dan Njoto sebagai delegasi persahabatan PKI kekongres CPN.
- Hubungan antara Partai² Komunis sangat ditakuti oleh kaum imperialis sebagai jang kelihatan dari pengalaman delegasi PKI ini. Kawan Aidit dan Njoto sudah mendapat visa jang diperlukan dari Perwakilan Belanda di Indonesia, tetapi bertentangan dengan hukum² jang lazim.

- setibanja dilapangan terbang Amsterdam, mereka ditolak masuk dan terpaksa kembali ketanahair.
2. *MMB (NMM)* — Misi Militer Belanda (Nederlandse Militaire Missie) jang dikirimkan ke Indonesia untuk mendjadi „penasehat” Tentara Nasional Indonesia berdasarkan persetudjuan KMB jang chianat. Segala blaia untuk MMB ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Setelah melalui perdjungan sengit dari patriot² Indonesia, MMB ini kemudian dipaksa pulang.
 3. *Nasionalisasi perusahaan² tambang minjak Tjepu dan Sumatera Utara* — Perusahaan² ini semula kepunjaan BPM. Waktu revolusi didjadi kan milik Republik Indonesia. Sesudah persetudjuan KMB, pemimpin² Masjumi seperti Moh. Roem (Menteri Dalamnegeri kabinet Wi-lopo) berusaha keras untuk mengembalikannja kepada BPM, tetapi mendapat perlawanan keras dari Rakjat. Berdasarkan tekad Rakjat jang bersatu ini parlemen menjetudjui nasionalisasi atas tambang minjak Tjepu dan Sumatera Utara.
 4. *Kup tanggal 17 Oktober* — suatu pertjobaan perebutan kekuasaan negara oleh kaum sosialis kanan dengan menggunakan kaum militeris pada tanggal 17 Oktober 1952 di Djakarta. Mereka mengepung gedung parlemen, merusak alat²nja, untuk membubarkan DPR. Di-depan istana dipasang meriam². Pertjobaan ini digagalkan oleh kekuatan demokratis jang patriotik.
 5. *Perbuatan Nadjib di Mesir* — penggulingan kekuasaan Radja Farouk pada tanggal 24 Djuli 1952 oleh segolongan militer Mesir, diantara pimpinannja adalah Nadjib.

KEBANGGAAN DAN KESEDARAN NASIONAL

1. *Pemberontakan dikapal perang Zeven Provincien* — Akibat penurunan upah para marinir (kelasi) Indonesia dan Belanda oleh pemerintah Belanda jang terdjadi pada 1 Dju i 1931 dengan 5% dan kemudian pada 1 Djanuari 1932 dengan 5% lagi timbul rasa tidak puas dikalangan kelasi² itu. Pemerintah Belanda tidak berhenti sampai disitu sadja malahan sudah merentjanakan lagi penurunan upah dengan 7% jang akan berlaku mulai 1 Djanuari 1933. Pada waktu itu upah kelasi Indonesia tidak bisa lebih dari setengah upah kelasi Belanda. Meskipun begitu penurunan upah tersebut membuat mereka lebih bersatu melawan rentjana penurunan upah. Tanggal 1 Djanuari 1933 diadakan rapat bersama antara Marinir Belanda dan Marine Bond Indonesia memprotes rentjana penurunan upah tsb.

Oleh karena pemerintah Belanda mengetahui bahwa kelasi² kapal „Zeven Provincien” („Kapal Tudjuh”) adalah jang paling militan, diperintahkanlah „Kapal Tudjuh” berlajar keluar Djawa, agar penurunan upah 7% dapat dilaksanakan.

Tetapi perkiraan Belanda meleset. Sesudah rentjana penurunan upah djadi dilaksanakan, tidak 7% tetapi dikurangi mendjadi 4%, pada tanggal 27 Djanuari 1933 timbul demonstrasi besar kaum buruh di Surabaya melawan penurunan upah 4% itu. Meskipun Belanda mengadakan penangkapan², tanggal 29 Djanuari 1933 terdjadi demonstrasi lagi jang lebih besar dan timbul perkelahian² antara alat² kolonial Belanda dengan kaum buruh jang berdemonstrasi. Mende-

ngar kedjadian ini kelasi2 di-kapal2 perang „Java“, „Evertsen“, „Piet Hein“ dan „Sumba“ semua menolak bekerdja.

Sementara itu „Kapal Tudjuh“ sudah sampai di Oleleh (Kotaradja). Pada 4 Februari 1933 antara djam 8 dan 9 malam opsir2 Belanda pergi menghadiri pesta di Atjeh Club Kotaradja. Pada saat itu di dalam kapal diadakan rapat diantara para marinir Paradji, Rumambi, Gosal dan lain2, untuk merebut kekuasaan dikapal, dan terus akan berljajar menudju Surabaya untuk membebaskan kawan2nja jang ditawan di Surabaya.

Dibawa pimpinan Rumambi, Suwarso, Hendrik, Paradji, Kawilarang, Boshart tanggal 4 malam itu djuga para kelasi berhasil merebut kekuasaan dikapal. Dan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 1933 „Kapal Tudjuh“ berljajar menudju Surabaya. Matros2 Belanda jang berada di Kotaradja menjatakan setiakawannja dan mendukung aksi itu.

Tanggal 10 Februari djam 9 pagi „Kapal Tudjuh“ sampai di Selat Sunda. Pemerintah Belanda memberikan ultimatum kepada „Kapal Tudjuh“ untuk menjerah tanpa sjarat. Ultimatum itu ditolak dan para pelaut melakukan perlawanan jang gigih. Belanda lalu membom „Kapal Tudjuh“ dan mengepungnja dengan kapal2 perang lainnja. Achirnja para pelaut jang patriotik di „Kapal Tudjuh“ dapat ditangkap; mereka disiksa diluar batas kemanusiaan sehingga banjak jang meninggal dunia.

MENUDJU INDONESIA BARU

1. *VOC* — Vereenigde Oost Indische Compagnie (Persatuan Perkongsian Dagang Hindia Timur). Dengan menggunakan VOC burdjuasi Belanda mendjalankan monopoli dagangnja atas rempah2 di Indonesia. VOC dengan kedjam melakukan serangan2 terhadap keradjaan2 feodal dan Rakjat Indonesia. Untuk merampas dan mendjaga monopoli rempah2 VOC mendjalankan pembadjakan dan pembunuhan jang terkenal dengan nama „hongi-tochten“ (pelajaran hongi); mereka membinasakan penduduk dan membabati kebun2 rempah2 di-pulau2 Indonesia bagian timur, antaranja dipulau Banda. Salahsatu tokoh VOC jang pertama dan terkenal kedjamnja ialah Gubernur Djenderal J.P. Coen jang meletakkan dasar2 kolonialisme Belanda di Indonesia. VOC merupakan alat penimbunan primitif kapital dari burdjuasi Belanda. Keuntungan VOC sampai rontoknja, djadi selama 2 abad, luarbiasa besarnja. Selama itu kapital-dagang Belanda merampas kekayaan Indonesia sebesar 800 djuta florin Belanda. Pada th. 1800 VOC dibubarkan dan sedjak itu pemerintah Belanda langsung mendjadjah Indonesia.
2. Lenin, „*Kebangkitan Asia*“, dalam *Bintang Merah*, Agustus 1958, hlm. 409.
3. *SS Bond* — Staatsspoor Bond. Serikatburuh jang pertama-tama didirikan berdasarkan organisasi modern di Indonesia pada th. 1905. Keanggotaannja terbatas pada pegawai2 SS, tetapi tidak mengenal perbedaan bangsa. Pimpinannja dipegang oleh pegawai2 SS bangsa

Belanda. SS Bond bukan organisasi buruh jang militan dan tidak bisa memenuhi keinginan kaum buruh. Dengan berdirinja VSTP (Vereniging van Spoor-en Tramweg Personeel) — suatu organisasi kaum buruh kereta-api jang militan — di Semarang pada th. 1908, maka banjak anggota SS Bond pindah ke VSTP. Hal ini achirnja menjebabkan SS Bond mendjadi gulung tikar.

4. *Perhimpunan Indonesia (P.I.)* — Organisasi para peladjar Indonesia dinegeri Belanda jang didirikan pada th. 1908 dan semula dengan nama „Indische Vereniging“. Dalam th. 1922 namanja diganti dengan „Indonesische Vereniging“ dan sedjak th. 1925 namanja mendjadi „Perhimpunan Indonesia. P.I.“ adalah organisasi jang mempunyai karakter politik jang tegas dan menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. Tidak sedikit pemimpin2 progresif di Indonesia jang dulunja tokoh2 P.I.
5. *Komintern* — Komunis Internasional, atau djuga disebut Internasionale ke-III, adalah badan kolektif internasional dari Partai2 Komunis diseluruh dunia dan didirikan atas usul W.I. Lenin dalam bulan Maret 1919. Segera setelah lahirnja, PKI djuga menggabungkan diri pada dan mendjadi anggota Komintern. Sebagai organisasi internasional Komintern mengeratkan hubungan dan kerdjasama serta memimpin gerakan proletar diseluruh dunia, baik di-negeri2 jang madju maupun di-negeri2 djadjahan jang terbelakang, pada masa gelombang revolusi sedang naik di-mana2. Dalam bulan September th. 1943 Komintern dibubarkan. Pembubaran ini berlangsung pada saat dimana situasi sudah berubah dan masing2 Partai Komunis dalam perdjjuangan di-negeri2nja sudah makin terudji dan mendjadi dewasa.
6. Lihat keterangan no. 1 pada tulisan *Mengatasi Kelemahan Kita*.
7. Lihat keterangan no. 1 pada tulisan *Kebanggaan Dan Kesedaran Nasional*.
8. Lihat keterangan no. 2 pada tulisan *Mengatasi Kelemahan Kita*.
9. Lihat keterangan no. 3 pada tulisan *Front Persatuan Nasional Dan Sedjarahnja*.
10. *romusja* — istilah Djepang jang berarti „pekerdja“. Di Indonesia sebutan romusja digunakan terhadap mereka jang dipaksa bekerdja guna kepentingan pemerintah fasis Djepang tanpa mendapat bajaran apa2. Karena siksaan kedjam, kuranglebih 2 djuta Rakjat jang mati atau sengadja dibunuh oleh Djepang dengan dalih „mendjaga rahasia militer“.
11. kantor „Romu Kyo Kai“, sebuah kantor jang bertugas mentjari, mengumpulkan dan mengirimkan „romusja“ ke-daerah2 di Indonesia atau ke Burma, Muangthai dan negeri lainnja guna mentjukupi kebutuhan fasis Djepang.
12. *Proklamasi Republik Indonesia* — Djepang bertekuk lutut kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang penjerahan Djepang ini diterima setjara ragu oleh sementara golongan. Tetapi oleh grup2 patriotik dan revolusioner jang selama pendudukan Djepang mengadakan perlawanan terhadap Djepang, diterima dengan hati jang ber-debar2 dan segera menjiapkan diri mengoper kekuasaan dari tangan Djepang dan mendirikan Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat.

Pada tanggal 15 Agustus sore 1945 kawan D.N. Aidit menemui teman2nya diasrama Badan Perwakilan Peladjar Indonesia (Baperpi) di Tjikini serta mengajak Wikana di Kebon Sirih untuk mengadakan suatu pertemuan. Pertemuan ini berlangsung di Institut Baktereologi di Pegangsaan (Jakarta) pada jam 19.00 yang dihadiri oleh Wikana, D.N. Aidit, Chairul Saleh, Djohar Nur, Pardjono, Armansjah, Kusnandar, Darwis, Suroto Kunto, Subadio, Subianto, Martono dll. yang memutuskan bahwa Indonesia Merdeka harus diproklamasikan dengan segera. Untuk melaksanakan ini pertemuan mengutus Wikana, Aidit, Subadio dan Suroto Kunto untuk menjam-paikan keputusan tersebut kepada pemimpin2 Indonesia dan pada diam 20.00 mereka sudah sampai ditempat kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Wikana sebagai djurubitjara utusan. Ditengah-tengah pemitjaraan antara Bung Karno dan utusan pemuda semen-tara datang Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Djojopranoto, mBah Diro, dll. Setelah didesak berulang-ulang oleh utusan pemuda2 Bung Karno mendjawab bahwa ia tidak bisa memutuskan sendiri dan ia harus berunding dengan pemimpin2 lainnja lebih dulu. Utusan2 pemuda mempersilahkan Bung Karno berunding dengan para pemimpin lainnja dan setelah berunding keluarlah Hatta lebih dulu sebagai djurubitjara para pemimpin tsb., menjampaikan kesimpulan mereka, bahwa usul pemuda2 tidak bisa diterima karena dianggap kurang perhitungan dan akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Entah sudah disetudjui oleh para pemimpin atau tidak, Hatta pada waktu itu mengedjek utusan pemuda dengan mengatakan bahwa ia waktu masih muda pernah djuga „berkepala panas“, tetapi sesudah dia tua kepalanja mendjadi dingin, segala-galannya „diper-timbangkan yang matang.“ Sebagai djawaban Wikana menjatakan, bahwa djika demikian pendapat para pemimpin, pemuda2 tidak ber-tanggungjawab djika Rakjat bertindak tanpa pimpinan. Penolakan ini oleh utusan pemuda2 disampaikan kepada rapat para pemuda dan peladjar di Tjikini 71 jam 24.00. Pertemuan ini didatangi pula oleh wakil2 dari beberapa grup lainnja jaitu Dr. Muwardi, Jusuf Kunto, Sukarni dan Singgih. Dalam pertemuan ini diambil keputusan bahwa Sukarno—Hatta harus dibawa ke Rengasdengklok, supaya terhindar dari Djepang dalam membitjarakan tugas mereka yang historis itu. Setelah pertemuan selesai, Dr. Sutjipto, Jusuf Kunto dan Sukarni di-tugaskan untuk datang kerumah Bung Karno dan Hatta, yang ke-mudian dibawa ke Rengasdengklok pada jam 4.30 pagi. Pada waktu itu daerah Rengasdengklok pada hakekatnja sudah merupakan daerah merdeka, berkat adanya pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dibawah pimpinan Umar Bachsan yang sudah melepaskan diri dari Djepang. Di Rengasdengklok sedjak pada 16 Agustus pagi oleh Bung Karno dan Hatta diadakan pemitjaraan2 dengan utusan2 grup2 pemuda mengenai keharusan adanya pimpinan kepada Rakjat Indonesia yang menghendaki kemerdekaan pada waktu itu djuga. Sementara itu di Jakarta diadakan persiapan2 untuk menjambut Proklamasi Republik Indonesia pada hari besoknja. Untuk ini pada tanggal 16 Agustus jam 10.00 pagi diadakan pemitjaraan diantara wakil2 pemuda dengan wakil2 Peta dan Heiho. Diluar perundingan ini disiapkan pengerahan Rakjat Jakarta dan sekitarnya dibawah

pimpinan D.N. Aidit, M.H. Lukman, Sidik Kertapati, Suko, Gundiwan Mu jono, Njono, Samsudin, A.M. Hanafi, dll. Disamping itu disiap-kan tenaga2 untuk menjiarkan berita proklamasi dan menjambut kemerdekaan di-daerah2. Untuk ini antara lain diadakan rapat di-rumah Armunanto pada tanggal 16 Agustus jam 16.00 bertempat di Gang Sentiong, yang dihadiri oleh almarhum Sidik Djojokusarto, Widarta, Kartopandojo, Sujono, mBah Diro, Armunanto, Inu Kerta-pati, Sundoro, Ukon Effendi dll.

Dalam perundingan Pemuda-Peta-Heiho tsb. telah ditjapai kata-sepakat untuk mengadakan gerakan bersendjata dengan bantuan Rakjat guna melumpuhkan kekuasaan militer Djepang dan untuk mengoper ibukota sebagai ibukota Republik. Gerakan bersendjata ini akan dipelopori oleh Peta dan Heiho dan akan dimulai pada tanggal 17 Agustus jam 01.00. Pertjobaan ini menemui kegagalan karena kurangnya persiapan2, terutama karena adanya elemen2 yang ragu2 didalam kota. Tanda dari dalam kota untuk Rakjat yang sudah siap untuk menjerbu kota tidak kundjung tiba. Pada jam 20.15, empat jam sebelum gerakan itu dimulai, datanglah kurir dari fihak Peta yang menjampaikan putusan Daidantjo Kasman Singodimedjo: „Peta hanya bisa ikut dalam gerakan bersendjata atas perintah atasan.“ Pertjobaan yang ke-2 dan ke-3 djuga menemui kegagalan. Kegagalan ini karena dua sebab pokok: (1) tidak ada kern revolu-sionier yang kuat didalam pimpinan angkatan bersendjata, (2) tidak ada koordinasi yang baik antara kekuatan dikota dan luarkota. In-lah sebab2nja kenapa Proklamasi Indonesia Merdeka terpaksa di-adakan dalam situasi dimana bajonet Djepang belum dipatahkan, walaupun semangat Djepang memang sudah patah.

Setelah Bung Karno yakin bahwa Djepang sudah bertekuk lutut dan Rakjat beserta pemuda berdiri dibelakangnja, maka beliau bersedia menandatangani Proklamasi Indonesia Merdeka, sebagai seruan ke-pada Rakjat supaya bertindak dengan segera dan serentak. Karena Bung Karno sudah mau, Hatta sudah sukar mundur, dan karena itu ikut menjetudjui putusan Bung Karno. Proklamasi ini akan ditanda-tangani dan diumumkan di Jakarta. Demikianlah Bung Karno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus jam 22.00 diantarkan kembali ke Jakarta. Jam 24.00 tiba di Jakarta dan naskah Proklamasi di-susun. Setelah selesai disusun, disaksikan oleh wakil2 grup2 patriotik maka Proklamasi ditandatangani pada tanggal 17 Agustus jam 02.00 pagi. Sesudah itu mulailah perdjjuangan bersendjata di Ja-karta dan tempat2 lain untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia terhadap tentara Djepang yang ber-tindak atasnama „sekutu“, terhadap tentara Inggris dan Belanda yang mendapat bantuan Amerika Serikat.

Semula Proklamasi ini akan diadakan dilapangan Ikada. Untuk ini Suwirjo yang pada waktu itu mendjabat wakil Walikota, mengadakan instruksi kepada bawahannja untuk mengatur upatjara tsb. Oleh bawahan ini persiapan2 itu dilakukan melalui tilpun yang dapat di-dengarkan oleh kempetai. Dengan demikian maka segenap rentjana lalu dirubah. Semua golongan seperti Barisan Pelopor, kaum buruh dll. diminta untuk datang menjaksikan Proklamasi itu bukan di Ikada, melainkan di Pegangsaan Timur 56. Demikianlah pada

tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi, dengan disaksikan oleh sebagian penduduk Djakarta, Bung Karno membatjakan Proklamasi Indonesia Merdeka. Oleh kaum buruh yang bekerdja di Kantorberita „Domei” naskah Proklamasi ini diperbanjak dan disebarkan keseluruh kota Djakarta; oleh kaum buruh kereta-api yang sudah praktis menguasai bagian tilgrap, Proklamasi ini disiarkan keseluruh Jawa. Kemudian buruh „Domei” menggunakan radio penjiar „Domei” untuk menjabarkan keseluruh dunia. Demikian juga buruh radio menjiarkannya. Dengan demikian dunia mengetahui bahwa atas kekuatan Rakjat telah diwujudkan satu negara merdeka yang baru di Asia Tenggara.

13. Karena Belanda tak berdaya menghadapi kekuatan revolusi Rakjat Indonesia, maka pengiriman dan penempatan tentara Belanda ke dan di Indonesia dilakukan dengan „membontjeng” tentara Inggris dan Australia di Indonesia, yang sebagai tentara Sekutu bertugas melutjuti tentara Djepang. Dengan tipu-muslihat ini maka Belanda bisa memasuki kota2 pelabuhan yang strategis seperti Djakarta, Semarang dan Surabaya.
14. *Komisi Djasas Baik (KDB)* — suatu komisi yang dibentuk atas keputusan Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhubungan dengan perang kolonial pertama yang dilantjarkan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia pada 21 Djuli 1947. Komisi ini terdiri dari tiga anggota, yaitu masing2 dari Amerika, Australia dan Belgia, dan juga dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam kenjataanja, Komisi ini memberi lebih banjak „djasas baik” kepada kaum kolonialis Belanda daripada kepada Republik Indonesia, dan terutama anggota dari Amerika sangat „berdjasas” dalam hal ini. Dalam perundingan dikapal Renville pada bl. Desember 1947, Dr. Graham, wakil Amerika dalam Komisi tsb. mengantjam delegasi Indonesia bahwa Amerika tidak akan menentang usaha Belanda memaksakan penyelesaian perselisihan setjara kekerasan, djika pemerintah Indonesia tidak bersedia menjerah kepada tuntutan2 Belanda.

Sesudah Belanda melantjarkan perang kolonial yang kedua pada 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB pada bl. Djanuari 1949 mengubah Komisi Djasas Baik ini menjadi „U.N. Commission for Indonesia” (Komisi PBB untuk Indonesia) atau UNCI, yang anggota2nja tetap dari Amerika, Australia dan Belgia. Komisi ini dan terutama wakil Amerika, Merle Cochran, sangat membantu Belanda dalam perundingan KMB bl. Agustus-November 1949 di Den Haag, Nederland.

15. *daerah kantong* — daerah2 Republik di-tengah2 daerah pendudukan Belanda pada waktu Revolusi Agustus 1945-1948.
16. „Red Drive Proposals” — „Usul2 pembasmian kaum merah”. Sebagai akibat „usul2” ini timbullah „Peristiwa Madiun” yang telah banjak memakan korban patriot2 Indonesia.
17. *Eximbank* — nama lengkapja ialah „The Export Import Bank of Washington”, suatu bank yang dibangun sebagai alat pemerintah Amerika Serikat untuk menguasai ekonomi negeri2 lain. Pemerintah Sukiman pada tanggal 12 Djanuari 1951 mengadakan perdjandjian pindjaman dengan Eximbank sebanyak \$ 100.000.000 dengan sjarat2

yang sangat mengikat dan merugikan Indonesia. Dalam perdjandjian itu antara lain ditentukan bahwa segala barang yang dibiajai dengan kredit itu hanya boleh diangkut dengan kapal Amerika Serikat; selama lima tahun pertama Indonesia diwajibkan memberikan laporan tengah-tahunan kepada Eximbank yang diperintji mengenai pemakaian keuangan, perlengkapan, bahan2, perbekalan2 dan djasas2 yang diterimanya, sedangkan Eximbank mempunyai hak kontrol atas semua itu.

18. „*Radical Concentratie*” — front persatuan nasional yang didirikan pada pertengahan bulan November 1918 dan didalamnja antara lain tergabung Serikat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan ISDV. PPPKI — *Permufakatan Perhimpunan2 Politik Kebangsaan Indonesia*, yaitu front persatuan nasional yang didirikan pada 17 Desember 1927 dan didalamnja tergabung antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Serikat Sumatera, Kaum Betawi, Indonesische Studie-club. Pemuka PPPKI antara lain Ir. Sukarno, Kusumo Utojo dan Thamrin. GAPI — *Gabungan Politik Indonesia*, front persatuan nasional yang didirikan bulan Mei 1939 dengan anggota2nja antara lain Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, Partai Islam Indonesia, Persatuan Politik Katolik Indonesia. Waktu mula2 berdiri sekretariat GAPI terdiri dari Abikusno (PSII), Thamrin (Parindra), Amir Sjarifuddin (Gerindo). Tuntutannja waktu itu: „Indonesia Berparlemen”, milisi Rakjat untuk menghadapi fasis Djepang.

KAUM BURUH BERDJUANG UNTUK HAK-HAKNJA

1. *Undang2 „Staat van Oorlog en Beleg” (SOB)* — Undang2 Keadaan Darurat Perang dan Perang, suatu undang2 pemerintah kolonial Belanda. Dalam keadaan SOB, kekuasaan sepenuhnya berada ditangan militer. Dizaman Republik Indonesia untuk pertama kalinya SOB digunakan pada waktu kabinet Hatta tahun 1948 (Provokasi Madiun); kemudian oleh kabinet Natsir tahun 1952 untuk menindas gerakan revolusioner.
2. *Panitia Arbitrase* — suatu panitia penyelesaian perselisihan perburuhan yang dibentuk berdasarkan Undang2 Darurat no. 16. Panitia ini terdiri dari wakil pemerintah, buruh dan madjikan, tapi keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri Perburuhan. Kemudian Panitia ini diganti dengan yang baru berdasarkan Undang2 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang disahkan Parlemen pada bulan April 1957.
3. *GSS* — *Gabungan Serikatburuh Sedunia*, didirikan bulan Oktober 1945 di Paris. GSS adalah organisasi Serikatburuh Internasional yang progresif, yang terbesar. Pada th. 1957 GSS menghimpun serikatburuh2 di 82 negeri yang beranggota 105 djuta orang. Sekretarisnja ialah Louis Saillant, pemimpin serikatburuh Perantjis. Program GSS a.l. membela kepentingan ekonomi, sosial dan hak2 demokrasi Rakjat rekerdja, anti perang dan dengan gigih memperdjungkan persatuan buruh sedunia. Didalam PBB, GSS duduk se-

bagai anggota konsultatif kategori A dalam Dewan Ekonomi dan Sosial.

4. Lihat keterangan no. 4 pada tulisan *Belum Pernah Keadaan Dalam-negeri Sesudah KMB Begitu Baik Seperti Sekarang*.
5. Lihat keterangan no. 2 pada tulisan *Belum Pernah Keadaan Dalam-negeri Sesudah KMB Begitu Baik Seperti Sekarang*.

PKI MENGHENDAKI PEMERINTAH FRONT PERSATUAN

1. *DPV* — Deli Planters Vereeniging (Gabungan Tuan2 Perkebunan Deli) adalah suatu badan monopoli dari pengusaha2 tembakau asing yang didirikan pada akhir abad ke-19. Pada bulan Oktober 1952 DPV menggabungkan diri dalam AVROS.

AVROS — Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera, suatu gabungan madjikan perkebunan karet dan kelapa-sawit se-Sumatera Utara yang menentukan soal2 upah dan sjarat2 kerdja kaum buruh serta teknik perkebunan pada umumnya. Gabungan ini meliputi modal besar asing Belanda, Inggeris, Amerika, Belgia, dll.

Pada tahun 1952 madjikan2 perkebunan tembakau menggabungkan diri dalam AVROS. Setelah perkebunan Belanda diambilalih pada akhir tahun 1957 namanja berubah mendjadi GAPERSU (Gabungan Perusahaan2 Perkebunan Sumatera Utara).

2. *Mosi Sidik Kertapati* — suatu mosi dalam DPR yang menuntut dikeluarkanja Menteri Dalamnegeri Moh. Roem dari kabinet Wilopo, karena ia telah menimbulkan teror Tandjung Morawa, jaitu penembakan petani2 oleh polisi serta pentraktor terhadap tanaman kaum tani, sehingga ada yang meninggal.
3. *Amandemen Djaswadi* — amandemen mengenai Rantjangan Undang2 tentang penetapan tarip Pajak Perseroan th. 1953 yang diadjudkan oleh pemerintah Wilopo (Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo — PSI). Amandemen ini bertudjuan memberi perlindungan kepada pengusaha nasional dengan tjara menetapkan pajak yang ringan bagi perusahaan ketjil dan persentase yang lebih tinggi bagi yang besar. Dalam pemungutan suara amandemen diterima dengan suara 59 setuju dan 41 menolak.

Mosi Rondonuwu — mosi yang diadjudkan pada 9 Februari 1953 yang menuntut pemerintah segera membuka perwakilan Republik Indonesia di Uni Sovjet dalam tahun 1953 itu djuga.

Mosi Tjikwan — mosi yang diadjudkan berhubung dengan peraturan impor baru tgl. 10 April 1953 pada waktu kabinet Wilopo. Mosi itu pokoknja mengundang pemerintah supaya se-lekas2nja mengadjudkan Rantjangan Undang2 kepada DPR untuk mengganti peraturan2 yang ditetapkan hanja oleh Menteri sadja. Usul mosi disetujui dengan suara 97 setuju dan 0 menolak.

HISTERIA DIKALANGAN REAKSI

1. *ALS* — Algemene Landbouw Syndicaat, suatu gabungan madjikan perkebunan di Djawa terutama yang mengkoordinasi soal2 upah, perburuhan, tjatu buruh, perselisihan2 dan djuga im- dan expor. Kemudian badan ini mengatur djuga perkebunan2 luar Djawa yang belum tergabung dalam sesuatu badan. Setelah perkebunan Belanda diambilalih pada akhir th. 1957 namanja mendjadi P3BI (Perkumpulan Perusahaan Perkebunan Besar Indonesia).
2. *Tugu (Puntjak)* — tempat peristirahatan didaerah pegunungan, kurang lebih 90 km. sebelah Selatan kota Djakarta. Kaum reaksi kerap kali menggunakan tempat ini untuk rapat2 mereka.

KEADAAN SUDAH LEBIH MATANG UNTUK PEMERINTAH PERSATUAN NASIONAL

1. *NICA* — Netherlands Indies Civil Administration, nama yang dipakai pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah perang dunia kedua untuk menguasai Indonesia kembali. Mereka datang di Indonesia membontjeng tentara Sekutu.

HARIDEPAN GERAKAN TANI INDONESIA

1. *Pologoro* — bentuk pajak yang harus dipikul oleh Rakjat untuk keperluan pamongdesa. Misalnja, djika Rakjat mendjual/membeli hewan, rumah, dsb., ia harus menjerahkan sedjumlah uang tertentu. Djika potong ternak, harus menjerahkan sebagian dari dagingnja. Waktu mempunjai hadjat, harus memberi makanan atau bahan makanan.
- Rodi* — sistim sewatanah dalam bentuk kerdja, yang menempatkan kaum tani dalam kedudukan sebagai hamba. Bentuknja ber-matjam2 seperti: kerdja untuk keperluan pamongdesa, mengawal dan menerima tamu pemerintah, memperbaiki atau membuat djalan, bendungan, rumah, dll., yang kesemuanja merupakan kerdja-paksa yang tak dibayar.
2. *Domein verklaring* — pernyataan dan pengakuan hak penguasaan pemerintah Belanda atas semua tanah di Indonesia.
3. batas waktu biasanja diatur dalam perdjandjian yang ber-matjam2 seperti „hak erfpacht“, „hak opstal“, yang formilnja masing2 berlaku selama 75 dan 30 tahun, tetapi dalam prakteknja bisa diperpanjang sekehendak mereka sendiri.

PERSATUAN NASIONAL DAN KEWASPADAAN NASIONAL

1. *Gentjatan sendjata di Korea* — penghentian tembak-menembak di medan perang Korea antara Tentara Amerika Serikat yang menggunakan bendera PBB dengan Tentara Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Tentara Sukarela Rakjat Tiongkok pada tgl. 27 Djuli 1953 setelah berperang selama lebihkurang 3 tahun, dan setelah Tentara Amerika ternjata tidak mampu meneruskan agresi2nya terhadap Rakjat Korea.
2. *Darul Islam (DI)* — gerakan teror berkedok Islam dari tuantanah yang didirikan pada bulan Maret 1948 dengan tudjuan merobohkan Republik Indonesia. Pada bulan Agustus 1949 gerakan ini memproklamasikan apa yang mereka namakan Negara Islam Indonesia dengan gerombolan bersendjatanja yang dinamakannja „Tentara Islam Indonesia” (TII). Gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwirjo ini disokong penuh oleh tuan2 kebun asing, bahkan algodjo2 tentara kolonial Belanda merupakan pimpinan mereka, seperti Jungschlaeger, Schmidt, Bosch dan banjak lagi lainnja.

PERKUAT KEDUDUKAN REPUBLIK!

1. *Masjarakat Pertahanan Eropa* — suatu perdjandjian bersama antara beberapa negeri Eropa Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, yang menghidupkan kembali tentara fasis Djerman bagi keperluan agresinya, dengan Djerman Barat sebagai intinja.
2. *Suami-isteri Rosenberg* — Julius dan Ethel Rosenberg, dua orang warganegara Amerika yang dibunuh dikursi listrik pada tanggal 20 Djuni 1953 oleh pemerintah Eisenhower dalam histeria perang dan kampanye anti-Komunismja. Mereka difitnah mentjuri rahasia atom untuk kepentingan Uni Sovjet. Fitnahan yang tak terbuktikan dan pembunuhan biadab itu menimbulkan amarah dan protes diseluruh dunia.
3. *mutasi yang bersifat madju dikalangan Angkatan Perang* — penggantian perwira2 yang tersangkut dalam kup 17 Oktober 1952, penghapusan djabatatan Kepala Staf Angkatan Perang dan kemudian diganti dengan Gabungan Kepala Staf ketiga Angkatan.

PKI TAK AKAN HENTI2NJA MENJEBARKAN TJITA2 PERSATUAN NASIONAL

1. *Program pemerintah Ali Sastroamidjojo yang mengandung unsur2 demokratis* — program ini a.l. merumuskan:
 - memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan2 yang tegas serta membangkitkan tenaga Rakjat;

- segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ketingkat jang paling bawah;
 - mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia se-tjepat2nja;
 - menjalankan politik luarnegeri yang bebas dan jang menudju perdamaian dunia;
 - mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni menjdadi hubungan internasional biasa;
 - mengusahakan segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan didalam kabinet dengan menjerahkan keputusannja kepada Parlemen.
2. *Soska* — singkatan sosialis kanan, penamaan Rakjat kepada Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin a.l. oleh Sjahrir dan Sumitro Djojohadikusumo yang sekarang ini memimpin pemberontakan PRRI-Permesta. Partai ini hanya namanja sadja „sosialis”, tapi prakteknja membela mati2an kaum imperialis.
 3. *PUSA (Masjumi)* — „Persatuan Ulama2 Seluruh Atjeh” didirikan di Atjeh pada tanggal 5 Mei 1939 dibawah pimpinan M. Daud Beureuh. Bulan September 1953 PUSA mengchianati dan memberontak terhadap Republik Indonesia dan menggabungkan diri pada gerombolan DI-TII. Lebih landjut lihat keterangan no. 2 pada tulisan *Persatuan Nasional Dan Kewaspadaan Nasional*.
 4. *Gunting-uang Sjafrudin* — tindakan menggunting-dua uang kertas yang sangat merugikan Rakjat. Tindakan ini dilakukan oleh Sjafrudin Prawiranegara (Masjumi) sebagai Menteri Keuangan pemerintah Hatta dalam bulan Maret 1950. Dari pengguntingan ini kaum modal besar Belanda memperoleh keuntungan tidak kurang dari Rp. 500.000.000,— (kurs rupiah pada waktu itu dibandingkan dengan gulden 1:1). Sedangkan Rakjat telah dirugikan tidak kurang dari Rp. 1.500.000.000,—.
- Dengan pengguntingan uang itu kurs rupiah kita telah merosot dengan 50%. Bersamaan dengan tindakan pengguntingan uang itu djuga diadakan apa yang dinamakan sistim Sertifikat Devisen yang mengharuskan importir membayar tambahan pembayaran impor sebanyak 200% harga nominal sehingga kurs rupiah kita menjdadi sepertiga dari gulden Belanda.
- Sjafrudin kemudian menjdadi Gubernur Bank Indonesia dan dalam djabatatan ini terus melindungi kepentingan modal Belanda di Indonesia. Ketika politik djahatnja akan dibongkar ia melarikan diri dan menjdadi „perdana menteri” PRRI-Permesta.
5. *Konferensi Berlin* — Konferensi Menteri2 Luarnegeri Uni Sovjet, Perantjis, Inggris dan Amerika Serikat yang berlangsung dari tgl. 25 Djanuari sampai dengan 18 Februari 1953 di Berlin. Konferensi telah mentjapai persetudjuan tentang prinsip pengurangan persen-djataan dan akan diadakannja konferensi Djenewa pada tgl. 26 April 1954.
- Konferensi Djenewa* — dihadiri oleh waki2 Uni Sovjet, RRT, RDV, Perantjis, Inggris dan Amerika Serikat, dan telah mentjapai persetudjuan untuk mengachiri perang kolonial di Indotjina.

MADJU TERUS UNTUK SUKSES2 JANG LEBIH BESAR!

1. *Partai Sosialis* — Partai jang timbul dari fusi antara Partai Sosialis Indonesia (PARSI) jang revolusioner jang dipimpin oleh kawan Amir Sjarifuddin dengan Partai Rakjat Sosialis (PARAS) dari Sutan Sjahrir jang reformis. Dengan adanya fusi ini terbukalah jalan bagi Sutan Sjahrir untuk melumpuhkan Partai Sosialis. Pada bulan Februari 1948 Sutan Sjahrir memisahkan diri dari Partai Sosialis dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). *Sajap Kiri* — gabungan organisasi jang terdiri dari PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pesindo, Gerakan Republik Indonesia (GRI-Solo). Kemudian organisasi ini menjadi Front Demokrasi Rakjat (FDR) pada awal 1948 dan keanggotaannya diperluas dengan organisasi2 massa revolusioner seperti SOBSI, BTI, dll. Pada tahun 1950, 1951 dan 1952 timbul pemberontakan2 DI-TII di Jawa Tengah dengan menggunakan nama Angkatan Umat Islam (AUI) dan Bataljon 426 (Major Munawar). Berdasarkan pengalamannya melawan DI-TII di Jawa Tengah ini maka sedjak itu DI-TII dinjatkan sebagai musuh negara jang harus dibasmi dengan tegas. Tjara2 pembasmian jang berhasil ialah dengan mengikutsertakan Rakjat, sehingga pemberontakan tersebut dapat ditumpas dalam waktu jang singkat.

DJALAN KE DEMOKRASI RAKJAT BAGI INDONESIA

1. Mengenai perumusan Stalin tentang hukum ekonomi pokok kapitalisme modern perlu ditegaskan bahwa baik pada zaman kapitalisme pra-monopoli maupun pada zaman kapitalisme monopoli atau kapitalisme modern tetap berlaku hukum nilai-lebih sebagai hukum ekonomi pokok. Hanya perwujudan2nya bisa berbeda2. Dalam zaman kapitalisme pra-monopoli hukum nilai-lebih menampilkan diri terutama melalui laba rata2 dan harga produksi, sedangkan dalam zaman kapitalisme monopoli terutama melalui laba monopoli jang tinggi dan harga monopoli. Perumusan hukum ekonomi pokok Sosialisme kini telah disempurnakan sebagai berikut : peluasan dan penjempurnaan produksi dengan tak henti2nya berdasarkan teknik termadju guna memuaskan sepenuhnya kebutuhan2 masyarakat jang semakin bertambah, guna peningkatan kemakmuran dan perkembangan harmonis semua anggota masyarakat setjara sistematis. *ANZUS* (Australia, New Zealand, United States) — pakt agresinya antara Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. *Pakt Pasifik jang dimaksudkan sematjam NATO bagi daerah Asia* — berbagai pakt agresinya di Asia dibawah pimpinan imperialis Amerika. *Perebutan kekuasaan di Iran* — pada tahun 1951 Mossadeq, seorang wakil burjuasi nasional Iran, menjadi perdana menteri. Dibawah pemerintahannya dilakukan nasionalisasi atas perusahaan2 minyak

- jang dikuasai oleh imperialis Inggris, yaitu Anglo-Iranian Oil Co. Kaum imperialis menentang dan berusaha membatalkan nasionalisasi ini. Sebagai akibat pergolakan dalam negeri Sjah Iran jang memihak kaum imperialis itu terpaksa lari keluar negeri. Sambil menentang Mossadeq, imperialis Amerika dengan bekerdjasama dengan komprador Iran menentang Inggris dan menggantikan kedudukannya. Pada bulan Agustus 1953 fasis Fazlollah Zahedi dengan bantuan agen2 imperialis menjatuhkan Mossadeq. Sjah Iran dipanggil kembali, sedangkan Mossadeq ditangkap dan didjatuhi hukuman berat.
4. Dengan bertambah madjunya gerakan progresif Rakjat Indonesia, maka politik luar negeri dari pemerintah Indonesia jang dirumuskan sebagai politik „bebas, aktif” makin jelas tidak menganggap dirinya netral dalam masalah2 perang dan damai, kolonialisme dan anti-kolonialisme, tetapi memihak perdamaian dan anti-kolonialisme.
 5. J.W. Stalin, *Masalah2 Ekonomi Sosialisme di Uni Republik2 Sovjet Sosialis*.
 6. Berhubung dengan kenyataan adanya dua Jerman sekarang, yaitu Republik Demokrasi Jerman dan Republik Federal Jerman, jang sistem masyarakatnya sangat berbeda dan telah melalui perkembangan sendiri2, maka penjatuan kedua Jerman itu harus melalui proses perkembangan bersama jang wadjar, ditentukan oleh Rakjat Jerman sendiri. Tjara jang diperjuangkan oleh Rakjat Jerman sekarang ialah dengan jalan membentuk konfederasi antara kedua Republik Jerman itu. Perdijandjian perdamaian dapat diadakan dengan kedua Republik masing2.
 7. *Uni Indonesia-Belanda* — sebagian dari persetudjuan KMB jang menetapkan Indonesia harus mengakui ratu Belanda sebagai kepala Uni dan dalam segala soal penting jang menjangkut „kepentingan bersama Indonesia-Belanda” harus berunding dulu dengan Belanda. Sesudah perjuangan jang lama, Uni dapat dibubarkan pada th. 1954.
 8. *Rubber Study Group* — suatu badan internasional jang dikuasai oleh kaum monopoli, jang a.l. mengurus dan menentukan djatah produksi dan pendjualan karet.
 9. *Peraturan devisa Sumitro* — peraturan jang hanya menjadikan devisa bagi importir jang sanggup membayar uang muka jang sangat tinggi (40—75% dari harga nominal). Ketentuan2 ini hanya bisa dipenuhi oleh importir2 modal besar asing. Akibatnya, importir nasional jang pada umumnya lemah dipaksa mati atau menjadi kakitangan modal besar asing.
 10. Disamping koperasi2 a.l. Hatta, yaitu koperasi kaum penghisap, tumbuh pula koperasi Rakjat pekerdja, yaitu koperasi tani pekerdja dan koperasi kaum buruh, jang menjadi alat perjuangan mereka untuk meringankan beban hidupnya. Kaum Komunis terus bekerdja di-koperasi2 Rakyat pekerdja. Sedjak akhir tahun 1958 atas seruan dan pimpinan PKI koperasi Rakjat pekerdja ini diintensifkan dan dikembangkan setjara luas.
 11. Lihat keterangan no. 2 pada tulisan *Persatuan Nasional dan Kewas-nadaan Nasional*.
 12. Lihat tulisan2 PKI *Menghendaki Pemerintah Front Persatuan* sam-pai dengan *Kemenangan Gemilang Demokrasi Atas Fasisme* dalam djilid ini.

13. Lihat keterangan no. 12 tsb.
14. *Soal tanah di Tandjung Morawa* — sengketa tanah yang timbul di Tandjung Morawa (Sumatera Utara), karena Menteri Dalamnegeri Moh. Roem (Masjumi) dari pemerintah Wilopo mau merampas tanah kaum tani yang berasal dari bekas tanah perkebunan asing tetapi yang sudah digarap oleh kaum tani sendiri semendjak zaman pendudukan Djepang. Atas perintah Moh. Roem, Gubernur Provinsi Sumatera Utara Abdul Hakim (djuga Masjumi) memerintahkan alat2 negara mentraktor tanaman dan perumahan kaum tani. Peristiwa ini terkenal dengan nama „traktor maut” karena menimbulkan korban djiwa. Tindakan kedjam ini dilawan dengan berani oleh kaum tani dan mendapat sokongan luas dari Rakjat seluruh negeri. Perbuatan reaksioner inilah merupakan salah satu sebab terpenting yang menjatuhkan kabinet Wilopo dengan digantikan kabinet Ali Sastroamidjojo. Pemerintah Ali mentjopot Abdul Hakim dan mengusahakan penyelesaian sengketa tanah tersebut dengan mengeluarkan Undang2 Darurat no. 8 pada tahun 1954. Mengenai Undang2 ini lihat lebih lanjut tulisan *Hidup Revolusi Agustus!* him. 305 djilid ini.
15. *Rapat Pleno Central Komite bulan Djanuari 1951* — dalam Sidang Pleno ini terutama dilakukan perdjjuangan terhadap penjelewengan Tan Ling Djie-isme yang tidak mau melaksanakan Resolusi „Djalan Baru Untuk Republik Indonesia”, sehingga sangat menghambat kemadjuan Partai. Sebagai hasil kemenangan garis „Djalan Baru”, Sidang Pleno memilih Politbiro baru yang dipimpin oleh kawan Aidit. Semendjak saat itu Partai mengalami kemadjuan yang pesat.
16. *Rapat Pleno Central Komite bulan April 1951* — Sidang ini melahirkan Konstitusi PKI, suatu hasil yang sangat penting karena salah-satu sebab yang dulunya menimbulkan keruwetan dilapangan organisasi ialah bahwa PKI pada waktu yang lampau belum mempunyai Konstitusi yang tepat, djelas dan sempurna. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* Partai yang disahkan oleh Kongres ke-IV th. 1947 di Solo ternjata terlalu singkat dan kurang tepat, sedangkan dengan terdjadinja provokasi Madiun belum dapat disusun Konstitusi baru sebagai kelanjutan sewadjarnja dari Resolusi „Djalan Baru”. Dengan diterimanja Rentjana Konstitusi oleh Sidang Pleno CC ini dan dengan dilaksanakannja Konstitusi ini dalam pekerdjaan pembangunan Partai selandjutnja, tiap2 anggota Partai mendapat pegangan pokok bagi pekerdjaannja se-hari2.
17. Lihat keterangan no. 5 pada tulisan *PKI Tidak Akan Henti2nja Menjebarkan Tjita2 Persatuan Nasional*.
18. *Mulai digulungnja komplotan kolonialis Belanda anti-Republik* — maksudnja, ditangkapnja orang2 Belanda bekas tentara kolonial Belanda yang merupakan tokoh2 penting dalam gerombolan DI-TII, seperti Jungschlaeger, Schmidt, dll.
19. Pemerintah Ali mentjantumkan dalam programnja fasal2 tentang pemulihan kekuasaan Republik Indonesia atas Irian Barat dan pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Dalam melaksanakan fasal2 program ini masalah Irian Barat dibawa ke Sidang Umum PBB dan diusahkan mengirim delegasi ke Nederland untuk membatalkan Uni.

TENTANG TAN LING DJIE-ISME

1. Lihat keterangan no. 1 pada tulisan *Madju Terus Untuk Sukses2 Jang Lebih Besar!*
2. *Sedjarah Partai Komunis Sovjet Uni*, terbitan Jajasan Pembaruan, th. 1955, hlm. 153.
3. *Bintang Merah*, no. 3, tahun VI, 15 September 1950.

KONGRES NASIONAL KE-V PKI

1. *BKOI* — Badan Kerdjasama Organisasi Islam yang dikuasai oleh Masjumi.

HIDUP REVOLUSI AGUSTUS!

1. *Wates* — ketjamatan dekat Kediri, dimana terdapat banjak tanah onderneming asing. Selama revolusi tanah ini dengan disahkan oleh pemerintah dan penguasa perang digarap oleh kaum tani untuk memperkuat perang perlawanan terhadap Belanda. Diatas tanah ini sudah muntjul desa2 baru dengan segala peralatannja. Pada waktu pemerintah Sukiman (Masjumi-PSI) tahun 1951 Rakjat desa2 itu diusir dan tanamannja ditraktor. Rakjat bertahan dan me'awan.

UNTUK PERSATUAN JANG LEBIH LUAS DARI SEMUA KEKUATAN NASIONAL DI INDONESIA

1. *Madjalah „Economic Indicators”* — Ichtsar ekonomi yang diterbitkan oleh Parlemen Amerika.
2. *Konferensi Kolombo* — Konferensi Perdana Menteri lima negara Asia yang pertama, jaitu Indonesia, India, Burma, Pakistan dan Sri Lanka di Kolombo, ibukota Sri Lanka, pada bulan April 1954. Hasil2 yang terpenting antara lain ialah : mentjiptakan suasana untuk kerdjasama negeri2 Asia-Afrika setjara demokratis tanpa membeda2kan pandangan politik, sistim politik dan sistim masjarakatnja ; mengadakan konferensi yang kedua di Bogor pada tanggal 28 Desember 1954 sebagai persiapan untuk berlangsungnja Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955.
3. *Pertjobaan Tadjuddin Naor cs* — Pada tgl 1 Agustus 1953 terbentuk kabinet dengan Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai Perdana Menteri, Mr. Wongsonegoro (PIR) Wk. P.M. ke-I dan Zainul Arifin (NU) sebagai Wk. PM. ke-II. Sedjak sebelum dan sesudah kabinet Ali terbentuk, kaum reaksi yang dipimpin Masjumi-PSI terusmene-

rus berusaha membubarkan kabinet ini karena tindakannya banyak merugikan kaum imperialis. Kemudian Masjumi-PSI bersatu dengan sebagian dari PIR. Golongan ini yang dipimpin oleh Tadjuddin Noor (ketua fraksi PIR dalam Parlemen) memetjah PIR menjadi PIR-Wongsonegoro dan PIR-Tadjuddin Noor-Hazairin sehingga suara pendukung kabinet Ali dalam parlemen berkurang. Sebagai akibat perpejahan ini pada bulan Oktober 1954 semua menteri PIR mengundurkan diri dari kabinet dengan maksud supaya kabinet Ali bubar. Usaha reaksi ini gagal dan kabinet Ali berdiri terus dengan mengadakan reshuffle, yaitu mengikutsertakan wakil2 PRN, Perti dan PIR-Wongsonegoro. Pertjobaan membubarkan kabinet Ali tak berhenti disitu saja tapi kemudian disusun dengan diadukannya mosi tidak pertjaja terhadap kabinet oleh anggota2 parlemen Mr. Jusuf Wibisono (Masjumi), Tadjuddin Noor (PIR), Subadio (PSI), Kasimo (Katolik), Tambunan (Kristen) dan S. Engel (federal) pada tgl. 19 November 1954. Usul mosi inipun ditolak dengan perbandingan suara 115 lawan 92.

3. *Mac Carthy-isme* — aliran yang menteror kehidupan demokratis di A.S. dengan Mac Carthy seorang senator fasis Amerika sebagai pelopornja.

MENGUGAT PERISTIWA MADIUN

1. *Mr. Suprpto* — Ketua Fraksi Pembangunan dalam Parlemen yang membela perkara D.N. Aidit dimuka pengadilan. Pembelaan se'engkapnja sbb :

TUNTUTAN DJAKSA TIDAK BERALASAN

(Tangkisan terhadap tuntutan pada terdakwa D.N. Aidit diutjapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 25 November 1954)

Tangkisan pertama

Menurut surat tuduhan terdakwa dituntut berhubung dengan kedjahatan penghinaan dilakukan dengan pertjetakan (drukpers). Karangan yang mengakibatkan penuntutan diterbitkan dalam surat kabar „Harian Rakjat” dan disiarkan pada tanggal 14 September 1953.

Menurut ps. 78, ayat 1 sub 1e KUHP djangka waktu kasipnja penuntutan (verjaringstermijn) bagi kedjahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan pertjetakan adalah 1 (satu) tahun. Djangka waktu tadi menurut ps. 79 KUHP mulai berdjalan sedjak tanggal 14 September 1953 sampai tanggal 14 September 1954 dan karena itu hak untuk mengadakan penuntutan hukuman lenjap pada tanggal 14 September 1954, ketjuai djika djalannya djangka waktu kasip tadi digagalkan (gestuit) oleh tindakan penuntutan yang diketahui atau diberitahukan pada terdakwa.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Pada tanggal 24, 25, 26, 28 dan 29 September 1953 oleh Djaksa pada Kedjaksanaan Agung telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Pemeriksaan2 yang dilakukan terhadap terdakwa ini bukanlah tindakan penuntutan sebagai yang dimaksudkan dalam ps. 80 KUHP. Menurut sandjama2 hukum pidana pemeriksaan sebagai yang dilakukan oleh Djaksa termaksud tidak termasuk penuntutan (vervolging) tetapi hanya suatu pengusutan (opsporing). Pendapat ini a.l. dikemukakan oleh Noyon - Langemeyer dalam buku *het Wetboek van Strafrecht*, dl. I, th. 1954, hlm. 444 dan oleh Noyon dalam buku *Het Wetboek van Strafvordering*, th. 1926, hlm. 3, dimana ditegaskan sebagai berikut : „dat de strafvervolging eerst aanvangt wanneer eene vordering bij den rechter wordt gedaan of eenige andere wijze de zaak aan diens kennisneming wordt onderwerpen”. Djuga dalam jurisprudentie pendapat ini diikut, a.l. oleh Pengadilan Negeri di Jogjakarta, dalam keputusannya tg. 22 Oktober 1936 (T. dl. 146, hlm. 396), dimana dikatakan, bahwa selama berkas perkara (proces-stukken) masih belum diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka belumlah dapat dikatakan telah ada seorang terdakwa, melainkan seseorang yang mungkin didakwa. Begitu pula pendapat Raad van Justitie dahulu di Medan dalam keputusannya, tg. 17 Djuni 1932, T. dl. 136 hlm. 185, dan Hoog Gerechtshof dahulu dalam arrest tg. 17 Agustus 1937, T. dl. 146 hlm. 378 dan arrest tg. 31 Mei 1938, T. 148 - 117.

Sekiranjia tindakan Djaksa, yang mengirimkan berkas perkara terdakwa pada Ketua Pengadilan Negeri pada tg. 14 Agustus 1954 dianggap sebagai suatu tindakan penuntut, toh tindakan ini tidak sekali2 mempunyai kekuatan untuk menggagalkan (stuiten) djalannya djangka waktu kasip (verjaring), karena tidak ternyata, bahwa tindakan itu diketahui oleh atau diberitahukan pada terdakwa.

Dari hal tersebut tadi djelaslah, bahwa djangka waktu kasip (verjaringstermijn) berdjalan mulai dari tanggal 14 September 1953 dengan tiada mengalami suatu kegagalan sampai tanggal 14 September 1954, pada saat mana djangka termaksud berakhir.

Dalam pada itu Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta dengan surat tuduhan No. 3990/1954, tanggal 15 September 1954 menetapkan, supaya terdakwa diadjudkan di sidang Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 23 September 1954 dan memberi perintah kepada Djaksa Pengadilan Negeri untuk memanggil supaya terdakwa menghadap pada sidang Pengadilan pada tanggal tersebut tadi dan djuga supaya memberitahukan kepada terdakwa bunjinja surat tuduhan tersebut.

Sudah teranglah, bahwa surat tuduhan tadi setjara hukum tidak mempunyai kekuatan, karena telah kasip, jalah djangka waktu untuk hak penuntutan telah berakhir pada tanggal 14 September 1954.

Terlepas dari soal apakah surat tuduhan tersebut tadi diadakan dalam „djangka waktu kasip” (verjaringstermijn), surat tuduhan itu bagaimanapun djuga tidak mempunyai kekuatan untuk menggagalkan „verjaring”, karena tidak ternyata, bahwa diadakannya surat tuduhan itu diketahui atau diberitahukan pada terdakwa.

Menurut ps. 390 HIR pemberitahuan pada terdakwa tentang tuduhan itu harus disampaikan pada yang bersangkutan sendiri ditempat kediamannya atau tinggalnja, dan djika tidak dijumpai disitu, kepada Lunah kampungnja yang diwajibkan dengan segera memberitahukan itu pada yang bersangkutan sendiri. Aturan ini tidak dipenuhi oleh Djaksa sebab pemberitahuan atau panggilan pada

terdakwa yang dilakukan pada tg. 21 September 1954 tidaklah disampaikan pada terdakwa sendiri, karena pada ketika itu memang terdakwa tidak ada dirumah, melainkan sedang bepergian, tetapi setelah ternjata, yang terdakwa tak dapat didjumpai, pun tidak terdjadi pemberitahuan disampaikan pada Lurah, yang kemudian menjampaikan hal itu pada terdakwa.

Selain tidak dipenuhinja sjarat² menurut hukum mengenai pemberitahuan tadi perlu diperhatikan djuga seandainja djangka waktu kasip (verjaringstermijn) dianggap berlaku mulai tg. 29 September 1953, jaitu hari yang paling akhir pada waktu mana diadakan pemeriksaan oleh Djaksa, toh penuntutan ini telah kasip pula, karena setelah dilakukannya pemberitahuan lagi pada tg. 1 Oktober 1954, djadi setelah „verjaringstermijn” berakhir pada tanggal 29-9-1954, pada waktu pemberitahuan mana terdakwa tidak didjumpai lagi, tetapi oleh Djaksa tidak dijalankan sesuatu menurut ps. 390 HIR.

Berdasarkan hal² tersebut diatas kami mohon sudi apalah kiranya Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan menjatakan, bahwa hak untuk mengadakan penuntutan telah musnah (vernietigen), seandainya menetapkan, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan lebih lanjut terhadap terdakwa.

Tangkisan kedua

Menurut tuduhan primair dan subsidiair terdakwa dituduh melanggar ps. 134 dan ps. 207 KUHP.

Berdasarkan ps. 142 Undang² Dasar Sementara jo ps. 192 Konstitusi RIS yang berlaku di daerah Djakarta Raja adalah „Het Wetboek van Strafrecht voor Indonesië”, tanpa perubahan menurut Undang² tahun 1946 No. 1 dari Republik Indonesia yang beribu kota Jogjakarta. Djakarta Raja sebelumnya penjerahan kedaulatan oleh Belanda tidak termasuk daerah-hukum Undang² tahun 1946/No. 1, sehingga di daerah Djakarta-Raja berlaku KUHP, yang masih belum dirubah menurut Undang² RI (Jogjakarta) tersebut tadi (lihatlah : Engelbrecht, kitab Undang², hlm. 1104).

Pasal² 134 dan 207 KUHP menurut bunjinja sekarang ini masih tetap melindungi kehormatan Radja, Ratu dan kekuasaan Negara Asing, yang dahulu mendjadjah bangsa kita. Karena sedjak Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah bebas dari pendjadjahan, dan membentuk Negara yang merdeka dan berdaulat, dan mempunyai Undang² Dasar, maka pasal² tersebut tadi adalah bertentangan dengan azas kemerdekaan dan Undang² Dasar kita.

Adalah sangat gandjil sekali, djika terdakwa sebagai salah seorang putera Indonesia yang turut serta mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan, sekarang dituduh melanggar pasal² hukum pidana, yang memperlindungi kolonialisme.

Berdasarkan hal² tersebut tadi kami mohon sudi apalah kiranya Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan menjatakan, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan lebih lanjut.

TUNTUTAN DJAKSA INCONSTITUTIONEEL

(Pembelaan diutjapkan dimuka Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 24 Februari 1955)

Sebagai pembela dalam perkara ini kami ingin terlebih dulu meng-utjapkan penghargaan yang se-besar2nja atas kebidjaksanaan Sdr. Ketua dalam melakukan pemeriksaan perkara terdakwa, sehingga sidang pengadilan dapat berdjalan dengan lantjar. Dari sebab itulah kamipun ingin membantu setjepatnja penjelesaian perkara ini.

I. Bukankah waktu penuntutan telah kasip ?

1. Sebagaimana Sdr. telah maklum, kami telah mengajukan tangkisan terhadap tuduhan pada terdakwa, jalah bahwa penuntutan telah kasip waktunja, kedaluwarsa (verjaard). Sekalipun tangkisan itu oleh Pengadilan Negeri telah ditolak, namun penolakan ini tidak menjebabkan kami menjerah belaka, tetapi kami tetap mempertahankan dalil kami itu dengan sekuat tenaga. Dalam hubungan ini kami hendak menambahkan beberapa alasan pada tangkisan kami yang tempo hari telah kami adjukan, semoga dapatlah Sdr. Ketua merobah penetapan Sdr. yang semula.

2. Dalam berkas perkara dapat sdr. membuat sebuah keterangan dari Sdr. Djaksa yang termaktub dalam suratnja tanggal 23 September 1954, yang dalam pokoknja menjatakan, bahwa terdakwa *belum* dapat dipanggil untuk menghadap dipersidangan. Surat itu berbunyi antara lain sebagai berikut :

„Berhubung dengan panggilan terdakwa D.N. Aidit yang perkara-nja akan diadili pada hari Kamis tanggal 23 September 1954 ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Djakarta, maka dengan hormat kami kabarkan bahwa terdakwa tersebut belum dapat dipanggil, untuk menghadap sebab tidak terdapat pada alamatnja dst.”

Berhubung dengan kenyataan ini timbulah pertanyaan apakah sidang pada tanggal 23 September 1954 itu menurut hukum sah dilaksanakan ?

3. Untuk menjawab pertanyaan ini kiranya perlu terlebih dahulu kita meninjau ps. 250 ayat (1) H.I.R. yang mengatakan, bahwa djika telah dilakukan panggilan terhadap terdakwa menurut aturan² yang ditentukan, maka tentang hal itu dikirimkan bukti tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri oleh Djaksa.

Djustru surat dari Sdr. Djaksa tanggal 23 September 1954 itu menegaskan, bahwa belum dilakukan panggilan terhadap terdakwa menurut aturan² yang ditentukan. Bukankah Sdr. Djaksa menerangkan sendiri, bahwa terdakwa belum dapat dipanggil, sebab tidak terdapat pada alamatnja ? Padahal menurut aturan dalam ps. 250 ayat (8) H.I.R. panggilan harus dilakukan dengan perantaraan Wedana.

4. Karena terdakwa *belum atau tidak* dipanggil atau diberitahukan menurut peraturan yang ditentukan, maka adalah keliru sekali, djika pada tanggal 23 September 1954 diadakan sidang oleh Pengadilan Negeri guna pemeriksaan perkara terdakwa. Bukankah ps. 250 ayat (10) H.I.R. menentukan, bahwa dalam menentukan hari persidangan Ketua harus memperhatikan :

- a. lamanya waktu yang perlu bagi terdakwa untuk menghadap persidangan.
- b. waktu yang harus lalu antara saat pemberitahuan isi surat keputusan Hakim (surat tuduhan) dan hari persidangan.

Dengan diadakannya sidang pada tanggal 23 September 1954 dengan pengetahuan, bahwa terdakwa benar atau tidak diberitahukan isi surat ketetapan, maka sudah teranglah, bahwa peraturan2 atjara pidana tidak ditepati. Maka dari itu sidang pengadilan negeri pada tanggal 23 September 1954 tidak sah diadakan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menggagalkan (stuiten) djalamnya djangka waktu kasip (verjaring), jalah sebagai pemberitahuan penuntutan pada terdakwa.

5. Dengan tambahan keterangan ini pada tangkisan kami, maka kami berkesimpulan tetap pada pendirian kami semula, jalah perkara ini telah kasip penuntutanja (verjaard).

II. Pasal2 yang dituduhkan pada terdakwa berlawanan dengan Undang2 Dasar (Inconstitutioneel)

6. Menurut surat tuduhan yang telah dirobah, terdakwa dituduh: *primair* melanggar ps. 134 dan *suosidiar* melanggar ps. 207 K.U.H.P. Apakah benar ps. 134 dan 207 K.U.H.P. dapat dilakukan dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus bertamja pada Konstitusi R.I.S. dan Undang2 Dasar Sementara, undang2 pidana yang mana yang berlaku di Djakarta ini.

7. Menurut ps. 192 ayat (1) Konstitusi R.I.S. di Djakarta pada saat Konstitusi itu mulai berlaku, tetap berlakulah undang2 pidana yang masih belum diubah oleh undang2 tahun 1946 No. 1 dari R.I. (Jogjakarta), karena undang2 pidana tanpa perubahan itulah yang sudah ada dan berlaku di Djakarta dibawah kekuasaan Belanda dan pada saat perpindahan kekuasaan Belanda pada Indonesia. Tetapi ps. 192 ayat 2 Konstitusi menentukan, bahwa kelandjutan peraturan2 undang2 yang sudah ada hanya sekedar peraturan2 dari undang2 tadi tidak bertentangan dengan ketentuan pemulih kedaulatan dan ketentuan2 dari Konstitusi R.I.S. Maka dari itu tidaklah seluruhnya peraturan2 dari undang2 pidana (Wetboek van Strafrecht) termaksud tetap berlaku. Peraturan2 yang bersifat kolonial adalah tidak sesuai lagi dengan negara-hukum yang merdeka-berdaulat. Peraturan2 yang kolonial adalah berlawanan dengan ketentuan dari Konstitusi yang tidak memerlukan peraturan undang2 atau tindakan2 pelaksanaan, seperti halnya ps. 1 Konstitusi. Dari sebab itu berdasar ps. 192 ayat (2) Konstitusi peraturan2 kolonial yang terdapat dalam undang2 pidana (Wetboek van Strafrecht) tidaklah berlaku.

8. Pasal 134 termasuk peraturan2 yang berlawanan dengan Konstitusi, karena pasal tadi diadakan untuk memperindungi kedaulatan kedudukan radja. Negara kita adalah negara-hukum yang berdaulat dan berbentuk republik djadi tak mungkin kita mengakui kedaulatan kedudukan radja. Begitu pula ps. 207 adalah bertentangan dengan kedaulatan negara kita, karena ps. 207 memperindungi kekuasaan di Negeri Belanda disamping kekuasaan yang ada di Indonesia, bahkan dapat dikatakan memperindungi terlebih dahulu kekuasaan di Negeri Belanda daripada kekuasaan di Indonesia. Karena itu sedjak mulai berlakunya Konstitusi R.I.S. ps. 134 dan 207 K.U.H.P. tidak berlaku.

9. Setelah R.I.S. mendjelma mendjadi negara Kesatuan R.I., maka ps. 134 dan 207 yang telah tidak berlaku itu djuga tetap tidak berlaku, karena Undang2 Dasar Sementara djuga mempunyai peraturan2 peralihan yang maksudnja sama dengan ps. 192 Konstitusi R.I.S. Pasal 142 dan 141 ayat 3 Undang2 Dasar Sementara inti-sarinja bersamaan dengan ps. 192 ayat (1) dan (2) dari Konstitusi R.I.S. Berdasarkan ps. 142 U.U.D.S., yang berlaku di Djakarta djuga masih undang2 pidana yang masih tanpa perubahan dari undang2 No. 1/th. 1946 R.I., karena yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 dan masih berlaku di Djakarta djuga masih undang2 pidana tanpa perubahan itu. Sedjak tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang masih belum ada perubahan suatu apapun atau pernyataan berlakunya U.U. No. 1/th. 1946 untuk seluruh wilayah R.I.

Dalam pada itu apa yang telah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan kedaulatan dan ketentuan dalam Konstitusi djuga tetap tidak berlaku, karena ps. 141 ayat 3 U.U.D.S. djuga tidak memperkenankan melandjutkan berlakunya peraturan2 yang berlawanan dengan ketentuan2 dalam U.U.D.S., yang tidak memerlukan peraturan2 undang2 atau tindakan2 pengaksanaan yang lebih lanjut, seperti halnya dengan ketentuan dalam ps. 1 U.U.D.S. itu.

10. Berhubung dengan kemungkinan adanya anggapan bahwa ps. 134 dan ps. 207 dengan sendirinja telah diubah dengan undang2 No. 1 tahun 1946, disini hendak kami jelaskan, bahwa pendapat demikian adalah keliru, se-tidak2nja tidak sesuai dengan pendapat dari pembentuk undang2 (wetgever). Sebagai bukti dalam hubungan ini dapat kami kemukakan pernyataan berlakunya undang2 kerdja R.I. tahun 1948 untuk seluruh Indonesia dengan pengeluaran undang2 No. 1 tahun 1951. Djika undang2 kerdja R.I. tahun 1948 itu dengan sendirinja boleh dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, maka tidak perlu diadakannya pernyataan berlakunya lagi dengan undang2 No. 1 tahun 1951.

Bahwa menurut pendapat pembentuk undang2 daerah Djakarta tidak termasuk daerah-hukum per-undang2an R.I. dahulu lebih tegas dinjatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 dalam bab III dan IV. Disini diadakan perbedaan mengenai daerah dalam melakukan aturan2 undang2 kerdja tahun 1948 itu, jalah dalam daerah Djakarta, daerah bekas negara-bagian Indonesia Timur, Sumatra Timur dan Kalimantan Barat saat berlakunya aturan2 dari undang2 kerdja adalah berlainan daripada daerah yang telah dianggap termasuk daerah R.I. atau daerah berlakunya undang2 kerdja tahun 1948. Dari kenyataan ini telah djelaslah kiranya, bahwa pembentuk undang2 (wetgever) tidak berpendapat, bahwa per-undang2an R.I., diantaranya undang2 no. 1 tahun 1946, dengan sendirinja berlaku djuga dalam daerah Djakarta.

11. Djika ada pendapat, bahwa orang boleh menafsirkan begitu rupa, sehingga kata Koning dapat diartikan sebagai Presiden dan Koningin sebagai Wakil Presiden dalam ps. 134 dan perkataan Nederland dalam ps. 207 dianggap sebagai tidak ada sama sekali, maka tafsiran sematjam itu tidak lain hanya menundjukkan keinginan untuk memberi hukuman sadja dan tidak mengindahkan dasar pokok dari hukum pidana sebagai tertjantum

dalam ps. K.U.H.P. Pasal ini adalah pendjelmaan dari keme-nangan perjuangn demokrasi melawan penindasan se-wenang². Aturan dalam ps. 1, dalam ilmu hukum terkenal dengan formulasi dalam bahasa Latin sebagai „nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali“, adalah salah satu daripada hak² kemanusiaan yang telah diproklamirkan dalam tahun 1789 oleh ummat ma-nusia yang mentjintai keadilan (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Hak kemanusiaan itu tidak boleh diganggu-gugat. Dengan „nullum delictum“ tadi ditegaskan, bahwa hanya undang² sadjalah yang dapat menjatakan suatu perbuatan dapat dihukum dan bilamana undang² tidak mengatur suatu hal, maka tidak diperbolehkan Hakim dengan tjara tafsiran menjatakan hal itu dapat dikenakan hukuman. (lih. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht, th. 1953, hlm. 276 dst.). Pelanggaran atas „nullum delictum“ tadi berarti malapetaka bagi negara kita, karena pelanggaran tadi mengakibatkan tindakan yang se-wenang², tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Keadilan adalah dasar daripada negara yang demokratis, karena untuk memindjam perkataan dari Aristoteles keadilanlah yang dapat memberikan bahagia pada Rakjat banjak dalam Negara. (Lihatlah : Von Schmid, grote denkers over staat en recht, hlm. 25).

III. Tuduhan Primair

12. Terlepas dari soal berlaku atau tidaknya ps. 134 K.U.H.P., di-sini kami hendak meninjau unsur daripada pasal 134. Pasal 134 mempunyai unsur² :

- a. penghinaan.
- b. perbuatan yang sengadja.

13. Terlebih dahulu kami hendak membitjarakan unsur penghinaan. Penghinaan dari ps. 134 harus dijdelaskan dengan tafsiran yang terdapat dari titel XVI. Dalam titel XVI kita dapat mengenal ber-bagai² matjam penghinaan, ialah : smaad, smaadschrift, laster, een-voudige belediging dan lasterlijke aanklacht. Dalam pasal 134 ber-bagai matjam bentuk penghinaan tadi semuanya dikenakan satu hu-kuman dan semuanya diberi kualifikasi yang sama, yaitu penghinaan. Tetapi ini tidak berarti, bahwa tidak diperbolehkamlah kita meng-gunakan aturan² mengenai „smaad“ atau smaadschrift dari titel XVI, djika penghinaan menurut ps. 134 itu sebenarnya memang bersifat „smaad“. Dari sebab itu, djika seperti dalam perkara ini, terdakwa dituduh melakukan penghinaan, yang sifatnya sebagai „smaadschrift“, yang dimaksudkan dalam ps. 310 ayat (2), maka terdakwa berhak un-tuk mempergunakan ps. 310 ayat (3), agar supaya tidak dapat di-kenakan hukuman, karena ia melakukan perbuatan tadi guna kepen-tingan umum dan untuk pembelaan yang perlu dilakukan. Noyon dalam komentarnya pada ps. 111 K.U.H.P.-Belanda mengatakan, bah-wa djuga terhadap radjapun dapat dilakukan hak untuk berbuat guna kepentingan umum atau pembelaan yang perlu (Lih. Noyon, het Wetboek van Strafrecht, I, tahun 1954, hlm. 567).

14. Adalah sangat penting penjangkalan terdakwa terhadap tu-duhan padanya dengan mengemukakan, bahwa ia membuat statement sengketa itu untuk kepentingan umum dan pembelaan yang perlu di-lakukannya. Dengan diadjukannya hal tadi, maka seandainya ada penghinaan, dalam hal ini lebih tepat „smaadschrift“, toh penghinaan

itu tak dapat dikenakan hukuman (uitgesloten van strafbaaheid).

15. Sebagaimana telah dijdatakan oleh terdakwa dihadapan sidang pengadilan dan tidak disangkal oleh Sdr. Djaksa dan Hakim, terdakwa sebagai sekretaris-djendral Partai Komunis Indonesia terpaksa me-ngeluarkan statement termaksud, karena PKI pada waktu itu di-serang o eh lawan² politiknya. Dalam harian „Abadi“ tanggal 4 Sep-tember 1953 dimuat suatu resolusi dari Persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia (P.B. P.I.I.) Jogjakarta yang mengatakan, bahwa:

- a. PKI telah mengadakan pemberontakan di Madiun dan mempro-klamirkan sebuah negara Komunis yang dipimpin oleh Musso-Amir, sesuai dengan instruksi imperialis Rusia.
- b. Pemberontakan itu merupakan pengkhianatan dan kedjahatan besar terhadap negara dan Rakjat Indonesia.
- c. supaya Pemerintah R.I. menetapkan hari pemberontakan kaum Komunis PKI cs di Madiun tanggal 18 September mendjadi hari berkabung nasional.
- d. supaya pada tanggal 18 September 1953 diadakan pawai yang di-namakan „Pawai Duka“, yang dilakukan dengan penuh chidmad dan disertai pukulan genderang tanda berkabung dan bersedih. Dalam harian „Pedoman“ tanggal 7 September 1953 dimuat peng-umuman BKOI Djakarta Raja, yang mengatakan a.l. sebagai berikut:
 - a. Beratus djuta rupiah kekayaan negara telah dirampok, sesudah kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Madiun, mereka mendirikan pemerintahan Sovjet disana, dan melakukan pember-sihan.
 - b. Waktu itu berlakulah kekedjaman yang tidak ada taranja. Ula-ma² Islam yang tidak terhitung banjaknya, pegawai² negeri, anggota² tentara dan ummat Islam dibunuh dengan tjara diuar-peri-kemanusiaan.

BKOI djuga menuntut supaya tanggal 18 September ditetapkan oleh Pemerintah mendjadi hari berkabung.

16. Serangan² yang dilontarkan oleh lawan politik PKI itu dirasakan oleh pihak PKI sebagai fitnahan dan hasutan supaya Rakjat mem-bentji PKI, se-tidak²nya supaya ummat Islam terbakar hatinja dan meluap sentimennja. Dalam hubungan ini kami ingatkan pada tu-duhan pembunuhan ulama² Islam yang tidak terhitung banjaknya dan ummat Islam dengan tjara di'uar-peri-kemanusiaan oleh kaum Komunis katanja.

17. Karena serangan² ini, maka adalah sewadjarnya, bahwa terdakwa dalam fungsinya sebagai sekretaris-djendral CC PKI untuk mengada-kan pembelaan. Kami katakan, bahwa pembelaan itu dilakukan dalam fungsinya untuk menunjukkan, bahwa terdakwa perlu mengadakan pembelaan, karena kedudukannya itu mewajibkan padanya untuk melawan serangan² terhadap Partainya. Karena itu sifat pembelaan-nya adalah sangat perlu (noodzakelijk).

18. Mengingat pada pasal dari Undang² yang menjebutkan „ter nood-zakelijke verdediging“, maka dasar penidaan hukuman (straf-uitsluitingsgrond) dari ps. 310 ayat 3, tidak hanya berlaku dalam hal terdakwa membela dirinya sendiri, tetapi djuga bilamana ia meng-adakan pembelaan guna orang lain, djadi djuga dalam pembelaan

untuk Partainja, yang memberi kepertjajaan padanja sebagai pimpinan yang terkemuka dan dalam pembelaan untuk kawan2 seperjuangannya yang telah wafat yang ditjintainja. (Bandingkan keputusan Hof 's Hertogenbosch, tanggal 1 Oktober 1953, N. J. 1954, hlm. 1065).

19. Karena serangan2 yang dilantjarkan oleh pihak lawan politik PKI memberikan gambaran yang keliru dari peristiwa Madiun, mengingat dipergunakan perkataan yang sangat di-lebih2kan, seperti membunuh dengan tjara diluar-peri-kemanusiaan, pemberontakan, kekedjamaan yang tak ada taranja terhadap ulama2 Islam, pegawai2 negeri, angga2 tentara dan ummat Islam, maka menurut pendapat terdakwa serangan2 itu tidak boleh dibiarkan sadja, karena merugikan nama baik PKI dan orang Komunis umumnya. Dengan mengeluarkan statement sengketa terdakwa berusaha mendjelaskan apa yang sebenarnya telah terdjadi menurut pengalamannya dan laporan2 saksi2 yang bilamana perlu sanggup memberikan keterangan dibawah sumpah.

20. Djika dalam statementnja terdakwa mempergunakan perkataan provokasi yang kedjam, maka hal ini bukanlah berke-lebih2an, tetapi hanya pemberian nama pada rangkaian kedjadian2 yang mendahului peristiwa Madiun, sebagai pembunuhan kolonel Sutarto, pentjulikan pemimpin2 FDR, penganiayaan pegawai kotapradja Madiun dsb. Djika dipergunakan perkataan membunuh dan tangan yang berlumuran darah, maka hal itu ada hubungannya dengan kenyataan, yang Mr. Amir Sjarifuddin dkk yang ada dalam tahanan Pemerintah, dikatakan setjara resmi, bahwa mereka itu telah mendjalani hukuman-militer, sedangkan tak ada pemeriksaan perkaranya dan keputusan yang mendjatuhkan hukuman itu. Djika dibandingkan dengan perkataan2 yang telah dipergunakan oleh lawan PKI, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perkataan2 itu tidaklah setadjam perkataan yang dipergunakan oleh lawan PKI dalam surat2 kabar „Abadi“ dan „Pedoman“ tersebut.

Dalam tulisan pihak lawan PKI dipergunakan perkataan pengchianatan dan kedjahatan besar terhadap Negara dan Rakjat Indonesia, sebaliknya dalam statement PKI oleh terdakwa hanya dipergunakan „berdjasa“ menimbulkan perang saudara dan „kepahlawanan“ membasmi kaum Komunis dan kaum patriot. Pihak lawan PKI menuliskan membunuh dengan tjara diluar-peri-kemanusiaan, sebaliknya terdakwa mempergunakan perkataan provokasi, dan tangan berlumuran darah. Pihak lawan politik PKI menuduh kaum Komunis membunuh ulama2 Islam, ummat2 Islam, pegawai2 Negeri dan angga2 tentara, hal mana adalah terang berke-lebih2an, sebaliknya terdakwa hanya menuduh lawannya telah membunuh patriot2 sadja. Tidak dihitung perkataan2 lain yang menghina seperti merampok, pemberontakan, menurut instruksi imperialis Rusia dsb. yang dipergunakan oleh lawan politik PKI dalam serangannya.

21. Adalah sangat penting bagi umum untuk diberikan pendjelaskan tentang duduk-letaknya dan asal-mulanya peristiwa Madiun yang sebenarnya. Adalah sangat penting untuk umum untuk mendjaga djangan sampai chalajak ramai diberi penerangan yang keliru oleh lawan2 PKI, disesatkan (misleid), dihasut, dibakar hatinja dan dipantjing

untuk melakukan perbuatan2 yang melawan hukum terdorong oleh kebentjiaan yang ditimbulkan oleh lawan PKI.

22. Maka dari itu dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa tepat sekali terdakwa mengelakkan diri dari hukuman dengan alasan yang telah diadjudkan pada sidang berdasarkan ps. 310 ayat (3), ialah ia melakukan perbuatan yang diperkarakan itu demi kepentingan umum dan untuk pembelaan yang perlu mengingat pada kedudukannya sebagai Sekretaris-Djendral PKI yang berkewadajiban membela PKI.

23. Kembali pada soal penghinaan, yang mendjadi salah satu unsur dari ps. 134, disini kami hendak mengemukakan apakah sifat penghinaan itu. Penghinaan hanya ada, bila rasa kehormatan seseorang dilukai. Penetapan adanya penghinaan adalah sulit sekali, karena arti kehormatan, yang mendjadi objek dari penghinaan, adalah sangat relatif. Aristoteles mengatakan, bahwa kehormatan lebih banyak terdapat dalam orang yang menghormati daripada dalam orang yang dimuljakan. Dalam hubungan ini dapat dibandingkan pemudjaan Drs. Mohammad Hatta oleh Sdr. Dali Mutiara. Bahwa kehormatan hanya ada hubungannya dengan nilai kesusilaan (zedelijke waarde) manusia, tidak ada perbedaan faham baik dalam ilmu maupun jurisprudentie. (Lih. Simons - Pompe, dl. II, th. 1941, hlm. 55 dst. dan Noyon dl. III, 3e dr. aant. 3 op titel XVI). Berhubung dengan itu kritik terhadap ketjaksanaan, kebidjaksanaan seseorang tidak mungkin menimbulkan penghinaan, karena kritik demikian itu tidak mengenai nilai kesusilaan (zedelijke waarde). Dalam hubungan ini patut diperhatikan keputusan Hoge Raad, yang menjatakan, bahwa seorang Mahaguru tidak mungkin terhina dirinja berhubung dipergukannya oleh seorang perkataan2 yang menghina mengenai soal dari pelajaran yang diberikannya, sekalipun hal itu dilakukan berhubung dengan djabatannya (H.R. tg. 24 Februari 1902, W. 7730).

24. Apa yang termuat dalam statement PKI yang disangkut-pautkan dengan tuduhan menurut ps. 134, tidak lain hanyalah suatu kritik terhadap kebidjaksanaan atau tindakan kabinet Hatta dahulu di Jogjakarta. Kritik itu, walaupun dilakukan dengan perkataan2 yang mungkin menghina, tidak dapat dikatakan mengenai nilai kesusilaan dari pribadi Sdr. Hatta, karena kritik itu mengenai kebidjaksanaan Pemerintah dahulu di Jogjakarta. Djika nama Sdr. Hatta disebut, hal itu tidak lain hanya untuk menundjukkan kabinet yang mana, yang bersangkutan dengan peristiwa Madiun, karena R.I. dari mulai berdirinja sampai sekarang ini telah mengalami ber-kali2 pergantian kabinet atau pemerintah.

25. Ada'ah tidak masuk akal, djika kritik terhadap kebidjaksanaan pemerintahan itu dapat menjinggung kehormatan Wakil Presiden, karena toh kedudukan Wakil Presiden menurut hukum tata-negara yang berlaku sekarang dalam negara kita tidak membawa pertanggungjawab pemerintahan. Djadi tidak mungkin Wakil Presiden yang tidak mem'unyai tanggungjawab pemerintahan dapat bertindak atau melakukan kebidjaksanaan yang salah, yang dapat dikritik. (Bandingkanlah Noyon, het Wetboek v. Strafrecht, dl. I th. 1954, ps. 111, aant. 3).

26. Mengenai unsur sengadja harus diperhatikan, bahwa hal ini ketjuali pada penghinaan djuga harus ditudjukan pada Wakil Presiden

(djika koningin dapat ditafsirkan mendjadi Wakil Presiden). Menurut pendapat kami unsur sengadja dalam hal ini tidak terbukti. Pada waktu membuat statement itu terdakwa tidak mengetahui akan sifat penghinaan tulisannya itu, karena bukanlah maksudnya untuk menghina siapapun, tetapi yang dimaksudkan adalah mengadakan pembelaan berhubung adanya serangan2 dari pihak lawan PKI.

27. Djuga tidak ada fikiran sama sekali untuk menghina Wakil Presiden. Dalam statement itu tidak disebut sama sekali Wakil Presiden, melainkan pemerintah Hatta-Sukiman-Natsir, yang berarti Kabinet dari RI dahulu, yang dipimpin oleh Drs. Mohamad Hatta sebagai PM, dalam kabinet mana turut serta duduk sebagai Menteri2 Dr. Sukiman dan Sdr. Mohamad Natsir.

28. Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai tuduhan primair dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- I. Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena belum/tidak adanya lagi peraturan yang mengantjam hukuman atau tidak ada penghinaan yang telah dilakukan.
- II. Kesalahan terdakwa tidak terbukti.
Oleh karena itu kami mohon supaya terdakwa dibebaskan, sehingga tidak2nya dinjatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

IV. Tuduhan Subsidiar

29. Unsur2 dalam pasal 207 dalam hakekatnya sama dengan unsur2 dalam pasal 134; bedanya hanyalah penghinaan menurut ps. 134 ditujukan pada „Koning” atau „Koningin”, sedangkan menurut ps. 207 ditujukan pada „gestelde macht” atau „openbaar lichaam”.

30. Mengenai penghinaan tidak perlu kiranya kami mengulangi keterangan kami yang telah diutarakan berhubung dengan tuduhan primair, tetapi cukuplah kami menundjuk pada alinea 13. Djuga berhubung dengan tuduhan subsidiar ini berlaku mutatis mutandis apa yang telah diuraikan dalam alinea 13, begitu pula terdakwa dalam tuduhan subsidiar ini menjatakan haknya untuk menghindari hukuman berdasar pada ketentuan dalam ps. 310 ayat 3. Selanjutnya keterangan2 yang telah kami adjukan dalam alinea 14 s/d 22 kami mohon supaya dianggap djuga diadjukan berhubung dengan tuduhan subsidiar dan karena itu tidak perlu lagi kami ulangi.

31. Lebih lanjut mengenai penghinaan, apa yang telah kami terangkan dalam alinea 23 s/d 25 mutatis mutandis berlaku pula berhubung tuduhan subsidiar.

32. Djuga mengenai soal sengadja (opzet) dalam hal ini kami menundjuk pada uraian kami dalam alinea 26 dan 27.

33. Hanya tentang soal perbedaan antara ps. 134 dan 207 kami hendak mengadakan uraian lebih djauh. Keistimewaan dari ps. 207 adalah: penghinaan pada lain dari perseorangan (individu). Untuk dapat mengerti hal ini adalah penting sekali untuk mengetahui bagaimana dalam tahun 1887 Komisi yang merentjanakan hukum pidana untuk bangsa Eropa di Indonesia mengatur soal kedjahatan penghinaan. Komisi tadi dalam KUHP Belanda hanya menjumpai aturan sebagai tertantum dalam titel XVI. Panitia hanya menjumpai smaad,

smaadschrift dan eenvoudige belediging, djuga yang dilakukan terhadap pegawai negeri, tetapi tidak ada aturan tentang penghinaan badan2 hukum dan collectiviteiten. Aturan2 dari KUHP Belanda itu dikutip setjara letterlijk oleh Panitia tsb. Dalam pada itu Panitia berpendapat, bahwa di Indonesia dengan menjimpang dari hukum yang berlaku di Nederland perlu sekali diadakan aturan2 untuk memberantas penghinaan kekuasaan dan badan pemerintahan, bila-mana mereka bukan merupakan seorang atau beberapa orang pendjabat setjara perseorangan (individu) dhina. Untuk itu direntjanakanlah ps. 207 KUHP. Djadi karena itu djelaslah, bahwa ps. 207 hanya dipergunakan, djika penghinaan dilakukan terhadap pada kekuasaan yang bukan perseorangan. Hal ini dalam pendjelasan pada pasal tadi diterangkan sebagai berikut: „Mist de belediging geheel dat individueel karakter, treft zij uitsluitend de organen van het openbaar gezag als zodanig, dan is de aangewezen plaats voor strafbaarstelling deze titel en niet T. XVI”, (lih. van Hatum I.T. dl. 149, hlm. 71 dst. dan Lemaire het Wetb. van Strafr., hlm. 95 dst.).

34. Adalah mengherankan sekali, bahwa dalam tuduhan subsidiar yang didasarkan pada ps. 207 ditjantumkan: „menghina dengan tulisan terhadap *Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijabat oleh Drs. Moh. Hatta*”. Sudah teranglah berhubung dengan uraian dalam alinea 33 tadi, bahwa tuduhan ini tidak tepat, karena djustru dengan demikian ditundjukkan, bahwa penghinaan itu bersifat individueel, djadi tidak pada tempatnya, bila dipergunakan ps. 207. Selain dari itu djuga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jalah statement PKI tidak se-kali2 menyebut Wakil Presiden.

35. Djika dalam statement tadi disebutkan pemerintah Hatta, apakah berhubung dengan ini dipergunakan ps. 207? Menurut pendapat kami djuga tidak, karena djika maksud ps. 207 itu memberantas penghinaan kekuasaan yang diadakan, tentu yang dimaksudkan adalah kekuasaan yang masih tegak, bukanlah kekuasaan yang telah tidak ada. Pemerintah Hatta, jalah kabinet yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai PM yang bersangkutan dengan peristiwa Madiun telah lama tidak ada.

36. Oleh karena hal2 tadi mengenai tuduhan subsidiar kami berkesimpulan sebagai berikut:

- I. Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena belum/tidak adanya lagi peraturan yang mengantjam hukuman atau memang tidak ada penghinaan yang dilakukan.
- II. Kesalahan terdakwa tidak terbukti.
Berdasarkan hal2 tadi kami mohon supaya terdakwa dibebaskan, sehingga tidak2nya dinjatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

2 „Liga Pembela Demokrasi” — Suatu badan yang terdiri dari bekas pedjuang Islam, didirikan pada bulan September 1953 dan dipimpin oleh orang2 Masjumi seperti Sjarif Usman (sekarang pengikut PRRI) dan Isa Anshary. Aktivitennya ialah melawan kabinet Ali yang mendapat dukungan Rakjat dan mengeluarkan siaran2 yang memfitnah PKI, terutama dalam hubungan dengan Provokasi Madiun. Organisasi ini djuga tersangkut dalam demonstrasi maut BKOI bulan

Februari 1954 jang melakukan pembunuhan terhadap major Supar-tawidjaja.

3. *Buku Putih tentang Peristiwa Madiun* — buku jang memuat kenja-taan2 setjara dokumenter tentang Peristiwa Madiun dari permulaan sampai akhir. Dengan diterbitkanja Buku Putih ini oleh Dep. Agit/Prop CC PKI pada bulan September 1953, hasutan, pemutarbalikan dan segala pemalsuan kaum reaksi terhadap kaum Komunis menda-pat djawaban jang meyakinkan.

LAHIRNJA PKI DAN PERKEMBANGANNJA

1. *Sarekat Rakjat, „onderbouw” PKI* — suatu organisasi massa di-bawah pimpinan orang2 Komunis jang mengambil bagian penting didalam pemberontakan Rakjat tahun 1926. Sampai Kongres Na-sional ke-IV PKI di Solo tahun 1947 „Sarekat Rakjat” (SR) masih mendjadi anggota istimewa PKI. Malahan organisasi Rakjat lain-nja jang pimpinannja dipegang oleh orang2 Komunis dijadikan SR, seperti Gerakan Republik Indonesia (GRI) — Surakarta — dan Pakempalan Kawulo Surokarto (PKS) — Surakarta.

Tahun 1950 oleh Pimpinan Sentral Partai SR dibubarkan. Anggo-ta2nja kemudian memasuki organisasi massa menurut lapangan pe-perdjaannja masing2.

2. *Partai Bangsa Indonesia (PBI)* — Partai Bangsa Indonesia didiri-kan tanggal 16 Oktober 1930 sesudah Indonesische Studieclub (Su-rabaja) direorganisasi atas andjuran Dr. Sutomo. Kemudian PBI berfusi dengan Budi Utomo pada bulan Desember 1935 dengan nama Parindra (Partai Indonesia Raja).

UNTUK KEMENANGAN FRONT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM

1. *Djatuhnja Kabinet Ali-Arifin tanggal 24 Djuli 1955* — karena kaum reaksi tidak dapat menjatuhkan pemerintah Ali-Arifin dari dalam DPR, mereka berusaha dengan djalan diluar Parlemen untuk me-rebut kekuasaan. Dipelopori oleh Zu'kifli Lubis, waktu itu wakil KSAD dengan pangkat kolonel, sekarang memimpin pemberontak PRRI, kaum kontrarevolusioner didalam dan diluar AP memboikot pengangkatan djendral major Bambang Utojo sebagai KSAD. Di-bawah tekanan dari go'ongan tsb. jang sedjalan dengan intrik dan intimidasi Amerika pemerintah Ali menjerahkan mandatnja kepada Wakil Presiden Hatta. Hatta tanpa menunggu Presiden Sukarno jang sedang berada diluar kota dengan setjara ter-buru2 mem-bentuk suatu kabinet jang sangat reaksioner dengan Burhanuddin Harahap (Masjumi) sebagai perdana menteri. Sekarang Burhanud-din Harahap mendjadi „menteri” PRRI.

SELAMATKAN DAN KONSOLIDASI KEMENANGAN FRONT PERSATUAN

1. *Fraksi Demokrat* — fraksi didalam DPR Sementara jang anggota2-nja terdiri dari orang2 federal angkatan Van Mook. Dalam pemilihan umum tahun 1955 mereka tidak mendapat suara.

DAFTAR PENGGOLONGAN ARTIKEL

Soal2 Pokok Revolusi

<i>Menempuh Djalan Rakjat</i>	41
<i>Front Persatuan Nasional Dan Sedjarahnja</i>	65
<i>Belum Pernah Keadaan Dalamnegeri Sesudah KMB Begitu Baik Seperti Sekarang</i>	76
<i>Kebanggaan Dan Kesedaran Nasional</i>	83
<i>Menudju Indonesia Baru</i>	91
<i>Kaum Buruh Indonesia Berdjuaug Untuk Hak-haknja</i>	125
<i>PKI Menghendaki Pemerintah Front Persatuan Nasional</i>	139
<i>Sudah Sewadjarnja Para Formator Mengembalikan Man-datnja</i>	143
<i>Histeria Dikalangan Reaksi</i>	147
<i>Satu2nja Djalan Keluar; Kabinet Persatuan Nasional</i>	150
<i>Keadaan Sudah Lebih Matang Untuk Pemerintah Persatuan Nasional</i>	152
<i>Kemenangan Gemilang Demokrasi Atas Fasisme</i>	155
<i>Haridepan Gerakan Tani Indonesia</i>	157
<i>Persatuan Nasional Dan Kewaspadaan Nasional</i>	169
<i>Perkuat Kedudukan Republik!</i>	182
<i>Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia</i>	206
<i>Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia</i>	278
<i>Hidup Revolusi Agustus!</i>	299
<i>Rakjat Indonesia Bersatu Untuk Membubarkan Uni Indo-nesia-Belanda Dan Untuk Memasukkan Irian Barat Kedalam Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia</i>	312
<i>Delegasi Sunario Berhasil Menggerowoti Sebagian Persetu-djuan KMB</i>	321
<i>Penolakan Resolusi Tentang Irian Barat Oleh PBB Menelan-djangi PBB Sendiri Dan Menelandjangi Negeri2 Barat</i>	351
<i>Menggugat Peristiwa Madiun</i>	367
<i>Lahirnja PKI Dan Perkembangannja</i>	403
<i>Untuk Kemenangan Front Nasional Dalam Pemilihan Umum</i>	440

<i>Selamatkan Dan Konsolidasi Kemenangan Front Persatuan</i>	461
<i>Pertahankan Republik Proklamasi 1945 !</i>	471

Pembangunan Partai

<i>Mengatasi Kelemahan Kita</i>	5
<i>Menempuh Jalan Rakjat</i>	41
<i>Menudju Indonesia Baru</i>	91
<i>Madju Terus Untuk Sukses² Jang Lebih Besar !</i>	198
<i>Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia</i>	206
<i>Tentang Tan Ling Djie-isme</i>	258
<i>Kembangkan Periode 1951 !</i>	273
<i>Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia</i>	278
<i>Perkuat Persatuan Nasional Dan Perkuat Partai !</i>	293
<i>Untuk Persatuan Jang Lebih Luas Dari Semua Kekuatan Nasional Di Indonesia</i>	323
<i>Introduksi „Kehidupan Partai“</i>	355
<i>Mengaktifkan Grup Partai</i>	360
<i>Lahirnja PKI Dan Perkembangannja</i>	403
<i>Pertahankan Republik Proklamasi 1945 !</i>	471

Front Persatuan Nasional

<i>Menempuh Jalan Rakjat</i>	41
<i>Front Persatuan Nasional Dan Sedjarahnja</i>	65
<i>Kebanggaan Dan Kesedaran Nasional</i>	83
<i>Menudju Indonesia Baru</i>	91
<i>Kaum Buruh Indonesia Berjuang Untuk Hak-haknja</i>	125
<i>PKI Menghendaki Pemerintah Front Persatuan</i>	139
<i>Sudah Sewadarnja Para Formator Mengembalikan Mandatnja</i>	143
<i>Histeria Dikalangan Reaksi</i>	147
<i>Satu²nja Jalan Keluar: Kabinet Persatuan Nasional</i>	150
<i>Kadaan Sudah Lebih Matang Untuk Pemerintah Persatuan Nasional</i>	152
<i>Kemenangan Gemilang Demokrasi Atas Fasisme</i>	155
<i>Haridepan Gerakan Tani Indonesia</i>	157

<i>Persatuan Nasional Dan Kewaspadaan Nasional</i>	169
<i>Perkuat Kedudukan Republik !</i>	176
<i>PKI Tidak Henti²nja Menjebarkan Tjita² Persatuan Nasional</i>	182
<i>Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia</i>	206
<i>Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia</i>	273
<i>Perkuat Persatuan Nasional Dan Perkuat Partai !</i>	293
<i>Untuk Persatuan Jang Lebih Luas Dari Semua Kekuatan Di Indonesia</i>	323
<i>Di Bandung Negeri² Asia-Afrika Mulai Membikin Sedjarahnja Sendiri Setjara Kolektif</i>	400
<i>Untuk Kemenangan Front Nasional Dalam Pemilihan Umum</i>	440
<i>Selamatkan Dan Konsolidasi Kemenangan Front Persatuan</i>	461
<i>Pertahankan Republik Proklamasi 1945 !</i>	471

I S I

Katapengantar	1
Mengatasi Kelemahan Kita	5
Menempuh Djalan Rakjat	41
Front Persatuan Nasional Dan Sedjarahnja	65
Belum Pernah Keadaan Dalamnegeri Sesudah KMB Begitu Baik Seperti Sekarang	76
Kebanggaan Dan Kesedaran Nasional	83
Menudju Indonesia Baru	91
Kaum Buruh Indonesia Berjuang Untuk Hak-haknja	125
PKI Menghendaki Pemerintah Front Persatuan	139
Sudah Sewadarnja Para Formator Mengembalikan Mandatnja	144
Histeria Dikalangan Reaksi	147
Satu ² nja Djalan Keluar: Kabinet Persatuan Nasional	150
Keadaan Sudah Lebih Matang Untuk Pemerintah Persatuan Nasional	152
Kemenangan Gemilang Demokrasi Atas Fasisme	155
Haridepan Gerakan Tani Indonesia	157
Persatuan Nasional Dan Kewaspadaan Nasional	169
Perkuat Kedudukan Republik !	176
PKI Tidak Akan Henti ² nja Menjebarkan Tjita ² Persatuan Nasional	182
Madju Terus Untuk Sukses ² Jang Lebih Besar !	198
Djalan Ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia	206
Tentang Tan Ling Djie-isme	258
Kembangkan Periode 1951 !	273
Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia	278
Perkuat Persatuan Nasional Dan Perkuat Partai !	293
Hidup Revolusi Agustus !	299

Rakjat Indonesia Bersatu Untuk Membubarkan Uni Indonesia-Belanda Dan Untuk Memasukkan Irian Barat Kedalam Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia	312
Delegasi Sunario Berhasil Menggerowoti Sebagian Persetujuan KMB	321
Untuk Persatuan Jang Lebih Luas Dari Semua Kekuatan Nasional Di Indonesia	323
Penolakan Resolusi Tentang Irian Barat Oleh PBB Menelanjangi PBB Sendiri Dan Menelanjangi Negeri ² Barat	351
Introduksi „Kehidupan Partai”	355
Mengaktifkan Grup Partai	360
Menggugat Peristiwa Madiun	367
Di Bandung Negeri ² Asia-Afrika Mulai Membikin Sedjarahnja Sendiri Setjara Kolektif	400
Lahirnja PKI Dan Perkembangannja	403
Untuk Kemenangan Front Nasional Dalam Pemilihan Umum	440
Selamatkan Dan Konsolidasi Kemenangan Front Persatuan	461
Pertahankan Republik Proklamasi 1945 !	471
Keterangan-keterangan	500
Daftar penggolongan artikel	533